**PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE**
**NOMOR : 22 TAHUN 2023**

**TENTANG**

# RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
**KOTA LHOKSEUMAWE**
**TAHUN 2023**

BUKU
I

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

# RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023

WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

b. bahwa untuk pelaksanaan pembangunan di daerah harus memiliki dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023, yang merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2023;

c. bahwa untuk mewujudkan perencanaan partisipatif maka perlu melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);



Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;



Dipindai dengan CamScanner

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
16. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68)
19. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bagu Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Otonomi Khusus;
21. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2014 Nomor 4);
22. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
23. Pereturan Walikota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lhokseumawe.



Dipindai dengan CamScanner

2. Pemerintahan Kota adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang terdiri atas Walikota Lhokseumawe dan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lhokseumawe.
5. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Lhokseumawe.
6. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota Lhokseumawe dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanagan Kota Lhokseumawe yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas, Badan dan Sekretariat Lembaga Keistimewaan.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Lembaga yang mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Kota Lhokseumawe yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe melalui Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe.
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe.
11. Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah dokumen pembangunan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Qanun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



Dipindai dengan CamScanner

14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan DPRK.
16. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, Musyawarah Rencana Pembangunan, Anggaran Pendapatan Belanja Kota.

## BAB II
## RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA

### Pasal 2

(1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan kota untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yaitu Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

(2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:
   a. Bab I Pendahuluan
   b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Kota
   c. Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Kota
   d. Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota
   e. Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Kota



Dipindai dengan CamScanner

f. Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota
g. Bab VII Penutup

(3) Uraian secara rinci RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini yang terdiri atas:
a. Buku I memuat tentang narasi bab per bab
b. Buku II memuat tentang rencana kerja dan pendanaan daerah
c. Buku III memuat tentang usulan pokok-pokok pikiran DPRK.

Pasal 3

(1) RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan RKPK penjabaran tahun ke-1 (satu) dari RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026, yang disusun berdasarkan hasil musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat melalui hasil reses DPRK, arah kebijakan dan strategi pembangunan, serta prioritas pembangunan kota.

(2) RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kota.

(3) RKPD Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan:
a. pedoman penyempurnaan rancangan Renja perangkat daerah Tahun 2024;
b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024; dan
c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBK Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBK Tahun Anggaran 2024:
a. Pemerintah Kota Lhokseumawe menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRK.
b. Perangkat Daerah menggunakan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan DPRK.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN RKPK

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPK adalah sebagai berikut:
a. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD sesuai tugas dan kewenangannya;



Dipindai dengan CamScanner

b. Kepala Perangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah bila belum sesuai dengan RKPK;
c. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRK berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRK maka RKPK Tahun 2024 dapat dilakukan penyesuaian;
d. kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPK merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRK;
e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPK dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRK;
f. penyesuaian RKPK Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf e,ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Walikota;
g. RKPK Tahun 2024 sebagai pedoman penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2023 serta bahan arahan penyusunan RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

## BAB IV
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 6

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB V
## PERUBAHAN RKPK DAN EVALUASI

### Pasal 7

(1) Penambahan program baru dalam RKPK dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan dan/atau penambahan program dalam RPK.

(2) Dalam hal penambahan program baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah dan/ atau perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja, tidak perlu mengubah RPK.

(3) Penambahan Program/Kegiatan baru dalam RKPK ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah



Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan RKA-Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan yang berkenaan berakhir.

(3) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah yang diperlukan kepada Walikota.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan sebagai bahan/pertimbangan dalam penyusunan RKPK periode tahun berikutnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lhokseumawe.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 14 juli 2023 M
25 Dzulhijjah 1444 H
Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE,

IMRAN

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal _____ 2023 M
1444 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE,

T. ADNAN

BERITA KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023 NOMOR....



Dipindai dengan CamScanner

# DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... **i**
**DAFTAR TABEL** ..... **v**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xv**

**BAB I PENDAHULUAN** ..... **I-1**
1.1. Latar Belakang ..... I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan ..... I-8
1.3. Hubungan Antar Dokumen ..... I-11
1.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ..... I-12
1.3.2. Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun Tahun 2023-2026 ..... I-13
1.3.3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 ..... I-14
1.3.4. Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ..... I-14
1.3.5. Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 ..... I-15
1.3.6. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... 1-15
1.4. Sistematika Penulisan ..... I-16
1.5. Maksud dan Tujuan ..... I-17

**BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE** **II-1**
2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe ..... II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi ..... II-1
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .... II-1
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi ..... II-1
2.1.1.1.2. Kondisi Topografi ..... II-2
2.1.1.1.3. Kondisi Geologi ..... II-3
2.1.1.1.4. Kondisi Hidrologi ..... II-4
2.1.1.1.5. Kondisi Klimatologi ..... II-5
2.1.1.1.6. Penggunaan Lahan ..... II-7
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah ..... II-8
2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana ..... II-8
2.1.1.4. Demografi ..... II-9
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat .... II-11
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi ..... II-11
2.1.2.1.1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ..... II-11
2.1.2.1.2. Distribusi PDRB ..... II-14
2.1.2.1.3. Laju Inflasi ..... II-16
2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita ..... II-17

2.1.2.1.5. Indeks Rasio Gini ..... II-19
2.1.2.1.6. Tingkat Kemiskinan ..... II-19
2.1.2.1.7. Pengangguran ..... II-20
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial ..... II-21
2.1.2.2.1. Angka Melek Huruf ..... II-21
2.1.2.2.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah ..... II-22
2.1.2.2.3. Angka Harapan Lama Sekolah ..... II-23
2.1.2.2.4. Angka Usia Harapan Hidup ..... II-24
2.1.2.2.5. Angka Kematian Ibu (AKI) ..... II-25
2.1.2.2.6. Indeks Pembangunan Manusia ..... II-26
2.1.2.2.7. Persentase Balita Gizi Buruk ..... II-27
2.1.2.2.8. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) ..... II-28
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya ..... II-29
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum ..... II-32
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh dan Kekhususan ..... II-32
2.1.3.1.1. Penyelenggaraan Kehidupan Beragama ..... II-32
2.1.3.1.2. Majelis Ulama ..... II-36
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib ..... II-38
2.1.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar ..... II-38
2.1.3.2.1.1. Pendidikan ..... II-38
2.1.3.2.1.2. Kesehatan ..... II-44
2.1.3.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang..... II-81
2.1.3.2.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman ..... II-89
2.1.3.2.1.5. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ..... II-96
2.1.3.2.1.6. Sosial ..... II-107
2.1.3.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar ..... II-115
2.1.3.2.2.1. Ketenagakerjaan ..... II-115
2.1.3.2.2.2. Pangan ..... II-119
2.1.3.2.2.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ..... II-120
2.1.3.2.2.4. Pertanahan ..... II-127
2.1.3.2.2.5. Lingkungan Hidup ..... II-130
2.1.3.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil ..... II-136
2.1.3.2.2.7. Komunikasi dan Informatika ..... II-140
2.1.3.2.2.8. Penanaman Modal ..... II-144
2.1.3.2.2.9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa II-145
2.1.3.2.2.10. Perhubungan ..... II-160
2.1.3.2.2.11. Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah..... II-168
2.1.3.2.2.12. Penanaman Modal ..... II-168
2.1.3.2.2.13. Kepemudaan dan Olahraga ..... II-170
2.1.3.3. Urusan Pemerintahan Pilihan ..... II-172

| | | |
|---|---|---|
| 2.1.3.3.1. | Pariwisata ..... | II-172 |
| 2.1.3.3.2. | Statistik ..... | II-173 |
| 2.1.3.3.3. | Perpustakaan ..... | II-174 |
| 2.1.3.3.4. | Kearsipan ..... | II-175 |
| 2.1.3.3.5. | Pertanian ..... | II-176 |
| 2.1.3.3.6. | Perdagangan ..... | II-177 |
| 2.1.3.3.7. | Perindustrian ..... | II-178 |
| 2.1.3.3.8. | Kelautan dan Perikanan ..... | II-179 |
| 2.1.3.4. | Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan ..... | II-179 |
| 2.1.3.4.1. | Perencanaan ..... | II-179 |
| 2.1.3.4.2. | Keuangan ..... | II-182 |
| 2.1.3.4.3. | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan ..... | II-183 |
| 2.1.3.4.4. | Pengawasan ..... | II-184 |
| 2.1.3.4.5. | Sekretariat DPRK ..... | II-186 |
| 2.1.3.4.6. | Sekretariat Daerah ..... | II-187 |
| 2.1.3.5. | Fokus Urusan Penunjang Urusan Kewilayahan ..... | II-193 |
| 2.1.3.5.1. | Kecamatan ..... | II-193 |
| 2.1.4. | Aspek Daya Saing Daerah ..... | II-197 |
| 2.1.4.1. | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | II-197 |
| 2.1.4.2. | Fokus Fasilitasi Wilayah/ Infrastruktur..... | II-199 |
| 2.1.4.3. | Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 ..... | II-203 |
| 2.1.4.4. | Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... | II-204 |
| 2.2. | Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2022 dan Realisasi RPJMK sampai dengan Tahun 2022 ..... | II-207 |
| 2.2.1. | Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2022 ..... | II-207 |
| 2.2.2. | Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan ..... | II-210 |
| 2.2.2.1. | Realisasi Pendanaan ..... | II-210 |
| 2.2.2.2. | Realisasi Pendapatan ..... | II-210 |
| 2.2.2.3. | Realisasi Belanja ..... | II-212 |
| 2.2.2.4. | Realisasi Pembiayaan..... | II-214 |
| 2.2.3. | Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi RPJMK | II-215 |
| 2.2.3.1. | Metode Evaluasi..... | II-215 |
| 2.2.3.2. | Hasil Evaluasi..... | II-217 |
| 2.2.3.3. | Capaian Indikator Kinerja Utama .... | II-227 |
| 2.2.3.4. | Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) ..... | II-237 |
| 2.2.4. | Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe ..... | II-266 |
| 2.2.5. | Isu Strategis Kota Lhokseumawe ..... | II-272 |

**BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA** ..... **III-1**

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi..... III-2

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Aceh .. III-5

3.1.2. Kondisi Perekonomian Kota Lhokseumawe . III-8

3.1.3. Perkiraan Perekonomian Tahun 2023 ..... III-18

3.1.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2024 ..... III-19

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota..... III-23

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe ..... III-23

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe ..... III-30

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe ..... III-35

**BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA** .... **IV-1**

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan ..... IV-1

4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe ..... IV-9

4.3. Tema Pembangunan..... IV-9

4.4. Prioritas dan sasaran Pembangunan ..... IV-10

4.5. Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... IV-16

4.6. Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe ..... IV-17

4.7. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) ..... IV-29

4.8. Pokok-Pokok Pikiran DPRK Lhokseumawe..... IV-33

4.8.1 Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRK..... IV-33

4.8.2 Rekomendasi DPRK Lhokseumawe untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2024 .... IV-34

4.9. Inovasi Pembangunan Tahun 2023 ..... IV-35

**BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA** ..... **V-1**

**BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA** **VI-1**

**BAB VII PENUTUP** ..... **VII-1**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL


| | | | |
|---|---|---|---|
| Tabel | 2.1 | Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... | II-6 |
| Tabel | 2.2 | Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... | II-6 |
| Tabel | 2.3 | Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... | II-6 |
| Tabel | 2.4 | Arah Angin, Kecepatan Rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2022 | II-7 |
| Tabel | 2.5 | Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... | II-10 |
| Tabel | 2.6 | Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-12 |
| Tabel | 2.7 | Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-14 |
| Tabel | 2.8 | Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2018-2022 ..... | II-19 |
| Tabel | 2.9 | Tingkat Kemiskinan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-20 |
| Tabel | 2.10 | Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-26 |
| Tabel | 2.11 | Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... | II-30 |
| Tabel | 2.12 | Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe ..... | II-31 |
| Tabel | 2.13 | Tipe Dayah, Kepemilikan dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022..... | II-32 |
| Tabel | 2.14 | Jumlah Hafiz Hafizah yang Dibina Tahun 2018-2022 ..... | II-33 |
| Tabel | 2.15 | Rasio ZIS yang Disalurkan dan ZIS yang Terkumpul Tahun 2018-2022..... | II-34 |
| Tabel | 2.16 | Jumlah Mesjid yang Melaksanakan Sholat 5 Waktu dan Jumlah Mesjid yang ada Imam Hafiz Tahun 2018-2022 ..... | II-35 |
| Tabel | 2.17 | Data Mesjid Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... | II-35 |
| Tabel | 2.18 | Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-36 |
| Tabel | 2.19 | Kegiatan Musyawarah Ulama Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-37 |
| Tabel | 2.20 | Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-38 |
| Tabel | 2.21 | Angka Pertisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-39 |

Tabel 2.22 Angka Kelulusan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-41
Tabel 2.23 Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-43
Tabel 2.24 Angka Kematian Bayi (AKB) (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-45
Tabel 2.25 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-46
Tabel 2.26 Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-47
Tabel 2.27 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-48
Tabel 2.28 Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022..... II-49
Tabel 2.29 Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.. II-50
Tabel 2.30 Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-51
Tabel 2.31 Rasio Dokter Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-53
Tabel 2.32 Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-54
Tabel 2.33 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-55
Tabel 2.34 Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-56
Tabel 2.35 Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-57
Tabel 2.36 Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-58
Tabel 2.37 Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-59
Tabel 2.38 Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-60
Tabel 2.39 Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-60
Tabel 2.40 Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-61

Tabel 2.41 Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 . II-62
Tabel 2.42 Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-62
Tabel 2.43 Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-63
Tabel 2.44 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-64
Tabel 2.45 Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-65
Tabel 2.46 Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-66
Tabel 2.47 Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-67
Tabel 2.48 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-67
Tabel 2.49 Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-68
Tabel 2.50 Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-69
Tabel 2.51 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4 Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-70
Tabel 2.52 Cakupan Pelayanan Nifas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-72
Tabel 2.53 Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 .. II-73
Tabel 2.54 Cakupan Pelayanan Anak Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-74
Tabel 2.55 Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 .. II-76
Tabel 2.56 Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-77
Tabel 2.57 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-78
Tabel 2.58 Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiolgi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-80

Tabel 2.59 Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 (Km) ..... II-83
Tabel 2.60 Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-85
Tabel 2.61 Rasio Panjang Jalan Dengan Per Satuan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 . II-86
Tabel 2.62 Persentase Panjang Jalan Dilalui Roda 4 Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-87
Tabel 2.63 Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-87
Tabel 2.64 Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-88
Tabel 2.65 Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota LhokseumaweTahun 2022 ..... II-90
Tabel 2.66 Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-91
Tabel 2.67 Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe 2018-2022 ..... II-92
Tabel 2.68 Rasio PSU dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-94
Tabel 2.69 Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-94
Tabel 2.70 Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 .... II-95
Tabel 2.71 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-97
Tabel 2.72 Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-98
Tabel 2.73 Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-99
Tabel 2.74 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 II-100
Tabel 2.75 Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-102
Tabel 2.76 Persentase Pembinaan Ormas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-103
Tabel 2.77 Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-104

Tabel 2.78 Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-105
Tabel 2.79 Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-107
Tabel 2.80 Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-108
Tabel 2.81 Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-109
Tabel 2.82 Persentase Penanganan Anak Terlantar Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-110
Tabel 2.83 Persentase Penanganan Fakir Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-111
Tabel 2.84 Rekapitulasi P3KE Kota Lhokseumawe 2022 ..... II-112
Tabel 2.85 Persentase Korban Bencana yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel 2.86 Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-114
Tabel 2.87 Persentase Pencari Kerja Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-115
Tabel 2.88 Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-116
Tabel 2.89 Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 .. II-117
Tabel 2.90 Ketersediaan Pangan Utama Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-119
Tabel 2.91 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 II-122
Tabel 2.92 Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-124
Tabel 2.93 Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-124
Tabel 2.94 Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-126
Tabel 2.95 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2018-2022 ..... II-127
Tabel 2.96 Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun

2018-2022 ..... II-128
Tabel 2.97 Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-128
Tabel 2.98 Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-129
Tabel 2.99 Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-130
Tabel 2.100 Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-135
Tabel 2.101 Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-136
Tabel 2.102 Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-137
Tabel 2.103 Rasio Bayi ber Akta Kelahiran Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-138
Tabel 2.104 Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-139
Tabel 2.105 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 II-141
Tabel 2.106 Persentase Penyebarluasan Informasi Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-142
Tabel 2.107 Persentase Pelayanan Publik yang Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-143
Tabel 2.108 Persentase PD yang Melakukan Pengamanan Data dan Informasi Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-143
Tabel 2.109 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-144
Tabel 2.110 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-145
Tabel 2.111 Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-146
Tabel 2.112 Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-148
Tabel 2.113 Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2018-2022 ..... II-150
Tabel 2.114 Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-150

Tabel 2.115 Data Penyaluran Dana Ke Gampong Tahun 2018-2022 ..... II-151
Tabel 2.116 Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 .. II-153
Tabel 2.117 Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-153
Tabel 2.118 Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-154
Tabel 2.119 Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-155
Tabel 2.120 Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-156
Tabel 2.121 Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-157
Tabel 2.122 Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-158
Tabel 2.123 Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-158
Tabel 2.124 Cakupan Pembinaan Kerjasama Antar Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-159
Tabel 2.125 Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-160
Tabel 2.126 Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawem Tahun 2018-2022 ..... II-161
Tabel 2.127 Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-162
Tabel 2.128 Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-163
Tabel 2.129 Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-163
Tabel 2.130 Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-164
Tabel 2.131 Pemasangan Rambu-Rambu Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-165
Tabel 2.132 Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kenderaan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-165
Tabel 2.133 Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2018-2022 ..... II-166
Tabel 2.134 Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/ Terminal per Tahun Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-166

Tabel 2.135 Fasilitas Keselamatan Jalan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-167
Tabel 2.136 Persentase Koperasi Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-168
Tabel 2.137 Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-169
Tabel 2.138 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-170
Tabel 2.139 Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-170
Tabel 2.140 Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-171
Tabel 2.141 Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-171
Tabel 2.142 Objek Wisata Kota Lhokseumawe ..... II-172
Tabel 2.143 Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-174
Tabel 2.144 Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-175
Tabel 2.145 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHK) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-176
Tabel 2.146 Produktivitas Komoditas Pangan (Kg) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-177
Tabel 2.147 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-178
Tabel 2.148 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-178
Tabel 2.149 Produksi Perikanan Budidaya Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-179
Tabel 2.150 Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.. II-183
Tabel 2.151 Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-184
Tabel 2.152 Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-185
Tabel 2.153 Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-186
Tabel 2.154 Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-187
Tabel 2.155 Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 II-190

Tabel 2.156 Nilai Hasil Evaluasi LPPD Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-192
Tabel 2.157 Persentase Binaan PKK Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-193
Tabel 2.158 Persentase Penertiban dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-194
Tabel 2.159 Persentase Penanganan di Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-195
Tabel 2.160 Persentase Pengawasan Dokumen Gampong Tahun 2018-2022 ..... II-196
Tabel 2.161 Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2018-2022 . II-199
Tabel 2.162 Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-200
Tabel 2.163 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-201
Tabel 2.164 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-202
Tabel 2.165 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-203
Tabel 2.166 Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-204
Tabel 2.167 Realisasi Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-205
Tabel 2.168 Perkembangan Capaian Indikator Makro Tahun 2018-2022 ..... II-209
Tabel 2.169 Realisasi Pendanaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-210
Tabel 2.170 Realisasi Pendapatan RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-211
Tabel 2.171 Realisasi Belanja RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-213
Tabel 2.172 Realisasi Pembiayaan RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-215
Tabel 2.173 Tingkat Capaian Realisasi RPJMK Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... II-218
Tabel 2.174 Tingkat Capaian Realisasi RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-219
Tabel 2.175 Konsistensi Dokumen Perencanaan ..... II-224
Tabel 2.176 Penetapan Target Indikator Kinerja Utama dan Capaian Tahun 2022 ..... II-228
Tabel 2.177 Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah dan Capaian Tahun 2022 ..... II-238

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tabel | 3.1 | Target Makro Ekonomi Tahun 2024 ..... | III-4 |
| Tabel | 3.2 | Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 ..... | III-25 |
| Tabel | 3.3 | Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 ..... | III-33 |
| Tabel | 3.4 | Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025 ..... | III-36 |
| Tabel | 4.1 | Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan ..... | IV-3 |
| Tabel | 4.2 | Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional Aceh dan Kota Lhokseumawe ..... | IV-9 |
| Tabel | 4.3 | Penyandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Kota Lhokseumawe ..... | IV-15 |
| Tabel | 4.4 | Target Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | IV-16 |
| Tabel | 4.5 | Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | IV-18 |
| Tabel | 4.6 | Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | IV-30 |
| Tabel | 4.7 | Hasil Rakortekrenbang Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2023 ..... | IV-32 |
| Tabel | 4.8 | Data Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023 ..... | IV-36 |
| Tabel | 5.1 | Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe TA 2024 .... | V-2 |
| Tabel | 5.2 | Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-4 |
| Tabel | 5.3 | Rekapitulasi Pagu Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Pendukung Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe ..... | V-11 |
| Tabel | 5.4 | Program Prioritas Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-12 |
| Tabel | 5.5 | Program Prioritas Pendidikan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-16 |
| Tabel | 5.6 | Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-16 |
| Tabel | 5.7 | Program Prioritas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-18 |
| Tabel | 5.8 | Program Prioritas Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-19 |
| Tabel | 5.9 | Program Prioritas Infrastruktur Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Tabel | 5.10 | Program Prioritas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2024 ..... | V-20 |
| Tabel | 5.11 | Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024 ..... | V-22 |
| Tabel | 6.1 | Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024 ..... | VI-2 |
| Tabel | 6.2 | Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | VI-3 |

## DAFTAR GAMBAR


| | | | |
|---|---|---|---|
| Gambar | 1.1 | Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPK ..... | I-4 |
| Gambar | 1.2 | Hubungan Antara RPJPD, RPJMK/RPK dan RKPK Lhokseumawe..... | I-12 |
| Gambar | 2.1 | Peta Wilayah Kota Lhokseumawe ..... | II-2 |
| Gambar | 2.2 | Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe ..... | II-3 |
| Gambar | 2.3 | Peta Geologi Kota Lhokseumawe ..... | II-4 |
| Gambar | 2.4 | Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe ..... | II-5 |
| Gambar | 2.5 | Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha) ..... | II-7 |
| Gambar | 2.6 | Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe ..... | II-9 |
| Gambar | 2.7 | Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kota Lhokseumawe 2018-2022 ..... | II-10 |
| Gambar | 2.8 | Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe 2022 ..... | II-11 |
| Gambar | 2.9 | Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2022 (%) ... | II-12 |
| Gambar | 2.10 | Inflasi Kota Lhokseumawe 2018-2022 (%) ..... | II-17 |
| Gambar | 2.11 | PDRB Per Kapita ADHB Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah) ..... | II-18 |
| Gambar | 2.12 | PDRB Per Kapita ADHK Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah) ..... | II-18 |
| Gambar | 2.13 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022..... | II-21 |
| Gambar | 2.14 | Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-22 |
| Gambar | 2.15 | Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-23 |
| Gambar | 2.16 | Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-24 |
| Gambar | 2.17 | Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-25 |
| Gambar | 2.18 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-27 |
| Gambar | 2.19 | Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-28 |
| Gambar | 2.20 | Angka Partisipasi Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-41 |
| Gambar | 2.21 | Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan Tahun 2018-2022 ..... | II-43 |
| Gambar | 2.22 | Nilai Kelulusan dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-44 |
| Gambar | 2.23 | Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-80 |
| Gambar | 2.24 | Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-120 |
| Gambar | 2.25 | Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 ..... | II-121 |

Gambar 2.26 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA,IKU,IKL,IKLH) Tahun 2020-2022 ..... II-131
Gambar 2.27 Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 II-147
Gambar 2.28 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 Kota Lhokseumawe ..... II-198
Gambar 2.29 Realisasi Pendapatan RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-212
Gambar 2.30 Realisasi Belanja APBK Lhokseumawe Tahun 2022 ..... II-214
Gambar 3.1 PDRB ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 (triliun rupiah) ..... III-9
Gambar 3.2 PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 (triliun rupiah) ..... III-10
Gambar 3.3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2022 (persen) ..... III-11
Gambar 3.4 Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2022 (persen) ..... III-12
Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Tahun 2018-2022 (persen) ..... III-13
Gambar 3.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (persen) ... III-13
Gambar 3.7 Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, Banda Aceh Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2022 (persen) .. III-15
Gambar 4.1 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe ..... IV-14

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. RKPK selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBK), juga sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta menjadi pedoman dalam melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBK).

RKPK Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Lhokseumawe tahun ke-dua pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026, yang disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026.

Dalam dokumen RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagaimana telah dilegalisasikan melalui Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022, fokus/prioritas pembangunan Tahun 2024 adalah:

1. Reformasi Birokrasi;
2. Pendidikan;
3. Pertumbuhan Ekonomi;
4. Kesehatan;
5. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya;
6. Infrastruktur; dan
7. Lingkungan Hidup.

dengan tema ***"Peningkatan Kualitas SDM dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak serta Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi"***.

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi capaian indikator makro pembangunan Kota Lhokseumawe menunjukkan pertumbuhan Kota Lhokseumawe dengan migas, pada Tahun 2018 sebesar 3,78%, pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi 3,98% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan drastis di angka -1,80%, Hal ini sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid 19. Pada Tahun 2021, kembali terjadi pertumbuhan positif yaitu sebesar 3,84% dan Tahun 2022 mengalami kenaikan kembali berada pada angka 4,01% Namun, secara umum pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe masih berada dibawah nasional dan Aceh.

Berbeda halnya dengan pertumbuhan ekonomi, Angka Kemiskinan Kota Lhokseumawe mengalami tren menurun di Tahun 2018 -2020 adalah 11,81% , 11,18% dan 10,80%, sedangkan pada Tahun 2021 angka kemiskinan Kota Lhokseumawe naik menjadi 11,16% serta tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 10.84% , hal ini menempatkan Kota Lhokseumawe berada pada peringkat ketiga terbaik se-Aceh, namun demikian masih lebih tinggi dari angka target kemiskinan nasional.

Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat nasional maupun provinsi. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari 2018 hingga Tahun 2021 yaitu 12,51%, 11,01%, 11,99%, 11,16% dan Tahun 2022 angka menurun menjadi 9.15%. Sementara itu angka pengangguran nasional berada pada kisaran 5% sampai dengan 7% dan provinsi pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022 berada dikisaran 6% . Hal ini menunjukkan Kota Lhokseumawe terjadi permasalahan yang cukup serius dalam hal ketenagakerjaan, trend naik dan turunnya persentase masih berada jauh diatas capaian nasional dan provinsi, ini menunjukkan persentase angka penggangguran berpotensi terus meningkat sesuai dengan populasi penduduk.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Lhokseumawe memang masih berada di atas IPM Nasional dan Provinsi. Misalnya pada tahun 2022, IPM Kota Lhokseumawe berada di angka 78,04 sementara IPM Provinsi 72,91 dan IPM Nasional berada di angka 72,80. Namun Kota Lhokseumawe masih kalah dari Kota Banda Aceh yang memperoleh nilai IPM sebesar 86,28 pada Tahun 2022.

Secara umum, RKPK mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
2. RKPK memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Kota.
3. RKPK merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRK dalam menentukan Kebijakan Umum APBK dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBK.
4. RKPK merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

Adapun tahapan dan tata cara penyusunanan RKPK disajikan pada Gambar 1.1

**Gambar 1.1**

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD

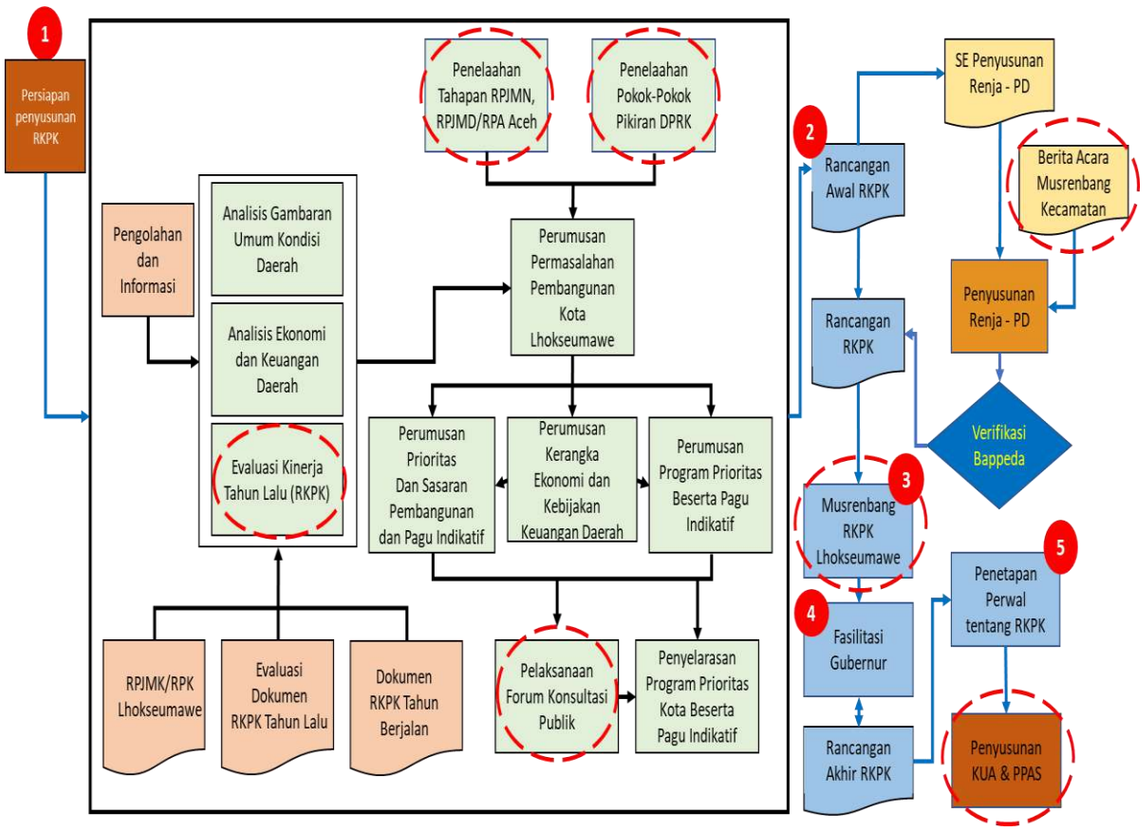


Tahapan dan tata cara penyusunan RKPK sebagaimana tergambar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan RKPK

   Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi:

   a. penyusunan rancangan keputusan Walikota tentang pembentukan tim penyusun RKPK;
   b. orientasi mengenai RKPK;
   c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPK; dan
   d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.

2. Penyusunan Rancangan Awal RKPK

   Penyusunan Rancangan awal RKPK melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu:

   a. Tahap penyusunan Rancangan RKPK, mencakup:
      1) analisis gambaran umum kondisi daerah;

2) analisis Rancangan kerangka ekonomi daerah;
3) analisis kapasitas riil keuangan daerah;
4) penelaahan Rancangan awal Renja perangkat daerah;
5) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
6) penelaahan terhadap sasaran RPK;
7) penelaahan terhadap arah kebijakan RPK;
8) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
9) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRK;
10) perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
11) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

b. Dalam penyusunan Rancangan Awal RKPK, DPRK memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRK disampaikan secara tertulis kepada kepala Bappeda berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota RPK 2023-2026.

c. Rancangan Awal RKPK dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPK dilaksanakan pada hari Senin Tanggal 13 Februari 2023, bertempat di Aula Setdako Lhokseumawe.

3. Penyusunan Rancangan RKPK

Penyusunan Rancangan RKPK adalah proses penyempurnaan Rancangan awal RKPK disempurnakan berdasarkan:

a. rancangan awal Renja seluruh perangkat daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi; dan

b. hasil penelaahan terhadap Rancangan awal RKPA Provinsi, RKP dan program strategis nasional.

4. Pelaksanaan Musrenbang RKPK

Musrenbang RKPK bertujuan untuk membahas Rancangan RKPK yang dilaksanakan dalam rangka:

a. menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
b. menyepakati prioritas pembangunan daerah;
c. menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
d. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunann provinsi; dan
e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.

Musrenbang Rancangan RKPK 2024 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023, bertempat di Aula Setdako Lhokseumawe dengan narasumber dari Bappeda Aceh dengan materi Arah Kebijakan Pembangunan Aceh Tahun 2024, Bank Indonesia dengan materi *Outlook* Ekonomi Aceh, Kepala Satgas Korsupgah Wilayah I KPK-RI dengan materi Program Pencegahan Korupsi Daerah di Area Perencanaan dan Penganggaran, Direktorat Bina Pembangunan Daerah kementerian Dalam Negeri dengan materi Tujuan Pembangunan Daerah, Direktorat Bina Keuangan Daerah kementerian Dalam Negeri dengan materi Arah Kebijakan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan materi Kebijakan Pengawasan Pemda dan Hubungan Tata Cara Kerja Pengawasan.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPK

Perumusan rancangan akhir RKPK merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPK menjadi rancangan akhir RKPK berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang

RKPK. Rancangan akhir RKPK yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Perwal RKPK.

6. Penetapan Rancangan Akhir RKPK

   Rancangan Perwal tentang Rancangan Akhir RKPK yang telah disempurnakan disampaikan Wali Kota kepada Gubernur Aceh melalui Kepala Bapeda Aceh untuk dilakukan Fasilitasi. Fasiltasi Rancangan Akhir RKPK Tahun 2024 dilakukan pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, bertempat di Oproom Bappeda Aceh.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPK dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (stakeholders). Ketiga pendekatan politis, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan. Dan keempat pendekatan bawah atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*) dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

RKPK dibahas bersama dengan kepala perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik dan musrenbang untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappeda dan Kepala perangkat daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik dan musrenbang, kemudian berdasarkan berita acara kesepakatan tersebut Bappeda menyempurnakan dokumen RKPK.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4633);
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indoneais Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
24. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2012-2032;
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Aceh Tahun 2012-2032;

26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
27. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus;
28. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;
29. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender pada Pemerintah Aceh;
30. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026;
31. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh Tahun 2024;
32. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032;
33. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025;
34. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
35. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu pada Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025; dan Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dimana RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 ini merupakan tahun

kedua periode Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Selain itu indikasi perumusan prioritas program pembangunan dalam RKPK ini juga berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 dan RKPA Tahun 2024. Untuk itu perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan pembangunan Nasional dan Aceh, dalam hal ini mengenai keterkaitan dan keselarasan tema dan prioritas pembangunan, akan dibahas lebih lanjut pada Bab IV.

**Gambar 1.2**
**Hubungan Antara RPJPD, RPJMK/RPK, dan RKPK Lhokseumawe**

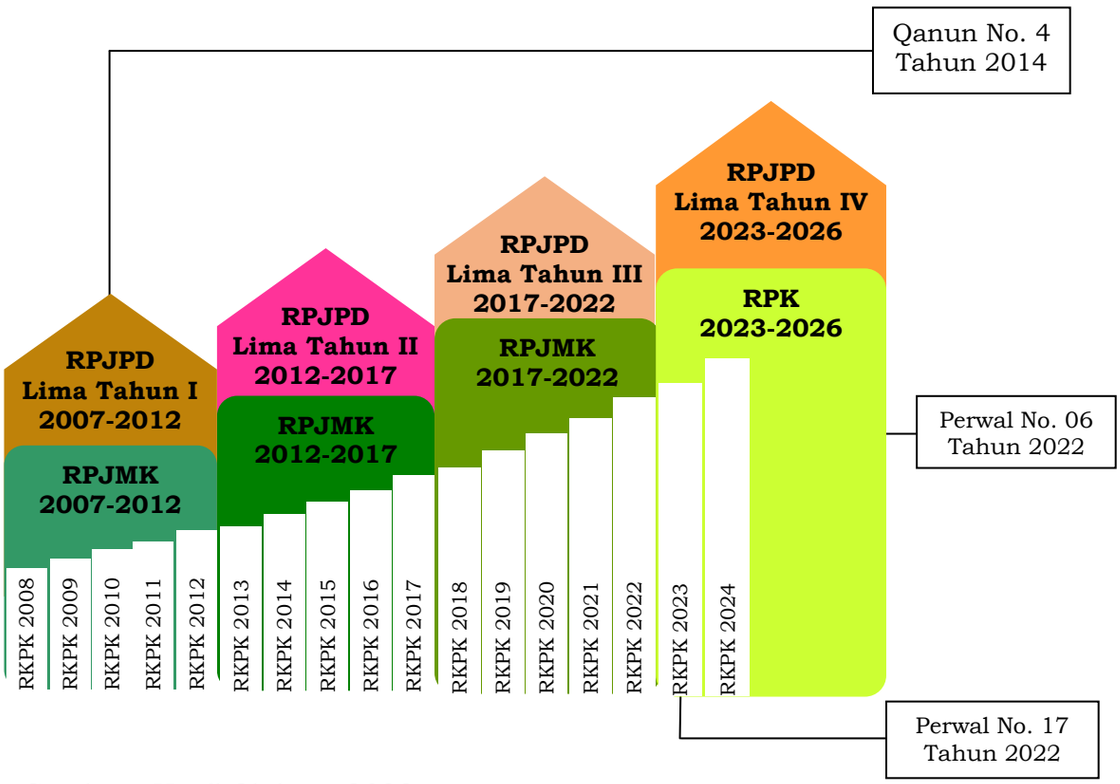


*Sumber : Hasil Olahan, 2023*

### 1.3.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dan menjadi agenda prioritas nasional dalam penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024, yaitu:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungal hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

### 1.3.2 Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026

Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Aceh (RPA) Tahun 2023-2026 guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, sehingga kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPK Lhokseumawe tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, yaitu:

1. peningkatan kualitas demokrasi;
2. peningkatan kualitas kelembagaan, tatalaksana dan sumber daya aparatur;
3. peningkatan kualitas penerapan syariat islam;
4. peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
5. pengembangan kapasitas dan daya saing keolahragaan dan kepemudaan;
6. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat;
7. penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem;
8. peningkatan pertumbuhan ekonomi;
9. pengembangan kemitraan dan peningkatan sumber pendanaan pembangunan;

10. optimalisasi kemandirian pangan;
11. penciptaan lapangan kerja dan penurunan pengangguran;
12. pengurangan ketimpangan antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur dasar dan strategis;
13. optimalisasi tata kelola lingkungan hidup, pelestarian hutan dan penanganan bencana;
14. penguatan perdamaian secara berkelanjutan.

### 1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025

RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 masuk dalam Tahap ke empat (2022-2025) RPJP 2005- 2025. Dimana Tahap ke empat ini ditujukan untuk mewujudkan Kota Lhokseumawe yang Bersyariat, Sehat, Cerdas dan Sejahtera. Hal ini dicapai melalui percepatan pembangunan disegala bidang dengan penekanan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh dengan prioritas pembangunan pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
2. bidang pendidikan,
3. bidang kesehatan.
4. bidang infrastruktur,
5. bidang perekonomian
6. bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
7. agama, kebudayaan, kreativitas dan inovasi tinggi

### 1.3.4 Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026

RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Kota (RPK) Tahun 2023-2026 sebagaimana diamanatkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, dengan prioritas pembangunan pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. reformasi Birokrasi
2. pendidikan
3. pertumbuhan Ekonomi
4. kesehatan
5. memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya
6. infrastruktur
7. Lingkungan Hidup

### 1.3.5 Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024

Guna mewujudkan sinergitas kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, kebijakan pembangunan yang ditetapkan dalam RKPK Lhokseumawe tidak bertentangan dengan kebijakan pembangunan di tingkat provinsi, untuk itu penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 mengacu dokumen RKP Aceh Tahun 2024, yang merupakan tahun pertama pelaksanaan RPA 2023-2026, dengan prioritas pembangunan
pada periode ini adalah sebagai berikut:

1. meningkatkan pembangunan demokrasi.
2. mewujudkan reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional.
3. penguatan Adat Istiadat dan pelaksanaan syariat islam secara kafah.
4. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan derajat kesehatan.
5. meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, kemandirian fiskal daerah dan ketahanan pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial ekonomi Covid-19.
6. meningkatkan percepatan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh bencana.
7. meningkatkan penguatan perdamaian.

### 1.3.6 Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024

Berdasarkan Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Bupati/Wali Kota tentang RKPD

kabupaten/kota dijadikan sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir renja perangkat daerah kabupaten/kota. Program dan kegiatan dalam renja perangkat daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. Perumusan Renja perangkat daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan RKPK. Penyempurnaan Renja perangkat daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditetapkan dalam RKPK.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPK
- 1.5 Maksud dan Tujuan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

- 2.1. Kondisi Umum Kondisi Kota
  - 2.1.1 Aspek Geografi
  - 2.1.2 Aspek Demografi
  - 2.1.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
  - 2.1.4 Aspek Pelayanan Umum
  - 2.1.5 Aspek Daya Saing Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMK
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Kota

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Kota

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA

BAB VI. KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAH KOTA

BAB VII. PENUTUP

## 1.5 Maksud dan Tujuan

### A. Maksud

Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Kota dan DPRK Lhokseumawe dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan kedalam KUA dan PPAS Tahun 2024 yang selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan APBK Tahun 2024.

### B. Tujuan

Penyusunan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan sinergitas dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan, dan antar tingkat pemerintahan.

# BAB II

# GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA LHOKSEUMAWE

## 2.1. Kondisi Umum Kota Lhokseumawe

### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, demografi dan sosiologi.

#### 2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

##### 2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Letak geografis Kota Lhokseumawe yaitu 04°54'–05°18' Lintang utara dan 96°20' –97°21' Bujur Timur. Kota Lhokseumawe berada pada ketinggian +24 meter diatas permukaan laut, disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 105 diatas permukaan laut, sedangkan pada daerah di sebelah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 diatas permukaan laut. Kota Lhokseumawe dengan luas wilayah 181,06 $Km^2$ atau 18.106 Ha dibagi menjadi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Blang Mangat dengan luas wilayah 56,12 $Km^2$, Kecamatan Muara Dua luas wilayah 57,80 $Km^2$, Kecamatan Muara Satu luas wilayah 55,90 $Km^2$ dan Kecamatan Banda Sakti luas wilayah 11,24 $Km^2$. Kota Lhokseumawe memiliki 9 kemukiman dengan 68 gampong.

Basarkan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kota Lhokseumawe Periode 2012–2032, Kota Lhokseumawe berbatasan dengan wilayah berikut:

- Utara dengan Selat Malaka;
- Selatan dengan Kecamatan Kuta Makmur (Kabupaten Aceh Utara);
- Barat dengan Kabupaten Kecamatan Dewantara (Kabupaten Aceh Utara); dan
- Timur dengan Kecamatan Syamtalira Bayu (Kabupaten Aceh Utara).

**Gambar 2.1**
**Peta Wilayah Kota Lhokseumawe**

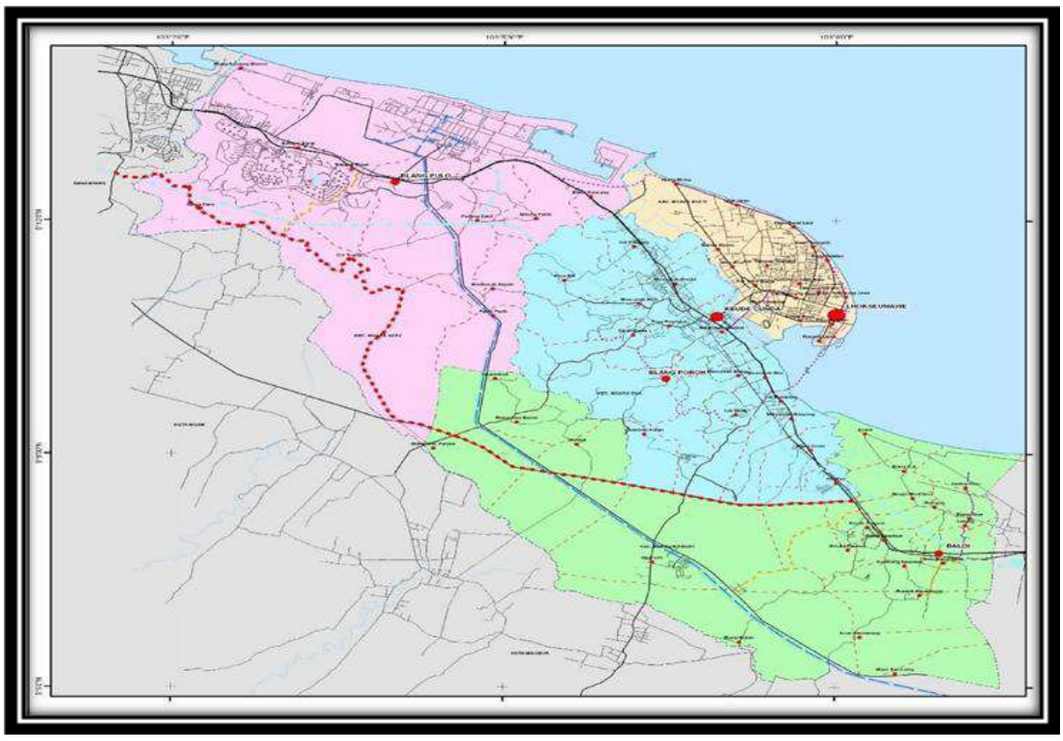

*Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.*

### 2.1.1.1.2 Kondisi Topografi

Wilayah utara Kota Lhokseumawe merupakan pesisir selat malaka dan daerah sebelah Timur merupakan daerah dataran dengan kemiringan antara 0-8%. Sedangkan pada daerah yang menjauhi pesisir merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan kemiringan antara 8-15%. Kondisi ketinggian lahan menunjukan bahwa Kota Lhokseumawe berada di antara ketinggian 0-100 mdpl. Daerah pesisir disebelah utara dan daerah disebelah timur berada pada ketinggian antara 0-5 mdpl. Sedangkan pada daerah selatan memiliki kondisi yang relatif berbukit-bukit dengan ketinggian antara 5-100 m dpl. Dengan kondisi kemiringan lahan seperti ini masih memungkinkan untuk dilakukan pengembangan kegiatan perkotaan.

**Gambar 2.2**
**Peta Kemiringan Lereng Kota Lhokseumawe**

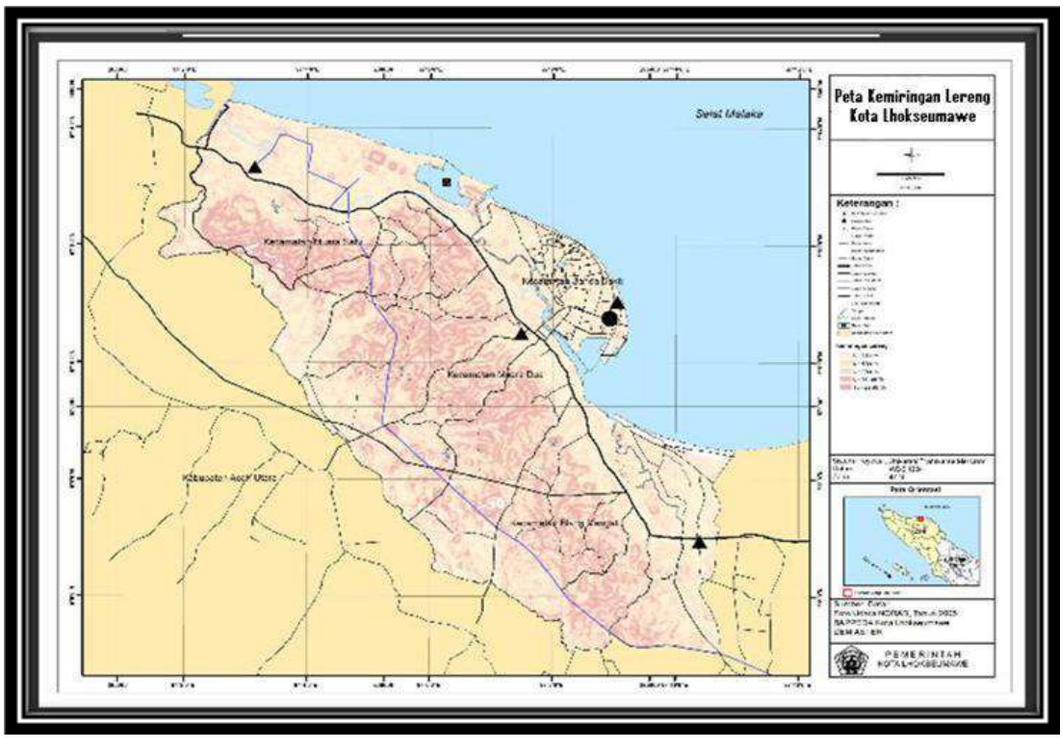


*Sumber : RTRW Kota LhokseumaweTahun 2012-2032.*

### 2.1.1.1.3 Kondisi Geologi

Kondisi geologi Kota Lhokseumawe terbentuk oleh bantuan Alluvium Muda, Formasi Idi, Formasi Julurayeu dan Formasi Seureula. Sebaran batuan Aluvium Muda berupa endapan pesisir dan Fluviatill berada pada daerah di sebelah utara dan selatan Kota Lhokseumawe. Sebaran Formasi Idi berupa kerikil, pasir, gamping dan lempung berada pada daerah sebelah barat yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua dan sebelah timur yaitu sebagian Kecamatan Muara Dua dan Blang Mangat. Sebaran Formasi Julurayeu berupa endapan sungai batu pasir tufaan, lempung berlignit, dan batulumpur berada pada daerah sebelah barat hingga tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua. Sedangkan sebaran formasi seureula berupa batupasir gunungapi, dan batulumpur gampingan berada pada daerah tengah Kota Lhokseumawe yaitu sebagian wilayah Kecamatan Muara Satu dan Muara Dua.

**Gambar 2.3**

**Peta Geologi Kota Lhokseumawe**

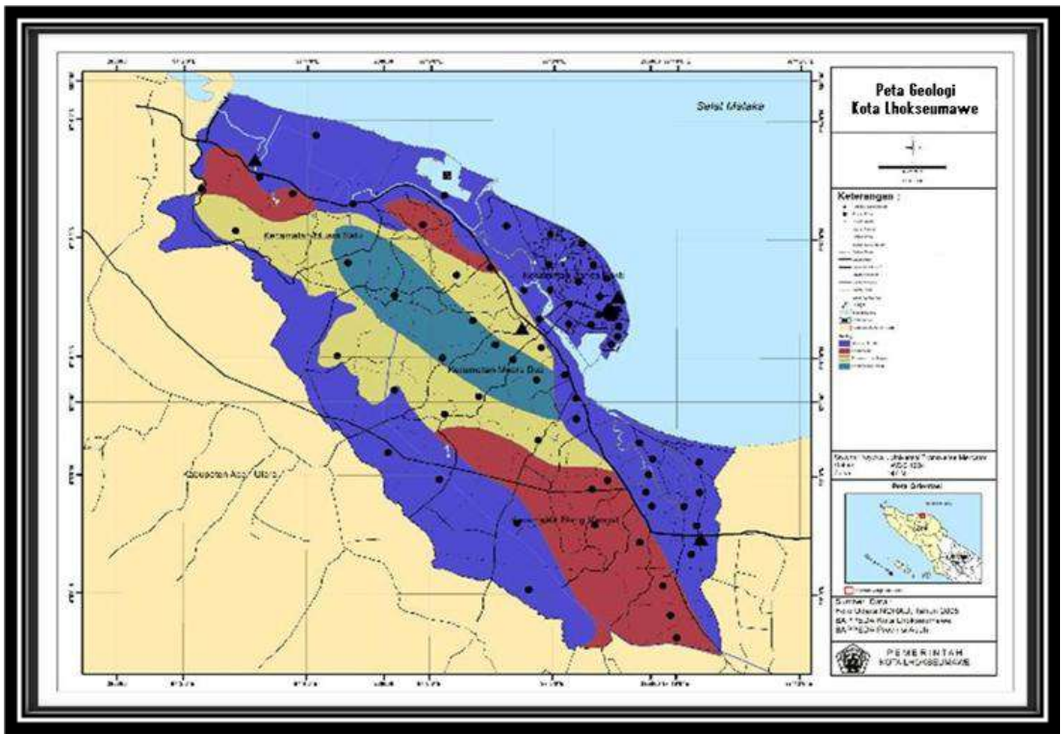


*Sumber : RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032.*

### 2.1.1.1.4 Kondisi Hidrologi

Kondisi air tanah dalam dicirikan dengan adanya akuifer cukup produktif meliputi sebagian besar wilayah Kota Lhokseumawe. Sedangkan akuifer tinggi berada pada daerah barat hingga selatan Kota Lhokseumawe. Kondisi air permukaan dicirikan dengan keberadaan *Krueng* (Sungai) Cunda yang terletak di bagian barat. Namun keadaan air sungai tersebut merupakan air payau sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai air bersih. Untuk keperluan air bersih, pada umumnya penduduk memanfaatkan air sumur dan air PDAM.

**Gambar 2.4**

**Peta Hidrologi Kota Lhokseumawe**

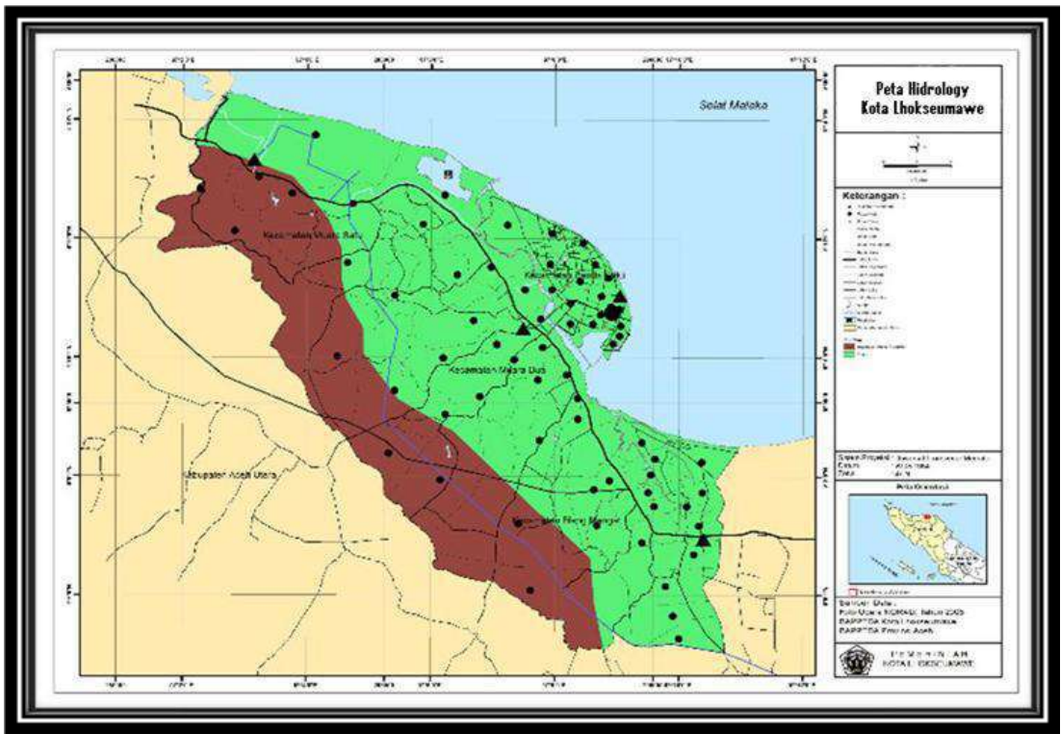


*Sumber : RTRW Kota LhokseumaweTahun 2012-2032.*

**2.1.1.1.5 Kondisi Klimatologi**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2022, rata rata suhu udara minimum Kota Lhokseumawe berkisar antara 22$^0$C dan suhu udara maksimum 32$^0$C dan rata rata kelembapan udara berkisar 83% sampai dengan 90%. Dan rata rata tekanan udara berkisar 1.004 mb sampai dengan 1006 mb. Lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada Bulan Januari sebesar 73 persen dengan jumlah hari hujan yaitu 9 hari. Sementara itu, jumlah penyinaran matahari minimum yaitu 25 persen yang terjadi pada Bulan Desember dengan jumlah hari hujan yaitu 25 hari sedangkan rata-rata kelembaban udara tertinggi terjadi pada Bulan Oktober sebesar 89 persen dan terendah terjadi pada Bulan Agustus yaitu sekitar 83 persen. Berikut tabel temperatur suhu Kota Lhokseumawe Tahun 2022:

**Tabel 2.1**
**Rata-rata Temperatur Maximum dan Minimum**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| Bulan | Temperatur | | |
|---|---|---|---|
| | Min | Maks | Rata-rata |
| Januari | 22.8 | 30.8 | 2.6.2 |
| Februari | 22.8 | 30.4 | 25.9 |
| Maret | 23.2 | 31.0 | 25.9 |
| April | 23.3 | 31.3 | 26.6 |
| Mei | 23.7 | 32.1 | 27.1 |
| Juni | 23.2 | 31.4 | 26.5 |
| Juli | 23.8 | 32.0 | 27.2 |
| Agustus | 23.2 | 31.9 | 26.8 |
| September | 23.1 | 31.5 | 26.7 |
| Oktober | 23.3 | 30.4 | 26.1 |
| November | 23.2 | 29.7 | 25.8 |
| Desember | 22.6 | 29.2 | 25.3 |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023.*

**Tabel 2.2**
**Banyaknya Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| Bulan | Curah Hujan (mm) | Hari Hujan | Penyinaran Matahari |
|---|---|---|---|
| Januari | 129 | 9 | 73 |
| Februari | 296 | 14 | 55 |
| Maret | 61 | 11 | 58 |
| April | 112 | 9 | 68 |
| Mei | 62 | 7 | 61 |
| Juni | 182 | 11 | 59 |
| Juli | 31 | 4 | 63 |
| Agustus | 132 | 12 | 59 |
| September | 56 | 10 | 62 |
| Oktober | 359 | 17 | 53 |
| November | 271 | 15 | 53 |
| Desember | 379 | 22 | 25 |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023*

**Tabel 2.3**
**Rata-rata Tekanan Udara dan Kelembaban Nisbi**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| Bulan | Rata-rata | Tekanan Udara (mb) |
|---|---|---|
| Januari | 85 | 1007.3 |
| Februari | 84 | 1005.9 |
| Maret | 87 | 1005.5 |
| April | 85 | 1005.8 |
| Mei | 84 | 1004.8 |
| Juni | 83 | 1005.5 |
| Juli | 83 | 1004.3 |
| Agustus | 83 | 1005.2 |
| September | 84 | 1005.3 |
| Oktober | 89 | 1006.7 |
| November | 90 | 1006.7 |
| Desember | 90 | 1006.4 |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023.*

**Tabel 2.4**
**Arah Angin, Kecepatan rata-rata, dan Kecepatan Angin Maksimum Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| Bulan | Arah Angin | Kecepatan Rata-rata | Kecepatan Maksimum | Arah Maksimum |
|---|---|---|---|---|
| Januari | T | 5 | 15 | T |
| Februari | TG | 4 | 12 | T |
| Maret | BD | 4.2 | 10 | SW |
| April | BD | 4.2 | 11 | BL |
| Mei | TG | 3.8 | 17 | BL |
| Juni | TG | 4 | 20 | BD |
| Juli | U | 3.7 | 11 | BD |
| Agustus | TG | 4 | 15 | TG |
| September | S | 3.9 | 11 | TG |
| Oktober | BD | 3.7 | 14 | BD |
| November | | | | |
| Desember | | | | |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023.*

### 2.1.1.1.6 Penggunaan Lahan

Kota Lhokseumawe memiliki luas 181,06 Km$^2$ dengan penggunaan lahan yang beragam. Angka paling tinggi digunakan sebagai kawasan pemukiman dan diikuti oleh kawasan perdagangan dan jasa. Untuk Lebih jelas mengenai kondisi penggunaan lahan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Gambar 2.5**
**Penggunaan Lahan Kota Lhokseumawe (Ha)**

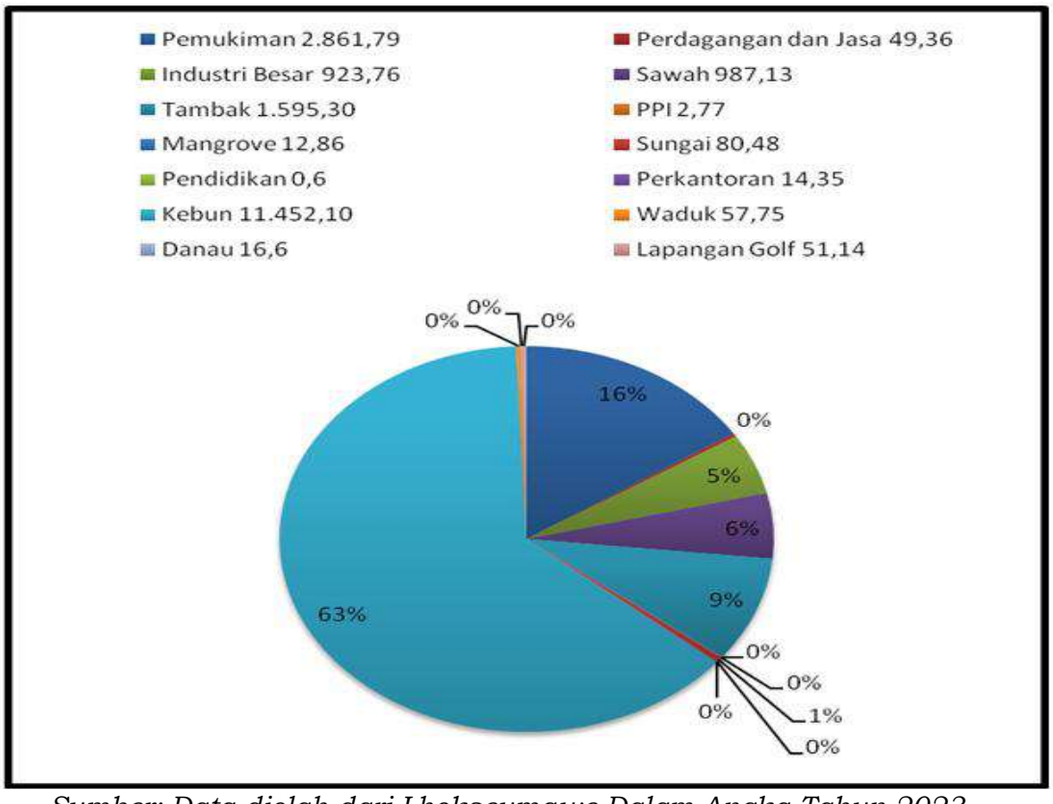


*Sumber: Data diolah dari Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2023*

#### 2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032, arah pengembangan kawasan Kota Lhokseumawe yang berguna mempercepat laju pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan. Dalam dokumen RTRW dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) zona pengembangan wilayah, yaitu:

1. zona pesisir, merupakan daerah pinggiran pantai dan memiliki kondisi wilayah relatif datar, zona pesisir mencakup:
   - zona Pesisir di Kecamatan Muara Satu dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor industri besar, industri menengah dan pariwisata;
   - zona Pesisir di Kecamatan Banda sakti dengan kegiatan utamanya untuk pelayanan kota seperti: pendidikan, pemerintahan, kesehatan, permukiman dan pariwisata, perdagangan dan jasa;
   - zona pesisir di Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi sektor perikanan laut, dan sektor perikanan darat.
2. zona Tengah merupakan daerah sekitar Jalan Banda Aceh – Medan, memiliki kondisi wilayah relatif datar dan berbukit, wilayah ini mencakup Kecamatan Muara Satu, Kecamatan Muara Dua dan Kecamatan Blang Mangat dengan kegiatan utamanya diperuntukkan bagi perdagangan dan permukiman.
3. zona Dalam merupakan daerah dataran tinggi disekitar Jalan Elak memiliki kondisi wilayah berbukit, dengan kegiatan utama pada kawasan ini diperuntukkan bagi kegiatan pertanian (lahan basah dan lahan kering), peternakan, pariwisata dan sebagian permukiman.

#### 2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kota Lhokseumawe juga merupakan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, abrasi dan gelombang pasang. Wilayah rawan bencana Kota Lhokseumawe

didominasi pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada

kawasan budidaya. Dengan adanya resiko kerawanan terhadap bencana pada kawasan budidaya ini tidak berarti bahwa pada kawasan tersebut tidak dapat dibangun, akan tetapi pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi (mitigasi) dari terjadinya dampak bencana alam.

Selain itu, Kota Lhokseumawe juga merupakan wilayah yang rawan bencana abrasi, gelombang pasang seperti Pantai Ujong Blang, Rancung, dan Meuraksa. Sedangkan wilayah yang rawan akan bencana banjir terdapat di Kecamatan Banda Sakti, meliputi Gampong Jawa, Gampong Jawa Lama, Lancang Garam, dan Tumpok Teungoh. Berikut Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe:

**Gambar 2.6**

**Peta Rawan Bencana Kota Lhokseumawe**

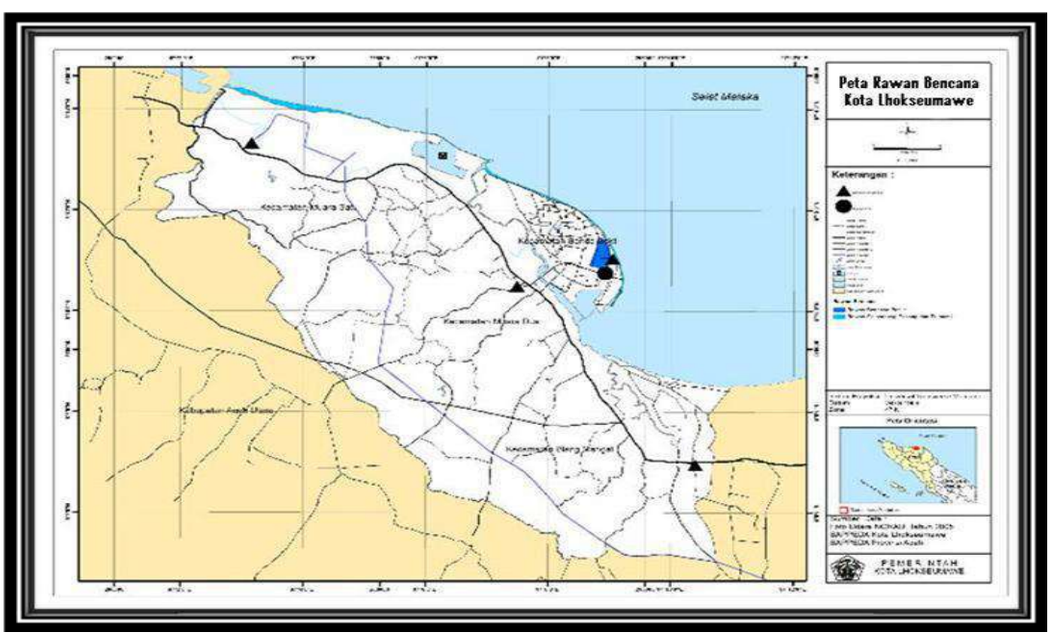


*Sumber : RTRW Kota LhokseumaweTahun 2012-2032.*

### 2.1.1.4 Demografi

Pada Tahun 2022 penduduk Kota Lhokseumawe mencapai 191.396 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk Kota Lhokseumawe 0.77 persen. Dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuatif. Laju

pertumbuhan ini dipengaruhi oleh faktor kematian, kelahiran dan migrasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2.7**

**Jumlah Penduduk (jiwa) dan Laju Pertumbuhan Penduduk (%) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

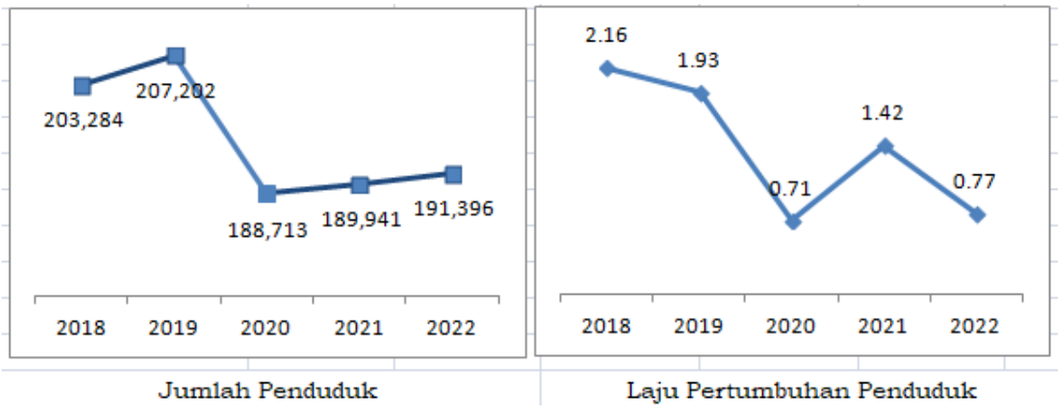


*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023.*

**Tabel 2.5**

**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| No | Kecamatan | Persentase penduduk | Kepadatan penduduk | Rasio Jenis kelamin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Blang Mangat | 14.10 | 481 | 100 |
| 2 | Muara Dua | 27.21 | 901 | 97 |
| 3 | Muara Satu | 17.80 | 609 | 100 |
| 4 | Banda Sakti | 40.89 | 6962 | 99 |
| | Lhokseumawe | 100 | 1.057 | 99 |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023.*

Berdasarkan sebaran umur dan jenis kelamin, gambaran penduduk Kota Lhokseumawe disajikan pada Gambar 2.7, Piramida penduduk tersebut memperlihatkan bahwa sebagai besar penduduk Kota Lhokseumawe berada pada usia muda belum produktif, yang didominasi oleh usia sekolah yang tergolong dalam kelompok umur 0-14 Tahun yaitu sebesar 51.437 jiwa, kelompok umur 15-59 Tahun (usia produktif) sebesar 125.214 jiwa dan kelompok umur 60 Tahun keatas (lanjut usia) sebesar 14.745 jiwa.

**Gambar 2.8**

**Piramida Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

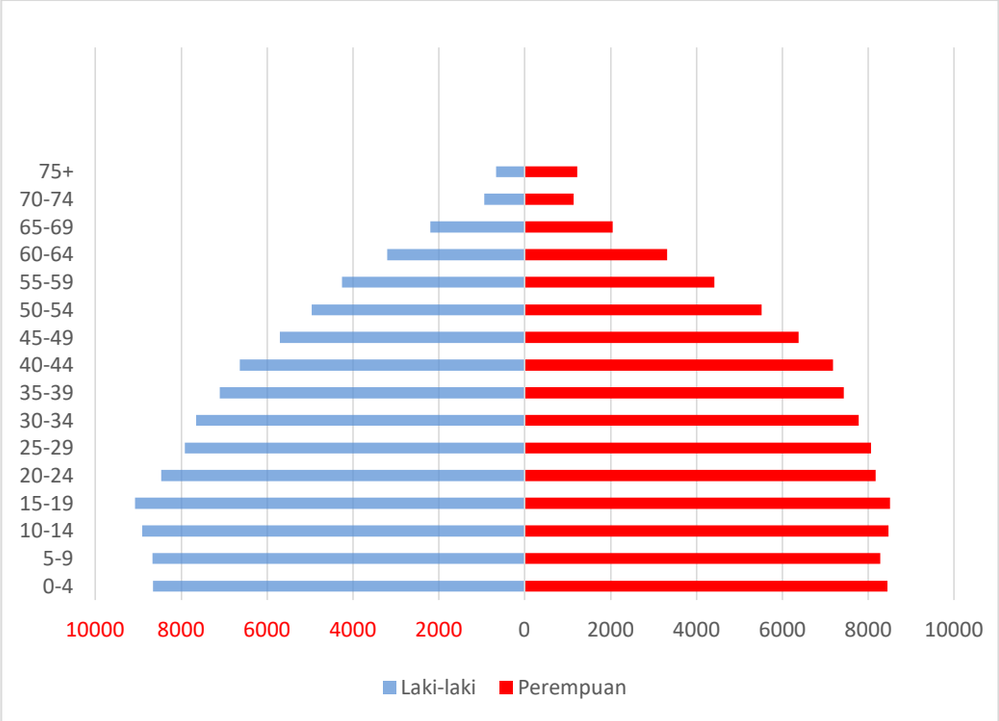


*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka (LDA), BPS 2023*

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

#### 2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

##### 2.1.2.1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan Tahun yang bersangkutan terhadap Tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Selama lima Tahun terakhir (2018-2022), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami peningkatan dari waktu ke waktu terutama tanpa migas, Namun, Pertumbuhan ekonomi ini sama-sama mengalami kontraksi pada Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 diperlihatkan oleh gambar berikut:

**Gambar 2.9**

**Laju Pertumbuhan PDRB Tahun 2018-2022 (%)**

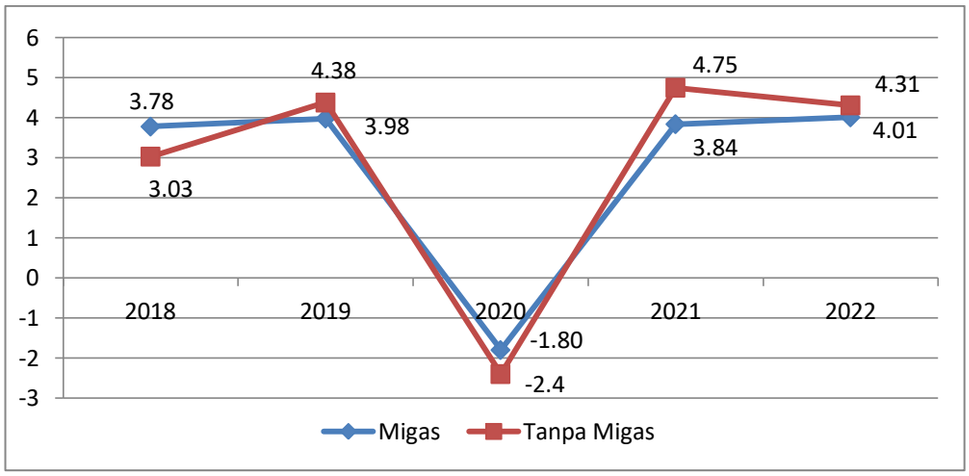


*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2023*

Gambar 2.9 menunjukan bahwa pada Tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan (-1.80%) akibat terjadinya pandemi Covid-19. Seiring membaiknya pencegahan Covid-19 maka pada Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi kembali tumbuh positif sebesar 4.01 persen. Perekonomian Kota Lhokseumawe tanpa migas juga mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022, rata-rata relative tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan dengan PDRB Migas, kecuali pada Tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar (-2.40 persen). Pada Tahun 2021 perekonomian tanpa migas tumbuh signifikan sebesar 4.75%, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 4.31.

**Tabel 2.6**

**Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Lapangan Usaha / Industry | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Agriculture, Forestry, and Fishing | 4.65 | 5.66 | 3.85 | -1.65 | -1.60 |
| B | Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying | -4.09 | 3.37 | 2.53 | 7.1 | 0.33 |
| C | Industri Pengolahan/ Manufacturing | 7.27 | 2.05 | 1.15 | 0.07 | 2.82 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas / Electricity and Gas | 6.95 | 6.31 | 2.84 | -0.30 | 2.21 |

| No | Lapangan Usaha / Industry | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water SupplySewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 6.52 | 18.25 | 3.1 | 2.32 | 9.51 |
| F | Konstruksi/ Construction | 1.69 | 5.94 | 4.08 | -1.82 | 0.73 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 1.51 | 2.51 | -3.85 | 4.17 | 5.91 |
| H | Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage | 1.96 | 1.88 | -22.31 | 23.65 | 4.77 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Activities Accommodation and Food Service | 18.79 | 10.61 | -6.91 | -0.85 | 29.78 |
| J | Informasi dan Komunikasi Information and Communication | 0.55 | 3.30 | 12.35 | 6.98 | 10.05 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities | 1.7 | 9.34 | 0.73 | -3.81 | -4.18 |
| L | Real Estat/ Real Estate Activities | 6.13 | 6.43 | 2.80 | 3.57 | 3.71 |
| M,N | Jasa Perusahaan/ Business Activities | 6.71 | 5.01 | 0.28 | 0.83 | 10.45 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 5.63 | 4.18 | -0.17 | 5.16 | -0.21 |
| P | Jasa Pendidikan/ Education | 7.92 | 7.55 | 3.53 | 1.41 | 2.94 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities | 5.51 | 7.17 | 3.63 | 9.52 | 10.36 |
| R,S, T,U | Jasa Lainnya/ Other Services Activities | 6.70 | 8.88 | 2.12 | 2.28 | 12.70 |
| **Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product** | | **3.78** | **3.98** | **-180** | **3.84** | **4.01** |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2023.*

Berdasarkan Tabel 2.6 Perkembangan pertumbuhan PDRB Seri Menurut Lapangan Usaha dengan migas dan non migas periode 2018-2022 (c to c) yang menggambarkan beberapa lapangan usaha mengalami pertumbuhan kontraksi. Pada Tahun 2018–2022 secara keseluruhan menunjukkan perkembangan dan terjadi kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha. Pada Tahun 2018, terdapat terdapat 1 (satu) lapangan usaha yang mengalami kontraksi yaitu Pertambangan dan Kontruksi sebesar -4.09. Kemudian pada tahun 2019 perekonomian relatif membaik. Tahun 2020 lapangan usaha mengalami kontraksi untuk 3 (tiga) lapangan usaha yaitu lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan serta lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Pada Tahun 2021 terdapat 3 lapangan usaha yang kontraksi yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas, lapangan usaha Kontruksi, dan Jasa Keuangan dan Komunikasi dan Tahun 2022 terdapat 3 lapangan usaha yang kontraksi yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Jasa Keuangan dan Asuransi Financial, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib.

#### 2.1.2.1.2 Distribusi PDRB

Peran dari masing-masing lapangan usaha dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 2.7 dibawah ini.

**Tabel 2.7**

**Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Lapangan Usaha / Industry | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Agriculture, Forestry, and Fishing | 9.14 | 9.37 | 10.10 | 9.79 | 9.38 |
| B | Pertambangan dan Penggalian/ Mining and Quarrying | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| C | Industri Pengolahan/ Manufacturing | 19.48 | 18.78 | 18.86 | 18.97 | 19.45 |

| No | Lapangan Usaha / Industry | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Pengadaan Listrik dan Gas Electricity and Gas | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.16 |
| E | Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ Water SupplySewerage, Waste Management, and Remediation Activities | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| F | Konstruksi/ Construction | 14.23 | 14.68 | 15.51 | 14.49 | 14.17 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles | 22.39 | 21.91 | 21.31 | 21.37 | 21.28 |
| H | Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage | 10.87 | 10.42 | 8.19 | 9.58 | 9.96 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Activities Accommodation and Food Service | 1.82 | 1.98 | 1.89 | 1.79 | 2.20 |
| J | Informasi dan Komunikasi Information and Communication | 3.18 | 3.14 | 3.53 | 3.53 | 3.57 |
| K | Jasa Keuangan dan Asuransi Financial and Insurance Activities | 2.84 | 2.98 | 3.04 | 2.89 | 2.73 |
| L | Real Estat/ Real Estate Activities | 4.52 | 4.69 | 4.87 | 4.80 | 4.64 |
| M,N | Jasa Perusahaan/ Business Activities | 0.99 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 1.10 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ Public Administration and Defence; Compulsory Social Security | 4.25 | 4.36 | 4.56 | 4.68 | 4.24 |
| P | Jasa Pendidikan/ Education | 1.39 | 1.52 | 1.66 | 1.58 | 1.51 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Human Health and Social Work Activities | 3.10 | 3.28 | 3.49 | 3.59 | 3.80 |
| R,S, T,U | Jasa Lainnya/ Other Services Activities | 1.26 | 1.32 | 1.38 | 1.36 | 1.41 |
| **Produk Domestik Regional Bruto Gross Regional Domestic Product** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2023.*

Pada Tabel 2.7 Kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Lhokseumawe berasal dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Ecera; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Pada Tahun 2018 kontribusi lapangan usaha ini sebesar 22.39%, kemudian Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 21.91%, lalu menurun lagi sampai Tahun 2022 sebesar 21.28%. Namun Tahun 2021 sempat meningkat menjadi 21.37%.

Kemudian kontribusi kedua terbesar yaitu dari lapangan usaha Industri Pengolahan. Pada Tahun 2018 lapangan usaha ini berkontribusi sebesar 19.48%, dan menurun pada Tahun 2019 sebesar 18.78%, serta meningkat kembali pada Tahun 2020 sebesar 18,86% dan mengalami peningkatan kembali pada Tahun 2021-2022 menjadi 18.97% dan 19.45%.

#### 2.1.2.1.3 Laju Inflasi

Inflasi yang terjadi di Lhokseumawe terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,23 persen; kelompok transportasi sebesar 0,84 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,37 persen. Kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,07 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang tidak mengalami perubahan, yaitu: kelompok pakaian dan alas kaki; kelompok kesehatan; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya; kelompok pendidikan; dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran. Tingkat Inflasi tahun kalender Desember 2022 (Januari-Desember) 2022 untuk Kota Lhokseumawe sebesar 5.37 persen, Kota Meulaboh sebesar 6.56 persen, Kota Banda Aceh sebesar 6.00 persen. Untuk Provinsi Aceh sebesar 5.89 persen dan Nasional sebesar 5.51 persen.

**Gambar 2.10**

**Inflasi Kota Lhokseumawe 2018-2022 (%)**

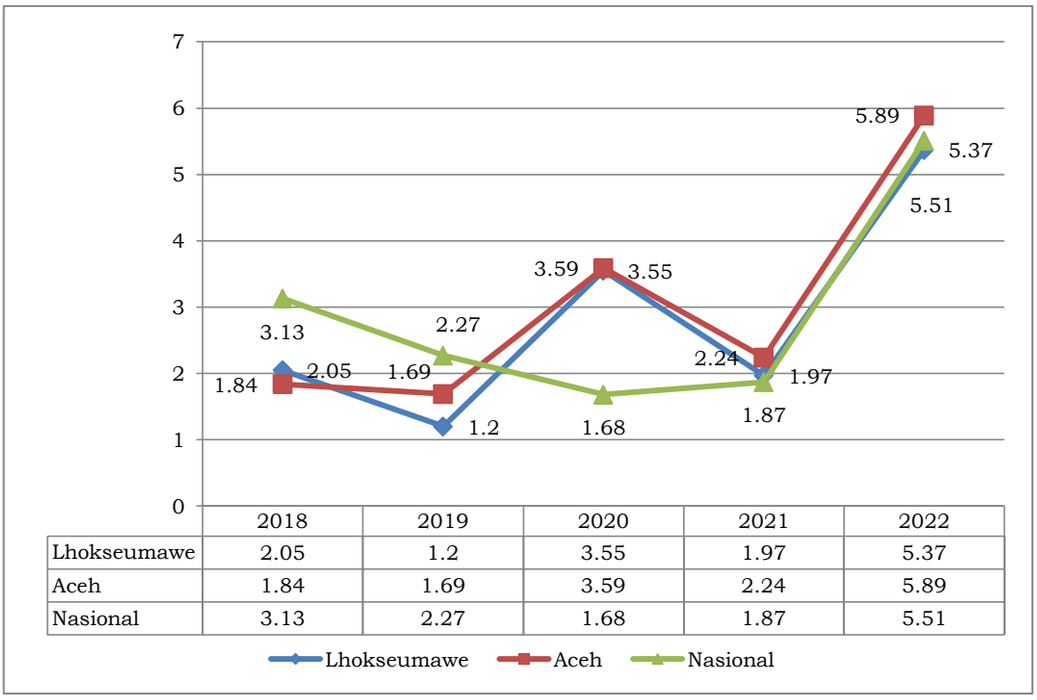


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lhokseumawe | 2.05 | 1.2 | 3.55 | 1.97 | 5.37 |
| Aceh | 1.84 | 1.69 | 3.59 | 2.24 | 5.89 |
| Nasional | 3.13 | 2.27 | 1.68 | 1.87 | 5.51 |

*Sumber : BPS, Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2023.*

Dari gambar 2.10 diatas dapat dijelaskan bahwa Inflasi di Kota Lhokseumawe sangat fluktuatif dimana inflasi Tahunan menurun drastis dari 2.05 di Tahun 2018 menjadi 1.20 di Tahun 2019 kemudian mengalami peningkatan di Tahun 2020 yaitu 3.55 dan pada Tahun 2021 kembali mengalami penurunan yaitu 1.97, dan Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 5.37 Sedangkan Inflasi Aceh Tahun 2018 sebesar 1.84 mengalami kenaikan menjadi 5.89 pada Tahun 2022. Begitu juga untuk nasional 3.13 pada Tahun 2018 dan Tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar 5.51.

#### 2.1.2.1.4 PDRB Per Kapita

Berdasarkan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 dalam gambar 2.11 dibawah ini:

**Gambar 2.11**

**PDRB Per Kapita ADHB, Tahun 2018-2022 (Milyar Rupiah)**

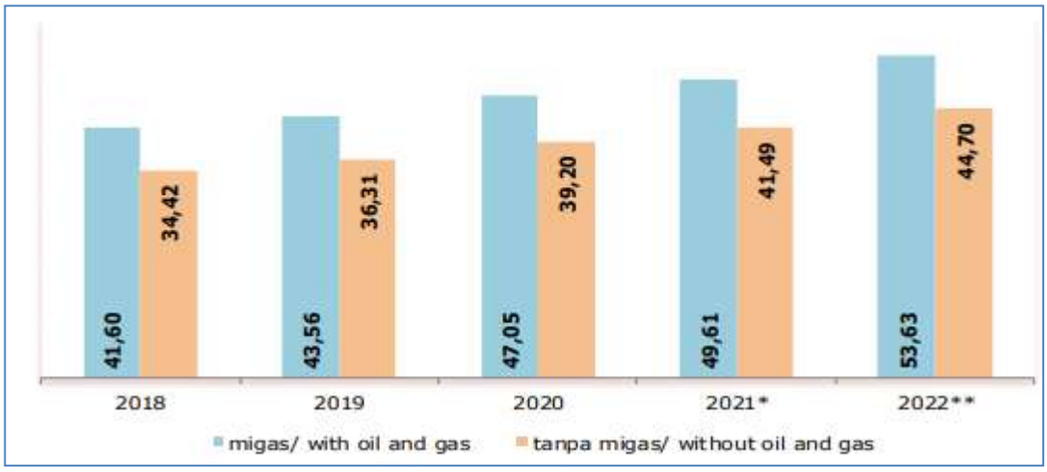


*Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2018-2022*

Dari gambar 2.11 di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima tahun terakhir terlihat bahwa PDRB per kapita Lhokseumawe ADHB terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Lhokseumawe adalah sebesar 53,63 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 4,02 juta rupiah dari tahun 2021. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe tanpa migas pada tahun 2022 adalah sebesar 44,70 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 3,20 juta rupiah dari tahun 2021.

**Gambar 2.12**

**PDRB Per Kapita ADHK, Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

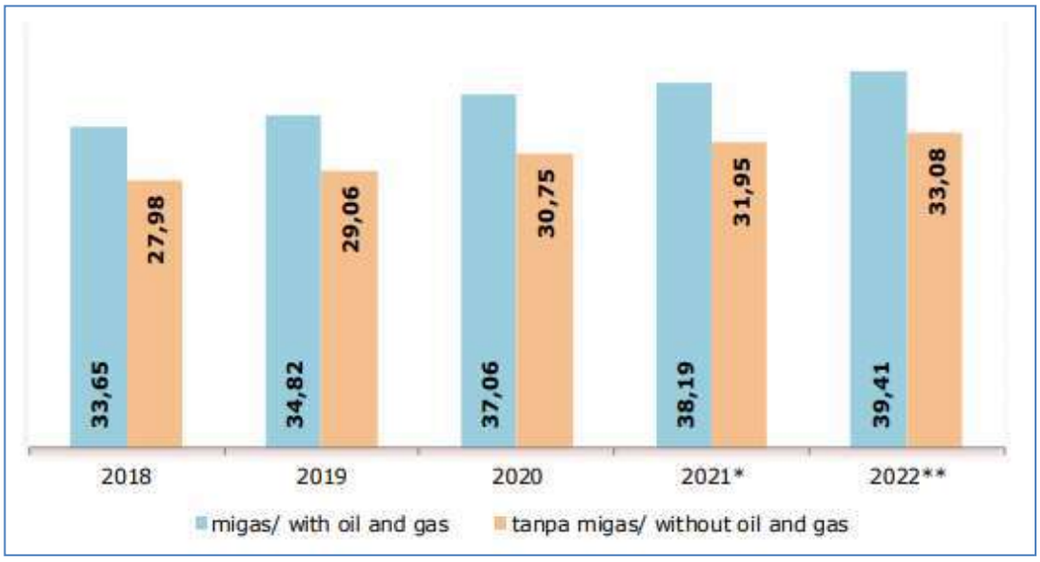


*Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe 2018-2022*

Dari gambar 2.12 di atas dapat dijelaskan bahwa selama lima

tahun terakhir PDRB per kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan juga terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan dengan migas adalah sebesar 39,41 juta rupiah pertahun, meningkat sebesar 1,23 juta rupiah dari tahun 2021. Sedangkan PDRB per kapita Lhokseumawe Atas Dasar Harga Konstan tanpa migas pada tahun 2022 adalah sebesar 33,08 juta rupiah setahun, meningkat sebesar 1,12 juta rupiah dari tahun 2021.

#### 2.1.2.1.5 Indeks Rasio Gini

Indeks Gini merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi untuk menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan yang dihitung berdasarkan kelas pendapatan individu. Rasio Gini mempunyai nilai antara 0-1 dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan tidak sempurna. Rasio Gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

**Tabel 2.8**

**Perbandingan Gini Rasio Kota Lhokseumawe dengan Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota Tetangga Tahun 2018-2022**

| Kabupaten/Provinsi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Lhokseumawe | 0,305 | 0,310 | 0,307 | 0,296 | 0.348 |
| Aceh Utara | 0,292 | 0,312 | 0,261 | 0,283 | 0.275 |
| Kota Langsa | 0,356 | 0,363 | 0,356 | 0,340 | 0.368 |
| Aceh | 0,325 | 0,319 | 0,323 | 0,324 | 0,311 |

*Sumber: Analisis Indeks Gini Kab/Kota Provinsi Aceh, 2023.*

Dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai Rasio Gini Kota Lhokseumawe, Aceh Utara, Kota Langsa dan Provinsi Aceh masih dibawah 0,4 yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pendapatan dalam masyarakat masih tergolong rendah.

#### 2.1.2.1.6 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2021, jumlah penduduk miskin Kota Lhokseumawe mengalami

pergerakan yang dinamis sebagaimana dapat dilihat dalam gambar 2.9 dibawah ini:

**Tabel 2.9**

**Tingkat Kemiskinan Kota Lhoksemawe Tahun 2018-2022**

| Indikator | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Penduduk Miskin | 23.880 | 23.050 | 22.690 | 23.380 | 23.030 |
| Persentase Penduduk Miskin | 11.81 | 11.18 | 10.80 | 11.16 | 10.84 |

*Sumber : Lhokseumawe Dalam Angka 2023.*

Berdasarkan Tabel 2.9 di atas dapat dijelaskan bahwa Tingkat kemiskinan Kota Lhokseumawe selama periode 2018-2022 bergerak secara dinamis, terlihat bahwa pada Tahun 2018 persentase kemiskinan Kota Lhokseumawe sebesar 11.81% dan Tahun 2022 mengalami penurunan yakni 10.84 % atau 23.030 jiwa, hal ini sangat dipengaruhi oleh berakhirnya pandemi covid 19 yang memperluas aktifitas ekonomi dan pelaku usaha.

Berbagai upaya telah dilakukan olah Pemerintah Kota Lhokseumawe diantaranya dengan memberikan bantuan modal usaha baik di sektor jasa, perdagangan, dan perindustrian, akan tetapi upaya tersebut tidak dapat mengatasi dampak pandemi yang terjadi.

#### 2.1.2.1.7 Pengangguran

**A. Tingkat Pengangguran Terbuka**

Permasalah pengangguran umumnya lebih banyak terdapat di daerah perkotaan sebagai efek dari kecinya lapangan pekerjaan yang tercipta pada kurun waktu 2018-2022.

**Gambar 2.13**

**Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

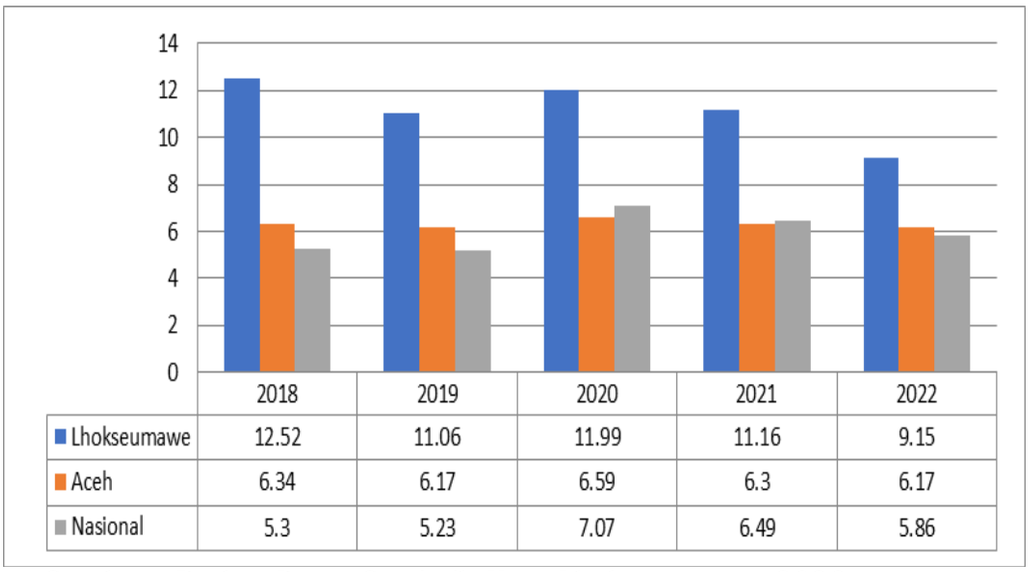


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lhokseumawe | 12.52 | 11.06 | 11.99 | 11.16 | 9.15 |
| Aceh | 6.34 | 6.17 | 6.59 | 6.3 | 6.17 |
| Nasional | 5.3 | 5.23 | 7.07 | 6.49 | 5.86 |

*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan Gambar di atas Kota Lhokseumawe Tahun 2018 memperlihatkan peningkatan yang signifikan yaitu dari 12,52% sedangkan untuk Aceh 6,34% dan Nasional 5,3%, selanjutnya untuk Tahun 2022 terjadi penurunan untuk Kota Lhokseumawe menjadi 9.15%, sedangkan untuk Aceh terjadi kenaikan fluktuatif antara Tahun 2018-2022 dan untuk nasional juga mengalami fluktuatif anatara Tahun 2018-2022.

### 2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

#### 2.1.2.2.1 Angka Melek Huruf

Pengukuran tingkat kualitas pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf (AMH). Pencapaian AMH merupakan angka pendidikan dasar dan program pemberian keahlian melek huruf terhadap penduduk. Selain itu AMH dapat digunakan untuk:

1. mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD.
2. menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media.

3. menunjukkan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis.

Berikut gambar 2.14 menjelaskan Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 15 tahun ke atas Tahun 2018-2022:

**Gambar 2.14**

**Angka Melek Huruf (AMH) Penduduk Usia 15 Tahun keatas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

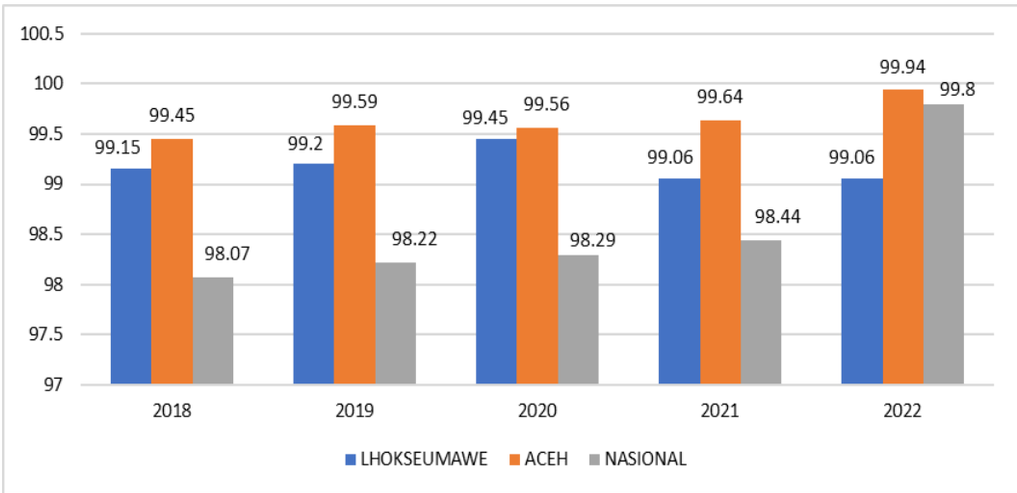


*Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, 2023*

Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Lhokseumawe selama periode ini yaitu dari 99,15% pada Tahun 2018 menjadi 99,06% dan pada Tahun 2022 sehingga angka buta aksara tinggal sebesar 0,94% lagi yang diharapkan dapat tuntas pada tahun berikut nya sehingga Kota Lhokseumawe terbebas dari buta aksara. Hal ini menunjukan bahwasanya perlu ditingkatkan program-program yang dapat menurunkan angka melek huruf sehingga Kota Lhokseumawe terbebas dari buta huruf.

#### 2.1.2.2.2 Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Lamanya sekolah atau *years of schooling* adalah sebuah angka yang menunjukkan lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat Pendidikan Terakhir (TPT). Pada prinsipnya angka ini merupakan transformasi dari bentuk kategori TPT menjadi bentuk numerik.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu.

Angka rata–rata lama sekolah penduduk Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 adalah sebesar 10,89. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,23 pada Tahun 2022 sebesar 11,12. Rata-rata lama sekolah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar 2.15 berikut ini:

**Gambar 2.15**

**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

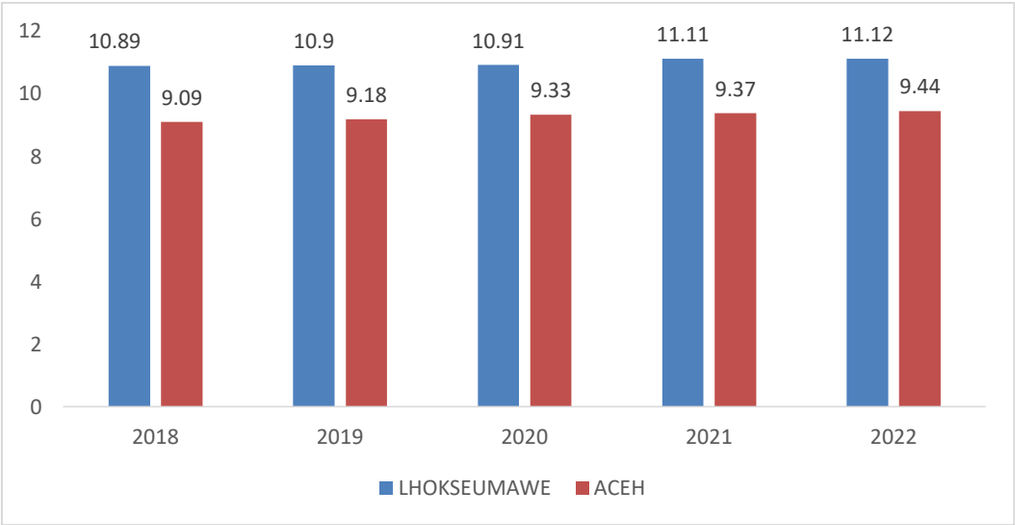


*Sumber : BPS Aceh, 2023.*

Dari Gambar 2.15 dapat dilihat bahwa sampai dengan Tahun 2022 Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Lhokseumawe masih berada di atas Rata-Rata Lama Sekolah tingkat provinsi Aceh, dimana di Kota Lhokseumawe tercatat 11,12% sedangkan provinsi Aceh sebesar 9,44%.

#### 2.1.2.2.3 Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe meningkat dari Tahun ke Tahun. Rata-rata angka harapan lama sekolah sudah berada di atas rata-rata nasional (14,36). Berikut angka harapan lama sekolah Kota Lhokseumawe dalam gambar 2.16 berikut ini:

**Gambar 2.16**

**Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

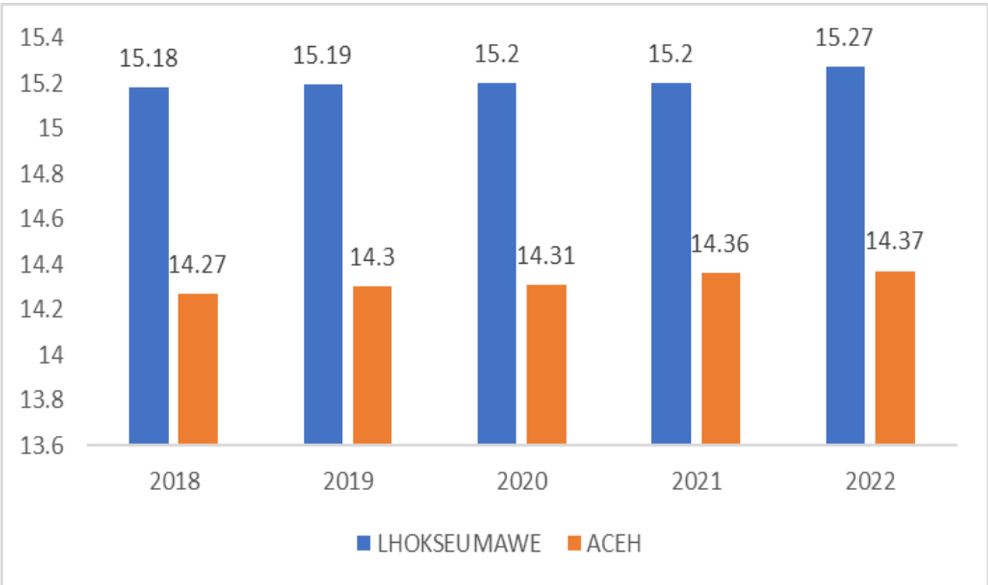


*Sumber : BPS Aceh, 2023.*

Gambar 2.16 di atas menggambarkan bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar 15,18% meningkat menjadi 15,27% pada akhir Tahun 2022. Angka ini juga menunjukan bahwa bahwa Angka Harapan Lama Sekolah Kota Lhokseumawe masih di atas angka provinsi yang hanya mencapai 14,27% pada Tahun 2018 dan 14,37% pada Tahun 2022.

**2.1.2.2.4 Angka Usia Harapan Hidup**

Angka Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator dalam mengukur indeks pembangunan manusia (IPM). Selain AKB dan AKI, UHH juga digunakan untuk menilai derajat kualitas hidup masyarakat baik kabupaten/kota, propinsi maupun negara. Keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi pada umumnya juga dapat dilihat dari peningkatan UHH penduduk dari satu negara.

Upaya untuk meningkatkan UHH menjadi 71 Tahun merupakan hal penting yang perlu dicermati melalui upaya-upaya peningkatan kegiatan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat seperti penurunan resiko kesakitan pada keluarga rentan, trend penyakit degeneratif dan tidak menular, serta peningkatan kesehatan kelompok usia lanjut yang dapat hidup

produktif dan mandiri. Berikut gambar angka usia harapan hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018 s.d 2022:

**Gambar 2.17**

**Angka Usia Harapan Hidup**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

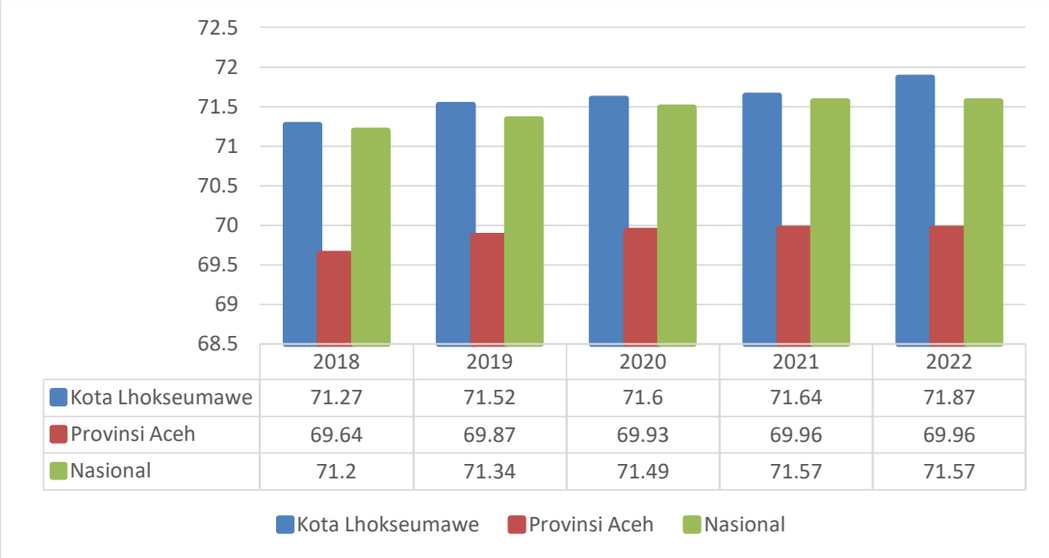


*Sumber : Dinas Kesehatan dan BPS Aceh, 2023.*

Jika dilihat dari Gambar 2.17 rata-rata Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 s.d 2022 terjadi peningkatan setiap tahunnya. Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar 71,27 lebih baik dari Aceh sebesar 69,64 dan Nasional sebesar 71.02. Dan pada Tahun 2022 Angka Usia Harapan Hidup Kota Lhokseumawe sebesar 71,87 lebih baik dari Aceh sebesar 69,96 dan Nasional sebesar 71,57.

#### 2.1.2.2.5 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka kematian ibu di Kota Lhokseumawe mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2018 tidak terjadi kasus kematian ibu dan pada Tahun 2019 menjadi 47.44 pada tahun 2020 meningkat mencapai 161.29 sedangkan di tahun 2021 terus meningkat mencapai 294.9 serta pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 77.88. Untuk mengatasi peningkatan jumlah kematian ibu adalah meningkatkan pertolongan pasca persalinan oleh tenaga kesehatan professional di fasilitas kesehatan, serta meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal.

**Tabel 2.10**

**Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian Ibu Hamil | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKI |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Banda Sakti | 0 | 1941 | 0 |
| | Muara Dua | 0 | 1129 | |
| | Muara Satu | 0 | 697 | |
| | Blang Mangat | 0 | 432 | |
| 2019 | Banda Sakti | 1 | 1958 | 47.44 |
| | Muara Dua | 1 | 1144 | |
| | Muara Satu | 0 | 624 | |
| | Blang Mangat | 0 | 489 | |
| 2020 | Banda Sakti | 3 | 1945 | 161.29 |
| | Muara Dua | 2 | 1135 | |
| | Muara Satu | 1 | 792 | |
| | Blang Mangat | 1 | 468 | |
| 2021 | Banda Sakti | 4 | 1741 | 294.9 |
| | Muara Dua | 6 | 689 | |
| | Muara Satu | 1 | 841 | |
| | Blang Mangat | 1 | 257 | |
| 2022 | Banda Sakti | 1 | 1786 | 77.88 |
| | Muara Dua | 1 | 916 | |
| | Muara Satu | 0 | 669 | |
| | Blang Mangat | 1 | 481 | |

*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

### 2.1.2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) (IPM/HDI) adalah satuan untuk mengukur kesuksesan pembangunan suatu wilayah. IPM/HDI adalah angka yang diolah berdasarkan tiga dimensi: yaitu panjang usia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup (*standard of living*) suatu wilayah. IPM yang tinggi menunjukkan keberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, IPM yang rendah menunjukkan ketidakberhasilan pembangunan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi suatu negara. Berikut gambar 2.18 perihal perkembangan IPM Kota Lhokseumawe antara Tahun 2018-2022:

**Gambar 2.18**

**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

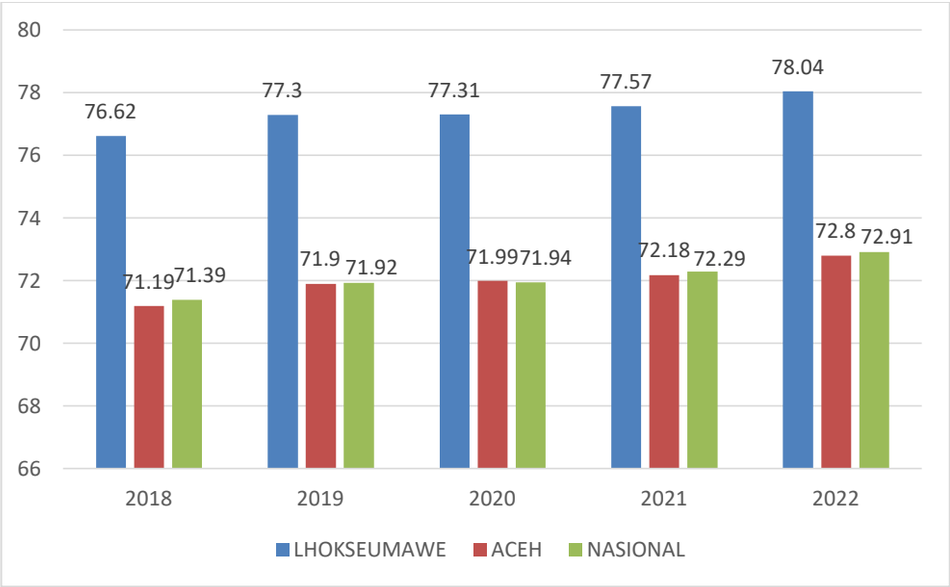


*Sumber : BPS Aceh, 2023.*

Jika dilihat dari nilainya, Provinsi Aceh memperoleh nilai IPM sebesar 72,8 pada Tahun 2022, sedangkan untuk IPM Kota Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2022 adalah sebesar 78,04.

**2.1.2.2.7 Persentase Balita Gizi Buruk**

Gizi buruk adalah suatu kondisi yang ditandai dengan berat badan dan tinggi badan balita jauh di bawah rata-rata. Maka itu, untuk mengetahui status gizi yang satu ini, indikator yang digunakan adalah grafik berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Selain berat dan tinggi badan, lingkar lengan atas (LILA) juga masuk ke dalam pemeriksaan klinis gizi buruk pada balita. Kondisi gizi buruk pada balita tidak terjadi secara instan atau singkat. Artinya, balita yang masuk ke dalam kategori gizi buruk sudah mengalami kekurangan berbagai zat gizi dalam jangka waktu yang sangat lama. Gagalnya anak untuk mencapai aspek akademis dan sosial akibat gizi buruk tentu saja memiliki dampak negatif yang berkelanjutan sepanjang hidupnya apabila tidak segera disembuhkan. Berikut gambar Persentase Balita Gizi Buruk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 :

**Gambar 2.19**

**Persentase Balita Gizi Buruk**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

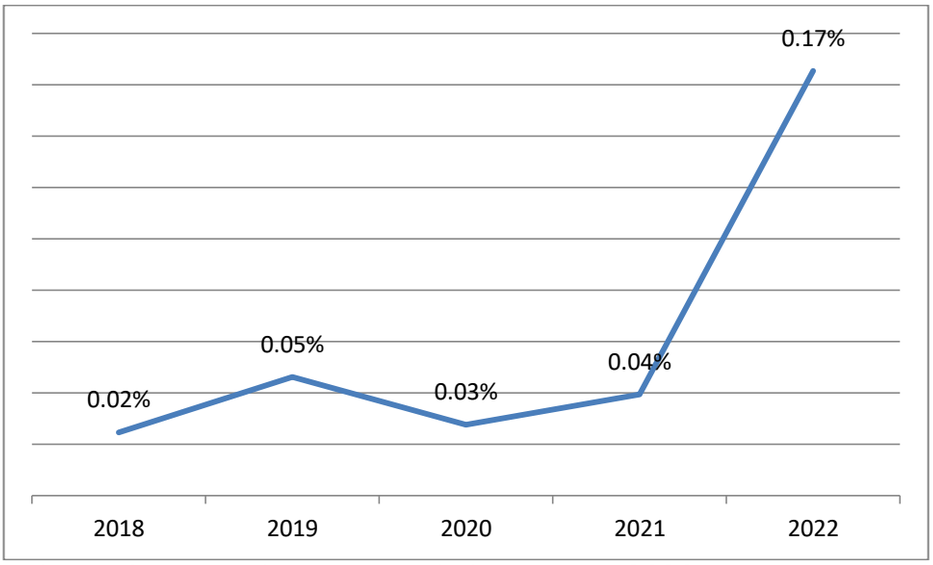


*Sumber : Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023*

Dari gambar 2.19 di atas dapat di lihat persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 s.d 2022 mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2018 persentase balita gizi buruk 0.02% dan 2019 persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe meningkat menjadi sebesar 0.05%, selanjutnya di Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,03% dan pada Tahun 2021 mencapai 0,04% dan Tahun 2022 persentase balita gizi buruk Kota Lhokseumawe meningkat lagi menjadi 0.17%.

**2.1.2.2.8 Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

Berdasarkan laporan harian Covid-19 Kota Lhokseumawe tanggal 20 Januari 2022 yaitu :

1. total suspek : 1.690 orang
2. suspek dalam pemantauan : 0 orang
3. suspek selesai pemantauan : 1.690 orang
4. jumlah proable meninggal hari ini : 0 orang
5. jumlah kasus konfirmasi positif : 1.694 orang
6. kasus konfirmasi positif dirawat di RS : 2 orang
7. kasus konfirmasi positif isolasi mandiri : orang
8. kasus konfirmasi positif selesai isolasi : 1612 orang

9. kasus konfirmasi positif meninggal : 80 orang

Capaian vaksinasi Covid-19 di Kota Lhokseumawe, Jum'at 21 Januari 2022 pukul 07:08 WIB tercatat bagi Tenaga Kesehatan (Nakes) yang sudah melakukan vaksinasi dosis pertama telah mencapai 3.069 orang, atau 111,3 % dari target awal yang jumlahnya sekitar 2.757 orang. Lalu Nakes yang sudah melaksanakan vaksinasi dosis II sebanyak 2.812 orang atau 102,0 %. Sedangkan Nakes yang sudah mendapat dosis III sebanyak 1.872 orang atau 67,9%.

Sementara itu, vaksinasi dosis I bagi kelompok lanjut usia (Lansia) mencapai 7.197 orang, atau sekitar 66,02% dari target sebanyak 10.901. Lansia yang telah tuntas melakukan suntikan dosis II sebanyak 1.930 orang atau sekitar 17,7%. Pada kelompok Pelayanan Publik target vaksinasinya yaitu 18.397 orang. Pelayanan Publik yang sudah melakukan vaksinasi dosis I sebanyak 22.852 orang, atau setara 124,2%. Untuk Pelayanan Publik yang sudah melakukan vaksinasi dosis II sebanyak 17.632 Orang, atau 95,8%.

Kemudian Target vaksinasi pada kelompok Masyarakat umum berjumlah 91.336 orang. Sebanyak 79,183 orang telah melakukan vaksinasi dosis I, atau sekitar 86,69%. Sedangkan 24.149 orang, atau sekitar 26,4% telah mendapatkan dosis II sesuai waktu yang ditetapkan, dan sebanyak 27 orang atau 0,11% telah mendapatkan vaksin dosis ke III. Selanjutnya, sebanyak 17.746 orang remaja telah melakukan vaksinasi dosis I atau sekitar 83,73% dari target sasaran 21.194 orang. Sedangkan suntikan dosisi II telah diberikan kepada 7.312 remaja, atau setara dengan 34,5 %, serta kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosis I sebanyak 3.760 orang atau 18,13%, dan Kelompok Anak yang sudah melakukan vaksinasi dosis II sebanyak 13 orang atau 0,1.

#### 2.1.2.3 Fokus Seni Budaya

**A. Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya**

Festival seni di setiap daerah merupakan perayaan tahunan yang menjadi wadah untuk mempertunjukan keunikan budaya dari berbagai daerah. Festival ini biasanya berlangsung selama beberapa

hari yang dimeriahkan dengan musik, tarian, hingga ritual dalam paradenya.

Kota Lhokseumawe memiliki berbagai jenis kesenian yang mengandung nilai-nilai islami, bersifat demokratif yang mencerminkan kehidupan masyarakat sehari-hari, misalnya jenis tarian dilakukan secara berkelompok sebagai simbol dari keanekaragaman masyarakat Aceh, dinamis iringannya yang disertai lagu dan pantun yang mengandung nasehat yang baik bagi kehidupan masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini,

**Tabel 2.11**

**Penyelenggara Festival Seni Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| No | Kegiatan |
|---|---|
| 1 | Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) |
| 2 | Anugerah Budaya |
| 3 | Audisi Paduan Suara Gita Bahana Nusantara |
| 4 | Festival dan Lomba Karya Seni |
| 5 | Festival Permainan Rakyat |
| 6 | Hari Kesenian Daerah |
| 7 | Festival Rapai Uroeh |
| 8 | Festival Teluk Samawi |
| 9 | Pelatihan Pengembangan Kesenian |
| 10 | Temu Tokoh Seudati se-Aceh |
| 11 | Aceh culinary Festival |
| 12 | Parade Seudati |
| 13 | Tunang Seudati |
| 14 | Festival Lomba Mewarnai Antar Sekolah |
| 15 | Ahad Festival |
| 16 | Festival Lomba Mural |
| 17 | Festival Lomba Peuayon Aneuk |
| 18 | Pengiriman Tim Kesenian ke Luar Daerah |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.*

Dari Tabel 2.11 di atas dapat tergambarkan bahwa dalam wilayah Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 terdapat 18 jenis kegiatan seni budaya tarian Aceh dalam penyelenggaraan festival seni budaya yang dilaksanakan.

## B. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya, bahwa cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya. Dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut ini:

**Tabel 2.12**

**Situs/Bangunan Cagar Budaya Kota Lhokseumawe**

| No. | Lokasi (Kecamatan) / Nama Situs | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Banda Sakti** | **Muara Satu** | **Blang Mangat** | **Muara Dua** |
| 1 | Makam Tgk. Chik Ditunong dan Tgk. Dibuah | Makam Putroe Neng | Makam Prajurit Tgk. Abd. Jalil Cot Plieng | Tugu Perlawanan TKR |
| 2 | Makam Tgk. Di Lhokseumawe | Makam Tgk. Syiah Hudam | Makam Mualem Taufiq Shaleh | Rumah Adat Ulee Balang |
| 3 | Makam Tgk. Maharaja Abdul Hamid dan Meriam Belanda | Makam Tgk. Chik Dipaloh | Makam Tgk. Batee Meutarah | - |
| 4. | Makam Tgk. Sayed Muhammad Nadir | Makam Tgk. Jrat Meuindram | Tugu Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng | - |
| 5. | Makam Tgk. Ulei Utan | Makam Tgk. Chik Buket Bruek Kreung | - | - |
| 6. | Makam Tgk. Syaikh Al Kalaliy | Gua Jepang | - | - |
| 7. | Tugu Pahlawan TNI | Gua Tgk. Ibrahim Tapa dan Cot Bu Kulah | - | - |
| 8. | Rumoh Aceh Kota Lhokseumawe | - | - | - |
| 9. | Kurok-Kurok | - | - | - |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2023.*

Dari tabel 2.12 di atas menggambarkan bahwa Kota Lhokseumawe memiliki 22 (dua puluh dua) unit situs/bangunan cagar budaya diantaranya situs makam sebanyak 9 (sembilan) makam yang terdapat di 3 (tiga) Kecamatan, situs tugu sebanyak 2 (dua) tugu di Kecamatan Banda Sakti dan Kecamatan Blang Mangat, situ benteng dan goa sebanyak 7 (tujuh) unit yang terdapat di 2 (dua) Kecamatan dan tempat bersejarah sebanyak 4 (empat) yang terdapat di Kecamatan Muara Satu.

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh dan Kekhususan

##### 2.1.3.1.1 Penyelenggaraan Kehidupan Beragama

**A. Syariat Islam**

Indeks pembangunan Syariat Islam diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Tujuan dilaksanakan Survey Indeks Pembangunan Syariah adalah untuk mengukur persepsi masyarakat mengenai syariat islam dan mengukur sejauh mana penerapan dan pelaksanaanya agar tercapai maqasid syariah (kriteria dan indikator Indeks Pembangunan Syariah).

**Tabel 2.13**

**Tipe Dayah, Kepemilikan, dan Jumlah Guru Dayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tipe | Kepemilikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| A | Yayasan | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Yayasan | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Yayasan | 0 | 23 | 23 | 8 | 29 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D | Yayasan | 0 | 12 | 12 | 4 | 12 |
| | Pribadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Jumlah Type** | | 0 | 43 | 43 | 18 | 55 |
| **Non Type** | | 58 | 22 | 27 | 54 | 20 |
| **Jumlah Dayah Keseluruhan** | | 58 | 65 | 70 | 72 | 75 |
| **Jumlah Guru Dayah** | | 427 | 550 | 559 | 567 | 1187 |

*Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2023.*

Tabel 2.13 di atas menggambarkan kondisi jumlah dayah dan guru dayah di Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2018-2022. Dayah di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 berjumlah 58 dan keseluruhan dayah tersebut berstatus dayah Non Type, dikarenakan belum adanya tim akreditasi dayah dari Dinas Dayah Aceh untuk

Kabupaten Kota, dengan jumlah guru berjumlah 427 orang. Tim akreditasi dayah terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor. 451.44/770/2019 tentang Penetapan Type Dayah di Aceh. Pada Tahun 2020 tim akreditasi dayah tidak melaksanakan monitoring dikarenakan Pandemi Covid 19, maka jumlah type sama dalam kurun waktu 2 tahun tersebut dan Pada Tahun 2021 dan 2022 tim akreditasi dayah Aceh melakukan monitoring menentukan type dayah sesuai dengan kriteria dayah, jumlah tersebut menunjukkan peningkatan hingga Tahun 2022, jumlah dayah di Kota Lhokseumawe berjumlah 75 dayah, dengan type A sebanyak 6 dayah, Type B 8 dayah, dan Type C sebanyak 29 dayah, dan dayah Type D 12 dayah dengan jumlah guru sebanyak 1187 orang. Keseluruhan dayah tersebut semuanya berada di bawah kepemilikan yayasan. Sementara jumlah dayah bertambah dikarenakan munculnya dayah baru dari balai pengajian naik status/grade ke dayah. Pada Tahun 2022 jumlah dayah type A, C dan D bertambah yang berjumlah 18 dayah menjadi 55 dayah.

**Tabel 2.14**

**Jumlah Hafiz Hafizah yang dibina**
**Tahun 2018-2022**

| NO | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Hafizh hafizah | 20 | 15 | 10 | 13 | 10 |
| **Jumlah Hafizh Hafizhah** | | **20** | **15** | **10** | **13** | **10** |

*Sumber: Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, 2023.*

Dari Tabel 2.14 diatas dapat dilihat jumlah hafiz hafizah Kota Lhokseumawe yang mendapat pembinaan Tahun 2018 sebanyak 20 orang Tahun 2019 sebanyak 15 orang, Tahun 2020 sebanyak 10 orang dan Tahun 2021 sebanyak 13 orang. Dari Tahun 2019 sampai tahun 2022 mengalami pengurangan di karenakan hafiz tersebut ada yang pindah gampong, kelembaga lain, dan juga usianya sudah tidak sesuai lagi untuk di pembinaan/lembaga tersebut, yang di bina di lembaga hafiz untuk tingkatan SPM dan SMA. Salah satu kegiatan yang ada di Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Pembinaan Hafiz Hafizh yang di bina oleh lembaga pendidikan dan

pengembangan Tilawatil Quran (PPTQ). Dengan tujuan untuk mengkader calon peserta MTQ untuk tingkat Kota Lhokseumawe maupun MTQ tingkat Provinsi.

Adapun Jumlah Zakat, Infak, Sadaqah yang disalurkan dan Jumlah Zakat, Infak, Sadaqah (ZIS) yang terkumpul di Kota Lhokseumawe dari periode Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada Tabel 2.15.

**Tabel 2.15**

**Rasio ZIS yang Disalurkan dan ZIS yang Terkumpul Tahun 2018-2022**

| Uraian | Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Jumlah ZIS yang tersalurkan | 5.366.564.920 | 8.929.010.000 | 6.611.208.400 | 6.815.193.600 | 8.449.648.975 |
| Jumlah ZIS yang Terkumpul | 7.423.041.072 | 7.644.838.340 | 7.645.219.592 | 6.862.029.359 | 7.012.469.033 |
| Rasio | 0,72 | 1,16 | 0,84 | 0,99 | 1,20 |

*Sumber: Baitul Mal Kota Lhokseumawe, 2023*

Dari tabel 2.15 di atas dapat dilihat bahwa Jumlah ZIS yang disalurkan secara rata-rata mengalami peningkatan, serta ZIS yang terkumpul juga mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 jumlah ZIS mencapai rasio 1,20 yang berarti jumlah ZIS yang disalurkan melebihi jumlah yang terkumpul. Hal ini terjadi karena penyaluran ZIS Tahun 2018, 2020 dan 2021 lebih kecil penyalurannya dari ZIS yang terkumpul, menyebabkan terdapat sisa-sisa ZIS yang tidak habis dibagikan sehingga pada Tahun 2022 ZIS yang disalurkan lebih besar daripada ZIS yang terkumpul yaitu sebesar Rp.1.437.179.942,-

## B. Pelaksanaan Ibadah

Kondisi mesjid dalam Wilayah Kota Lhokseumawe yang melaksanakan sholat 5 waktu dan mesjid yang ada imam hafis dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.16**
**Jumlah Mesjid yang melaksanakan Sholat 5 Waktu dan Jumlah Mesjid yang ada Imam Hafiz Tahun 2018-2022**

| Tahun | Jumlah Mesjid yang ada imam hafiz | Jumlah Mesjid yang melaksanakan Sholat 5 Waktu | Jumlah Mesjid Se-Kota Lhokseumawe |
|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 51 | 51 |
| 2019 | 2 | 51 | 51 |
| 2020 | 3 | 51 | 51 |
| 2021 | 3 | 52 | 52 |
| 2022 | 3 | 52 | 52 |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan tabel di atas jumlah mesjid yang melaksanakan sholat fardhu 5 (lima) waktu di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebanyak 51 mesjid, pada Tahun 2021 terjadi 1 penambahan mesjid yaitu mesjid Teuku Muda Kuala di Gampong Blang Panyang kecamatan Muara Satu dan pada Tahun 2022 jumlah mesjid di Kota Lhokseumawe masih berjumlah 52 mesjid.

**Tabel 2.17**
**Data Mesjid Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| No | Kecamatan | Mesjid Agung | Mesjid Jamik | Mesjid Kecamatan | Mesjid Gampong | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Banda Sakti | 1 | 1 | 1 | 15 | 18 |
| 2. | Muara Dua | - | 1 | 2 | 8 | 11 |
| 3. | Muara Satu | - | 1 | 1 | 8 | 10 |
| 4. | Blang Mangat | - | 2 | 1 | 10 | 13 |
| Kota Lhokseumawe | | | | | | 52 |

*Sumber : Dinas Syariat Islam Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa jumlah mesjid di Kota Lhokseumawe Pada Tahun 2022 terbanyak di Kecamatan Banda Sakti yaitu 18 mesjid, sedangkan yang paling sedikit berada di Kecamatan Muara satu yaitu 10 mesjid. Jumlah Masjid di Kota Lhokseumawe berjumlah 52 semuanya aktif dalam melaksanakan shalat 5 waktu, namun demikian jamaah yang banyak terdapat pada masjid yang berada di Pinggir Jalan Raya Medan Banda Aceh yaitu Masjid besar Al-Ikhlas batuphat, Masjid Al-Munawwarah Blang Pulo, Masjid Jamik Taqwa Paloh, Masjid Teuku

Muda Kuala Blang Panyang, Masjid Jami' Babul Huda Panggoi, Masjid Meunasah Masjid, Masjid Al-Hikmah Cunda, Masjid Raudhatul Jannah Alue Awe, Masjid asyura Kandang, Masjid Jami' At Tahrir Ubudiyah Punteut. Selain masjid tersebut juga melaksanakan shalat 5 waktu. Selain Shalat 5 waktu juga mengadakan pengajian rutin untuk masyarakat, dan terdapat juga di sebagian Masjid lembaga pendidikan seperti TPA.

#### 2.1.3.1.2 Majelis Ulama

Kondisi Pelayanan umum urusan Keistimewaan dan Kekhususan bidang Majelis Ulama dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain Pendidikan Kader Ulama, Musyawarah Ulama dan Sosialisasi Fatwa.

**A. Pendidikan Kader Ulama (PKU)**

Majelis Permusyarawatan Ulama Kota Lhokseumawe telah menyelenggakan Pendidikan Kader Ulama (PKU) setiap tahun, dimana pada Tahun 2018 peserta yang mengikuti Pendidikan Kader Ulama (PKU) sebanyak 30 orang, peserta yang ikut berpartisipasi dalam PKU semuanya laki-laki. Pada Tahun 2022 Majelis Permusyarawatan Ulama Kota Lhokseumawe juga menyelenggarakan Pendidikan Kader Ulama (PKU), jumlah peserta yang ikut dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sebanyak 20 orang laki-laki serta 20 orang perempuan. Pada tahun 2022 peserta pendidikan kader ulama tidak lagi didominasi oleh peserta laki-laki akan tetapi pada tahun tersebut peserta perempuan juga mengikuti pendidikan kader ulama, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 2.18.

**Tabel 2.18**

**Jumlah Peserta PKU Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Tahun | Jumlah Peserta | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| | | Lk | Pr | |
| 1 | 2018 | 30 (orang) | - | |
| 2 | 2019 | 30 (orang) | - | |
| 3 | 2020 | 20 (orang) | - | |
| 4 | 2021 | 20 (orang) | 20 (orang) | |
| 5 | 2022 | 20 (orang) | 20 (orang) | |

*Sumber : Sekretariat MPU 2023*

## B. Musyawarah Ulama

Islam memandang musyawarah sebagai salah satu hal yang amat penting bagi kehidupan insani, bukan saja dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melainkan dalam kehidupan berumah tangga dan lain-lainnya. Ini terbukti dari perhatian Al-Qur'an dan Hadist yang memerintahkan atau menganjurkan umat pemeluknya supaya bermusyawarah dalam memecah berbagai persoalan yang mereka hadapi. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.19 di bawah ini:

**Tabel 2.19**

**Kegiatan Musyawarah Ulama**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Kegiatan | Tahun | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Sidang Paripurna Ulama | 32 | 40 | 40 | 40 | 30 | 182 |
| 2 | Rapat koordinasi MPU | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3 | Nadwah/Mubahasah Ilmiah/Simposium | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 |
| 4 | Muzakarah masalah Keagamaan | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 |
| 5 | Pengkajian Aliran Sempalan | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 6 | Rapat Pimpinan MPU | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 27 |
| 7 | Eksistensi Peran Ulama | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | **Jumlah** | **44** | **50** | **48** | **49** | **40** | **231** |

*Sumber : Sekretariat MPU, 2023.*

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Tahun 2018-2022 kegiatan musyawarah ulama di Kota Lhokseumawe telah dilakukan sebanyak 231 kali, dimana pada Tahun 2018 sebanyak 44 kali, , Tahun 2019 sebanyak 50 kali, Tahun 2020 sebanyak 48 kali, Tahun 2021 sebanyak 49 kali dan pada Tahun 2022 sebanyak 40 kali. Kegiatan musyawarah tersebut meliputi Sidang Paripurna Ulama dilakukan sebanyak 182 kali, Rapat Koordinasi MPU sebanyak 10 kali, Nadwah/Muhasah Ilmiah sebanyak 4 kali, Muzakarah Masalah Keagamaan sebanyak 4 kali, dan Rapat Pimpinan MPU sebanyak 27 kali.

**C. Sosialisasi Fatwa/Himbauan/Taushiah**

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe hingga saat ini telah melakukan kegiatan sosialisasi fatwa, Himbauan, Taushiah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Syariat Islam hasil dari MPU Aceh sebanyak 8 Fatwa/himbauan/Taushiah Tahun 2018, 7 Fatwa/himbauan/ Taushiah pada Tahun 2019, 13 Fatwa/himbauan/Taushiah pada Tahun 2020 dan 12 Fatwa/himbauan/Taushiah pada Tahun 2021, 2 Fatwa/himbauan/Tausiah pada Tahun 2022.

**2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib**

**2.1.3.2.1 Layanan Urusan Wajib Dasar**

**2.1.3.2.1.1 Pendidikan**

**A. Angka Partisipasi Kasar (APK)**

Partisipasi sekolah dapat dilihat dari Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan dari berbagai usia sedang sekolah pada jenjang pendidikan SD dan SMP per jumlah penduduk yang pada tahun pengamatan berada pada kelompok usia yaitu kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan SD dan SMP.

Berikut tabel Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.20**
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | SD/MI | | | | | |
| **1.3** | **APK SD/MI** | **104,48** | **103,49** | **105.63** | **101,74** | **107,71** |
| 2 | SMP/MS | | | | | |
| **2.3** | **APK SMP/MS** | **99,80** | **110.88** | **101** | **104,24** | **97,44** |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| **3.3** | **APK SMA/MA/SMK** | **93,20** | **95,22** | **91.8** | **95,79** | **87,25** |

*Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/*

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka partisipasi kasar pada tingkat SD/ MI tertinggi pada Tahun 2022 sebesar 107,71. Sedangkan terendah pada Tahun 2021 sebesar 101,74 artinya dari tabel diatas seluruh penduduk kelompok usia sekolah

dasar telah memperoleh pendidikan sekolah dasar. Begitu juga terjadi pada tingkat SMP/MS seluruh penduduk Kota Lhokseumawe usia Sekolah Menengah Pertama telah memperoleh pendidikan tertinggi terlihat pada Tahun 2019, yaitu angka partisipasi kasar sebesar 110,88 dan terendah pada Tahun 2022 sebesar 97,44. Untuk Tingkat Sekolah Menengah Atas, Angka Partisipasi Kasar SMA/ SMK/ MA tertinggi terjadi pada Tahun 2021 sebesar 95,79 dan terendah sebesar 87,25 yang terjadi pada Tahun 2022.

**B. Angka Partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Realisasi kinerja indikatornya antara lain angka partisipasi murni SD/MI dan SMP/MTs adalah jumlah siswa usia 7-12 Tahun dijenjang SD/MI dan SMP/MTs usia 13-15 Tahun per jumlah penduduk kelompok usia 7-12 Tahun SD/MI dan usia 13-15 Tahun SMP/MTs.

Bila APM kurang dari APK berarti terdapat murid SD diluar usia 7-12 Tahun (*underage*) atau di atas umur (*overage*). Dari tabel 2.21 menunjukkan bahwa APM lebih kecil dari APK, berarti masih ada penduduk yang sekolah di luar usia sekolah yang bersesuaian. Berikut Tabel Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.21**

**Angka Partisipasi Murni (APM)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | SD/MI | | | | | |
| 1,3 | **APM SD/MI** | **93,52** | **96,98** | **93,66** | **90,48** | **99,84** |
| 2 | SMP/MS | | | | | |
| 2,3 | **APM SMP/MS** | **79,17** | **88,79** | **79,05** | **78,10** | **96,69** |
| 3 | SMA/MA/SMK | | | | | |
| 3,3 | **APM SMA/MA/SMK** | **73,86** | **77,38** | **70,5** | **71,19** | **77,38** |

*Sumber : http://apkapm.data.kemdikbud.go.id/*

Dari Tabel 2.21 diatas, menunjukkan Angka Partisipasi Murni pada tingkat SD/MI tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 99,84.

Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2021 yaitu sebesar 90,48. Pada tingkat SMP/MTs angka partisipasi murni tertinggi terjadi pada Tahun 2022 yaitu 96,69. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 78,10. Pada tingkatan SMA/MA/SMK angka partisipasi murni tertinggi pada Tahun 2019 dan 2022 yaitu sebesar 77,38. Sedangkan angka terendah terjadi pada Tahun 2020 yaitu sebesar 70,5.

**C. Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah siswa kelompok usia tertentu yang bersekolah ditingkat jenjang pendidikan tertentu pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah tersebut. Selama periode Tahun 2018-2022, capaian Angka Partisipasi Sekolah (APS) menurut kelompok usia sekolah terus mengalami fluktuatif dengan rata–rata baik. Pada Tahun 2022, APS penduduk usia 13-15 (SMP) tahun mencapai 99,59 persen, ini berarti masih terdapat 0,41 persen penduduk usia 13-15 (SMP) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/sederajat namun tidak bersekolah lagi. APS terendah penduduk usia 13-15 (SMP) tahun terjadi pada tahun 2020 mencapai 99,25 persen sehingga terdapat 0,75 persen penduduk usia 13-15 (SMP) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SMP/sederajat namun tidak bersekolah lagi.

Selanjutnya tahun 2021 APS SD sebesar 99,98 persen artinya masih terdapat 0,02 persen penduduk usia 7-12 (SD) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SD/sederajat namun tidak bersekolah lagi. APS SD pada Tahun 2022 menunjukkan angka sebesar 99,84 persen artinya masih terdapat 0,16 persen penduduk usia 7-12 (SD) tahun yang masih aktif bersekolah pada tingkat SD/sederajat namun tidak bersekolah lagi. Dan Berikut Gambar Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

**Gambar 2.20**

**Angka Partisipasi Sekolah**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

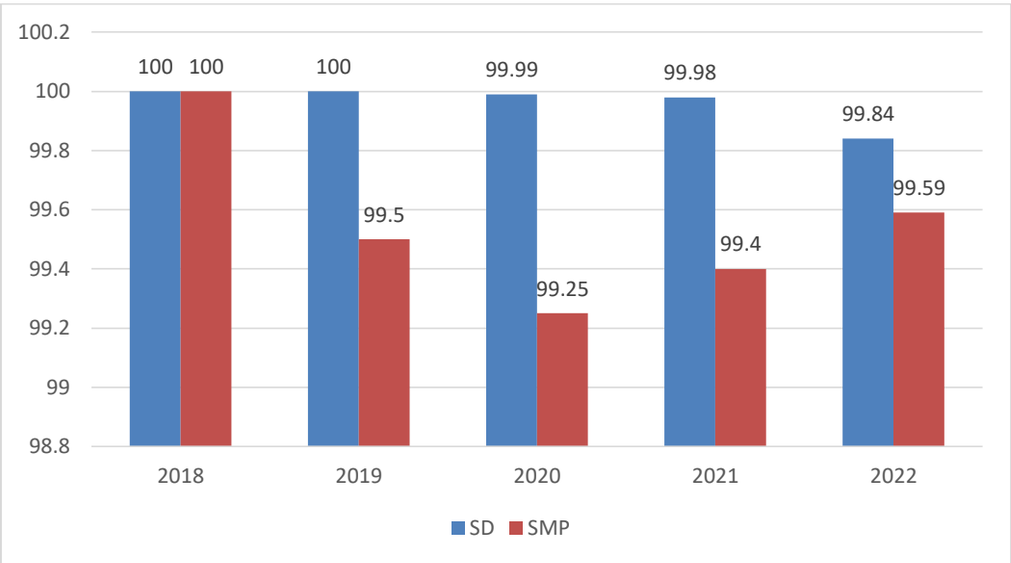


*Sumber: BPS Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.*

## D. Angka Kelulusan

Angka Kelulusan adalah jumlah siswa yang lulus dan dibuktikan dengan surat tanda tamat belajar/ijazah. Angka ini menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Angka Kelulusan di Kota Lhokseumawe di setiap tahunnya mengalami perubahan baik di tingkat SD/MI dan SMP/MTS, hal ini disebabkan ada murid yang pindah sekolah sebelum berakhir masa pendidikannya disekolah tersebut baik yang masuk ke Kota Lhokseumawe ataupun keluar dari Kota Lhokseumawe menuju ke Kabupaten/Kota lain sehingga jumlah dan lulusan murid di Kota Lhokseumawe berubah-ubah. untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 2.22 berikut ini:

**Tabel 2.22**

**Angka Kelulusan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Jenjang Pendidikan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | SD/MIN/MIS | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | SMP/MTS | 99.07% | 99.64% | 99 % | 99.50% | 100% |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.*

Tabel 2.22 di atas menggambarkan Angka Kelulusan siswa sesuai kelompok jenjang pendidikan SD/MI diwilayah Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018-2022. Kelulusan tertinggi di tingkat SD/MI sebesar 100% pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022. Sedangkan pada jenjang SMP/MTS, angka kelulusan sudah mencapai 100%. Pada Tahun 2022. Angka kelulusan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 dengan nilai mencapai 100% sedangkan terendah terjadi pada Tahun 2020 dengan nilai 99%.

**E. Ruang Sekolah Pendidikan Kondisi Bangunan Baik**

Sekolah atau bangunan Pendidikan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara Gedung atau bangunan dalam kondisi baik dengan total seluruh Gedung atau bangunan. Kondisi sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dalam wilayah Kota Lhokseumawe masih terdapat ruang kelas dengan kondisi rusak berat dan rusak ringan. Kondisi ruang kelas sekolah untuk jenjang pendidikan SD/MI Pada Tahun 2018 untuk SD/MI dengan kondisi baik terdapat 562 ruang kelas dan kondisi rusak terdapat 112 ruang kelas. Pada Tahun 2019 terdapat 562 dengan kondisi baik dan 112 dengan kondisi rusak. Untuk Tahun 2019 terdapat 587 ruang kelas dengan kondisi baik dan 107 dengan kondisi rusak. Pada Tahun 2020 terdapat 587 ruang kelas dengan kondisi baik dan 107 dengan kondisi rusak. Pada Tahun 2021 kondisi ruang baik mencapai 270 ruang serta 427 rusak ringan dan pada Tahun 2022 kondisi ruang baik mencapai 406 ruang serta 415 ruang kondisi rusak

Kondisi ruang kelas sekolah untuk jenjang Pendidikan SMP pada Tahun 2019 terdapat 365 dengan kondisi baik dan 55 dengan kondisi rusak. Pada Tahun 2020 terdapat 194 ruang kelas dengan kondisi baik dan 123 dengan kondisi rusak. Untuk Tahun 2021 terdapat 173 ruang kelas dengan kondisi baik dan 160 ruang dengan kondisi rusak. Berikut Tabel Kondisi Ruang Kelas Kondisi baik dan rusak Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.23**

**Kondisi Ruang Kelas Kondisi Baik**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Jenjang Pendidikan | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Baik | Rusak | Baik | Rusak | Baik | Rusak | Baik | Rusak | Baik | Rusak |
| 1 | SD/MI | 562 | 112 | 587 | 107 | 587 | 107 | 270 | 427 | 406 | 415 |
| 2 | SMP | - | - | 365 | 55 | 194 | 123 | 173 | 160 | 188 | 161 |
| 3 | SMA | - | - | 426 | 15 | 426 | 15 | - | - | - | - |

*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023.*

## F. Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan

Pembinaan pada siswa agar memperoleh prestasi baik di tingkat lokal, antar Kabupaten/Kota serta tingkat nasional selalu dilakukan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pembinaan ini berupa pemberian tambahan pembelajaran maupun pelatihan khusus menyangkut keterampilan siswa tersebut. Pembinaan terhadap siswa yang ada di Kota Lhokseumawe ritin dilakukan serta telah mencakup seluruh kegiatan yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pembina dari Sekolah yang ada di Kota Lhokseumawe.

**Gambar 2.21**
**Persentase Siswa Yang Memperoleh Pembinaan**
**Tahun 2018-2022**

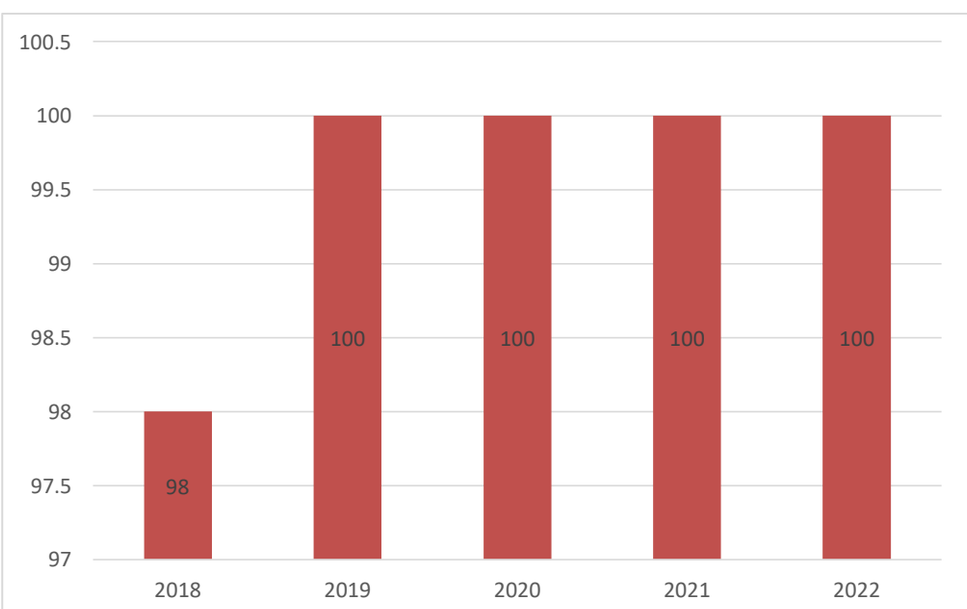


*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023.*

## G. Nilai Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan

Nilai kelulusan dan ketercapaian kurikulum pada Satuan pendidikan di Kota Lhokseumawe telah memenuhi target dengan mencapai 100 persen kelulusan pada Ujian Nasionl yang telah dilaksanakan selama ini.

**Gambar 2.22**

**Nilai Kelulusan dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

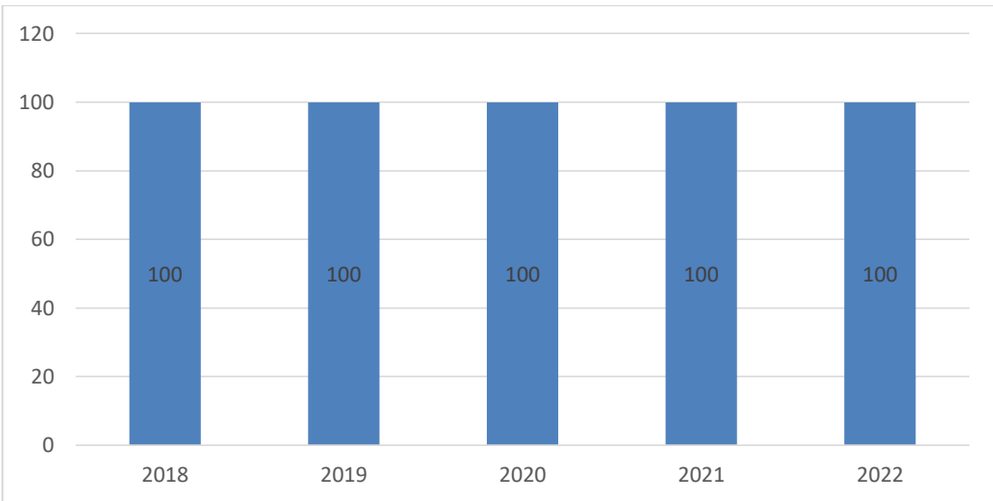


*Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Tahun 2023.*

Dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum bidang pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan terdapat penambahan 3 (tiga) indikator pencapaian SPM yaitu Iklim keamanan SD dan SMP, iklim kebhinekaan SD dan SMP dan iklim inklusivitas SD dan SMP.

### 2.1.3.2.1.2 Kesehatan

**A. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.**

Angka kematian bayi (*Infant Mortality Rate*/IMR) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 Tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada Tahun yang sama. AKB merupakan indikator yang biasa digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang di lakukan dalam rangka menurunkan AKB.

Berbagai faktor dapat menyebabkan adanya penurunan AKB, diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan berikut fasilitasnya. Hal ini disebabkan AKB sangat sensitif terhadap perbaikan pelayanan kesehatan. Selain perbaikan kondisi ekonomi yang tercermin dengan pendapatan masyarakat yang meningkat juga dapat berkontribusi melalui gizi yang berdampak pada daya tahan terhadap infeksi penyakit.

Pada tabel dibawah ini dapat dilihat dalam kurun waktu lima (5) Tahun terdapat Angka Kematian Bayi (AKB) Pada Tahun 2018 AKB kota Lhokseumawe 3.33% dan terjadi kenaikan pada Tahun 2019, mengalami kenaikan kembali di tahun 2021 menjadi 4,51% serta pada Tahun 2022 mengalami kenaikan mencapai 5.97%.

**Tabel 2.24**

**Angka Kematian Bayi (AKB) (%)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Kota Lhokseumawe | 3.33 | 4.74 | 0.51 | 4.51 | 5.97 |

*Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## B. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi adalah angka yang dihitung berdasarkan jumlah kematian bayi yang berumur kurang dari satu Tahun pada Tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada Tahun tertentu untuk setiap seribu kelahiran.

Angka Kelangsungan Hidup Bayi merupakan peluang bayi hidup sampai dengan usia satu Tahun. Angka kelangsungan hidup bayi Kota Lhokseumawe pada 2018 menjadi 996.67 hari. Pada Tahun 2019 terjadi sedikit penurunan menjadi 995.26 hari, namun pada Tahun 2020 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 999.77 hari sedangkan di Tahun 2021 dan 2022 Angka Kelangsungan Hidup Bayi Kota Lhokseumawe mengalami penurunan menjadi 995.49 hari dan 994.03 hari.

**Tabel 2.25**
**Angka Kelangsungan Hidup Bayi**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 Tahun | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKB | AKHB |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Banda Sakti | 8 | 1941 | 3.33 | 996.67 |
| | Muara Dua | 3 | 1129 | | |
| | Muara Satu | 2 | 697 | | |
| | Blang Mangat | 1 | 432 | | |
| 2019 | Banda Sakti | 7 | 1958 | 4.74 | 995.26 |
| | Muara Dua | 5 | 1144 | | |
| | Muara Satu | 5 | 624 | | |
| | Blang Mangat | 3 | 489 | | |
| 2020 | Banda Sakti | 1 | 1945 | 0.51 | 999.49 |
| | Muara Dua | 0 | 1135 | | |
| | Muara Satu | 0 | 792 | | |
| | Blang Mangat | 0 | 468 | | |
| 2021 | Banda Sakti | 3 | 1741 | 4.51 | 995.49 |
| | Muara Dua | 6 | 689 | | |
| | Muara Satu | 3 | 841 | | |
| | Blang Mangat | 4 | 257 | | |
| 2022 | Banda Sakti | 9 | 1786 | 5.97 | 994.03 |
| | Muara Dua | 4 | 916 | | |
| | Muara Satu | 6 | 669 | | |
| | Blang Mangat | 4 | 481 | | |

*Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## C. Angka Kematian Balita (AKABA)

Angka kematian balita (AKABA) adalah jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 Tahun yang dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup. angka kematian balita mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 Tahun. Menurunkan jumlah kematian anak dengan menghitung angka kematian balita dan angka kematian balita di suatu negara. Upaya percepatan penurunan Angka kematian balita dan Angka kematian balita menjadi prioritas Kementerian Kesehatan RI dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD). Upaya ini dilakukan dengan kegiatan program yang fokus, terintegrasi secara sektoral dan berkesinambungan sehingga berdampak ungkit besar terhadap penurunan AKB dan AKABA di Kota Lhokseumawe.

AKABA Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar 4.30, Tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 4.98 dan pada Tahun

2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi masing-masing 0.92 dan 0.56 dan pada tahun 2022 menjadi 0.52.

**Tabel 2.26**
**Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Kecamatan | Jumlah kematian BALITA usia 5 Tahun | Jumlah kelahiran hidup per Tahun | AKBA |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Banda Sakti | 8 | 1941 | 4.30 |
| | Muara Dua | 4 | 1129 | |
| | Muara Satu | 2 | 679 | |
| | Blang Mangat | 4 | 432 | |
| 2019 | Banda Sakti | 7 | 1958 | 4.98 |
| | Muara Dua | 6 | 1144 | |
| | Muara Satu | 5 | 624 | |
| | Blang Mangat | 3 | 489 | |
| 2020 | Banda Sakti | 1 | 1945 | 0.92 |
| | Muara Dua | 2 | 1135 | |
| | Muara Satu | 1 | 792 | |
| | Blang Mangat | 0 | 468 | |
| 2021 | Banda Sakti | 1 | 1741 | 0.56 |
| | Muara Dua | 0 | 689 | |
| | Muara Satu | 0 | 841 | |
| | Blang Mangat | 1 | 257 | |
| 2022 | Banda Sakti | 1 | 1786 | 0.52 |
| | Muara Dua | 0 | 916 | |
| | Muara Satu | 1 | 669 | |
| | Blang Mangat | 0 | 481 | |

*Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

**D. Angka Kematian Neonatal (AKN)**

Angka kematian neonatal (AKN) adalah jumlah bayi (umur 0–28 hari) yang meninggal disuatu wilayah pada kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Masalah utama penyebab kematian pada bayi dan balita adalah pada masa neonatus. Komplikasi yang menjadi penyebab kematian terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan infeksi. Pada Tahun 2018 angka kematian neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 13 jiwa dan angka kelahiran hidup 4.199 jiwa. Pada Tahun 2019 Angka kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup adalah 3 dimana jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 bulan) sebanyak 12 jiwa dan Angka kelahiran hidup 4..215 jiwa. Perhatian terhadap upaya penurunan angka kematian neonatal menjadi penting. Untuk mencapai target penurunan kematian bayi,

maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi bayi baru lahir menjadi prioritas utama.

## E. Angka Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Posyandu adalah wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh masyarakat untuk masyarakat yang dibimbing petugas terkait. Rasio posyandu per satuan balita Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 dengan rasio 6.23 pada Tahun 2019 yaitu dengan rasio 6.67. Sedangkan rasio posyandu terendah tahun 2020 dengan rasio 6.67. Rasio tahun 2021 menurun mencapai 4.99 dan tahun 2022 mengalami kenaikan kembali menjadi rasio 5.63. Posyandu per satuan balita Kota Lhokseumawe mengalami penurunan dikarenakan besarnya jumlah balita yang akan terus bertambah kurang diseimbangi oleh banyaknya jumlah posyandu.

**Tabel 2.27**
**Rasio Posyandu Per Satuan Balita**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Posyandu | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 2 | Jumlah Balita | 16210 | 151266 | 21626 | 20231 | 19948 |
| **Rasio** | | **6.23** | **6.67** | **6.67** | **4.99** | **5.63** |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## F. Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan

Rasio posyandu per 1000 balita perkecamatan Tahun 2018 s.d Tahun 2022 tertinggi di Kecamatan Muara Dua dengan rasio masing-masing pada Tahun 2018, 6.23 pada Tahun 2019 terjadi peningkatan sebanyak rasionya 6.67 pada Tahun 2020 menurun menjadi rasionya 4.67 pada Tahun 2021 dan 2022 naik kembali rasionya menjadi 5.06 terjadi peningkatan Kecamatan Muara Dua, hal ini dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk per kecamatan dan anggota KB aktif di kecamatan tersebut.

**Tabel 2.28**

**Rasio Posyandu Per Satuan Balita Per Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Kecamatan | Jumlah Posyandu | Jumlah Balita | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Muara Dua | 24 | 3333 | 6.23 |
| | Banda Sakti | 33 | 7857 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2110 | |
| | Muara Satu | 15 | 2910 | |
| 2019 | Muara Dua | 24 | 3315 | 6.67 |
| | Banda Sakti | 33 | 6655 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2260 | |
| | Muara Satu | 15 | 2896 | |
| 2020 | Muara Dua | 24 | 5589 | 4.67 |
| | Banda Sakti | 33 | 9292 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2759 | |
| | Muara Satu | 15 | 3990 | |
| 2021 | Muara Dua | 24 | 5227 | 5.06 |
| | Banda Sakti | 33 | 8392 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2562 | |
| | Muara Satu | 15 | 3750 | |
| 2022 | Muara Dua | 24 | 5236 | 5.06 |
| | Banda Sakti | 33 | 8352 | |
| | Blang Mangat | 29 | 2603 | |
| | Muara Satu | 15 | 3757 | |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Kota Lhokseumawe 2023.*

## G. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu per satuan Penduduk

Puskesmas dan jaringannya, sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 tentang kebijakan dasar Puskesmas mendefinisikan Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPT) Dinas Kesehatan kab/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pusat pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer, dan pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Puskesmas berkewajiban memberikan upaya kesehatan wajib yang terdiri :

1. upaya promosi kesehatan
2. upaya kesehatan lingkungan
3. upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana

4. upaya perbaikan gizi
5. upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
6. upaya pengobatan

Jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 6 Puskesmas. Pada Tahun 2020 bertambah 1 Puskesmas menjadi 7 puskesmas. Adapun Rasio Puskesmas dari Tahun 2018-2022 semakin tinggi. Berdasarkan rasio kecukupan puskesmas secara nasional sebesar 28.000 penduduk/puskesmas. Berarti ketersediaan puskesmas di Kota Lhokseumawe belum memadai, jumlah penduduk terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan sarana kesehatan lainnya hal ini perlu mendapat perhatian untuk pembangunan sarana kesehatan yang mencukupi dan memelihara kondisi fisik bangunan dan sanitasinya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dasar, Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan perorangan yang diberikan terdiri dari pelayanan rawat jalan dan rawat inap untuk Puskesmas tertentu jika dianggap diperlukan. Meskipun pelayanan kesehatan masyarakat merupakan inti dari puskesmas. pelayanan kesehatan perorangan juga menjadi perhatian dari pemerintah.Selain enam upaya kesehatan wajib yang harus diberikan puskesmas juga menyelenggarakan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas dapat berupa pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar (PONET). Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR), upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan olah raga, dan tata laksana kasus kekerasan terhadap anak (KIA). Upaya kesehatan pengembangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan yang ada diwilayah kerja.

**Tabel 2.29**

**Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Puskesmas | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 2 | Jumlah Poliklinik | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | Jumlah Pustu | 22 | 22 | 23 | 23 | 22 |
| 4 | Jumlah Penduduk | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| 5 | Rasio Puskesmas persatuan penduduk | 0.030 | 0.028 | 0.037 | 0.037 | 0.036 |
| 6 | Rasio Poliklinik persatuan penduduk | 0.059 | 0.048 | 0.052 | 0.053 | 0.052 |
| 7 | Rasio Pustu persatuan penduduk | 0.108 | 0.106 | 0.121 | 0.121 | 0.115 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

**H. Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit mengelompokkan Rumah Sakit berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan menjadi Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Adapun Rumah Sakit Khusus adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. Dalam wilayah Kota Lhokseumawe terdapat 11 (Sebelas) Rumah Sakit (RS), terdiri dari 1 Rumah sakit TNI AD/AU/AL/Polri dan 9 Rumah Sakit Swasta berikut data dimaksud.

**Tabel 2.30**

**Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Rumah Sakit Umum (Pemerintah) | - | - | - | - | - |
| 2 | Rumah Sakit Jiwa/ Paru dan Penyakit Khusus Lainnya Milik Pemerintah | - | - | - | - | - |
| 3 | Rumah Sakit AD/ AU/ AL/ Polri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 4 | Rumah Sakit Daerah | - | - | - | - | - |
| 5 | Rumah Sakit Swasta | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| 6 | Jumlah Seluruh Rumah Sakit | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 7 | Jumlah Penduduk | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| **Rasio** | | **0.044** | **0.048** | **0.053** | **0.053** | **0.052** |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

Untuk upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kota Lhokseumawe, Pemerintah Kota Lhokseumawe juga telah menganggarkan untuk Pembangunan Rumah Sakit Umum Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024 dari Dana Alokasi Umum bidang kesehatan.

**I. Rasio Dokter per satuan Penduduk**

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 21 menyebutkan bahwa pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendaya gunaan, pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Dalam peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang sistem kesehatan Nasional dijelaskan bahwa untuk melaksanakan upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah,jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan memutuskan bahwa tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik dan tenaga keteknisan medis. Gambaran mengenai jumlah, jenis dan kualitas serta penyebaran tenaga kesehatan di Kota Lhokseumawe dilakukan dengan cara pengumpulan data pada sarana pelayanan kesehatan. pengumpulan tenaga kesehatan meliputi tenaga kesehatan yang berstatus PNS, Pegawai Tidak Tetap, TNI/POLRI dan swasta.

Adapun rasio dokter persatuan penduduk di Kota Lhokseumawe berdasarkan pelayanan yang diberikan satu (1) orang dokter harus melayani pada Tahun 2018 adalah seorang dokter berjumlah 44 orang dengan jumlah penduduk 203.284 orang. pada Tahun 2019 adalah seorang dokter berjumlah 54 orang dengan jumlah penduduk meningkat menjadi 207.202 orang. pada Tahun 2020 adalah seorang dokter berjumlah meningkat 58 orang dengan jumlah penduduk meningkat menjadi 188.713 orang. Pada Tahun 2021 adalah jumlah dokter terus meningkat menjadi 67 orang dengan jumlah penduduk meningkat sebanyak 189.941 orang, dengan Rasio tahun 2021 meningkat menjadi 0.35 dan Tahun 2022 terjadi penurunan kembali menjadi rasio 0.17.

**Tebel 2.31**

**Rasio Dokter per Satuan Penduduk**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Dokter Umum | 44 | 54 | 58 | 67 | 32 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| Rasio | | 0.22 | 0.26 | 0.31 | 0.35 | 0.17 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## J. Rasio Tenaga Medis Per satuan Penduduk

Rasio tenaga medis Kota Lhokseumawe cenderung mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2018 rasio tenaga medis sebesar 0.27 dan pada Tahun 2019 naik menjadi 0.32, Tahun 2020 mengalami kenaikan sehingga rasio tenaga medis menjadi 0.38 serta pada Tahun 2021 rasio tenaga medis menjadi 0.47 dan Tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 0.26, terjadinya penurunan karena tidak adanya penambahan penerimaan tenaga medis pada Kota Lhokseumawe. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.32**
**Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Tenaga Medis | 55 | 66 | 72 | 89 | 49 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| **Rasio** | | **0.27** | **0.32** | **0.38** | **0.47** | **0.26** |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

**K. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani**

Komplikasi kebidanan adalah kesakitan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan atau janin dalam kandungan baik langsung maupun tidak langsung, termasuk penyakit menular dan tidak menular yang dapat mengancam jiwa ibu atau janin yang tidak disebabkan oleh trauma kecelakaan. Komplikasi kebidanan antara lain pecah ketuban dini, pendarahan, pervaginan, hipertensi dalam kehamilan (systole>140 mmHg, diastole>90 mmHg) dengan atau tanpa edema pre tibial, ancaman persalinan prematur, infeksi berat dalam kehamilan, distosia (persalinan macet, persalinan tidak maju dan infeksi masa nifas).

Pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah pelayanan kepada ibu dengan komplikasi kebidanan untuk mendapatkan perlindungan/pencegahan dan penanganan definitif sesuai standar oleh tenaga kesehatan kompeten pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencegahan dan penanganan komplikasi kebidanan adalah cakupan penanganan komplikasi kebidanan (cakupan PK). Indikator ini mengukur kemampuan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara profesional kepada ibu hamil, bersalin nifas dengan komplikasi.

Berdasarkan data bahwa cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani pada Tahun 2018 cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani sebesar 0.58% dan pada Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 0.56% serta Tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 0.67% sedangkan Tahun 2021 mencapai persentasenya

59.9%, dan tahun 2022 mengalami penurunan kembali menjadi 54.7%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.33**

**Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja | 561 | 549 | 649 | 499 | 481 |
| 2 | Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 971 | 989 | 964 | 833 | 879 |
| | **Persentase** | **0.58** | **0.56** | **0.67** | **59.9** | **54.7** |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## L. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan

Upaya kesehatan ibu bersalin dilaksanakan dalam rangka mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), Dokter umum dan bidan serta diupayakan dilakukan difasilitas pelayanan kesehatan. Pertolongan persalinan adalah proses pelayanan persalinan yang dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan. Persalinan yang dilakukan disarana pelayanan kesehatan dapat menurunkan resiko kematian ibu saat persalinan karena ditempat tersebut persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan dan tersedia sarana kesehatan yang memadai sehingga dapat menangani komplikasi yang mungkin terjadi pada saat persalinan yang membahayakan nyawa ibu dan bayi.

Pencapaian upaya kesehatan ibu bersalin diukur melalui indikator persentasi persalinan ditolong tenaga kesehatan terlatih (cakupan Pn). Indikator ini memperlihatkan diantaranya tingkat kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan persalinan berkualitas yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih. peningkatan cakupan persalinan perlu dilakukan melalui upaya pelaksanaan program unggulan kesehatan Ibu diantaranya adalah kemitraan bidan dan dukun, peningkatan persalinan difasilitas pelayanan kesehatan melalui jaminan program persalinan, model

rumah tunggu dengan puskesmas didaerah terpencil untuk pencegahan terhadap komplikasi yang terjadi selama persalinan.

Revitalisasi bidan koordinator melalui pelaksanaan supervise fasilitatif untuk peningkatan mutu dan kualitas tenaga penolong persalinan serta peningkatan kualitas surveilans kesehatan ibu melalui pelaksanaan pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak (PWS KIA). Bila ditelusuri dari tabel dibawah ini maka Kota Lhokseumawe menunjukkan peningkatan yang sangat baik untuk cakupan pertolongan persalinan. Peningkatan ini dihubungkan dengan semakin dekatnya akses kefasilitas kesehatan dan ketersediaan tenaga profesional yang memadai diikuti dengan sistem informasi yang lebih baik.

Cakupan jumlah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/nakes dari Tahun 2018 dengan rasio 0.91 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi rasio 0.97 namun tahun 2022 mengalami penurunan menjadi rasio 0.91. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.34**

**Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi Kebidanan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Kecamatan | Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes | Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Muara Dua | 1127 | 1197 | 0.91 |
| | Banda Sakti | 1944 | 1992 | |
| | Blang Mangat | 433 | 587 | |
| | Muara Satu | 694 | 859 | |
| 2019 | Muara Dua | 1141 | 1209 | 0.89 |
| | Banda Sakti | 1957 | 2027 | |
| | Blang Mangat | 489 | 598 | |
| | Muara Satu | 622 | 875 | |
| 2020 | Muara Dua | 1133 | 1976 | 0.94 |
| | Banda Sakti | 1943 | 1188 | |
| | Blang Mangat | 468 | 583 | |
| | Muara Satu | 796 | 852 | |
| 2021 | Muara Dua | 612 | 707 | 0.97 |
| | Banda Sakti | 1737 | 1791 | |
| | Blang Mangat | 498 | 528 | |
| | Muara Satu | 840 | 772 | |

| Tahun | Kecamatan | Jumlah Ibu Bersalin Yang ditolong Oleh Nakes | Jumlah seluruh sasaran Ibu bersalin di wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | Rasio |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Muara Dua | 913 | 1084 | 0.91 |
| | Banda Sakti | 1784 | 1804 | |
| | Blang Mangat | 481 | 532 | |
| | Muara Satu | 663 | 778 | |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

**M. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)**

Indikator lain untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan imunisasi adalah *Universal Child Immunization* atau yang biasa disingkat UCI. Imunisasi dasar pada bayi seharusnya diberikan pada anak sesuai umurnya. Pada kondisi ini diharapkan sistem kekebalan tubuh dapat berkerja secara optimal. Namun demikian pada kondisi tertentu beberapa bayi tidak mendapatkan imunisasi dasar secara lengkap. Kelompok inilah yang disebut *drop out* (DO) imunisasi. Bayi yang mendapat imunisasi DPT/HB 1 awal pemberian imunisasi, namun tidak mendapatkan imunisasi campak disebut *drop out* Rate DPT/HB1 Campak.

UCI adalah gambaran suatu desa atau kelurahan dimana pada Tahun 2018 desa uci sebanyak 30 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe mencapai 44.1%, pada Tahun 2019 terdapat 5 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe yaitu 7.35% dan pada Tahun 2020 terdapat 13 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 19.1% serta pada Tahun 2021 terdapat 11 desa dari 68 desa di Kota Lhokseumawe sehingga mencapai 16.2%, dan tahun 2022 terdapat 9 desa dari 68 desa dengan 13.52%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.35**

**Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Jumlah Desa | Desa/Kelurahan UCI% | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun | | | | |
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Cakupan Desa/ Kelurahan UCI | 68 | 30 | 5 | 13 | 11 | 9 |
| Persentase | | | 44.1 | 7.35 | 19.1 | 16.2 | 13.52 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## N. Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Balita dengan gizi buruk berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Gejala awal sering tidak jelas hanya terlihat bahwa berat badan anak tersebut lebih rendah dari anak usianya. Rata-rata berat badannya hanya sekitar 60-80% dari berat badan ideal. Ciri-ciri klinis yang biasanya menyertainya antara lain: kenaikan berat badan berkurang bahkan terus menurun, ukuran lingkaran lengan atas menurun, maturasi tulang terlambat, rasio berat terhadap tinggi normal atau cenderung menurun, tebal lipat kulit normal atau semakin berkurang. Seluruh balita gizi buruk di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018-2022 seluruhnya mendapat perawatan mencapai 100%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.36**

**Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah balita gizi buruk yang mendapat perawatan | 5 | 4 | 7 | 8 | 33 |
| 2 | Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan | 5 | 4 | 7 | 8 | 33 |
| **Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan** | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## O. Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Di Imunisasi Campak

Kementerian Kesehatan menetapkan bahwa ada beberapa penyakit yang dapat di cegah dengan imunisasi diantaranya penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus campak, golongan paramyxovirus penularan dapat terjadi melalui udara yang telah terkontaminasi oleh droplet (ludah) orang yang telah terinfeksi. Sebagian besar kasus campak menyerang anak–anak usia pra sekolah dan usia SD. Jika seseorang pernah menderita campak, maka dia akan mendapat kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun yang mendapat imunisasi campak pada Tahun 2018 sebanyak 3.499 atau 28.31%,

namun pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 terjadi penurunan menjadi sebanyak 2.574 atau 22.31% dan sebanyak 2627 atau 22.46%. Namun pada Tahun 2021 dan Tahun 2022 terjadi peningkatan sehingga pada Tahun 2022 menjadi 56.95%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.37**
**Cakupan Persentase Anak Usia I Tahun Yang Mendapat Imunisasi Campak Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah bayi imunisasi campak usia 1 Tahun | 3499 | 2574 | 2627 | 2406 | 2413 |
| 2 | Jumlah anak usia I Tahun pada wilayah dan Tahun yang sama | 12050 | 11540 | 11695 | 4299 | 4237 |
| | **Persentase** | **28.31** | **22.31** | **22.46** | **55.97** | **56.95** |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

**P. Cakupan penemuan dan penanganan penderita Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk**

Polio disebabkan oleh infeksi virus yang menyerang sistem syaraf sehingga penderita mengalami kelumpuhan. Pada umumnya menyerang anak berusia 0-3 Tahun, ini ditandai dengan munculnya demam, lelah, sakit kepala, mual, kaku di leher, serta sakit di tungkai dan lengan. AFP merupakan kelumpuhan yang sifatnya flaccid yang bersifat lunglai, lemas atau layuh (bukan kaku), atau terjadi penurunan kekuatan otot secara mendadak. Sedangkan non polio AFP adalah kasus lumpuh layu akut yang di duga kasus polio sampai di buktikan dengan pemeriksaan laboraturium bukan kasus polio. Pada Tahun 2018 dan 2019 kasus SFP non polio yang di laporkan di Kota Lhokseumawe sebanyak 2 kasus atau 0.003% dan Tahun 2020 terdapat 1 kasus atau 0.001% sedangkan di Tahun 2021 terjadinya kasus AFP meningkat menjadi 4 kasus atau 0.003% dan tahun 2022 dilaporkan tidak terdapat kasus SFP non polio, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.38**
**Cakupan Persentase Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kasus SFP non Polio yang dilaporkan | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 2 | jumlah penduduk < 15 Tahun | 63208 | 59014 | 64756 | 144294 | 58338 |
| | **Persentase** | **0.003** | **0.003** | **0.001** | **0.003** | **0** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

**Q. Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani**

Pneumonia adalah penyakit pada paru-paru di mana pulmonary alveolus (alveoli) yang bertanggung jawab menyerap oksigen dari atmosfer meradang dan terisi oleh cairan. Radang ini disebabkan oleh kuman pneumococcus, staphylococcus, streptococcus dan virus. Gejala penyakit pneumonia yaitu menggigil, demam,sakit kepala,batuk, mengeluarkan dahakdan sesak nafas. Populasi yang rentan terserang pneumonia adalah anak-anak usia kurang dari 2 Tahun, usia lanjut lebih dari 65 Tahun dan orang yang memiliki masalah kesehatan (malnutrisi, gangguan imonulogi).

Adapun cakupan balita pneumonia dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Cakupan penemuan Pneumonia pada Balita Kota Lhokseumawe tertinggi terjadi pada Tahun 2019 sebesar 8.23% pada Tahun 2018 sebesar 2.54% pada Tahun 2020 menurun menjadi 0.04% sedangkan di Tahun 2021 dengan jumlah balita pneumonia sebanyak 22 orang, maka persentasenya sebanyak 2.43% dan pada Tahun 2022 terjadi penurunan dari tahun 2021 menjadi 0.72%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.39**

**Cakupan Penemuan Pneumonia Pada Balita Kota Lhokseumawe Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penderita balita pneumonia yang ditangani | 55 | 73 | 1 | 22 | 16 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita pneumonia balita di suatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 2163 | 886 | 2222 | 902 | 2223 |
| | **Persentase** | **2.54** | **8.23** | **0.04** | **2.43** | **0.72** |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## R. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri mycobacterium tuberculosis, penyakit ini menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil tuberculosis. Beban penyakit Tuberkulosis dapat di ukur dengan case notification rate (CNR) dan prevalensi dan mortalitas. Pada Tahun 2018 sebanyak 161 kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 328 kasus. Pada Tahun 2019 terdapat 136 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 238 perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 0.57. Sementara pada Tahun 2020 terdapat 128 kasus penderita baru TBC BTA (+) dari 216 kasus perkiraan penderita baru TBC BTA (+) atau 59.2%. sedangkan tahun 2021 berjumlah 569 orang kasus dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dengan persentasenya 51.03% dan tahun 2022 meningkat menjadi 83.05% dengan 833 penderita baru TBC BTA (+) dari perkiraan penderita baru TBC BTA (+) sebanyak 1003 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.40**

**Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati di satu wilayah kerja elama 1 Tahun | 161 | 136 | 128 | 569 | 833 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) dalam kurun wkt yang sama | 697 | 238 | 216 | 1115 | 1003 |
| | **Persentase** | 23,7 | 57,1 | 59,2 | 51.03 | 83.05 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## S. Tingkat Prevelensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe tertinggi pada dengan jumlah kasus penderita TBC Tahun 2022 sebanyak 833 orang dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama sebanyak 191.396 orang dengan tingkat prevalensi 435.2 dan kasus tingkat prevalensi Tuberkulosis per 100.000 penduduk di Kota Lhokseumawe terendah adalah pada

Tahun 2019 sebesar 111 dengan jumlah kasus penderita TBC sebanyak 230 kasus dari jumlah penduduk 207.202 pada Tahun tersebut. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.41**

**Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Banyaknya kasus penderita TBC (baru dan lama) | 633 | 230 | 297 | 569 | 833 |
| 2 | Jumlah Penduduk pada kurun waktu yang sama | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| | **Persentase** | 311.3 | 111 | 157.4 | 299.6 | 435.2 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## T. Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

Tingkat kematian karena tuberkulosis per 100.000 tuberkulosis di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 terdapat 2 kasus pasien TB yang meninggal atau dengan tingkat kematian sebesar 0.98. Sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 tingkat kematian karena tuberkulosis menurun sebesar 0.48 dan 0.52 dengan kasus kematian hanya 1 kasus. Sedangkan Tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 6 kasus dengan tingkat kematian 3.15 dengan jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama berjumlah 189.941 orang. Tahun 2022 mengalami penurunan dengan jumlah pasien TB yang meninggal sebanyak 2 pasien atau tingkat kematian karena Tuberkulosis 1.04. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.42**

**Tingkat Kematian Karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Paisen TB yang meninggal | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 2 | Jumlah penduduk pada kurun waktu yang sama | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| | **Persentase** | 0,98 | 0,48 | 0.52 | 3.15 | 1.04 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## U. Proporsi Kasus Tuberculosis Yang Di Obati Dan Sembuh Dalam Program DOTS

Angka Keberhasilan Pengobatan Penderita TB Paru BTA(+) adalah salah satu upaya mengendalikan TB Paru yaitu dengan pengobatan. Indikator yang digunakan sebagai evaluasi pengobatan, Yaitu angka keberhasilan pengobatan ini di bentuk dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap ada. Pada Tahun 2018, 2019 dan 2020 pasien baru TB paru masing-masing sebesar 161 pasien, 136 pasien dan 216 pasien pada tahun 2021 pasien baru TB paru masing-masing sebesar 277 pasien BTA mendapat pengobatan sebanyak 312 pasien dengan persentase menurun 88%, pada tahun 2022 jumlah pasien meningkat menjadi 344 pasien BTA dan semuanya mendapat pengobatan melalui DOTS. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.43**

**Proporsi Jumlah Kasus Tuberculosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS Kota Lhokseumawe Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pasien tuberkulosis BTA yang mendapat pengobatan melalui DOTS | 161 | 136 | 216 | 277 | 344 |
| 2 | Jumlah pasien baru TB paru BTA yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut | 161 | 136 | 216 | 312 | 344 |
| | Persentase | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## V. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Penyakit Demam Berdarah Dengeu (DBD) adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dengue, yang masuk keperedaran darah manusia melalui gigitan nyamuk dari genus Aedes, misalnya Aedes aegypty atau Aedes albopictus. Penyakit DBD dapat muncul sepanjang Tahun dan dapat menyerang seluruh kelompok umur. Penyakit ini berkaitan dengan kondisi lingkungan dan prilaku masyarakat. Pada Tahun 2018-2022 Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe 100%. Jumlah penderita DBD yang ditemukan semua ditangani sesuai SOP dan jumlah nya setiap Tahun menurun. Kasus DBD pada Tahun

2018 sebesar 111 kasus. Pada tahun 2019 sebesar 84 orang pada tahun 2020 sebesar 79 orang dan tahun 2021 terjadinya penurunan sebesar 46 orang. Pada tahun 2022 Jumlah penderita DBD yang ditemukan semua ditangani sesuai SOP menurun menjadi 47 orang. Kesimpulan dari jumlah kasus tersebut masih perlu upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan di rumah sakit dan puskesmas (dokter, perawat dan lain–lain) termasuk peningkatan sarana–sarana penunjang diagnostik dan penatalaksanaan bagi penderita di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.44**
**Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wil. Kerja selama 1 Tahun | 111 | 84 | 79 | 58 | 47 |
| 2 | Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam Kurun waktu yang sama | 111 | 84 | 79 | 58 | 47 |
| | Persentase | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

**W. Penderita Diare Di Temukan Dan Ditangani**

Diare merupakan penyakit endemis dan juga merupakan penyakit potensial KLB yang sering di sertai kamatian. Seseorang di katakan menderita diare bila feses lebih berair dari biasanya atau air besar lebih dari tiga kali dan berair tapi tidak berdarah dalam waktu 24 jam. Salah satu penyebab diare pada masyarakat adalah prilaku hidup sehat yang belum baik masih banyak sampah yang buang bukan pada tempatnya, buang air besar tidak dijamban serta kebiasaan minum air mentah dan makan yang tidak didahului dengan cuci tangan terlebih dahulu. Penderita diare yang ditangani adalah jumlah penderita yang datang dan dilayani disarana kesehatan pada suatu wilayah.

Gambaran tabel di bawah ini menunjukan cakupan penderita diare yang ditangani dengan kasus terendah terjadi pada Tahun

2018 sebesar 18 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 1018 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5.489 kasus. pada Tahun 2019 sebesar 46 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 2555 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5516 kasus pada Tahun 2020 sebesar 33 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 1185 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5700 kasus pada Tahun 2021 sebesar 55 % dengan jumlah penderita diare sebanyak 3071 kasus dari jumlah perkiraan penderita diare sebanyak 5555 kasus dan Tahun 2022 cakupan penderita Diare yang ditangani sebanyak 28.49% dengan jumlah penderita diare sebanyak 2568 kasus dari 9014 jumlah perkiraan penderita diare. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.45**

**Cakupan Penderita Diare Yang Ditangani**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penderita diare yang datang dan dilayani disaran kesehatan dan kader suatu wilayah tertentu dalam waktu satu Tahun | 1018 | 2555 | 1885 | 3071 | 2568 |
| 2 | Jumlah perkiraan penderita diare pada satu wilayah tertentu dalam waktu yang sama (10% dari angka kesakitan diare x jumlah penduduk) | 5489 | 5516 | 5700 | 5555 | 9014 |
| | Persentase | 18 | 46 | 33 | 55 | 28.49 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

**X. Angka Kesakitan Malaria Per 100.000 Penduduk**

Malaria adalah penyakit infeksi yang di sebabkan oleh plasmodium yang hidup dan berkembang baik dalam sel darah merah manusia, di tularkan oleh nyamuk malaria (Anopheles) betina, dapat menyerang semua orang baik laki-laki atau pun perempuan pada semua golongan umur dari bayi,anak – anak dan orang dewasa. Pengobatan malaria harus tepat waktu yang sesuai dengan acuan program pengendalian malaria. Pengobatan yang efektif adalah

pemberian ACT (artemicin-basedcombination therapy) pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus di minum habis dalam 3 hari.

Pada Tahun 2018-2021 di Kota Lhokseumawe tidak ditemukan penduduk yang menderita malaria atau 0 kasus dan tahun 2022 terdapat 2 kasus penderita malaria. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.46**

**Cakupan Angka Kejadian Penderita Malaria Kota Lhokseumawe Tahun 2018 - 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penduduk yang menderita malaria pada Tahun tertentu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Jumlah penduduk pada pertengahan Tahun | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| | Persentase | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.04 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## Y. Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari Total Populasi

HIV/AIDS merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi Humam Immunodeficiency virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan ketahanan tubuh sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sebelum memasuki fase AIDS, penderita terlebih dahulu dinyatakan sebagai HIV positif. Jumlah HIV positif yang ada di masyarakat dapat di ketahui melalui 3 metode, yaitu pada layanan voluntary, counseling, and testing (VCT), sero survey, dan survei terpadu biologis dan prilaku (STBP).

Gambaran kasus HIV/AIDS di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 s.d 2022 mengalami naik turun. Pada Tahun 2018 terdapat 4 kasus Pasien HIV/AIDS dan 2019 bertambah menjadi 7 kasus dan Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 3 kasus. sedangkan Tahun 2021 Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu mencapai 8 kasus dan Tahun 2022 Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu

tertentu mencapai 4 kasus. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.47**

**Prevalensi HIV/AIDS Dari Total Populasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pasien HIV dan AIDS di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu x | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 |
| 2 | Jumlah penduduk disatu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| | **Persentase** | 0,001 | 0,003 | 0,001 | 0.004 | 0.002 |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## Z. Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin

Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin, dan hampir miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2018 adalah 145%, pada Tahun 2019 adalah 121%, pada Tahun 2020 menurun menjadi sebesar 83% dan pada Tahun 2021 kembali meningkat menjadi sebesar 85%, namun pada Tahun 2022 kembali menurun menjadi 71.31%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.48**

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1 | 34.845 | 27.895 | 18.923 | 19.953 | 16.422 |
| 2 | Jumlah seluruh penduduk miskin | 23.880 | 23.050 | 22.690 | 23.380 | 23.030 |
| | **Persentase** | **145** | **121** | **83** | **85** | **71.31** |

*Sumber: Dinas Kesehatan, Tahun 2023.*

## AA. Cakupan Kunjungan Bayi

Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan setiap Tahunnya. Pada Tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 83.4%, Pada Tahun 2019 Cakupan kunjungan bayi di Kota Lhokseumawe turun lagi menjadi 56.7% Tahun 2020 59.5%. sedangkan Tahun 2021 mencapai 2265 dan persentasenya 52.7 %, namun pada Tahun 2022 megalami penurunan menjadi 51.4%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.49**

**Cakupan Kunjungan Bayi Menurut Kecamatan Dan Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Kecamatan | Puskesmas | Kunjungan Bayi | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
| | | | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % | Jumlah | % |
| 1 | Banda Sakti | Banda Sakti | 1206 | 87.4 | 940 | 72.2 | 965 | 75.9 | 769 | 59 | 777 | 63.1 |
| | | Mongeudong | 417 | 74.3 | 449 | 82.7 | 292 | 55.1 | 377 | 68 | 369 | 68.0 |
| 2 | Muara Dua | Muara Dua | 1088 | 96.4 | 562 | 50.5 | 783 | 72.3 | 673 | 68.8 | 633 | 56.7 |
| 3 | Muara Satu | Muara Satu | 422 | 60.5 | 285 | 35.9 | 281 | 36.1 | 311 | 40 | 269 | 33.7 |
| 4 | Blang Mangat | Blang Mangat | 245 | 87.8 | 110 | 29.7 | 86 | 24.0 | 77 | 21 | 101 | 27.6 |
| | | Blang Cut | 125 | 81.7 | 95 | 52.5 | 87 | 50.6 | 58 | 33 | 47 | 21.8 |
| **Jumlah** | | | 3503 | 83.4 | 2441 | 56.7 | 2494 | 59.5 | 2268 | 52.7 | 2196 | 51.4 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## BB. Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas

Pada Tahun 2021 jumlah Puskesmas di Kota Lhokseumawe sebanyak 7 unit yang tersebar di 4 (empat) kecamatan dan terdiri dari 68 Gampong, diantaranya Kecamatan Muara Dua sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 17 gampong, Kecamatan Banda Sakti sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 18 gampong, Kecamatan Blang Mangat sebanyak 2 (dua) unit dengan jumlah gampong sebanyak 22 gampong dan pada Kecamatan Muara Satu sebanyak 1 (satu) unit dengan jumlah gampong sebanyak 11 gampong. Jika dibandingkan jumlah puskesmas dengan jumlah kecamatan dalam Kota Lhokseumawe dapat mencapai hingga 175% kesediaan puskesmas dalam Kota Lhokseumawe.

Cakupan Pembantu Puskesmas dalam Wilayah Kota Lhokseumawe sebanyak 20 (dua puluh) unit yang tersebar di 68 gampong dengan persentase sebesar 29%. Adapun jumlah

Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dalam Wilayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat 2.50 berikut:

**Tabel 2.50**

**Cakupan Puskesmas dan Pembantu Puskesmas Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| No | Kecamatan | Jumlah Puskesmas | Jumlah Gampong | Jumlah Pembantu Puskesmas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Muara Dua | 2 | 17 | 4 |
| 2 | Banda Sakti | 2 | 18 | 8 |
| 3 | Blang Mangat | 2 | 22 | 4 |
| 4 | Muara Satu | 1 | 11 | 4 |
| | Jumlah | 7 | 68 | 20 |
| | Persen | 175 | 34 | 29 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## CC. Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4

Pelayanan kesehatan ibu hamil di wujudkan melalui pemberian pelayanan antenatal sekurang–kurangnya 4 kali selama masa kehamilan, dengan distribusi waktu minimal 1 kali pada trisemester pertama (usia 0 - 12 minggu),minimal 1 kali pada trisemester kedua (usia kehamilan 12–24 minggu) dan minimal 2 kali pada trisemester ke tiga (usia kehamilan 24 minggu – lahir).

Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan atau janin,berupa deteksi dini faktor risiko,pencegahan dan penanganan dini komplikasi kehamilan. Pelayanan antenatal di upayakan agar memenuhi standar kualitas yaitu:

a. penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan
b. pengukuran tekanan darah
c. pengukuran lingkar lengan atas (LILA)
d. pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri)
e. penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus toksoid sesuai status imunisasi
f. pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan
g. penentuan presentasi janin dan denyut jantung (DJJ)
h. pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling termasuk keluarga berencana)

i. pelayanan tes laboraturium sederhana, minimaltes hemoglobin darah(HB), pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah di lakukan sebelumnya) dan tatalaksana kasus.

Capaian pelayanan kesehatan ibu hamil dapat di nilai dengan menggunakan indikator cakupan K1 dan K4. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Sedangkan cakupan K4 adalah jumlah ibu hamilyang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit 4 kali sesuai jadwal yang di anjurkan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu Tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilan ke tenaga kesehatan.

Dari tabel di bawah ini terlihat pada Tahun 2020 K4 meningkat menjadi sebesar 95.41% menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu hamil yang di berikan oleh tenaga kesehatan. Pada tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa cakupan K4 dari Tahun ke Tahun relatif tidak terlalu stabil. Tahun 2018 cakupan kunjungan ibu hamil sebesar 94.96% dan Tahun 2019 sebesar 90.45% selanjutnya Tahun 2020 sebesar 95.41%, sedangkan Tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 96% namun tahun 2022 cakupan kunjungan ibu hamil k4 terjadi penurunan menjadi 92.5%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.51**

**Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Ibu Hamil yang memperoleh pelayanan antenatal K4 | 4426 | 4472 | 4597 | 4191 | 4069 |
| 2 | Jumlah sasaran Ibu Hamil | 4661 | 4944 | 4818 | 4366 | 4397 |
| **Persentase** | | 94,9 | 90,4 | 95,4 | 96 | 92.5 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

**DD. Cakupan Pelayanan Nifas**

Nifas adalah periode mulai dari 6 jam sampai 42 hari pasca persalinan. Pelayanan kesehatan ibu nifas sesuai standar yang di lakukan sekurang – kurangnya 3 (tiga) kali sesuai jadwal yang di anjurkan yaitu pada 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan pada hari ke – 4 sampai dengan hari ke – 28 pasca persalinan pada hari ke -29 sampai dengan hari ke – 42 pasca persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan meliputi :

a. pemeriksaan tanda vital (tekanan darah,nadi,nafas dan suhu)
b. pemeriksaan tinggi puncak rahim (fundus uteri)
c. pemeriksaan lokhia dan cairan pervaginam lain
d. pemeriksaan payudara dan pemberian anjuran ASI eksklusif
e. pemberian komunikasi informasi dan edukasi (KIE) kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir, termasuk keluarga berencana
f. pelayanan keluarga berencana pasca persalinan
g. keberhasilan upaya kesehatan ibu nifas di ukur melalui indikator cakupan pelayanan kesehatan ibu nifas (KF3). Indikator ini menilai kemampuan dalam menyediakan pelayanan kesehatan ibu nifas yang berkualitas sesuai standar.

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa cakupan kunjungan nifas (KF3) dalam kurun waktu 5 Tahun terakhir cenderung fluktuatif, pada Tahun 2018 cakupan pelayanan nifas 83.5% pada Tahun 2019 kembali turun menjadi 83.03% dan Tahun 2020 naik menjadi 90.1%. Sedangkan Tahun 2021 terus meningkat menjadi sebesar 97.5% dan tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 89%. Capaian indikator KF merupakan hasil yang baik dari upaya yang di lakukan oleh petugas dan juga termasuk peran masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.52**

**Cakupan Pelayanan Nifas**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Peserta Ibu Nifas yang telah memperoleh 3 kali pelayanan nifas sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | 3871 | 3910 | 4146 | 4064 | 3736 |
| 2 | Jumlah seluruh ibu nifas disatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu | 4635 | 4709 | 4599 | 4167 | 4198 |
| **Persentase** | | **83,5** | **83,03** | **90,1** | **97.5** | **89.0** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

**EE. Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani**

Dengan melihat adanya resiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering (minimal 2 kali) dalam minggu pertama langkah ini di lakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit-penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian bayi. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Kunjungan neonatal pertama adalah (KN 1) adalah cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir (umur 6 jam – 48 jam) di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai standar oleh tenaga kesehatan terlatih di seluruh sarana pelayanan kesehatan. Pelayanan yang di berikan saat kunjungan neonatal adalah pemeriksaan sesuai standar Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM) serta konseling perawatan bayi baru lahir termasuk ASI eksklusif dan perawatan tali pusat. Pada kunjungan neonatal pertama (KN1), bayi baru lahir mendapatkan vitamin K1 injeksi dan imunisasi hepatitis BO bila belum di berikan pada saat lahir.

Selain KN1, indikator yang menggambarkan pelayanan kesehatan bagi neonatal adalah KN lengkap yang mengharuskan agar setiap bayi baru lahir memperoleh pelayanan kunjungan

minimal 3 kali, yaitu 1 kali pada 6–48 jam,1 kali pada 3–7 hari, 1 kali pada 8–28 hari sesuai standar di satu wilayah kerja satu Tahun. Capaian KN lengkap sesuai dengan tabel di bawah ini adalah Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar 60.3% dan pada Tahun 2019 turun kembali menjadi 40.8% dan Tahun 2020 sebesar 58.5%. Sedangkan Tahun 2021 menurun menjadi sebesar 48.6%. dan Tahun 2022 menurun kembali menjadi 44.6%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.53**

**Cakupan Neonatus dengan Komplikasi yang Ditangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani | 380 | 258 | 381 | 314 | 285 |
| 2 | Jumlah seluruh neonatus dengan komplikasi yang ada | 630 | 632 | 651 | 648 | 639 |
| **Persentase** | | **60.3** | **40.8** | **58.5** | **48.6** | **44.6** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## FF. Cakupan Pelayanan Anak Balita

Kehidupan anak, usia di bawah lima Tahun memperoleh bagian yang sangat penting, usia tersebut merupakan landasan yang membentuk masa depan kesehatan, kebahagiaan, pertumbuhan perkembangan dan hasil pembelajaran anak di sekolah, keluarga masyarakat dan kehidupan secara umum.

Kesehatan bayi dan balita harus di pantau untuk memastikan kesehatan mereka selalu dalam kondisi optimal. Penilaian perkembangan gerak kasar, gerak halus bicara dan bahasa, sosialisasi dan kemandirian, pemeriksaan daya lihat. Bila ditemukan penyimpangan atau gangguan perkembangan harus dilakukan rujukan kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Untuk itu di pakai indikator–indikator yang bisa menjadi ukuran keberhasilan upaya peningkatan kesehatan bayi dan balita, salah satu di antaranya adalah pelayanan kesehatan anak balita. Adapun batasan anak balita adalah setiap anak yang berada pada kisaran umur 12 sampai dengan 59 bulan. Pelayanan

kesehatan pada anak balita di lakukan oleh tenaga kesehatan dan memperoleh:

1. pelayanan pemantauan pertumbuhan minimal 8 kali seTahun (penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan 8 kali dalam setahun)
2. pemberian vitamin A, dua kali dalam setahun yakni setiap bulan Februari dan Agustus
3. stimulasi deteksi dan intervensi dini tumbuh kembang balita minimal 2x kali dalam setahun.
4. pelayanan anak balita sakit sesuai standar menggunakan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS)

Adapun capaian indikator pelayanan kesehatan anak balita yang mendapat pelayanan kesehatan 8 kali yaitu pada Tahun 2018 sebesar 97.89% dan pada Tahun 2019 menurun menjadi 97.63% pada Tahun 2020 persentasenya menurun kembali menjadi sebesar 87.23% sedangkan pada Tahun 2021 data yang diperoleh sebesar 85.3% dan tahun 2022 terjasi penurunan kembali menjadi 81.0%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.54**
**Cakupan Pelayanan Anak Balita**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah anak balita yang memperoleh pelayanan pemantauan minimal 8 kali disatu wilayah kerja pada waktu tertentu | 16939 | 15487 | 15200 | 13600 | 12698 |
| 2 | Jumlah seluruh anak balita disatu wilayah kerja dalam waktu yang sama | 17305 | 15863 | 17425 | 15933 | 15677 |
| **Persentase** | | **97.89** | **97.63** | **87.23** | **85.3** | **81.0** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## GG. Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat

Usia masuk sekolah merupakan hal yang penting bagi tahap perkembangan anak. Banyak masalah kesehatan terjadi pada anak usia sekolah. Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti menggosok gigi dengan baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun, karies gigi, kecacingan, kelainan refraksi

ketajaman penglihatan dan masalah gizi. Pelayanan kesehatan pada anak termasuk pula intervensi pada anak usia sekolah.

Selain itu, usia anak sekolah merupakan sasaran yang strategis untuk pelaksanaan program kesehatan,karena selain jumlahnya yang besar, mereka juga merupakan sasaran yang mudah dijangkau karena terorganisir dengan baik. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan ini di utamakan untuk siswa SD/sederajat kelas1. Pemeriksaan kesehatan di laksanakan oleh tenaga kesehatan bersama tenaga lainnya yang terlatih (guru UKS/UKSG dan dokter kecil).

Tenaga kesehatan disini adalah tenaga medis,tenaga keperawatan atau petugas puskesmas lainnya yang telah di latih sebagai tenaga pelaksana UKS/UKSG. Guru UKS/UKSG adalah guru kelas atau guru yang ditunjuk sebagai pembina UKS/UKSG di sekolah dan telah dilatih tentang UKS/UKSG. Dokter kecil adalah kader kesehatan sekolah yang biasanya berasal dari murid kelas 4 dan 5 SD dan setingkat yang telah mendapatkan pelatihan dokter kecil. Hal ini di maksud agar pembelajaran tentang kebersihan dan kesehatan gigi bisa dilaksanakan sedini mungkin. Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut pada khususnya dan kesehatan tubuh serta lingkungan umumnya.

Kegiatan penjaringan kesehatan selain untuk mengetahui secara dini masalah-masalah kesehatan anak sekolah sehingga dapat di lakukan tindakan secepatnya untuk mencegah keadaan yang lebih buruk,juga untuk memperoleh data atau informasi dalam menilai perkembangan kesehtan anak sekolah maupun untuk dijadikan pertimbangan dalam menyusun perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kegiatan penjaringan kesehatan ini terdiri dari :

1. Pemeriksaan kebersihan perorangan (rambut, kulit dan kuku)
2. Pemeriksaan status gizi melalui pengukuran antripometri
3. pemeriksaan ketajaman indera (penglihatan dan pendengaran)
4. Pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut

5. pemeriksaan laboratorium untuk anemia dan kecacingan
6. Pengukuran kebugaran jasmani
7. Deteksi dini masalah mental emosional

Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi adalah pada Tahun 2018 sebesar 71.34%. Sementara pada Tahun 2019 sebesar 91.93 persen mengalami kenaikan dibanding Tahun 2018 sebesar 71.34 persen. Dan Tahun 2020 mengalami penurunan lagi menjadi 65.59 persen. Sedangkan Tahun 2021 sebesar persentasenya mencapai 85%. Dan Tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 95.57%. Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat khususnya mulut dan gigi berarti pengetahuan dan tingkat kepedulian masyarakat untuk mempertahankan gigi cukup baik melalui upaya pencegahan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.55**

**Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD Dan Setingkat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Kecamatan | Jumlah murid SD dan setingkat yang diperiksa kes oleh tenaga terlatih disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu | Jumlah murid SD dan setingkat disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yang sama | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Banda Sakti | 1288 | 1864 | 71.34 |
| | Muara Dua | 700 | 1115 | |
| | Muara Satu | 660 | 797 | |
| | Blang Mangat | 423 | 529 | |
| 2019 | Banda Sakti | 1817 | 1828 | 91.93 |
| | Muara Dua | 687 | 772 | |
| | Muara Satu | 541 | 762 | |
| | Blang Mangat | 610 | 614 | |
| 2020 | Banda Sakti | 2338 | 4200 | 65.59 |
| | Muara Dua | 2833 | 4205 | |
| | Muara Satu | 3352 | 4829 | |
| | Blang Mangat | 1422 | 1928 | |
| 2021 | Banda Sakti | 7022 | 10024 | 85 |
| | Muara Dua | 5835 | 6020 | |
| | Muara Satu | 5567 | 4325 | |
| | Blang Mangat | 1495 | 2963 | |
| 2022 | Banda Sakti | 9041 | 9651 | 95.57 |
| | Muara Dua | 6028 | 6043 | |
| | Muara Satu | 4227 | 4336 | |
| | Blang Mangat | 2686 | 2970 | |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## HH. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin

Penduduk atau masyarakat sasaran program yang telah di tetapkan oleh Kementrian Kesehatan dan Dinas Kesehatan kab/kota setempat. Seluruh penduduk umumnya di Provinsi Aceh dan

khususnya Kota Lhokseumawe terlindung oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendapat subsidi pemerintah dan pemda di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Kunjungan pasien baru adalah seseorang yang baru berkunjung ke sarana kesehatan dengan kasus penyakit baru. Sarana kesehatan strata pertama adalah tempat pelayanan kesehatan meliputi antara lain: puskesmas,balai pengobatan pemerintah dan swasta, praktek bersama dan perorangan.

Pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien rawat jalan masyarakat miskin dan hampir miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2018 sebesar 463%, selanjutnya pada tahun 2019 meningkat kembali menjadi 1290% kemudian pada tahun 2020 menurun menjadi 868%, dan pada tahun 2021 menurun kembali menjadi 851% serta tahun 2022 menjadi 470%. Kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan melebihi 100% dikarenakan kunjungan yang berulang-ulang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.56**

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kunjungan Pasien miskin disarana kesehatan strata 1 | 110.660 | 297.507 | 197.068 | 198.986 | 108.274 |
| 2 | Jumlah seluruh penduduk miskin | 23.880 | 23.050 | 22.690 | 23.380 | 23.030 |
| **Cakupan pelayanan** | | **463** | **1290** | **868** | **851** | **470** |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## II. Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Nomor 741/VII/2008 SPM Bidang Kesehatan yang terdiri dari 4 jenis pelayanan dengan 18 Indikator. Salah satu Standart Pelayanan Minimal (SPM-K) adalah

pelayanan kesehatan rujukan. Ada 2 Indikator untuk menilai pelayanan kesehatan rujukan yaitu :

1. cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan rumah sakit (RS), Puskesmas (PKM) dan sarana kesehatan lainnya.
2. cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin.

Sarana kesehatan dengan kemampuan pelayanan gawat darurat level 1 adalah tempat pelayanan gawat darurat yang memiliki Dokter Umum *on site* (berada di tempat) selama 24 jam dengan kualitas GELS (*General Emergency life support*) dan/atau ATLS (*Advance Trauma life support*) serta ACLS (*Advance Cardiac life support*) yang di lengkapi dengan alat transportasi dan komunikasi. Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 adalah mencapai 100% dan Tahun 2019-2020 adalah 90% bertambahnya rumah sakit namun tidak memiliki Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS). Sedangkan pada Tahun 2021 mencapai 90 % dan Tahun 2022 Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) sudah mencapai 100%.

**Tabel 2.57**

**Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pelayanan Gawat Darurat Level 1 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS) | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 2 | Jumlah Rumah Sakit | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Persentase** | | 100% | 90% | 90% | 90% | 100% |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## JJ. Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiologi ≤ 24 Jam

Kejadian luar biasa (KLB) adalah kejadian atau peristiwa dalam masyarakat atau wilayah dari suatu kasus penyakit tertentu yang secara nyata melebihi dari jumlah yang di perkirakan. Wabah

adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Menteri menetapkan dan mencabut daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang berjangkit wabah sebagai daerah wabah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 949 Tahun 2004).

Kriteria KLB adalah kriteria tentang kejadian luar biasa mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Nomor 451/91, tentang pedoman penyelidikan dan penanggulangan kejadian luar biasa. Menurut aturan itu suatu kejadian dinyatakan luar biasa jika unsur:

1. timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
2. peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut–turut menurut jenis penyakitnya (jam, hari, minggu)
3. peningkatan kejadian penyakit/kematian 2 kali lipat atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya (jam, hari, minggu, bulan, Tahun)
4. jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan 2 kali lipat atau lebih bila dibandingkan dengan angka rata–rata perbulan dalam Tahun sebelumnya.

Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi ≤ 24 jam pada tabel di bawah ini mengambarkan ada terjadi KLB tertinggi pada Tahun 2018 sebesar 15 kasus dengan penanganan 100%, Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar 0 dengan penanganan 0%. Sedangkan pada Tahun 2021 mencapai 100% dengan jumlah kasus 4 kasus dan Tahun 2022 terdapat 2 kasus dengan penanganan 100%.

**Tabel 2.58**

**Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB yang dilakukan Penyelidikan Epidemiolgi ≤ 24 jam Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah KLB didesa/kelurahan yang ditangani ≥ 24 jam dalam periode tertentu | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | Jumlah KLB di desa/kelurahan yang terjadi pada periode yang sama | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Jumlah | | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |

*Sumber: Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe 2023.*

## M.M Stunting

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa berisiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi juga mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Balita stunting disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal. Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Gambar 2.23**

**Prevelensi Balita Stunting Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

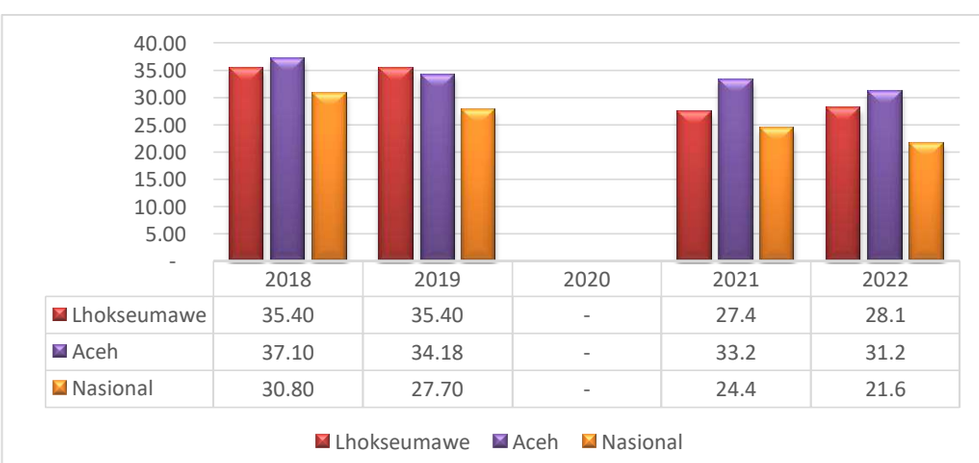


*Sumber: Buku Saku Hasil SSGI 2023*

Prevelensi Stunting Kota Lhokseumawe mengalami fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada Tahun 2018 Stunting Kota Lhokseumawe mencapai 34,40% persen, sedangkan Aceh sebesar 37.10 lebih tinggi diatas Nasional sebesar 30.80%. Prevelensi Stunting Lhokseumawe mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 27.40% dan meningkat 0.7 persen pada tahun 2022 menjadi 28.1 % dan Aceh mengalami penurunan menjadi 31.2% yang lebih rendah dari nasional sebesar 21.6%.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe untuk menurunkan angka prevalensi Stunting Kota Lhokseumawe dengan peningkatan gizi masyarakat melalui program pemberian makanan tambahan dan dengan melakukan inovasi yang diluncurkan BKKBN salah satunya program Bapak asuh anak stunting yang melibatkan seluruh masyarakat, Forkopinda, institusi, perusahaan dan staekholder dalam memberikan bantuan untuk penanganan stunting.

**2.1.3.2.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

**A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap**

Jalan sebagai suatu prasarana transportasi darat memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan suatu wilayah. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan, menyatakan bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting dalam mendukung bidang-bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, serta dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah, agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antardaerah dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Peran jalan yang sangat penting ini membawa implikasi pada upaya dan kerja keras Pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan infrastruktur jalan yang berkualitas.

Jalan dengan kondisi pelayanan mantap adalah ruas-ruas jalan kondisi baik atau sedang sesuai umur rencana yang diperhitungkan serta mengikuti suatu standar tertentu. Ketersediaan jalan dalam kondisi mantap mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta

lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Perkembangan aktifitas pembangunan ekonomi dan sosial di Kota Lhokseumawe cenderung menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dan terus diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang berkesimbangunan dan berkelanjutan. Salah satu hal yang harus diberi perhatian dan menjadi prioritas adalah menyangkut penanganan ketersediaan sarana dan prasarana dasar seperti jalan dan jembatan.

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Kota Lhokseumawe adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui peningkatan prasarana angkutan barang massal yang terintegrasi untuk mewujudkan perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik telah mempunyai andil besar terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya.

Kota Lhokseumawe memiliki panjang jalan 412.468 Km dengan jumlah ruas jalan mencapai 699 ruas yang tersebar pada 4 (empat) kecamatan dengan rincian sebagaimana dideskripsikan pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.59**

**Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 (Km)**

| Tahun | Jalan Kota | | Persentase Panjang Jaringan Jalan |
|---|---|---|---|
| | Kondisi Mantap | Panjang Jalan Keseluruhan | |
| 2018 | 239,574 | 412,468 | 58,08 |
| 2019 | 239,572 | 412,468 | 58,08 |
| 2020 | 239,752 | 412,468 | 58,13 |
| 2021 | 321,789 | 412,468 | 78,02 |
| 2022 | 314,60 | 412,468 | 77,48 |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023 dan diolah*

Meskipun proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kota Lhokseumawe cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, akan tetapi kondisi ini masih belum mampu mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Proporsi panjang jaringan jalan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 dan Tahun 2019 persentase panjang jalan 58,08 dari kondisi jalan mantap sepanjang 239,574 dan 239,572 Tahun 2019. Tahun 2020 kondisi jalan mantap sepanjang 239,752 mengalami peningkatan yang tidak signifikan dengan capaian 58,13 persen. Sementara pada tahun 2021 persentase panjang jaringan jalan meningkat menjadi 75,41 persen, begitu juga dengan tahun 2022 menjadi 77,48 persen. Kerusakan jalan biasanya timbul akibat genangan yang terjadi karena kondisi *drain hole* (lubang pembuangan) yang tidak memadai. Kerusakan lainnya juga ditimbulkan oleh kelebihan muatan *tonase* dari truck yang melintasi jalanan tersebut.

Kondisi jalan adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan dalam menentukan program pemeliharaan jalan. Menurut Departemen Pekerjaan Umum Dirjen Bina Marga 1992, kondisi jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut;

1. jalan dengan kondisi baik adalah jalan dengan permukaan perkerasan yang benar-benar rata, tidak ada gelombang dan tidak ada kerusakan permukaan;
2. jalan dengan kondisi sedang adalah jalan dengan kerataan permukaan perkerasan sedang, mulai dari gelombang tetapi tidak ada kerusakan permukaan;

3. jalan dengan kondisi rusak ringan adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah mulai bergelombang, mulai ada kerusakan permukaan dan penambalan kurang dari 20 dari luas jalan yang ditinjau;
4. jalan dengan kondisi rusak berat adalah jalan dengan permukaan perkerasan sudah banyak kerusakan seperti bergelombang, retak-retak buaya, dan terkelupas yang cukup besar 20-60 dari ruas jalan yang ditinjau disertai dengan kerusakan lapis pondasi seperti amblas, sungkur, dan sebagainya.

Pada tabel berikut terdapat jenis, kondisi, kelas dan panjang jalan Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.60**

**Jenis, Kondisi, Kelas dan Panjang Jalan (Km) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Jenis, Kondisi, Kelas | Status | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Jalan Nasional | | | | | Jalan Provinsi | | | | | Jalan Kabupaten/Kota | | | | |
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Jalan Permukaan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspal | 23.20 | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 4.60 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2,80 | 288.629 | 288.630 | 288.630 | 297.943 | 314,60 |
| Paklah (Kerikil) | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 71.988 | 71.985 | 71.985 | 48.412 | 45,94 |
| Perkerasan Beton | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 51.849 | 51.851 | 51.851 | 66.113 | 51,93 |
| Tanah | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2.39 | 2.240 | 2.240 | - | |
| **Jumlah** | **23.20** | **23.20** | **40.45** | **40.45** | **40,45** | **4.60** | **4.60** | **2.80** | **2.80** | **2.80** | **412.468** | **412.468** | **412.468** | **412.468** | **412,468** |
| **Kondisi Jalan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| .Baik | 23.20 | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 4.60 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 108.089 | 108.157 | 108.157 | 225.342 | 280,01 |
| Sedang | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 131.485 | 131.595 | 131.595 | 96.447 | 39,57 |
| Rusak | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 108.800 | 107.545 | 107.545 | 90.641 | 59,42 |
| Rusak Berat | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 64.094 | 65.122 | 65.122 | 38.02 | 33,47 |
| **Jumlah** | **23.20** | **23.20** | **40.45** | **40.45** | **40,45** | **4.60** | **4.60** | **2.80** | **2.80** | **2.80** | **412.468** | **412.468** | **412.468** | **412.468** | **412.47** |
| **Kelas Jalan** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kelas I | 23.20 | 23.20 | 40.45 | 40.45 | 40,45 | 4.60 | 4.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 288629 | 286.389 | 286.389 | 290.386 | 286.389 |
| Kelas II | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 71988 | 71.988 | 71.988 | 73.900 | 71.988 |
| Kelas III | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 51849 | 51.851 | 51.851 | 55.851 | 51.851 |
| Tidak Terperinci | | - | - | - | - | | - | - | - | - | 2.39 | 2.240 | 2.240 | 2.780 | 2.240 |
| **Jumlah** | **23.20** | **23.20** | **40.45** | **40.45** | **40,45** | **4.60** | **4.60** | **2.80** | **2.80** | **2.80** | **412.468** | **412.468** | **412.468** | **412.468** | **412.468** |

*Sumber: Aceh Dalam Angka Tahun 2022 dan Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

## B. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah Penduduk

Berdasarkan pengelompokkan jalan, terdapat lima kewenangan administrasi menurut statusnya. Pengelompokkan tersebut dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota. Dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 206 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Lhokseumawe Nomor 400 Tahun 2013 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Lhokseumawe disebutkan bahwa panjang jalan Kota Lhokseumawe sepanjang 412,468 Km. Berikut tabel rasio panjang jalan per satuan jumlah penduduk:

**Tabel 2.61**
**Rasio Panjang Jalan Dengan Per Satuan Jumlah Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | URAIAN | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Panjang Jalan (Km) | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412,468 |
| 2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| **Rasio** | | **2.02** | **1.99** | **2.18** | **2.17** | **2.15** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk pada tahun 2018 sebesar 2.02 dan tahun 2022 menjadi 2.15, hal ini di pengaruhi oleh berkurangnya jumlah penduduk.

## C. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (> 40 Km/Jam)

Pengelompokan jalan kota dalam kondisi baik yang dapat dilalui dengan kecepatan > 40 Km/Jam termasuk dalam pengelompokan jalan kolektor. Pengertian jalan kolektor ialah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, jumlah jalan masuk dibatas serta melayani daerah-daerah di sekitarnya. Dengan cirinya kendaraan yang melaluinya yaitu kendaraan ringan <10 ton, kemudian dapat dilalui kendaraan dengan kecepatan sedang (40-80 Km/Jam). Berikut data tentang panjang jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/Jam).

**Tabel 2.62**

**Persentase Panjang Jalan Dilalui Roda 4**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jalan kota dalam kondisi baik dan sedang (> 40 Km/ Jam) | 64,46 | 58,14 | 75,41 | 75,41 | 76,27 |
| 2 | Panjang Jalan Kota Lhokseumawe (Km) | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412,468 | 412,468 |
| **Persentase** | | **15.63** | **14.10** | **18.28** | **18.28** | **18.49** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa kondisi jalan di Kota Lhokseumawe semakin tahun semakin meningkat kondisi baiknya. Pada tahun 2021 tidak ada peningkatan kondisi jalan disebabkan oleh adanya *refocushing* anggaran untuk keperluan covid 19. Sedangkan pada tahun 2019 terjadi penurunan kondisi jalan dari 64,46 km menjadi 58,14 km, ini disebabkan oleh kondisi jalan yang sudah tidak memadai lagi. Tahun 2022 jalan kota dalam kondisi baik bertambah 0,86 km dari tahun 2021, dan persentasenya menjadi 18,49.

## D. Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk

Terdapat tiga jenis pemakaman dalam wilayah Kota Lhokseumawe, Tempat Pemakaman Umum (TPU), Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), dan Tempat Pemakaman Khusus (TPK). Berikut data dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.63**
**Rasio Tempat Pemakaman Umum Per Satuan Penduduk**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| No | URAIAN | 2022 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Jumlah | Luas | Daya Tampung |
| 1 | Tempat Pemakaman Umum (TPU) | 74 | 62.520 | 24.000 |
| 2 | Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) | 205 | 10.320 | 2.040 |
| 3 | Tempat Pemakaman Khusus (TPK) | 2 | 2.500 | 1.000 |
| 4 | Lain-Lain | - | - | - |
| 5 | Jumlah Tempat Pemakaman | 281 | 75.340 | 27.040 |
| 6 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | | | 191.396 |
| **Rasio TPU Per Satuan Penduduk (6/5)** | | | | **7,078** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

Pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan Tahun 2022 jumlah tempat pemakaman yang ada di Kota Lhokseumawe sebanyak 281 tempat dengan luas sebesar 75,340 ha dengan rincian 74 tempat pemakaman umum dengan luas lahan 62.520 ha, sementara tempat pemakaman bukan umum sejumlah 205 dengan luas lahan 10.320 ha, dan jumlah tempat pemakaman khusus sebanyak 2 dengan rasio TPU per satuan penduduk sebesar 7,078.

## E. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Kebutuhan akan tempat ibadah bagi penduduk Kota Lhokseumawe dirasakan telah mencukupi. Jumlah kepadatan penduduk di Kecamatan Banda Sakti sebesar 7.223 jiwa/Km2, Blang Mangat 479 jiwa/Km2, Muara Satu 930 jiwa/Km2, Muara Dua 597 jiwa/Km2. Jumlah ibadah pada Kecamatan Banda Sakti sebanyak 17 unit Masjid, 17 unit Mushalla, 18 Meunasah, 3 unit Gereja dan 1 unit Vihara. Pada kecamatan Muara Satu terdapat 8 unit Mesjid, 45 unit Mushalla dan 11 unit Meunasah. Sedangkan pada kecamatan Blang Mangat terdapat 13 unit Mesjid, 10 unit Mushalla dan 22 unit Meunasah, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.64**

**Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Mesjid | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 2 | Mushalla | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| 3 | Meunasah | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 4 | Gereja | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | Vihara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **a** | **Jumlah Rumah Ibadah** | **215** | **215** | **215** | **215** | **215** |
| **b** | **Jumlah Penduduk (Jiwa)** | **203.284** | **207.202** | **188.713** | **189.941** | **191.396** |
| **b/a** | **Rasio** | **1.05** | **1.03** | **1.13** | **1.13** | **1.12** |

*Sumber : Kota Lhokseumawe Dalam Angka 2023*

Dari tabel 2.64 di atas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terdapat sebanyak 215 unit Rumah Ibadah yang tersebar di empat kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Jumlah mesjid sebanyak 50 unit, Mushalla sebanyak

93 unit, Meunasah sebanyak 68 unit, Gereja 3 unit, dan Vihara sebanyak 1 Unit dengan rasio tempat ibadah sebesar 1.05 di tahun 2018 menjadi 1.12 pada tahun berkurangnya jumlah penduduk.

#### 2.1.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

**A. Rasio Permukiman Layak Huni**

Dari beberapa kawasan perumahan yang telah ada di kota ini, hanya beberapa kawasan saja yang memiliki prasarana dasar penting yang telah tersedia seperti, komplek perumahan PT. Perta Arun Gas (PAG), perumahan Komplek Tsunami Blang Crum yang dibangun oleh *Save The Children*, Komplek Mutiara, dan Komplek Asrama TNI/Polri dan instansi vertikal yang layak. Tapi hanya Komplek PT. PAG saja yang memiliki pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, kuliner serta sarana olah raga seperti stadion bola kaki, kolam renang, tenis *outdoor, volleyball*, basket, badminton, *jogging track* dan golf. Sedangkan Asrama TNI yang berlokasi di Kecamatan Banda Sakti hanya mempunyai pusat pelayanan kesehatan dan lapangan *volleyball*, basket, dan *jogging track* saja.

**B. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar di negara berkembang lainnya. Telaah tentang permukiman kumuh (*slum*), pada umumnya mencakup tiga segi, yaitu, *pertama*, kondisi fisiknya. Kondisi fisik tersebut antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang sangat rapat dengan kualitas konstruksi rendah, jaringan jalan tidak berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta sampah belum dikelola dengan baik. *Kedua*, kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di permukiman tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berada di kawasan permukiman kumuh antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang antara lain tampak dari sikap dan perilaku yang apatis. *Ketiga*, dampak oleh kedua kondisi tersebut. Kondisi tersebut sering juga mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran, sumber

penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang, yang berdampak pada kehidupan keseluruhannya.

Peningkatan permukiman kumuh lebih banyak disebabkan adanya urbanisasi yang terus menerus terjadi. Urbanisasi yang tidak terkontrol ini mengakibatkan kurangnya lokasi hunian di perkotaan. Sehingga untuk keberlanjutan hidup para urban (penduduk kota) tinggal di daerah-daerah yang tidak layak huni.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe. Kecamatan Banda Sakti merupakan daerah yang paling luas kawasan kumuhnya. Pada Surat Keputusan tersebut terdapat 2 (dua) penanganan, yaitu skala kawasan dan skala gampong seluas 78,46 ha. Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berharap kawasan kumuh dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditanggulangi secara komprehensif. Berikut tabel untuk lebih jelasnya:

**Tabel 2.65**

**Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| No. | Uraian | Luas Kumuh (Ha) | Gampong | Kecamatan | Tingkat Kekumuhan |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Kawasan Prioritas Penanganan** | | | | |
| 1. | Kampung Jawa-Hagu (JAGU) | 22,51 | Kampung Jawa<br>Hagu Selatan | Banda Sakti | Kumuh Sedang |
| 2. | Pusong | 32,56 | Pusong Lama<br>Pusong Baru | Banda Sakti | Kumuh Ringan |
| | **Total Luas** | **55,07** | | | |
| | | | | | |
| | **Gampong Prioritas Penanganan** | | | | |
| 1. | Kuta Blang | 7,56 | Kuta Blang | Banda Sakti | Kumuh Ringan |
| 2. | Simpang Empat | 8,32 | Simpang Empat | Banda Sakti | Kumuh Ringan |
| 3. | Blang Naleung Mameh | 7,51 | Blang Naleung Mameh | Muara Satu | Kumuh Ringan |
| | **Total Luas** | **23,39** | | | |

*Sumber : SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020*

Tujuan Pendataan Permukiman Kumuh ini ditujukan untuk:

1. Membantu Pemerintah Kabupaten/Kota memperoleh dan menyusun data dan profil permukiman kumuh di wilayahnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Menjadi panduan operasional bagi Pemerintah Kota/Kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pendataan dan penyusunan profil permukiman kumuh;
3. Memastikan hasil pendataan permukiman kumuh menjadi basis penetapan SK Kumuh Bupati/Walikota.

Indikator permukiman kumuh telah dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Berikut dibawah ini terdapat tabel persentase penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022;

**Tabel 2.66**
**Persentase Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Luas Kumuh (Ha) | 163,86 | 29,59 | 78,46 | 78,46 | 78,46 |
| 2 | Luas Wilayah (Ha) | 18,106 | 18,106 | 18,106 | 18,106 | 18,106 |
| **Persentase** | | **11,05** | **61,29** | **23,18** | **23,18** | **23,18** |

*Sumber :*
1. *SK Walikota Lhokseumawe Nomor 455 Tahun 2018*
2. *SK Walikota Lhokseumawe Nomor 395 Tahun 2019*
3. *SK Walikota Lhokseumawe Nomor 35 Tahun 2020*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2018 luas kumuh Kota Lhokseumawe sebesar 163,86 ha. Pada tahun ini

hanya skala kawasan saja yang dihitung delinasinya, yaitu Pusong yang terdiri dari Pusong Baru dan Pusong Lama; Gampong Kampung Jawa dan Hagu Selatan yang disingkat menjadi JAGU; Gampong Keude Aceh; Gampong Mongeudong; dan Batuphat yang terdiri dari Gampong Batuphat Timur dan Gampong Batuphat Barat. Untuk Tahun 2019 terdapat 17 gampong yang masuk dalam delinasi kumuh dengan luas 29,59 ha. Delinasi kumuh untuk Tahun 2018 merujuk Surat Keputusan Walikota Nomor 442 Tahun 2016.

Pada tahun 2022 kawasan JAGU melalui dana DOKA Tahun Anggaran 2022 adanya lanjutan penanganan, yaitu lanjutan pedestrian, dan timbunan pada Gampong Kampung Jawa. Sedangkan Gampong Batuphat Timur ada pembangunan sumur bor, saluran dan jalan.

## C. Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni

Rumah Layak Huni atau RLH adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Dulu rumah dikatakan layak huni jika memenuhi satu faktor saja. Sedangkan saat ini berdasarkan *Suistainable Development Goals (*SDGs), ada empat faktor atau kriteria dan semuanya harus terpenuhi. yakni mulai dari strukturnya, luasannya, sanitasinya, juga air bersihnya. Beberapa alasannya adalah jumlah pengangguran yang tinggi dan pendapatan yang masih rendah, sehingga mereka mencari tempat tinggal atau membangun rumah tidak layak huni.

Berikut dibawah ini adalah tabel persentase ketersediaan rumah layak huni Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022;

**Tabel 2.67**

**Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni Kota Lhokseumawe 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah rumah layak huni | 35.518 | 35.610 | 35.678 | 35.858 | 37.074 |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 43.331 | 43.331 | 43.331 | 51.827 | 55.661 |
| **Persentase** | | **81,97** | **82,18** | **82,34** | **69,19** | **66.61** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase ketersediaan rumah layak huni dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah rumah tinggal sebanyak 12.330 unit rumah dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 66,61 persen, sedangkan rumah tidak layak huni mencapai 33,39 persen pada tahun 2022. Sebagian besar rumah tidak layak huni berada di daerah pesisir pantai Jagu dan Pusong.

**D. Rasio Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)**

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Fasilitas umum dan fasilitas sosial merupakan sebuah prasarana atau sarana penunjang layanan kegiatan yang ada dalam perumahan.

Penyediaan atau bantuan PSU adalah pemberian sebagian dari komponen PSU yang merupakan satu kesatuan jaringan PSU perumahan dan kawasan permukiman yang fungsional (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Pada tahun 2022 jumlah PSU yang dibangun/direhab sebanyak 55 unit, diantaranya adalah Penataan Lapangan Hiraq, Pembangunan Pagar Kuburan Gampong Meuria Paloh Kecamatan Muara Satu, Pembangunan Paving Blok Dayah Raudhatul Fata Gampong Blang Buloh Kecamatan Blang Mangat dan banyak lagi PSU yang dibangun dan direhab. Jumlah PSU yang tersedia sampai dengan tahun 2022 sebanyak 1.567 unit dengan rasio PSU dalam kondisi baik sebesar 0,04, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.68**

**Rasio PSU dalam Kondisi Baik**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah PSU yang dibangun/rehab dalam kurun waktu 4 tahun | 74 | 94 | 117 | 140 | 55 |
| 2 | Jumlah PSU yang tersedia | 1.474 | 1.474 | 1.474 | 1.512 | 1.567 |
| **Rasio** | | **0,05** | **0,06** | **0,08** | **0,09** | **0,04** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

**D. Persentase Penataan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah**

Penataan bangunan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya.

Bangunan gedung untuk kepentigan strategi daerah Kota Lhokseumawe terdiri dari bangunan sosial, keagamaan, kesehatan dan bangunan publik lainnya.

**Tabel 2.69**

**Persentase Penataan Bangunan Gedung**
**untuk kepentingan strategis Daerah**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah bangunan gedung yang ditata | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah keseluruhan bangunan gedung | 18 | 21 | 25 | 25 | 27 |
| **Persentase** | | **5,56** | **9,52** | **4,00** | **4,00** | **3,70** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

Persentase penataan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 adalah 3,70 persen dengan jumlah bangunan yang ditata sebanyak 1 unit dengan jumlah keseluruhan bangunan gedung sebanyak 27 unit.

## E. Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun

Pertumbuhan dan perkembangan kota sangat dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk. Peningkatan yang sangat pesat dari populasi perkotaan berdampak terhadap kebutuhan ruang dan lahan yang semakin meningkat. Kebutuhan ruang dan lahan yang meningkat terutama untuk kebutuhan permukiman, perekonomian, pemerintahan, sosial dan lainnya. Disisi lain, lahan perkotaan yang tersedia sangat terbatas sehingga mengakibatkan pengalihfungsian guna lahan untuk memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan ruang dan lahan kegiatan perkotaan tersebut. Pengembangan lahan terbangun dari proses pengalihfungsian lahan tersebut pada akhirnya akan meningkatkan aliran permukaan yang menjadi salah satu penyebab terjadinya genangan atau banjir di kawasan perkotaan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor: 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menyebutkan bahwa standar pelayanan minimal sistem jaringan drainase skala kota adalah tidak terjadinya genangan lebih dari 2 kali setahun dengan ketinggian genangan lebih dari 30 cm selama 6 jam. Genangan (*inundation*) yang dimaksud adalah air buangan ataupun air hujan yang tidak dapat mengalir ke badan air terdekat sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang lebih rendah dalam suatu kawasan. Genangan terjadi karena banyak faktor, salah satu penyebabnya adalah kurang berfungsinya drainase perkotaan.

**Tabel 2.70**

**Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Luasan daerah yang tergenang (ha) | 7,80 | 7,00 | 6,50 | 6,46 | 4,52 |
| 2 | Luasan daerah rawan genangan atau berpotensi tergenang (ha) | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 4,90 |
| **Persentase** | | **97,50** | **87,50** | **81,25** | **92,29** | **92,24** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa luasan daerah yang tergenang setiap tahunnya berkurang, begitu juga dengan luasan daerah rawan genangan yang berpotensi tergenang. Luasan daerah tergenang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 mengalami pengurangan 3,28 ha dengan luasan daerah genangan atau berpotensi tergenang dari 8,00 ha menjadi 4,90 ha.

Daerah yang tergenang akibat curah hujan yang tinggi dan terjadi genangan selama ±6 jam adalah Gampong Hagu Teungoh (Komplek Pemda), Gampong Hagu Barat Laut, Gampong Tumpok Teungoh dan sebagian daerah Kota Lhokseumawe (Jalan Perdagangan Ujung sampai Jalan Sukaramai). Untuk Kecamatan Muara Satu pada Gampong Blang Pulo sepanjang Jalan Medan-Banda Aceh, Cot Trieng, Batuphat dan untuk Kecamatan Muara Dua terdapat pada Gampong Blang Poroh, dan Cunda.

Dengan adanya Gerakan Masyarakat Lhokseumawe Bersih, yang dicanangkan oleh Pj. Walikota diharapkan drainase-drainase maupun saluran-saluran yang ada di Kota Lhokseumawe dapat bersih dari sedimen-sedimen. Kegitan ini merupakan upaya Pemerintah Kota bersama masyarakat untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan kebersihan dilingkungan masing-masing.

#### 2.1.3.2.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

**A. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk**

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaiman telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 bahwa Ketentraman, ketertiban Umum dan Pelindungan masyarakat merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan berjalannya waktu, bila ditelaah dari sisi kependudukan, maka masyarakat dalam suatu wilayah selalu tumbuh dan berkembang. Hal ini mengakibatkan perlu adanya

pengaturan yang lebih baik dari sisi pemerintah untuk dapat mengantisipasi segala macam tantangan yang bermuara pada terancamnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah kerjanya. Berdasarkan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 1950 mengeluarkan Surat Keputusan Nomor UR 32/2/21 tentang Perubahan Nama Detasemen Polisi Pamong Praja Menjadi Satuan Polisi Pamong Praja. Surat Keputusan tersebut menjadi dasar peringatan Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja yang diperingati setiap tanggal 3 Maret.

Dari tabel 2.71 dapat terlihat bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Lhokseumawe memiliki rasio sebesar 10,08 untuk Tahun 2018, 10,27 di Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 dengan rasio 12,34 persatuan penduduk. Sedangkan Tahun 2021 terjadi penurunan rasio jumlah polisi pamong praja sebesar 12.79 persatuan penduduk. Dan pada tahun 2022 rasio jumlah Polisi Pamong Praja mengalami kenaikan menjadi sebesar 13,06 persatuan penduduk.

Berikutnya Rasio Jumlah Linmas Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar 51,15 persatuan penduduk. Tahun 2019 menurun menjadi 50,19 persatuan penduduk. Selanjutnya di tahun 2020 rasio jumlah Linmas mengalami kenaikan menjadi sebesar 55,11 dan kembali terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 54.75 persatuan penduduk. Sedangkan pada tahun 2022 rasio jumlah Linmas meningkat kembali menjadi sebesar 54,33 persatuan penduduk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.71 berikut ini:

**Tabel 2.71**

**Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja dan Linmas Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Polisi Pamong Praja | 205 | 213 | 233 | 243 | 250 |
| 2. | Jumlah Linmas | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| 3. | Jumlah Penduduk | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| **Rasio Polisi Pamong Praja** | | **10.08** | **10.27** | **12.34** | **12.79** | **13.06** |
| **Rasio Jumlah Linmas** | | **51.15** | **50.19** | **55.11** | **54.75** | **54.33** |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2023.*

## B. Penegakan PERDA/QANUN

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Wilayatul Hisbah (WH) mempunyai tugas menegakkan Qanun dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan syariat islam. Satpol PP Kota Lhokseumawe memiliki kewenangan untuk menertibkan dan menindak warga yang mengganggu ketertiban umum, melakukan pemeriksaan dan tindakan Represif non-yustisial terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

**Tabel 2.72**

**Jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Penegakan Perda/Qanun | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 |
| 2. | Jumlah Pelanggaran Perda/Qanun | 133 | 862 | 2129 | 4584 | 759 |
| **Persentase** | | **11,28** | **1.74** | **0.56** | **0.26** | **1.45** |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2023.*

Pada tabel 2.72 dapat dilihat jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan pelanggaran Peraturan Daerah/Qanun di Tahun 2018 sebesar 11 persen dengan 15 jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun dan 133 pelanggaran. Selanjutnya di tahun 2019 jumlah Penegakan Peraturan Daerah/Qanun masih sebanyak 15 penegakan yang dilakukan namun jumlah pelanggaran mengalami peningkatan sebanyak 862 pelanggaran atau 1.7 persen. Di Tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebanyak 12 Penegakan Peraturan Daerah/Qanun yang telah dilakukan namun jumlah pelanggaran di tahun 2020 sebanyak 2129 pelanggaran dan sebanyak 4584 pelanggaran di tahun 2021 dengan persentase 0.56 persen untuk Tahun 2020 dan 0.26 persen di Tahun 2021. Untuk Tahun 2022 terjadi penurunan jumlah pelanggaran yaitu menjadi 759 pelanggaran dengan persentase 1.45 persen.

## C. Cakupan Patroli Petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) sebagai perangkat daerah mempunyai peranan yang sangat

strategis dalam membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat melakukan kegiatannya dengan aman.

Cakupan Patroli Petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tetap dilakukan dalam proporsi yang sama. Patroli ini merupakan kegiatan rutin guna melakukan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan atau di trotoar, penertiban juga dilakukan di pasar tumpah, penertiban gelandangan dan pengemis (Gepeng), penertiban pemasangan baliho, maupun penertiban yang terkait dengan masalah perizinan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.73 berikut ini.

**Tabel 2.73**

**Jumlah Patroli Penegakan Peraturan Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Waktu Patroli | 2 Jam | 2 Jam | 2 Jam | 2 Jam | 2 Jam |
| 2. | Jumlah Kegiatan Patroli | 3 x Sehari | 3 x Sehari | 4 x Sehari | 4 x Sehari | 4 x Sehari |
| **Persentase** | | **0,67** | **0,67** | **0,50** | **0,50** | **0.50** |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2023.*

Dari tabel 2.73 dapat dilihat bahwa patroli penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan rutin oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe berdurasi 2 jam dengan jumlah kegiatan patroli dilakukan sebanyak 3 kali sehari namun mengalami peningkatan menjadi 4 kali sehari di Tahun 2020 s.d 2022. Patroli ini sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah dalam rangka menciptakan kenyaman ketertiban umum. Keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe perlu adanya dukungan dan komitmen bersama dari semua pihak.

## D. Jumlah Pelanggaran Syariat Islam

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh diberikan beberapa kewenangan istimewa dalam mengurus daerahnya. Salah satu

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh adalah penerapan nilai-nilai syari'at Islam kepada masyarakat setempat yang diatur berdasarkan Qanun.

Syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak. Adapun bagian-bagian lebih lanjut dari syari'at Islam ini meliputi ahwal al-syakshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.Khusus jinayah atau hukum pidana, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Jinayat merupakan kesatuan hukum pidana yang berlaku bagi masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syari'at Islam. Qanun Jinayat mengatur tentang Jarimah (perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam), pelaku jarimah, dan uqubat (hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah). Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan masyarakat Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.74 berikut:

**Tabel 2.74**

**Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Pasal 15 tentang Khamar | - | - | 13 | - | - |
| 2. | Pasal 16 tentang menyimpan, menimbun dan menjual Khamar | 2 | - | - | 2 | - |
| 3. | Pasal 18 tentang Maisir | 4 | - | 22 | - | - |
| 4. | Pasal 20 tentang Menyediakan Fasilitas Jarimah Maisir | 7 | 9 | 1 | 4 | 7 |
| 5. | Pasal 22 tentang Jarimah percobaan Maisir | 12 | 3 | - | - | - |
| 6. | Pasal 23 tentang Khalwat | 61 | 47 | 49 | 31 | 124 |
| 7. | Pasal 25 tentang Ikhtilath | 48 | 48 | 90 | 45 | - |
| 8. | Pasal 27 tentang Melakukan Jarimah Ikhtilath dengan berhubungan Mahran dengannya | 26 | - | - | - | - |
| 9. | Pasal 33 tentang Zina | 3 | 3 | 1 | 10 | 8 |

| No | Jenis Pelanggaran (Qanun Aceh No.6 Tahun 2014) | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 10. | Pasal 46 tentang Pelecahan Seksual | - | - | 2 | - | 2 |
| 11. | Pasal 47 Pelecehan seksual terhadap anak | 2 | - | - | - | - |
| 12. | Pasal 50 tentang melakukan Pemerkosaan terhadap Anak | - | - | 1 | - | - |
| 13. | Pasal 64 tentang Musahaqah | - | 4 | - | - | - |
| | **Jumlah Kasus** | **165** | **114** | **179** | **92** | **141** |

Sumber: *Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2023.*

Berdasarkan tabel 2.74 di atas dapat dilihat jumlah Pelanggaran Syariat Islam sejak Tahun 2018-2022 menunjukkan angka yang menurun walaupun pada tahun 2020 dan 2022 mengalami kenaikan kembali. Tahun 2018 jumlah kasus pelanggaran syariat islam sebanyak 165 kasus dan menjadi 92 kasus pada tahun 2021. Selanjutnya kasus Pelanggaran Khalwat menjadi kasus tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 124 kasus dimana pada tahun 2021 sebelumnya hanya ada 31 kasus. Sedangkan untuk kasus Ikhtilath mengalami penurunan, hal ini dapat dilihat pada tahun 2020 terjadi sebanyak 90 kasus ikhtilath dan tidak ditemukan kasus ikhtilath sama sekali di tahun 2022.

## E. Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman

Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melalui penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Data Penertiban yang dilakukan Satpol PP dan WH untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe sebagi berikut :

**Tabel 2.75**

**Jumlah Penertiban Untuk Menjaga Ketertiban dan Ketentraman Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Jenis Penertiban | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Penertiban Pasar | 3 | 9 | 249 | 249 | 250 |
| 2. | Penertiban IMB dan HO | 14 | 1 | 2 | - | - |
| 3. | Penertiban Pedagang Kaki Lima | 68 | 93 | 249 | 249 | 250 |
| 4. | Penertiban Spanduk | 12 | 8 | 5 | - | 2 |
| 5. | Penertiban Pelajar Bolos Sekolah | 7 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 6. | Penertiban Café dan Tempat Hiburan Malam | - | - | - | - | - |
| 7. | Penertiban Keramaian Umum | 6 | 7 | 1 | - | - |
| 8. | Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak | 1 | - | 1 | - | - |
| 9. | Pengamanan Demo | - | - | - | - | - |
| 10. | Pengamanan Upacara dan Hari Besar Lainnya | - | - | - | - | 2 |
| 11. | Penertiban Pengelolaan Air Kotor/Limbah | 2 | - | - | - | - |
| 12. | Penertiban Penindakan PNS | 1 | 1 | - | - | - |
| 13. | Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis | 5 | 2 | 40 | 2 | 250 |
| 14. | Penertiban Izin Milik Ruang Jalan (Galian C dll) | 6 | - | 3 | - | - |
| | Jumlah Kasus | 125 | 125 | 555 | 501 | 759 |

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, 2023.*

Penertiban yang dilakukan untuk menjaga Ketertiban dan Ketentraman yang dilakukan Tahun 2018 pada penertiban pasar sebanyak 3 penertiban dan tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban. Pada Tahun 2018 Penertiban Pedagang Kaki Lima sebanyak 68 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban. Penertiban Ketertiban Sosial, Adab, Susila dan Premanisme, Tuna Wisma, Gepeng/Pengemis pada tahun 2018 sebanyak 5 penertiban dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 250 penertiban.

## F. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Pengawasan dan pembinaan terhadap Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini bukan membatasi gerak Ormas dan LSM, tapi dalam rangka penguatan dan penyehatan bagi Ormas dan LSM itu sendiri. Pengawasan dan pembinaan ini, mempunyai arti penting karena Ormas dan LSM adalah bagian dari lembaga non-pemerintahan dan sebagai mitra bagi pemerintah dalam turut serta mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya tujuan pembangunan nasional.

Ormas dan LSM dituntut untuk terus melakukan peningkatan kualitas lembaga, baik dari sisi tertib administrasi, tertib anggota maupun dalam peningkatan SDM yang ada, serta peningkatan kualitas program kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART masing-masing ormas. Persentase pembinaan ormas yang ada di Kota Lhokseumawe dari tahun ke tahun bergerak secara fluktuatif, terlihat pada tahun 2018 sebesar 33% pembinaan terhadap ormas yang telah dilakukan namun mengalami penurunan menjadi 20% di Tahun 2019. Selanjutnya di Tahun 2020 dan 2021 persentase pembinaan ormas sebesar 8% dan 11% hingga di Tahun 2022 menjadi 12% untuk persentase pembinaan ormas yang telah dilakukan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.76**

**Persentase Pembinaan Ormas**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | TAHUN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Ormas yang mendapat bantuan | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | Jumlah Ormas yang terdaftar | 12 | 20 | 50 | 54 | 54 |
| | Persentase | 33% | 20% | 8% | 11% | 12% |

*Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 2023*

## G. Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko

timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Laporan kejadian kebencanaan dalam beberapa tahun terakhir di Kota Lhokseumawe mengalami beberapa bencana alam seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gelombang ekstrim/abrasi. Statistik kebencanaan yang dihimpun oleh BPBD menunjukkan terjadi penurunan jumlah kejadian bencana dari tahun 2018 hingga 2022. Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.77 berikut:

**Tabel 2.77**

**Kejadian Bencana Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2018-2022**

| Jenis Bencanas | Frekuensi Terjadinya Bencana (Kejadian) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Banjir | 1 | - | 1 | 1 | 3 |
| Puting Beliung | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Tanah Longsor | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Gempa Bumi | - | - | - | - | - |
| Gelombang Ekstrim/Abrasi | - | - | 1 | - | 1 |
| **Jumlah** | **3** | **2** | **3** | **2** | **15** |

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023.*

Pada tabel 2.77 di atas dapat kita ketahui bahwa pada tahun 2022 kejadian bencana banjir meningkat menjadi 3 kali, bencana angin puting beliung meningkat menjadi 5 (lima) kali, tanah longsor meningkat menjadi 6 (enam) kali, sedangkan gelombang ekstrim/abrasi hanya terjadi 1 (satu) kali serta tidak ada kejadian gempa bumi yang menimbulkan kerugian/bencana di Kota Lhokseumawe.

## F. Indeks Risiko Bencana

Kerusakan dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana alam dan meningkatnya frekuensi kejadian bencana, memerlukan upaya antisipatif untuk mengurangi atau meminimalkan dampak kerugian ekonomi akibat bencana di masa mendatang. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah rangkaian upaya yang dilakukan secara sistematis untuk menganalisis risiko-risiko dampak bencana terhadap kehidupan dan penghidupan manusia. Risiko bencana

dapat diartikan sebagai kerugian potensi akibat bencana seperti nyawa, harta, kesehatan, aset, mata pencaharian, layanan publik, dan lain-lain yang terjadi kepada masyarakat pada waktu tertentu.

Dalam indeks risiko, tingkat kebencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunnya, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana. Penilaian tingkat risiko berdasarkan potensi kerugian di atas memungkinkan adanya perhitungan capaian suatu upaya pengurangan risiko bencana di suatu daerah. Risiko bencana akan mengalami penurunan atau peningkatan seiring adanya perubahan pada komponen tersebut.

Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$\text{Risk} = \text{hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti frekuensi gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe dapat di lihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.78**

**Indeks Risiko Bencana Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Kelas Resiko 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lhokseumawe | 130.11 | 130.11 | 130.11 | 130.11 | 132.70 | Sedang |

*Sumber : Buku IRBI 2023*

## G. Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran

Penanggulangan Kebakaran adalah semua usaha yang dilakukan untuk mencegah, menyiagakan, memadamkan dan penanganan akibat kebakaran. Api dapat timbul jika terjalin interaksi ketiga unsur "segitiga api" yaitu: oksigen (dari udara), bahan yang dapat menyala (bahan bakar) dan panas

Metode pencegahan kebakaran pada dasarnya meliputi pengurangan atau penghapusan salah satu unsur diatas. Dalam hampir semua situasi, dua dari ketiga unsur yang ada yaitu oksigen dan bahan yang mudah terbakar. Karena itu penting dijaga agar komponen ketiga yaitu panas jangan sampai cukup tinggi untuk menyalakan api.

Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat PPK adalah sumber daya yang berpotensi kebakaran yang perlu mendapat perlindungan dari bahaya kebakaran yang membentuk Wilayah Manajemen Kebakaran, selanjutnya disebut WMK oleh daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai wilayah yurisdik urusan pemerintahannya. WMK bertujuan untuk mendukung pengurangan risiko kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran antara lain: permukiman, perindustrian/pabrik, bangunan gedung, hutan dan lahan maupun kebakaran lainnya seperti pada kawasan tertentu pertambangan, depot bahan bakar minyak dan/atau bahan yang sangat mudah terbakar, pelabuhan, bandara dan lingkungan yang memiliki potensi kebakaran lainnya.

Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK adalah pelayanan Pemadam Kebakaran pada saat Tanggap Darurat yang efektif, dan bereaksi cepat dan tepat tiba dilokasi kejadian kebakaran untuk pengurangan risiko kebakaran dengan waktu minimal yang diperlukan, dimulai saat menerima informasi dari warga/penduduk sampai tiba ditempat kejadian kebakaran, yang langsung melakukan tindakan pemadaman api, penyelamatan jiwa dan harta benda. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industry yang tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

**Tabel 2.79**

**Persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah kejadian kebakaran yang ditanggulangi | 83 | 97 | 196 | 75 | 44 |
| 2 | Jumlah kejadian kebakaran yg terjadi | 83 | 97 | 196 | 75 | 44 |
| **Persentase** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kota Lhokseumawe selalu dapat ditangani 100%. Pada tahun 2022 kejadian kebakaran yang terjadi 44 kasus, dapat ditangani seluruhnya.

**2.1.3.2.1.6 Sosial**

**A. Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu.**

Permasalahan di bidang sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada sebagian warga masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri dan hidup dalam kondisi kemiskinan dan ketidakberdayaan. Mereka umumnya mengalami hambatan fungsi sosial dalam hidup bermasyarakat, kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dasar dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Permasalahan yang dihadapi oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah belum terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan,

dan kebutuhan sosial dasar lainnya, sehingga memerlukan koordinasi dan kemitraan

Memperhatikan hal tersebut di atas serta merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan upaya peningkatan fungsi-fungsi sosial melalui pendekatan dan intervensi profesi pekerjaan sosial yang melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dapat ditingkatkan fungsi sosialnya agar mampu mengakses pelayanan sosial dasar. Dari Tabel.1 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Cakupan Perningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu di Tahun 2021 Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan untuk peningkatan kesejahteraan sosial terjadi peningkatan sebanyak 17.828 orang dan jumlah masyarakat yang terdata dalam DTKS sebanyak 25.000 orang dengan persentase 71 %.

**Tabel.2.80**

**Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Keluarga yang mendapatkan Bantuan untuk Peningkatan Kesejahteraan Sosial | 7498 | 7498 | 9598 | 17828 | 13514 | KK |
| 2. | Jumlah Masyarakat yang terdata dalam DTKS | 17104 | 17654 | 18516 | 25000 | 33198 | KK |
| **Pesentase** | | **44** | **42** | **52** | **71** | **40.71** | |

*Sumber : Dinas Sosial Kota Lhokseumawe Tahun 2023*

**1. Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani**

Penanganan para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sudah seharusnya menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Lhokseumawe melalui Dinas Sosial. Hal ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Dalam Undang-Undang tersebut dijabarkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan langkah-langkah rehabilitasi sosial. Penyelenggaraan rehabilitasi

sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup; memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan social, meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dari Tabel.2.80 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani di Tahun 2022 Jumlah jenis PMKS yang tertangani 4 Jenis dan jumlah PMKS 4 Jenis tidak ada perubahan dari Tahun 2018-2022 dengan persentase 100%.

**Tabel.2.81**

**Persentase Rehabilitasi Sosial yang tertangani**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Jenis PMKS yang tertangani | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Jenis PMKS |
| 2. | Jumlah PMKS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Jenis PMKS |
| **Pesentase** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.*

Untuk dapat melakukan usaha kesejahteraan sosial dalam menangani permasalahan sosial sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dan sumber-sumber kesejahteraan sosial seperti Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial. Potensi Sumber Kesejahteran Sosial adalah semua hal yang berharga yang dapat digunakan untuk menjaga, menciptakan, mendukung atau memperkuat usaha kesejahteraan sosial. Potensi dan sumber kesejahteraan sosial dapat berasal atau bersifat manusiawi, sosial dan alam.

Potensi Sumber Kesejahteran Sosial yang terdapat di Kota Lhokseumawe terdiri dari Taruna Siaga Bencana (Tagana) sebanyak 10 orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Anak sebanyak 12

orang, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Lansia sebanyak 2 orang, Penyuluh Sosial sebanyak 6 orang, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 4 orang dengan 1 orang pada masing-masing kecamatan, Pekerja Sosial Masyarakat sebanyak 75 orang yang tersebar pada 68 desa di Kota Lhokseumawe.

**2. Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial**

**a. Persentase Penanganan Anak Terlantar**

Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Dimana Kriterianya berasal dari keluarga fakir miskin; anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah anak telantar yang tertangani di Tahun 2021 terjadi peningkatan sebanyak 40 orang, Jumlah anak telantar yang tertangani di Tahun 2022 terjadi penurunan sebanyak 25 orang, Jumlah anak telantar yang terdata mengalami kenaikan sebanyak 76 orang, Tahun 2022 dengan persentase terjadi penurunan sebanyak 32,89 %.

**Tabel.2.82**
**Persentase Penanganan Anak Terlantar**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Anak terlantar yang tertangani | 18 | 25 | 7 | 40 | 25 | Orang |
| 2. | Jumlah Anak terlantar yang terdata | 18 | 40 | 7 | 65 | 76 | Orang |
| **Pesentase** | | **100** | **63** | **100** | **62** | **32.89** | |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.*

**b. Persentase Penanganan Fakir Miskin**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang multidimensional, baik dari aspek penyebab, maupun dampaknya sehingga diperlukan langkah penanggulangan dari berbagai perspektif dengan melibatkan banyak pihak sesuai dengan kewenangannya. Untuk mewujudkan proses ini, pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan

mengatur pembagian tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat pusat sampai dengan kabupaten/kota. Hal ini setidaknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota dalam berbagai bidang termasuk bidang sosial.

Dinas Sosial provinsi merupakan bagian stakeholder dalam penanggulangan kemiskinan dalam tingkat regional. Salah satu tugas pokoknya adalah mengsinergikan penanganan kemiskinan pada tingkat pusat dengan pihak kabupaten/kota sebagai pelaksana langsung program kemiskinan. Dengan posisi tersebut, maka dinas sosial provinsi harus mampu menciptakan kondisi agar komunikasi antara berbagai pihak tersebut dapat terlaksana dengan baik, sehingga program yang diluncurkan oleh pemerintah dapat dilaksanakan pada tingkat provinsi dan kabupaten kota, serta dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari Tabel.2.82 dibawah ini dapat dijelaskan dengan jumlah fakir miskin berdasarkan data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tertangani di Tahun 2022 menjadi sebanyak 13.514 jiwa, jumlah fakir miskin yang terdata terjadi peningkatan menjadi 13.514 jiwa, dengan persentase penanganan sebesar 100%.

**Tabel.2.83**
**Persentase Penanganan Fakir Miskin**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Fakir Miskin yang tertangani | 7498 | 7498 | 9598 | 17828 | 13514 | Jiwa |
| 2. | Jumlah Fakir Miskin yang terdata | 17104 | 17654 | 18516 | 113755 | 13514 | Jiwa |
| **Pesentase** | | **44** | **42** | **52** | **15,67** | **100** | |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.*

**c. Kemiskinan Ekstrem**

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Garis Kemiskinan Ekstrem

diperkirakan sebesar Rp11.941,12/orang/hari atau Rp358.233,6/orang/bulan (BPS, 2021). Penghapusan miskin ekstrem menjadi salah satu indikator Tujuan 1 yaitu: Tanpa Kemiskinan di Sustainable Development Goals (SDGs). Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel.2.84**
**Rekapitulasi P3KE Kota Lhokseumawe 2022**

| No | Kecamatan | Jumlah Keluarga | Jumlah Individu |
|---|---|---|---|
| 1 | Banda Sakti | 4.544 | 21.010 |
| 2 | Muara Dua | 3.389 | 14.838 |
| 3 | Muara Satu | 2.835 | 12.531 |
| 4 | Blang Mangat | 2.924 | 12.406 |
| | **Jumlah** | **13.692** | **60.785** |

*Sumber: Kemenko PMK Nomor 25 Tahun 2022*

**3. Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat**

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang

berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.

Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati/walikota, atau perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Secara umum dinas sosial dalam penanggulangan bencana berperan untuk memberikan bantuan logistik/dapur umum. Karena tupoksinya Dinas Sosial dalam penanggulangan bencana adalah merencanakan dan melaksanakan penyediaan kebutuhan logistik bencana. Dinas Sosial akan memberikan bantuan terhadap masyarakat yang tertimpa bencana, bantuan yang diberikan dinas sosial juga bisa berupa bantuan fisik, akan tetapi bantuan fisik yang diberikan terbatas karena berpatokan kepada anggaran yang didapat dinas sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) .

Dalam memenuhi bahan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan penanggulangan bencana, Dinas Sosial dibantu Relawan Sosial (Tagana, Pelopor dan TKSK) dalam mengumpulkan bahan dan data yang berkaitan dengan bencana.

Dari Tabel dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun di Tahun 2022 sebanyak 4515 jiwa, Jumlah Korban Bencana yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun terjadi peningkatan sebanyak 4515 jiwa, Tahun 2022 dengan persentase mencapai 100%. Peningkatan ini terjadi karena di tahun 2022 ini banyak terjadi bencana alam, baik itu bencana Alam seperti Air Pasang (Abrasi Pantai), Banjir, Tanah Longsor, dan Angin Putin

Beliung, maupun Bencana Sosial Seperti Kebakaran dan Korban Tenggelam.

**Tabel. 2.85**

**Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah Korban Bencana yang Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun | 65 | 55 | 65 | 60 | 4515 | Jiwa |
| 2. | Jumlah Korban Bencana yang seharusnya Menerima Bantuan Sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (Satu) Tahun | 65 | 55 | 65 | 60 | 4515 | Jiwa |
| **Pesentase** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.*

**4. Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola**

Taman Makam Pahlawan sendiri secara luas diartikan sebagai lokasi pemakaman khusus bagi para pejuang yang berjasa pada Negara Republik Indonesia. Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1, Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) adalah taman makam pahlawan nasional yang berada di provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sementara Makam Pahlawan Nasional (MPN) adalah makam di luar Taman Makam Nasional di mana jenazah Pahlawan Nasioal dimakamkan. Dari Tabel 2.88 dibawah ini dapat dijelaskan dengan data Jumlah TMPN yang dikelola sebanyak 1 buah dan Jumlah TMP yang terdata sebanyak 1 buah di Tahun 2018 s.d 2022 tidak ada perubahan dengan persentase mencapai 100%.

**Tabel. 2.86**

**Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jumlah TMP yang dikelola | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. | Jumlah TMP yang terdata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Pesentase** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber: Dinas Sosial Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.*

**2.1.3.2.2 Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar.**

**2.1.3.2.2.1 Ketenagakerjaan**

**A. Persentase Pencari Kerja**

Jumlah pencari kerja yang dilatih akan ditempatkan menyesuaikan dengan lowongan kerja yang terdaftar, khususnya di lapangan usaha yang bersifat formal. Selebihnya pencari kerja akan terdistribusi ke dalam lapangan usaha mandiri, yang bersifat tersier dan sebagian primer, seperti perdagangan dan *home industry*. Selama 5 tahun terakhir, Kota Lhokseumawe belum pernah memfasilitasi pihak lapangan usaha khususnya swasta untuk mengadakan bursa kerja swasta. Hal ini mungkin juga dikarenakan minimnya lowongan pekerjaan yang tersedia di sektor formal.

**Tabel 2.87**

**Persentase Pencari Kerja**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pencari kerja yang dilatih | 101 | 94 | 40 | 95 | 144 |
| 2 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar | 341 | 189 | 695 | 482 | 549 |
| **Persentase** | | **29,6** | **49,7** | **5,76** | **19,7** | **26,2** |

*Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2023*

Dari tabel tersebut di atas dilihat bahwa jumlah pencari kerja yang dilatih pada Tahun 2018 diperoleh jumlah pencari kerja yang dilatih sebanyak 101 orang dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 341, sehingga diperoleh persentase 29,6 persen. Adapun pada Tahun 2019, jumlah pencari kerja yang dilatih berjumlah 94 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 189 orang, sehingga diperoleh persentase 49,7 persen. Pada Tahun 2020 pencari kerja berjumlah 40 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 695, sehingga diperoleh persentase 5,76 persen. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang dilatih berjumlah 95 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 482 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 19.7 persen, dan Tahun 2022 meningkat dengan jumlah pencari

kerja yang dilatih berjumlah 144 orang dengan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 549 orang atau sebesar 26,2 persen.

## B. Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan

Penempatan Tenaga Kerja adalah proses pelayanan penempatan yang diberikan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan. Penempatan Tenaga Kerja diukur berdasarkan beberapa komponen, yakni adanya lowongan kerja terdaftar, pencari kerja terdaftar, dan pencari kerja ditempatkan. Dibawah ini dapat kita lihat persentase pencari kerja yang ditempatkan mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

**Tabel 2.88**

**Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar dan Ditempatkan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah pencari kerja yang ditempatkan | 29 | 93 | 331 | 189 | 44 |
| 2 | Jumlah pencari kerja yang terdaftar | 341 | 189 | 695 | 482 | 549 |
| **Persentase** | | **8,50** | **49,21** | **47,63** | **39,21** | **8,01** |

*Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2018 jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 29 orang dan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 341, dengan persentase 8,50 persen. Adapun pada Tahun 2019, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 93 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 189 orang, sehingga diperoleh persentase 49,21 persen. Pada Tahun 2020 pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 331 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 695, sehingga diperoleh persentase 47,63 persen. Pada Tahun 2021, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 189 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar berjumlah 482 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 39,21 persen. Pada tahun 2022, jumlah pencari kerja yang ditempatkan berjumlah 44 orang dari pencari kerja yang terdaftar sebanyak 549 orang. Sehingga, persentase dari data tersebut didapat sebesar 8,01%. Rendahnya jumlah pencari kerja yang ditempatkan

karena tidak semua pencari kerja yang tercatat dilaporkan kembali setelah mendapatkan pekerjaan.

## C. Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada awalnya dianggap merupakan hubungan perburuhan yang hanya membahas masalah hubungan antara pekerja/buruh dan pengusaha. Seiring dengan perkembangan dan kenyataan yang terjadi dilapangan bahwa masalah hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha ternyata juga menyangkut aspek lain yang luas.

Demikian hubungan perburuhan tidaklah terbatas hanya pada hubungan antara pekerja dan buruh dan pengusaha tetapi perlu adanya kebijakan Pemerintah Kota Lhokseumawe, apalagi di kota Lhokseumawe hanya ada 1 orang mediator khusus hubungan industrial. Dibawah ini dapat kita lihat persentase perselisihan hubungan industrial mulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

**Tabel 2.89**

**Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah perkara PPHI selesai dengan PB | 40 | 25 | 47 | 46 | 17 |
| 2 | Perkara PPHI yang dicatatkan | 40 | 25 | 50 | 46 | 29 |
| **Persentase** | | **100** | **100** | **94** | **100** | **58.6** |

*Sumber : DPMTSP Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa pada Tahun 2018 jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 40 orang dan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan sebanyak 40, dengan persentase 100 persen. Adapun pada Tahun 2019, jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 25 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 25 orang, sehingga diperoleh persentase 100 persen. Pada Tahun 2020 jumlah perkara PPHI selesai dengan PB berjumlah 47 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 50, sehingga diperoleh persentase 94 persen. Pada Tahun 2021, jumlah perkara PPHI

selesai dengan PB berjumlah 46 orang, sedangkan jumlah perkara PPHI yang dicatatkan berjumlah 46 orang, dengan demikian persentase yang diperoleh 100 persen. Pada tahun 2022, terdapat jumlah Perkara PPHI yang tercatat sebanyak 29 kasus. Dari 29 kasus tersebut terdapat 17 kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB), sedangkan lainnya ada yang belum terselesaikan dan ada kasus yang dilimpahkan ke tingkat provinsi.

## D. Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal merupakan bagian dari penyelenggaraan perekonomian sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah. Untuk memperepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui penanaman modal tersebut, pemerintah telah melakukan langkah-langkah untuk menarik investor dengan mebuat kebijakan melalui Peraturan Daerah Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah kepada masyarakat dan/atau investor sesuai dengan kewenangan berdasarkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal dapat berupa :

a. pengurangan pajak daerah.
b. pengurangan retribusi daerah.
c. pemberian bantuan modal dan/atau peralatan kerja kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan /atau Koperasi di Daerah;
d. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah.
e. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal.
f. penyediaan sarana dan prasarana.
g. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi.
h. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

i. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.
j. kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah.
k. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah.
l. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
m. kemudahan akses informasi lowongan pekerjaan dan pelaporan lowongan pekerjaan dari perusahaan.
n. kemudahan akses pasokan bahan baku, dan
o. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

#### 2.1.3.2.2.2 Pangan

**A. Ketersediaan Pangan Utama**

Ketersediaan pangan utama dapat dilihat dengan menghitung rasio antara rata-rata ketersediaan pangan utama per Tahun (Kg) dengan jumlah penduduk. Berdasarkan data, penduduk Kota Lhokseumawe bergantung pada makanan pokok berupa beras (padi). Selain itu terdapat sejumlah kecil produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar yang diketahui sebagai sumber karbohidrat yang dapat menggantikan peran beras (padi). Sampai saat ini Kota Lhokseumawe tidak memiliki permasalahan ketahanan pangan.

**Tabel 2.90**

**Ketersediaan Pangan Utama**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Rata-rata Jumlah Ketersediaan Pangan Utama per Tahun (Kg) | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Ketersediaan Pangan Utama (%) |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1091 | 203.280 | 0.0000054 |
| 2019 | 1100 | 207.200 | 0.0000053 |
| 2020 | 1092 | 188.710 | 0.0000058 |
| 2021 | 1100 | 210.180 | 0.0000052 |
| 2022 | 1096 | 210.177 | 0.0000052 |

*Sumber : DKP3 Kota Lhokseumawe 2023*

**2.1.3.2.2.3 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**A. Indek Pembangunan Gender**

Indeks Pembangunan Gender adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Keguanaan Indeks Pembangunan Gender untuk melengkapi penghitungan IPM dengan memberikan informasi capaian pembangunan manusia menurut gender. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan perbandingan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

**Gambar 2.24**
**Indeks Pembangunan Gender Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2018-2022**

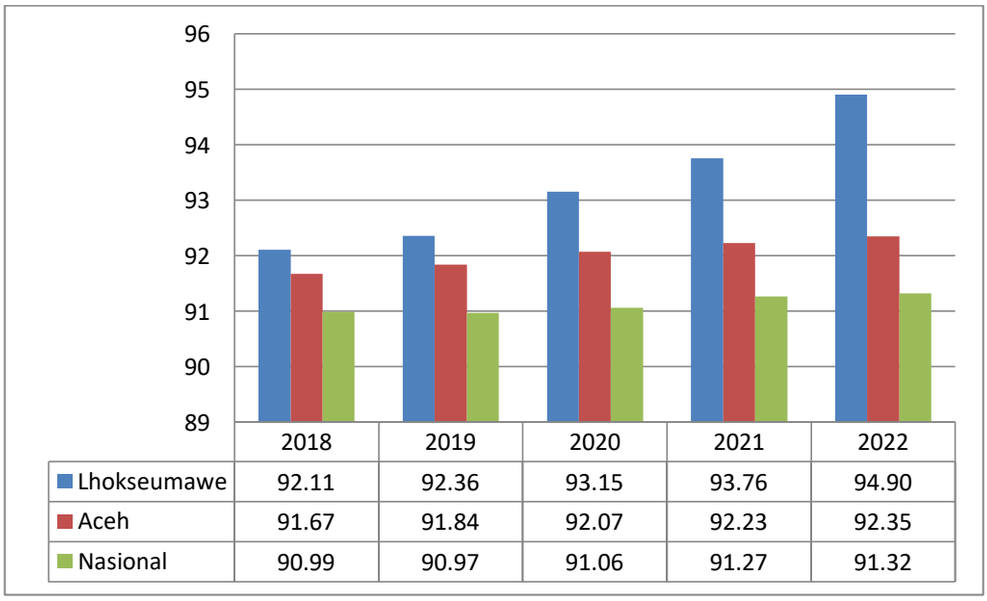


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lhokseumawe | 92.11 | 92.36 | 93.15 | 93.76 | 94.90 |
| Aceh | 91.67 | 91.84 | 92.07 | 92.23 | 92.35 |
| Nasional | 90.99 | 90.97 | 91.06 | 91.27 | 91.32 |

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe 2023*

**B. Indek Pemberdayaan Gender**

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), UNDP juga mengenalkan ukuran komposit lainnya yang terkait dengan gender,

yakni Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang digunakan untuk mengukur persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua ukuran ini, diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang kesetaraan dan keadilan gender yang telah dicapai melalui berbagai program pembangunan serta dapat digunakan sebagai bahan dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe terlihat pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2.25**
**Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2018-2022**

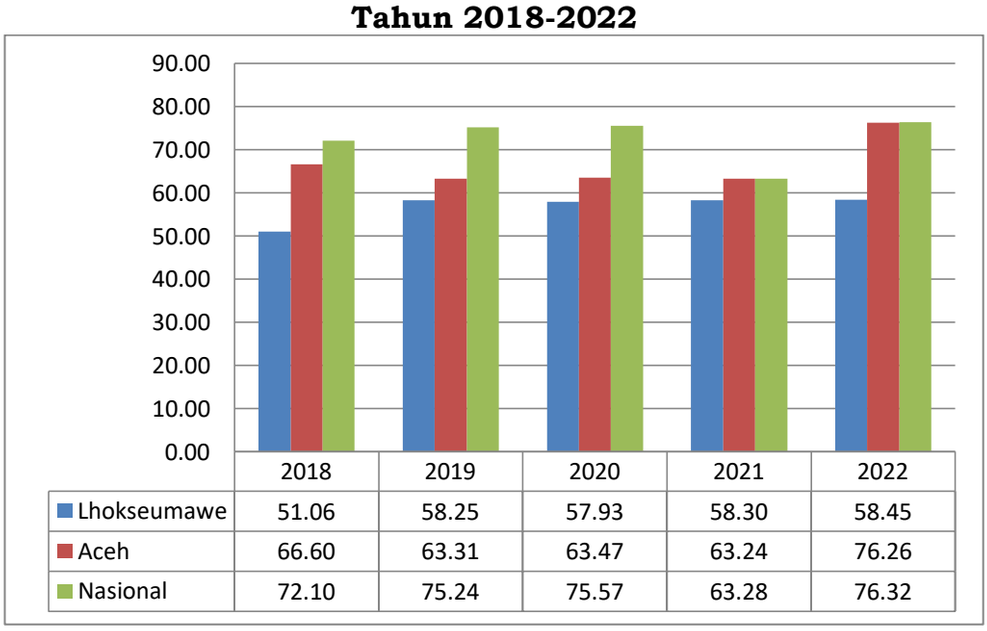


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lhokseumawe | 51.06 | 58.25 | 57.93 | 58.30 | 58.45 |
| Aceh | 66.60 | 63.31 | 63.47 | 63.24 | 76.26 |
| Nasional | 72.10 | 75.24 | 75.57 | 63.28 | 76.32 |

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe 2023*

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2022 semakin membaik walaupun pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe mengalami penurunan. Pada tahun 2018 IDG Lhokseumawe sebesar 51,06 lebih rendah dari Aceh sebesar 66.60 dan Nasional sebesar 72.10. Pada tahun 2020 IDG Lhokseumawe 57.93 masih lebih rendah dari Aceh sebesar 63.47 dan Nasional sebesar 75.57. Pada tahun 2021 IDG Lhokseumawe 58,30 lebih rendah dari Provinsi Aceh sebesar 63,24 dan Nasional sebesar 76,26 sedangkan tahun 2022 IDG Lhokseumawe meningkat menjadi 58,45, namun masih tetap lebih rendah dari Provinsi Aceh sebesar 63,28 dan Nasional sebesar 76,32.

## C. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Peran perempuan menjadi semakin publik, perempuan kini menikmati kesempatan pendidikan yang sama dengan laki-laki dan merupakan bagian yang signifikan dari tenaga kerja. Perempuan yang bekerja di pelayanan publik hampir mencapai setengahnya, dan sekarang terdapat lebih banyak perempuan yang duduk di parlemen dibandingkan periode-periode sebelumnya.

Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam lembaga Pemerintah sangat penting. baik Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Hal ini karena keberadaan perempuan dapat mewakili serta meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan yang diwakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan. Partisipasi perempuan yang rendah di bidang politik dan pemerintah akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebijakan publik yang responsif terhadap gender yang menyangkut baik laki-laki maupun perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Meski demikian ada banyak kerangka peraturan yang berpihak kepada perempuan, reformasi kebijakan di bidang hukum, politik, kepemiluan dan kelembagaan dapat membantu dalam menciptakan sebuah lingkungan yang lebih sensitif terhadap gender. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel persentase partisipasi perempuang di lembaga berikut ini:

**Tabel 2.91**
**Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah pekerja perempuan di Instansi Pemerintah | 3.100 | 3.400 | 3.421 | 3.475 | 2.210 |
| 2. | Jumlah Pekerja Perempuan | 71.645 | 72.891 | 73.412 | 72.345 | 34.739 |
| **Persentase** | | **4.32** | **4.66** | **4.66** | **4.73** | **6.4** |

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan data tabel 2.89 diatas dapat dilihat jumlah pekerja perempuan di Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe pada

tahun 2017 sebanyak 2.844 orang, pada tahun 2018 sebanyak 3.100 orang, kemudian pada tahun 2019 sebanyak 3.400 orang, tahun 2020 sebanyak 3.421 orang dan pada tahun 2021 terus meningkat menjadi 3.475, sedangkan untuk jumlah pekerja perempuan untuk tahun 2017 sebanyak 70.875 orang, tahun 2018 sebanyak 71.645 orang, tahun 2019 sebanyak 72.891, tahun 2020 terus meningkat menjadi sebanyak 73.412 orang sedangkan di tahun 2021 menurun menjadi sebanyak 72.345 orang. Dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 34.739. Dilihat dari persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Lhokseumawe didominasi oleh perempuan sebesar 65% sedangkan laki-laki 35% ini dapat dilihat dari keseluruhn jumlah ASN di Kota Lhokseumawe yaitu 3.367 jiwa, diantaranya yaitu laki-laki 1.157 jiwa dan perempuan 2.210 jiwa (sumber: Kota Lhokseumawe dalam angka 2022 Hal. 38).

**A. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK**

Partisipasi politik perempuan saat ini semakin dibutuhkan dalam upaya pengintegrasian kebutuhan gender dalam berbagai kebijakan publik dan menghasilkan instrument hukum yang sensitif gender, yang selama ini terabaikan dan banyak menghambat kemajuan perempuan di berbagai sektor kehidupan.

Namun terkadang pada kenyataannya, dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Sehingga partai politik menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.92**
**Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Laki-laki | 23 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 2. | Perempuan | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Jumlah** | | **25** | **25** | **25** | **25** | **25** |
| **Persentase** | | **8** | **16** | **16** | **16** | **16** |

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan data tabel 2.90 diatas proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR pada tahun 2018 sebanyak 2 orang atau 8% dan pada periode tahun 2019 sampai dengan 2022 naik dua kali lipat proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR meningkat menjadi 4 orang atau 16%. Keterwakilan Perempuan di Parlemen di Kota Lhokseumawe masih rendah selain belum tercapainya kuota 30 persen anggota DPR perempuan, lemahnya keterwakilan kaum hawa di lembaga pembuat undang-undang ini terlihat dari tidak ada satu pun perempuan yang menjadi pimpinan DPR atau Ketua Komisi.

## B. Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta

Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga swasta terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berikut data dapat dilihat pada tabel 2.91 berikut ini:

**Tabel 2.93**

**Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Pekerja Perempuan di instansi Swasta | 1.085 | 1.366 | 1.542 | 1.215 | 1.421 |
| 2. | Jumlah Pekerja Perempuan | 71.645 | 72.891 | 73.412 | 72.345 | 73.456 |
| **Persentase** | | **1.51** | **1.87** | **2.1** | **1.67** | **1.9** |

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan data tabel 2.91 diatas dapat dilihat partisipasi jumlah pekerja perempuan di instasi swasta pada tahun 2018 sebanyak 1.085 orang, tahun 2019 sebanyak 1.366 orang, Tahun 2020 meningkat sebanyak 1.542 orang, tahun 2021 menurun

menjadi 1.215 orang dan jumlah pekerja perempuan tahun 2018 sebanyak 71.645 orang, Tahun 2019 sebanyak 72.891 orang di Tahun 2020 terus meningkat menjadi 73.412 orang sedangkan Tahun 2021 menurun jumlah pekerja perempuan 73.421 menjadi 72.345 pekerja perempuan persentasenya 1.67% dan Tahun 2022 meningkat kembali menjadi 1.421 orang dengan jumlah pekerja perempuan 73.456 orang.

**C. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Jenis kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, meliputi:

- kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
- kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- penelantaran rumah tangga dimana setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang

layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) Tahun per 1.000 rumah tangga. Data rasio KDRT tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.94**

**Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah KDRT | 7 | 37 | 49 | 18 | 29 |
| 2. | Jumlah RT | 53.600 | 53.535 | 54.735 | 55.154 | 56.280 |
| **Rasio KDRT** | | **0.013%** | **0.067%** | **0.089%** | **0.032%** | **0.051%** |

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan data Tabel 2.92 Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Lhokseumawe menunjukkan jumlah yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian secara umum rasio KDRT di Kota Lhokseumawe bisa dikatakan masih sangat rendah. Hal ini bisa dilihat dari Rasio KDRT yang tidak mencapai angka 1 digit. Pada tahun 2018 angka Rasio KDRT 0,13%, tahun 2019 naik sedikit angka Rasio KDRT 0,067% sedangkan tahun 2020 meningkat angka Rasio KDRT sebanyak 0.089% dan tahun 2021 angka Rasio KDRT menurun menjadi 0,032% di Kota Lhokseumawe namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 0,051% di Kota Lhokseumawe.

## D. Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih Didalam Unit Pelayanan Terpadu

Kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak setiap Tahun jumlahnya terus meningkat, yang dilaporkan jauh lebih sedikit dengan kasus yang sebenarnya karena pada umumnya perempuan dan anak korban kekerasan sering merasa ragu maupun takut dalam melaporkan kekerasan yang dialaminya, atau ada kendala lain seperti sulitnya akses dalam mencapai layanan pengaduan dan kurangnya informasi yang dimiliki perempuan dan anak. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan

dan anak dari tindakan kekerasan dapat dilihat pada tabel 2.93 berikut:

**Tabel 2.95**

**Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Kota Lhokseumawe 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Jumlah Pengaduan yang diselesaikan | 19 | 22 | 86 | 56 | 75 |
| 2. | Jumlah Pengaduan | 19 | 22 | 86 | 56 | 75 |
| **Persentase** | | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : DP3AP2KB Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan data tabel 2.93 di atas terlihat bahwa jumlah pengaduan yang diselesaikan di Kota Lhokseumawe tahun 2018 sebanyak 19 orang, tahun 2019 sebanyak 22 orang, tahun 2020 meningkat sebanyak 86 orang dan di tahun 2021 menurun sebanyak 56 orang, namun pada tahun 2022 meningkat menjadi 75 kasus, sedangkan Jumlah Pengaduan di Kota Lhokseumawe tahun 2018 sebanyak 19 pengaduan dan meningkat menjadi 75 pengaduan pada Tahun 2022. Rasio penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Kota Lhokseumawe sangat baik, hal ini dapat dilihat dari seluruh pengaduan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada tahun 2018-2022 semuanya dapat diselesaikan.

#### 2.1.3.2.2.4 Pertanahan

Pertanahan merupakan bagian dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatur hubungan hukum antara tanah dengan orang sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA). Dalam urusan pertanahan terdapat beberapa elemen, diantaranya adalah Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

## A. Sertifikat Hak Milik

Hak Milik (HM) adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Sesuai dengan Undang-Undang Agraria bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Dari luas lahan wilayah Kota Lhokseumawe sebesar 129.067.057 m2, Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki lahan bersertifikat hak milik sebesar 660.058 $m^2$ sedangkan lahan bersertifikat hak milik masyarakat sebesar 17.520.000 $m^2$, kondisi tersebut merupakan kondisi sampai dengan tahun 2021. Dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 2.96**

**Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018–2022**

| No | uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas lahan bersertifikat milik pemerintah (m2) | 4.397 | 108.363 | 68.243 | 143.333 | 355.063 |
| 2 | Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2) | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 |
| | **Persentase** | **0,0024** | **0,060** | **0,038** | **0,079** | **0,196** |

*Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2023.*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2018 lahan bersertifikat milik Pemerintah Kota Lhokseumawe seluas 4.397 m2 atau 0,0024% dari total luas wilayah Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2022 luas lahan bersertifikat milik pemerintah seluas 355.063 m2 yaitu sebesar 0,196% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.97**

**Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas lahan bersertifikat milik masyarakat (m2) | 2.552.630 | 5.459.640 | 1.713.953 | 2.932.830 | 1.964.782 |
| 2 | Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2) | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 |
| | **Persentase** | **1,41** | **3,02** | **0,95** | **1,62** | **1,085** |

*Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2023.*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa luas lahan bersertifikat milik masyarakat di Kota Lhokseumawe. Terakhir tahun 2022 luas lahan bersertifikat milik masyarakat seluas 1.964.782 m2 yaitu sebesar 1,085% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

**B. Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha**

Hak Guna Bangunan (HGB) adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. Tidak mengenai tanah pertanian, oleh karena itu dapat diberikan atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara maupun tanah milik seseorang, sampai dengan tahun 2021 luas lahan yang digunakan untuk Hak Guna Bangunan (HGB) Kota Lhokseumawe seluas 325.700 $m^2$.

Hak Guna usaha (HGU) adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu paling lama 25 Tahun. Hak Guna Usaha merupakan hak khusus untuk mengusahakan tanah yang bukan miliknya sendiri guna perusahaan, pertanian, perikanan dan peternakan.

**Tabel 2.98**

**Persentase Luas Hak Guna Bangunan yang Dipetakan di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luas Hak Guna bangunan (m2) | 2.518 | 81.976 | 63.387 | 20.399 | 73.624 |
| 2 | Total luas lahan Kota Lhokseumawe (m2) | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 | 181.060.000 |
| | **Persentase** | **0,0014** | **0,045** | **0,035** | **0,011** | **0,041** |

*Sumber : Kantor BPN Kota Lhokseumawe 2023.*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sebesar 2.518 m2 atau 0,0014% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2022 Luas Hak Guna Bangunan di Kota Lhokseumawe menjadi 73.624 m2 atau 0,041% dari luas lahan yang ada di Kota Lhokseumawe.

**C. Penyelesaian kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan**

Pengertian sengketa tanah tertera dalam Undang-Undang Sengketa Tanah yaitu Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. Di dalamnya tertulis bahwa sengketa tanah atau sengketa adalah perselisihan tanah yang melibatkan badan hukum, lembaga atau perseorangan dan secara sosio-politis tidak memiliki dampak luas.

Singkatnya, tanah sengketa adalah tanah yang kepemilikannya dipermasalahkan oleh dua pihak, dimana mereka saling berebut untuk mengklaim kepemilikan tanah tersebut. Tanah sengketa adalah kasus yang bisa dibilang sering terjadi di Indonesia.

**Tabel 2.99**

**Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kota Lhokseumawe Tahun 2018–2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kasus yang Diselesaikan | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Jumlah Kasus yang Terdaftar | - | 1 | 1 | 1 | 3 |
| **Persentase** | | **-** | **100** | **100** | **100** | **0** |

*Sumber : Kantor Pertanahan Negara Kota Lhokseumawe 2023.*

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa penyelesaian kasus sengketa dan konflik pertanahan di Kota Lhokseumawe semuanya dapat diselesaikan. Dimana pada tahun 2019-2021 terjadi 1 kasus dan dapat diselesaikan 1 kasus. Namun Tahun 2022 dari 3 kasus yang terdaftar belum terselesaikan.

**2.1.3.2.2.5 Lingkungan Hidup**

**A. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. Selain itu sebagai bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan indeks tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Peningkatan nilai indeks kualitas lingkungan didasarkan pada target nilai indeks yang ditetapkan secara nasional pada tahun 2020, baik untuk nilai IKLH (68,71), IKA (55,10), IKU (84,10), IKL (61,66), dan IKAL (58,5). Indeks kualitas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Gambar di bawah:

**Gambar 2.26**

**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKA, IKU, IKL, IKLH) Tahun 2020-2022**

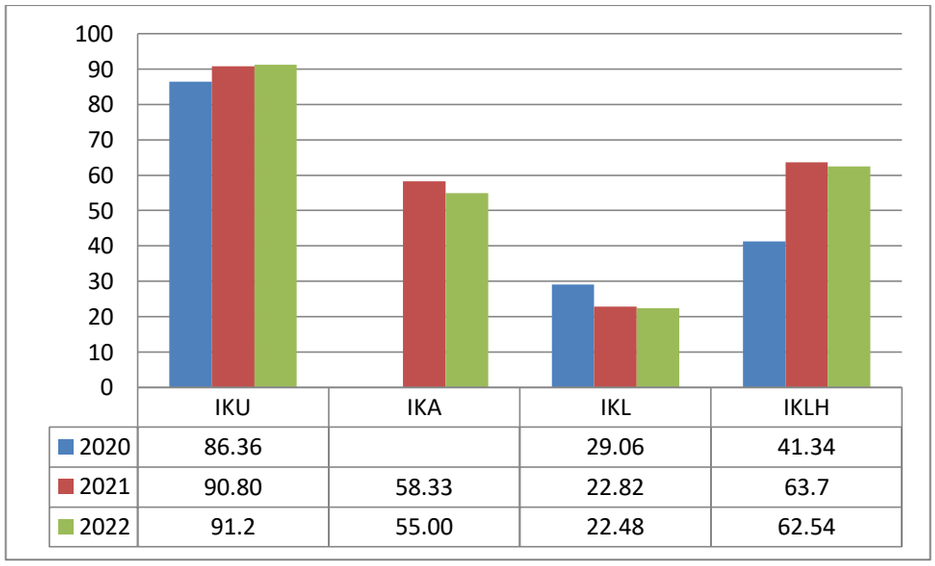


| | IKU | IKA | IKL | IKLH |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 86.36 | | 29.06 | 41.34 |
| 2021 | 90.80 | 58.33 | 22.82 | 63.7 |
| 2022 | 91.2 | 55.00 | 22.48 | 62.54 |

*Sumber: DLH Kota Lhokseumawe, 2023*

Dari Gambar di atas Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk, pada Tahun 2021 meningkat menjadi 63.70 dengan predikat sedang dan Tahun 2022 menurun menjadi 62.54 masih dengan predikat sedang. Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36, pada Tahun 2022

meningkat menjadi 91.20.Untuk Indeks Kualitas Air pada Tahun 2021 sebesar 58.33 dan Tahun 2022 menurun menjadi 55.00. Sedangkan Indeks Kualitas Lahan Lhokseumawe sebesar 29.06 dan mengalami penurunan menjadi 22.48 pada Tahun 2022.

**B. Tersedianya Dokumen RPPLH dan KLHS**

**1. Dokumen RPPLH**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjabarkan kewajiban membuat perencanaan lingkungan yang berkekuatan hukum untuk melengkapi perencanaan pembangunan (RPJP/RPJM) dan perencanaan spasial (RTRW). Dokumen yang berisi rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat multi sektor dengan mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan kewenangan daerah, serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.

Dokumen RPPLH Lhokseumawe masih dalam proses penyusunan. Kehadiran Qanun RPPLH akan memberikan dampak positif bagi Pemerintah Lhokseumawe dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencan Pembangunan Jangka Panjang Lhokseumawe (RPJPK) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota (RPJMK).

**2. Dokumen KLHS Kota**

Perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan telah diamanatkan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain dilakukan melalui upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terdiri dari pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Salah satu instrumen pertimbangan dalam pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Sampai saat ini Dokumen KLHS yang sudah tersedia adalah KLHS RPJMK 2017-

2022, dan KLHS RTRW 2012- 2032. Pada Tahun 2023 sedang dilakukan penyusunan KLHS RPJPD 2025-2045 dan KLHS RPJMK 2025-2030.

**C. Persentase Jumlah Sampah yang tertangani**

Lingkungan hidup hidup sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Lingkungan yang tercemar akan mengakibatkan hal yang fatal bagi manusia, misalnya air yang dicemari oleh limbah cair dari pabrik, udara yang dikotori oleh banyaknya asap kenderaan dan asap pabrik, dan juga limbah yang berasal dari medis ini akan mengakibatkan penyakit antara lain kanker, gangguan sistem syaraf, hepatitis, pembengkakan hati dan gejala depresi.

Kota Lhokseumawe mempunyai masalah dengan lingkungan, antara lain masih kurangnya penanganan masalah sampah maupun masalah pembuangan limbah baik padat maupun limbah cair. Masalah limbah cair antara lain limbah medis yang penanganannya masih sangat minim sekali.

Pengelolaan sampah suatu kota bertujuan untuk melayani sampah yang dihasilkan penduduk, secara tidak langsung turut memelihara kesehatan masyarakat serta menciptakan suatu lingkungan yang bersih, baik dan sehat. Saat ini pengelolaan persampahan menghadapi banyak tekanan terutama akibat semakin besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Semua sampah dari sumber masing-masing akan bermuara ke tempat pemrosesan akhir sampah (TPA) Alue Lim. Biasanya sumber sampah dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu :

1. sampah dari permukiman atau sampah rumah tangga;

2. sampah dari non permukiman yang sejenis sampah rumah tangga, seperti dari pasar, komersial dsb.

Sampah dari kedua jenis sumber tersebut dikenal sebagai sampah domestik, sedangkan sampah non-domestik adalah sampah atau limbah yang bukan sejenis sampah rumah tangga misalnya limbah dari proses industri.

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan sebagai hasil dari aktivitas manusia maupun hasil aktivitas alam yang tidak/belum memiliki nilai ekonomis.. Jenis sampah yang dihasilkan bermacam-macam bentuk dan jenisnya. Secara garis besar sampah dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: sampah kering atau sampah anorganik, sampah basah atau sampah organik dan sampah berbahaya. Sampah-sampah tersebut perlu adanya penanganan yang serius. Tujuan dan manfaat penangan sampah/pengelolaan sampah merupakan langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan mengubah sampah material yang tidak berguna menjadi material yang memiliki nilai ekonomis dan mengolah sampah menjadi material yang tidak membahayakan lingkungan hidup.

Untuk Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe setiap tahun mengalami peningkatan. Ini dapat dilihat dari jumlah sampah yang diproduksi dan jumlah sampah yang ditangani dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2021. Tahun 2018 sampah yang ditangani sama persentasenya yaitu dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 32.419 ton yang ditangani sebanyak 24.572 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 75,80%. Pada Tahun 2019 dari jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.067 ton yang ditangani sebanyak 25.604 ton, dapat dilihat capaian penanganan sampah 77,43%. Tahun 2020 jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 33.729 ton sampah yang tertangani meningkat menjadi 27.396 ton, capaian penanganan menjadi 81,22% dan meningkat lagi pada tahun 2021 dengan jumlah timbulan sampah yang ada di Kota sebanyak 34.403 ton yang ditangani sebanyak 29.672 ton, sehingga mencapai 86,25% sampah tertangani ditahun 2021. Pada Tahun 2022 persentase sampah yang

tertangani menurun menjadi 81.13%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah.

**Tabel 2.100**

**Persentase Jumlah Sampah yang tertangani Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah sampah yang tertangani (ton) | 24.572 | 25.604 | 27.396 | 29.672 | 28.470 |
| 2 | Total jumlah timbulan sampah di Kota (ton) | 32.419 | 33.067 | 33.729 | 34.403 | 35.091 |
| **Persentase** | | **75,80** | **77,43** | **81,22** | **86,25** | **81,13** |

*Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2023*

**D. Persentase Cakupan Area Pelayanan**

Pengelolaan sampah di lingkungan permukiman sebagian besar diselesaikan di lokasi sumber sampah dengan cara dibakar dan hanya sebagian yang dikumpulkan oleh pengumpul sampah informal untuk didaur ulang. Penanganan sampah di Kota Lhokseumawe yang meliputi pertokoan dan pasar sudah mencapai 100%, artinya semua timbulan sampah setiap harinya sudah dapat diangkut ke TPA.

Untuk menciptakan lingkungan yang bersih serta memberikan pelayananan kepada masyarakat di bidang persampahan dibutuhkan sejumlah sarana dan prasarana, seperti tempat penampungan sampah sementara (kontainer, bin/tong, bak permanen), alat pengangkut (gerobak, dumptruck, becak sampah), dan sebagainya.

Upaya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan upaya reduksi sampah di sumber penghasil sampah, yaitu di lingkungan rumah tangga. Salah satu cara melakukan reduksi sampah di lingkungan rumah tangga adalah dengan membentuk kelompok masyarakat pengolah sampah. Cakupan pelayanan sampah di kota juga makin tahun makin luas.

**Tabel 2.101**

**Persentase Cakupan Area Pelayanan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Luas area pelayanan pengelolaan sampah (km2/ha) | 130,00 | 150,00 | 160,00 | 165,00 | 166,00 |
| 2. | Luas area kabupaten/kota (km2/ha) | 181,06 | 181,06 | 181,06 | 181,06 | 181,06 |
| **Persentase** | | **71.80** | **82.84** | **88,36** | **91,13** | **91.68** |

*Sumber : DLH Kota Lhokseumawe, 2023*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase cakupan area pelayanan di Kota Lhokseumawe terjadi peningkatan yang signifikan seperti terlihat pada Tahun 2018 persentase cakupan area pelayanan sebesar 71.80% dan pada Tahun 2019 persentase cakupan area pelayanan menjadi sebesar 82.84%, pada Tahun 2020 persentase cakupan area pelayanan sebesar 88.36%, dan pada Tahun 2021 persentase cakupan area pelayanan sebesar 91.13% dan Tahun 2022 meningkat menjadi 91.68%..

**2.1.3.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**A. Rasio Penduduk Ber KTP Per Satuan Penduduk**

Setiap warga negara Indonesia yang sudah berumur > 17 Tahun atau sudah menikah wajib akan kepemilikan KTP, karena Kepemilikan KTP adalah mutlak diperlukan. Dengan memiliki KTP maka seseorang telah dapat melakukan hak dan kewajiban sebagai warga Negara sepenuhnya.

Program KTP-el diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia telah dimulai sejak tahun 2009 dengan ditunjuknya empat kota sebagai proyek percontohan Nasional, adapun keempat kota tersebut adalah Padang, Makasar, Yogyakarta dan Denpasar.

Untuk mempermudah pencatatan penduduk di Kota Lhokseumawe telah mulai dirintis pembuatan KTP-El. Dengan menggunakan KTP-El identitas seseorang akan direkam secara digital pada chip, sengan menggunakan KTP Digital akan dapat diketahui hasilnya secara lebih cepat. Selain itu penggunaan

Blangko secara otomatis akan lebih bisa dihemat, karena mencontreng dengan menggunakan media digital.

**Tabel 2.102**

**Rasio Penduduk ber-KTP per satuan Penduduk Kota Lhokseumawe Tahun 2018- 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah penduduk usia > 17 yang ber KTP | 116.032 | 122.958 | 125.483 | 126.300 | 129.740 |
| 2 | Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau pernah/sudah menikah | 132.038 | 128.230 | 130.141 | 130.633 | 132.102 |
| | **Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk** | **0.88** | **0.96** | **0,96** | **0,97** | **0.98** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023.*

Dari tabel dapat dijelaskan selama 5 (lima) tahun terakhir 2018-2022, rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk pada tahun 2019 yaitu sebesar 0,96% sedangkan pada tahun 2018 hanya 0,88% ini terlihat terjadi peningkatan dikarenakan Kebutuhan untuk pengurusan administrasi pada instansi lain dengan menerapkan penggunaan dokumen kependudukan seperti dalam pengurusan (KUA, BPJS, Pendidikan). Dan juga sudah adanya kesadaran masyarakat untuk memiliki Dokumen Kependudukan.

## B. Rasio Bayi Ber Akta Kelahiran

Akte kelahiran adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan jaminan atas status kewarganegaraan sebagaimana diatur dalam 28 D ayat (4) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”. Rasio Jenis kelamin waktu lahir, Para demografis mengajukan bahwa perbandingan antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan pada waktu lahir berkisar antara 103-105 bayi laki-laki per 100 bayi perempuan.

Setiap anak yg baru lahir perlu memiliki akte kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Namun saat ini terlihat bahwa

pembuatan akte kelahiran masih minim dikarenakan kurangnya kepedulian dari orangtua anak dalam menguruske dinas terkait. Berikut tabel rasio bayi berkata kelahiran Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 sampai dengan 2022.

**Tabel 2.103**

**Rasio Bayi ber Akta Kelahiran**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Bayi ber Akta Kelahiran | 18.279 | 18.311 | 18.159 | 18.532 | 20.567 |
| 2 | Jumlah Bayi | 20.269 | 20.996 | 20.296 | 18.589 | 20.753 |
| **Rasio** | | **0.88** | **0.87** | **0,96** | **0,97** | **0.99** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023.*

Berdasarkan Tabel di atas Rasio Bayi berakta Kelahiran dari Tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi sehingga menyebabkan rasio yang tidak stabil tetapi pada tahun 2021 mengalami peningkatan ini dikarenakan adanya kebutuhan yang meningkat untuk keperluan BPJS, Imigrasi, Ibadah Umrah, Penambahan Penghasilan Gaji Orang Tua, dll

## C. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Program KTP-elektronik dilatar belakangi oleh sistem pembuatan KTP konvensional/nasional di Indonesia yang memungkinkan seseorang dapat memiliki lebih dari satu KTP. Hal ini disebabkan belum adanya basis data terpadu yang menghimpun data penduduk dari seluruh Indonesia. Fakta tersebut memberi peluang penduduk yang ingin berbuat curang dalam hal-hal tertentu dengan manggandakan KTP-nya. Sedangkan untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di kota Lhokseumawe telah mulai berlaku setelah pergantian KTP merah putih yaitu pada Tahun 2006. Pada Tahun 2012 terjadi pergantian KTP Nasional menjadi KTP elektronik atau e-KTP. Hampir 90 persen penduduk Kota Lhokseumawe telah memiliki dan/ atau telah mengaktifkan e-KTP. Dengan demikian penerapan KTP

Nasional berbasis NIK di Kota Lhokseumawe telah berhasil dengan baik.

## D. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan. Ayat (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam rangka mewujudkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk diperlukan kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 101 Undang-undang nomor 23 Tahun 2006. KTP merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh NKRI. KTP wajib dimiliki oleh penduduk yang telah berumur 17 Tahun keatas atau telah kawin atau pernah menikah. Masa berlaku nya KTP adalah 5 tahun kecuali penduduk yang berusia 60 tahun ke atas diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

**Tabel 2.104**

**Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah KTP ber-NIK yang diterbitkan | 116.032 | 122.988 | 125.483 | 126.300 | 129.740 |
| 2 | Jumlah penduduk wajib KTP | 132.038 | 128.230 | 130.141 | 130.633 | 132.102 |
| | **Persentase** | **88** | **96** | **96** | **97** | **98** |

*Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023.*

Dari tabel jelas sekali, bahwa untuk penggunaan NIK pada KTP yang diterbitkan dari tahun ke tahun (2018-2022) mengalami peningkatan dikarenakan Mutasi pindah datang penduduk dan

sangat mepengaruhi jumlah NIK pada Kota Lhokseumawe. Jumlah penduduk yang berumur 17 tahun dari Tahun ke tahun semakin bertambah juga, sehingga terjadi penambahan penduduk untuk wajib KTP.

**2.1.3.2.2.7 Komunikasi dan Informatika**

**A. Website Milik Pemerintah Daerah**

Website milik Pemerintah Daerah sangat bermanfaat bagi publik agar publik dapat dengan mudah mengakses data maupun informasi mengenai Pemerintahan. Begitu juga sebaliknya, bagi Pemerintah sendiri website dapat menjadi sebuah instrumen dalam mewujudkan transparansi publik. Saat ini seluruh Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe telah memiliki website.

**B. Pameran/Expo**

Pameran/Expo bagi masyarakat sangat berguna karena merupakan event dimana publik dapat melihat informasi maupun perencanaan-perencanaan kedepan yang akan dilakukan bahkan dapat melihat berbagai produk-produk terbaru. Substansi pameran itu sendiri tergantung pada tema di saat melakukan pameran. Tema pameran dapat berbagai macam sehingga masyarakat sangat mendapatkan keuntungan dari dilakukannya sebuah pameran. Kota Lhokseumawe sendiri telah melakukan sebanyak 2 (dua) kegiatan pameran yaitu pada tahun 2017 Pameran Gampong Expo Kota Lhokseumawe dan tahun 2019 Lhokseumawe Expo.

**C. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan program dari Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) yang diimplementasikan oleh seluruh instansi pemerintahan yang ada di Indonesia. KIM dijalankan dengan maksud mewujudkan masyarakat yang aktif dan peka akan informasi, serta menciptakan jaringan informasi media komunikasi dua arah dengan meghubungkan satu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya agar bisa saling memberdayakan, salah satunya dalam mengumpulkan, mengelola dan menyebarkan informasi.

Melalui KIM, masyarakat diberdayakan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk kepentingannya sendiri dan untuk kepentingan kebijakan pemerintah dalam melanjutkan informasi pembangunan agar tidak terjadi kesenjangan informasi. Tujuan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah sebagai mitra pemerintah dalam penyebarluasan, sosialisasi dan diseminasi informasi pembangunan kepada masyarakat sebagai mediator komunikasi informasi pembangunan secara timbal balik dan berkesinambungan serta menjadi forum media untuk pelayanan komunikasi dan informasi pemerintah dan pembangunan.

Selain dari tujuan tersebut, KIM berfungsi sebagai wahana informasi antar anggota KIM , dari KIM kepada pemerintah dan dari pemerintah kepada masyarakat, KIM sebagai mitra dialog dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan publik. KIM sebagai sarana peningkatan literasi anggota KIM dan masyarakat dibidang informasi dan media masa. KIM sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Tingkat Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.105**

**Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Jumlah Kecamatan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| **Persentase** | | **100** | **100** | **100** | **100** | 100 |

*Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 terdapat empat (4) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan empat (4) jumlah Kecamatan yang ada dalam Kota Lhokseumawe.

## D. Penyebarluasan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, searah dengan hal tersebut hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Melalui program penyebarluasan informasi dimaksud untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai. Selain itu juga ditujukan untuk meningkatkan pemerataan informasi/komunikasi timbal batik secara terbuka dan bertanggung jawab.

Berikut tabel di bawah ini menjelaskan presentase penyebarluasan informasi publik Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 sampai dengan 2022.

**Tabel 2.106**

**Persentase Penyebarluasan Informasi Publik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Informasi publik yang tercatat | 2 | 3 | 8 | 10 | 27 |
| 2 | Jumlah informasi Publik yang tersedia | 50 | 52 | 55 | 60 | 81 |
| **Persentase** | | **4,0** | **5,8** | **14,5** | **16,7** | **33,3** |

*Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa jumlah informasi publik yang tercatat dan jumlah informasi publik yang tersedia persentasenya adalah 4% pada Tahun 2018 dan meningkat menjadi 33,3% pada Tahun 2022.

Melalui program penyebarluasan informasi dimaksudkan untuk memberikan, menyampaikan informasi yang sehat, akurat kepada masyarakat agar dapat diketahui dengan jelas tentang arah dan tujuan pembangunan yang akan ditempuh serta hasil yang telah dicapai. Persentase pelayanan publik yang terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.104 berikut:

**Tabel 2.107**

**Persentase Pelayanan Publik yang Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah PD yang terintergrasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Seluruh PD | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Persentase | | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2.9 |

*Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2023.*

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa jumlah PD yang pelayanan publik yang terintegrasi baru Dinas Informasi, Komunikasi dan Persandian dari 34 PD yang ada di Kota Lhokseumawe. Tahun 2018 persentase pelayanan publik yang terintegrasi sebanyak 3% disebabkan karena PD yang ada di Kota Lhokseumawe 32 PD, sedangkan pada Tahun 2019-2022 ada penambahan 1 Perangkat Daerah yaitu Dinas Pertanahan.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kini memiliki kewenangan sebagai Wali Data statistik sektoral. Kewenangan tersebut berdasarkan tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

**Tabel 2.108**

**Persentase PD yang Melakukan Pengamanan Data dan Informasi Terintegrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah PD yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Jumlah Seluruh PD | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| **Persentase** | | **3** | **2,9** | **2,9** | **2,9** | **2,9** |

*Sumber : Diskominfo Kota Lhokseumawe, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi hanya satu Perangkat Daerah saja yaitu Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian. Sedangkan Perangkat Daerah yang ada di Kota Lhokseumawe terdapat 34 Perangkat Daerah. Diharapkan untuk tahun berikutnya akan bertambah jumlah Perangkat Daerah yang menggunakan sandi dalam komunikasi.

**2.1.3.2.2.8 Penanaman Modal**

**A. Jumlah Investor Bersekala Nasional (PMDN/PMA).**

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Jumlah seluruh investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.616 Investor dan khususnya untuk PMA (penanaman modal asing) tidak ada sama sekali investor. Pada Tahun 2018 jumlah investor PMDN sebesar 139, tahun 2019 jumlah investor PMDN sebesar 152, di Tahun 2020 jumlah investor PMDN/PMA terjadi kenaikan sebesar 434 dan di Tahun 2021 jumlah investor PMDN/PMA terjadi penurunan sebesar 432 namun Tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi 459. Berikut tabel Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.109**

**Jumlah Investor PMDN/PMA**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Investor | 139 | 152 | 434 | 432 | 459 |

*Sumber : DPMTSPNAKER, 2023*

**B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)**

Jumlah Investasi pada Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 jumlah Investasi PMDN sebesar 618 (milyar), tahun 2019 jumlah Investasi PMDN sebesar 793 (milyar), di Tahun 2020 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.268 (milyar) dan pada Tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5.303 (milyar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.110**

**Jumlah Investasi PMDN/PMA**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | URAIAN | PMDN (Milyar) |
|---|---|---|
| 2018 | Jumlah Investasi | 618 |
| 2019 | Jumlah Investasi | 793 |
| 2020 | Jumlah Investasi | 1.268 |
| 2021 | Jumlah Investasi | 5.303 |
| 2022 | Jumlah Investasi | 1.107 |

*Sumber : DPMTSPNAKER, 2023.*

Jumlah investasi tahun 2022 Rp. 1.107.119.499.191,- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementrian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori : Usaha mikro < 1 M, Usaha kecil 1M-5 M, Usaha Menengah 5M-10 M dan Usaha Besar >10 M. maka pencatatan investasi berpengaruh pada klifikasi tersebut, sehingga terjadi penurunan nilai Investasi. Dengan berlakunya sistem OSS RBA, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara pelaku usaha UMK (<1M) tidak masuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMK, maka terjadi penurunan realisasi investasi.

**2.1.3.2.2.9 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

**A. Indeks Desa Membangun**

Desa mempunyai peran yang cukup besar dalam upaya menentukan arah visi membentuk sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik di masa depan. Upaya tersebut dapat dimulai dengan menggerakkan pembangunan, meningkatkan kualitas hidup, serta kesejahteraan masyarakat desa. Aspek yang penting untuk mencapai visi tersebut adalah pembangunan desa. Dalam hal pembangunan desa, instrumen yang perlu diketahui adalah bagaimana permasalahan yang sebenarnya dialami oleh desa dan seberapa besar dan kuat potensi desa yang dimiliki.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melalui Permendesa Nomor 2 Tahun 2016, telah menetapkan beberapa indikator yang memberi kemudahan kepada desa untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemandirian desanya. Dengan adanya instrumen tersebut, desa dapat mengenali dan menggali informasi, sejauh mana permasalahan yang dialami dan potensi yang dimiliki untuk mendorong desa keluar dari jerat masalahnya. Perkembangan status desa di Kota Lhokseumawe per Kecamatan pada tahun 2018-2022 dapat kita lihat pada Tabel di bawah ini.

**Tabel 2.111**

**Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Nama Desa | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **A** | **Muara Dua** | | | | | |
| | - Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | - Maju | 2 | 2 | 5 | 5 | 12 |
| | - Berkembang | 13 | 13 | 12 | 12 | 4 |
| | - Tertinggal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **B** | **Banda Sakti** | | | | | |
| | - Mandiri | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| | - Maju | 1 | 1 | 3 | 3 | 12 |
| | - Berkembang | 15 | 15 | 14 | 14 | 1 |
| | - Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **C** | **Blang Mangat** | | | | | |
| | - Mandiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | - Maju | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | - Berkembang | 21 | 21 | 20 | 20 | 19 |
| | - Tertinggal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **D** | **Muara Satu** | | | | | |
| | - Mandiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | - Maju | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 |
| | - Berkembang | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 |
| | - Tertinggal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| | - Sangat Tertinggal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| **TOTAL** | | **68** | **68** | **68** | **68** | **68** |

Sumber: Keputusan Menteri Desa, PDTT dan Transmigrasi Nomor : 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa

Untuk lebih jelas jumlah status desa di Kota Lhokseumawe tahun 2017-2021 dapat di lihat pada gambar dibawah ini :

**Gambar 2.27**

**Status Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

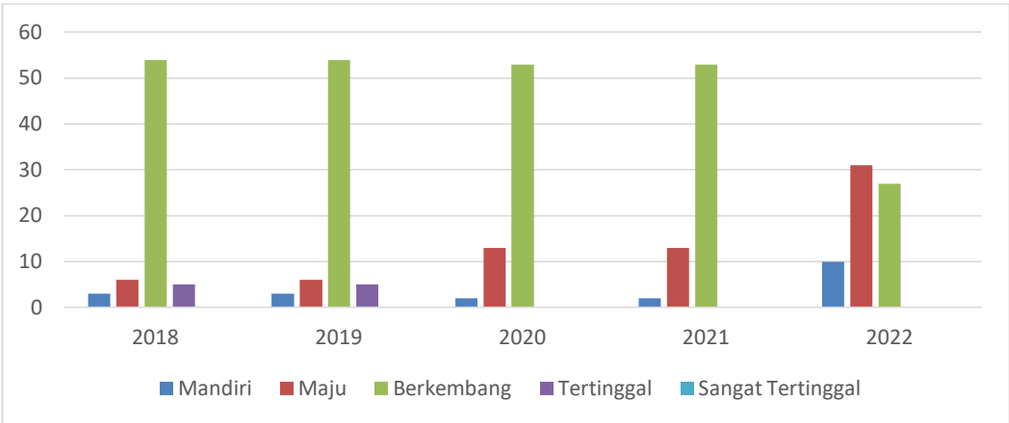


*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe Tahun 2023.*

Dari Gambar di atas, terlihat bahwa status desa yang sangat tertinggal di Kota Lhokseumawe tidak ada, dan status desa tertinggal menurun dari tahun 2018 dan 2019 sebanyak 5 desa menjadi tidak ada desa tertinggal sejak tahun 2020. Sedangkan status desa berkembang dari tahun 2018 dan 2019 sebanyak 54 desa menurun menjadi 53 desa di tahun 2020 dan 2021, pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 27 desa yang berstatus desa berkembang. Status desa maju terdapat pada 6 desa pada tahun 2018 dan 2019, pada tahun 2020 dan 2021 meningkat jumlah desa yang berstatus maju menjadi sebanyak 13 desa serta tahun 2022 juga terus mengalami peningkatan menjadi 31 desa yang berstatus desa maju. Status desa mandiri pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dimana terdapat 10 desa yang berstatus desa mandiri. Sedangkan tahun 2021 dan 2020 justru mengalami penurunan menjadi 2 desa yang berstatus mandiri, dari kondisi pada tahun 2018 dan 2019 yang terdapat sebanyak 3 desa berstatus mandiri.

Penurunan atau peningkatan status desa dari status mandiri menjadi status maju serta status desa maju menjadi berkembang dan sebaliknya dikarenakan adanya faktor-faktor yang tidak mampu dipertahankan ataupun dipenuhi oleh desa tersebut atau terdapat factor-faktor yang mampu dipertahankan dan ditingkatkan. Untuk mengetahui nilai Indek Desa Membangun (IDM) di Kota

Lhokseumawe pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.112**
**Indeks Desa Membangun Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| KECAMATAN | NAMA GAMPONG | IDM | STATUS |
|---|---|---|---|
| BANDA SAKTI | BANDA MASEN | 0,7162 | MAJU |
| | HAGU BARAT LAUT | 0,7368 | MAJU |
| | HAGU SELATAN | 0,7616 | MAJU |
| | HAGU TEUNGOH | 0,7410 | MAJU |
| | JAWA BAROE | 0,8148 | MAJU |
| | KAMPUNG JAWA LHOKSEUMAWE | 0,8733 | MANDIRI |
| | KEUDE ACEH | 0,8090 | MAJU |
| | KOTA LHOKSEUMAWE | 0,8463 | MANDIRI |
| | KUTA BLANG | 0,8860 | MANDIRI |
| | LANCANG GARAM | 0,8863 | MANDIRI |
| | MON GEUDONG | 0,7473 | MAJU |
| | PUSONG BARU | 0,7741 | MAJU |
| | PUSONG LHOKSEUMAWE | 0,7702 | MAJU |
| | SIMPANG EMPAT | 0,8108 | MAJU |
| | TUMPOK TEUNGOH | 0,8283 | MANDIRI |
| | UJONG BLANG | 0,8079 | MAJU |
| | ULEE JALAN | 0,7454 | MAJU |
| | UTEUN BAYI | 0,6884 | BERKEMBANG |
| BLANG MANGAT | ALUE LIM | 0,6883 | BERKEMBANG |
| | ASAN KAREUNG | 0,6594 | BERKEMBANG |
| | BALOI | 0,6041 | BERKEMBANG |
| | BLANG BULOH | 0,7049 | BERKEMBANG |
| | BLANG CUT | 0,7040 | BERKEMBANG |
| | BLANG PUNTEUET | 0,7163 | MAJU |
| | BLANG TEUE | 0,6538 | BERKEMBANG |
| | BLANG WEU BAROH | 0,6887 | BERKEMBANG |
| | BLANG WEU PANJOE | 0,6870 | BERKEMBANG |
| | JAMBO MESJID | 0,7029 | BERKEMBANG |
| | JAMBO TIMU | 0,7044 | BERKEMBANG |
| | JEULIKAT | 0,6903 | BERKEMBANG |
| | KEUDE PUNTEUET | 0,8300 | MANDIRI |
| | KUALA | 0,7071 | BERKEMBANG |
| | KUMBANG PUNTEUET | 0,6686 | BERKEMBANG |
| | MANE KAREUNG | 0,6608 | BERKEMBANG |
| | MESJID PUNTEUET | 0,8438 | MANDIRI |
| | RAYEUK KAREUNG | 0,6819 | BERKEMBANG |
| | SEUNEUBOK | 0,6981 | BERKEMBANG |
| | TEUNGOH | 0,7035 | BERKEMBANG |
| | TUNONG | 0,6917 | BERKEMBANG |
| | ULEE BLANG MANE | 0,6489 | BERKEMBANG |
| MUARA DUA | ALUE AWE | 0,7395 | MAJU |

| KECAMATAN | NAMA GAMPONG | IDM | STATUS |
|---|---|---|---|
| | BLANG CRUM | 0,7197 | MAJU |
| | BLANG POROH | 0,7248 | MAJU |
| | COT GIREK KANDANG | 0,7657 | MAJU |
| | CUT MAMPLAM | 0,6832 | BERKEMBANG |
| | KEUDE CUNDA | 0,7151 | MAJU |
| | LHOK MON PUTEH | 0,7352 | MAJU |
| | MEUNASAH ALUE | 0,6971 | BERKEMBANG |
| | MEUNASAH BLANG | 0,7168 | MAJU |
| | MEUNASAH MANYANG | 0,7219 | MAJU |
| | MEUNASAH MEE | 0,7933 | MAJU |
| | MEUNASAH MESJID | 0,8490 | MANDIRI |
| | MNS. PANGGOI | 0,7763 | MAJU |
| | PALOH BATEE | 0,6511 | BERKEMBANG |
| | PAYA BILI | 0,7035 | BERKEMBANG |
| | PAYA PUNTEUET | 0,7725 | MAJU |
| | UTEUNKOT | 0,7873 | MAJU |
| MUARA SATU | BATUPHAT BARAT | 0,8102 | MAJU |
| | BATUPHAT TIMUR | 0,8603 | MANDIRI |
| | BLANG NALEUNG MAMEH | 0,8008 | MAJU |
| | BLANG PANYANG | 0,7171 | MAJU |
| | BLANG PULO | 0,8787 | MANDIRI |
| | COT TRIENG | 0,6768 | BERKEMBANG |
| | MEUNASAH DAYAH | 0,7025 | BERKEMBANG |
| | MEURIA PALOH | 0,7930 | MAJU |
| | PADANG SAKTI | 0,8105 | MAJU |
| | PALOH PUNTI | 0,7456 | MAJU |
| | UJONG PACU | 0,6959 | BERKEMBANG |

*Sumber: Keputusan Menteri Desa, PDTT dan Transmigrasi Nomor : 80 Tahun 2022 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa*

## B. Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintahan Desa Yang Baik

Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan menunjang kegiatan pemerintahan desa perlu tersedianya sarana prasarana kantor desa yang memadai. Termasuk ruangan untuk menunjang pelayanan dan kegiatan pemerintahan desa. Kota Lhokseumawe terdiri dari 68 gampong dimana sampai dengan Tahun 2022 hanya 1 gampong saja dengan kondisi kantor yang rusak dan 3 gampong yang belum memiliki kantor untuk urusan pemerintahan gampongnya. Pemerintahan gampong yang kondisi bangunannya rusak maupun yang tidak memiliki kantor dalam menjalankan kegiatan pemerintahan menggunakan sarana prasarana lainnya yang ada di gampong seperti bangunan yang ada di mesjid, meunasah,

gedung pertemuan maupun ruangan lain yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi Kantor Pemerintahan Desa selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.113**

**Data Kondisi Kantor Pemerintahan Desa Tahun 2018-2022**

| No | Kondisi Kantor | Jumlah Kondisi Kantor Geuchik | | | | | Keterangan (Gampong) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Kantor Dalam Kondisi Baik | 54 | 58 | 60 | 64 | 64 | |
| 2 | Kantor Dalam Kondisi Rusak | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | Kota Lhokseumawe |
| 3 | Belum Memiliki Kantor | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 | Hagu Teungoh, Jambo Timu, Batuphat Timur |
| **Jumlah** | | **68** | **68** | **68** | **68** | **68** | |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Selanjutnya cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik diperoleh dari perbandingan antara jumlah kantor pemerintahan desa yang baik dengan jumlah seluruh pemerintahan desa dikali 100%. Sejak Tahun 2018-2022 data cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.114**

**Cakupan Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Desa yang Baik di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana | Jumlah kantor yang baik | cakupan sarana prasarana |
| 1 | Banda Sakti | 18 | 16 | 88,88% | 16 | 88,88% | 16 | 88,88% | 16 | 88,88% | 16 | 88,88% |
| 2 | Muara Satu | 11 | 7 | 63,63% | 6 | 54,54% | 7 | 63,63% | 10 | 90,91% | 10 | 90,90% |
| 3 | Blang Mangat | 22 | 18 | 81,81% | 17 | 72,72% | 18 | 95,45% | 21 | 95,45% | 21 | 95,45% |
| 4 | Muara Dua | 17 | 13 | 76,47% | 13 | 76,47% | 13 | 94,11% | 17 | 100% | 17 | 100% |
| **Jumlah** | | **68** | **54** | **79,41%** | **52** | **76,47%** | **54** | **85%** | **60** | **94,11%** | **64** | **94.11%** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintah desa yang baik di Kota Lhokseumawe pada

tahun 2018 sebesar 79,41%, terjadi penurunan di tahun 2019 menjadi sebesar 76,47% namun di Tahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan sebesar 79,41% hingga mencapai 88,23% serta 94,11% pada tahun 2022. Peningkatan cakupan sarana prasarana perkantoran tersebut menjadi baik pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

## C. Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Yang Baik

Dana Desa/Gampong adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa/Gampong yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Kota Lhokseumawe setiap Tahun telah memfasilitasi dana untuk gampong dengan pemerataan kemampuan keuangan antar Gampong yang dilaksanakan dari APBK melalui Alokasi Dana Gampong (ADG). Sejak Tahun 2015 pemerintah pusat mulai APBN menyalurkan Dana Desa (DD). Pada Tahun 2016 Pemerintah Kota Lhokseumawe mulai menyalurkan dana bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah (BHPRD) untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gampong. Adapun besaran dana yang disalurkan untuk gampong sejak Tahun 2018 s.d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.115**

**Data Penyaluran Dana Ke Gampong**
**Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Realisasi Penyaluran Dana ke Gampong | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Alokasi Dana Gampong (ADG) dan Kurang Bayar ADG | 47.393.135.135 | 49.971.344.117 | 40.846.685.523 | 44.587.713.353 | 43.990.585.700 |
| 2 | Dana Desa (DD) | 53.475.677.300 | 58.773.329.996 | 60.285.819.000 | 61.858.474.338 | 61.983.149.000 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) | 973.164.381 | - | 447.198.335 | 1.873.782.221 | 1.857.415.769 |
| **Jumlah** | | **101.841.976.816** | **108.744.674.113** | **101.579.702.858** | **108.319.969.912** | **107.831.150.469** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023*

Dari tabel dapat dilihat bahwa dana yang menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) pada Tahun 2018 sebesar Rp. 101.841.976.816,- dan terus berfluktuasi hingga pada tahun 2022 menjadi Rp. 107.831.150.469,- Dana APBG tersebut digunakan untuk mendanai kebutuhan gampong dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan masyarakat dan belanja tak terduga. Pemerintah desa/gampong diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan gampong dan kekayaan milik gampong.

Begitu besar peran yang diterima oleh gampong, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah gampong harus bisa menerapkan prinsip tertib, transparan, akuntabel, dan berkualitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan gampong harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu perlu adanya pembinaan secara berkesinambungan guna peningkatan kapasitas SDM aparatur gampong yang baik di bidang pengelolaan keuangan.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2018-2022 telah melakukan pembinaan kepada pemerintah gampong dengan melakukan penyusunan produk hukum gampong, pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap proses perencanaan, pengganggaran, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset gampong serta penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut :

**Tabel 2.116**
**Data Cakupan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Gampong Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | Jumlah Gampong Yang Dibina | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2018 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Banda Sakti | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2. | Muara Satu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 3. | Blang Mangat | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 4. | Muara Dua | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | **Jumlah** | **68** | **68** | **68** | **68** | **68** | **68** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Prioritas penggunaan Dana Desa salah satunya adalah pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dengan tujuan memberdayakan gampong dengan usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengganggguran, peningkatan Pendapatan Asli Gampong (PAG), meningkatkan kemandirian dan kapasitas gampong serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di gampong. Pada Tahun 2018 pemerintah gampong melalui APBG menganggarkan Dana Desa (DD) untuk belanja penyertaan modal gampong guna mendukung modal awal Badan Usaha Milik Gampong (BUMG). Pembinaan dilakukan Pemerintah Kota Lhokseumawe terhadap BUMG sebagai upaya pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap tumbuh kembangnya usaha guna mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan warga gampong dan Pendapatan Asli Gampong (PAG). Dana Desa dipergunakan secara terarah, ekonomis, efesien, efektif, berkeadilan, dan terkendali. Selama Tahun 2018-2022 data pendirian Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.117**

**Data Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Kecamatan | Tahun Pendirian dan Penyertaan Modal Gampong | | | | | Penyertaan Modal Gampong | BUMDESMA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| 1 | Banda Sakti | 2.395.503.306 | 964.466.591 | - | - | | 4.567.252.991 | - |
| 2 | Muara Satu | 884.870.269 | 188.000.000 | - | - | | 2.727.410.020 | - |
| 3 | Blang Mangat | 1.761.707.870 | 431.000.000 | 257.892.700 | - | | 4.918.607.810 | - |
| 4 | Muara Dua | 1.257.127.743 | 451.506.734 | 263.130.589 | - | | 4.214.662.316 | 1.600.000.000 |
| **JUMLAH** | | **6.299.209.189** | **2.034.973.325** | **521.023.289** | | - | **17.000.573.788** | **1.600.000.000** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel dapat dilihat bahwa penyertaan modal untuk BUMG di awal Tahun 2018 sebesar Rp. 6.299.209.189,-, di tahun 2019 sebesar Rp. 2.034.973.325,- dan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 521.023.289,- sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 belum ada data yang diberikan oleh dinas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa penyertaan modal yang diberikan oleh pemerintah gampong kepada BUMG sangat besar dan guna mencapai tujuan pendirian perlu adanya pembinaan BUMG tersebut dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong dilakukan terhadap seluruh gampong yang ada di 4 kecamatan dalam wilayah kota Lhokseumawe sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.118**

**Cakupan Pembinaan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | Jumlah BUMG | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | BUMDESMA |
| 1 | Banda Sakti | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | - |
| 2 | Muara Satu | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | - |
| 3 | Blang Mangat | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | - |
| 4 | Muara Dua | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 1 |
| | **Jumlah** | **68** | **64** | **67** | **67** | **67** | **68** | **1** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah BUMG yang ada di Kota Lhokseumawe terus bertumbuh, dimana pada Tahun 2018 sebanyak 64 unit BUMG dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2022 mencapai 68 unit. Pada Tahun 2019 telah berdiri Badan Usaha Milik Bersama (BUMDESMA) yang beranggotakan 16 gampong dan berada di wilayah Kecamatan Muara Dua.

## D. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut TP PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Lhokseumawe melaksanakan pembinaan secara

berjenjang dari TP-PKK Kecamatan sampai TP-PKK Gampong dan dilakukan secara bergantian setiap Tahunnya. Selanjutnya TP-PKK Gampong membina kelompok PKK Dusun dan Kelompok Dasa Wisma. Kelompok binaan PKK merupakan Kelompok-kelompok Masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Gampong yang terdiri dari Kelompok PKK Dusun, Kelompok Dasa Wisma dan lain-lain. Jumlah kelompok Dasa Wisma adalah bagian dari jumlah Kelompok PKK Dusun yang ada di Gampong.

**Tabel 2.119**

**Data Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | TP PKK Kecamatan | Jumlah TP-PKK Gampong | Kelompok Binaan | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Banda Sakti | 18 | 3 | 3 | 7 | 2 | 18 |
| 2. | Muara Satu | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Blang Mangat | 22 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 4. | Muara Dua | 17 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| | **Jumlah** | **68** | **9** | **10** | **12** | **7** | **19** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel dapat dilihat bahwa jumlah kelompok binaan PKK berfluktuasi dan mengalami peningkatan di tahun 2022. Pada Tahun 2018 jumlah yang dibina sebanyak 9 kelompok dan menjadi 19 kelompok di tahun 2022 yang tersebar di 4 Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe.

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK diperoleh dari perbandingan antara jumlah kelompok binaan PKK dengan jumlah PKK. Selama Tahun 2018-2022 data kelompok binaan PKK Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.120**

**Rata-rata Jumlah Kelompok Binaan PKK di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Kecamatan | Jumlah TP-PKK | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata | Jumlah Binaan | Rata-Rata |
| 1 | Banda Sakti | 18 | 3 | 0,16 | 4 | 0,22 | 7 | 0,38 | 2 | 0,28 | 17 | 0,81 |
| 2 | Muara Satu | 11 | 3 | 0,36 | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | 1 | 0,09 | 1 | 0,05 |
| 3 | Blang Mangat | 22 | 1 | 0,04 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | 1 | 0,05 |
| 4 | Muara Dua | 17 | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | 2 | 0,09 |
| | **Jumlah** | **68** | **10** | **0,14** | **9** | **0,13** | **12** | **0,14** | **7** | **0,17** | **21** | **0.30** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

## E. Persentase PKK Aktif

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Kesejahteraan keluarga menjadi tujuan utama PKK, hal ini dikarenakan keluarga merupakan unit terkecil masyarakat yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pembangunan. Pemberdayaan keluarga adalah segala upaya fasilitas yang bersifat noninstruktif, guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan keluarga untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan dan melakukan pemecahan masalahnya, tanpa atau dengan bantuan pihak lain, dengan memanfaatkan potensi keluarga dan fasilitas yang ada di masyarakat. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dalam program kerjanya banyak berkiprah pada peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan, kekeluargaan serta peningkatan kualitas perempuan.

TP-PKK Kota Lhokseumawe aktif menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah dengan adanya dukungan dari pemerintah melalui Dana ADG dan Dana Desa sejak Tahun 2018 sampai dengan saat ini, sehingga lebih meningkatkan peran aktif TP-PKK dalam pembangunan gampong khususnya pembinaan perempuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persentase PKK aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah PKK aktif dengan jumlah PKK

dikali 100%. Pada tahun 2018 persentase PKK aktif sebesar 60,26 persen dan terus berfluktuasi hingga mencapai 100 persen di tahun 2022. Untuk lebih jelasnya persentase PKK Aktif yang ada di Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.121**

**Persentase PKK Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Kecamatan | Jumlah TP-PKK Aktif | Persentase (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Banda Sakti | 18 | 16,66 | 16,66 | 33,34 | 11,12 | 100 |
| 2. | Muara Satu | 11 | 27,28 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 100 |
| 3. | Blang Mangat | 22 | 4,55 | 9,09 | 9,09 | 9,09 | 100 |
| 4. | Muara Dua | 17 | 11,77 | 23,53 | 17,64 | 11,77 | 100 |
| | **Jumlah / Persentase** | **68** | **60,26** | **59,18** | **69,16** | **41,07** | **100** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

## F. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Posyandu adalah wujud peran serta masyarakat dalam bidang Kesehatan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dalam upaya pelayanan kesehatan dan keluarga berencana yang dikelola dan diselenggarakan untuk dan oleh masyarakat dengan dukungan teknis dari petugas kesehatan. Sasaran utama kegiatan posyandu ini adalah balita, ibu hamil, ibu menyusui serta wanita usia subur. Oleh karena itu kegiatan posyandu sangat penting dirasakan pengaruhnya di tengah-tengah masyarakat.

Persentase posyandu aktif diperoleh dari perbandingan antara jumlah posyandu aktif dengan total posyandu dikali 100%. Selama Tahun 2018 s.d 2022 jumlah posyandu aktif Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.122**

**Persentase Posyandu Aktif di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Kecamatan | Jumlah Posyandu | Posyandu Aktif | Persentase (%) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Banda Sakti | 32 | 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Muara Satu | 15 | 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Blang Mangat | 29 | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Muara Dua | 24 | 24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | **Jumlah / Persentase** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel terlihat bahwa persentase posyandu aktif Kota Lhokseumawe sampai dengan saat ini adalah 100 persen dan tersebar di 4 Kecamatan. Kecamatan Banda Sakti merupakan Kecamatan yang memiliki persentase posyandu aktif paling tinggi dibanding kecamatan lainnya mengingat jumlah penduduk yang banyak dan padat di kecamatan tersebut.

Posyandu menyelenggarakan minimal 5 program prioritas yaitu kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, imunisasi dan penanggulangan diare. Untuk memantau perkembangannya, Posyandu dikelompokkan ke dalam 4 strata posyandu yaitu strata pratama, strata madya, strata purnama dan strata mandiri.

Posyandu yang berada di wilayah Kota Lhokseumawe memiliki strata yang berbeda-beda, tergantung pada pencapaian indikator tingkat perkembangan posyandu. Pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 strata posyandu Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.123**

**Strata Posyandu Di Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Strata Posyandu | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pratama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Madya | 10 | 12 | 12 | 12 | 6 |
| 3 | Purnama | 78 | 87 | 87 | 87 | 78 |
| 4 | Mandiri | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| | **Jumlah** | **89** | **100** | **100** | **100** | **101** |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

## G. Kerjasama Antar Gampong

Pembangunan kawasan perdesaan merupakan pembangunan antar Desa yang bertujuan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan yang ditetapkan. Pembangunan skala kawasan mengedapankan asas manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat di kawasan perdesaan. Prioritas pembangunan dalam skala kawasan meliputi, penggalian potensi kawasan serta perumusan masalah yang dihadapi oleh masyarakat di kawasan tersebut. Hal ini penting agar penyepakatan keputusan dalam upaya membangun kawasan perdesaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan sekaligus untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mayoritas masyarakat serta membuka peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut. Untuk melaksanakan pembangunan antar desa dalam skala kawasan ini, perlu dibentuk lembaga antar desa yang keanggotaannya mewakili desa-desa yang melaksanakan kegiatan kerjasama. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri Nomor 96 tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan kerjasama antar desa ini disebut Badan Kerja Sama Antar-Desa (BKAD). BKAD merupakan kelembagaan masyarakat yang proses pembentukannya atas dasar kesepakatan antar-Desa untuk membantu kepala Desa dalam melaksanakan kerja sama antar-Desa.

**Tabel 2.124**

**Cakupan Pembinaan Kerjasama Antar Desa Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Kecamatan | Jumlah Gampong | Target Pembentukan Kerjasama Antar Gampong | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Muara Dua | 17 | - | 17 | - | - | - |
| 2 | Banda Sakti | 18 | - | - | - | - | - |
| 3 | Blang Mangat | 22 | - | - | - | - | 21 |
| 4 | Muara Satu | 11 | - | - | - | - | - |

*Sumber : DPMG Kota Lhokseumawe, 2023.*

Dari tabel di atas dilihat bahwa pada Tahun 2019 ada 17 Gampong di Kecamatan Muara Dua dan 21 Gampong di Kecamatan Blang Mangat untuk Tahun 2022 yang sudah membentuk kerjasama antar gampong dalam bentuk Badan Usaha Bersama Milik Gampong. Badan Usaha Bersama Milik Gampong tersebut bertujuan untuk mendukung percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/ atau pemberdayaan masyarakat desa.

#### 2.1.3.2.2.10 Perhubungan

Permasalahan Transportasi di Kota Lhoseumawe kita hanya akan membicarakan Transporasi darat karena Kota Lhokseumae tidak mempunyai Transportasi Laut dan Udara. Arus Transportasi Darat dalam hal ini Kota Lhokseumawe mempunyai armada Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dimana perkembangan jumlah unit dan penumpang setiap tahunnya sedikit mengalami fluktuasi.

**Tabel 2.125**

**Jumlah Kendaraan dan Arus Penumpang Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Unit Kendaraan | Jumlah Penumpang | |
|---|---|---|---|
| | | Naik | Turun |
| 2018 | 100.853 | 147.352 | 130.589 |
| 2019 | 129.575 | 172.154 | 165.189 |
| 2020 | 13.207 | 27.068 | 26.575 |
| 2021 | 15.151 | 33.160 | 31.176 |
| 2022 | 15.330 | 41.980 | 36.650 |

*Sumber: Dinas Perhubungan, 2023.*

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah unit kendaraan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang mengambarkan situasi pandemic covid-19 sudah mulai berkurang yang menyebabkan mobilitas pergerakan orang menjadi naik kembali. Adapun jumlah kendaraan yang beroperasional di Kota Lhokseumawe tahun 2020 sewaktu awal pandemic covid-19 sebanyak 13.207 unit dengan jumlah penumpang naik 27.068 orang dan turun 26.575 orang, Tahun 2021 naik sedikit menjadi 15.151 unit dengan jumlah penumpang naik 33.160 orang dan turun 31.176 orang. Tahun 2022 mengalami kenaikan signifikan terhadap

penumpang yang naik serta turun, jumlah kendaraan di yang beroperasional sebanyak 15.330 unit dengan jumlah penumpang yang naik sebanyak 41.980 orang dan yang turun sebanyak 36.650 orang.

**A. Rasio ijin trayek**

Ijin trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Jaringan trayek terdiri atas jaringan trayek lintas batas Negara, jaringan trayek antarkota antar provinsi, jaringan trayek antarkota dalam provinsi, jaringan trayek perkotaan dan jaringan trayek perdesaan. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang. Di Kota Lhokseumawe rasio ijin trayek pada Tahun 2018 sebesar 0,008, sedangkan pada Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,007, Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,008 dan tahun 2021 naik kembali menjadi sebesar 0.009 sedangkan untuk tahun 2022 terjadi penurunan sebesar 0.008 Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk dari Tahun 2021. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.126**

**Rasio Ijin Trayek di Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Ijin Trayek | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 | 1.636 |
| 2 | Jumlah Penduduk | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| **Rasio Ijin Trayek** | | **0,008** | **0,007** | **0,008** | **0,009** | **0.008** |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

**B. Jumlah uji kir angkutan umum**

Uji kir angkutan umum merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan atau dirakit di dalam

negeri yang akan di operasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian dimaksud meliputi:

a. uji tipe yaitu pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap dan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
b. uji berkala yaitu diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan, meliputi pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor dan pengesahan hasil uji.

Di Kota Lhokseumawe rasio uji kir angkutan umum tiap tahunnya cenderung stabil yakni pada Tahun 2018 sebesar 1,05 pada Tahun 2019 sebesar 1,02, pada Tahun 2020 sebesar 1,02 sedangkan pada Tahun 2020 sebesar 1,91 dan tahun 2021 mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar 1,04 dan untuk tahun 2022 sebesar 1.14. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.127**

**Uji Kir Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Kenderaan | 2.381 | 2.558 | 3.845 | 3.195 | 3.612 |
| 2 | Kenderaan yang di Uji | 2.330 | 2.496 | 2.006 | 3.078 | 3.154 |
| **Rasio** | | **1,02** | **1,02** | **0,52** | **1,04** | **1.14** |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

## C. Jumlah Pelabuhan Udara/Laut/Terminal Bis

Di Kota Lhokseumawe hanya terdapat Terminal Bis Prasarana Transportasi bagi penduduk Kota Lhokseumawe dikarenakan belum adanya Pelabuhan Udara dan Laut sebagai prasarana transportasi masyarakat Kota Lhokseumawe seperti yang telah dijelaskan pada sub Arus Penumpang Umum Kota Lhokseumawe diatas. Oleh Karena

itu tidak ada penambahan fasilitas Pelabuhan Baik Udara maupun Laut di Kota Lhokseumawe pada setiap tahunnya Untuk lebih jelas dapat dilihat pada dibawah ini:

**Tabel 2.128**

**Jumlah Pelabuhan Udara, Laut dan Terminal Bis Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pelabuhan Udara | - | - | - | - | - |
| 2 | Pelabuhan Laut | - | - | - | - | - |
| 3 | Terminal Bis/ Barang | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

## D. Kepemilikan KIR angkutan umum

Persentase kepemilikan KIR bagi setiap kendaraan yang ada di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan setiap tahunnya terutama pada tahun 2020 seperti terlihat pada tabel dibawah ini bahwa pada tahun 2018 persentase Kir adalah 97% sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 87%. Hal ini terjadi disebabkan oleh meningkatnya jumlah kenderaan dari tahun sebelumnya, sedangkan yang melakukan KIR sudah meningkat dari tahun lalu. Akan tetapi karena selisih jumlah kenderaan dengan kenderaan yang melakukan KIR menyebabkan terjadinya persentase. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.129**

**Kepemilikan KIR Angkutan Umum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Angkutan Umum yang memiliki KIR | 2.330 | 2.496 | 2.006 | 3.078 | 3.154 |
| 2 | Jumlah Angkutan Umum | 2.381 | 2.558 | 3.845 | 3.195 | 3.612 |
| **Peresentase** | | **97** | **97** | **52** | **96** | **87** |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

## E. Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Lhokseumawe mengalami kendala karena tidak adanya peralatan yang memadai untuk melakukan global checking pada setiap kendaraan yang ada. Pada setiap tahunnya petugas yang berwenang dalam melakukan pengujian kelayakan Angkutan umum hanya mengecek administrasi saja, oleh karena itu proses berlangsungnya pengujian tersebut hanya membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit saja. Adapun Pengujian kelayakan Angkutan umum di kota Lhokseumawe diaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.130**

**Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Periode Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan | 6 Bulan |
| 2 | Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum (KIR) | 20 Menit | 20 Menit | 20 Menit | 30 Menit | 30 Menit |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

## F. Pemasangan Rambu-rambu

Rambu-rambu merupakan hal yang penting bagi kelancaran lalu lintas di Wilayah Kota Lhokseumawe. Yang mana Rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambing, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan Oleh karena itu rambu-rambu merupakan sebuah petunjuk maupun peringatan bagi setiap orang. Di Kota Lhokseumawe jumlah rambu-rambu belum tersedia dengan maksimal dimana dari jumlah rambu-rambu yang harusnya tersedia diseluruh elemen kota Lhokseumawe yaitu jumlah rambu yang seharusnya tersedia 195 namun tidak ada pemasangan rambu pada tahun 2018, pada tahun 2019 dan 2020 ada pemasangan rambu-rambu masing-masing berjumlah 60 dan 80 rambu, sedangkan tahun 2021 dan tahun 2022 tidak ada pemasangan rambu yang baru. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.131**

**Pemasangan Rambu-Rambu**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pemasangan Rambu-Rambu | 0 | 60 | 80 | 0 | 0 |
| 2 | Jumlah Rambu-Rambu yang seharusnya tersedia | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| **Persentase** | | **0** | **30** | **41** | **0** | **0** |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

## G. Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan

Panjang jalan yang diperhitungkan adalah jalan nasional (belum termasuk jalan tol), jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan kota. Rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kendaraan (unit) dengan panjang jalan (km).Nilai ini berarti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah kendaraan.Kendaraan yang diperhitungkan disini terdiri dari mobil penumpang, bus truk, dan sepeda motor.

Panjang Jalan di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 yaitu 412 km, jumlah kendaraan 50.340 unit terjadi peningkatan ditahun 2021 panjang jalan tetap 412 km sedangkan jumlah kendaraan 55.461 unit sedangkan untuk tahun 2022 terjadi penurunan disebabkan oleh berkurangnya jumlah kendaraan bermotor di Kota Lhokseumawe sehingga Rasio panjang jalan terhadap jumlah kenderaan masih berkisar 0.008. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

**Tabel 2.132**

**Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kenderaan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Panjang Jalan | 412 | 412 | 412 | 412 | 412 |
| 2 | Jumlah Kenderaan | 50.340 | 52.402 | 59.064 | 55.461 | 50.546 |
| **Rasio** | | **0.008** | **0.008** | **0,007** | **0,007** | **0.008** |

*Sumber : Dinas PUPR dan Samsat Kota Lhokseumawe, 2023*

## H. Jumlah Barang yang terangkut Angkutan Umum

Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada setiap tahunnya terjadi peningkatan kecuali pada tahun 2020 mengalami penurunan. Jumlah barang yang terangkut angkutan umum pada Tahun 2018 sebesar 7,236 ton, pada Tahun 2019 sebesar 7,510 ton, pada Tahun 2020 sebesar 5,805 ton pada Tahun 2021 sebesar 6,552 ton dan tahun 2022 mengalami peningkatan drastis sebesar 18.306 ton yang mana hal tersebut akibat meningkatnya aktifitas angkutan barang serta semakin bagusnya sistem pendataan barang pada Terminal Angkutan Barang Kota Lhokseumawe seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.133**
**Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum**
**Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Barang yang Terangkut Angkutan Umum (ton) | 7.236 | 7.510 | 5.805 | 6.552 | 18.306 |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

## I. Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal Pertahun

Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun dikota Lhokseumawe dari Tahun 2018 sampai Tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.134**

**Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun | 277.941 | 337.343 | 53.643 | 64.336 | 78.630 |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah orang yang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per tahun di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan. Pada Tahun 2018 jumlah orang yang melalui

Dermaga/Bandara/Terminal sebanyak 277.941 orang, pada Tahun 2019 sebanyak 337,343 orang, pada Tahun 2020 sebanyak 53.643 orang, pada Tahun 2021 sebanyak 64.336 orang dan pada tahun 2022 bertambah kembali menjadi sebanyak 78.630 orang.

## J. Fasilitas Keselamatan

Keselamatan jalan raya adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan jalan raya dengan memperhatikan faktor–faktor penyebab kecelakaan, seperti: prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia dan rambu atau peraturan.

Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan fasilitas pendukung dan lalu lintas angkutan jalan (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009, pasal 25).

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa fasilitas keselamatan yang diadakan setiap tahunnya bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang tersedia. Sementara kebutuhan fasilitas keselamatan yang harusnya ada adalah 8 fasilitas keselamatan.

**Tabel 2.135**

**Fasilitas Keselamatan Jalan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Fasilitas keselamatan yang diadakan | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| 2 | Fasilitas keselamatan yang seharusnya ada | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| **Persentase** | | **12,50** | **75,00** | **50,00** | **50,00** | **50.00** |

*Sumber : Dinas Perhubungan, 2023*

#### 2.1.3.2.2.11 Koperasi dan Usaha Kecil & Menengah

**A. Persentase Koperasi Aktif**

Jumlah Koperasi di Kota Lhokseumawe dari Tahun 2018 ke Tahun 2019 mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa koperasi Kota Lhokseumawe masih belum beraktifitas seperti yang diharapkan. Kemudian pada Tahun 2020 s.d 2022 koperasi aktif bertambah. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel berikut ini:

**Tabel 2.136**

**Persentase Koperasi Aktif**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Koperasi Aktif | 100 | 100 | 104 | 107 | 108 |
| 2 | Jumlah Koperasi | 251 | 251 | 205 | 208 | 209 |
| | **Persentase** | **39,84** | **39,84** | **50,7** | **51,4** | **51,6** |

*Sumber: Disperindagkop, 2023.*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 persentase koperasi aktif di Kota Lhokseumawe hanya sebesar 39.84 persen dan tahun selanjutnya terus meningkat sehingga pada Tahun 2022 menjadi menjadi 51,6 persen.

#### 2.1.3.2.2.12 Penanaman Modal

**A. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan PMA (Penanaman Modal Asing) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Jumlah seluruh investor pada PMDN selama 5 Tahun mencapai 1.422 Investor. Pada Tahun 2018 jumlah investor PMDN sebesar 139, tahun 2019 jumlah investor PMDN sebesar 152, di Tahun 2020 jumlah investor PMDN/PMA terjadi kenaikan sebesar 434 dan di Tahun 2021 jumlah investor PMDN/PMA terjadi

penurunan sebesar 432 namun di Tahun 2022 terjadi kenaikan kembali menjadi sebesar 459. Berikut tabel Jumlah Investor PMDN/PMA Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.137**

**Jumlah Investor PMDN/PMA**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Investor | 139 | 152 | 434 | 432 | 459 |

*Sumber : DPMTSPNAKER, 2023*

**B. Jumlah Investasi Bersekala Nasional (PMDN/PMA)**

Jumlah Investasi pada Kota Lhokseumawe pada Tahun tahun 2018 jumlah Investasi PMDN sebesar 618 (milyar), tahun 2019 jumlah Investasi PMDN sebesar 793 (milyar), di Tahun 2020 jumlah Investasi PMDN/PMA terjadi kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.268 (milyar) dan pada Tahun 2021 jumlah Investasi PMDN/PMA mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 5.303 (milyar). Jumlah investasi tahun 2022 Rp. 1.107.119.499.191,- Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan K-UMKM dan Peraturan Kementrian Investasi/BKPM RI mengklasifikasikan UMKM berdasarkan Aset dan Omset Usaha dengan kategori : Usaha mikro < 1 M, Usaha kecil 1M-5 M, Usaha Menengah 5M-10 M dan Usaha Besar >10 M. maka pencatatan investasi berpengaruh pada klifikasi tersebut, sehigga terjadi penurunan nilai Investasi. Dengan berlakunya sistem OSS RBA, penambahan angka realisasi investasi hanya berlaku untuk pelaku usaha Non UMK (>1M), sementara pelaku usaha UMK (<1M) tidak masuk kategori penambahan realisasi. Dengan tidak tercatatnya penambahan realisasi LKPM pelaku usaha UMK, maka terjadi penurunan realisasi investasi.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.138**

**Jumlah Investasi PMDN/PMA**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | URAIAN | PMDN (Milyar) |
|---|---|---|
| 2018 | Jumlah Investasi | 618 |
| 2019 | Jumlah Investasi | 793 |
| 2020 | Jumlah Investasi | 1.268 |
| 2021 | Jumlah Investasi | 5.303 |
| 2022 | Jumlah Investasi | 1.107 |

*Sumber : DPMTSPNAKER, 2023.*

### 2.1.3.2.2.13 Kepemudaan dan Olahraga

#### A. Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif

Pemuda merupakan aset potensial yang dapat meneruskan cita-cita bangsa. Pemuda merupakan kader pemimpin bangsa. Pada era globalisasi, kegagalan dalam menyiapkan pemuda yang berkualitas dapat menyebabkan suatu negara mengalami kemunduran dan tidak mampu bersaing dengan negara lain. Organisasi pemuda di Kota Lhokseumawe hingga Tahun 2022 berjumlah 16 namun yang tidak aktif berjumlah 4 yang tergabung dalam wadah Karang Taruna Gampong. Berikut data Organisasi Pemuda Yang Aktif Kota Lhokseumawe:

**Tabel 2.139**

**Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
| 1 | Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif | 50 | 50 | 50 | 50 | 16 | |
| 2 | Jumlah seluruh Organisasi Pemuda | 60 | 60 | 60 | 60 | 20 | |
| **Persentase** | | **83,3** | **83,3** | **83,3** | **83,3** | **80** | |

*Sumber: Disporapar, 2023*

#### B. Cakupan Pembinaan Olahraga

Berikut data Cakupan Pembinaan Olahraga Kota Lhokseumawe dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.140**

**Cakupan Pembinaan Olahraga**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
| 1 | Jumlah cabang olahraga yang dibina | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | |
| 2 | Jumlah seluruh cabang olahraga yang terdaftar | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | |
| **Persentase** | | **81,82** | **81,82** | **81,82** | **81,82** | **77.77** | |

*Sumber: Disporapar, 2023.*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa cakupan pembinaan cabang olahraga di Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 sebesar 77,78 persen dari total cabang olahraga yang ada di Kota Lhokseumawe. Secara kuantitas jumlah cabang olahraga yang dibina di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022.

## C. Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi

Penguatan kapasitas pelatih yang berkompeten atau bersertifikat menjadi indikator penting dalam hal pembinaan olahraga. Kota Lhokseumawe memiliki 60 pelatih yang bersertifikat, sedangkan jumlah seluruh pelatih yang ada hingga Tahun 2022 adalah 87. Terjadi penurunan persentase cakupan pelatih yang bersertifikasi pada tahun 2022 dibandingkan dengan pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa cabang olahraga yang tidak lagi aktif, pelatih yang meninggal dunia atau berpindah daerah.

**Tabel 2.141**

**Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018 s.d 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ket |
| 1 | Jumlah pelatih bersertifikat | 53 | 53 | 53 | 53 | 60 | |
| 2 | Jumlah seluruh pelatih | 146 | 146 | 146 | 146 | 87 | |
| **Persentase** | | **36,3** | **36,3** | **36,3** | **36,3** | **68.9** | |

*Sumber: Disporapar, 2023.*

### 2.1.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan

### 2.1.3.3.1 Pariwisata

### A. Objek Wisata

Kunjungan wisata di Kota Lhokseumawe terdiri dari wisatawan domestik dan wisatawan manca negara. Pada umumnyawisatawan lebih banyak mengunjungi destinasi wisata alam, baik pada akhir pekan maupun saat liburan. Berikut ini adalah objek wisata Kota Lhokseumawe meliputi; 1. Objek wisata alam, 2. Objek Wisata budaya/spiritual, dan 3. Objek wisata buatan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.142**
**Objek Wisata Kota Lhokseumawe**

| No | Uraian | Lokasi | Ket |
|---|---|---|---|
| 1. | **Wisata Alam** | | |
| | a. Pantai Ujon Blang | Kecamatan Banda Sakti | |
| | b. Pulau semadu | Kecamatan Muara Satu | |
| | c. Pantai pulo daruet | Kecamatan Muara Dua | |
| 2. | **Wisata Budaya/Spiritual** | | |
| | a. Benteng (kurok-kurok) tentara Jepang | Gp. Ujong Blang (Banda Sakti) | |
| | b. Gua Jepang cot Panggoi | Gp. Blang Panyang (Muara Satu) | |
| | c. Meriam Belanda | Gp. Kuta Blang (Banda Sakti) | |
| | d. Tugu Pahlawan TKR | Gp. Peukan Cunda (Muara Dua) | |
| | e. Tugu lokasi syahid Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng | Gp. Blang Buloh (Kec. Blang Mangat) | |
| | f. Tiang gantuangan Tgk. Chik Ditungong | Gp. Jawa Lama (Banda Sakti) | |
| | g. Mon tujoh | Gp. Mesjid (Blang Mangat) | |
| | h. Makam Tgk. Dilhokseumawe | Gp. Banda Masen (Banda Sakti) | |
| | i. Makam Tgk. Chik Ditunong | Gp. Mon Geudong (Banda Sakti) | |
| | j. Makam prajurit Tgk. Abdul Jalil Cot Plieng | Gp. Blang Buloh (Blang Mangat) | |
| | k. Makam Mualim Taufik Shaleh | Gp. Blang Weu Panjo (Blang Mangat) | |
| | l. Makam Putroe Neng | Gp. Blang Pulo (Muara Satu) | |
| | m. Makam Tgk. Syiah Hudam | Gp. Blang Pulo (Muara Satu) | |
| | n. Makam Tgk. Chik Dipaloh | Gp. Cot Trieng (Muara Satu) | |
| | o. Makam Tgk. Jrad Meuindram | Gp. Cot Trieng (Muara Satu) | |
| | p. Makam Tgk. Chik Buket Krueng | Gp. Cot Trieng (Muara Satu) | |
| | q. Museum P. Ramli | Gp. Paloh (Muara Dua) | |

| No | Uraian | Lokasi | Ket |
|---|---|---|---|
| 3. | **Wisata Buatan**<br>a. Reservoir (Waduk)<br>b. Taman Riyadah<br>c. Taman Mangat Cerita<br>d. Waduk Jeulikat | <br>Gp. Pusong (Banda Sakti)<br>Kecamatan Banda Sakti<br>Kecamatan Blang Mangat<br>Kecamatan Blang Mangat | |

*Sumber: Lhokseumawe Dalam Angka, 2023.*

#### 2.1.3.3.2 Statistik

**A. Buku "Kabupaten/Kota Dalam Angka"**

Buku Lhokseumawe Dalam Angka yang diterbitkan pada setiap Tahun merupakan hasil kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Kepres RI Nomor 86 Tahun 1998 tentang BPS Bab V Pasal 26 Ayat (2), bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan data statistik regional bagi Pemerintah Daerah, penyediaan dana dan fasilitasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setempat.

**B. Buku "PDRB Kabupaten/Kota"**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe yang juga merupakan kerjasama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Lhokseumawe dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe sudah tersedia setiap Tahun guna memberikan gambaran mengenai struktur ekonomi Kota Lhokseumawe baik ekonomi secara keseluruhan maupun masing-masing sektor.

#### 2.1.3.3.3 Perpustakaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan, jumlah pengunjung perpustakaan dan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah.

**A. Jumlah Perpustakaan**

Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat dimana didalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistim tertentu, bertujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat yang beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur dan menyajikan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam satu tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasarkan pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, sehingga jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah. Rincian data jumlah gedung perpustakaan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.143**

**Rasio Perpustakaan Per Satuan Penduduk**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Tahun | Jumlah Penduduk | Perpustakaan | | | | | Total | Rasio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PU/PD | PS | PT | PK | PONTREN | | |
| 1 | 2018 | 203.284 | 15 | 163 | 13 | 14 | 8 | 213 | 0,105 |
| 2 | 2019 | 207.202 | 15 | 163 | 13 | 14 | 8 | 213 | 0,103 |
| 3 | 2020 | 188.713 | 15 | 163 | 13 | 14 | 8 | 213 | 1.128 |
| 4 | 2021 | 189.941 | 15 | 163 | 13 | 14 | 8 | 213 | 1.121 |
| 5 | 2022 | 191.396 | 13 | 163 | 13 | 14 | 14 | 217 | 1.133 |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023.*

Tabel di atas menjelaskan bahwa sejak Tahun 2018-2021 jumlah perpustakaan di Kota Lhokseumawe terdapat 213 perpustakaan dan 2022 menjadi 217. Seiring dengan penambahan jumlah penduduk, rasio perpustakaan terhadap satuan penduduk mengalami fluktuasi setiap Tahunnya. Pada Tahun 2018 rasio sebesar 0.105, Tahun 2019 rasio sebesar 0.103, Tahun 2020 rasio sebesar 1.128 dan Tahun 2021 rasio sebesar 1.121, serta Tahun 2022 sebesar 1.133.

#### 2.1.3.3.4 Kearsipan

**A. Pengelolaan Arsip Secara Baku**

Kearsipan memegang peran penting bagi kelancarannya organisasi, dimana pengelolaan arsip secara baku dapat menjadi sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi. Kearsipan merupakan suatu proses penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan dokumen menurut sistem tertentu.

Menurut data dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Lhokseumawe, bahwa dari periode 2018-2022 jumlah persentase pengelolaan arsip secara baku menurun menjadi 24% dari Jumlah 34 SKPD. Persentase pengelolaan arsip ini menurun dikarenakan jumlah OPD yang mengelola Arsip di Kota Lhokseumawe, pada Tahun 2022 menjadi 8 OPD saja. Berikut tabel data jumlah pengelolaan arsip secara baku di Kota Lhokseumawe:

**Tabel 2.144**

**Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Jumlah Pengunjung | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah SKPD yang mengelola arsip secara baku | 1 | 1 | 10 | 15 | 8 |
| 2 | Jumlah SKPD | 33 | 34 | 34 | 34 | 38 |
| **Persentase** | | **3** | **3** | **30** | **45** | **23.5** |

*Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023.*

### 2.1.3.3.5 Pertanian

**A. Kontibusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB**

Kontribusi sektor pertanian Kota Lhokseumawe dalam 5 (lima) tahun terakhir berfluktuatif. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2020 dan terendah pada tahun 2018. Tahun 2018 memberikan kontribusi sebesar 8.30% dengan migas dan tanpa migas sebesar 9.98%, terus meningkat sampai Tahun 2020 sebesar 8.92% dengan migas, sedangkan tanpa migas sebesar 10.75%. kemudian terjadi penurunan di Tahun 2021 sebesar 8.45% dengan migas dan tanpa migas sebesar 10.10%. Kontribusi dengan migas Tahun 2022 sebesar 7.99% dan tanpa migas sebesar 9.52% mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk lebih detail data selama 5 (lima) tahun terakhir ada pada tabel berikut:

**Tabel 2.145**
**Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (ADHK)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun (Juta Rupiah) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pertanian. Kehutanan dan Perikanan | 567.783,30 | 599.904,70 | 622.995,80 | 612.746,70 | 602.949,80 |
| 2 | Jumlah PDRB dengan Migas | 6.840.710,70 | 7.112.684,80 | 6.984.713,30 | 7.252.904,80 | 7.543.739,10 |
| 3 | Jumlah PDRB tanpa Migas | 5.687.525,60 | 5.936.513,60 | 5.794.141,20 | 6.069.121,60 | 6.330.756,60 |
| Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%) | | 8,30 | 8,43 | 8,92 | 8,45 | 7,99 |
| Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%) | | 9,98 | 10,11 | 10,75 | 10,10 | 9,52 |

*Sumber: PDRB Lhokseumawe, 2023, BPS 2018-2022*

**B. Produktifitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar**

Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya di Kota Lhokseumawe dalam lima Tahun terakhir secara keseluruhan menunjukkan fluktuasi sejak 2018-2022. Puncak produksi padi di Kota Lhokseumawe terjadi pada Tahun 2021, sementara itu, pada Tahun 2022 komoditi padi menurun dari kondisi sebelumnya. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.146**

**Produktivitas Komoditas Pangan (Kg)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No. | Uraian | Tahun | | | | | Ha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Padi | 9.954.000 | 9.954.000 | 10.345.000 | 10.362.000 | 8.882.500 | 1.381 |
| 2 | Jagung | - | - | - | - | - | 21 |
| 3 | Ubi Kayu | 1.764.000 | 1.764.000 | - | - | 328 | 52 |
| 4 | Ubi Jalar | - | - | - | - | | - |
| 5 | Kedelai | - | - | - | - | - | - |

*Sumber : DKP3, 2023*

### 2.1.3.3.6 Perdagangan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Perdagangan adalah pengaman pembangunan nasional di bidang ekonomi yang disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sedangkan kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan ekspor dan devisa, memeratakan pendapatan, serta memperkuat daya saing produk dalam negeri demi kepentingan nasional Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perdagangan dapat dilihat dari kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.

Perdagangan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe. Pada Tahun 2018 sektor ini mampu memberikan kontribusi sebesar 22,60% dengan migas, sedangkan tanpa migas memberikan kontribusi sebesar 27,18%. Terjadi penurunan kontribusi hingga Tahun 2022 sebesar 22.29% dengan migas dan tanpa migas sebesar 26.56%, Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.147**

**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHK)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Sektor Perdagangan | 1,546,120.10 | 1,584,878.40 | 1,523,878.70 | 1,587,445.50 | 1,681,277.90 |
| 2 | Jumlah PDRB dengan Migas | 6,840,710.70 | 7,112,684.80 | 6,984,713.30 | 7,252,904.80 | 7,543,739.10 |
| 3 | Jumlah PDRB tanpa Migas | 5,687,525.60 | 5,936,513.60 | 5,794,141.20 | 6,069,121.60 | 6,330,756.60 |
| **Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)** | | **22.60** | **22.28** | **21.82** | **21.89** | **22.29** |
| **Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)** | | **27.18** | **26.70** | **26.30** | **26.16** | **26.56** |

*Sumber : PDRB Lhokseumawe, BPS 2018-2022.*

### 2.1.3.3.7 Perindustrian

Kondisi Pelayanan umum Urusan pemerintahan pilihan bidang perindustrian dapat dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Kontribusi kegiatan usaha di sektor industri dalam pembentukan *Product Domestic Regional Bruto* (PDRB) Kota Lhokseumawe tanpa migas dinilai masih rendah yaitu sebesar 21,77 % pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 21,94 pada tahun 2021. Ini berbeda dengan migas dalam sektor pengolahan industri yang memberikan kontribusi sebesar 18,23% pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 sebesar 18,36%. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.148**
**Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (ADHK)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Sektor Industri | 1,289,007.00 | 1,315,377.00 | 1,330,546.40 | 1,331,428.60 | 1,368,986.00 |
| 2 | Jumlah PDRB dengan Migas | 6,840,710.70 | 7,112,684.80 | 6,984,713.30 | 7,252,904.80 | 7,543,739.10 |
| 3 | Jumlah PDRB tanpa Migas | 5,687,525.60 | 5,936,513.60 | 5,794,141.20 | 6,069,121.60 | 6,330,756.60 |
| **Kontribusi terhadap PDRB dengan Migas (%)** | | **18.84** | **18.49** | **19.05** | **18.36** | **18.15** |
| **Kontribusi terhadap PDRB tanpa Migas (%)** | | **22.66** | **22.16** | **22.96** | **21.94** | **21.62** |

*Sumber : PDRB Lhokseumawe 2023, BPS 2018-2022.*

#### 2.1.3.3.8 Kelautan dan Perikanan

**A. Produksi Perikanan Budidaya**

Produksi perikanan budidaya didominasi oleh kelompok bandeng, udang, kerapu dan mujair. Berikut tabel produksi perikanan:

**Tabel 2.149**

**Produksi Perikanan Budidaya**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| NO | URAIAN | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Produksi Ikan (ton) | 3,703.65 | 3,470.00 | 3,350.00 | 3,400.00 | 8065.56 |
| 2 | Target Daerah (ton) | 4,035.00 | 4,450.00 | 4,895.00 | 5,385.00 | 8,085.00 |
| **Persentase** | | **91.79** | **77.97** | **68.44** | **63.14** | **99.76** |

*Sumber: DKP3, 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa produksi tertinggi perikanan budidaya sejak Tahun 2018-2022 terjadi pada Tahun 2022 yang mencapai 99.76%, Semakin tinggi produksi budidaya ikan akan memberikan nilai lebih terhadap perekonomian masyarakat. Untuk jenis ikan yang umumnya dilakukan petani tambak di wilayah Kota Lhokseumawe adalah udang, ikan bandeng, kerapu, nila, lele, mujahir selebihnya ikan kakap.

### 2.1.3.4 Fokus Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 2.1.3.4.1 Perencanaan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA, tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/Perkada, tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA.

**A. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA**

Dalam pembangunan daerah, peran serta dan partisipasi masyarakat memiliki arti yang sangat penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Melalui penyediaan ruang bagi publik ini diharapkan pembangunan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 Tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah. Kota Lhokseumawe telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan ditetapkan dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2014.

**B. Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA/PERKADA**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) Tahun. RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Walikota yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan, rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif, dan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Untuk Tahun 2017-2022 Kota Lhokseumawe telah menetapkan Qanun RPJM dengan Nomor 7 Tahun 2019.

**C. Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yang Telah Ditetapkan Dengan PERKADA**

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksud guna mengidentifikasi permasalahan pembangunan secara rutin dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya

baik yang berasal dari dinamika internal maupun eksternal. Atas dasar hal tersebut penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) menjadi suatu keharusan bagi daerah.

RKPD Kota Lhokseumawe yang akan dipergunakan oleh Organisasi pernagkat daerah sebagai acuan untuk melaksanakan Rencana Kerja pada setiap Tahun disusun dengan harapan dapat terjadi keseimbangan serta mempersempit egoisme sektoral dalam pelaksanaannya. Penyusunan RKPD mendasarkan pada fungsi-fungsi pelayanan dasar Pemerintah Daerah yang merupakan analisis usulan dari SKPD.

Selama periode 2017 sampai dengan 2022 dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe setiap Tahunnya telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota (Perwal), dimana RKPD tersebut merupakan penjabaran dari program RPJMD Lhokseumawe Tahun 2017-2022. Penjabaran RPJMD kedalam RKPD merupakan bahan penyusunan RAPBD. Penjabaran RPJMD diawali dengan penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda, yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari Renstra Organisasi Perangkat Daerah. RKPD berisi tujuan, sasaran, prioritas, program dan kegiatan adalah hasil dari suatu proses berjenjang yang dimulai dariMusyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Gampong, Kecamatan hingga Kota. Dengan demikian materi dalam RKPD adalah refleksi dari kebutuhan masyarakat secara *bottom up* yang dipaduserasikan dengan program dan kegiatan yang direncanakan OPD yang bersifat *top down* yang diselaraskan dengan program dan kegiatan dalam RPJMD.

## D. Tersedianya Dokumen RTRW yang Telah Ditetapkan Dengan PERDA

Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan hasil perencanaan taarsipta ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kota Lhokseumawe kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah. Dokumen RTRW digunakan juga sebagai acuan dalam

penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan dokumen RTRW dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah serta menjadi acuan lokasi investasi kota baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. Disamping itu, RTWR dimaksudkan sebagai acuan dalam pengendalian dan pemanfaatan ruang serts arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi; dan acuan dalam administrasi pertanahan. Dokumen RTRW Kota Lhokseumawe telah ditetapkan dengan Qanun Nomor 1 Tahun 2014.

#### 2.1.3.4.2 Keuangan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dapat dilihat dari Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap Laporan Keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (*fraud*) dalam pengelolaan keuangan. Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelenggaraan terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP. Dalam batas tertentu terkait materialitasnya, hal ini mungkin mempengaruhi opini atas kewajaran LK secara keseluruhan, sehingga BPK harus mempertimbangkan secara cermat pengaruh *fraud* tersebut terhadap penyajian laporan keuangan.

Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2016 adalah wajar dengan pengecualian (WDP), berbeda dari Tahun sebelumnya, dimana pada LKPD TA 2015 Pemerintah Kota Lhokseumawe mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Penurunan opini dikarenakan terdapat permasalahan pada Tahun 2016 dalam pengendalian atas utang belanja dimana terdapat perbedaan saldo utang belanja antara Neraca *unaudited* dengan data

SKPD yang tidak dapat dijelaskan dan perbedaan dengan hasil reviu Inspektorat.

#### 2.1.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Kondisi Pelayanan umum Urusan penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dari beberapa indikator antara lain persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural dan jumlah jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.

**A. Persentase ASN yang Mengikuti DIKLAT Formal**

Sejak periode 2018-2022 jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih sangat kecil sekali. Hal ini terlihat dari tidak adanya pejabat ASN yang mengikuti diklat struktural di Tahun 2022 dari 305 jumlah total jabatan struktural. Pada Tahun 2018 persentase pejabat ASN mengikuti diklat struktural mencapai 18.7% dari 492 jumlah total jabatan hanya 92 orang saja yang mengikuti diklat struktural tersebut. Pada Tahun 2019 mencapai 15.64% dari 518 jumlah total jabatan hanya 81 orang saja yang mengikuti diklat struktural dan untuk Tahun 2020 mencapai 11,3% dari 495 jumlah total jabatan hanya 56 orang saja yang mengikuti diklat struktural. Pada Tahun 2021 mencapai 8,7% yang mengikuti diklat struktural.

Berikut tabel persentase pejabat ASN mengikuti Diklat Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022;

**Tabel 2.150**

**Persentase Pejabat ASN mengikuti DIKLAT Struktural Kota Lhokseumawe Tahun 2018- 2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pejabat ASN yang mengikuti | | | | | |
| | - PIM II | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| | - PIM III | 20 | 17 | 8 | 6 | 0 |
| | - PIM IV | 70 | 62 | 47 | 37 | 0 |
| 2 | Jumlah Total Jabatan | 492 | 518 | 495 | 513 | 305 |
| **Persentase** | | **18,7** | **15,64** | **11,3** | **8,7** | **0** |

*Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2023.*

**B. Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional Tertentu Pada Instansi Pemerintah**

Jumlah jabatan struktural dan fungsional di lingkup Pemerintah Kota Lhokseumawe sejak Tahun 2018-2022 menunjukkan penambahan setiap Tahunnya, namun di Tahun 2019 dan Tahun 2022 terjadi penurunan. Total jumlah jabatan dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pengawas dan jabatan fungsional tertentu pada Tahun 2019 mencapai 2.105 merupakan jumlah terendah, Tahun 2018 mencapai 2.433, pada Tahun 2020 naik kembali hingga mencapai 2.207 orang serta kembali naik pada Tahun 2021 menjadi 2.268 dan kembali terjadi penurunan pada Tahun 2022 menjadi 2.244. Posisi dan jumlah jabatan pada instansi pemerintah Kota Lhokseumawe ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Berikut tabel Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022.

**Tabel 2.151**

**Jumlah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pengawas, Jabatan Fungsional Tertentu pada Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jabatan Pimpinan Tinggi | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 |
| 2 | Jabatan Administrasi | 124 | 120 | 131 | 132 | 132 |
| 3 | Jabatan Pengawas | 330 | 330 | 358 | 334 | 141 |
| 4 | Jabatan Fungsional Tertentu | 1.948 | 1.624 | 1.686 | 1770 | 1.939 |
| | **Jumlah Jabatan** | **2.433** | **2.105** | **2.207** | **2268** | **2244** |

*Sumber : BKPSDM Kota Lhokseumawe, 2023.*

**2.1.3.4.4 Pengawasan**

**A. Level Kapabilitas APIP**

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Pengawasan intern ini dilakukan mulai dari

proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.

Untuk itu, APIP harus terus melakukan transformasi dalam menjalankan tugasnya guna memberi nilai tambah bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sejalan dengan fungsi dan peran APIP, yaitu melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko *(risk management)*, pengendalian *(control)* dan tata kelola *(governance)* organisasi. Pencapaian kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 2.149, dimana pada tahun 2018 Kapabilitas Kota Lhokseumawe berada pada level 2, namun di tahun 2019 sampai dengan 2022 naik menjadi level 3 untuk Kapabilitas APIP Kota Lhokseumawe.

**Tabel 2.152**

**Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Level Kapabilitas APIP | Level 2 | Level 3 | Level 3 | Level 3 | Level 3 |

*Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2023*

## B. Tingkat Maturitas SPIP

Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP didefinisikan sebagai kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturasi ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturasi sistem pengendalian intern.

Jadi tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Maturitas yang rendah

mencerminkan kemungkinan yang lebih rendah dalam mencapai tujuan, sedangkan tingkat maturitas yang lebih tinggi mencerminkan kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan.

Untuk capaian Tingkat Maturitas SPIP dapat dilihat pada tabel 2.150 berikut ini:

**Tabel.2.153**

**Capaian Tingkat Maturitas SPIP**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Maturitas SPIP | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 | Level 2 |

*Sumber : Inspektorat Kota Lhokseumawe, 2023*

Tabel 2.153 memperlihatkan Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sampai Tahun 2022 berada pada level 2. Diupayakan pada tahun-tahun berikutnya adanya peningkatan level dalam rangka mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

### 2.1.3.4.5 Sekretariat DPRK

### A. Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan

Dalam proses penyusunan Qanun, Program Legislasi Daerah (Prolegda) yang partisipatif memiliki kedudukan yang sangat penting karena akan menjadi acuan mengenai skala prioritas penyusunan Rancangan Qanun selama 1 tahun periode sesuai amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan. Oleh karena itu Pemerintahan Daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota dan DPRK sebagai pemegang kewenangan penyusunan Program Legislasi Daerah harus melalui mekanisme yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat dan stakeholder yang ada sehingga Program legislasi Daerah yang dihasilkan merupakan usulan-usulan Rancangan Qanun yang aspiratif dan partisipatif yang dalam pelaksanaannya usulan-usulan Rancangan

Qanun tersebut dapat dibuat secara berencana, terpadu, dan sistematis.

Persentase Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe pada Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 berfluktuasi setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada tabel. Pada tabel tersebut terlihat bahwa Tahun 2018 persentase rancangan qanun yang ditetapkan sebesar 53.33% namun di Tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 47.06% dan di Tahun 2020 semakin menurun menjadi 33.33%. Selanjutnya pada tahun 2021 persentase rancangan qanun yang ditetapkan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 41.18%, walaupun ditahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 40.00%.

**Tabel 2.154**

**Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Rancangan Qanun yang ditetapkan | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 |
| 2 | Jumlah Prolegda | 15 | 17 | 21 | 17 | 10 |
| Persentase | | 53.33 | 47.06 | 33.33 | 41.18 | 40.00 |

*Sumber : Sekretariat DPRK Lhokseumawe, 2023*

### 2.1.3.4.6 Sekretariat Daerah

**A. Kategori Reformasi Birokrasi**

Dewasa ini, pemerintahan menuntut setiap aparatur pemerintah untuk meningkatkan kualitas profesionalitas aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang baik salah satunya melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan penataan ulang atau pembaharuan dalam berbagai penyelenggaraan pemerintah agar mampu memenuhi tuntutan masyarakat dengan cara meningkatkan kinerja penguatan etos kerja aparatur dalam memperbaiki tatanan birokrasi pemerintah. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan culture-set serta pengembangan budaya kerja. Reformasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Clean Goverment*).

Sebagai dasar kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menpan dan RB Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi disusun dalam rangka mendukung program nasional untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2021, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh nilai 44,03 atau (C/Agak Kurang) dari target nilai 50,01 atau (CC/Cukup Baik). Hasil tersebut menggambarkan pencapaian kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa kelemahan-kelemahan yang diungkapkan oleh evaluator Kemenpan dan RB, yaitu:

1. manajemen pelaksanaan reformasi birokrasi mulai dari perencanaan, implementasi, monitoring hingga evaluasi belum dilakukan secara baik;
2. deregulasi kebijakan yang dilaksanakan belum mampu memetakan kebutuhan peraturan yang mendorong kinerja;
3. implementasi penyederhanaan birokrasi belum dilaksanakan menyeluruh;
4. peta proses bisnis yang ada belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas dan fungsi;
5. belum optimalnya penguatan sistem manajemen SDM;
6. kurang pedulinya pimpinan OPD dalam perencanaan kinerja pada SAKIP;
7. implementasi kebijakan pengawasan internal terhadap penanganan gratifikasi, pengelolaan pengaduan masyarakat, kebijakan berbenturan serta penerapan SPIP masih bersifat normatif; dan
8. hasil standar pelayanan belum sesuai dengan harapan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Pemerintah Kota akan menindaklanjuti hasil rekomendasi Kemenpan dan RB dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. membentuk tim/ penanggungjawab reformasi birokrasi Pemerintah Kota Lhokseumawe serta menyusun dan menetapkan rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kerja;
3. melakukan sosialisasi/ internalisasi road map reformasi birokrasi;
4. melibatkan keikutsertaan pejabat struktural dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dari tahap awal sampai akhir;
5. pelaksanaan penyederhanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara menyeluruh;
6. penguatan sistem manajemen SDM dengan pengembangan karir SDM sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, penempatan pegawai pada suatu jabatan dengan mempertimbangkan sesuai standar kompetensi jabatan;
7. melibatkan pimpinan dengan mengadakan rapat tindaklanjut SAKIP bersama pimpinan OPD mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi; dan
8. melibatkan masyarakat dalam penyusunan standar pelayanan.

Penyusunan dokumen road map reformasi birokrasi tahun 2020 merupakan tahun pertama dilakukan, sehingga analisis perbandingan capaian kinerja tidak dapat dilakukan. Hal ini disebabkan karena minimnya anggaran dan kurangnya kompetensi SDM aparatur pada penyusunan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan, penyusunan dokumen Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dilakukan pada bulan Juli 2022 setelah ditetapkannya Penjabat Walikota Sementara sampai dengan terpilihnya Walikota Lhokseumawe definitif pada pilkada serentak tahun 2024.

## B. Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan

pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Bagi seorang pimpinan atau kepala daerah, SAKIP akan berguna untuk bisa mengukur setiap pembangunan atau kinerja yang dilakukan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu, sistem ini bisa juga dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan dalam pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan negara. Salah satu azas penyelenggaraan good governance adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

**Tabel.2.155**

**Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah | CC | CC | CC | CC | CC |

*Sumber : Setdako Lhokseumawe, 2023*

Tabel di atas memperlihatkan tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Lhokseumawe dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 masih mendapat kategori CC. Oleh karena itu untuk dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi maka akan diupayakan perbaikan predikat untuk menjadi lebih baik lagi di tahun-tahun mendatang.

## C. Persentase perangkat daerah dengan nilai IKM yang baik

Salah satu tuntutan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik merupakan bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dalam rangka memenuhi kepuasan, kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Lhokseumawe melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Evaluasi tersebut dilakukan melalui tindakan survey, yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). SKM suatu survey yang disusun berdasarkan indikator-indikator unsur pelayanan dalam suatu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Unsur-unsur pelayanan publik yang menjadi kriteria pelayanan adalah:

a. Persyaratan;
b. Prosedur;
c. Biaya/ Tarif;
d. Waktu Pelayanan;
e. Produk Pelayanan;
f. Kompetensi Pelaksana;
g. Perilaku Pelaksana;
h. Sarana dan Prasarana; dan
i. Penanganan pengaduan.

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat terkait pelayanan dari aparatur pemyelemggaraan pelayanan publik. Selain hal tersebut, IKM berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan hasil survey, nilai IKM Pemerintah Kota Lhokseumawe meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat pada perolehan nilai IKM pada Tahun 2019 sebesar 80,23 (Baik),

kemudian meningkat sebesar 1,63 poin dari perolehan Tahun 2020 sebesar 81,86 (Baik) dan kembali meningkat pada Tahun 2021 sebesar 0,66 poin atau sebesar 82,52 (Baik). Sedangkan untuk tahun 2022 belum tersedianya data.

**D. Nilai LPPD**

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) menyajikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahun dan setiap akhir masa jabatan kepala daerah. LPPD berfungsi sebagai wahana sinergitas dan sinkronisasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah dan pemerintah dalam rangka mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Nilai LPPD diukur dari skor evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi LPPD, pada Tahun 2019, Pemerintah Kota Lhokseumawe memperoleh nilai predikat Tinggi. Artinya capaian nilai hasil evaluasi LPPD untuk Tahun 2019 telah mencapai target RPJMK. Bila dibandingkan dengan Tahun 2018, perolehan nilai LPPD Tahun 2019 naik sebesar 0,09 poin, namun masih dalam predikat Tinggi. Hal ini didukung oleh mayoritas Perangkat Daerah telah memenuhi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan bukti pendukung pemenuhan IKK. Berikut tren capaian nilai LPPD Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022:

**Tabel 2.156**

**Nilai Hasil Evaluasi LPPD**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| Tahun | Target | Realisasi |
|---|---|---|
| 2018 | Tinggi | 2,73 (Tinggi) |
| 2019 | Tinggi | 2,82 (Tinggi) |
| 2020 | Tinggi | Tinggi |
| 2021 | Tinggi | 3,4290 (Tinggi) |
| 2022 | Tinggi | |

*Sumber: Bagian Pemerintahan, Setdako, 2023*

Berdasarkan Tabel 2.153 di atas, tren perolehan nilai hasil evaluasi LPPD Kota Lhokseumawe menunjukkan hasil yang baik.

Nilai perolehan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2018 nilai LPPD turun sebesar 0,03 poin menjadi 2,73 (Tinggi) dari tahun sebelumnya 2,76 (Tinggi). Hal ini disebabkan karena adanya Perangkat Daerah yang kurang responsif dalam pemenuhan IKK. Selanjutnya, pada tahun 2019 nilai LPPD Kota Lhokseumawe kembali naik sebesar 0,09 poin. Untuk Tahun 2020-2021, Kementrian Dalam Negeri masih belum mengeluarkan nilai LPPD Kota Lhokseumawe yang diambil berdasarkan peringkat nasional. Sedangkan untuk tahun 2022 masih menunggu penilaian evaluator (proses penilaian) dari kementrian dalam Negeri.

#### 2.1.3.5 Fokus Urusan Penunjang Urusan Kewilayahan

##### 2.1.3.5.1 Kecamatan

**A. PKK Gampong**

Pembinaan PKK Gampong dalam 4 (empat) kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2022 terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 terdapat binaan 16 gampong, tahun 2019 dan tahun 2020 binaan 21 gampong, tahun 2021 binaan 33 gampong serta pada tahun 2022 terdapat binaan 51 gampong. Pada tahun 2020 tersebut tidak mengalami peningkatan pembinaan PKK gampong, hal ini disebabkan karena terjadinya *refocusing* anggaran namun pada tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami peningkataan pembinaan PKK gampong dalam wilayah Kota Lhokseumawe. Pesentase Binaan PKK Gampong Tahun 2018-2022 dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel berikut:

**Tabel 2.157**

**Persentase Binaan PKK Gampong dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| NO | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Gampong |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blang Mangat | 0 | 10 | 10 | 19 | 22 | 22 |
| 2 | Banda Sakti | 3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 |
| 3 | Muara Dua | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 |
| 4 | Muara Satu | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| **Jumlah** | | **16** | **21** | **21** | **33** | **51** | **68** |
| **Persentase** | | **0,24** | **0,31** | **0,31** | **0,49** | **0.75** | |

*Sumber : Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe, 2023*

## B. Penertiban

Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2022 dapat dihitung dengan membandingkan antar jumlah penertiban yang dilaksanakan berbanding dengan jumlah penertiban yang direncanakan dikali seratus persen. Dari data penertiban dalam masing-masing kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat disimpulkan bahwa penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe dari tahun 2018-2022 mengalami fluktuasi setiap tahunnya.

Pada tahun 2018 persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe mencapai 40% dimana tahun ini merupakan tahun dengan pencapaian terendah. Tahun 2019 persentase penertiban naik sebesar 26% dari tahun sebelumnya sehingga persentase penertiban mencapai 66%, namun ditahun 2020 kembali turun sebesar 23% sehingga persentase penertiban menjadi 43%. Hal ini disebabkan karena tidak dilaksanakannya penertiban dalam Kecamatan Banda Sakti dari 8 kali penertiban yang direncanakan pada tahun tersebut. Tahun 2021 persentase penertiban naik menjadi 71% dan pada tahun 2022 Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe merupakan capaian tertinggi dari 4 tahun sebelumnya yang mencapai 95%, ini menggambarkan bahwa jumlah penertiban yang dilaksanakan hampir sebanding dengan jumlah penertiban yang direncanakan. Persentase penertiban dalam wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel 2.155 berikut:

**Tabel 2.158**

**Persentase Penertiban dalam Wilayah Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| NO | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANG MANGAT | | | | | |
| | *Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan* | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | *Jumlah Penertiban yang Direncanakan* | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | **Persentase** | **0%** | **80%** | **80%** | **80%** | **100%** |
| 2 | BANDA SAKTI | | | | | |
| | *Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan* | 0 | 8 | 0 | 20 | 71 |
| | *Jumlah Penertiban yang Direncanakan* | 0 | 8 | 8 | 20 | 71 |
| | **Persentase** | **0%** | **100%** | **0%** | **100%** | **100%** |

| NO | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | MUARA DUA | | | | | |
| | *Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan* | 4 | 5 | 5 | 4 | 10 |
| | *Jumlah Penertiban yang Direncanakan* | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
| | **Persentase** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **66.67%** |
| 4 | MUARA SATU | | | | | |
| | *Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan* | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 |
| | *Jumlah Penertiban yang Direncanakan* | 8 | 8 | 7 | 7 | 11 |
| | **Persentase** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| **KOTA LHOKSEUMAWE** | | | | | | |
| *Jumlah Penertiban yang Dilaksanakan* | | 12 | 25 | 16 | 35 | 97 |
| *Jumlah Penertiban yang Direncanakan* | | 30 | 38 | 37 | 49 | 102 |
| **Persentase** | | **40%** | **66%** | **43%** | **71%** | **95%** |

*Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2023*

## C. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Forkopimcam adalah unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan. Salah satu tugasnya melaksanakan rapat koordinasi setiap bulannya sehingga apa saja yang terjadi di kecamatan dapat segera ditangani. Adapun keanggotaan Forkopimcam berasal dari tiga unsur, yakni camat sebagai ketua, pimpinan kepolisian dan pimpinan kewilayahan TNI di kecamatan sebagai anggota.

Berdasarkan tabel berikut dapat dilihat bahwa kegiatan Forkopimcam ini baru dianggarkan pada tahun 2021 dan 2022, sedangkan untuk proyeksi pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mengalami peningkatan sehingga permasalahan yang terjadi di kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe dapat ditangani dengan baik demi terwujudnya masyarakat yang damai dan tentram. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel;

**Tabel 2.159**

**Persentase Penanganan di Kecamatan Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| NO | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANG MANGAT | | | | | |
| | *Jumlah penanganan di kecamatan* | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | *Jumlah permasalahan di kecamatan* | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| | **Persentase** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **100%** |

| NO | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BANDA SAKTI | | | | | |
| | *Jumlah penanganan di kecamatan* | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| | *Jumlah permasalahan di kecamatan* | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | **Persentase** | **0%** | **0%** | **0%** | **75%** | **100%** |
| 3 | MUARA DUA | | | | | |
| | *Jumlah penanganan di kecamatan* | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| | *Jumlah permasalahan di kecamatan* | 17 | 17 | 17 | 17 | 2 |
| | **Persentase** | **0%** | **0%** | **0%** | **17,64%** | **100%** |
| 4 | MUARA SATU | | | | | |
| | *Jumlah penanganan di kecamatan* | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| | *Jumlah permasalahan di kecamatan* | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| | **Persentase** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| *Jumlah penanganan di kecamatan* | | 7 | 6 | 6 | 11 | 24 |
| *Jumlah permasalahan di kecamatan* | | 24 | 44 | 23 | 26 | 24 |
| **Persentase** | | **29,2%** | **13,6%** | **26,1%** | **42,3%** | **100%** |

*Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2023*

## D. Pengawasan Dokumen Gampong

Kegiatan pengawasan dokumen gampong ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap penyelesaian penyusunan RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) dan RAPBG serta penyelesaian dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) APBG terhadap gampong-gampong dalam 4 (empat) Kecamatan di Wilayah Kota Lhokseumawe. Evaluasi ini bertujuan agar gampong dapat segera menyelesaikan LPJ dan menyelesaikan dokumen RKPG dan RAPBG beserta penginputannya kedalam aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk dapat di evaluasi menjadi APBG dengan lebih dulu menunggu Peraturan Walikota yang mengatur besaran sumber dana untuk dimasukkan dalam dokumen tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel;

**Tabel 2.160**

**Persentase Pengawasan Dokumen Gampong**
**Tahun 2018-2022**

| NO | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANG MANGAT | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dokumen gampong* | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |

| NO | Kecamatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Jumlah gampong dalam kecamatan* | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 |
| | **Persentase** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 2 | BANDA SAKTI | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dokumen gampong* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | *Jumlah gampong dalam kecamatan* | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | **Persentase** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| 3 | MUARA DUA | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dokumen gampong* | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| | *Jumlah gampong dalam kecamatan* | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | **Persentase** | **0%** | **0%** | **0%** | **17,64%** | **70.59%** |
| 4 | MUARA SATU | | | | | |
| | *Jumlah pengawasan dokumen gampong* | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| | *Jumlah gampong dalam kecamatan* | 7 | 6 | 6 | 5 | 11 |
| | **Persentase** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** | **100%** |
| *Jumlah pengawasan dokumen gampong* | | 7 | 6 | 6 | 11 | 63 |
| *Jumlah gampong dalam kecamatan* | | 24 | 44 | 23 | 26 | 68 |
| **Persentase** | | **29,2%** | **13,6%** | **26,1%** | **42,3%** | **92,65%** |

*Sumber : Kecamatan dalam Wilayah Kota Lhokseumawe, 2023*

### 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

#### 2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiflier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dari perannya mampu memicu daya saing daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita.

Kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat melalui Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita. PDRB penggunaan atau pengeluaran merupakan nilai pengeluaran atas penggunaan barang dan jasa yang digunakan sebagai konsumsi akhir oleh

berbagai golongan dalam masyarakat baik untuk memenuhi modal, stok, maupun ekspor dan impor.

## A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita

Konsumsi rumah tangga merupakan salah satu variabel makro ekonomi yang menggambarkan besarnya pendapatan yang dibelanjakan. Untuk memperoleh gambaran besarnya rata-rata konsumsi yang dilakukan rumah tangga maupun perorangan di suatu wilayah, perlu adanya nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga. Konsumsi rumah tangga per kapita merupakan representasi mengenai gambaran tingkat pendapatan per kapita suatu masyarakat, sehingga informasi mengenai konsumsi rumah tangga per kapita dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

**Gambar 2.28**

**Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita ADHB (Juta Rupiah) Tahun 2018-2022 Kota Lhokseumawe**

*Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022*

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita maupun per-rumah tangga di Lhokseumawe dalam kurun waktu 2018-2022 mengalami fluktuatif. Hal ini menunjukkan adanya perubahan daya beli penduduk yang juga indikasi adanya perubahan rata-rata pendapatan. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2021.

Nilai konsumsi rumah tangga perkapita meningkat sebesar 4,74 juta rupiah selam kurun waktu 5 tahun, dari 22,10 juta rupiah di tahun 2018 menjadi 26,84 juta rupiah di tahun 2022. Konsumsi

rumah tangga per-rumah tangga pun meningkat sebesar 18,57 juta rupiah dalam 5 tahun. Laju pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga per-kapita tahun 2021 sebesar 4.16 persen mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh sebesar 1,83 persen.

#### 2.1.4.2 Fokus Fasilitasi Wilayah/Infrastruktur

Kondisi kemampuan ekonomi daerah di Kota Lhokseumawe dapat juga dilihat melalui fasilitas wilayah/infrastruktur melalui beberapa pendekatan antara lain persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih dan persentase rumah tangga yang menggunakan listrik.

**A. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih**

Jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih di Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 melalui jaringan PDAM adalah sebanyak 2.419 rumah tangga atau sebesar 4,34%. Minimnya persentase akses jaringan rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih ini dikarenakan jaringan pipa air PDAM baru terpasang untuk wilayah Kecamatan Banda Sakti dan Muara Satu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.161**

**Persentase Akses Jaringan Rumah Tangga (RT) Yang Menggunakan Air Bersih Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Pelanggan PDAM Ie Beusare Rata | - | 1,719 | 1.914 | 1.953 | 2.419 |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga | 43.309 | 44.165 | 47.620 | 47.726 | 55.661 |
| **Persentase** | | **0** | **3,89** | **4,02** | **4,09** | **4.34** |

*Sumber : PDAM Ie Beusare Rata Tahun 2023*

Air merupakan kebutuhan dasar yang paling utama bagi keberlangsungan aktivitas ekonomi sehari-hari. Perbandingan kebutuhan air secara internasional menunjukkan kebutuhan konsumsi air secara normal per orang sekitar 20 liter per hari dengan perincian 4 liter untuk konsumsi dan sisanya untuk aktivitas yang lainnya.

Persentase penduduk berakses air minum dari tahun 2018 terus meningkat seiring dengan bertambahnya penduduk dan kebutuhan air minum. Untuk keperluan air minum, maka sumber air baku yang dapat digunakan untuk kebutuhan air minum dapat terdiri dari mata air, air permukaan (sungai, danau, waduk, dan sebagainya), air tanah (sumur gali, sumur bor) maupun air hujan.

Pada tahun 2018 persentase penduduk berakses air minum sebesar 15,57 %, dan terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020 sebesar 19,59 %, namun terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi sebesar 20.35% dan tahun 2022 meningkat menjadi 22.57%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.162**

**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Penduduk berakses air minum | 31.651 | 35.452 | 36.969 | 38.648 | 43.192 |
| 2 | Jumlah penduduk | 203.284 | 207.202 | 188.713 | 189.941 | 191.396 |
| **Persentase** | | **15,57** | **17,11** | **19,59** | **20.35** | **22.57** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemawe Tahun 2023*

Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Dalam rangka pemenuhan infrastruktur dasar sebagai upaya pemenuhan SPM Pekerjaan Umum telah didukung dengan pendanaan yang bersumber dari APBK, DOKA dan DAK. Program yang mendukung pemenuhan infrastruktur dasar adalah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dengan kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota dan Sub kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan dan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan.

## B. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Sanitasi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan penyediaan air minum yang bersih serta pengolahan dan pembuangan sampah dan air limbah, dimana tujuannya untuk melindungi kesehatan manusia dengan menyediakan lingkungan yang bersih. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga. Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Lhokseumawe tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.163**

**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi | 29,565 | 31,651 | 32,709 | 34,969 | 39.563 |
| 2 | Jumlah rumah tinggal | 43.331 | 43.331 | 43.331 | 51.827 | 55.661 |
| **Persentase** | | **68,23** | **73,04** | **75,49** | **67,47** | **71.08** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemawe Tahun 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase rumah tinggal berakses sanitasi dari tahun 2018 sampai tahun 2020 terus terjadi penambahan. Pada tahun 2018 jumlah rumah tinggal berakses sanitasi sebanyak 29.565 rumah atau sebesar 68.23% dan pada tahun 2020 menjadi 32.709 rumah atau 75.49%, pada tahun 2021 terjadi persentase rumah tinggal berakses sanitasi menurun menjadi 67.47% dikarenakan bertambahnya jumlah rumah tinggal maupun jumlah rumah tinggal berakses sanitasi dan pada tahun 2022 persentase rumah tinggal berakses sanitasi meningkat menjadi 71.08% .

## C. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Drainase memiliki peran yang sangat penting di kawasan berpenghuni. Sistem drainase yang baik membantu mencegah banyak persoalan, seperti mengurangi kemungkinan banjir, mengendalikan permukaan air tanah, erosi tanah dan mencegah

kerusakan jalan dan bangunan yang ada. Sistem drainase bisa dikatakan baik apabila bisa berhubungan secara sistematik antara satu dengan yang lainnya, yang bertujuan agar air mengalir atau berjalan dengan baik.

Identifikasi terhadap masalah-masalah drainase di perkotaan sangat penting untuk dilakukan demi menemukan solusi yang tepat. Identifikasi masalah-masalah drainase di perkotaan juga diperlukan untuk perencanaan drainase di kawasan perkotaan di masa depan supaya dapat dibuat dengan lebih baik. Berikut ini permasalahan yang kerap dihadapi sistem drainase di perkotaan.

- Bertambahnya jumlah penduduk
- Pengelolaan sampah yang tidak diperhatikan
- Tanah ambles
- Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dengan infrastruktur yang lain
- Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah

Pada tabel di bawah ini dapat dilihat persentase drainase dalam kondisi baik terhadap panjang seluruh drainase di Kota Lhokseumawe Tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.164**

**Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Panjang drainase tidak tersumbat pembuangan aliran air (km) | 56,733 | 62,072 | 74,856 | 79,829 | 96.000 |
| 2 | Panjang seluruh drainase (km) | 116,408 | 116,408 | 116,408 | 115,408 | 115,408 |
| **Persentase** | | **48,74** | **53,32** | **64,30** | **68,58** | **83.18** |

*Sumber : Dinas PUPR Kota Lhoksemawe Tahun 2023*

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa panjang seluruh drainase Kota Lhokseumawe pada tahun 2022 adalah 115,408 Km berkurang 1 Km dari tahun 2018-2020. Sedangkan panjang drainase yang tidak tersumbat semakin tahun semakin baik terlihat pada tahun 2018 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 48.74% dan pada tahun 2022 meningkat kembali menjadi 83.18%.

**D. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik**

Proporsi rumah tangga dengan akses listrik di Kota Lhokseumawe pada tahun 2018 jumlah rumah tangga pengguna listrik sebesar 90,67 persen. Sedangkan pada Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 104 persen atau mengalami peningkatan 11,6 persen dan Tahun 2022 mengalami peningkatan kembali menjadi 112 persen, ini disebabkan karena sebagian rumah tangga ada yang menggunakan lebih dari 1 meteran listrik.

**Tabel 2.165**

**Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Jumlah Rumah Tangga Pengguna Listrik (Rayon Lhokseumawe) | 39.267 | 40.828 | 47.945 | 49.688 | 62.052 |
| 2 | Jumlah Rumah Tangga | 43.309 | 44.165 | 47.620 | 47.726 | 55.661 |
| **Persentase** | | **90,67** | **92,44** | **100.7** | **104** | **112** |

*Sumber: Publikasi PLN 2023*

### 2.1.4.3 Telaahan RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032 yang disusun untuk kurun waktu 20 Tahun mendatang, pengembangan ruang Kota Lhokseumawe mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan RTRWN dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain:

a. Dalam Konteks Nasional Kota Lhokseumawe adalah Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang membutuhkan keterkaitan aksesibilitas antar wilayah secara optimal.
b. Fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional dituntut adanya keterkaitan Kota Lhokseumawe dengan kota-kota *hinterland* disekitarnya yang berhimpitan untuk membagi beban dan fungsi-fungsi kegiatan perkotaan secara hirarkis dan terintegrasi.

Dengan demikian sistem pusat pelayanan yang ditetapkan di Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.166**

**Pusat-Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| No | Fungsi Pelayanan | Pusat Kegiatan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Pusat Kegiatan Nasional | Kota Lhokseumawe dan sekitarnya | Kota Lhokseumawe dan sekitarnya (wilayah Kab. Aceh Utara, yaitu Kecamatan Dewantara dan Muara Batu) |
| 2 | Pusat Pelayanan Kota | Keude Cunda | Kecamatan Muara Dua |
| 3 | Sub Pusat Pelayanan Kota | Lhokseumawe | Pusat Kecamatan Banda Sakti |
| | | Kandang | Pusat Kecamatan Muara Dua |
| | | Batuphat Timur | Pusat Kecamatan Muara Satu |
| | | Keude Peunteuet | Pusat Kecamatang Blang Mangat |
| 4 | Pusat Lingkungan | Lhokseumawe Selatan | Pusat Mukim Lhokseumawe Selatan |
| | | Lhokseumawe Utara | Pusat Mukim Lhokseumawe Utara |
| | | Kandang | Pusat Mukim Kandang |
| | | Cunda | Pusat Mukim Cunda |
| | | Paloh Timur | Pusat Mukim Paloh Timur |
| | | Paloh Barat | Pusat Mukim Paloh Barat |
| | | Meuraksa | Pusat Mukim Meuraksa |
| | | Peunteuet | Pusat Mukim Peunteuet |
| | | Mangat Makmu | Pusat Mukim Mangat Makmu |

*Sumber : Qanun RTRW Kota Lhokseumawe Tahun 2012-2032*

#### 2.1.4.4 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Lhokseumawe Tahun 2022

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Dalam ketentuan umum Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal, dinyatakan bahwa SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar

yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas:

a. Pendidikan;

b. Kesehatan;

c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;

d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

e. Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;

f. Sosial.

Jenis-jenis SPM :

1. SPM Pendidikan
2. SPM Kesehatan
3. SPM Pekerjaan Umum
4. SPM Perumahan Rakyat
5. SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
6. SPM Sosial

Berikut merupakan realisasi Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe Tahun 2022.

**Tabel 2.167**

**Realisasi Standar Pelayanan Minimal Kota Lhokseumawe Tahun 2022**

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|---|
| **SPM PENDIDIKAN** | | | |
| 1 | Pendidikan Dasar | 100 | 92 |
| 2 | Pendidikan Anak Usia Dini | 100 | 33 |
| 3 | Pendidikan Kesetaraan; | 100 | 99.72 |
| **SPM KESEHATAN** | | | |
| 1 | Pelayanan kesehatan ibu hamil | 100 | 92.5 |
| 2 | Pelayanan kesehatan ibu bersalin | 100 | 91.5 |
| 3 | Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | 100 | 87.7 |
| 4 | Pelayanan kesehatan balita | 100 | 74.7 |
| 5 | Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | 100 | 97 |
| 6 | Pelayanan kesehatan pada usia produktif | 100 | 80 |

| NO | JENIS PELAYANAN DASAR | TARGET | REALISASI |
|---|---|---|---|
| 7 | Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | 100 | 94.8 |
| 8 | Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | 100 | 86.6 |
| 9 | Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | 100 | 89.3 |
| 10 | Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | 100 | 90.3 |
| 11 | Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | 100 | 68.5 |
| 12 | Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficien cy Virus) | 100 | 84 |
| **SPM PEKERJAAN UMUM** | | | |
| 1 | Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari | 100 | 56.34 |
| 2 | Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | 100 | 78.01 |
| **SPM PERUMAHAN RAKYAT** | | | |
| 1 | Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota | 100 | 0 |
| 2 | Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten / kota | 100 | 0 |
| **SPM TRANTIBUMLINMAS** | | | |
| 1 | Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | 100 | 93.83 |
| 2 | Pelayanan informasi rawan bencana | 100 | 100 |
| 3 | Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | 100 | 100 |
| 4 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | 100 | 100 |
| 5 | Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | 100 | 100 |
| **SPM SOSIAL** | | | |
| 1 | Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | 100 | 95.77 |
| 2 | Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | 100 | 61.54 |
| 3 | Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | 100 | 100 |
| 4 | Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | 100 | 55.74 |
| 5 | Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kabupaten/kota | 100 | 0 |

*Sumber : OPD Pengampu Masing-masing SPM, 2023*

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPK Tahun 2022 dan Realisasi RPJMK sampai dengan Tahun 2022

### 2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Makro Tahun 2022

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Indikator makro pembangunan tersebut terdiri dari indeks pembangunan manusia, Jumlah pengangguran, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, inflasi.

1. Indeks Pembangunan Manusia

   Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran untuk melihat dampak kinerja pembangunan wilayah, karena memperlihatkan kualitas penduduk suatu wilayah dalam hal harapan hidup, intelektualitas dan standar hidup yang layak. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Untuk Tahun 2022 IPM Kota Lhokseumawe mencapai 78,04, mengalami kenaikan dari target yang telah di tetapkan dalam RKPK sebesar 77,62.

2. Kemiskinan

   Tingkat Kemiskinan adalah prosentase jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu minimum untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara.

   Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin). Tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe untuk tahun 2022 sebesar 10,48%, turun dibandngkan tahun 2021.

3. Pengangguran

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja. Secara general pengangguran terbuka dapat didefinisikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Di Kota Lhoksemawe Angka pengangguran untuk Tahun 2022 sebesar 9,15 persen mengalami penurunan dari target yang telah di tetapkan dalam RKPK sebesar 11,03 persen.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Untuk Tahun 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,01 persen, ini mengalami penurunan atau tidak mencapai Target yang telah di tetapkan dala RKPK sebesar 4,01 persen.

5. Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang per tahun di suatu negara atau wilayah geografis. Sehingga dapatdigunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk, atau menjadi tolak ukur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah.Dimana semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah tersebut menjadi lebih baik.

Untuk pendapatan perkapita Kota Lhokseumawe tahun 2022 sebesar 33,08 naik dibandingkan tahun 2021.

6. Ketimpangan Pendapatan/Indeks Gini

Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat kesenjangan pembagian pendapatan relatif antar penduduk suatu wilayah. Adanya Indeks Gini maka dapat menjelaskan hubungan antar kelompok dengan tingkat pendapatan yang berbeda. Berdasarkan koefisien gini, kesenjangan pendapatan di Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2022 sebesar 0,348 secara umum termasuk dalam kategori kesenjangan rendah.

7. Inflasi

Inflasi merupakan peningkatan nilai (barang/jasa) umumnya yang terdiri secara terus menerus. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurani nilai kekayaan yang berbentuk uang. Untuk Tahun 2022 Inflasi Kota Lhokseumawe sebesar 5,37 persen, inflasi Kota Lhokseumawe lebih tinggi bila dibandingkan dua Kota di Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dan Meulaboh.

Untuk mengetahui secara terperinci mengenai perkembangan capaian Indikator Makro Kota, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.168**
**Perkembangan Capaian Indikator Makro**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**

| No | Indikator Kinerja Makro | Capaian | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 76,62 | 77,30 | 77,31 | 77,57 | 78,84 |
| 2 | Angka Kemiskinan | 11,81 | 11,18 | 10,80 | 11,16 | 10,84 |
| 3 | Angka Pengangguran | 12,51 | 11,01 | 11,99 | 11,16 | 9,15 |
| 4 | Pertumbuhan Ekonomi | 3,03 | 4,38 | -2,40 | 4,75 | 4,01 |
| 5 | Pendapatan Perkapita | 27,98 | 28,65 | 30,75 | 31,95 | 33,08 |
| 6 | Ketimpangan Pendapatan | 0,305 | 0,306 | 0,307 | | 0,348 |
| 7 | Laju Inflasi | 2,05 | 1,2 | 3,55 | 1,97 | 5,37 |

*Sumber : BPS Kota Lhokseumawe 2023*

### 2.2.2. Realisasi Terhadap Proyeksi Kebijakan Keuangan

#### 2.2.2.1. Realisasi Pendanaan

Realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe dari Target RKPK-P Lhokseumawe Tahun 2022 sebesar Rp. 789.566.096.079,52 atau 99,47% dari yang telah di tetapkan sebesar Rp. 793.791.537.519,- dari sisi belanja Kota Lhokseumawe terealisasi sebesar Rp.825.509.672.418,00 atau 95,78% dari target yang telah di tetapkan dalam perubahan RKPK sebesar Rp. 861.875.702.114,- Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel berikut

**Tabel 2.169**
**Realisasi Pendanaan RKPK Lhokseumawe**
**Tahun 2022**

| No | Uraian | PROYEKSI RKPK- P 2022 | Realisasi Semeseter II | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **1** | **PENDAPATAN** | **793.791.537.519** | **789.566.096.079,52** | **99,47%** |
| **2** | **BELANJA** | **861.875.702.114** | **825.509.672.418,00** | **95,78%** |
| **3** | **SURPLUS/DEFISIT** | **(68.084.164.595)** | **(35.943.576.338,48)** | **52,79%** |
| | | | | |

*Sumber : P RKPK 2022 dan LRA Kota Lhokseumawe Tahun 2022*

#### 2.2.2.2. Realisasi Pendapatan

Tingkat realisasi pendapatan tahun 2022 terhadap target RKPK-P tahun 2022 mencapai 99,47 persen. Jumlah realisasi Pendapatan tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp. 721.353.589.208,24 atau 100,10 persen melebihi dari target yang telah di tetapkan dalam P-RKPK sebesar Rp. 720.608.169.676,- diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah yang mencapai sebesar Rp. 68.212.506.871,28,- atau 93,21 persen dari target yang telah di tentukan.

Pendapatan Transfer yang tertinggi berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 101,94 persen dari target yang di tetapkan dalam RKPK-P Tahun 2022, pendapata transfer pusat tersebut berasal dari Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa. Pada umumnya pendapatan Kota Lhokseumawe masih didominasi oleh pendapatan Transfer Pemerintah Pusat. Dilihat dari

proyeksi besar Pendapatan Kota Lhokseumawe, besrnya persentase Pendapatan Asli Daerah masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total pendapatan/penerimaan Kota Lhokseumawe, hal ini menunjukkan bahwa daerah masih tergantung pada Dana Transfer Pemerintah Pusat yang dapat di artikan bahwa Kota Lhokseumawe belum mandiri, karena tingkat kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar peranan PAD dalam APBK, maka dapat disimpulkan bahwa peranan pemerintah pusat dalam hal ini transfer dana ke daerah semakin kecil.

Secara persentase kemandirian keuangan daerah, target proyeksi pada RKPK-P Lhokseumawe Tahun 2022 mencerminkan bahwa keuangan Kota Lhokseumawe masih tergolong dalam kriteria rendah sekali (kriteria 0-25 persen "rendah sekali") tau sebesar 8,64% dari pagu Pendapatan Daerah.

Pada tahun 2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Lhokseumawe tercatat Rp. 68.212.506.871,28 atau 93,21 persen dari target yang ditetapkan dala RKPK-P Tahun 2022 sebesar Rp. 73.183.367.843,- Kontribusi tetinggi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp.40,032.463.309,91 atau 108,18 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp.37.006.250.000,- dan yang terendah pada Retribusi daerah yaitu sebesar Rp.3.022.508.323,- atau 75,36 persen dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.4.010.500.000. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel berikut

**Tabel 2.170**
**Realisasi Pendapatan RKPK Lhokseumawe Tahun 2022**

| No | Uraian | PROYEKSI RKPK- P 2022 | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **I** | **PENDAPATAN DAERAH** | **793.791.537.519** | **789.566.096.079,52** | **99,47%** |
| **1.1** | **PENDAPATAN ASLI DAERAH** | **73.183.367.843** | **68.212.506.871,28** | **93,21%** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 37.006.250.000 | 40.032.463.309,91 | 108,18% |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 4.010.500.000 | 3.022.508.323,00 | 75,36% |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | 5.200.000.000 | 4.350.084.432,00 | 83,66% |
| 1.1.4 | Lain-lain PAD yang Sah | 26.966.617.843 | 20.807.450.806,37 | 77,16% |

| No | Uraian | PROYEKSI RKPK- P 2022 | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % |
| **1.2** | **PENDAPATAN TRANSFER** | **720.608.169.676** | **721.353.589.208,24** | **100,10%** |
| 1.2.1 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | 610.894.511.889 | 622.773.568.549,00 | 101,94% |
| 1.2.2 | Pendapatan Transfer Antra Daerah | 109.713.657.787 | 98.580.020.659,24 | 89,85% |

*Sumber : RKPK P Tahun 2022 dan BPKD Lhokseumawe (diolah)*

Berdasarkan strukturnya realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022 didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 100,10 persen kemudian diikuti oleh Pendapatan Asli Daerah sebesar 99,47 persen.

**Gambar 2.29**
**Realisasi Pendapatan RKPK Lhokseumawe Tahun 2022**

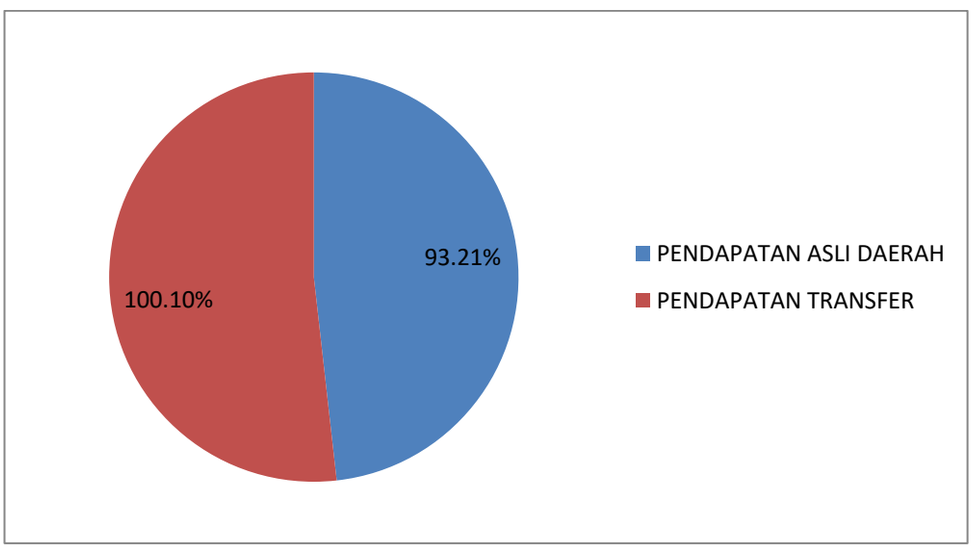


*Sumber : BPKD Lhokseumawe Tahun 2022*

### 2.2.2.3. Realisasi Belanja

Belanja Daerah terdiri dari Belana Opreasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Realisasi Belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 mencapai 95,78 persen dari target RKPK P 2022. Jumlah Realisasi tertinggi berada pada Belanja Modal sebesar Rp. 142.251.751.256,- atau 99,62 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 142.787.821.753,- dalam belanja modal tersebut penyumbang realisasi tertinggi berada pada belanja modal jaringan jalan dan irigasi sebesar Rp. 62.614.371.138,00,-

atau 119,80 persen dari target yang telah ditetapka sebesar Rp. 52.264.928.358,-

Kemudian diikuti oleh jenis belanja transfer sebesar Rp. 104.748.131.372,00,- atau 97,22 persen dari target sebesar Rp. 107.745.918.700,-. Belanja Transfer ini merupakan belanja bagi hasil dan belanja keuangan yang diberikan kepada pemerintah desa. Selanjutnya Belanja Operasi terealisasi sebesar Rp.576.374.939.708,00,- atau 95,06 persen dari target sebesar Rp. 606.341.961.661,-. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, pada jenis belanja operasi penyumbang tertingi realisasi yaitu pada belanja bantuan sosial sebesar Rp. 49.131.020.993,00,- atau 109,66 persen dari target dalam RKPK P sebesar Rp. 44.802.328.558,-

Sedangkan realisasi terendah padajenis belanja tidak terduga sebesar Rp. 2.134.850.082,00,- atau 42,70 persen dari target yang telah di tetapkan sebesar Rp. 5.000.000.000,- Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel berikut

**Tabel 2.171**
**Realisasi Belanja RKPK Lhokseumawe**
**Tahun 2022**

| NO | JENIS BELANJA | PROYEKSI RKPK- P 2022 | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **II** | **BELANJA** | **861.875.702.114** | **825.509.672.418,00** | **95,78%** |
| **2.1** | **BELANJA OPERASI** | **606.341.961.661** | **576.374.939.708,00** | **95,06%** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 336.445.145.270 | 304.916.122.038,00 | 90,63% |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 187.432.132.498 | 185.425.254.292,00 | 98,93% |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | 200.000.000,00 | 0,00% |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 37.662.355.335 | 36.702.542.385,00 | 97,45% |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 44.802.328.558 | 49.131.020.993,00 | 109,66% |
| | | | | |
| **2.2** | **BELANJA MODAL** | **142.787.821.753** | **142.251.751.256,00** | **99,62%** |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 19.427.530.720 | 13.713.809.182,00 | 70,59% |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 25.191.605.111 | 21.363.441.916,00 | 84,80% |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 42.025.723.210 | 40.945.930.770,00 | 97,43% |

| NO | JENIS BELANJA | PROYEKSI RKPK- P 2022 | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 52.264.928.358 | 62.614.371.138,00 | 119,80% |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3.878.034.354 | 3.614.198.250,00 | 93,20% |
| | | | | |
| **2.3** | **BELANJA TIDAK TERDUGA** | **5.000.000.000** | **2.134.850.082,00** | **42,70%** |
| 2.3.1 | Belanja Tidak Terduga | 5.000.000.000 | 2.134.850.082,00 | 42,70% |
| | | - | | |
| **2.4** | **BELANJA TRANSFER** | **107.745.918.700** | **104.748.131.372,00** | **97,22%** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil | 3.827.000.000 | 1.820.631.270,00 | 47,57% |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan | 103.918.918.700 | 102.927.500.102,00 | 99,05% |
| | | | | |

*Sumber : RKPK P Tahun 2022 dan BPKD Lhokseumawe 2022 (diolah)*

Berdasarkan strukturnya realisasi belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2022 didominasi oleh belanja Modal sebesar 99,62 persen, kemudian belanja transfer sebesar 97,22 persen, selanjutnya belanja operasi sebesar 95,06 persen dan terakhir belanja tidak terduga sebesar 42,70 persen.

**Gambar 2.30**

**Realisasi Belanja APBK Lhokseumawe Tahun 2022**

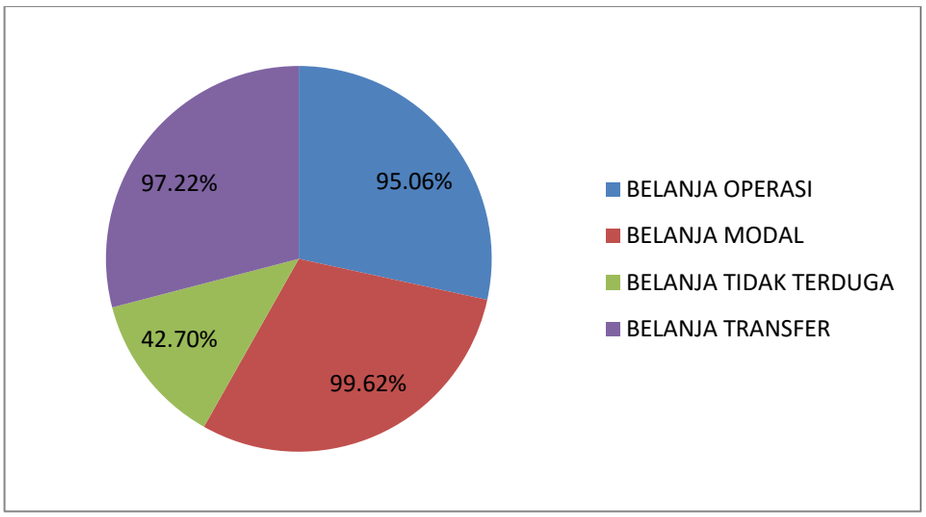


*Sumber : BPKD Lhokseumawe Tahun 2022*

### 2.2.2.4. Realisasi Pembiayaan

Pada tahun 2022 penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) dan terealisasi. Dari jumlah yang telah di targetkan dalam RKPK-P tahun

2022 sebesra Rp. 40.484.611.013,- terealisasi sebesar 100 persen. Untuk mengetahui secara lebih terperinci mengenai kondisi tersebut, dapat dilihat Tabel berikut :

**Tabel 2.172**
**Realisasi Pembiayaan RKPK Lhokseumawe**
**Tahun 2022**

| No | URAIAN | PROYEKSI RKPK- P 2022 | REALISASI | |
|---|---|---|---|---|
| | | Rp | Rp | % |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| **III** | **PEMBIAYAAN** | | | |
| **3.1** | **PENERIMAAN PEMBIAYAAN** | **48.484.611.013** | **48.484.611.012,85** | **100,00%** |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 48.484.611.013 | 48.484.611.012,85 | 100,00% |
| | | | | |
| | **Jumlah Penerimaan Pembiayaan** | **48.484.611.013** | **48.484.611.012,85** | **100,00%** |
| | | | | |
| **3.2** | **PENGELUARAN PEMBIAYAAN** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000,00** | **100,00%** |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal | 2.000.000.000 | 2.000.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | |
| | **Jumlah Pengeluaran Pembiayaan** | **2.000.000.000** | **2.000.000.000,00** | **100,00%** |
| | | | | |
| | **PembiayaanNetto** | **46.484.611.013,00** | **46.484.611.012,85** | **100,00%** |
| | | | | |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN** | **(21.599.553.582)** | **10.541.034.674,37** | **-49%** |

*Sumber : RKPK P Tahun 2022 dan BPKD Lhokseumawe 2022 (diolah)*

### 2.2.3. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Realisasi RPJMK

#### 2.2.3.1. Metode Evaluasi

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Tujuan evaluasi hasil RKPK adalah untuk memastikan dan menilai bahwa target program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPK dapat dicapai dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka

menengah daerah dan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan tahunan nasional.

Evaluasi hasil RKPK dilaksanakan setiap semester oleh Kepala Bappeda dengan menggunakan hasil evaluasi Renja OPD. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala OPD wajib melaksanakan evaluasi hasil Renja OPD setiap semester berdasarkan realisasi DPA OPD.

a. Bappeda melakukan Evaluasi Hasil RKPK setiap semester berdasarkan Hasil Evaluasi Renja SKPK yang dilaporkan/disampaikan Kepala SKPK.
b. evaluasi Hasil RKPK selanjutnya digunakan untuk penyusunan Perubahan RKPK Tahun Berjalan atau RKPK Tahun berikutnya.
c. formulir Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota adalah seperti dapat dilihat yang menyerupai Formulir Evaluasi Hasil Renja.

Untuk lebih jelas mengenai mekanisme pengisian Evaluasi Hasil RKPK Provinsi/Kabupaten/Kota, dapat dilihat sebagai berikut:

Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud.

Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut:

| Skala Nilai Peringkat Kinerja Semester 1 | | | Skala Nilai Peringkat Kinerja Semeter 2 | |
|---|---|---|---|---|
| INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA | | INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA | KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA |
| 45,5% ≤ 50% | Sangat tinggi | | 91% ≤ 100% | Sangat tinggi |
| 38% ≤ 45% | Tinggi | | 76% ≤ 90% | Tinggi |
| 33% ≤ 37,5% | Sedang | | 66% ≤ 75% | Sedang |
| 25,5% ≤ 32,5% | Rendah | | 51% ≤ 65% | Rendah |
| ≤ 25% | Sangat Rendah | | ≤ 50% | Sangat Rendah |

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

(1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

(2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.

(3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Catatan :

1. dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan dan supervisi ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan atas pelaksanaan RKPK pada Semester I dan Semester II, Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempurnaan RKPK untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Bappeda provinsi/kabupaten/kota dengan melakukan perubahan RKPK.
2. dalam hal dilakukan perubahan RKPK, data dan informasi pada Kolom (7) disesuaikan dengan data dan informasi yang tercantum dalam perubahan RKPK.

Setelah Formulir Evaluasi Hasil RKPK diisi, maka diketahuilah tingkat capaian kinerja dan capaian anggaran untuk masing-masing program, masing-masing urusan maupun masing-masing OPD.

#### 2.2.3.2 Hasil Evaluasi

**A. Capaian Anggaran**

Target Anggaran RPJMK Tahun 2018-2022 berdasarkan Qanun nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Lhokseumawe Tahun 2017-2022 adalah sebesar Rp. 3.263.657.236.122,- dengan tingkat realisasi sampai dengan 2022 sebesar 71,33 persen dengan kriteria sedang.

Sedangkan target RKPK Tahun 2022 sebesar Rp.861.875.702.114,- dengan tingkat realisasi sebesar 95,77% dengan kriteria sangat tinggi.

**Tabel 2.173**
**Tingat Capaian Realisasi RPJMK Lhokseumawe**
**Tahun 2018-2022**

| No | Uraian | Tingkat Anggaran RPJMK 2018 s.d 2022 | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 | Realisasi Anggaran RPJMK s.d 2018 | Realisasi Anggaran RKPK s.d 2022 | Realisasi Anggaran RPJMK s.d 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jumlah (Rp) | | 3.263.657.236.122 | 861.875.702.114 | 315.454.397.103 | 825.379.340.058 | 2.327.966.718.612 |
| Persentase (%) | | 100 | 26,41% | 9,67% | 95,77%% | 71,33% |

| No | Uraian | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPK 2022 | Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggran RPJMK 2018 s.d 2022 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Persentase (%) | | 95,77% | 71,3% |
| Predikat Kinerja | | ST | S |

*Sumber : RPJMK, RKPK dan LRA*

Bila ditinjau dari Tingkat Rata-rata Capaian Kinerja dan Rata-rata Realisasi Anggaran Terhadap RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 untuk seluruh Perangat Daerah adalah sebagai berikut :

a) Untuk Tingkat rata-rata capaian kinerja terhadap RKPK tahun 2022 dan RPJMK sampai dengan 2022 masih tidak dapat di hitung, karena masih banyak terjadi ketidak sesuaian satuan dalam indikator kegiatan dan sub kegiatan.

b) Rata-rata tingkat capaian anggaran program/kegiatan/sub kegiatan mencapai 69,19 persen atau kriteria sedang, hal ini di sebabkan masih banyak kegiatan/sub kegiatan dalam RKPK Tahun 2022 tidak dapat dilaksanakan, sehingga menyebabkan rata-rata capaian tidak mencapai 100 pesen

c) Begitu pula untuk rata-rata capaian kinerja dan rata-rata realisasi anggaran RPJMK sampai dengan 2022 sebesar 64,14 persen atau kriteria rendah, hal ini di sebabkan banyak kegiatan/sub kegiatan dalam RPJMK sampai dengan 2022 tidak dilaksanakan, sehingga menyebabkan rata-rata capaian tidak mencapai 100 pesen.

d) Perangkat Daerah yang memiliki nilai capaian rata-rata anggaran tahun 2022 dengan kriteria Sangat Tinggi diantaranya adalah Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (DISPUPR) sebesar 100 persen; Satuan Polisi Pamong Praja Dan WH (SATPOLPP) sebesar 100 persen; Dinas Sosial (DINSOS) 100 persen; Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja (DPMTSP NAKER) 100 persen; Dinas Perindustrian,Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah (DISPRINDAGKOP) 100 persen. Sedangkan Perangkat Daerah dengan nilai realisasi rendah atau kriteria Sangat Rendah diantaranya adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (DISPK) 47,7 persen; Dinas Pertanahan 19,34 persen; Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 19,75 persen; Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) 16,65 persen; Dinas Perhubungan (DISHUB) 37,72 persen; Dinas Komunikasi, Informasi Dan Persandian (KOMINFO) 24,95 persen; Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan (PUSIP) 41,56 persen; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 37,47 persen.

Untuk mengetahui secara terperinci mengenai rata-rata capaian anggaran pada RKPK Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.174**
**Tingkat Capaian Realisasi RKPK Lhokseumawe**
**Tahun 2022**

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 (setelah perubahan) | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2022 (%) | | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2022 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | K | Rp | K | Rp |
| | | | | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (**DISPK**) | 196.697.079.383 | 180.420.528.334 | 26,11% | 47,75% | 41,60% | 37,03% |
| | | | | SR | SR | SR | SR |
| 2 | DINAS KESEHATAN (**DINKES**) | 102.575.015.885 | 92.860.608.934 | 76,16% | 69,84% | 100,00% | 100,00% |
| | | | | T | S | ST | ST |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (**DISPUPR)** | 74.163.241.110 | 93.350.842.253 | 58,26% | 100,00% | 100,00% | 70,26% |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 (setelah perubahan) | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2022 (%) | | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2022 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |
| | | | | R | ST | ST | S |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (**BPBD**) | 17.106.088.892 | 17.640.223.272 | 44,54% | 72,49% | 72,27% | 100,00 % |
| | | | | SR | S | S | ST |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH (**SATPOLPP**) | 9.699.363.233 | 9.205.932.996 | 58,54% | 100,00 % | 90,93% | 12,61% |
| | | | | R | ST | ST | SR |
| 6 | DINAS SOSIAL (**DINSOS)** | 8.498.440.075 | 9.764.365.859 | 31,71% | 100,00 % | 56,29% | 50,08% |
| | | | | SR | ST | R | SR |
| 7 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA **(DP3AP2KB)** | 8.525.023.716 | 7.751.366.856 | 31,44% | 63,52% | 78,80% | 65,99% |
| | | | | SR | R | T | S |
| 8 | DINAS PERTANAHAN | 3.446.307.140 | 3.300.179.897 | 21,05% | 19,34% | 73,77% | 9,90% |
| | | | | SR | SR | S | SR |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (**DLH)** | 44.762.924.542 | 38.420.357.458 | 20,95% | 19,75% | 38,39% | 54,28% |
| | | | | SR | SR | SR | R |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (**DISDUKCAPIL)** | 4.407.458.120 | 3.990.514.718 | 17,81% | 16,65% | 25,91% | 17,60% |
| | | | | SR | SR | SR | SR |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG **(DPMG)** | 3.677.088.690 | 3.487.528.446 | 65,56% | 63,89% | 79,69% | 20,60% |
| | | | | S | R | T | SR |
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN **(DISHUB)** | 7.436.364.740 | 6.949.324.602 | 41,10% | 37,72% | 97,04% | 49,87% |
| | | | | SR | SR | ST | SR |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (**KOMINFO)** | 2.737.679.752 | 2.545.550.608 | 22,23% | 24,95% | 48,73% | 33,45% |
| | | | | SR | SR | SR | SR |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 (setelah perubahan) | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2022 (%) | | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2022 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (**DPMTSP NAKER)** | 6.426.480.200 | 7.121.108.774 | 86,40% | 100,00 % | 100,00% | 67,01% |
| | | | | T | ST | ST | S |
| 15 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (**PORAPAR)** | 7.285.352.520 | 8.628.885.162 | 45,54% | 86,37% | 100,00% | 100,02 % |
| | | | | SR | T | ST | ST |
| 16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN **(PUSIP)** | 4.781.923.900 | 4.766.861.616 | 30,11% | 41,56% | 40,37% | 46,96% |
| | | | | SR | SR | SR | SR |
| 17 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (**DKP3)** | 23.991.962.263 | 20.454.115.097 | 57,41% | 76,85% | 100,00% | 100,00 % |
| | | | | R | T | ST | ST |
| 18 | DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH **(DISPRINDAGKOP)** | 13.396.845.680 | 15.721.886.101 | 36,80% | 100,00 % | 53,91% | 100,00 % |
| | | | | SR | ST | R | ST |
| 19 | SETDAKO | 56.568.306.134 | 46.454.941.705 | 70,13% | 33,39% | 100,00% | 17,90% |
| | | | | S | SR | ST | SR |
| 20 | SEKWAN | 26.529.281.657 | 29.482.851.227 | 78% | 100,00 % | 100,00% | 91,76% |
| | | | | T | ST | ST | ST |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **(BAPPEDA)** | 6.911.244.428 | 6.307.993.034 | 49,39% | 37,47% | 88,63% | 16,74% |
| | | | | SR | SR | T | SR |
| 22 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH **(BPKD)** | 131.624.927.761 | 124.897.668.520 | 73,52% | 83,37% | 100,00% | 100,00 % |
| | | | | S | T | ST | ST |
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (**BKPSDM)** | 24.480.236.335 | 17.827.305.885 | 78,37% | 87,07% | 100,00% | 43,88% |

| No | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 (setelah perubahan) | Realisasi Tahun 2022 | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RKPK Tahun 2022 (%) | | Tingkat Rata-Rata Capaian Kinerja dan Rata-Rata Realisasi Anggaran RPJMD S/D Tahun 2022 (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |
| | | | | T | T | ST | SR |
| 24 | INSPEKTORAT | 9.465.640.810 | 8.636.411.419 | 75,86% | 72,82% | 100,00% | 40,81% |
| | | | | T | S | ST | SR |
| 25 | KECAMATAN BANDA SAKTI | 3.449.592.700 | 3.376.040.761 | 94,29% | 75,00% | 100,00% | 100,00 % |
| | | | | ST | S | ST | ST |
| | | | | | | | |
| 26 | KECAMATAN BLANG MANGAT | 2.676.532.160 | 2.485.376.407 | 65,89% | 95,69% | 100,00% | 100,00 % |
| | | | | S | ST | ST | ST |
| 27 | KECAMATAN MUARA SATU | 2.756.678.752 | 2.352.177.692 | 94,38% | 100,00 % | 100,00% | 73,89% |
| | | | | ST | ST | ST | S |
| 28 | KECAMATAN MUARA DUA | 2.910.485.500 | 2.834.828.574 | 89,62% | 96,02% | 66,44% | 70,31% |
| | | | | T | ST | S | S |
| 29 | BADAN KESBANGPOL **(KESBANGPOL)** | 4.945.349.497 | 4.477.592.402 | 37,23% | 82,61% | 30,14% | 94,03% |
| | | | | SR | T | SR | ST |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (**DSI PD)** | 32.406.081.545 | 33.211.249.800 | 44,46% | 69,21% | 69,63% | 100,00 % |
| | | | | SR | S | S | ST |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARAT AN ULAMA **(MPU)** | 3.270.520.160 | 3.297.839.671 | 91,67% | 100,00 % | 86,42% | 71,45% |
| | | | | ST | ST | T | S |
| 32 | SEKRETARIAT BAITUL MAL **(BM)** | 10.638.697.160 | 10.239.276.699 | 64,29% | 58,76% | 100,00% | 60,84% |
| | | | | R | R | ST | R |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH **(MAA)** | 1.465.142.414 | 1.349.151.070 | 57,26% | 57,31% | 100,00% | 82,04% |
| | | | | R | R | ST | T |
| 34 | SEKRETAARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH **(MPD)** | 2.162.345.260 | 1.768.454.209 | 67,26% | 62,99% | 100,00% | 81,39% |
| | | | | S | R | ST | T |
| **TOTAL** | | **861.875.702.114** | **825.379.340.058** | | **69,19%** | | **64,14%** |
| | | | | | **S** | | **R** |

*Sumber : Data diolah*

A. Konsistensi

Anggaran Daerah yang tertuang dalam APBK berpedoman pada RKPD, dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa proses perencanaan pembangunan harus melalui musrenbang partisipatif. Perencanaan dimulai dari RPJP yang bersifat 20 tahunan, RPJMK perencanaan 5 tahunan, Renstra, RKPK perencanaan 1 tahunan dan Renja, kemudian dilanjutkan ke penganggaran dengan pengesahan APBK. Melalui dokumen perencanaan antara yang satu dengan yang lainnya diharuskan terjadinya konsistensi guna mengetahui keberhasilan perencanaan penganggaran.

Dari hasil evaluasi yang telah di lakukan terdapat 1.686 sub kegiatan yang terdapat dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2022, namun sebanyak 59 persen yang dapat dilaksanakan dan dapat dicapai pada tahun 2022, sedangkan 41 persen kegiatan yang direncanakan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 dan terdapat 0,5 persen kegiatan yang tidak di reencanakan dalam RKPK dan dianggarkan dalam APBK Tahun 2022. Adapun kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPK namun dianggarkan dalam APBK merupakan kegiatan yang pembahasannya melalui bappeda Aceh dan menyarakan memakai sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPK, contonya terdapat pada Dinas PUPR. dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.175**
**Konsistensi Dokumen Perencanaan**

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 (setelah perubahan) | Realisasi Tahun 2022 | Direncanakan Dalam RKPD Dan Direncanakan Dalam Renstra | Direncanakan Dalam Renstra Namun Tidak Direncanakan Dalam Renja *"(Kuning)"* | Tidak Direncanakan Dalam Renstra Namun Direncanakan Dalam Renja *"(Merah)"* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN (**DISPK**) | 196.697.079.383 | 180.420.528.334 | 52 | 58 | 0 |
| 2 | DINAS KESEHATAN (**DINKES**) | 102.575.015.885 | 92.860.608.934 | 66 | 15 | 0 |
| 3 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT (**DISPUPR)** | 74.163.241.110 | 93.350.842.253 | 32 | 23 | 2 |
| 4 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (**BPBD**) | 17.106.088.892 | 17.640.223.272 | 22 | 13 | 0 |
| 5 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WH (**SATPOLPP**) | 9.699.363.233 | 9.205.932.996 | 25 | 21 | 0 |
| 6 | DINAS SOSIAL (**DINSOS)** | 8.498.440.075 | 9.764.365.859 | 32 | 34 | 0 |
| 7 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA **(DP3AP2KB)** | 8.525.023.716 | 7.751.366.856 | 37 | 12 | 1 |
| 8 | DINAS PERTANAHAN | 3.446.307.140 | 3.300.179.897 | 17 | 20 | 0 |
| 9 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP (**DLH)** | 44.762.924.542 | 38.420.357.458 | 20 | 21 | 0 |
| 10 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL (**DISDUKCAPIL)** | 4.407.458.120 | 3.990.514.718 | 30 | 72 | 0 |
| 11 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG **(DPMG)** | 3.677.088.690 | 3.487.528.446 | 30 | 22 | 0 |

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 (setelah perubahan) | Realisasi Tahun 2022 | Direncanakan Dalam RKPD Dan Direncanakan Dalam Renstra | Direncanakan Dalam Renstra Namun Tidak Direncanakan Dalam Renja *"(Kuning)"* | Tidak Direncanakan Dalam Renstra Namun Direncanakan Dalam Renja *"(Merah)"* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | DINAS PERHUBUNGAN **(DISHUB)** | 7.436.364.740 | 6.949.324.602 | 25 | 26 | 0 |
| 13 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMASI DAN PERSANDIAN (**KOMINFO)** | 2.737.679.752 | 2.545.550.608 | 25 | 14 | 1 |
| 14 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA (**DPMTSP NAKER)** | 6.426.480.200 | 7.121.108.774 | 34 | 19 | 0 |
| 15 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA (**PORAPAR)** | 7.285.352.520 | 8.628.885.162 | 27 | 15 | 0 |
| 16 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN **(PUSIP)** | 4.781.923.900 | 4.766.861.616 | 23 | 24 | 0 |
| 17 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN (**DKP3)** | 23.991.962.263 | 20.454.115.097 | 32 | 23 | 3 |
| 18 | DINAS PERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH **(DISPRINDAGKOP)** | 13.396.845.680 | 15.721.886.101 | 34 | 54 | 0 |
| 19 | SETDAKO | 56.568.306.134 | 46.454.941.705 | 46 | 6 | 0 |
| 20 | SEKWAN | 26.529.281.657 | 29.482.851.227 | 56 | 16 | 0 |
| 21 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH **(BAPPEDA)** | 6.911.244.428 | 6.307.993.034 | 37 | 34 | 0 |
| 22 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH **(BPKD)** | 131.624.927.761 | 124.897.668.520 | 59 | 19 | 0 |

| NO | Organisasi Perangkat Daerah | Target Anggaran RKPK Tahun 2022 (setelah perubahan) | Realisasi Tahun 2022 | Direncanakan Dalam RKPD Dan Direncanakan Dalam Renstra | Direncanakan Dalam Renstra Namun Tidak Direncanakan Dalam Renja *"(Kuning)"* | Tidak Direncanakan Dalam Renstra Namun Direncanakan Dalam Renja *"(Merah)"* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (**BKPSDM)** | 24.480.236.335 | 17.827.305.885 | 29 | 15 | 0 |
| 24 | INSPEKTORAT | 9.465.640.810 | 8.636.411.419 | | | |
| 25 | KECAMATAN BANDA SAKTI | 3.449.592.700 | 3.376.040.761 | 22 | 7 | 0 |
| 26 | KECAMATAN BLANG MANGAT | 2.676.532.160 | 2.485.376.407 | 22 | 12 | 0 |
| 27 | KECAMATAN MUARA SATU | 2.756.678.752 | 2.352.177.692 | 23 | 4 | 0 |
| 28 | KECAMATAN MUARA DUA | 2.910.485.500 | 2.834.828.574 | 20 | 7 | 0 |
| 29 | BADAN KESBANGPOL **(KESBANGPOL)** | 4.945.349.497 | 4.477.592.402 | 21 | 19 | 0 |
| 30 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH (**DSI PD)** | 32.406.081.545 | 33.211.249.800 | 31 | 32 | 0 |
| 31 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA **(MPU)** | 3.270.520.160 | 3.297.839.671 | 16 | 3 | 0 |
| 32 | SEKRETARIAT BAITUL MAL **(BM)** | 10.638.697.160 | 10.239.276.699 | 18 | 9 | 0 |
| 33 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH **(MAA)** | 1.465.142.414 | 1.349.151.070 | 16 | 10 | 1 |
| 34 | SEKRETAARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH **(MPD)** | 2.162.345.260 | 1.768.454.209 | 16 | 4 | 0 |
| | | | | | | |
| | **TOTAL** | **861.875.702.114** | **825.379.340.058** | | | |
| | | | | | | |

*Sumber : Data diolah*

#### 2.2.3.3. Capaian Indikator Kinerja Utama

Kinerja pemerintahan daerah memiliki target yang diukur dengan sebuah alat ukur. Target kinerja dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan. Indikator kinerja yang telah di tetapkan dalam RPJMK untuk kurun waktu 5 tahun dan diturunkan dalam dokumen RKPK Lhokseumawe untuk satu tahunan sebagai tolak ukur pemerintah Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja yang lebih baik. Indikator Kinerja di dalam RPJMK Lhokseumawe diantaranya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 sebanyak 80 indikator yang harus di capai. Dari 83 indikator yang telah di tetapkan, sebesar 38 persen dapat dicapai dan sebesar 60 persen tidak dapat dicapai dan 3 persen masih dalam proses penilaian. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai capaian Indikator Kinerja Utama pada RKPK Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.176**
**Penetapan Target Indikator Kinerja Utama dan Capaian**
**Tahun 2022**

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 1 | DSI PD | Indeks Pembangunan Syariat Islam | Indeks | 50 | 54 | 54 | 57 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| | DSI PD | Persentase pemahaman masyarakat terhadap kebijakan syariat islam | | | | | | | | | 70 | 70 | 80 | 82,57 | 80 |
| 2 | DSI PD | Kasus Pelanggaran Syariat Islam | Kasus | 81 | 69 | 58 | 59 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 3 | B. MAL | Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq, Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF) | Rp (milyar) | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8,8 | 7,6 | 8,8 | 6,9 | 8,8 | 7,01 | 9 |
| 4 | MAA | Cakupan pembinaan adat Gampong | Jumlah gampong | 0 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | | 0 | | 0 | 2 | 0 |
| 5 | MAA | Cakupan pembinaan dan penguatan lembaga adat Aceh | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | - | | - | 12 | - |
| 6 | BPS | Pertumbuhan PDRB | Persen | 1,18 | 6,50 | 3,84 | 6,80 | 3,97 | 4,00 | 33,20 | 4,10 | data belum di publis | 4,20 | 4,01 | 4,20 |
| 7 | BPS | Pengendalian laju inflasi (disperindagkop) | Persen | 5,60 | 2,80 | 2,05 | 2,60 | 1,20 | 1,95 | 3,55 | 1,40 | 1,97 | 1,30 | 5,37 | 1,30 |
| 8 | BPS | Penduduk dibawah garis kemiskinan | Persen | 11,98 | 9,50 | 11,81 | 9,30 | 11,18 | 11,00 | 10,44 | 10,80 | 11,16 | 10,80 | 10,84 | 10,80 |
| 9 | BPS | Tingkat pengangguran terbuka | Persen | 10,51 | 10,40 | 12,52 | 10,33 | 11,06 | 11,05 | 11,99 | 11,04 | 11,16 | 11,03 | 9,15 | 11,03 |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 10 | BPS | Pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita | Rp (Juta) | 1,01 | 1,04 | 10,86 | 1,08 | 11,42 | 11,82 | | 1,16 | | 1,20 | | 1,20 |
| 11 | DP3A P2KB | Persentase pemberdayaan kelompok perempuan | Persen | 20 | 20 | NA | 20 | 20 | 20 | 80 | 25 | 100 | 30 | 30 | 30 |
| 12 | Diskop | Pertumbuhan UMKM | Jumlah | 2314 | 2314 | 3850 | 2323 | 5084 | 2333 | 5623 | 2342 | 5739 | 2351 | 5739 | 2351 |
| 13 | BPS | Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | Persen | 17,84 | 18,20 | NA | 18,56 | NA | 18,93 | | 19,31 | | 19,70 | | 19,70 |
| 14 | Set dako | Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi | Persen | - | - | - | - | - | 80,00 | | 80,00 | | 90,00 | 0,00 | 90 |
| 15 | DPM PTSP | Jumlah Investor | PMDN/ PMA | 305 | 320 | 348 | 336 | 386 | 342 | 366 | 352 | 377 | 362 | 459 | 362 |
| 16 | DPM PTSP | Jumlah nilai investasi | Rp (Milyar) | 3387 | 3556,4 | 3656 | 3734,2 | 3838,8 | 3,399 | 3.403 | 3,409 | 3.422 | 3,419 | 7,368 | 3 |
| 17 | Dis Pora | Kontribusi pariwisata terhadap PDRB | Persen | 1,09 | 1,12 | NA | 1,16 | NA | 1,19 | 10,90 | 1,23 | 20,50 | 1,26 | NA | 1,26 |
| 18 | Dis Pora | Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe | Persen | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 19 | Dinsos | Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial | Persen | 31,49 | 31,49 | 80,00 | 32,12 | 80,00 | 32,76 | 87,61 | 33,42 | 96,10 | 34,09 | 99,13 | 34,09 |
| 20 | Dinsos | Persentase Panti Sosial yang menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan Sosial | Persen | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 99,96 | 100,00 |
| 21 | DKPP | Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 98,88 | 12 |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 22 | DKPP | Konstribusi Sub Sektor Peternakan Terhadap PDRB | Persen | 0,73 | 0,73 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,77 | 0,75 | 0,00 | 0,75 |
| 23 | DKPP | Persentase Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB | Persen | 6,48 | 6,54 | 6,61 | 6,61 | 6,68 | 6,75 | 6,75 | 6,81 | 6,81 | 6,88 | 91,80 | 6,88 |
| 24 | DKPP | Konstribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB | Persen | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 8,27 | 8,33 | 8,40 | 8,30 | 8,47 | 8,70 | 8,53 | 0,00 | 8,53 |
| 25 | DKPP | Persentase peningkatan produksi perikanan | Persen | - | - | - | - | - | 85 | 6,61 | 90 | 6,95 | 95 | - | 95 |
| 26 | DKPP | Persentase peningkatan produksi peternakan | Persen | - | - | - | - | - | 95 | 95 | 98 | 98 | 100 | - | 100 |
| 27 | DKPP | Persentase peningkatan produksi pertanian | Persen | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 100 |
| 29 | BPS | Indeks Pembangunan Manusia | IPM | 75,78 | 76,31 | 76,62 | 76,84 | 77,30 | 77,38 | 77,31 | 77,92 | 77,57 | 78,47 | 78,84 | 78,47 |
| | PK | Rerata nilai ujian nasional: | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | PK | -Rerata nilai ujian nasional SD/MI | Nilai | 87 | 90 | NA | 90 | NA | 95 | NA | 95 | NA | 95 | NA | 95 |
| 31 | PK | -Rerata nilai ujian nasional SMP/MTs | Nilai | 56 | 75 | NA | 80 | NA | 95 | NA | 95 | NA | 95 | NA | 95 |
| | PK | Angka Partisipasi Kasar: | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | PK | - APK SD/MI | Angka | 106 | 106 | 95 | 106 | 94 | 100 | 108,53 | 100 | 108,62 | 100 | 108 | 100 |
| 34 | PK | - APK SMP/MTs | Angka | 101 | 101 | 112 | 101 | 97 | 100 | 101,66 | 100 | 100,05 | 100 | 97 | 100 |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| | PK | Angka Partisipasi Murni: | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | PK | - APM SD/MI | Angka | 94 | 96 | 82 | 99 | 84 | 90 | 99,60 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 |
| 36 | PK | - APM SMP/MTs | Angka | 79 | 81 | 81 | 84 | 66 | 90 | 93,60 | 90 | 93 | 90 | 97 | 90 |
| 37 | PK | Angka Harapan lama Sekolah | Angka | 15 | 15 | NA | 15 | NA | 16 | 15,53 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 38 | PK | Rasio ketergantungan | Rasio (Per 10.000) | 51,90 | 51,38 | NA | 50,87 | NA | 50,61 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | Dis Pora | Jumlah prestasi olahraga | Jumlah | 18 | 28 | 20 | 30 | NA | 5 | 4 | 7 | 6 | 7 | 20 | 7 |
| 40 | DSI PD | Jumlah dayah dengan Tipe "A" | Dayah | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 14 | 4 | 15 | 4 | 16 | 6 | 16 |
| 41 | Dinkes | Angka Usia Harapan Hidup | Tahun | 71,05 | 71,16 | NA | 71,28 | NA | 71,39 | 71,6 | 71,51 | 71,64 | 71,62 | 71,87 | 71,62 |
| 42 | Dinkes | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi | Jumlah | 2 | 2 | 3,00 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 43 | Dinkes | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 50 | 60 | 6,33 | 70 | 9,2 | 80 | 32,95 | 90 | 51 | 100 | 83 | 100,00 |
| 44 | Dinkes | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | NA | 100 | NA | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dinkes | Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Pneumonia | Persen | 5,78 | 6,18 | 2,5 | 6,62 | 14,6 | 15,62 | 0,05 | 16,72 | 2,40 | 17,89 | 9,20 | 17,89 |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 46 | Dinkes (Revisi) | Persentase orang terduga TBC mendapat pelayanan TBC sesuai standar | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 35,2 | 100 | 68,5 | 100 |
| 47 | Dinkes (Revisi) | persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 45,2 | 100 | 84 | 100 |
| 48 | Dinkes (Revisi) | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 49 | Dinkes | Cakupan anak usia 0-11 bulan mendapat imunisasi dasar lengkap (IDL) | Persen | 91,50 | 81,5 | 92,00 | 56,2 | 92,50 | 93,00 | 59,40 | 100,00 | 48,50 | 100,00 | 51,50 | 100,00 |
| 50 | Dinkes (Revisi) | Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | persen | 81,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65,8 | 100 | 86,6 | 100 |
| 51 | Dinkes (Revisi) | Persentase Penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | persen | 57,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92,9 | 100 | 89,3 | 100 |
| 52 | Dinkes (Revisi) | Persentase Orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93,4 | 100 | 90,3 | 100 |
| 53 | Dinkes (Revisi) | Persentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | persen | 95,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 96 | 100 | 92,5 | 100 |
| 54 | Dinkes (Revisi) | Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan | persen | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97,5 | 100 | 91,5 | 100 |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 55 | Dinkes (Revisi) | Persentase Bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | persen | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 99 | 100 | 97,7 | 100 |
| 56 | Dinkes (Revisi) | Cakupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar | persen | 88,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 78,4 | 100 | 74,7 | 100 |
| 57 | Dinkes (Revisi) | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | persen | 87,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 97,4 | 100 | 97 | 100 |
| 58 | Dinkes (Revisi) | Persentase Orang Usia 15-59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar | persen | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 82,8 | 100 | 80 | 100 |
| 59 | Dinkes (Revisi) | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar | persen | 85,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 94,5 | 100 | 94,8 | 100 |
| 60 | Dinkes (Revisi) | Persentase Balita Gizi Buruk | persen | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0241 | 0,04 | 0,024108 | 0,16 | 0 |
| 61 | Dinkes (Revisi) | Prevelensi Balita Gizi Kurang | persen | 0,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,1813 | 1,00 | 1,181292 | 4,04 | 1 |
| 62 | Dinkes (Revisi) | Cakupan Desa Siaga | jumlah | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 63 | Setda | Kategori Reformasi Birokrasi | Kategori | CC | CC | NA | C | NA | CC | C | B | sedang dlm proses | B | C | B |
| 64 | Setda | Kategori hasil evaluasi SAKIP | Kategori | CC | CC | CC | C | CC | CC | CC | B | sedang dlm proses | B | CC | B |
| 65 | Setda | Kategori hasil evaluasi LPPD | Kategori | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | Tinggi | sedang dlm proses | Sangat Tinggi | Dalam proses penilaian | Sangat Tinggi |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 66 | Setda | Cakupan kebijakan ekonomi yang terintegrasi | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 85 | 85 | 90 | NA | 90 |
| 67 | BPKD | Opini BPK | Opini | WDP | WDP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | Dalam proses pemeriksaan BPK RI | WTP | Dalam proses penilaian | WTP |
| 68 | Inspektorat | Persentase Kasus pengaduan yang ditindaklanjuti | persen | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 88 | 100 | 88 |
| 69 | Inspektorat | Persentase tindak lanjut hasil pengawasan | persen | - | - | - | - | - | 100 | 71 | 100 | 74 | 100 | 87,08 | 100 |
| 70 | Inspektorat | Level Kapabilitas APIP | level | - | - | - | - | - | 3 level | Level 3 | 3 level | Level 3 | 4 dengan catatan level | 3 Level | 4 dengan catatan level |
| 71 | Inspektorat | Tingkat marturitas SPIP Pemko Lhokseumawe | level | - | - | - | - | - | 3 level | Level 2 | 3 level | Belum Ada Hasil | 3 level | 2 Level | 3 level |
| 72 | Kominfo | Cakupan pengelolaan Website pemerintah | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 73 | Kominfo | Cakupan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik | Persen | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 4.0 | 60 | 4.0 | 60 | 4.0 | 10 | 4.0 |
| 74 | Kesbang Pol | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | Persen | 40 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 75 | 0 | 75 |
| 75 | PUPR | Pencapaian target nasional 100-0-100 | Persen | 3.89-81.3-71.4 | 4.01-76.4-73.5 | NA | 4.13-16.8-75-7 | NA | 4.25-13.8-75.7 | 4.00-13.79-70.40 | 4.38-11.3-80.4 | 4.89-11,3-74,3 | 4.51-9.3-82.8 | 18,44-12,27-78,01 | 4.51-9.3-82.8 |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 76 | PUPR | Persentase akses jaringan air minum layak/ air bersih | Persen | 3,89 | 4,96 | NA | 80,00 | 17,03 | 4,25 | 4,00 | 4,38 | 4,89 | 4,51 | 18,44 | 4,51 |
| 77 | PUPR | Penanganan Kawasan Kumuh | Luas Wilayah (Ha) | 81,30 | 76,42 | 2,44 | 16,81 | 0,79 | 13,79 | 13,79 | 11,30 | 11,30 | 9,27 | 12,27 | 9,27 |
| 78 | PUPR | Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5) | Persen | 6,98 | 7,68 | 3,64 | 8,45 | 3,67 | 4,25 | 3,65 | 4,38 | 3,65 | 4,51 | 22,53 | 4,51 |
| 79 | PUPR | Kategori capaian kinerja infrastruktur publik | Absolut | Cukup | Cukup | Cukup | Baik | Cukup | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik | Baik |
| 80 | PUPR | Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap | Persen | 58,13 | 62,20 | NA | 66,55 | NA | 71,21 | 65,05 | 76,20 | 70,58 | 81,53 | 77,48 | 81,53 |
| 81 | Dishub | Ketersediaan fasilitas keselamatan lalulintas | Persen | 36,80 | 40,11 | 0,14 | 43,72 | 1,00 | 47,66 | 46,95 | 51,95 | 46,72 | 51,95 | 50,00 | 51,95 |
| 82 | DLH | Rasio RTH per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | Rasio | 0,69 | 0,75 | NA | 0,82 | NA | 0,98 | 0,00 | 1,15 | 0,00 | 1,36 | 1,39 | 1,36 |
| 83 | DLH | Luasan RTH Publik 20% | Ha | 25,40 | 27,94 | 25,40 | 30,73 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,,47 | 0,00 |
| 84 | DLH | Persentase sampah yang tertangani | Persen | 71,40 | 74,97 | 81,53 | 78,72 | 81,00 | 82,65 | 79,45 | 86,80 | 81.86 | 92,00 | 81,13 | 92,00 |
| 85 | PP WH | Angka Kriminalitas yang tertangani (per 10.000) | Rasio (Per 10.000) | 58,76 | 52,88 | NA | 47,60 | NA | 42,84 | 0,00 | 38,55 | 0,00 | 34,70 | NA | 34,70 |
| 86 | PP WH | Kasus Pelanggaran Syariat Islam | Kasus | 81 | 69 | 58 | 59 | 37 | 63 | 65 | 60 | 46 | 65 | 35 | 65 |
| 87 | Kesbang Pol | Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu | Persen | 40 | - | 100 | 70 | 73 | - | 0 | - | 0 | - | - | - |

| NO | OPD | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIO | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* |
| 88 | PP WH | Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas | Persen | - | 50 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 89 | BPBD | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | Persen | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 45,00 | 24,85 | 47,00 | 28,71 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 90 | BPBD | Cakupan penanggulangan kebakaran | Persen | - | - | - | - | - | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

2.2.3.4. Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang terdapat dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2022 sebanyak 187 indikator yang harus di capai. Dari 187 indikator kinerja daerah yang telah di tetapkan, sebesar 55 persen dapat dicapai dan sebesar 44 persen tidak dapat dicapai dan 1 persen masih dalam proses penilaian. Untuk mengetahui secara terperinci mengenai capaian Indikator Kinerja Daerah pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut

**Tabel 2.177**
**Penetapan Target Indikator Kinerja Daerah dan Capaian**
**Tahun 2022**

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| | | | **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | | | | | | | | | |
| 1, | | | **Layanan Urusan Wajib Dasar** | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1, | | | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | |
| 1,1, | PK | 1, | Persentase PAUD dengan Akreditasi B | Persen | 10 | 20 | NA | 35 | NA | 50 | 50 | 70 | 70 | 90 | 72 | 90 |
| 1,1, | PK | 2, | Persentase Angka Partisipasi Kasar PAUD | Persen | 30 | 40 | NA | 50 | NA | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 39,96 | 90 |
| 1,1, | PK | 3, | Persentase Angka partisipasi Murni SD/ MI | Persen | 93,66 | 96,5 | 81,81 | 99,36 | 84,47 | 90,00 | 99,60 | 90,00 | 100,00 | 90,00 | 99,84 | 90 |
| 1,1, | PK | 4, | Persentase Angka partisipasi Murni SMP / MTs | Persen | 79,05 | 81,4 | 81,24 | 83,86 | 66,31 | 90,00 | 93,60 | 90,00 | 93,40 | 90,00 | 96,69 | 90 |
| 1,1, | PK | 5, | Persentase Guru yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pendidik | Persen | 10 | 30 | NA | 40 | NA | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 75 | 70 |
| 1,1, | PK | 6, | Persentase Pengawas Sekolah yeng telah memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah | Persen | 10 | 85 | NA | 85 | NA | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | 95 | 90 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 1,1, | PK | 7, | Persentase guru yang telah memiliki sertifikasi Guru | Persen | 20 | 10 | NA | 15 | NA | 30 | 20 | 40 | 40 | 70 | 45 | 70 |
| 1,1, | PK | 8, | Persentase Kompetensi Tenaga Kependidikan | Persen | 30 | 40 | NA | 50 | NA | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| 1,1, | PK | 9, | Persentase Guru Berijazah S1/D4 | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | 100 |
| 1,1, | PK | 10, | Cakupan Pengendalian Perizinan Pendidikan | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | | 85 | | 85 | 98 | 85 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,2, | | | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | |
| 2, | Dinkes | 1, | Cakupan pelayanan obat dan perbekalan kesehatan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2, | Dinkes | 2, | Persentase kesediaan obat, vaksin dan alat kesehatan di puskesmas | Persen | 100 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2, | Dinkes | 3, | Jumlah Puskesmas yang terakreditasi | Jumlah | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2, | Dinkes | 4, | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin | Persen | 12,13 | 100 | 11,12 | 100 | 9,38 | 100 | 14,2 | 100 | 35,7 | 100 | 33,46 | 100 |
| 2, | Dinkes | 5, | Persentase Kecamatan/ desa sehat | Persen | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2, | Dinkes | 6, | Persentase pasar sehat | Persen | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2, | Dinkes | 7, | Jumlah Kecamatan yang melaksanakan minimal 5 tema kampanye Gerakan Masyarakat ( GERMAS ) Hidup Sehat | Jumlah | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 2, | Dinkes | 8, | Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2, | Dinkes | 9, | Cakupan balita gizi buruk dan gizi kurang mendapatkan PMT | Persen | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 85 | 100 | 90 | 10 | 95 | 100 | 95 |
| 2, | Dinkes | 10, | Persentase desa yang melaksanakan STBM | Persen | 20 | 20 | 4,4 | 20 | 26,5 | 94 | 0 | 100 | 96 | 20 | 100 | 20 |
| 2, | Dinkes | 11, | Persentase Desa ODF | Persen | 20 | 20 | 1,5 | 20 | 7,4 | 9 | 18 | 15 | 18 | 20 | 32 | 20 |
| 2, | Dinkes | 12, | Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melakukan pengolahan limbah medis | Persen | 50 | 50 | 75 | 50 | 75 | 80 | 50 | 85 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| 2, | Dinkes | 13, | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | Persen | 50 | 60 | 6,33 | 70 | 9,2 | 80 | 32,95 | 90 | 51 | 100 | 83 | 100 |
| 2, | Dinkes | 14, | Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2, | Dinkes | 15, | Cakupan Penderita diare yang ditangani | Persen | 20 | 30 | 34,5 | 40 | 46,3 | 60 | 33,1 | 80 | 23,7 | 100 | 28,74 | 100 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2, | Dinkes | 16, | Jumlah SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya | Persen | 80 | 100 | 36,2 | 100 | 12,9 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2, | Dinkes | 17, | optimalisasi sarana dan prasarana kesehatan | Persen | 50 | 80 | 70 | 80 | 75 | 80 | 80 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 |
| 2, | Dinkes | 18, | Cakupan playanan kesehatan anak berkebutuhan khusus | Persen | 50 | 80 | 1 | 80 | 0,5 | 80 | 40,9 | 80 | 60 | 80 | 1,12 | 80 |
| 2, | Dinkes | 19, | Cakupan pelayanan anak balita | Persen | 88 | 80 | 97,9 | 100 | 97,6 | 100 | 87,23 | 100 | 78 | 100 | 74,77 | 100 |
| 2, | Dinkes | 20, | Cakupan Desa dengan posyandu lansia | Persen | 0 | 80 | 100 | 85 | 100 | 90 | 100 | 95 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2, | Dinkes | 21, | Cakupan Desa dengan kegiatan aktifitas fisik lansia | Persen | 0 | 80 | 100 | 85 | 100 | 90 | 75 | 95 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| 2, | Dinkes | 22, | Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup | Persen | 1,8 | 0 | 119 | 0 | 142 | 0 | 161 | 0 | 344 | 0 | 78 | 0 |
| 2, | Dinkes | 23, | Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup | Persen | 5 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0,9 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
| 2, | Dinkes | 24, | Cakupan pelayanan Informasi kesehatan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 2, | Dinkes | 25, | Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 1,3, | | | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | |
| 1,3, | PUPR | 1, | Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap | Persen | 58,13 | 62,20 | NA | 66,55 | NA | 71,21 | 65,05 | 76,20 | 65,05 | 81,53 | 74,38 | 81,53 |
| 1,3, | PUPR | 2, | Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk | Persen | 2,11 | 2,54 | 0,54 | 3,04 | 1,37 | 3,65 | 1,99 | 4,38 | 2,16 | 5,26 | 2,16 | 5,26 |
| 1,3, | PUPR | 3, | Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) | Persen | 8,89 | 10,67 | 70,74 | 12,80 | 73,92 | 14,52 | 3,65 | 15,60 | 3,65 | 17,53 | 22,54 | 17,53 |
| 1,3, | PUPR | 4, | Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | Persen | 53,15 | 58,46 | 70,74 | 64,31 | 73,92 | 70,74 | 65,05 | 77,81 | 79,21 | 85,59 | 79,41 | 85,59 |
| 1,3, | PUPR | 5, | Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor | Persen | 41,27 | 51,27 | 71,27 | 61,27 | 81,27 | 71,27 | 65,05 | 81,27 | 65,05 | 91,27 | 83,53 | 91,27 |
| 1,3, | PUPR | 6, | Persentase jalan Kota dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam) | Persen | 58,14 | 63,95 | 26,23 | 70,35 | 67,48 | 77,38 | 65,05 | 85,12 | 65,05 | 93,64 | 67,89 | 93,64 |
| 1,3, | PUPR | 7, | Persentase akses Air Minum/ air bersih | Persen | 4,82 | 4,96 | 65,29 | 5,11 | 17,03 | 5,27 | 4,00 | 5,42 | 5,78 | 5,59 | 18,44 | 5,59 |
| 1,3, | PUPR | 8, | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 66,00 | 70,62 | 65,29 | 75,56 | 65,29 | 80,85 | 70,40 | 86,51 | 74,30 | 95,57 | 78,01 | 95,57 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 1,3, | PUPR | 9, | Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | Persen | 44,64 | 40,18 | 32,54 | 36,16 | 29,29 | 32,54 | 35,58 | 29,29 | 29,29 | 26,36 | 23,72 | 26,36 |
| 1,3, | PUPR | 10, | Cakupan dokumen perencanaan tataruang | Dokumen | - | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 1,3, | PUPR | 11, | Ruang publik yang berubah peruntukannya | Persen | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,00 | 0,09 |
| 1,3, | PUPR | 12, | Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan | Ha | 25,40 | 27,90 | 33,80 | 30,70 | 37,20 | 33,80 | 30,30 | 37,20 | 32,40 | 37,80 | 20,16 | 37,80 |
| 1,3, | PUPR | 13, | Ketaatan terhadap RTRW | Persen | 3,28 | 3,28 | 3,30 | 3,29 | 3,40 | 3,30 | 3,28 | 3,40 | 3,35 | 3,35 | 3,88 | 3,35 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4, | | | Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman | | | | | | | | | | | | | |
| 1,4, | PUPR | 1, | Rasio rumah layak huni | Rasio | 0,22 | 0,24 | 0,17 | 0,26 | 0,17 | 0,29 | 0,17 | 0,32 | 0,45 | 0,35 | 0,19 | 0,35 |
| 1,4, | PUPR | 2, | Rasio permukiman layak huni | Rasio | 0,87 | 0,89 | 0,93 | 0,81 | 0,96 | 0,93 | 0,81 | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0,94 | 0,98 |
| 1,4, | PUPR | 3, | Persentase kawasan pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan roda empat | Persen | 1,89 | 1,51 | 0,97 | 1,21 | 0,77 | 0,97 | 0,95 | 0,77 | 0,82 | 0,56 | 0,87 | 0,56 |
| 1,4, | PUPR | 4, | Cakupan Penanganan Kawasan Kumuh | Ha | 81,30 | 76,42 | 2,44 | 16,81 | 0,79 | 13,79 | 13,79 | 11,30 | 11,30 | 9,27 | 12,27 | 9,27 |
| 1,4, | PUPR | 5, | Persentase lingkungan pemukiman kumuh | Persen | 2,82 | 1,97 | 0,67 | 1,38 | 0,53 | 0,97 | 0,95 | 0,68 | 0,73 | 0,47 | 0,37 | 0,47 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 1,4, | PUPR | 6, | Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk | Persen | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | 0,15 | 0,10 | 0,15 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5, | | | Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5, | PP dan WH | 1, | Tingkat penyelesaian pelanggaran KamTranTibMas | Persen | - | 50 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 1,5, | PP dan WH | 2, | Persentase penegakan Perda/Qanun | Persen | 25 | 50 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 |
| 1,5, | PP dan WH | 3, | Cakupan petugas perlindungan Masyarakat | Persen | 27,88 | 27,88 | 27,88 | 27,88 | 27,88 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 | 50,91 |
| 1,5, | PP dan WH | 4, | Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat | Rasio | - | - | - | - | - | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5, | | | Penanggulangan Bencana | | | | | | | | | | | | | |
| 1,5, | BPBD | 1, | Cakupan pelayanan bencana kebakaran | Persen | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 18,39 | 45,00 | 24,85 | 47,00 | 28,71 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |
| 1,5, | BPBD | 2, | Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) | Persen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 40,00 | 4,08 | 45,00 | 16,00 | 50,00 | 100,00 | 50,00 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 1,5, | BPBD | 3, | Wilayah Terkena Bencana Alam Kota Lhokseumawe | Persen | - | - | - | - | - | 46,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1,6, | | | Sosial | | | | | | | | | | | | | |
| 1,6, | Dinsos | 1, | Persentase Panti Asuhan/ Jompo yang menerima bantuan | Persen | 69 | 70 | 100 | 80 | 100 | 80 | 67,96 | 80 | 0 | 80 | - | 80 |
| 1,6, | Dinsos | 2, | Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17,86 | 100 | 0 | 100 | - | 100 |
| 1,6, | Dinsos | 3, | Persentase Korban Bencana yang menerima Bantuan Sosial selama masa Tanggap Darurat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91,12 | 100 | 0 | 100 | - | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2, | | | **Layanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4, | | | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | |
| 2,4, | Pertanahan | 1, | Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat | M2 (Juta) | - | - | - | - | 17,37 | 17,383 | 17,45 | 17,42 | 17,52 | 17,452 | 351,399 | 17,45 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,4, | Per Tana han | 2, | Luas Lahan Bersertifikat Milik Pemerintah Kota Lhokseumawe | M2 (Ribu) | - | - | - | - | 255,169 | 256,96 | 158,16 | 257,5 | 218,85 | 258 | 355,063 | 258,0 |
| 2,4, | Per Tana han | 3, | Jumlah Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan | Jumlah | - | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 2,4, | Per Tana han | 4, | Jumlah Kasus Sengketa dan Konflik Pertanahan yang Terdaftar | Jumlah | - | - | - | - | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| 2,4, | Per Tana han | 5, | Luas Hak Guna Bangunan (HGB) | M2 (Ribu) | - | - | - | - | 316,598 | 316,915 | 318,5 | 317,232 | 325,7 | 317,55 | 73,624 | 317,5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,7, | | | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | |
| 2,7, | DPM PTSP | 1, | Persentase peningkatan kualitas tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi | Persen | - | 20 | 50 | 30 | 60 | 50 | 90 | 60 | 90 | 70 | - | 70 |
| 2,7, | DPM PTSP | 2, | Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan | Persen | - | 20 | 50 | 30 | 60 | 49 | 60 | 49 | 29 | 70 | - | 70 |
| 2,7, | DPM PTSP | 3, | Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja Pertahun | Rasio | 1 | 0 | 20 | 0 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| 2,7, | DPM PTSP | 4, | Persentase perusahaan yang menerapkan keselamatan dan perlindungan pekerja | Persen | 80 | 80 | 85 | 80 | 85 | 77,9 | 0 | 78 | 0 | 78 | - | 78 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,8, | | | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | |
| 2,8, | DP3A P2KB | 1, | Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67,5 | 100 | 82,5 | 100 | 82,5 |
| 2,8, | DP3A P2KB | 2, | Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah | Persen | 75,30 | 75,30 | 24,00 | 75,30 | 25,00 | 75,30 | 99,60 | 80,00 | 20,00 | 80,00 | 65,00 | 80,00 |
| 2,8, | DP3A P2KB | 3, | Proporsi Kursi yang diduduki Perempuan di DPR | Persen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 100 | 8 | 100 | 8 | 16 | 8 |
| 2,8, | DP3A P2KB | 4, | Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta | Persen | 24,70 | 24,70 | 14,00 | 24,95 | 14,00 | 14,14 | 99,00 | 30,00 | 280,00 | 30,00 | 38,00 | 30,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,9, | | | Pangan | | | | | | | | | | | | | |
| 2,9, | DKPP P | 1, | Cakupan penyediaan sarana dan prasarana pertanian/perkebunan | Persen | 0 | 30 | 30 | 40 | 40 | 50 | 40 | 60 | 50 | 80 | 99,45 | 80 |
| 2,9, | DKPP P | 2, | Persentase Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 516 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 89,86 | 100 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,11, | | | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | |
| 2,11, | DLH | 1, | Cakupan penyediaan sarana dan prasarana persampahan | Persen | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 88,07 | 100 |
| 2,11, | DLH | 2, | Cakupan limbah B3 yang dikelola | Persen | 0 | 100 | NA | 100 | NA | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 66,67 | 100 |
| 2,11, | DLH | 3, | Jumlah ketaatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH | Jumlah | 0 | 1 | 75 | 2 | 123 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 189 | 1 |
| 2,11, | DLH | 4, | Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan | Ha | 25,40 | 27,90 | 33,80 | 30,70 | 37,20 | 33,80 | 33,80 | 37,50 | 37,50 | 40,90 | 0,47 | 40,90 |
| 2,11, | DLH | 5, | Jumlah sarana dan prasarana yang memenuhi standar minimum | Jumlah | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2,11, | DLH | 6, | Cakupan pelaksanaan keindahan dan kerasian kota | Kecamatan | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| 2,11, | DLH | 7, | Penanganan Sampah | Persen | 71,40 | 73,54 | 81,53 | 75,75 | 81,00 | 81,00 | 79,45 | 882,00 | 81,86 | 83,00 | 81,13 | 83,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,12, | | | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | |
| 2,12, | Capil | 1, | Rasio Penduduk ber KTP | Persen | 858 | 883 | 878 | 883 | 956 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 97,96 | 0,97 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,12, | Capil | 2, | Cakupan Penerbitan KTP | Persen | 79 | 80 | 88 | 85 | 96 | 88 | 96 | 90 | 97 | 93 | 98,26 | 93 |
| 2,12, | Capil | 3, | Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran | Persen | 85 | 88 | 93 | 89 | 95 | 90 | 83 | 90 | 99 | 90 | 98,79 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,13, | | | Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | | | | | | | | | | | | | |
| 2,13, | DPMG | 1, | Cakupan pembinaan pengelolaan keuangan gampong | Gampong | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2,13, | DPMG | 2, | Jumlah Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2,13, | DPMG | 3, | Jumlah Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK | Persen | 11,78 | 12,00 | 5,80 | 12,30 | 5,80 | 2,00 | 0,18 | 3,00 | 0,10 | 4,00 | 27,94 | 4,00 |
| 2,13, | DPMG | 4, | Cakupan pembinaan Badan Usaha Milik Gampong | Unit | 47 | - | - | - | - | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 71 |
| 2,13, | DPMG | 5, | Cakupan pembinaan lembaga kemasyarakatan gampong | Gampong | 68 | - | - | - | - | 68 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 68 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,14, | | | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,14, | DP3A P2KB | 1, | Rata-Rata Jumlah anak Per Keluarga | Rata-rata | 1,64 | 2,00 | 1,40 | 2,00 | 2,16 | 2,00 | 142,00 | 2,00 | 166,00 | 2,00 | 1,24 | 2,00 |
| 2,14, | DP3A P2KB | 2, | Laju pertumbuhan penduduk | Persen | 2,00 | 2,00 | 1,94 | 2,00 | 2,16 | 2,00 | 103,00 | 2,00 | 204,00 | 2,00 | 1,42 | 2,00 |
| 2,14, | DP3A P2KB | 3, | Cakupan pelayanan reproduksi remaja | Persen | 0 | 70 | 150 | 70 | 52 | 70 | 0 | 70 | 285 | 70 | 21 | 70 |
| 2,14, | DP3A P2KB | 4, | Rasio Akseptor KB | Persen | 81,29 | 81,45 | 81,54 | 81,62 | 52,00 | 81,78 | 94,2 | 81,80 | 99,27 | 82 | 49,7 | 82,00 |
| 2,14, | DP3A P2KB | 5, | Cakupan Peserta KB aktif | Persen | 81,29 | 81,45 | 81,54 | 81,62 | 52,00 | 81,78 | 94,4 | 81,80 | 99,27 | 82 | 94,7 | 82,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,15, | | | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | |
| 2,15, | Dish ub | 1, | Cakupan prasarana dan fasilitas perhubungan pada terminal darat | Persen | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,15, | Dish ub | 2, | Cakupan pemeliharaan fasilitas LLAJ | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2,15, | Dish ub | 3, | Rasio Izin Trayek | Persen | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 5,00 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,007 | 0,010 | 0,000 | 0,01 |
| 2,15, | Dish ub | 4, | Jumlah Uji Kir angkutan umum | Unit | 1 | 1 | 2234 | 1 | 2230 | 2579 | 2.006 | 2589 | 3.078 | 2.594 | - | 2594 |
| 2,15, | Dish ub | 5, | Cakupan sarana dan prasarana perhubungan publik | Sarana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,15, | Dishub | 6, | Cakupan pemasangan rambu-rambu | Unit | 36,80 | 40,11 | 0,00 | 43,72 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 50,00 | - | 70 | - | 70,00 |
| 2,15, | Dishub | 7, | Cakupan penyediaan sarana penunjang transportasi | Persen | 60 | 60 | 0 | 60 | 12 | - | - | - | - | - | | - |
| 2,15, | Dishub | 8, | Jumlah arus penumpang angkutan umum | Unit | - | - | - | - | - | 129,58 | 13,21 | 130,23 | 64,33 | 132,26 | 78,63 | 132,26 |
| 2,15, | Dishub | 9, | Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | Unit | - | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 3,00 |
| 2,15, | Dishub | 10, | Persentase layanan angkutan darat | % | - | - | - | - | - | 26,05 | - | 26,04 | 46,72 | 26,03 | 87,00 | 26,03 |
| 2,15, | Dishub | 11, | Persentase kepemilikan KIR angkutan umum | % | - | - | - | - | - | 98,00 | 52,00 | 98,00 | 96,00 | 99,00 | 1,14 | 99,00 |
| 2,15, | Dishub | 12, | Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan | % | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,009 | 0,008 | 0,009 |
| 2,15, | Dishub | 13, | Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | ton | - | - | - | - | - | 7,63 | 5,81 | 7,82 | 6,55 | 8,21 | 18,31 | 8,21 |
| 2,15, | Dishub | 14, | Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | orang | - | - | - | - | - | 352,89 | 53,64 | 378,23 | 64,34 | 821,69 | 78,63 | 821,69 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,16, | | | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,16, | Kominfo | 1, | Cakupan kerjasama informasi dengan mass media | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 70% | 20% | 70% | 25% | 70% | 25% | 0,7 |
| 2,16, | Kominfo | 2, | Cakupan surat elektronik resmi Pemerintah Kota Lhokseumawe bagi OPD dan ASN | Persen | 30% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 10% | 40% | 10% | 40% | 10% | 0,4 |
| 2,16, | Kominfo | 3, | Cakupan jumlah Kelompok Informasi Gampong (KIG) | Jumlah | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 |
| 2,16, | Kominfo | 4, | Persentase Nilai keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kota Lhokseumawe | Persen | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 60% | 50% | 60% | 50% | 60% | 50% | 0,6 |
| 2,16, | Kominfo | 5, | Cakupan Jaringan Intranet dilingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe | Persen | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 20% | 40% | 20% | 40% | 5% | 40% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,17, | | | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | |
| 2,17, | Diskop | 1, | Cakupan Penyediaan Dokumen DED | Persen | NA | 100% | 100% | 100% | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1 |
| 2,17, | Diskop | 2, | Cakupan pembinaan terhadap UKM | Persen | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 |
| 2,17, | Diskop | 3, | Persentase Koperasi Aktif | Persen | 38,91 | 39,26 | 42,56 | 39,54 | 47,69 | 39,81 | 39,81 | 40,09 | 40,09 | 40,37 | 51,67 | 40,37 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,18, | | | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,18, | DPM PTSP | 1, | Cakupan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jenis Media | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | - | 5 | - | 5 | 3 | 5 |
| 2,18, | DPM PTSP | 2, | Lamanya proses perizinan | Hari | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,19, | | | Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | | | | | | | | |
| 2,19, | Dispo rapar | 1, | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 83 | 83 | 75 | 83 | 75 | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | 75 | 75 |
| 2,19, | Dispo rapar | 2, | Cakupan Pembinaan Olahraga | Persen | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 13 | 12 | 14 | 13 | 15 | 12 | 15 |
| 2,19, | Dispo rapar | 3, | Cakupan Pelatih yang Bersertifikasi | Persen | 21 | 21 | 15 | 24 | 17 | 17 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 2,19, | Dispo rapar | 4, | Jumlah cabang olahraga berprestasi tingkat PORA | Jumlah Cabor | 18 | 28 | 11 | 30 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 12 | 27 | 12 |
| 2,19, | Dispo rapar | 5, | Persentase pembina pramuka yang dibina | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 100 | - | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,20, | | | Statistik | | | | | | | | | | | | | |
| 2,20, | Bapp eda | 1, | Ketersediaan Buku Daerah Dalam Angka dan PDRB | Ada / Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,22, | | | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | |
| 2,22, | PK | 1, | Cakupan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 24 | 24 | NA | 30 | NA | - | 35 | - | 40 | - | 40 | - |
| 2,22, | PK | 2, | Jumlah Penyelenggaran Festival Seni dan Budaya | Event | - | 3 | NA | 3 | NA | - | 3 | - | 3 | - | 5 | - |
| 2,22, | PK | 3, | Pembinaan kelompok seni dan budaya yang aktif | Jumlah | 2 | 2 | NA | 2 | NA | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - |
| 2,22, | PK | 4, | Cakupan Pengembangan Kebudayaan | Persen | - | - | - | - | - | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 2,22, | PK | 5, | Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisonal | Persen | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 90 | 100 |
| 2,22, | PK | 6, | Cakupan Pembinaan Sejarah | Persen | - | - | - | - | - | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 2,22, | PK | 7, | Cakupan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Persen | - | - | - | - | - | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 45,45 | 50 | 45,45 | 50 |
| 2,22, | PK | 8, | Cakupan Pengelolaan Museum | Persen | - | - | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,23, | | | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | |
| 2,23, | ARP US | 1, | Jumlah Pengunjung Perpustakaan Daerah | Jumlah | 3.159 | 3.159 | 4.774 | 3.184 | 5.719 | 3.225 | 2.962 | 3.245 | 2.037 | 3,275 | 1932 | 3.275 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 2,23, | ARP US | 2, | Cakupan pelayanan perpustakaan keliling | Bulan | 12 | 12 | 176 | 12 | 195 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 72 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,24, | | | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | |
| 2,24, | ARP US | 1, | Jumlah SKPD Yang Mengelola Arsip Secara Baku | Persen | 15 | 15 | 25 | 15 | 35 | 100% | 15% | 100% | 30% | 100% | 100% | 1 |
| 2,24, | ARP US | 2, | Cakupan Pembinaan SDM Pengelola Kearsipan | Kegiatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3, | | | **Layanan Urusan Pilihan** | | | | | | | | | | | | | |
| 3,26, | | | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | |
| 3,26, | Dispo rapar | 1, | Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB | Persen | 1,09 | 1,12 | NA | 1,16 | NA | 1,19 | 1,19 | 1,23 | 1,23 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 3,26, | Dispo rapar | 2, | Pengembangan objek wisata Kota Lhokseumawe | Persen | 24,00 | 24,00 | 20,00 | 24,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,27, | | | Pertanian | | | | | | | | | | | | | |
| 3,27, | DKPP P | 1, | Cakupan pembinaan Kelompok Tani | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 |
| 3,27, | DKPP P | 2, | Produktivitas Komoditas Pangan | Ton | 15.873 | 15.873 | 15.873 | 15.905 | 15.905 | 15.937 | 15.937 | 15.969 | 16,097 | 16,001 | - | 16.001 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 3,27, | DKPPP | 3, | Konstribusi Kelompok Tani terhadap PDRB | Persen | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 98,50 | 0,003 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,30, | | | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | |
| 3,30, | Diskop | 1, | Cakupan perlindungan dan pengamanan konsumen dan Tera Ulang | Bulan | 12 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 3,30, | Diskop | 2, | Cakupan pengembangan pasar rakyat | Kecamatan | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,31, | | | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | |
| 3,31, | Diskop | 1, | Konstribusi Sektor Industri terhadap PDRB | Persen | 17,84 | 18,20 | 7,27 | 18,56 | 7,32 | 18,93 | 18,76 | 19,31 | 18,65 | 19,70 | 20,00 | 19,7 |
| 3,31, | Diskop | 2, | Cakupan promosi perdagangan dan keikutsertaan dalam event pameran dagang | Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3,25, | | | Kelautan dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | |
| 3,25, | DKPPP | 1, | Cakupan pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 98,88 | 12 |
| 3,25, | DKPPP | 2, | Cakupan pembinaan dan penegakan hukum kelautan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 3,25, | DKPPP | 3, | Cakupan pembinaan pelaku usaha perikanan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | 12 |
| 3,25, | DKPPP | 4, | Jumlah Produksi Perikanan (Budidaya) | Ton | 1.704 | 1.704 | 1,704 | 1.721 | 1,721 | 2 | 1,738 | 2 | 2 | 2 | 92,29 | 2 |
| 3,25, | DKPPP | 5, | Cakupan sarana dan prasarana perikanan yang dikembangkan | Unit | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5,0 | 7 | 7 | 7 | - | 7 |
| 3,25, | DKPPP | 6, | Cakupan Bina Kelompok Nelayan | Jumlah | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | 30 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4, | | | Layanan Pendukung Urusan | | | | | | | | | | | | | |
| 4,1, | Setdako | | Sekretariat Daerah | | | | | | | | | | | | | |
| 7, | Setdako | 1, | Cakupan Penyediaan Dokumen Lakip, LKPJ, LPPD, IKK, dan EKPOD | Dokumen | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7, | Setdako | 2, | Cakupan pelaksanaan koordinasi pimpinan daerah | Kali | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
| 7, | Setdako | 3, | Cakupan produk hukum daerah yang difasilitasi | Perda/Qanun | 12 | 12 | 12 | 4 | 14 | 3 | 3 | 12 | 3 | 12 | 5 | |
| | | | | Perwal | 12 | 12 | 12 | 40 | 45 | 40 | | 45 | | 45 | 76 | |
| 7, | Setdako | 4, | Cakupan penyelesaaian tapal batas daerah | Titik wilayah | 12 | 12 | 12 | 10 | | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 41 | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 7, | Setdako | 5, | Cakupan pelaksanaan Pengajian Gampong diwilayah Kota Lhokseumawe | Gampong | 12 | 12 | 12 | 68 | 68 | 68 | 58 | 68 | 69 | 68 | 68 | |
| 7, | Setdako | 6, | Cakupan pelaksanaan Hari Besar Nasional dan Daerah | Hari Besar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 4,1, | Setdako | 7, | Cakupan pelaksanaan kegiatan keistimewaan Aceh | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 4,1, | Setdako | 8, | Cakupan Pemelihataan Taman Makam Pahlawan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | | 0 | NA | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4,2, | | | Sekretariat Dewan | | | | | | | | | | | | | |
| 4,2, | Sekwan | 1, | Persentase Qanun yang ditetapkan | Persen | 100 | 100 | 53,33 | 100 | 47,06 | 100 | 33 | 0 | | - | - | - |
| 4,2, | Sekwan | 2, | Persentase Anggota DPRK yang menjalankan fungsi | Persen | 100 | 100 | 83,33 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | | - | - | - |
| 4,2, | Sekwan | 3, | Persentase Qanun yang ditetapkan dan Anggota DPRK yang menjalankan fungsi | Persen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 100 | 41,18 | 100,00 | 40,00 | 100 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5, | | | **Layanan Penunjang Urusan** | | | | | | | | | | | | | |
| 5,1, | | | Perencanaan Pembangunan | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 5,1, | Bappeda | 1, | Keterbukaan informasi publik melalui website | Ada/Tidak | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5,1, | Bappeda | 2, | Cakupan koordinasi Kerjasama perencanaan pembangunan | Dokumen | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 0 | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 3, | Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis cepat tumbuh | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 4, | Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pengembangan kota menengah dan besar | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 5, | Cakupan fasilitasi dan peningkatan kapasitas perencana | Kegiatan | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 6, | Cakupan penyediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah | Dokumen | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 7, | Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan ekonomi | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 8, | Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan sosial budaya | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | - | - | - |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 5,1, | Bappeda | 9, | Cakupan koordinasi perencanaan pembangunan prasarana wilayah dan sumber daya alam | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 10, | Cakupan penyediaan laporan koordinaasi pendanaan pembangunan daerah | Laporan | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | | - | - | - |
| 5,1, | Bappeda | 11, | Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan | Bulan | - | - | - | - | - | - | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5,1, | Bappeda | 12, | Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Bulan | - | - | - | - | - | - | | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 5,1, | Bappeda | 13, | Persentase Tahapan proses perencanaan tepat waktu | Persen | - | - | - | - | - | - | | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 5,1, | Bappeda | 14, | Persentase Konsistensi Dokumen Perencanaan dalam proses perencanaan pembangunan | Persen | - | - | - | - | - | - | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5,1, | Bappeda | 15, | Cakupan Penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) | Persen | - | - | - | - | - | - | | 60 | 30 | 90 | 90 | 90 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,2, | | | Keuangan | | | | | | | | | | | | | |
| 5,2, | BPKD | 1, | Cakupan pelaksanaan pengeluaran belanja daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | - | 12 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 5,2, | BPKD | 2, | Jumlah penerimaan PAD | Milyar | 66,50 | 66,50 | 65,60 | 68,50 | 61,50 | 49,20 | 45,84 | 49,20 | 0,00 | 49,20 | - | 49,20 |
| | | | Besaran penerimaan PAD | Milyar | - | - | - | - | - | 49,20 | | 49,20 | 44,60 | 49,20 | 49,12 | 49,20 |
| 5,2, | BPKD | 3, | Cakupan penyediaan pedoman dan Dokumen APBK | Dokumen | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 |
| 5,2, | BPKD | 4, | Cakupan laporan pengelolaan Aset daerah | Dokumen | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 0 | 10 | - | 10 |
| | | | Cakupan laporan pengelolaan barang milik daerah | Laporan | - | - | - | - | - | 8 | | 64 | | 64 | 64,00 | 64 |
| 5,2, | BPKD | 1, | Cakupan pengelolaan sistem informasi keuangaan daerah | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | - | 12 |
| 5,2, | BPKD | 2, | Opini BPK Laporan Keuangan Daerah | Opini | - | - | - | - | - | WTP | WTP | WTP | Dalam proses pemeriksaan BPK RI | WTP | Dalam proses penilaian | WTP |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5,3, | | | Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | |
| 5,3, | BKPSDM | 1, | Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Struktural | Persen | 2,86 | 2,86 | 18.29 | 3,15 | 16.29 | 3,46 | 11,31 | 3,81 | 8,77 | 4,19 | 4,19 | 4,19 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 5,3, | BKPSDM | 2, | Cakupan pelayanan administrasi kepegawaian | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6, | | | Pengawasan | | | | | | | | | | | | | |
| 6,1, | Inspektorat | 1, | Cakupan tindak lanjut dan monitoring temuan APIP | LHP | 65 | 140 | 205 | 140 | 348 | 145 | 220 | - | 250,00 | - | - | - |
| 6,1, | Inspektorat | 2, | Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penjenjangan tenaga pemeriksa (auditor) | ASN | 37 | 50 | 20 | 50 | 36 | 50 | 15 | - | 10,00 | - | - | - |
| 6,1, | Inspektorat | 3, | Jumlah laporan pengawasan ASN | Jumlah | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 1000 | - | 1.000 | - | - | - |
| 6,1, | Inspektorat | 4, | Persentase Tindak Lanjut Evaluasi Implementasi SAKIP OPD | Persen | 75 | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6,1, | Inspektorat | 5, | Persentase OPD dan Gampong yang dilakukan Pengawasan | Persen | 80 | - | - | - | - | 100 | 75 | 100 | 75 | 100 | 100 | 100 |
| 6,1, | Inspektorat | 6, | Persentase Auditor yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Persen | 60 | - | - | - | - | 65 | 50 | 60 | 50 | 65 | 29 | 65 |
| 6,1, | Inspektorat | 7, | Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi | Kategori | - | - | - | - | - | C | C | B | | BB | C | BB |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 6,1, | Inspektorat | 8, | Indeks Integritas | Indeks | - | - | - | - | - | 7,50 | | 7,60 | | 8,00 | - | 8,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7, | | | Kecamatan | | | | | | | | | | | | | |
| 7,1, | Kantor Camat | 1, | Cakupan koordinasi pemerintahan Kecamatan, Mukim, Gampong | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 7,1, | Kantor Camat | 2, | Cakupan pelaksanaan kegiatan Syiar Islam | Kegiatan | 2 | 2 | 7 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7,1, | Kantor Camat | 3, | Cakupan pelaksanaan *Saweu Gampong* | Gampong | 68 | 68 | 51 | 68 | 52 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 7,1, | Kantor Camat | 4, | Cakupan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan | Kegiatan | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1, | | | Kesatuan Bangsa dan Politik | | | | | | | | | | | | | |
| 8,1, | Kesbang Pol | 1, | Cakupan Pengendalian keamanan dan kenyamanan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 8,1, | Kesbang Pol | 2, | Cakupan Pelaksanaan Koordinasi wawasan kebangsaan | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 8,1, | Kesbang Pol | 3, | Cakupan dukungan kelancaran Pemilu | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | - | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9, | | | Kekhususan | | | | | | | | | | | | | |
| 9,7, | DSIPD | 1, | Cakupan pelayanan kehidupan beragama | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 9,7, | DSIPD | 2, | Persentase penurunan pelanggaran syariat | Kasus | 81 | 69 | 69 | 59 | 59 | 0 | | 0 | | - | - | 0 |
| 9,7, | DSIPD | 3, | Jumlah Hafiz/Hafizah | Jumlah | 20 | 15 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 15 | 10 | 15 |
| 9,7, | DSIPD | 4, | Cakupan sosialisasi hukum Islam | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | | - | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,8, | MPU | 1, | Cakupan Pembinaan, Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Ulama | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | Persentase peningkatan kapasitas sumber daya ulama | | | | | | | | | | | | | |

| KODE | OPD | NO | URAIAN | SATUAN | KONDISI AWAL RPJM (2017) | TARGET DAN CAPAIAN | | | | | | | | | | KONDISI AKHIR RPJM (2022) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | |
| | | | | | | Target | Capaian | Target | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | Revisi RPJM | Capaian | |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* |
| 9,9, | Baitu l Mal | 1, | Cakupan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan anggota Baitul Mal | Kegiatan | 1 | - | - | 1 | - | - | | - | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,10, | MAA | 1, | Jumlah Sarana dan Prasarana Kesenian dan Budaya yang dikelola | Jumlah | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9,1 1, | MPD | 1, | Cakupan pelaksanaan Pengawasan/Monitoring dan Evaluasi Pendidikan | Bulan | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | | - | - | 0 |
| 9,1 1, | MPD | 2, | Persentase sekolah yang menerapkan Assesment Kompetesi Minimum (AKM) | Persentase | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | 80 | 100 | 80 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Sumber : RPJMK 2017-2022 dan OPD*

### 2.2.4. Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang belum diatasi, peluang yang belum dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Identifikasi permasalahan pembangunan didasarkan pada: (1) evaluasi capaian kinerja RPJMK Tahun 2017-2022, (2) evaluasi capaian kinerja bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, atau (3) Isu-isu terkini yang mempengaruhi jalannya pembangunan

Isu dan masalah mendesak yang dihadapi oleh Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Prioritas Pertumbuhan Ekonomi dengan sasaran daerah pertama meningkatnya jumlah dan nilai investasi dengan permasalahan sebagai berikut:
   - Tingginya tingkat pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe sangat terlihat jika dibandingkan dengan data pengangguran di tingkat Nasional maupun Provinsi. Angka pengangguran Kota Lhokseumawe masih berada di atas dua digit dari Tahun 2018 hingga Tahun 2022 yaitu 12,52%, 11,06%, 11,99%, 11,16% dan 9.15%. Sementara itu angka pengangguran nasional dan provinsi pada Tahun 2018 hingga Tahun 2022 berada dikisaran 5% sampai dengan 7%.
   - Tingkat Inflasi Kota Lhokseumawe yang fluktuatif dari tahun 2008 yaitu sebesar 2.05, tahun 2022 sebesar 5.37. Sementara angka inflasi nasional 2018 sebesar 3.13 dan

5.51 pada tahun 2022, dan angka inflasi propinsi 1.84 pada tahun 2018 menjadi 5.89 pada tahun 2022.

Sasaran kedua yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat dengan permasalahan sebagai berikut:

- Masih terdapatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial yang belum tertangani
- Masih tingginya Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebesar 60.785 jiwa

Sasaran ketiga meningkatkan kesempatan kerja dengan permasalahan sebagai berikut

- Jumlah pengganggguran terbuka masih cukup tinggi;
- Belum semuanya perusahaan menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawanya;

Sasaran keempat meningkatkan daya saing daerah dengan permasalahan sebagai berikut:

- Produksi perikanan budidaya Kota Lhokseumawe masih berada dibawah target dan jumlah produksi tidak meningkat seiring target yang diharapkan terus meningkat. Jumlah produksi ikan budidaya tahun 2017 sebanyak 3.182.490 ton dari target 3.900.420 atau tercapai sebesar 81,59%. Pada tahun 2021, jumlah produksi sebesar 3.400.000 dari target 5.384.500 atau hanya 63.14% dari target yang ditetapkan. Kelautan dan perikanan seharusnya menjadi andalan Kota Lhokseumawe karena didukung oleh alam serta sarana yang cukup memadai.

2. Prioritas kesehatan dengan sasaran daerah pertama meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan permasalahan sebagai berikut:

   - Masih tinggginya angka kematian bayi (AKB) di Kota Lhokseumawe. Hal ini terlihat dari data Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe Tahun 2022, dimana pada Tahun

2018 terdapat angka kematian bayi (AKB) sebesar 3.33%. Pada Tahun 2019 terjadi peningkatan AKB menjadi 4.74%. Pada Tahun 2020, nilai AKB cukup baik di angka 0.51%, tetapi pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 4.51%. dan tahun 2022 meningkat menjadi 5.97%. Idealnya AKB adalah 0% atau pun ditekan serendah mungkin karena ini terkait dengan nyawa.

- Jumlah puskesmas di Kota Lhokseumawe belum mencukupi rasio 28.000 penduduk per puskesmas, karena Kota Lhokseumawe hanya memiliki 7 puskesmas di tahun 2022 atau setara untuk pelayanan 196.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2022, penduduk Kota Lhokseumawe sudah berjumlah 213.107 jiwa.
- Prevalensi Stunting Kota Lhokseumawe yang masih fluktuatif;
- Tingkat prevalensi Tubercolusis Kota Lhokseumawe masih tinggi pada tahun 2018 adalah 311.5% mengalami penurunan pada tahun 2019-2021 masing-masing 112.5%, 140.6%, 270% dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 390.9%.

3. Prioritas Pendidikan dengan sasaran pertama meningkatnya kualitas pendidikan

- Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Sekolah di tingkat SD mengalami trend penurunan yang ditunjukkan melalui grafik dibawah.

  Angka Partisipasi Sekolah pada tahun 2018 sampai dengan 2019 cukup baik mencapai 100%. Artinya anak-anak di Kota Lhokseumawe mengikuti program wajib belajar yang telah dicanangkan pemerintah. Namun pada tahun 2020 dan 2022, Angka Partisipasi Sekolah SD menurun di bawah 100%, artinya masih ada anak usia sekolah dasar yang tidak ikut mengenyam pendidikan dasar sesuai program wajin belajar.

- Menurunnya kondisi ruang kelas yang baik untuk tingkat SD dan SMP. Kondisi ruang kelas pada tahun 2019 untuk SD terdapat 587 ruang kelas dengan kondisi baik dan untuk SMP terdapat 365 ruang kelas. Pada rentang Tahun 2020-2022 untuk tingkat SD, jumlah kelas yang berada dalam kondisi baik fluktuatif yaitu 587 ruang kelas pada Tahun 2020. Namun pada tahun 2021 menurun menjadi 270 bahkan lebih rendah dari angka awal di tahun 2018 dimana ada 562 ruang kelas yang berada dalam kondisi baik Untuk tahun 2022 ruang kelas yang berada dalam kondisi baik mengalami kenaikan menjadi 406 . Untuk tingkat SMP, pada tahun 2020 dan 2021, jumlah ruang kelas yang baik menurun ke angka 194 ruang kelas pada tahun 2020 dan 173 ruang kelas pada tahun 2021 serta tahun 2022 mengalami kenaikan menjadi 188. Untuk tren kondisi ruang kelas tingkat SD dapat dikatakan landai, sedangkan untuk tingkat SMP, trend terlihat menurun walaupun tidak terlalu signifikan.
- Belum semuanya guru sekolah dasar dan menengah memiliki kualifikasi pendidikan minimal S1/D-IV

4. Prioritas Reformasi Birokrasi dengan sasaran pertama meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dengan permasalahan sebagai berikut:
   - Tingkat pejabat ASN yang harus mengikuti diklat struktural masih sangat rendah. Pada tahun 2018, presentasi pejabat yang mengikuti diklat struktural sebesar 18.7%. Tapi pada tahun 2021, hanya 8,7% pejabat struktural yang sudah mengikuti diklat struktural dan tahun 2022 tidak ada pejabat yang mengikuti diklat struktural.
   - Capaian Kapabilitas APIP Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2022 masih stagnan di level 3 sejak tahun 2018

- Capaian Tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe masih rendah dan stagnan di predikat CC
- Indeks Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2021 memperoleh nilai 44.03 atau (C/agak kurang) dari target nilai 50,1 atau (CC/cukup baik)

Sasaran kedua meningkatnya pelayanan publik dengan permasalahan sebagai berikut:

Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe masih rendah dibandingkan provinsi dan nasional. Pada tahun 2018, Indeks pemberdayaan gender Kota Lhokseumawe pada angka 51.06, sementara provinsi dan nasional berturut-turut pada angka 66,60 dan 72.10. Pada Tahun 2022 Indeks Pemberdayaan Gender Kota Lhokseumawe meningkat menjadi 58.45, namun masih lebih rendah dari angka provinsi dan nasional berturut-turut diangka 76.26 dan 76.32.

5. Prioritas Memperkuat pelaksanaan syariat Islam dan budaya dengan sasaran pertama yaitu menguatnya penegakan syariat islam dalam bermasyarakat dengan permasalahan sebagai berikut:

- belum optimalnya pengelolaan ZISWAF Kota Lhokseumawe

  Data rasio ZIS yang disalurkan dan ZIS yang terkumpul pada Tahun 2018-2022, menunjunkan belum optimalnya pengelolaan ZISWAF dimana masih terjadi rasio penyaluran dibawah angka 1 yang berarti, masih terdapat dana ZIS yang belum disalurkan pada tahun bekenaan. menurunnya akreditasi dayah di Kota Lhokseumawe.

- Sejumlah dayah di Kota Lhokseumawe mengalami penurunan nilai akreditasi pada Tahun 2021. Jika kita lihat secara umum, jumlah dayah yang memiliki tipe A, B, C atau D pada Tahun 2019 dan 2020 sebanyak 43 dayah. Namun pada Tahun 2021, jumlah dayah yang memiliki

tipe hanya tinggal 18 dayah. Terjadi penurunan yang sangat tajam lebih seratus 100%. Dan tahun 2022 meningkat menjadi 55 dayah.

- Masih tingginya pelanggaran syariat Islam di Kota Lhokseumawe.

Sasaran kedua meningkatnya pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya dengan permasalahan sebagai berikut:

- Jumlah pelanggaran qanun masih tinggi setiap tahunnya, pada Tahun 2018 tercatat hanya 165 pelanggaran, sedangkan pada Tahun 2022 sudah mencapai 141 pelanggaran.
- Jumlah penertiban pelanggaran ketentraman untuk menjaga ketertiban dan ketentraman Kota Lhokseumawe dari tahun 2018–2022 terus meningkat, dimana pada tahun 2018 tercatat 125 kasus dan pada tahun 2022 menjadi 759 kasus.

6. Prioritas Infrastruktur dengan sasaran pertama meningkatkan infrastruktur Kota Berkualitas dengan permasalahan sebagai berikut:

- Masih minimnya penegakkan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang
- Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar kawasan permukiman ditandai dengan masih tingginya persentase luas kawasan kumuh di Kota Lhokseumawe, dimana pada tahun 2018 terdapat kawasan kumuh seluas 11.05%, meningkat di tahun 2019 menjadi 61,29% dan menurun kembali pada Tahun 2022 menjadi 23,18%.
- Kota Lhokseumawe rentan mengalami banjir genangan yaitu air buangan ataupun air hujan yang tidak dapat mengalir ke badan air terdekat sehingga terperangkap di daerah cekungan ataupun daerah yang lebih rendah

dalam suatu kawasan. Berdasarkan data Persentase Tidak Terjadi Genangan > 2 kali Setahun Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022, masih terdapat luasan daerah yang tergenang pada Tahun 2018 sebesar 7.80 Ha yang terus menurun hingga Tahun 2022 pada luasan sebesar 4.52 Ha.

- Persentase rumah tinggal bersanitasi di Kota Lhokseumawe masih rendah dan mengalami kecenderungan menurun. Pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 sempat terus meningkat berturut-turut pada angka 68,23%, 73,04%, dan75,49%. Namun pada tahun 2022 kembali menurun menjadi 71.08 pada tahun 2022;
- Masih terbatasnya ruang terbuka hijau;

7. Prioritas Lingkungan Hidup dengan sasaran pertama meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan permasalahan sebagai berikut:
   - Masyarakat masih belum berprilaku 3 R dalam pengelolaan sampah dalam rumah tangga, sehingga upaya pengurangan sampah belum berjalan maksimal;
   - Fasilitas pengurangan sampah yang disediakan oleh pemerintah Kota Lhokseumawe masih sangat terbatas dan operasional belum berjalan secara optimal;
   - Peralatan modern pada armada pengangkutan sampah yang masih belum memadai;
   - Belum tersedianya data tentang Indeks Pengelolaan Sampah.

### 2.2.5 Isu Strategis Kota Lhokseumawe

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar,

mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe; dinamika internasional, nasional, provinsi, dan regional yang mempengaruhi pembangunan Kota Lhokseumawe; serta Isu-isu strategis yang juga termaktub pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi yaitu RPJP.

Adapun Isu-Isu Strategis Internasional yang turut mempengaruhi isu strageis daerah meliputi:

1. globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. sumber energi alternatif; dan
5. perubahan iklim global;
6. perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4. memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6. memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
7. mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. peningkatan Kualitas Demokrasi
2. peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
3. peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
4. peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
5. pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
6. peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
7. penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
8. peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
9. pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. optimalisasi Kemandirian Pangan
11. penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran
12. pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis
13. optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan.

Berdasarkan uraian atas isu-isu strategis di tingkat nasional dan internasional dan permasalahan pembangunan di atas, maka ditetapkan isu-isu strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi

Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui Reformasi Birokrasi terus digaungkan mulai dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah terkecil di tingkat gampong/desa. Kebijakan peningkatan kualitas birokrasi saat ini diarahkan pada dua agenda, yakni penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi birokrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadikan birokrasi menjadi lebih adaptif, cepat melayani, dan cepat dalam mengambil keputusan. Penyederhanaan birokrasi telah dimulai

dengan pemangkasan struktur organisasi pada pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya perlu diikuti dengan pemantapan digitalisasi sistem kerja untuk memangkas hierarki yang berbelit dan memakan waktu. Untuk itu perlu diperkuat dengan peningkatan kualitas kepemimpinan dan SDM aparatur.

Kota Lhokseumawe perlu terus meningkatkan kualitas reformasi birokrasinya karena sampai saat ini pencapaian reformasi birokrasi di Kota Lhokseumawe terbilang masih rendah. Indikator capaian tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Lhokseumawe masih rendah dan stagnan di predikat CC serta indeks reformasi birokrasi Kota Lhokseumawe pada tahun 2020 memperoleh nilai 44.03 atau (C/agak kurang) dari target nilai 50,1 atau (CC/cukup baik). Karena itu, masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan reformasi birokrasi di Indonesia.

2. Peningkatan Kualitas Demokrasi

Kota Lhokseumawe sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, akan menghadapi Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Kepala Daerah secara serentak pada tahun 2024. Oleh karena itu Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu menyiapkan pendanaan yang mencukupi dan fasilitas yang memadai. Di samping itu Kota Lhokseumawe perlu mendorong pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak yang adil, transparan dan bebas *money politic* dalam pelaksanaan pesta demokrasi tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah memastikan keterwakilan perempuan dalam pesta demorasi tersebut. Pada pilkada tahun 2019, proporsi kursi yang diduduki anggota dewan perempuan adalah 16% atau 4 kursi dari 25 kursi yang ada.

3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam

Peningkatan pelaksanaan syariat Islam melalui pelaksanaan nilai-nilai Dinul Islam menjadi isu strategis dimana perilaku kehidupan sehari-hari individu, keluarga, lingkungan dan masyarakat harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. Oleh

karena itu, implementasi Qanun tentang pelaksanaan Dinul Islam harus dilaksanakan secara optimal.

Kota Lhokseumawe perlu terus meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai dinul Islam khususnya dalam hal pengelolaan ZISWAF, peningkatan kualitas pendidikan dayah dan penegakan qanun syariat Islam di Kota Lhokseumawe. Penyaluran ZISWAF di Kota Lhokseumawe perlu dioptimalkan agar dana zakat yang terkumpul dapat tersampaikan untuk menyampaikan amanah muzakki dan juga sekaligus sebagai salah satu upaya pengurangan kemiskinan di Kota Lhokseumawe. Kualitas pendidikan dayah di Kota Lhokseumawe juga perlu terus ditingkatkan tidak hanya sekedar menambah jumlah dayah namun disertai dengan peningkatan akreditasi dayah. Masalah pelanggaran syariat Islam juga harus diterus ditertibkan agar tujuan penegakan syariat Islam di Kota Lhokseumawe dapat tercapai.

4. Peningkatan Kualitas SDM

Kualitas SDM di Kota Lhokseumawe perlu terus ditingkatkan walaupun IPM Kota Lhokseumawe memang masih berada di atas IPM Nasional dan Provinsi. Misalnya pada tahun 2022, IPM Kota Lhokseumawe berada di angka 78.04 sementara IPM Provinsi dan IPM Nasional berada di angka 72,8 dan 72,91. Namun Kota Lhokseumawe masih kalah dari Kota Banda Aceh yang memperoleh nilai IPM sebesar 86,28 pada Tahun 2022.

Angka partisipasi Sekolah di tingkat SD maupun SMP harus tetap dijaga dan ditingkatkan untuk memastikan program wajib belajar yang merupakan program nasional. Selain itu, kualitas SDM juga sangat ditentukan oleh infrastruktur yang baik. Data ruang sekolah yang berkondisi baik perlu terus ditingkatkan agar pendidikan juga dapat berkualitas. Selain SDM di pendidikan dasar, SDM aparatur di Kota Lhokseumawe juga perlu diperhatikan karena hal ini diharapkan juga turut mempengaruhi peningkatan kualitas birokrasi di Kota Lhokseumawe.

5. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Kesehatan masyarakat juga merupakan tolok ukur kualitas sumber daya manusia di Kota Lhokseumawe sehingga menjadi isu strategis dalam pembangunan Kota Lhokseumawe. Fokus dilakukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas di Kota Lhokseumawe belum mencukupi rasio 28.000 penduduk per puskesmas, karena Kota Lhokseumawe hanya memiliki 7 puskesmas di tahun 2022 atau setara untuk pelayanan 196.000 penduduk. Sedangkan pada tahun 2022, penduduk Kota Lhokseumawe sudah berjumlah 213.107 jiwa.

Selain itu, penanganan pada ibu melahirkan dan bayi yang baru lahir juga perlu ditingkatkan dikarenakan angka kematian bayi idealnya adalah 0% atau pun ditekan serendah mungkin karena ini terkait dengan nyawa. Penanganan stunting yang lebih baik juga perlu terus ditingkatkan karena angka stunting di Kota Lhokseumawe tergolong cukup tinggi. Bahkan di tahun 2020, angka stunting di Kota Lhokseumawe mencapai 35%.

6. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada isu pemeliharaan lingkungan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup. Pemeliharaan lingkungan dapat dilakukan dengan adanya dukungan serta partisipasi masyarakat. Pesatnya pembangunan, terutama yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam (pertambagan energi, mineral dan bebatuan) telah menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, seperti pada kegiatan tambang terbuka, baik yang dilakukan secara legal maupun illegal. Data kualitas lingkungan hidup di Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa Indeks kualitas Lingkungan Hidup pada Tahun 2020 sebesar 41.34 dengan predikat buruk dan Tahun 2021 meningkat menjadi 63.70 namun menurun kembali pada Tahun 2022 menjadi 62.54. Sedangkan Indeks Kualitas Udara Lhokseumawe sebesar 86.36 dengan predikat baik dan Tahun 2022 menjadi 91.20. Dan Indeks Kualitas Lahan

Lhokseumawe sebesar 29.06 dengan predikat waspada dan semakin menurun menjadi 22.48 pada Tahun 2022. Dari data tersebut, memang fokus peningkatan kualitas lingkungan hidup Kota Lhokseumawe sangat relevan untuk dilakukan.

Disamping itu juga penanganan sampah di Kota Lhokseumawe perlu terus ditingkatkan. Di Kota Lhokseumawe masih terdapat persentase sampah yang tidak tertangani di tahun 2022 sejumlah 18,87% dari total timbulan sampah yang ada. Untuk itu dibutuhkan penanganan yang lebih serius dengan manajemen limbah yang berkelanjutan (*sustainable waste management*).

7. Pertumbuhan Ekonomi

Beberapa poin yang menjadi isu strategis dalam lingkup Ekonomi, Industri dan Pariwisata di Kota Lhokseumawe meliputi:

- Kawasan Ekonomi Khusus.

  Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017. Dengan adanya KEK ini diharapkan dapat menampung tenaga kerja untuk wilayah Kota Lhokseumawe.

- Pengembangan Industri.

  Pengembangan industri di Kota Lhokseumawe difokuskan pada pengembangan industri jasa dan industri rumah tangga.

- Pengembangan Kawasan Pariwisata.

  Terdapat beberapa objek wisata yang menarik untuk dikembangkan meliputi: Pantai Ujong Blang, Pulau Semadu, Pantai Meraksa, Bukit Goa Jepang, dan Waduk Jeulikat serta kawasan sekitaran waterboom di Kecamatan Blang Mangat.

- Pusat Pelayanan Skala Regional.

  Berdasarkan letak geografis, Kota Lhokseumawe dapat dikembangkan sebagai pusat pelayanan perdagangan barang/ jasa, pendidikan, kesehatan dengan skala regional yang meliputi

Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.

- Peningkatan Investasi Sektor Riil dan Ekonomi Kreatif

Pelaksanaan pembangunan tidak bisa diharapkan pada andalan APBD saja, perlu adanya Investasi yang mampu menumbuhkan perekonomian dengan cepat. Investasi yang dapat dipromosikan dan dilakukan di Kota Lhokseumawe antara lain Investasi bidang Perikanan, Kelautan, Industri, Pariwisata, Perhotelan dan bidang-bidang lainnya.

Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe harus digenjot dengan peningkatan skala ekonomi dan penumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di berbasis kawasan dengan pendekatan terintegrasi hulu hilir. Ke depan, para pelaku ekonomi di Kota Lhokseumawe tidak boleh lagi menjual bahan mentah, akan tetapi harus diolah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Kota Lhokseumawe juga harus merubah orientasi pasar produknya dari pasar lokal ke ke pasar lintas daerah atau pasar internasional.

8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup

Peningkatan infrastruktur diharapkan dapat menurunkan kesenjangan antar kecamatan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan infrastruktur seperti perbaikan jalan, infrastruktur pemukiman, penyediaan akses air bersih dapat memberi manfaat nyata pada kualitas hidup masyarakat.

9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Dana Otonomi Khusus berkurang menjadi 1% dari DAU mulai Tahun 2023 dan akan menjadi nol pada Tahun 2027. Oleh karena itu perlu perjuangan untuk mendapatkan perpanjangan Dana Otonomi Khusus tersebut mengingat masih banyaknya pekerjaan rumah pembangunan Kota Lhokseumawe.

Di samping itu, efektivitas dari Dana Otsus juga perlu diperhatikan, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan KetigaAtas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pada pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai program pembangunan, terutama:

(1) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur,

(2) pemberdayaan ekonomi rakyat,

(3) pengentasan kemiskinan,

(4) pendanaan pendidikan,

(5) sosial,

(6) kesehatan,

(7) keistimewaan Aceh dan

(8) penguatan perdamaian.

Untuk mengatasi ketimpangan pendanaan menjelang berakhirnya Dana Otonomi Khusus Aceh, Pemerintah Kota Lhokseumawe perlu melakukan upaya untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan di Kota Lhokseumawe, diantaranya dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan belanja pembangunan Non Pemerintah seperti CSR lewat Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dan sumber-sumber pendanaan lainnya.

# BAB III
# KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN KOTA

Perkembangan ekonomi secara global masih dalam tren pemulihan pasca Pandemi Covid-19. Pentingnya upaya global yang terkoordinasi dengan baik untuk dapat terus mendorong pemulihan ekonomi, serta mendorong inklusivitas dalam pengembangan ekonomi dan sektor keuangan yang berwawasan lingkungan. Indonesia diperkirakan mampu melanjutkan pemulihan ekonomi, di tengah risiko strategi global yang dipacu oleh tekanan inflasi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara.

Gelombang perlemahan ekonomi dunia, ketidakpastian global, serta kecenderungan suku bunga yang naik, akan turut mempengaruhi berbagai indikator dan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Lembaga-lembaga internasional, seperti IMF, WB, ADB dan lembaga lainnya memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 pada rentang antara 4,7 persen hingga 5,1 persen. Proyeksi ini masih berada dalam kisaran outlook Pemerintah yakni 4,8 persen-5,3 persen.

Ketidakpastian ekonomi global yang belum stabil tentu berpengaruh terhadap perekonomian lokal. Prospek perekonomian Aceh pada tahun 2023 diperkirakan tumbuh 3,2 persen-3,7 persen (yoy) atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (4,21 persen, yoy). Kondisi tersebut diperkirakan oleh normalisasi ekspor luar negeri yang sudah tumbuh tinggi pada periode-periode sebelumnya. Laju inflasi diperikirakan berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 3 persen-1 persen, dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh bahan-bahan makanan.

Pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe pada tahun 2022 mencapai 4,01 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,84 persen. Geliat ekonomi di Lhokseumawe terus membaik. Dibutuhkan inovasi dalam mendorong investasi, pengembangan sektor-sektor unggulan di Kota Lhokseumawe. Pemerintah terus mendorong para pelaku usaha mikro, kecil dan

menengah (UMKM) agar semakin berkembang dan berdaya saing. Salah satu dukungan terhadap UMKM yaitu ajang *Ahad Festival* yang dilaksanakan setiap hari minggu.

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi daerah.

Sesuai dengan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 "*Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*", pembangunan nasional diarahkan pada 8 (delapan) arah kebijakan yang meliputi:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Eksterem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan;
3. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
4. Penguatan Daya Saing Usaha;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Pembangunan Ibu Kota Nusantara;
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Arah kebijakan pembangunan dilaksanakan untuk mencapai sasaran pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,3 persen - 5,7 persen;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5 persen - 7,5 persen;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 persen - 5,7 persen;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99-74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27 persen; serta indikator lainnya yaitu:
7. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107-110;
8. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105-108.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintaha Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan juga harus mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilum pengetahuan dan teknologi di dukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan infrastruktur, melalunjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyerdahanaan regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mengejar sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah, maka upaya untuk meningkatkan daya saing di semua sektor lapangan usaha perlu dilakukan. Bersamaan dengan agenda tersebut, pemulihan sosial juga akan terus diperkuat melalui peningkatan kualitas SDM dan tenaga kerja, serta transisi menuju pembangunan yang ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah akan menata kembali agenda transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas, dan pemulihan ekonomi sosial yang melibatkan peran serta semua lapisan masyarakat untuk menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Seiring dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional, arah kebijakan pembangunan ekonomi Aceh pada tahun 2024 mengacu pada RPA 2023-2023. Secara mendasar tema pembangunan Aceh tahun 2024 yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak dan PON 2024. Atas agenda pembangunan tersebut, prioritas pembangunan Aceh tahun 2024 yaitu: memperkuat ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif; meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing; memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan; penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh; dan mensukseskan Pemilu serentak dan PON 2024.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional dan pembangunan ekonomi Aceh, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 yaitu Peningkatan Kualitas SDM dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak serta Mengoptimalkan Pertumbuhan Ekonomi.

Melalui arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut telah ditetapkan indikator makro ekonomi baik secara nasional, Aceh, dan Kota Lhokseumawe sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 3.1**
**Target Makro Ekonomi Tahun 2024**

| No | Indikator | Nasional | Aceh | Kota Lhokseumawe |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5.3-5.7 | 4.34 | 4.11 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5.0-5.7 | 5.36 | 9.05 |
| 3. | IPM | 73.99-74.02 | 73.26 | 78.90 |
| 4. | Tingkat Kemiskinan (%) | 6.5-7.5 | 14.53 | 10.74 |

Sumber : RKP 2024, dan RKPA 2024

### 3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Aceh

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 melanjutkan kinerja yang positif dari triwulan sebelumnya. Perekonomian nasional tumbuh sebesar 5,01 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,73 persen (yoy).

Perekonomian Sumatera pada triwulan IV 2022 juga positif sebesar 4,98 persen (yoy). Namun berbeda dengan nasional, realisasi tersebut lebih tinggi dari periode sebelumnya yang tumbuh 4,73 persen (yoy). Berdasarkan wilayah regional Sumatera, semua wilayah mengalami pertumbuhan yang positif di atas 4,0 persen (yoy). Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 6,40 persen diikuti oleh Provinsi Aceh sebesar 5,60 persen dan Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,26 persen.

Jika dilihat secara spasial, Aceh tercatat memiliki pangsa sebesar 5,30 persen terhadap perekonomian Sumatera. Sumbangan tersebut tidak mengalami perubahan dibanding periode-periode sebelumnya. Dengan proporsi tersebut, Aceh masih menjadi provinsi dengan perekonomian ketiga terkecil di Sumatera setelah Bengkulu (2,18 persen) dan Kepulauan Bangka Belitung (2,23 persen). Sementara itu, Riau (23,21 persen), Sumatera Utara (22,73 persen), dan Sumatera Selatan (13,93 persen) masih menjadi provinsi dengan sumbangan ekonomi paling dominan di Sumatera dengan pangsa dari ketiga provinsi tersebut mencapai lebih dari 50 persen dari total ekonomi Sumatera.

Ekonomi Aceh triwulan IV tercatat tumbuh sebesar 5,60 persen (yoy), meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 2,25 persen (yoy). Ditinjau dari sisi permintaan, pertumbuhan perekonomian Aceh pada triwulan laporan utamanya didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah dan impor luar negeri. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ditopang oleh peningkatan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutangan, dan Perikanan, Lapangan Usaha Industri Pengolahan, serta Lapangan Usaha Perdagangan.

Pertumbuhan ekonomi Aceh secara tahunan pada 2022 adalah sebesar 4,21 persen (yoy) meningkat dibandingkan tahun lalu yang sebesar 2,79 persen (yoy). Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Aceh tahun 2022, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga memberikan sumber pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 1,62 persen. Sumber pertumbuhan tertinggi berikutnya adalah dari komponen ekspor luar negeri yaitu sebesar 0,92 persen, dan impor luar negeri sebesar 0,92 persen. Sementera itu, konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap bruto menunjukkan sumber pertumbuhan yang negatif, dengan masing-masing -0,60 persen dan -0,23 persen.

Dari sisi lapangan usaha, LU yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantaranya perdagangan besar 0,94 persen, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,92 persen, informasi dan komunikasi sebesar 046 persen, penyedia akomodasi makan dan minum sebesar 0,37 persen, pertambangan dan penggalian sebesar 0,33 persen, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,33 persen. Sebaliknya, beberapa lapangan usaha masih mengalami kontraksi dengan kontraksi tertinggi diantaranya konstruksi sebesar -0,24 persen, jasa keuangan sebesar -0,10 persen, dan administrasi pemerintahan -0,01 persen.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap bertahan di tengah perlambatan ekonomi global. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I 2023 tercatat sebesar 5,03 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,01 persen (yoy). Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada batas atas kisaran 4,5-5,3 persen didorong oleh perbaikan permintaan domestik dan tetap positifnya kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat didukung oleh seluruh komponen PDB. Ekspor tetap tumbuh tinggi sebesar 11,68 persen (yoy), ditopang oleh permintaan mitra dagang utama yang masih kuat. Konsumsi rumah tangga membaik dengan tumbuh sebesar

4,54 persen (yoy), seiring dengan naiknya mobilitas dan peningkatan daya beli serta penurunan inflasi. Konsumsi Pemerintah tumbuh positif sebesar 3,99 persen (yoy) terutama didorong oleh belanja barang dan belanja pegawai. Pertumbuhan investasi nonbangunan tetap baik sejalan dengan kinerja ekspor, meski pertumbuhan investasi secara keseluruhan masih tertahan pada 2,11 persen akibat investasi bangunan yang masih terbatas.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap kuat juga tercermin dari sisi Lapangan Usaha dan spasial. Secara Lapangan Usaha (LU), seluruh LU pada triwulan I 2023 mencatat pertumbuhan positif, terutama ditopang oleh Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Pertambangan dan Penggalian. LU Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, serta Jasa Lainnya mencatat pertumbuhan yang tinggi, didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kunungan wisatawan mancanegara, serta penyelenggaraan acara nasional dan internasional. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan I 2023 tetap terjaga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Pertumbuhan ekonomi tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan, diikuti Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, Sumatera dan Bali-Nusa Tenggara (Balinusra).

Selain itu, inflasi juga menjadi salah satu indikator yang terkendali dengan optimal yakni sebesar 4,33 persen dari bulan Maret 2023. Seiring dengan hal tersebut, sektor keuangan tetap berada pada level yang resilien dengan ketersediaan likuiditas dalam negeri yang mencukupi.

Berdasarkan data BPS, inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) Mei 2023 tercatat sebesar 0,09 persen (mtm), menurun dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 0,33 persen (mtm). Dengan perkembangan tersebut, inflasi IHK secara tahunan menjadi 4,00 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan inflasi bulan sebelumnya yang sebesar 4,33 persen (yoy). Perkembangan ini tidak terlepas dari respons kebijakan moneter Bank Indonesia dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan mitra strategis lainnya dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID)

melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah. Ke depan, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran 3,0–1 persen pada sisa tahun 2023.

### 3.1.2. Kondisi Perekonomian Kota Lhokseumawe

Perekonomian Kota Lhokseumawe hingga akhir tahun 2022 menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mencapai 4,01 persen, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 3,84 persen. Meskipun dihadapkan pada ketidakpastian dan tren perlambatan ekonomi global serta tekanan inflasi yang masih terus berlanjut, pengendalian inflasi nasional menjadi agenda yang krusial.

Pengendalian inflasi menjadi hal penting dalam upaya memberikan pondasi yang kuat pada perkembangan perekonomian. Pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga daya beli masyarakat guna menjaga momentum pemuliah ekonomi nasional. Anggaran pemerintah terus berperan meredam sebagian dampak inflasi akibat gejolak harga global serta fluktuasi harga akibat gangguan suplai. Selain itu pengendalian inflasi secara konsisten terus dilakukan melalui penguatan sinergi dengan Bank Indonesia di tingkat pusat dan daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Strategi-strategi terus ditempuh melalui kebijakan menjaga keterjangkauan harga dan ketersediaan pasokan, menjadi dan mengawasi kelancaran distribusi, serta melakukan komunikasi efektif untuk menekan ekspektasi inflasi.

Dari sisi aktivitas perekonomian Kota Lhokseumawe yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Dari tahun 2018, PDRB meningkat sebesar 1,81 triliun rupiah menjadi 10,26 triliun rupiah pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.1**
**PDRB ADHB Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**
**(triliun rupiah)**

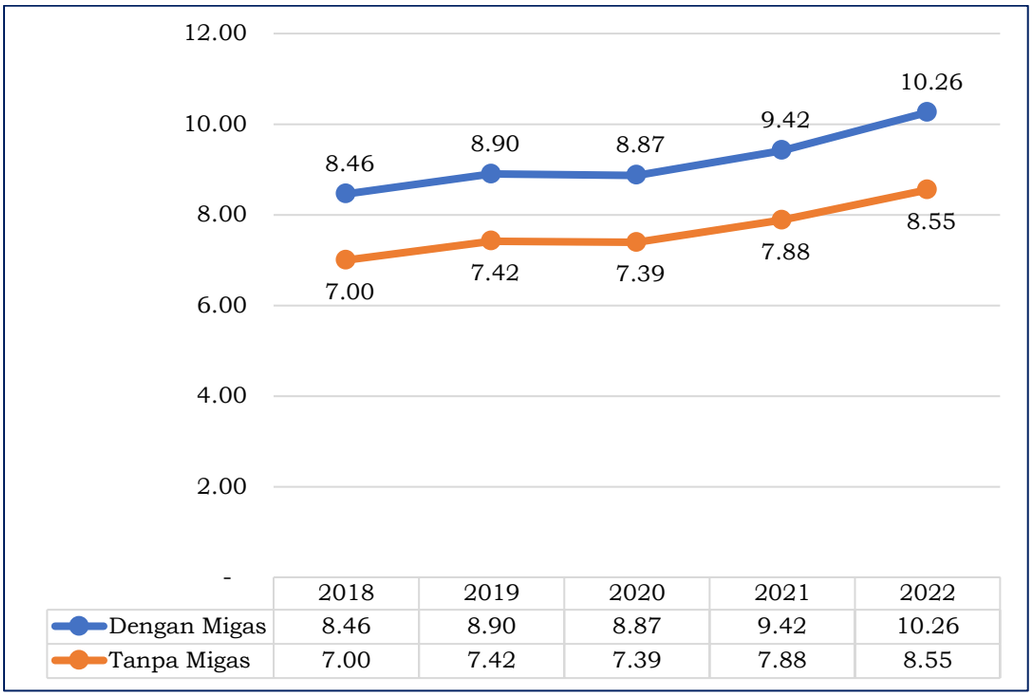


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe

Sejalan dengan PDRB memperhitungkan migas, PDRB ADHB tanpa memperhitungkan migas juga mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,42 triliun rupiah per tahun. PDRB ADHB tahun 2022 mencapai 8,55 triliun rupiah. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 0,67 triliun rupiah dari tahun 2021. Tahun sebelumnya, PDRB ADHB 2018-2021 mengalami peningkatan dari 7,00 menjadi 7,88 triliun rupiah.

Dalam perubahan nilai PDRB atas dasar harga berlaku masih terdapat pengaruh perubahan harga, sehingga untuk melihat perkembangan riil PDRB maka digunakan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) dengan tahun dasar 2010.

Nilai PDRB ADHK Lhokseumawe tahun 2022 mencapi 7,54 triliun rupiah, mengalami peningkatan sebesar 0,70 triliun rupiah dari tahun 2018. PDRB ADHK tanpa migas pada tahun 2022 juga menunjukkan peningkatan sebesar 0,64 triliun rupiah dari sebesar 5,69 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 6,33 triliun rupiah pada tahun 2022 sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

**Gambar 3.2**
**PDRB ADHK Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022**
**(triliun rupiah)**

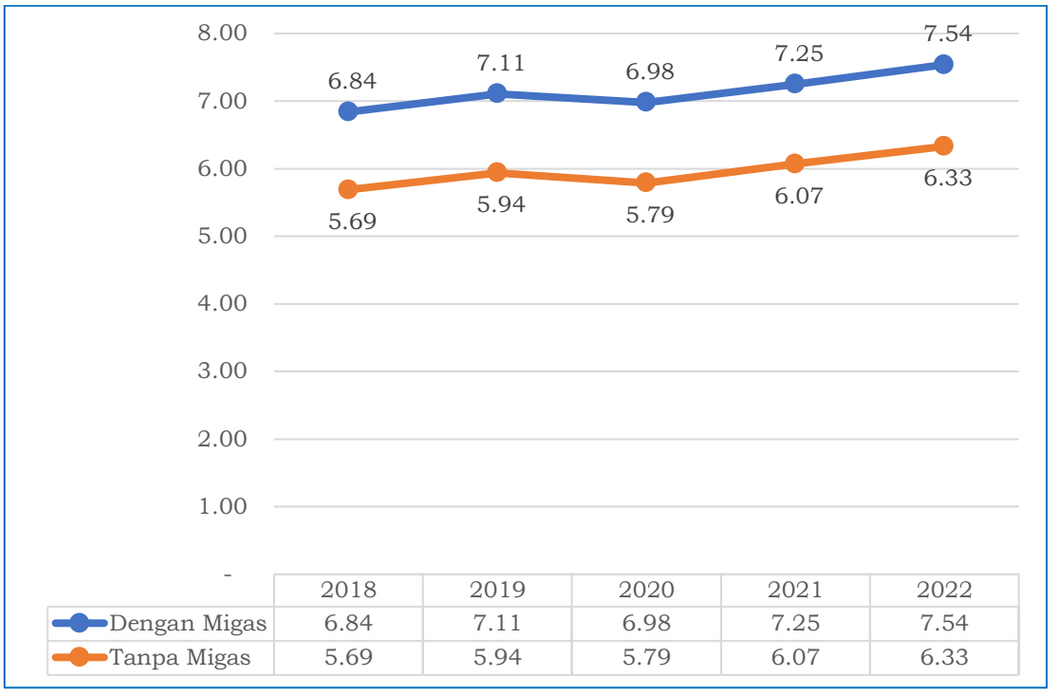


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe

Selama lima tahun terakhir (2018-2022) terlihat bahwa perubahan PDRB ADHB cenderung lebih besar daripada perubahan kenaikan PDRB ADHK. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan karena faktor harga lebih dominan daripada kenaikan karena faktor produktivitas.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Sejak tahun 2018, struktur ekonomi Kota Lhokseumawe didominasi oleh kategori Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Peranan kategori ini pada tahun 2017 sebesar 22,39 persen menjadi 21,28 persen pada Tahun 2022, sedikit mengalami penurunan nilai peranan sebesar 1,11 persen.

Kategori dengan peranan kedua terbesar hingga akhir tahun 2022 adalah industri pengolahan sebesar 19,45 persen. Kategori konstruksi menempati urutan ketiga pada Tahun 2022 dengan peranan sebesar 14,17 persen.

Kategori berikutnya yang cukup besar memberi kontribusi di tahun 2022 adalah kategori transportasi dan pergudangan serta kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dengan kontribusi kategori transportasi dan pergudangan sebesar 9,96 persen dan kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada angka 9,38 persen.

**Gambar 3.3**
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe dengan Migas Tahun 2022 (persen)**

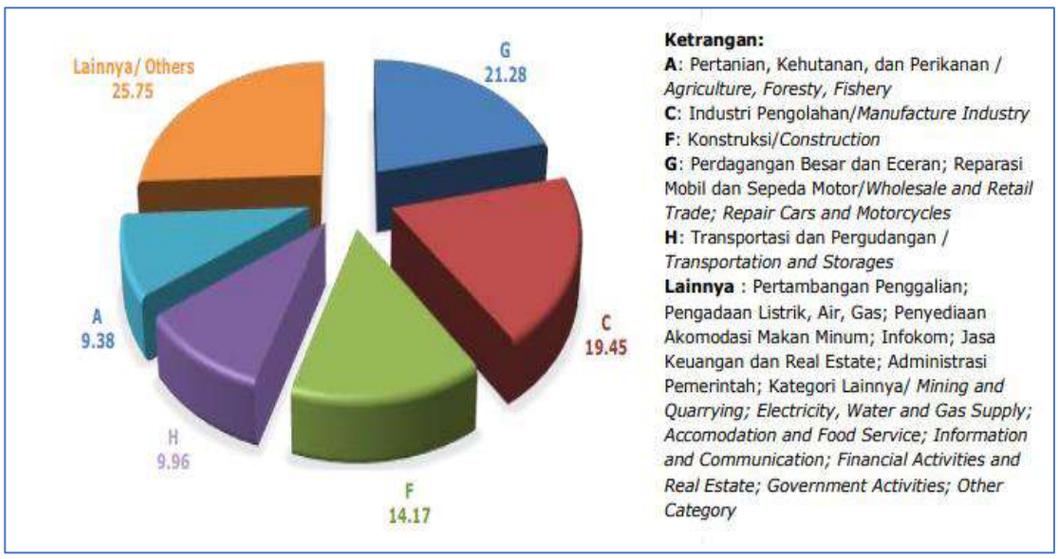


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe

Jika dipisahkan industri migas dari PDRB maka semakin terlihatlah bahwa kategori yang dominan di Lhokseumawe yaitu kategori perdagangan, disusul kategori konstruksi, dan pertanian.

Pada tahun 2022 dapat dilihat bahwa kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor memberi kontribusi mencapai 25,54 persen, lalu kategori konstruksi mencapai 17,01 persen, lalu kategori pertanian mencapai 11,95 persen. Kategori transportasi dan pergudangan bahkan muncul dengan

kontribusi sebesar 11,25 persen dan kategori real estate mencapai 5,56 persen.

**Gambar 3.4**
**Distribusi Persentase PDRB ADHB Lhokseumawe Tanpa Migas Tahun 2022 (persen)**

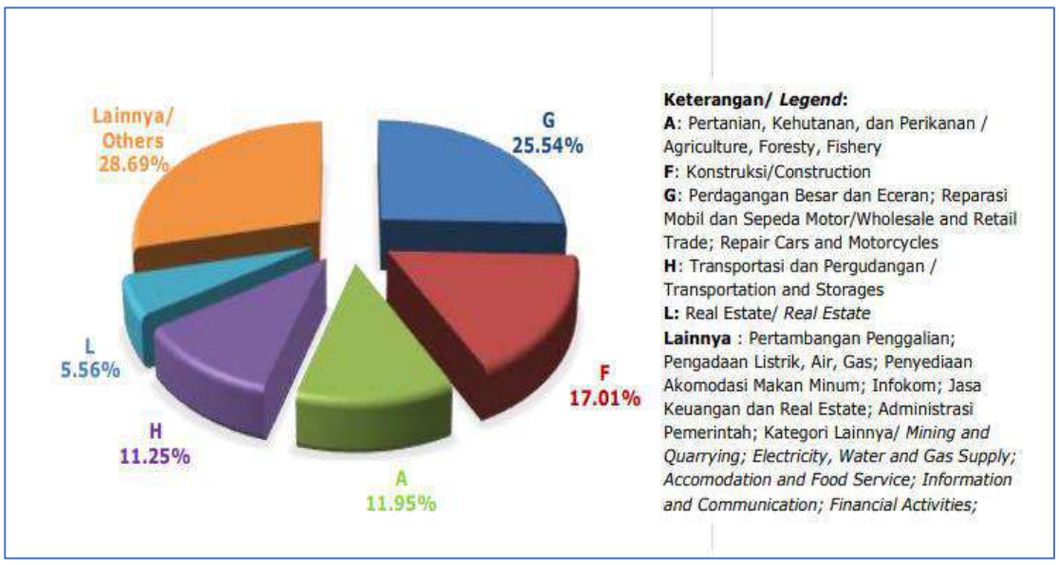


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe

## A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi selama kurun waktu setahun.

Selama lima tahun terakhir (2018-2022), pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe mengalami penurunan terdalam tahun 2020 disebabkan pandemi Covid-19. Dimana pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 3,98 persen namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 1,80 persen. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe kembali meningkat tahun 2021 sebesar 3,84 persen dan tahun 2022 sebesar 4,01 persen.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Lhokseumawe dengan migas selama lima tahun terakhir adalah sebesar 2,76 persen per tahun,

sedangkan rata-rata pertumbuhan tanpa migas sebesar 2,81 persen. Pada tahun 2022, perekonomian Lhokseumawe mengalami kenaikan sebesar 4,01 persen, sedangkan tanpa migas mengalami kenaikan sebesar 4,31 persen.

**Gambar 3.5**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe**
**Tahun 2018-2022 (persen)**

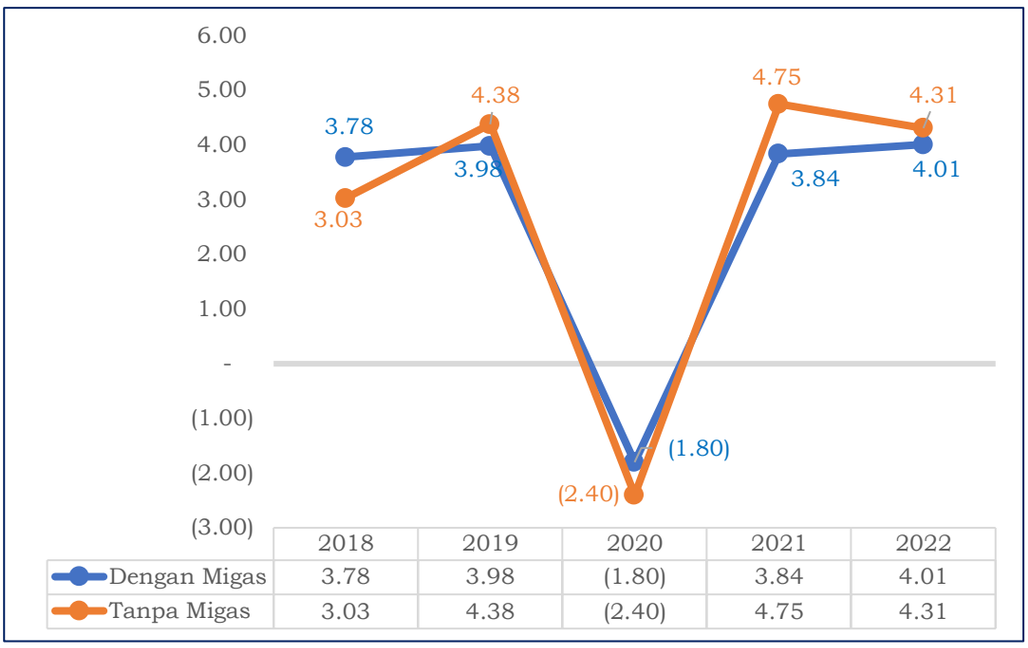


| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dengan Migas | 3.78 | 3.98 | (1.80) | 3.84 | 4.01 |
| Tanpa Migas | 3.03 | 4.38 | (2.40) | 4.75 | 4.31 |

Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe

**Gambar 3.6**
**Laju Pertumbuhan Ekonomi Lhokseumawe**
**Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (persen)**

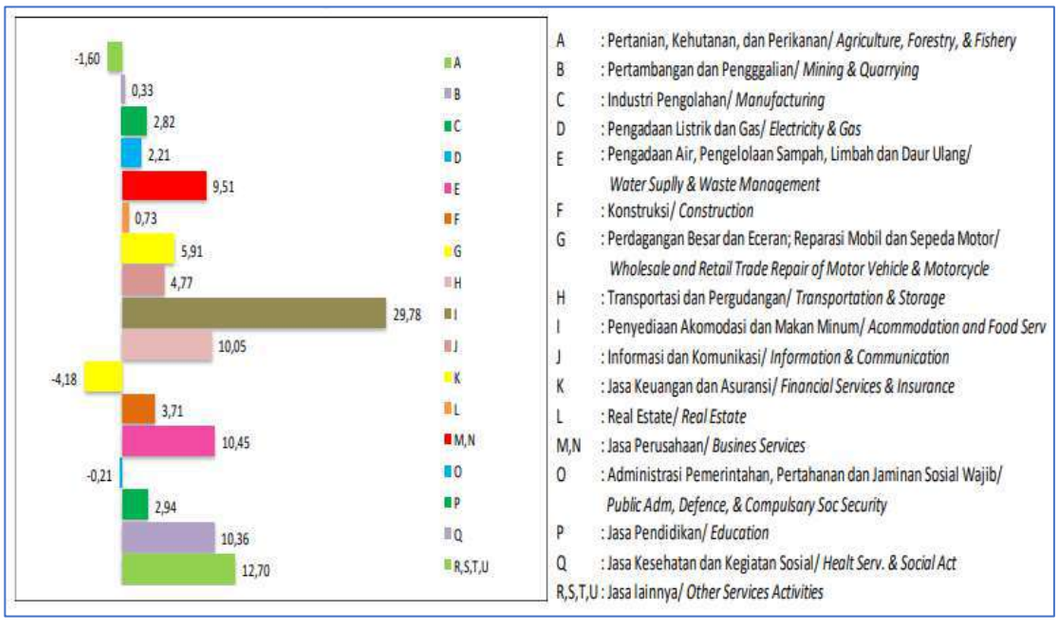


Sumber : PDRB Kota Lhokseumawe, BPS Lhokseumawe

Jika dilihat lebih rinci tahun 2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi per kategori mengalami pertumbuhan positif, pertumbuhan terbesar adalah kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (G) sebesar 28,78 persen. Terdapat tiga kategori yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (A), Jasa Keuangan dan Asuransi (K), dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial (O).

**B. Laju Inflasi**

Laju inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar untuk pengambalan keputusan. Peningkatan inflasi akan berdampak pada penurunan perkembangan ekonomi, dan secara umum akan menurunkan daya saing ekonomi. Dampak lain dari peningkatan inflasi ialah bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya pendapatan riil masyarakat, mengurangi nilai kekayaan yang berbentuk uang.

Inflasi Gabungan Kota IHK di Provinsi Aceh pada triwulan IV 2022 tercatat sebesar 5,89 persen (yoy) atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 7,38 persen (yoy). Angka inflasi tersebut tercatat lebih rendah dari inflasi Gabungan Kota IHK di Sumatera (6,14 persen, yoy), namun lebih tinggi dibanding inflasi Nasional (5,51 persen, yoy). Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumatera, realisasi inflasi tersebut menempatkan Provinsi Aceh sebagai daerah inflasi terendah keempat di Sumatera. Provinsi Sumatera Barat merupakan provinsi dengan inflasi tertinggi di Sumatera pada triwulan IV 2022.

Berdasarkan data yang dirilis *Berita Resmi Statistik* edisi Mei 2023 yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe, tercatat bahwa pada Mei 2022 terjadi inflasi di Kota Lhokseumawe sebesar 3,08 persen. Inflasi YoY untuk Kota Meulaboh

dan Kota Banda Aceh masing-masing sebesar 3,56 persen dan 3,41 persen. Secara agregat inflasi YoY untuk gabungan tiga kota di Aceh sebesar 3,34 persen, dan untuk Nasional sebesar 4,00 persen.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,13 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,18 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,40 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,16 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,29 persen; kelompok transportasi sebesar 11,42 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar -0,2 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 10,44 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,13 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,25 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,27 persen.

**Gambar 3.7**
**Inflasi Lhokseumawe, Meulaboh, Banda Aceh, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2022 (persen)**

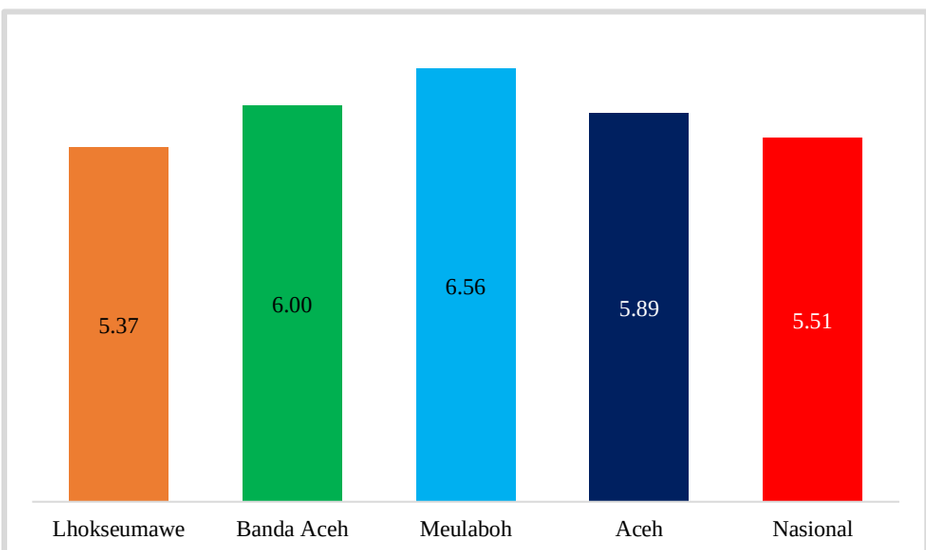


Sumber: Berita Resmi Statistik, Edisi Mei 2023, BPS Lhokseumawe

Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menjaga laju inflasi antara lain :

1. mengoptimalkan pengalokasian anggaran dalam memperbaiki konektivitas perhubungan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan mendukung peningkatan ketersediaan pasokan;
2. melakukan diseminasi dan komunikasi terkait inflasi untuk menjaga ekspektasi harga di masyarakat;
3. meningkatkan kelancaran distribusi barang ke masyarakat melalui pasar atau mempercepat fungsionalitas pasar induk.

Selanjutnya, untuk menekan laju inflasi dalam jangka menengah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh telah menyusun *Roadmap* Pengendalian Inflasi Daerah Aceh dengan strategi 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif dengan rincian program sebagai berikut:

***A. Keterjangkauan Harga***

- penyediaan komoditas pangan strategis murah melalui optimalisasi Toko Tani Indonesia Center (TTI-C) dan pasar/bazar murah terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- perbaikan manajemen pengelolaan kilang padi (permodalan, pemasaran, dan penyediaan stok);
- penyusunan neraca pangan;
- penguatan kolaborasi dengan Satgas Pangan dalam menjaga stabilitas harga;
- pengawasan penyaluran LPG bersubsidi (3 Kg) dan program konversi LPG;
- pengembangan PIHPS Produsen dan optimalisasi penggunaannya;
- diversifikasi konsumsi bahan makan pokok melalui sosialisasi secara massif, khususnya untuk produk olahan ikan dan daging beku.

***B. Ketersediaan Pasokan***

- peningkatan produksi;

- ✓ optimalisasi bantuan benih dan sarana produksi lainnya;
- ✓ program peningkatan populasi ternak melalui kegiatan sapi induk wajib bunting (SIWAB), kegiatan Bedah Miskin Rakyat Sejahtera (Bekerja), kegiatan pengembangan Kawasan peternakan, pelestarian sumber data genetic ternak sebagai plasma nuftag, kegiatan processing semen beku (sperma beku/straw);
- ✓ Diseminasi dan informasi mengenai musim dan lalu lintas ikan kepada nelayan.

➢ pemanfaatan Sarana Sistem Rantai Dingin; Gudang Beku Terpadu/*Integrated Cold Storage* (ICS) Lampulo, Idi, Aceh Selatan, Simeuleu, dan Sabang;

➢ pengembangan 17 Gapoktan PUPM di beberapa kabupaten di Aceh;

➢ pengenalan SRG kepada pelaku usaha dan penguatan pengelola Gudang SRG.

***C. Kelancaran Distribusi***

- kerjasama perdagangan antar daerah, baik antar kab/kota di Aceh maupun dengan provinsi lain, dalam rangka pemenuhan kebutuhan komoditas pangan strategis;
- melakukan fasilitasi kerjasama antar produsen maupun pedagang lintas daerah;
- optimalisasi perdagangan antar pulau dan meningkatkan kelancaran arus distribusi;
- pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mendukung kelancaran distribusi komoditas pangan strategis, baik menggunakan moda transportasi darat, laut, maupun udara;
- pemberian subsidi transportasi alternative.

***D. Komunikasi Efektif***

➢ perbaikan kualitas data sebagai dasar kebijakan:

- ✓ penyusunan neraca pangan kabupaten/kota sebagai dasar untuk menjaga stok pangan dan mendorong terjalinnya kerjasama perdagangan antar daerah;
- ✓ inventarisasi komoditas utama surplus dan deficit pada kabupaten/kota di Aceh;
- ✓ tersedianya informasi harga pangan strategis di 23 kab/kota untuk komoditas bahan pangan strategis.

- optimalisasi penyampaian informasi harga pangan strategis di berbagai lokasi di kabupaten/kota melalui berbagai media komunikasi;
- mendukung kebijakan *administered price*, termasuk pengawasan tarif angkutan udara;
- melakukan peningkatan kapasitas anggota TPID;
- komunikasi yang efektif di berbagai media dalam rangka membentuk persepsi positif masyarakat.

### 3.1.3. Perkiraan Perekonomian Tahun 2023

Perekonomian Nasional berhasil melewati berbagai tantangan di tahun 2022 sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh impresif mencapai 5,31 persen yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang sepuluh tahun terakhir. Menghadapi tahun 2023, pemerintah tetap optimis ekonomi Indonesia dapat tetap tumbuh positif berdasarkan berbagai indikator domestik dan eksternal yang menunjukkan ketahan yang impresif. Keduanya menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi perekonomian global ke depan.

Beberapa indikator sektor riil yang dirilis pada Januari 2023 menunjukkan Indeks Kepercayaan Konsumen bergerak di level optimil yakni 123,0 dan PMI Manufaktur berada pada level ekspansif yakni 51,3. Sementera itu, indikator eksternal juga menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia yang terlihat dari peningkatan Cadangan Devisi per Januari 2023 sebesar 139,4 miliar USD.

Sejumlah kebijakan utama telah dipersiapkan oleh Pemerintah menghadapi perekonomian ke depan yakni terkait bauran kebijakan

fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi *game changer* di masa pandemi Covid-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menerapkan *green economy* yang pada KTT G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan.

Kinerja perekonomian Aceh pada tahun 2023 juga diperkirakan tumbuh 3,20 persen hingga 3,70 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya (4,21 persen, yoy). Kondisi tersebut diperkirakan oleh normalisasi ekspor luar negeri yang sudah tumbuh tinggi pada periode-periode sebelumnya. Laju inflasi diperkirakan berada di atas sasaran inflasi nasional sebesar 3±1 persen, dengan perkiraan peningkatan inflasi didorong oleh bahan-bahan makanan.

Kinerja perekonomian Lhokseumawe juga diharapkan dapat tumbuh sejalan dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Pertumbuhan ekonomi Kota Lhokseumawe diperkirakan tumbuh sebesar 3,9 persen, lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan ekonomi nasional, akan tetapi sedikit berada di atas target pertumbuhan ekonomi Aceh.

### 3.1.4. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2024

Kondisi perekonomian nasional mulai menunjukkan perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat imbas dilonggarkannya pembatasan sosial. Pemerintah pun menargetkan ekonomi nasional bisa tumbuh lebih

baik pada tahun 2024. Berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan, ekonomi nasional dapat tumbuh dalam kisaran 5,0 – 5,5 persen sepanjang tahun 2024. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional berada pada kisaran yang jauh berbeda, yaitu 4,7-5,5 persen pada tahun 2024.

Dalam menghadapi sejumlah tantangan perekonomian pada tahun 2024 pemerintah telah memetakan strategi dan langkah prioritas yang akan diambil guna menghadapi tantangan ekonomi baik dari sisi internal maupun eksternal.

Langkah tegas dapat diterapkan secara efektif untuk menanggulangi dampak kesehatan dan ekonomi dari wabah tersebut, khususnya guna melindungi kelompok miskin dan rentan, perekonomian Indonesia dapat kembali pulih secara bertahap ke jalur pertumbuhannya tahun 2024.

Tahun 2024 merupakan masa lanjutan dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena menjadi titik awal akselerasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi Covid-19. Peningkatan kapasitas produksi perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19 melalui transformasi ekonomi yang mencakup peningkatan produktivitas di semua sektor ekonomi, pemulihan sosial yang inklusif melalui pembangunan SDM dan tenaga kerja yang berkualitas, serta transisi pembangunan ramah lingkungan melalui investasi infrastruktur hijau dan pengembangan teknologi, diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian. Berlanjutnya agenda transformasi ekonomi tersebut diprakirakan akan mendorong akselerasi ekonomi nasional pada tahun 2024.

Proses pemulihan ekonomi domestik pada tahun 2024 diprakirakan akan berlanjut walaupun masih dihadapkan pada beberapa tantangan. Penyebaran varian baru Covid-19, risiko pengetatan likuiditas domestik, ketidakpastian global yang mempengaruhi pola perdagangan, dan pemulihan sosial yang belum

optimal dari dampak pandemi Covid-19 diprakirakan mampu mempengaruhi kinerja perekonomian ke depan.

Langkah pemerintah dan otoritas keuangan yang telah meluncurkan berbagai langkah fiskal dan moneter yang terkoordinasi dan terarah untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian dan mata pencaharian masyarakat, termasuk distribusi bantuan langsung tunai bagi kelompok miskin dan rentan, pemotongan pajak dan kelonggaran pembayaran pinjaman bagi pekerja dan dunia usaha. Di sisi lain, Pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi struktural untuk memperkuat permintaan domestik dan kinerja perdagangan internasional. Selanjutnya, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan menjaga harga domestik dan nilai tukar pada tingkat yang stabil dan kompetitif. Di samping itu juga meningkatkan inklusivitas dan ekonomi yang berkelanjutan.

Proses perekonomian Kota Lhokseumawe tahun 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan global dan nasional, meskipun prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 akan tumbuh membaik. Adapun kondisi lingkungan nasional yang akan berpengaruh positif terhadap perekonomian Kota Lhokseumawe antara lain:

a. Dicabutnya status Pandemi Covid-19 sehingga akan lebih meningkatkan kegiatan ekonomi di Kota Lhokseumawe;
b. Kebijakan nasional terkait penerimaan pajak, serta kemudahan investasi dan berusaha, akan mendorong pertumbuhan komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB.

Selain itu, beberapa tantangan global dan nasional yang harus dihadapi oleh Kota Lhokseumawe, antara lain:

a. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat dapat berdampak pada kinerja keuangan negara terutama dari sisi permintaan. Selain itu penerimaan negara masih dihadapkan pada tantangan belum optimalnya penerimaan PNBP SDA Nonmigas;

b. Tantangan dari sisi belanja negara antara lain: (1) belum optimalnya outcome atau output yang dihasilkan atas belanja negara; (2) tingginya kebutuhan pendanaan program prioritas; dan (3) masih kurangnya efesiensinya belanja operasional;
c. Dari sisi pembiayaan, tantangan yang dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan inovatif bagi pembangunan;
d. Perubahan prilaku dan struktur perekonoian, baik global maupun domestik pasca pandemi Covid-19, antara lain: perubahan bentuk rantai pasok global; perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi; perubahan tata kerja perusahaan dan pola prilaku masyarakat; serta percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi;
e. Isu penguatan ketahanan pangan, energi, dan air dimana ketergantungan Kota Lhokseumawe masih sangat besar untuk mendapatkan pasokan air terutama air minum;
f. Melemahnya daya saing Kota Lhokseumawe seiring dengan belum adanya produk unggulan daerah, serta belum memiliki brand produk daerah yang bisa dijadikan unggulan;
g. Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UMKM di Kota Lhokseumawe melalui optimalisasi pengembangan perikanan, dan pengembangan inovasi daerah.

Dalam upaya menjawab tantangan tersebut, maka upaya yang akan dilakukan dalam pemantapan perekonomian daerah, adalah sebagai berikut:

a. Upaya percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 diarahkan untuk mengoptimalkan peran UMKM, dan investasi pariwisata melalui berbagai upaya penguatan sektor kesehatan, perluasan program perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, pemulihan perdagangan, serta pembangunan pariwisata;
b. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik;

c. Meningkatkan pelayanan perijinan usaha secara terpadu, untuk meningkatkan unit-unit layanan dan fasilitasi perijinan bagi usaha mikro, kecil serta sektor informal secara gratis agar dapat menjadi usaha formal dan mudah mengakses kredit perbankan;
d. Menjamin ketersediaan prasarana dan sarana perekonomian (revitalisasi pasar tradisional, perlindungan UKM) agar berfungsi dengan baik dan sektor-sektor lain sebagai penunjang pertumbuhan dan distribusi barang semakin efisien.
e. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan usaha dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan sektor informal. Melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) dan lembaga keuangan mikro (LKM);
f. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan, pendidikan kecakapan hidup (*life skills*), teknologi tepat guna, produktivitas kerja dan keterampilan yang bersifat teknis.

## 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Kota

### 3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Kota Lhokseumawe

Keuangan daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan semua hak dan kewajiban Pemerintah Kota Lhokseumawe dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Pemerintah Kota Lhokseumawe sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Terkait dengan hal tersebut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat maka perlu dilakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Pengelolaan keuangan Kota Lhokseumawe dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBK yang setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Kota Lhokseumawe. APBK merupakan suatu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBK maka analisis pada bab ini terkait pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi APBK Lhokseumawe dan laporan keuangan selama 5 (lima) tahun sebelumnya.

Penyusunan gambaran pengelolaan keuangan daerah juga dilakukan untuk mengevaluasi capaian kinerja keuangan daerah dan untuk memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dalam mendanai rencana pembangunan. Gambaran capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud meliputi capaian kinerja pendapatan, tren realisasi belanja, capaian pembiayaan, serta analisis neraca daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembanguan Kota Lhokseumawe. Untuk mengetahui tentang gambaran realisasi pendapatan dan target/proyeksi pendapatan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**
**Realisasi dan Target/Proyeksi Pendapatan Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025**

| NO. | URAIAN | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | APBK 2023 | TARGET 2024 | PROYEKSI 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **PENDAPATAN DAERAH** | **799,161,561,536** | **789,566,096,080** | **747,655,000,000** | **746,640,104,482** | **752,167,627,149** |
| **1.1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **61,984,628,376** | **68,212,506,871** | **70,167,263,361** | **56,345,750,000** | **57,047,943,659** |
| 1.1.1 | Pajak Daerah | 30,115,978,587 | 40,032,463,310 | 34,060,750,000 | 34,123,250,000 | 34,140,750,000 |
| 1.1.2 | Retribusi Daerah | 3,073,325,409 | 3,022,508,323 | 4,087,500,000 | 3,612,500,000 | 4,087,500,000 |
| 1.1.3 | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan | 4,174,105,667 | 4,350,084,432 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 | 5,200,000,000 |
| 1.1.4 | Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah | 24,621,218,713 | 20,807,450,806 | 26,819,013,361 | 13,410,000,000 | 13,619,693,659 |
| **1.2** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **607,748,339,000** | **622,773,568,549** | **615,885,706,000** | **615,885,706,000** | **620,711,035,008** |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil (DBH) | 28,117,593,050 | 25,508,814,157 | 17,283,623,000 | 17,283,623,000 | 22,108,952,008 |
| 1.2.2 | Dana Alokasi Umum (DAU) | 418,626,656,000 | 415,683,229,737 | 433,613,526,000 | 433,613,526,000 | 433,613,526,000 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Khusus (DAK) | 82,989,588,612 | 93,236,323,753 | 105,256,051,000 | 105,256,051,000 | 105,256,051,000 |
| 1.2.4 | Dana Insentif Daerah (DID) | 16,156,027,000 | 34,445,081,000 | - | - | - |
| 1.2.5 | Dana Desa (DD) | 61,858,474,338 | 53,900,119,902 | 59,732,506,000 | 59,732,506,000 | 59,732,506,000 |
| **1.3** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **98,962,753,398** | **98,580,020,659** | **61,062,030,639** | **61,062,030,639** | **61,062,030,639** |
| 1.3.1 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH) | 27,269,583,603 | 29,261,429,715 | 31,220,106,455 | 31,220,106,455 | 31,220,106,455 |
| 1.3.2 | Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) | 71,693,169,795 | 69,318,590,944 | 29,841,924,184 | 29,841,924,184 | 29,841,924,184 |
| 1.3.3 | Bantuan Keuangan Provinsi | - | - | - | - | - |
| **1.4** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **30,465,840,762** | **-** | **540,000,000** | **13,346,617,843** | **13,346,617,843** |
| 1.4.1 | Pendapatan Hibah | 30,465,840,762 | - | 540,000,000 | - | - |
| 1.4.2 | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | - | - | - | 13,346,617,843 | 13,346,617,843 |
| | **JUMLAH PENDAPATAN** | **799,161,561,536** | **789,566,096,080** | **747,655,000,000** | **746,640,104,482** | **752,167,627,149** |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan Kota Lhokseumwe pada Tahun 2021 sebesar Rp.799.161.561.536,-. Realisasi ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.61.984.628.376,- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.607.748.339.000,- Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.98.962.753.398,- dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.30.465.840.762,-.

Selanjutnya realisasi pendapatan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2022 sebesar Rp.789.566.096.080,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.68.212.506.871,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.622.773.568.549,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.68.580.020.659,-. Besaran realisasi pendapatan tahun 2022 relaltif lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Penurunan realisasi pendapatan tersebut terutama berasal dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Secara umum penurunan pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp.-9.595.465.457,-.

Sedangkan Tahun 2023 jumlah pendapatan Kota Lhokseumawe ditargetkan sebesar Rp.747.655.000.000,- yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.70.167.263.361,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.615.885.706.000,- dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.61.062.030.639,-. Pendapatan yang dianggarkan tersebut merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Dibandingkan dengan pendapatan tahun 2022, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -5,31 persen atau sebesar (Rp.41.911.096.080,-).

Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah pada tahun 2022 dan target pendapatan pada tahun 2023, pendapatan Kota Lhokseumawe tahun 2024 direncanakan sebesar Rp.746.640.104.482,-. Pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.69.692.367.843,-; Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.615.885.706.000,-; dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.61.062.030.000,-.

Jumlah pendapatan yang direncanakan pada tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pendapatan tahun berjalan (2023). Perbedaan target pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang bersumber dari Retribusi Daerah sebesar Rp.475.000.000,- dan Lain-Lain PAD yang Sah sebesar Rp.13.409.013.361,-. Penurunan pada Lain-Lain PAD yang Sah tampak lebih besar karena pendapatan yang berasal dari Dana Kapitasi JKN pada FKTP yang sebelumnya berada pada komponen ini berpindah ke Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hal ini dikarenakan adanya pemutakhiran Nomor Rekening Pendapatan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (sipd-ri). Selain itu Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah sebesar Rp.540.000.000,- tidak ditargetkan lagi pada tahun 2024. Secara umum Pendapatan Daerah Kota Lhokseumawe mengalami penurunan sebesar -0,44 persen pada tahun 2024 dibandingkan 2023.

Pendapatan daerah yang telah ditargetkan harus dioptimalkan untuk menghasilkan kapasitas keuangan daerah yang makin tinggi guna mendukung pendanaan pembangunan daerah. Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan penerimaan daerah, maka perlu adanya usaha meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau laba atas penyertaan modal pada BUMD serta lain-lain PAD yang sah, serta penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan penopang bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Arah kebijakan pendapatan daerah dalam rangka optimalisasi atas pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan sebagai berikut:

1. intensifikasi pajak dan retribusi daerah, ditujukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah dengan cara sebagai berikut :

a. melakukan pendekatan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. penyempurnaan landasan hukum serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
c. melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
d. peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan pendapatan asli daerah;
e. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar unit satuan kerja terkait; dan
f. Peningkatan kualitas aparat pengelola pajak daerah dan retribusi daerah melakukan pendekatan

2. ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan potensi penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan menambah jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta memperkuat basis pajak daerah dan retribusi daerah. Secara umum proses ini dilaksanakan dengan cara-cara sebagai berikut :
   a. menyelenggarakan sosialisasi dan pemberian penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
   b. melakukan pemutakhiran basis data pajak daerah serta optimalisasi pemanfaatan data perpajakan yang bersangkutan;
   c. melakukan pendataan ke seluruh objek pajak dan subjek pajak yang dapat dikenakan pajak daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   d. pengkajian terhadap potensi penerimaan pajak daerah;
   e. pemungutan terhadap jenis retribusi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
   f. meningkatkan peran seluruh stakeholder yang terkait dengan penerimaan pajak daerah terutama PBB dan BPHTB.

Dalam rangka optimalisasi pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah, kebijakan pendapatan difokuskan untuk memberdayakan potensi pendapatan asli daerah melalui:

a. pemantauan pajak daerah yang merupakan monitoring secara elektronik atas data transaksi usaha wajib pajak daerah berupa pemasangan/penerapan alat perekam data transaksi usaha wajib pajak seperti *tapping box* dan sejenisnya dengan tujuan antara lain:
   - Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak daerah;
   - Mempermudah Wajib Pajak Daerah dalam menghitung pajak yang harus disetorkan;
   - Meningkatkan efesiensi dan pemungutan pajak daerah;
   - Mempercepat pelaporan data penerimaan pembayaran subjek pajak daerah;
   - Meningkatkan transparansi dan akurasi data pembayaran subjek pajak daerah;
   - Meningkatkan pengawasan atas pelaporan Wajib Pajak daerah.
b. Pemberian *Reward*, antara lain:
   - Undian Berhadiah Pajak PBB bagi WP yang telah melunasi Pajak PBB sebelum jatuh tempo melalui non tunai (Action Bank Aceh);
   - Pemberian stimulus fiskal berupa keringanan/penghapusan denda keterlambatan;
   - Pemberian *doorprize*/souvenir bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran pada event-event yang digelar Pemerintah Kota Lhokseumawe.
c. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk Pendapatan Asli Daerah selain Pajak Daerah;
d. Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verfikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak;
e. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah.

Pendapatan Transfer baik itu Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat maupun Pendapatan Transfer Antar Daerah diarahkan pada program-program pembangunan yang mendorong perkembangan ekonomi daerah dalam upaya meningkatkan PAD dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa strategi perlu ditempuh dalam hal dana perimbangan diantaranya :

- mengalokasikan dana berdasarkan prioritas pembangunan;
- meningkatkan kesadaran Perangkat Daerah untuk menyusun rencana anggaran yang efisien dan efektif.

Peningkatan pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan Bagi Hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian. Dengan semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktivitas perekonomian daerah dan menjaga kestabilan politik dan keamanan daerah.

### 3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Kota Lhokseumawe

Arah kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan pada pelaksanaan program yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas melalui pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; penurunan prevelensi stunting; pengendalian inflasi, pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak, dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan dan mutu kesehatan. Selanjutnya alokasi anggaran belanja harus tetap mengedepankan azas efesiensi dan efektivitas dengan mengacu pada penyusunan anggaran berdasar *money follow program.*

Kebijakan pengelolaan belanja Kota Lhokseumawe dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. penyusunan alokasi belanja menggunakan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang direncanakan;

2. prioritas anggaran belanja adalah untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam melaksanakan kewajiban daerah yang menjadi kewenangan daerah;
3. setiap peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. besaran plafon anggaran harus realistis yaitu disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja;
5. penentuan kebijakan belanja daerah selain didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya dengan tetap berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra).

Dalam rangka mewujudkan sinergitas program dan kegiatan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe, maka kebijakan belanja Kota Lhokseumawe diarahkan untuk :

a. pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;
b. pemenuhan Dana Bagi Hasil Kepada Desa, serta pemenuhan Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa;
c. mengusahakan alokasi belanja fungsi pendidikan sebesar 20 persen dan fungsi kesehatan 10 persen;
d. mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memproritaskan pembangunan daerah;
e. mendukung agenda pelaksanaan pemilihan umum secara serentak dan pemilihan kepala daerah (termasuk pelaksanaan desk pilkada, pengawasan pemilu dan pilkada, penertiban serta pengamanan pilkada);
f. belanja sesuai dengan sumber dana yang diperuntukkan penggunaan, terutama yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat;
g. untuk belanja yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik masih mengikuti pedoman dan pagu indikatif sebagaimana tahun

2023, dan akan disesuaikan kembali pada tahapan selanjutnya berdasarkan pendapatan DAK Fisik Tahun 2024 yang diterima;

h. mendukung untuk pemenuhan belanja dalam rangka penanggulangan stunting, penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

Sesuai dengan arah kebijakan belanja daerah tersebut serta dengan mempertimbangkan realisasi kemampuan keuangan tahun-tahun sebelumnya, maka secara garis besar gambaran belanja daerah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3**
**Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025**

| NO. | URAIAN | REALISASI 2021 | REALISASI 2022 | APBK 2023 | TARGET 2024 | PROYEKSI 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **2** | **BELANJA DAERAH** | **786,577,978,856** | **825,509,672,418** | **777,444,500,000** | **761,066,186,781** | **752,167,627,149** |
| **2.1** | **Belanja Operasi** | **528,185,317,468** | **576,374,939,708** | **580,348,197,989** | **552,647,279,230** | **561,194,338,032** |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 283,587,471,724 | 304,916,122,038 | 344,381,031,279 | 339,335,452,564 | 347,601,202,987 |
| 2.1.2 | Belanja Barang dan Jasa | 176,198,828,614 | 185,425,254,292 | 189,280,301,778 | 169,979,128,649 | 170,382,362,314 |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | - | 200,000,000 | 470,000,000 | 1,008,000,000 | - |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 26,757,974,805 | 36,702,542,385 | 14,276,398,102 | 23,301,326,017 | 16,904,350,583 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 41,641,042,325 | 49,131,020,993 | 31,940,466,830 | 19,023,372,000 | 26,306,422,148 |
| | | | | | | |
| **2.2** | **Belanja Modal** | **140,433,183,319** | **142,251,751,256** | **75,571,171,296** | **93,833,111,651** | **80,231,545,417** |
| 2.2.1 | Belanja Modal Tanah | 8,819,863,140 | 13,713,809,182 | 1,652,000,000 | - | - |
| 2.2.2 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 27,807,298,336 | 21,363,441,916 | 14,872,556,410 | 19,021,042,290 | 15,021,042,290 |
| 2.2.3 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 37,651,964,370 | 40,945,930,770 | 36,659,694,574 | 46,728,876,015 | 42,127,309,781 |
| 2.2.4 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 62,684,960,792 | 62,614,371,138 | 18,667,130,680 | 24,377,078,714 | 20,377,078,714 |
| 2.2.5 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3,469,096,681 | 3,614,198,250 | 3,719,789,632 | 3,706,114,632 | 2,706,114,632 |
| | | | | | | |
| **2.3** | **Belanja Tak Terduga** | **3,719,221,430** | **2,134,850,082** | **3,000,000,000** | **3,000,000,000** | **3,000,000,000** |
| 2.3.1 | Belanja Tak Terduga | 3,719,221,430 | 2,134,850,082 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 |
| | | | | | | |
| **2.4** | **Belanja Transfer** | **114,240,256,639** | **104,748,131,372** | **118,525,130,715** | **111,585,795,900** | **107,741,743,700** |
| 2.4.1 | Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 1,794,068,948 | 1,820,631,270 | 3,814,825,000 | 6,823,120,088 | 3,822,825,000 |
| 2.4.2 | Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa | 112,446,187,691 | 102,927,500,102 | 114,710,305,715 | 104,762,675,812 | 103,918,918,700 |
| | **JUMLAH BELANJA** | **786,577,978,856** | **825,509,672,418** | **777,444,500,000** | **761,066,186,781** | **752,167,627,149** |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, dan https://sipd-ri.kemendagri.go.id.

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa, realisasi belanja Kota Lhokseumawe pada Tahun 2021 sebesar Rp.786.577.978.856,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.528.185.317.468,- Belanja Modal sebesar Rp.140.433.183.319,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.3.719.221.430,- dan Belanja Transfer sebesar Rp.114.240.256.639,-. Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2022 realisasi belanja sebesar Rp.825.509.672.418,-. Realisasi ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.576.374.939.708,- Belanja Modal sebesar Rp.142.251.751.256,- Belanja Tak Terduga sebesar Rp.2.134.850.082,- dan selanjutnya Belanja Transfer sebesar Rp.104.748.131.372,-.

Untuk Tahun Anggaran 2023 total belanja Kota Lhokseumawe dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota sebesar Rp.777.444.500.000,- yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp.580.348.197.989,-; Belanja Modal sebesar Rp.75.571.171.296,-; Belanja Tak Terduga sebesar Rp.3.000.000.000,-; dan Belanja Transfer sebesar Rp.118.525.130.715,-.

Berdasarkan rencana pendapatan daerah tahun 2024, belanja Kota Lhokseumawe direncanakan sebesar Rp.761.066.186.781,- yang terdiri dari:

a. Belanja Operasi sebesar Rp.552.647.279.230,-;

   Pada belanja operasi alokasi sebesar Rp.339.335.452.564,- untuk memenuhi belanja pegawai (belanja gaji dan tunjangan), selanjutnya Belanja Barang dan Jasa dialokasikan sebesar Rp.169.979.128.649,-; Belanja Subsidi yang diperuntukan untuk pelaksanaan pasar murah dalam rangka penanggulangan inflasi dan menjamin keterjangkauan daya beli masyarakat; Belanja Hibah sebesar Rp.23.301.326.017,- yang diperuntukkan untuk hibah KIP dalam rangka dukungan pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta dukungan untuk pelaksanaan desk pemilu dan pengamanan pemilu sebesar Rp.18.200.000.000,-, dan selebihnya untuk hibah lembaga; Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp.19.023.372.000,-.

b. Belanja Modal sebesar Rp.93.833.111.651,- terdiri atas belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp.19.021.042.290,-; belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp.46.728.786.015,-; belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp.24.377.078.714,-; serta belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp.3.706.114.632,-.

c. Belanja Tak Terduga Rp.3.000.000.000,- serta

d. Belanja Transfer sebesar Rp.111.585.795.900,- yang terdiri atas belanja bagi hasil sebesar Rp.6.823.120.088,-; dan belanja bantuan keuangan sebesar Rp.104.762.675.812,-.

Dalam belanja Kota Lhokseumawe tahun 2024 juga telah dialokasikan untuk menutupi kewajiban tahun-tahun sebelumnya, diantaranya kewajban atas kurang bayar biaya BPJS Kesehatan sebesar Rp.2.500.524.296,-; kurang salur atas Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.3.000.000.000,-; belanja kompensasi atas aset Aceh Utara sebesar Rp.3.000.000.000,-.

Disamping itu juga dalam belanja daerah tahun 2024 sudah dialokasikan untuk dukungan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.3/8326/Dukcapil tentang Dukungan Anggaran Penyelenggaraan Adminduk Tahun 2024, serta pemenuhan alokasi belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya.

### 3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Kota Lhokseumawe

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Pengeluaran

pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Untuk Tahun 2024 penerimaan pembiayaan Kota Lhokseumawe yang berasal dari sisa lebih belanja daerah sebesar Rp.16.426.082.299,- bersumber dari sisa belanja yang tidak diperuntukkan penggunaannya. Selanjutnya untuk Pengeluaran Pembiayaan direncanakan untuk Investasi/Penyertaan Modal pada Perusaaan Daerah sebesar Rp.2.000.000.000,-. Untuk lebih jelasnya tentang gambaran penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut.

**Tabel 3.4**
**Realisasi dan Target/Proyeksi Pembiayaan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2024**

| NO. | URAIAN | REALISASI APBK 2021 (n-3) | REALISASI APBK 2022 (n-2) | APBK 2023 (n-1) | TARGET 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| **3** | **PEMBIAYAAN DAERAH** | **35,901,027,333** | **46,484,611,013** | **29,789,500,000** | **14,426,082,299** |
| 3.1 | Penerimaan Pembiayaan | 42,045,667,333 | 48,484,611,013 | 31,789,500,000 | 16,426,082,299 |
| 3.1.1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya | 42,045,667,333 | 48,484,611,013 | 31,789,500,000 | 16,426,082,299 |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | 6,144,640,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 3.2.1 | Penyertaan Modal Daerah | 6,144,640,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| | | | | | |

Sumber : BPKD Kota Lhokseumawe, Tahun 2023.

# BAB IV
# SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan prioritas Aceh untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. RKPK merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program dalam RPK;
2. RKPK merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBK; dan
3. RKPK berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.

## 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara strategi, arah kebijakan dan program pembangunan. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 diturunkan berdasarkan tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 serta target RPJPD Kota Lhokseumawe Tahun 2005-2025 pada periode ke-5. Selain itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan

nasional serta tujuan dan sasaran pembangunan Aceh dalam rangka mewujudkan keselarasan sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.

Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah kebijakan pembangunan Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

**Tabel 4.1**
**Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan**

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja | Peningkatan tata kelola pemerintahan melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan yang terintegrasi | Melaksanakan reformasi birokrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan mengembangkan kebijakan pengelolaan pemerintahan yang efektif dan efisien |
| | | | | Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah | |
| | | | | Penguatan sistem pengendalianintern pemerintah (SPIP) | |
| | | | | Penguatan system pengelolaankeuangan daerah yang efektif dan efisien | |
| | | | | Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah | |
| | | Meningkatnya Pelayanan Publik | Meningkatkan sistem pelayanan publik | Meningkatkan manajemen pelayanan publik | |
| | | | | Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka dan transparant (open government) | |
| | | | | Meningkatkan pembangunan demokrasi yang partisipatif | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan | |
| | | | | Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; | |
| | | | | Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak. | |
| | | | | Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban. | |
| | | | | Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana. | |
| 2. | Memperkuat pelaksanaan syariat islam | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Syariat Islam | Mensosialisasikan qanun dan aturan yang berkenaan dengan pelaksanaan nilai-nilai keislaman | Memperkuat pelaksanaan syariat islam melalui penguatan kapasitas lembaga keagamaan, lembaga adat dan kemasyarakatan serta pengembangan budaya yang berazaskan nilai-nilai keislaman |
| | | | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Peningkatan kapasitas instansi dan lembaga terkait dalam mendukung pengumpulan ZIS | |
| | | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Peningkatan pemahaman dan penghayatan terhadap sejarah aceh dan nilai budaya dalam tatanan kehidupan | Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia | Meningkatnya kualitas pendidikan | Meningkatkan mutu infrastruktur dan proses pembelajaran pendidikan | Peningkatan kuantitas dan kualitas mutu sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan. | Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui peningkatan Mutu Pendidikan dan dan Kesehatan |
| | | | Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan | Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas | |
| | | | Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan | Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar | |
| | | Meningkatnya kualitas generasi muda | Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda | Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan | |
| | | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan | Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan dasar | |
| | | | | Peningkatan Ketersediaan sumber daya Kesehatan yang berkualitas dalam aspek sumber daya manusia (SDM) kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai standar | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatkan budaya hidup sehat | Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan | |
| | | | Meningkatkan pelayanan, Advokasi dan KIE Keluarga Berencana | Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana | |
| 4. | Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Meningkatkan pengelolaanlingkungan dan penanganan sampah | Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup | Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup melalui Perencanaan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup |
| 5. | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Meningkatkan kualitas iklim usaha dan invenstasi yang kondusif | Peningkatan fasilitas dan promosi Investasi | Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing melalui Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pangan, pertanian dan perikanan serta Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan |
| | | Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat | Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat | Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin | |
| | | Meningkatkan Kesempatan Kerja | Meningkatkan Kompetensi, produktivitas dan Perlindungan Tenaga Kerja | Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Meningkatkan Daya Saing Daerah | Meningkatkan Usaha Perdagangan Industri UMKM yang kompetitif untuk penguatan Ekonomi | Peningkatan pemberdayaan usaha perdagangan,industri, koperasi, dan UMKM | |
| | | | Mewujudkan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk pangan, pertanian dan perikanan | |
| | | | Mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal (syariat islam) | Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata; | |
| 6. | Meningkatkan infrastruktur berkualitas | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Meningkatkan aksesibilitas sarana prasarana jalan dan jembatan | Memastikan tersedianya kondisi jalan dan jembatan guna menunjang aktivitas perekenomian masyarakat | Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan dasar melalui perbaikan kualitas infrastruktur |
| | | | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman | Melakukan Penanganan kawasan kumuh perkotaan secara terpadu | |
| | | | Meningkatkan akses sanitasi | Meningkatkan cakupan sanitasi layak | |
| | | | Meningkatkan kapasitas saluran drainase | Meningkatkan Pengendalian dan kapasitas drainase | |

| NO | TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | KEBIJAKAN PEMBANGUNAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Meningkatkan akses air minum | Meningkatkan ketersediaan dan pasokan sumber daya air minum | |
| | | | Menguatkan Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Meningkatkan Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bangunan Gedung | |
| | | | | Peningkatan perencanaan dan pengendaliaan pemanfaatan ruang | |
| | | | Penataan dan pengembangan sistem keselamatan transportasi secara merata | Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi. | |

*Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026*

## 4.2 Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe

Arah Kebijakan dan target makro Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**
**Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Aceh dan Kota Lhokseumawe**

| No | Indikator | Target 2024 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nasional | Aceh | Kota Lhokseumawe |
| 1. | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5.3-5.7 | 4.34 | 4.11 |
| 2. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 5.0-5.7 | 5.36 | 9.05 |
| 3. | IPM | 73.99-74.02 | 73.26 | 78.90 |
| 4. | Tingkat Kemiskinan (%) | 6.5-7.5 | 14.53 | 10.74 |

*Sumber: Kick Off RKP 2024, RKPA 2024*

Target yang tertera dalam tabel di atas tercantum dalam Kick Off RKP 2024 dan RKPA 2024. Pada Tahun 2020 dengan ditetapkan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) sebagai pandemi global semenjak tanggal 11 Maret 2020, dan Indonesia sebagai salah satu Negara yang sampai saat ini cukup terdampak, menyebabkan dilakukan penyesuaian dalam penentuan target pembangunan nasioanal, sedangkan untuk Aceh dan Kota Lhokseumawe sudah di sesuaikan dalam penyusunan RPA 2023-2026 dan RPK Lhokseumawe 2023-2026.

## 4.3 Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 memperhatikan tema Pembangunan Daerah yang telah tercantum pada RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 yang mana pada Tahun 2024 telah ditetapakan yaitu: "***Peningkatan Kualitas SDM dalam Mensukseskan Agenda Politik Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak serta Mengoptimalkan***

***Pertumbuhan Ekonomi".*** Tema Pembangunan Daerah untuk RKPK Tahun 2024 telah memperhatikan dan mempertimbangkan tema Pembangunan Aceh yang tercantum dalam RKPA 2024 yaitu: ***"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas SDM Dalam Rangka Mensukseskan Pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah Serentak dan PON 2024".*** Tema Pembangunan ini juga sejalan dengan Tema RKP Tahun 2024 yang mengusung Tema "***Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***".

## 4.4 Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan Rencana Pembanguna Kota, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Aceh.

Prioritas pembangunan pada RKPK 2024 disusun juga dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPK Tahun 2024 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerjakeras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. transformasi ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin
3. pemerataan; meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan
7. memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

sedangkan prioritas pembangunan Aceh pada RKPA Tahun 2024 adalah :

1. memperkuati Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan
2. memperkuat kemandirian pangan, ketahanan ekonomi yang produktif dan kompetitif

3. meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing
4. penguatan tata kelola pemerintahan dan keistimewaan Aceh

Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Aceh yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPK, serta isu strategis di tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe untuk Tahun 2024 yaitu:

1. Reformasi Birokrasi
2. Pendidikan
3. Pertumbuhan Ekonomi
4. Kesehatan
5. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya
6. Infrastruktur
7. Lingkungan Hidup

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Aceh. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka.

Selanjutnya sasaran daerah untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. jumlah dan nilai investasi meningkat
2. kesejahteraan Masyarakat meningkat
3. kesempatan Kerja meningkat
4. daya Saing Daerah meningkat
5. kualitas pendidikan meningkat
6. kualitas generasi muda meningkat
7. derajat Kesehatan Masyatarakat meningkat
8. kualitas lingkungan hidup meningkat

9. infrastruktur kota berkualitas meningkat
10. kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat
11. pelayanan publik meningkat
12. pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap nilai budaya meningkat
13. penegakan syariat islam dalam bermasyarakat menguat

Secara lebih jelas pengelompokan sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe berdasarkan pendekatan prioritas pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 4.1**
**Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Kota Lhokseumawe**

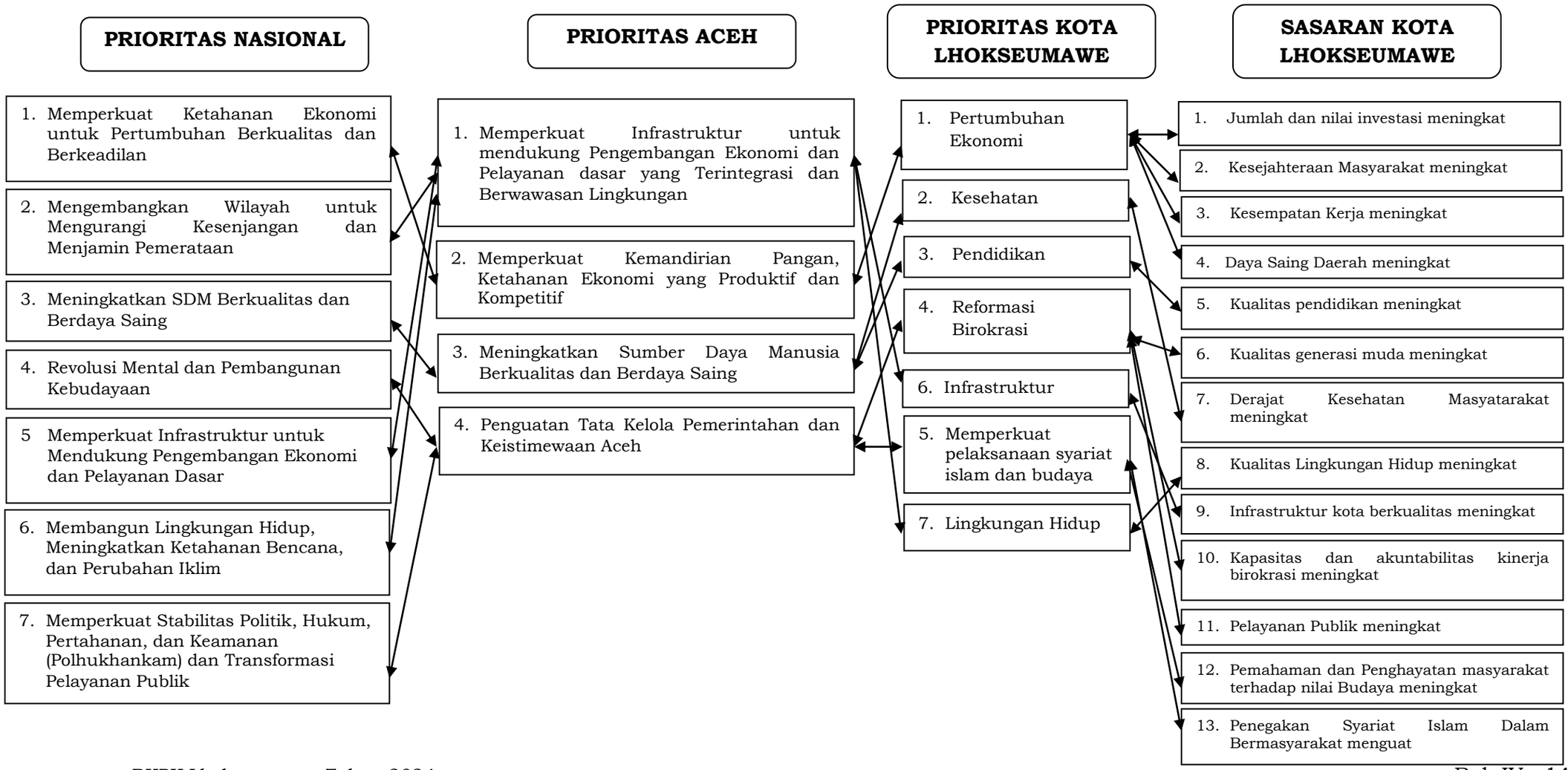

prioritas Kota Lhokseumawe telah selaras dengan prioritas nasional. Keselarasan dari masing masing prioritas dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 4.3**
**Penyandingan Prioritas Nasional dan Prioritas Kota Lhokseumawe**

| No. | Prioritas Nasional | Prioritas Kota Lhokseumawe | Sasaran |
|---|---|---|---|
| 1. | **PN-1:** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan | 1. Pertumbuhan Ekonomi | 1. Jumlah dan nilai investasi meningkat<br>2. Kesejahteraan Masyarakat meningkat<br>3. Kesempatan Kerja meningkat<br>4. Daya Saing Daerah meningkat |
| 2. | **PN-2:** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan | 5. Infrastruktur | 1. Infrastruktur kota berkualitas meningkat |
| | | 1. Pertumbuhan Ekonomi | 1. Jumlah dan nilai investasi meningkat<br>2. Kesejahteraan Masyarakat meningkat<br>3. Kesempatan Kerja meningkat<br>4. Daya Saing Daerah meningkat |
| 3. | **PN-3:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing | 2. Kesehatan | 1. Derajat Kesehatan Masyatarakat meningkat |
| | | 3. Pendidikan | 1. Kualitas pendidikan meningkat<br>2. Kualitas generasi muda meningkat |
| 4. | **PN-4:** Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaa | 6. Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | 1. Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya meningkat<br>2. Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat menguat |
| 5. | **PN-5:** Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar | 5. Infrastruktur | 1. Infrastruktur kota berkualitas meningkat |
| | | 1. Pertumbuhan Ekonomi | 1. Jumlah dan nilai investasi meningkat<br>2. Kesejahteraan Masyarakat meningkat<br>3. Kesempatan Kerja meningkat<br>4. Daya Saing Daerah meningkat |
| 6. | **PN-6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim | 7. Lingkungan Hidup | 1. Kualitas Lingkungan Hidup meningkat |

| No. | Prioritas Nasional | Prioritas Kota Lhokseumawe | Sasaran |
|---|---|---|---|
| 7. | **PN-7:** Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik | 4. Reformasi Birokrasi | 1. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meningkat<br>2. Pelayanan Publik meningkat |

*Sumber: Hasil Olahan 2023*

## 4.5 Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Target sasaran pembangunan Kota Lhokseumawe pada Tahun 2024 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini:

**Tabel 4.4**
**Target Sasaran Pembangunan Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2024**

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Target 2024 | Kondisi Akhir (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| **1.** | ***Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik*** | ***Indeks reformasi birokrasi*** | ***Kategori/ Poin*** | ***CC 50.50*** | ***CC 51.50*** |
| 1.1 | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Nilai LPPD Kota | Kategori/ Poin | Sangat Tinggi 4.20 | Sangat Tinggi 4,25 |
| | | Nilai Evaluasi SAKIP | Kategori/ Poin | B 60.50 | B 61.50 |
| | | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Opini | WTP | WTP |
| 1.2 | Meningkatnya Pelayanan Publik | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik | Kategori/ Poin | A 88.81 | A 89.81 |
| **2.** | ***Memperkuat pelaksanaan syariat islam*** | ***Indeks Pembangunan syariat islam*** | ***Indeks*** | ***80.85*** | ***81.00*** |
| 2.1 | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Persentase mesjid yang melaksanakan Shalat lima waktu | Persen | 100 | 100 |
| | | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | Rasio | 0.99 | 0.99 |
| 2.2 | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Persentase kegiatan pengembangan budaya | Persen | 61.54 | 76.92 |
| **3.** | ***Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia*** | ***Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*** | ***Indeks*** | ***78.90*** | ***79.00*** |
| 3.1 | Meningkatnya kualitas pendidikan | Harapan lama sekolah | Tahun | 15.23 | 15.25 |

| No | Tujuan / Sasaran | Indikator | Satuan | Target 2024 | Kondisi Akhir (2026) |
|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| | | Angka kelulusan | Persen | 100.00 | 100.00 |
| 3.2 | Meningkatnya kualitas generasi muda | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Persen | 100 | 100 |
| 3.3 | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Usia Harapan Hidup | Tahun | *71.68* | *71.75* |
| **4.** | ***Meningkatkan Tata Kelola Lingkungan Hidup*** | ***Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*** | ***Persen*** | ***65.35*** | ***66.25*** |
| 4.1 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Persentase RTH Publik | Persen | *2.49* | *2.79* |
| **5.** | ***Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing*** | ***Persentase pertumbuhan ekonomi*** | ***Persen*** | ***4.11*** | ***4.30*** |
| 5.1 | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) | Rp. Miliar | 3,541 | 3,684 |
| | | Jumlah Investor (PMDN/ PMA) | Perusahaan | 472 | 512 |
| 5.2 | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Tingkat kemiskinan | Persen | 10.74 | 10.45 |
| 5.3 | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 9.05 | 8.90 |
| 5.4 | Meningkatnya Daya Saing Daerah | PDRB Perkapita | Rp. (Juta) | 33.38 | 33.40 |
| | | Laju Inflasi | Persen | 2.10 | 2.05 |
| **6.** | ***Meningkatkan infrastruktur berkualitas*** | ***Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas*** | ***Persen*** | ***35.98*** | ***39.56*** |
| 6.1 | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | 71.64 | 78.91 |
| | | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Persen | 0.32 | 0.21 |
| | | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Persen | 61.13 | 74.47 |
| | | Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan | Rasio | 0.25 | 0.38 |

*Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026*

## 4.6 Penetapan Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe

Perumusan prioritas pembangunan daerah Kota Lhokseumawe yang akan dilaksanakan Tahun 2024, mempertimbangkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPK Tahun 2021, Target RPK Lhokseumawe

Tahun 2023-2026 untuk Tahun 2024, Prioritas Nasional Tahun 2024 dan Prioritas Aceh Tahun 2024. Prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang telah ditetapkan tersebut, dicapai melalui pelaksanaan program-program prioritas. Program prioritas merupakan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang *outcome* nya ditujukan untuk mewujudkan sasaran daerah.

Anggaran untuk program prioritas dimaksud dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non prioritas atau program yang sifatnya mendukung (*supporting)*. Berikut ini adalah Prioritas Pembangunan, Sasaran serta Program Prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 4.5**
**Program Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| Infrastruktur | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Penataan Bangunan Gedung | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Penyelenggaraan Jalan | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Kawasan Permukiman | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perhubungan |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | Dinas Perhubungan |
| Kesehatan | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pengendalian Penduduk | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Lingkungan Hidup | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | Dinas Lingkungan Hidup |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengelolaan Persampahan | Dinas Lingkungan Hidup |
| Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Pendidikan Dayah | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | | Program Majelis Adat Aceh (MAA) | Sekretariat Majelis Adat Aceh |
| | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Baitul Mal | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| | | Program Syariat Islam Aceh | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah |
| Pendidikan | Meningkatnya kualitas pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengembangan Kurikulum | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Sosial |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | Dinas Sosial |
| | | Program Rehabilitasi Sosial | Dinas Sosial |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | Dinas Sosial |
| | | Program Penanganan Bencana | Dinas Sosial |
| | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Dinas Sosial |
| | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | Program Hubungan Industrial | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | Meningkatnya jumlah dan nilai investasi | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja |
| | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pengembangan UMKM | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata |
| | | Program Pemasaran Pariwisata | Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pengembangan Ekspor | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah |
| Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Program Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah |
| | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Perlindungan Perempuan | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pertanahan |
| | | Program Penatagunaan Tanah | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah | Dinas Pertanahan |
| | | Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | Dinas Pertanahan |
| | | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan | Dinas Pertanahan |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Pencatatan Sipil | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| | | Program Penataan Desa | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | Dinas Kepemudaan, Olah raga dan Pariwisata |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Program Pembinaan Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | | Program Pengelolaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat Daerah |
| | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah |
| | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | Sekretariat Daerah |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Sekretariat DPRK |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | Sekretariat DPRK |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Program Kepegawaian Daerah | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| | Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Inspektorat |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | Inspektorat |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | Inspektorat |
| | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Banda Sakti |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | Kecamatan Muara Dua |

| Prioritas | Sasaran | Program | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |

*Sumber: RPK Lhokseumawe 2023-2026*

## 4.7 Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2024, Kota

Lhokseumawe melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.6**
**Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kota Lhokseumawe 2024**

| No | Jenis SPM | Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kota | Prioritas Kota Lhoksemawe | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan | 1. Pendidikan Dasar | Pendidikan | Dinas PK |
| | | 2. Pendidikan Kesetaraan | | |
| | | 3. Pendidikan Anak Usia Dini | | |
| 2. | Kesehatan | 1. Pelayanan kesehatan ibu hamil | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| | | 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin | | |
| | | 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir | | |
| | | 4. Pelayanan kesehatan balita | | |
| | | 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar | | |
| | | 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif | | |
| | | 7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut | | |
| | | 8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi | | |
| | | 9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus | | |
| | | 10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat | | |
| | | 11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis | | |
| | | 12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) | | |
| 3. | Pekerjaan Umum | 1. Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari | Infrastruktur | Dinas PUPR |
| | | 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik | | |
| 4. | Perumahan Rakyat | 1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota | Infrastruktur | Dinas PUPR |

| No | Jenis SPM | Jenis Pelayanan Dasar Pada SPM Kota | Prioritas Kota Lhoksemawe | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | 2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota | | |
| 5. | Trantibum linmas | 1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum | | Satpol PP dan WH |
| | | 2. Pelayanan informasi rawan bencana | Reformasi Birokrasi | BPBD |
| | | 3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana | | |
| | | 4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana | | |
| | | 5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran | | |
| 6. | Sosial | 1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti | Pertumbuhan Ekonomi | Dinas Sosial |
| | | 2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti | | |
| | | 3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti | | |
| | | 4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti | | |
| | | 5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana Kabupaten/ kota | | |

*Sumber: Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 dan Hasil Olahan 2023*

Sesuai dengan Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, adanya penambahan indikator pada SPM Pendidikan Dasar yaitu indikator iklim keamanan, indikator Iklim inklusifitas, indikator Iklim Kebinekaan.

Dan untuk menjaga upaya dukung terhadap kebijakan prioritas penyelelnggaraan urusan maka kebijakan yang diambil dalam penentuan prioritas yang telah terintegrasi dengan hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 seperti yang disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 4.7**
**Hasil Rakortekrenbang Urusan Bidang Pendidikan Tahun 2023**

| No | Urusan | Kinerja Urusan | Indikator Kinerja Urusan | Satuan | Target Nasional Tahun 2024 | Target Daerah Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV | % | 63 | 72,74 |
| 2 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B | % | 62 | 65,39 |
| 3 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 53 | 58,47 |
| 4 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional | Nilai | 40 | 44,58 |
| 5 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 54 | 57,41 |
| 6 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional | Nilai | 63 | 66,56 |
| 7 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | klim Inklusivitas SMP | Nilai | 68,84 | 75,04 |
| 8 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Iklim Inklusivitas SD | Nilai | 75,63 | 81,83 |
| 9 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Iklim Kebhinekaan SD | Nilai | 88,47 | 93,45 |
| 10 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Iklim Keamanan SD | Nilai | 85,44 | 92,52 |

| No | Urusan | Kinerja Urusan | Indikator Kinerja Urusan | Satuan | Target Nasional Tahun 2024 | Target Daerah Tahun 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Iklim Kebinekaan SMP | Nilai | 77,33 | 73,83 |
| 12 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Iklim Keamanan SMP | Nilai | 78,72 | 85,4 |
| 13 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS) | Persen tase | 100 | 100 |
| 14 | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS) | Persen tase | 100 | 4,17 |
| | | Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan | Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS) | Persen tase | 9,53 | 100 |

*Sumber : Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023*

## 4.8 Pokok-Pokok Pikiran DPRK Lhokseumawe

Pokok-pokok pikiran DPRK dalam kerangka penyusunan RKPK Tahun 2024 berisi saran dan pendapat DPRK yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMK. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRK dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

### 4.8.1 Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRK

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRK adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe, dalam menyusun dokumen

RKPK Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe 2024;

2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPK;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kota Lhokseumawe dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRK Kota Lhokseumawe; dan
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe yang lebih baik.

### 4.8.2 Rekomendasi DPRK Lhokseumawe untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2024

Rekomendasi DRPK Lhokseumawe yang tertuang dalam Pokok-Pokok Pikiran DPRK serta sejalan dengan tema dan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe 2024 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan
   a. Pengalokasian anggaran untuk fasilitas pendukung Sekolah Dasar di wilayah Kota Lhokseumawe;
   b. Fasilitas pendukung Perpustakaan Kecamatan;

2. Infrastruktur
   a. Pengerasan jalan untuk wilayah yang membutuhkan agar memperlancar akses distribusi;
   b. Pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL) maupun saluran pembuangan air hujan (SPAH);
   c. Bantuan Pembangunan Rumah Layak huni untuk kaum dhuafa;
   d. Pembangunan Talud untuk gampong yang membutuhkan;
   e. Pembangunan Sumur Bor Gampong yang kekerungan Air Bersih
3. Pertumbuhan Ekonomi
   a. Pelatihan dan pembinaan SDM parekraf untuk meningkatkan perekonomian masyarakat;
   b. Pelatihan untuk para pencari kerja;
   c. Pelatihan dan pembinaan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.
   d. Pemberian bibit tanaman, sayur maupun ikan konsumsi dalam mendukung budidaya masyarakat sebagai bentuk peningkatan perekonomian masyarakat;
   e. Pengadaan Alat Bantuan Penangkapan Ikan-Kapal penangkap ikan untuk nelayan;

f. Bantuan modal usaha bagi perorangan maupun kelopk usaha.

4. Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya
   a. Pembangunan sarana dan prasarana dayah/pesantren/balai pengajian;
   b. Perlombaan baca kitab kuning santri;
   c. Pembangunan sarana dan prasarana mesjid;
5. Lingkungan Hidup
   a. Peningkatan dan pengadaan pampu jalan solar cell di Gampong;
   b. Pengadaaan becak pengangkut sampah dan tempat sampah di wilayah Kota Lhokseumawe;
   c. Pemeliharaan dan Pembersihan Sediman Saluran Gampong;

## 4.9 Inovasi Pembangunan Tahun 2023

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, inovasi didefi nisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelengaraan pemerintah daerah melalui konsep *good governance*, Pemerintah Kota Lhokseumawe telah mengembangkan berbagai kreativitas dan inovasi. Inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini telah menjadi sebuah keniscayaan. Pelayanan yang cepat, tepat dan efisien hanya akan dapat dipenuhi dengan kreasi dan terobosan yang inovatif. Data Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe skala kota serta mendukung Prioritas Pembangunan Daerah (PPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2023 terdapat pada Tabel berikut:

**Tabel 4.8**
**Data Inovasi Daerah Pemerintah Kota Lhokseumawe**
**Tahun 2019-2023**

| Prioritas Pembangunan Daerah | Nama Inovasi Daerah | | Uraian Singkat |
|---|---|---|---|
| Inovasi dalam rangka Reformasi Birokrasi (Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik) | 1. | Layanan CAWAPRES (Chat WA Pajak dan Retribusi) | Layanan CAWAPRES merupakan salah satu solusi untuk menjawab isu strategis yang berkaitan dengan tujuan pelayanan online berjalan dengan lancar. Meski Wajib Pajak Daerah sedang berada di luar kota atau tidak berada di lokasi, pelayanan bisa diberikan. Layanan CAWAPRES memudahkan komunikasi dua arah dengan dikelola oleh admin (SDM) menggunakan aplikasi Whatsapp dan kanal QRIS |
| | 2. | SISTEM PERIZINAN DAN LAYANAN ANTAR JEMPUT IZIN (SIPERI WET WET) | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe, dalam hal ini melayani masyarakat melalui pelayanan antar jemput bola untuk pengurusan administrasi perizinan berusaha terutama Nomor Induk Berusah (NIB) pada hari Selasa dan Kamis pada pukul 09.00 wib s.d 12.30 wib dan masyarakat memperoleh edukasi mengenai perizinan berusaha, hal ini dapat memudahkan masyarakat yang tidak sempat datang untuk pengurusan administrasi perizinan. |
| | 3. | WHATSAPP DAN ON CALL | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe telah menerapkan Sistem Online Submission (OSS). Salah satu inovasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe adalah dengan menerapkan Integrasi Layanan OSS antara lain dengan Whatsapp dan On Call, dimana pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan informasi secara langsung terkait perizinan berusaha melalui whatsapp dan On Call langsung |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Nama Inovasi Daerah | | Uraian Singkat |
|---|---|---|---|
| | | | kepada petugas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe. |
| | 4. | PEKAD 3 IN 1 PLUS | Program ini bertujuan meningkatkan capaian kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan layanan yang dikhususkan dokumen kependudukan berupa perubahan kartu keluarga, akta kelahiran dan kartu identitas anak plus akta kematian apabila ada yang meninggal dunia dan bekerjasama dengan pihak rumah sakit yang ada di wilayah Kota Lhokseumawe sehingga mempermudah/mempercepat bagi warga untuk memperoleh dokumen administrasi kependudukan tanpa perlu datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khususnya bagi warga yang melakukan rawat inap di Rumah sakit |
| | 5. | Klinik Pelayanan Perizinan Sistem Online dan Verifikasi Cepat (KLIPPER SINOVAC) | Pelayanan Perizinan ini memberikan dokumen sebagai bukti Legalitas kepada pelaku usaha/kegiatan tertentu. Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menggunakan system pelayanan online. Bagi masyarakat yang sudah bisa menggunakan teknologi informasi pelayanannaya bisa secara online dan ada juga masyarakat dengan cara manual datang kekantornya langsung. |

| Prioritas Pembangunan Daerah | Nama Inovasi Daerah | | Uraian Singkat |
|---|---|---|---|
| | 6. | E-Kinerja Kota Lhokseumawe | Salah satu solusi yang inovatif adalah penggunaan sistem E-kinerja Kota Lhokseumawe berbasis elektronik, Organisasi Perangkat Daerah perlu memamfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi evaluasi kinerja. Sistem e-kinerja merupakan dasar untuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sesuai dengan kinerja yang terdata dan di hitung langsung oleh sistem yang memberi mamfaat bagi Pegawai diLingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe |
| | 7. | Absensi Pegawai Berbasis Aplikasi Presensi Lhokseumawe | BKPSDM berinisiatif untuk merubah tata cara absensi manual ke absensi dengan cara digital sehingga kita bisa mengukur tingkat kehadiran PNS baik itu pada jam masuk maupun jam pulang pegawai, dengan harapan meningkatkan disiplin pegawai. Hal ini juga diharapkan dapat mendorong gairah dan semangat kerja bagi seluruh PNS guna meningkatkan disiplin dan kepatuhan PNS terhadap jam kerja yang telah ditetapkan. |

# BAB V
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KOTA

Rencana kerja dan pendanaan dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan evaluasi pembangunan dan capaian kinerja yang telah dicapai dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2022. Disamping itu, rencana kerja dirumuskan atas aspirasi dan kepentingan masyarakat yang dirangkum dari hasil Musrenbang dan dituangkan ke dalam program, kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang diperoleh dari sistem perencanaan terpadu berbasis elektornik dalam Aplikasi SIPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang mengharuskan terwujudnya integrasi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

Program Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut dirangkum dan disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kueangan Daerah, sehingga memberi manfaat dan memiliki nilai kegunaan yang memadai dalam proses perencanaan pembangunan untuk masyarakat.

Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2024 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kota dalam memberikan perhatian pada upaya peningkatan perekonomian yang diarahkan pada penurunan tingkat kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran terbuka, peningkatan pelayanan dasar, pendidikan,

kesehatan, dan fasilitas umum yang layak. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPK ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPK Lhokseumawe 2023-2026 baik indikator sasaran maupun program. Usulan juga memperhatikan hal-hal strategis sesuai dengan ketugasan Perangkat Daerah masing-masing. Sedangkan usulan pada sub kegiatan dan output sesuai urutan prioritas, yang nantinya juga bisa menjadi dasar pemilihan saat terjadi efisiensi pada output maupun target, ketika ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPK ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2024. Prioritas Program dalam RKPK tahun 2024 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Di sisi lain, dalam RKPK juga memuat mengenai program dan kegiatan dengan pendanaan yang bersumber dari Dana Kekhususan Aceh dengan Program dan Kegiatan Kekhususan Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

**Rekapitulasi Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024**

| No | Urusan | Perangkat Daerah | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1. | Pendidikan | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 171.808.885 |
| | | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 4.160.480.000 |

| No | Urusan | Perangkat Daerah | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2. | Pertanahan | Dinas Pertanahan | 720.577.912 |
| 3. | Kebudayaan | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 235.000.000 |
| 4. | Kewilayahan | Kecamatan Banda Sakti | 10.000.000 |
| | | Kecamatan Blang Mangat | 10.000.000 |
| | | Kecamatan Muara Satu | 10.000.000 |
| | | Kecamatan Muara Dua | 10.000.000 |
| 5. | Kekhususan Aceh | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 615.000.000 |
| | | Sekretariat Baitul Mal | 6.909.400.000 |
| | | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | 1.380.000.000 |
| | | **TOTAL** | **14.232.266.797** |

*Sumber : SIPD-RI, diolah 2023*

Untuk mengetahui rincian usulan program, kegiatan dan sub kegiatan Kekhususan Aceh Tahun 2024 beserta indikasi pendanaan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut.

## Tabel 5.2
## Usulan Program dan Kegiatan Kekhususan Aceh Kota Lhokseumawe Tahun 2024

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran Target Kinerja | Usulan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH | Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh | Penetapan Standar Pendidikan Aceh | 3 Satuan Pendidikan | 52,980,855 |
| | | | Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | 1 Dokumen | 19,999,650 |
| | | | Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah | 75 Orang | 46,828,380 |
| | | | Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | 2 Satuan Pendidikan | 26,000,000 |
| | | | | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh | 3 Satuan Pendidikan | 26,000,000 |
| 2 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH | Pengelolaan Pendidikan Dayah | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah | 40 Unit | 100,000,000 |
| | | | | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah | 4 Unit | 50,000,000 |
| | | | | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | 438 Orang | 3,785,480,000 |
| | | | | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri | 25 Peserta Didik | 50,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran Target Kinerja | Usulan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | Pembinaan Manajemen Dayah | 66 Satuan Pendidikan | 20,000,000 |
| | | | | Penelitian dan Pengembangan Dayah | 20 Satuan Pendidikan | 10,000,000 |
| | | | | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah | 6 Satuan Pendidikan | 15,000,000 |
| | | | | Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah | 20 Buku | 25,000,000 |
| | | | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | 2 Dokumen | 20,000,000 |
| | | | | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren | 20 Satuan Pendidikan | 10,000,000 |
| | | | | Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian | 50 Satuan Pendidikan | 15,000,000 |
| | | | | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 2 Satuan Pendidikan | 50,000,000 |
| | | | | Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah | 2 Dokumen | 10,000,000 |
| | | | | | **JUMLAH USULAN URUSAN PENDIDIKAN** | **4,332,288,885** |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | |
| 1 | Dinas Pertanahan | PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH | Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | 4 Laporan | 15,000,000 |
| | | | | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | 4 Dokumen | 20,000,000 |
| | | PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH | Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah | 5 Laporan | 40,000,000 |
| | | PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN | Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | 5 Dokumen | 40,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran Target Kinerja | Usulan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN | Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan | 5 Dokumen | 25,000,000 |
| | | | | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik | 68 Orang | 25,000,000 |
| | | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN | Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | 4 Dokumen | 490,577,912 |
| | | | | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | 4 Dokumen | 25,000,000 |
| | | PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN | Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 40,000,000 |
| | | | | | **JUMLAH USULAN URUSAN PERTANAHAN** | **720,577,912** |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | |
| 1 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA) | Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | 1 Laporan | 75,000,000 |
| | | | | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | 2 Lembaga | 55,000,000 |
| | | | | Sosialisasi Adat Istiadat | 1 Orang | 30,000,000 |
| | | | | Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang | 2 Dokumen | 20,000,000 |
| | | | Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat | Penguatan Peradilan Adat | 50 Orang | 30,000,000 |
| | | | Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat | 50 Orang | 25,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran Target Kinerja | Usulan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | | **JUMLAH USULAN URUSAN KEBUDAYAAN** | **235,000,000** |
| | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | |
| 1 | Kecamatan Banda Sakti | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 12 Orang | 10,000,000 |
| | | | | | | |
| 2 | Kecamatan Blang Mangat | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 168 Orang | 10,000,000 |
| | | | | | | |
| 3 | Kecamatan Muara Satu | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 12 Bulan | 10,000,000 |
| | | | | | | |
| 4 | Kecamatan Muara Dua | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Pemberdayaan Mukim | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | 6 Orang | 10,000,000 |
| | | | | | **JUMLAH USULAN UNSUR KEWILAYAHAN** | **40,000,000** |
| | **UNSUR KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | |
| 1 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH | Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama | Pendidikan Kader Ulama | 50 Orang | 515,000,000 |
| | | | | Muzakarah Masalah Keagamaan | 3 Laporan | 50,000,000 |
| | | | | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | 2 Laporan | 25,000,000 |
| | | | | Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah | 30 Orang | 25,000,000 |
| 2 | Sekretariat Baitul Mal | PROGRAM BAITUL MAL | Pengelolaan ZISWAF | Penyusunan Perencanaan ZISWAF | 1 Dokumen | 10,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran Target Kinerja | Usulan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF | 2 Orang | 10,000,000 |
| | | | | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | 2 Dokumen | 5,000,000 |
| | | | | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | 1 Dokumen | 20,000,000 |
| | | | Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | 1985 Orang | 2,040,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | 1349 Orang | 2,249,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | 118 Orang | 670,400,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | 15 Orang | 45,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | 6 Orang | 15,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | 50 Orang | 60,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | 235 Orang | 285,000,000 |
| | | | | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | 326 Orang | 1,500,000,000 |
| 3 | Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah | PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH | Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam | Pelatihan Mawaris | 55 Orang | 20,000,000 |
| | | | | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam | 80 Orang | 35,000,000 |
| | | | | Seminar Problematika Syariat Islam | 40 Orang | 25,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran Target Kinerja | Usulan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat | 60 Orang | 30,000,000 |
| | | | | Pelaksanaan MTQ | 216 Orang | 250,000,000 |
| | | | Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | 1 Dokumen | 50,000,000 |
| | | | | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan | 52 Orang | 25,000,000 |
| | | | | Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan | 3 Orang | 15,000,000 |
| | | | | Pelatihan Takmir Mesjid | 52 Orang | 25,000,000 |
| | | | | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam | 36 Orang | 50,000,000 |
| | | | | Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | 101 Unit | 100,000,000 |
| | | | | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama | 13 unit | 100,000,000 |
| | | | Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman | 1 Laporan | 25,000,000 |
| | | | | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | 100 Orang | 35,000,000 |
| | | | | Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla | 95 Orang | 250,000,000 |
| | | | Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | 6 Laporan | 150,000,000 |

| No | Perangkat Daerah | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Keluaran Target Kinerja | Usulan Anggaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| | | | | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah | 300 Orang | 150,000,000 |
| | | | Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah | 2 Lembaga | 45,000,000 |
| | **JUMLAH USULAN UNSUR KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | **8,904,400,000** |
| | | | | | | |
| | **TOTAL USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN KEKHUSUSAN ACEH TAHUN 2024** | | | | | **14,232,266,797** |

Rencana program tahun 2024 pada Bab V disusun berdasarkan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sebagaimana dijabarkan pada Bab IV, sedangkan uraian rencana program/kegiatan/sub kegiatan tahun 2024 disusun berdasarkan urusan yang ditangani oleh masing-masing Perangkat Daerah, maka diperlukan sinkronisasi antara pembagian rencana program per prioritas pembangunan dengan pembagian rencana program/kegiatan/sub kegiatan per Perangkat Daerah. Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 tahun kedua, di mana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja selama 4 (empat) tahun. Program prioritas pembangunan daerah dalam RPK Lhokseumawe dijabarkan oleh Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah, masing-masing program dijabarkan kedalam kegiatan disertai pagu dan target kinerja.

**Tabel 5.3**

**Rekapitulasi Pagu Anggaran Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Pendukung Prioritas Pembangunan Kota Lhokseumawe**

| No | Prioritas Pembangunan | Pagu Anggaran | Persen |
|---|---|---|---|
| 1 | Reformasi Birokrasi | 321.872.600.360 | 42,29 |
| 2 | Pendidikan | 184.991.858.711 | 24.41 |
| 3 | Pertumbuhan Ekonomi | 27.567.129.797 | 3.64 |
| 4 | Kesehatan | 120.093.526.112 | 15.85 |
| 5 | Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya | 23.761.096.484 | 3.14 |
| 6 | Infrastruktur | 51.781.011.277 | 6.83 |
| 7 | Lingkungan Hidup | 30.998.964.040 | 4.09 |
| | Total | 761.066.186.781 | 100 |

*Sumber: Data diolah 2023*

Untuk lebih jelas program prioritas pembangunan untuk Prioritas Reformasi Birokrasi berserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.4**

**Program Prioritas Reformasi Birokrasi Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Pelayanan Publik | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4,885,035,892 | BPBD |
| | | Program Penanggulangan Bencana | 605,000,000 | BPBD |
| | | Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | 225,000,000 | BPBD |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 6,270,644,745 | Satpol PP dan WH |
| | | Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 2,826,450,000 | Satpol PP dan WH |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,627,214,730 | DP3AP2KB |
| | | Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan | 44,998,755 | DP3AP2KB |
| | | Program Perlindungan Perempuan | 254,198,820 | DP3AP2KB |
| | | Program Peningkatan Kualitas Keluarga | 30,001,795 | DP3AP2KB |
| | | Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak | 19,999,895 | DP3AP2KB |
| | | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) | 134,999,680 | DP3AP2KB |
| | | Program Perlindungan Khusus Anak | 371,795,330 | DP3AP2KB |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,221,099,040 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Penatagunaan Tanah | 35,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengurusan Hak Hak Atas Tanah | 40,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan | 40,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan | 50,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan | 515,577,912 | Dinas Pertanahan |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan | 40,000,000 | Dinas Pertanahan |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,204,242,560 | Disdukcapil |
| | | Program Pendaftaran Penduduk | 441.199.067 | Disdukcapil |
| | | Program Pencatatan Sipil | 100,000,000 | Disdukcapil |
| | | Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | 290,000,000 | Disdukcapil |
| | | Program Pengelolaan Profil Kependudukan | 10,000,000 | Disdukcapil |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,632,880,480 | DPMG |
| | | Program Administrasi Pemerintahan Desa | 223,880,221 | DPMG |
| | | Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 214.000.000 | DPMG |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,864,596,952 | Diskominfo |
| | | Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik | 30,000,000 | Diskominfo |
| | | Program Pengelolaan Aplikasi Informatika | 553,000,000 | Diskominfo |
| | | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 20,000,000 | Diskominfo |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3,089,795,000 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan | 225,000,000 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan | 2,141,730,502 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan | 50,000,000 | Disporapar |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,577,617,459 | Dispursip |
| | | Program Pembinaan Perpustakaan | 285,000,000 | Dispursip |
| | | Program Pengelolaan Arsip | 30,000,000 | Dispursip |
| | **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 29,278,018,212 | Setdako |
| | | Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat | 1,542,912,000 | Setdako |
| | | Program Perekonomian Dan Pembangunan | 557,000,000 | Setdako |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | **Meningkatnya Pelayanan Publik** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 18,841,216,907 | Setwan |
| | | Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD | 5,200,978,570 | Setwan |
| | **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5,640,310,217 | Bappeda |
| | | Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah | 1,266,495,336 | Bappeda |
| | | Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 589,457,075 | Bappeda |
| | | Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah | 550,000,000 | Bappeda |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 14,717,502,552 | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 112.975.795.900 | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Barang Milik Daerah | 3,727,728,521 | BPKD |
| | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1,130,000,000 | BPKD |
| | **Meningkatnya Pelayanan Publik** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 38,010,081,110 | BKPSDM |
| | | Program Kepegawaian Daerah | 1,676,314,530 | BKPSDM |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia | 1,905,759,400 | BKPSDM |
| | **Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7,265,505,900 | Inspektorat |
| | | Program Penyelenggaraan Pengawasan | 2,410,748,722 | Inspektorat |
| | | Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi | 499,240,205 | Inspektorat |
| | **Meningkatnya Pelayanan Publik** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,600,017,638 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 145,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 50,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 20,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 20,000,000 | Kecamatan Banda Sakti |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,061,189,681 | Kecamatan Blang Mangat |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik | 10,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 145,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 10,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 20,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 20,000,000 | Kecamatan Blang Mangat |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,998,855,362 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 145,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 15,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 25,000,000 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 27,910,520 | Kecamatan Muara Satu |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,275,052,450 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan | 150,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum | 10,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 25,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 20,000,000 | Kecamatan Muara Dua |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,685,164,757 | Kesbangpol |
| | | Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 570,000,000 | Kesbangpol |
| | | Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik | 19,057,202,017 | Kesbangpol |
| | | Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 150,000,000 | Kesbangpol |
| | | Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya | 50,000,000 | Kesbangpol |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 562,183,943 | Kesbangpol |
| | | **Total** | **321.872.600.360** | **42.29** |

*Sumber: Data diolah 2023*

Selanjutnya program prioritas pembangunan untuk Prioritas Pendidikan berserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.5**

**Program Prioritas Pendidikan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| Pendidikan | Meningkatnya kualitas pendidikan | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1,641,932,662 | Sekretariat MPD |
| | | Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh | 171,808,885 | Sekretariat MPD |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 125,481,239,629 | Dinas PK |
| | | Program Pengelolaan Pendidikan | 57,446,684,335 | Dinas PK |
| | | Program Pengembangan Kurikulum | 190,176,400 | Dinas PK |
| | | Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan | 30,016,800 | Dinas PK |
| | | Program Pengendalian Perizinan Pendidikan | 30,000,000 | Dinas PK |
| | | **Total** | **184.991.858.711** | **24.41** |

*Sumber: Data diolah 2023*

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Pertumbuhan Ekonomi berserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.6**

**Program Prioritas Pertumbuhan Ekonomi**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| Pertumbuhan Ekonomi | Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2,975,334,640 | Dinas Sosial |
| | | Program Pemberdayaan Sosial | 275,000,000 | Dinas Sosial |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Program Rehabilitasi Sosial | 1,120,000,000 | Dinas Sosial |
| | | Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial | 50,000,000 | Dinas Sosial |
| | | Program Penanganan Bencana | 25,000,000 | Dinas Sosial |
| | | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 40,000,000 | Dinas Sosial |
| | **Meningkatnya Kesempatan Kerja** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.131.825.140 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja | 75.000.000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Penempatan Tenaga Kerja | 16.025.000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Hubungan Industrial | 40.000.000 | DMPTSP dan Naker |
| | **Meningkatnya jumlah dan nilai investasi** | Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 27.000.000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Promosi Penanaman Modal | 30.000.000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pelayanan Penanaman Modal | 115.000.000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 478,200,000 | DMPTSP dan Naker |
| | | Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 8.000.000 | DMPTSP dan Naker |
| | **Meningkatnya Daya Saing Daerah** | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7.098.489.803 | DKPPP |
| | | Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 160.000.000 | DKPPP |
| | | Program Penanganan Kerawanan Pangan | 10.000.000 | DKPPP |
| | | Program Pengawasan Keamanan Pangan | 30.000.000 | DKPPP |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.980.610.214 | Disperindagkop |
| | | Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi | 25.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi | 10.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) | 225.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Pengembangan UMKM | 571.370.000 | Disperindagkop |
| | | Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata | 30.000.000 | Disporapar |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Program Pemasaran Pariwisata | 70.000.000 | Disporapar |
| | | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif | 100.000.000 | Disporapar |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | 150.000.000 | DKPPP |
| | | Program Pengelolaan Perikanan Budidaya | 305.000.000 | DKPPP |
| | | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan | 50.000.000 | DKPPP |
| | | Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan | 130.000.000 | DKPPP |
| | | Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | 830.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | 1.115.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Pengembangan Ekspor | 365.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen | 160.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri | 254.000.000 | Disperindagkop |
| | | Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional | 25.000.000 | Disperindagkop |
| | | **TOTAL** | **27.567.129.797** | **3.64** |

*Sumber: Data diolah 2023*

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Kesehatan berserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.7**

**Program Prioritas Kesehatan**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| Kesehatan | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 64,063,011,561 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 53,141,736,941 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 60,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman | 99,000,000 | Dinas Kesehatan |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 45,000,000 | Dinas Kesehatan |
| | | Program Pengendalian Penduduk | 30,000,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Pembinaan Keluarga Berencana | 1,452,878,000 | DP3AP2KB |
| | | Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) | 1,201,899,610 | DP3AP2KB |
| | | **Total** | **120.093.526.112** | **15.85** |

*Sumber: Data diolah 2023*

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya berserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.8**

**Program Prioritas Memperkuat Pelaksanaan Syariat Islam dan Budaya Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Pendidikan Dayah | 4.160.480.000 | DSIPD |
| | Meningkatnya Pemahaman dan Penghayatan masyarakat terhadap nilai Budaya | Program Pengembangan Kebudayaan | 900.000.000 | Dinas PK |
| | | Program Pengembangan Kesenian Tradisional | 50.000.000 | Dinas PK |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.262.654.300 | Sekretariat MAA |
| | | Program Majelis Adat Aceh (MAA) | 235.000.000 | Sekretariat MAA |
| | Menguatnya Penegakan Syariat Islam Dalam Bermasyarakat | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 2.950.727.830 | Sekretariat MPU |
| | | Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh | 615.000.000 | Sekretariat MPU |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1.680.392.446 | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Baitul Mal | 6.909.400.000 | Sekretariat Baitul Mal |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 3.617.441.908 | DSIPD |
| | | Program Syariat Islam Aceh | 1.380.000.000 | DSIPD |
| | | **Total** | **23.761.096.484** | **3.14** |

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Infrastruktur berserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.9**

**Program Prioritas Infrastruktur**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| Infrastruktur | Meningkatnya Infrastruktur kota berkualitas | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 5.861.929.720 | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 2.966.721.017 | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 10.456.583.000 | Dinas PUPR |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase | 3.174.536.000 | Dinas PUPR |
| | | Program Penataan Bangunan Gedung | 2.500.000.000 | Dinas PUPR |
| | | Program Penyelenggaraan Jalan | 17.032.041.994 | Dinas PUPR |
| | | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | 160.000.000 | Dinas PUPR |
| | | Program Kawasan Permukiman | 1.850.000.000 | Dinas PUPR |
| | | Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) | 700.000.000 | Dinas PUPR |
| | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 4.794.199.546 | DISHUB |
| | | Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) | 2.285.000.000 | DISHUB |
| | | **Total** | **51.781.011.277** | **6.83** |

*Sumber: Data diolah 2023*

Program prioritas pembangunan untuk Prioritas Lingkungan Hidup berserta Perangkat Daerah dan Pagu Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.10**

**Program Prioritas Lingkungan Hidup**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| Lingkungan Hidup | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 25.468.186.000 | DLH |

| Prioritas | Sasaran | Program | Pagu Indikatif | Perangkat Daerah |
|---|---|---|---|---|
| | | Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 20.000.000 | DLH |
| | | Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah | 1.080.000.000 | DLH |
| | | Program Pengelolaan Persampahan | 4.350.778.040 | DLH |
| | | **Total** | **30.998.964.040** | **4.09** |

*Sumber: Data diolah 2023*

Program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah tahun 2024 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang disusun menggunakan matrik program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah yang diperoleh dari sistem perencanaan terpadu berbasis elektornik dalam Aplikasi SIPD, memuat informasi mengenai:

1. Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan.
2. Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
3. Nama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan;
4. Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
5. Target Kinerja Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan;
6. Lokasi Kegiatan;
7. Besaran dana yang dibutuhkan;
8. Sumber dana;
9. Sinergitas terhadap Prioritas Nasional dan Daerah;
10. Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025;
11. Perangkat Daerah Penanggung Jawab.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaaan Kota Lhokseumawe dituangkan dalam dalam bentuk Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang disajikan dalam tabel 5.11 berikut ini:

**Tabel 5.11**

**Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Berdasarkan Perangkat Daerah Tahun 2024**

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Program | Jumlah Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|
| 1 | Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah | 2 | 1.813.741.547 |
| 2 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | 7 | 184.128.117.164 |
| 3 | Dinas Kesehatan | 5 | 117.408.748.502 |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 9 | 44.701.811.731 |
| 5 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 3 | 5.715.035.892 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah | 2 | 9.097.094.745 |
| 7 | Dinas Sosial | 6 | 4.485.334.640 |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian | 10 | 7.167.986.615 |
| 9 | Dinas Pertanahan | 7 | 3.941.676.952 |
| 10 | Dinas Lingkungan Hidup | 5 | 30.998.964.040 |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 5 | 4.045.441.627 |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong | 3 | 3.070.760.701 |
| 13 | Dinas Perhubungan | 2 | 7.079.199.546 |
| 14 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian | 4 | 2.467.596.952 |
| 15 | Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja | 9 | 5.921.050.141 |
| 16 | Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | 7 | 5.706.525.502 |
| 17 | Sekretariat Majelis Adat Aceh | 2 | 1.497.654.300 |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 3 | 2.892.617.459 |
| 19 | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan | 13 | 9.399.064.803 |
| 20 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | 11 | 7.561.680.213 |
| 21 | Sekretariat Daerah | 3 | 31.377.930.212 |
| 22 | Sekretariat DPRK | 2 | 24.042.195.477 |
| 23 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 4 | 8.046.262.628 |

| No | Perangkat Daerah | Jumlah Program | Jumlah Pagu Indikatif |
|---|---|---|---|
| 24 | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah | 4 | 132.551.026.973 |
| 25 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 3 | 41.592.155.040 |
| 26 | Inspektorat | 3 | 10.175.494.827 |
| 27 | Kecamatan Banda Sakti | 5 | 2.835.017.638 |
| 28 | Kecamatan Blang Mangat | 6 | 2.266.189.681 |
| 29 | Kecamatan Muara Satu | 5 | 2.211.765.882 |
| 30 | Kecamatan Muara Dua | 5 | 2.480.052.450 |
| 31 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 6 | 23.074.550.717 |
| 32 | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama | 2 | 3.565.727.830 |
| 33 | Sekretariat Baitul Mal | 2 | 8.589.792.446 |
| 34 | Dinas Syariat Islam dan | 3 | 9.157.921.908 |
| Jumlah Total | | 168 | 761.066.186.781 |

*Sumber: SIPD-RI, diolah 2023*

Penjelasan lebih rinci terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 5.12 yang dapat dilihat pada Buku 2 (dua) RKPK Lhokseumawe tahun 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran ini.

# BAB VI
# KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6.1**
**Target Indikator Kinerja Utama (IKU)**
**Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2024**

| No. | Indikator Kinerja Utama | Satuan | Kondisi Awal Tahun 2021 | Target 2023 | Target 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Indeks reformasi birokrasi | Kategori/ Point | CC/ 49.50 | CC/ 50.00 | CC/ 50.50 |
| 2. | Nilai LPPD Kota | Kategori/ Point | Tinggi 3,4290 | Tinggi 3,430 | Sangat Tinggi 4,20 |
| 3. | Nilai Evaluasi SAKIP | Kategori/ Poin | CC 55.50 | B 60.00 | B 60.50 |
| 4. | Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah | Opini | WTP | WTP | WTP |
| 5. | Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai "IKM" yang Baik | Kategori/ Poin | B 82.52 | A 88.31 | A 88.81 |
| 6. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Indeks | 77.57 | 77.62 | 78.90 |
| 7. | Harapan lama sekolah | Tahun | 15.21 | 15.22 | 15.23 |
| 8. | Angka kelulusan | Persen | 99.01 | 100 | 100 |
| 9. | Persentase organisasi pemuda yang aktif | Persen | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Usia Harapan Hidup | Tahun | 71.64 | 71.66 | 71.68 |
| 11. | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Persen | 63.7 | 64.9 | 65.35 |
| 12. | Persentase RTH Publik | Persen | 1.62 | 1.67 | 2.49 |
| 13. | Persentase pertumbuhan ekonomi | Persen | 1.98 | 3.50 | 4.11 |
| 14. | Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) | Rp. Miliar | 3.403 | 3.471 | 3.541 |
| 15. | Jumlah Investor (PMDN/ PMA) | Perusahaan | 432 | 452 | 472 |
| 16. | Tingkat kemiskinan | Persen | 11.16 | 11.10 | 10.74 |
| 17. | Tingkat Pengangguran Terbuka | Persen | 11.16 | 11.12 | 9.05 |
| 18. | PDRB Perkapita | Rp. (Juta) | 33.20 | 33.35 | 33.38 |
| 19. | Laju Inflasi | Persen | 1.97 | 2.30 | 2.10 |
| 20. | Cakupan ketersediaan infrastruktur berkualitas | Persen | 32.74 | 34.32 | 35.98 |
| 21. | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | 65.05 | 68.26 | 71.64 |
| 22. | Persentase lingkungan permukiman kumuh | Persen | 0.43 | 0.38 | 0.32 |
| 23. | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Persen | 47.80 | 54.47 | 61.13 |
| 24. | Rasio Fasilitas Keselamatan Jalan | Rasio | 0.50 | 0.25 | 0.38 |

*Sumber : RPK Lhokseumawe 2023-2026*

Selain penetapan Indikator Kinerja Utama, ditetapkan pula Indikator Kinerja Daerah sebagai alat ukur kuantitatif untuk

mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Penetapan indikator kinerja daerah disusun berdasarkan penetapan kinerja pada aspek kesejahteraan, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketenteraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan yang terkait dengan kependudukan, ketenagakerjaan, dan gender. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah yang mencakup fokus pelayanan urusan wajib dasar, urusan wajib nondasar, serta urusan pilihan. Target capaian indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 6.2**
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kota Lhokseumawe Tahun 2024**

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| I | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| 1 | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Sekolah yang Menerapkan Asessment Kompetensi Minimum (AKM) | Persen | 75.21 | 83.76 |
| | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Angka Partisipasi Kasar | Persen | 98.00 | 98.40 |
| 3 | Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan | Persen | 100 | 100.00 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4 | Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan | Persen | 89.47 | 90.00 |
| 5 | Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | |
| 1 | Persentase Dayah dengan Type A | Dayah | 8.11 | 7.89 |
| | | | | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat | Persen | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan | Persen | 3.20 | 4.14 |
| 4 | Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan | Persen | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persen | 70.73 | 83.44 |
| | | | | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase tidak terjadi genangan > 2 kali setahun | Persen | 81.38 | 70.42 |
| 3 | Persentase penduduk berakses air minum | Persen | 21.31 | 22.18 |
| 4 | Persentase rumah tinggal bersanitasi | Persen | 69.61 | 71.86 |
| 5 | Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat | Persen | 71.64 | 74.85 |
| 6 | Persentase penataan bangunan gedung | Persen | 4.00 | 7.69 |
| 7 | Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap | Persen | 68.26 | 71.64 |
| 8 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Persen | 54.47 | 61.13 |
| | | | | |
| **4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | |
| 1 | Persentase Ketersediaan rumah layak huni | Persen | 69.38 | 69.38 |
| 2 | Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | Persen | 0.38 | 0.32 |
| 3 | Rasio PSU dalam kondisi baik | Rasio | 0.093 | 0.117 |
| | | | | |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Penanggulangan Bencana | Persen | 100 | 100 |
| 3 | Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **6** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | |
| 4 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **7** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu | Persen | 73.09 | 74.92 |
| 3 | Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial | Persen | 100 | 100 |
| 4 | Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persen | 40.76 | 43.76 |
| 5 | Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat | Persen | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **II** | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | |
| | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan | Persen | 13.33 | 14.29 |
| 3 | Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan | Persen | 54.17 | 53.57 |
| 4 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender | Persen | 59.39 | 62.02 |
| 3 | Cakupan Perlindungan Perempuan dan Anak | Persen | 75.00 | 87.50 |
| 4 | Persentase Pembinaan Kelompok Perempuan | Persen | 91.67 | 92.41 |
| 5 | Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA | Persen | 29.41 | 32.35 |
| 6 | Cakupan Pemenuhan Hak Anak | Persen | 33.46 | 37.18 |
| 7 | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Ketersediaan Pangan Utama | Persen | 39.65 | 41.38 |
| 3 | Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan | Persen | 44.44 | 55.56 |
| 4 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar | Persen | 45.45 | 63.64 |
| | | | | |
| **4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Santunan Persertifikatan | Persen | 66.67 | 80.00 |
| 3 | Persentase Penanganan Tanah Kosong | Persen | 15.00 | 20.00 |
| 4 | Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah | Persen | 0.55 | 0.59 |
| 5 | Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat | Persen | 44.87 | 45.64 |
| 6 | Persentase Tanah yang Dipetakan | Persen | 66.21 | 67.80 |
| 7 | Persentase Pembinaan SDM Pertanahan | Persen | 43.86 | 52.63 |
| 8 | Persentase Pemanfaatan Lahan Wilayah Pesisir dan Sempadan Pantai | Persen | 54.17 | 58.33 |
| 9 | Ketersediaan Sistem Informasi Pertanahan | Ada/Tidak | Tidak | Tidak |
| 10 | Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan | Persen | 66.67 | 60 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| **5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Tersusunya RPPLH Kab/Kota | Ada/Tidak | Ada | Ada |
| 3 | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | Nilai | 64.9 | 65.35 |
| 4 | Persentase luasan taman | Persen | 48.97 | 61.95 |
| 5 | Persentase penanganan limbah B3 | persen | 80.00 | 85.00 |
| 6 | Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten / Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten / kota. | persen | 80.00 | 85.00 |
| 7 | Persentase aparatur desa yang terlatih | Persen | 7.35 | 7.35 |
| 8 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Ada/Tidak | Ada | Ada |
| 9 | Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup | Persen | 100 | 100 |
| 10 | Persentase jumlah sampah yang ditangani | Persen | 87.60 | 89.73 |
| | | | | |
| **6** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Persen | 66.16 | 71.18 |
| 3 | Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil | Persen | 86.42 | 87.77 |
| 4 | Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Persen | 100 | 100 |
| 5 | Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan | Ada/Tidak | Ada | Ada |
| | | | | |
| **7** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik | Persen | 95.59 | 95.59 |
| 3 | Persentase Kerjasama Gampong | Persen | 51.47 | 67.65 |
| 4 | Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong | Persen | 67.13 | 74.49 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan | Persen | 81.25 | 86.03 |
| | | | | |
| **8** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB | Persen | 55.88 | 64.71 |
| 2 | Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana | Persen | 52.28 | 51.61 |
| 3 | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Persen | 97.43 | 104.78 |
| | | | | |
| **9** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Kualitas Layanan Transportasi | Persen | 29.17 | 52.08 |
| 3 | Ketersediaan Pelabuhan Laut | Ada / Tidak | Tidak | Tidak |
| | | | | |
| **10** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Penyebaran Informasi Publik | Persen | 26.25 | 23.68 |
| 3 | Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi | Persen | 5.88 | 11.76 |
| | | | | |
| **11** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Koperasi yang memiliki USP | Persen | 0.94 | 0.93 |
| 3 | Persentase Koperasi Mandiri | Persen | 79.72 | 76.89 |
| 4 | Persentase Koperasi yang Sehat | Persen | 5.66 | 6.48 |
| 5 | Persentase Fasilitasi UMKM | Persen | 23.20 | 24.89 |
| 6 | Persentase Pengembangan UMKM | Persen | 6.72 | 7.31 |
| | | | | |
| **12** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | |
| 1 | Persentase Kemudahan Penanaman Modal | Persen | 33.33 | 40.00 |
| 2 | Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal | Persen | 20.00 | 20.00 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan | Indeks | 87.34 | 87.66 |
| 4 | Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi | Indeks | 77.75 | 76.83 |
| 5 | Ketersediaan Database Perizinan | Ada/Tidak | Ada | Ada |
| | | | | |
| **13** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif | Persen | 100 | 100 |
| 3 | Jumlah prestasi olahraga | Cabor | 6 | 6 |
| 4 | Pembinaan Pramuka | Persen | 42.86 | 42.86 |
| | | | | |
| **14** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | |
| 1 | Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi | Persen | 5.88 | 8.82 |
| | | | | |
| **15** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | |
| 1 | Persentase kegiatan pengembangan budaya | Persen | 53.85 | 61.54 |
| 2 | Persentase pembinaan sanggar seni | Persen | 3.45 | 3.45 |
| 3 | Persentase objek sejarah | Persen | 50.00 | 56.25 |
| 4 | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan | Persen | 50.00 | 59.09 |
| | | | | |
| **16** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Fasilitasi sengketa adat | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **17** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pembinaan Perpustakaan | Persen | 6.85 | 9.02 |
| | | | | |
| **18** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | |
| 1 | Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar | Persen | 7.41 | 10.91 |
| 2 | Persentase Penyelamatan Arsip | Persen | 18.18 | 25.00 |
| | | | | |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **III** | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | |
| | | | | |
| **1** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | |
| 1 | Cakupan bina kelompok nelayan | Persen | 45.41 | 47.47 |
| 2 | Cakupan bina kelompok pembudidaya | Persen | 46.52 | 49.83 |
| 3 | Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan | Persen | 44.17 | 46.67 |
| 4 | Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **2** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | |
| 1 | Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata | Persen | 40.00 | 60.00 |
| 2 | Peningkatkan Kunjungan Wisata | Persen | 95.00 | 96.88 |
| 3 | Persentase Pembinaan SDM Pariwisata | Persen | 100.00 | 100.00 |
| | | | | |
| **3** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | |
| 1 | Cakupan Sarana Kelompok Tani | Persen | 25.57 | 33.46 |
| 2 | Cakupan Prasarana Kelompok Tani | Persen | 26.10 | 34.51 |
| 3 | Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier | Persen | 39.87 | 42.00 |
| 4 | Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Persen | 46.07 | 50.37 |
| 5 | Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani | Persen | 38.88 | 40.93 |
| | | | | |
| **4** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | |
| 1 | Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan | Persen | 0.44 | 0.22 |
| 2 | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persen | 59.97 | 60.01 |
| 3 | Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang | Persen | 50.00 | 75.00 |
| 4 | Persentase Tera Tera Ulang UTTP | Persen | 71.25 | 71.35 |
| | | | | |
| **5** | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | |
| 1 | Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah | Persen | 4.95 | 5.27 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Persentase IKM yang memiliki Izin | Persen | 4.74 | 5.00 |
| 3 | Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan | Ada/Tidak | Ada | Ada |
| | | | | |
| **IV** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| | | | | |
| **1** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat | Persen | 98.70 | 98.70 |
| 3 | Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Persen | 97.00 | 97.00 |
| | | | | |
| **2** | **SEKRETARIAT DPRD** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan | Persen | 70.00 | 72.73 |
| | | | | |
| **V** | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| | | | | |
| **1** | **PERENCANAAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada | Ada/Tidak | Ada | Ada |
| 3 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **2** | **KEUANGAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Penetapan APBD Tepat Waktu | Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu | Tepat Waktu | Tepat Waktu |
| 3 | Opini BPK | Opini | WTP | WTP |
| 4 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Persen | 100.00 | 100.00 |
| 5 | Persentase penerimaaan PAD | Persen | 100 | 100 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| **3** | **KEPEGAWAIAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian | Persen | 52.19 | 53.10 |
| | | | | |
| **4** | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | |
| 1 | Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural | Persen | 9.36 | 9.75 |
| | | | | |
| **5** | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | |
| 1 | Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan | Persen | 85.71 | 75.00 |
| | | | | |
| **VI** | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | |
| | | | | |
| **1** | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan | Persen | 80.02 | 81.43 |
| 3 | Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi | Point / Kategori | CC 50.10 | CC 50.50 |
| 4 | Level Kapabilitas APIP | Level | Level 3 | Level 3 |
| 5 | Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe | Level/Point | Level 3 3.2 | Level 3 3.2 |
| | | | | |
| **VII** | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | |
| | | | | |
| **1** | **KECAMATAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 33.33 | 44.44 |
| 3 | Persentase Penertiban | Persen | 100 | 100 |
| 4 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 |
| **2** | **KECAMATAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Peningkatan Fasilitas Publik | Persen | 40 | 60 |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 86.36 | 86.36 |
| 4 | Persentase Penertiban | Persen | 80.00 | 80.00 |
| 5 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 22.73 | 22.73 |
| 6 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 |
| **3** | **KECAMATAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 100 | 100 |
| 3 | Persentase Penertiban | Persen | 42.86 | 50.00 |
| 4 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 100 | 100 |
| 5 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 |
| **4** | **KECAMATAN** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase pembinaan PKK Gampong | Persen | 17.65 | 17.65 |
| 3 | Persentase Penertiban | Persen | 23.53 | 23.53 |
| 4 | Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam | Persen | 17.65 | 17.65 |
| 5 | Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |
| **VIII** | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | |
| | | | | |
| **1** | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan | Persen | 1.44 | 1.91 |
| 3 | Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik | Rasio | 78.76 | 79.95 |
| 4 | Persentase Pembinaan Ormas | Persen | 15.00 | 18.75 |
| 5 | Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama | Persen | 1.46 | 2.65 |
| 6 | Persentase konflik sosial yang tertangani | Persen | 100 | 100 |
| | | | | |

| No. | Bidang Urusan Pemerintahan / Indikator KinerjaPembangunan Daerah | Satuan | Target Kinerja | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **IX** | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | |
| | | | | |
| **1** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Persentase Fatwa yang tersebarluaskan | Persen | 71.43 | 71.43 |
| | | | | |
| **2** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan | Rasio | 0.99 | 0.99 |
| | | | | |
| **3** | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | |
| 1 | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | Persen | 100 | 100 |
| 2 | Cakupan Pembinaan Syariat Islam | Persen | 48.50 | 53.88 |

*Sumber : RPK Lhokseumawe 2023-2026*

# BAB VII

# PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai wujud pelaksanaan Tahun Kedua Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026, yang disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota (RPJPK) Lhokseumawe Tahun 2005-2025, dan disesuaikan dengan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 juga diselaraskan dengan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe merupakan bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan antar tingkat pemerintah. Setelah ditetapkan, Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Rancangan Kebijakan Umum dan Anggaran (RKUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta rancangan APBK Tahun 2024. Selain itu, Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Walikota tentang RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Kota Lhokseumawe mengajak kepada seluruh pemangku

kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024, demi mewujudkan Visi RPJPD Kota Lhokseumawe Bersyariat, Sehat, Cerdas, dan Sejahtera.

**Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE**

**IMRAN**

PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377
BANDA ACEH 23144

Nomor : 180/ 9837
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : ***Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024.***----------

Banda Aceh, 6 Juli 2023
17 Dzulhijjah1444

**Yang Terhormat,**
**Pj. Walikota Lhokseumawe**
**di –**
**Lhokseumawe**

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/2045, tanggal 3 Juli 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe Tahun 2023, bahwa terhadap Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024, telah difasilitasi dan dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:
   a. Judul Rancangan, Konsiderans Menimbang huruf d, Konsiderans Menetapkan agar disinkronkan kembali, dan disesuaikan pula dalam batang tubuh rancangan Peraturan Walikota ini;
   b. Terhadap Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dapat ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan, apabila telah disesuaikan dengan Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024, sesuai surat Bappeda Aceh Nomor 050/1075 tanggal 3 Juli 2023.
2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan rancangan peraturan walikota dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
SEKRETARIS DAERAH,

PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

**BUSTAMI, SE, M.Si**
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19670722 199603 1 002

**Tembusan:**
1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Lhokseumawe .....

*D:\ELIN DATA BAGIAN BINWAS\2023\SURAT HASIL\PERBUP PERWAL\KOTA LHOKSEUMAWE\Rencana Kerja Pemko LSM Th 2024.docx*

**PEMERINTAH ACEH**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
Jalan Tgk. H. Mohd. Daud Beureu-eh No. 26 Telp. (0651) 21440 (Hunting), Fax. 33654, email : bappeda@acehprov.go.id
BANDA ACEH - 23121

Banda Aceh, 03 Juli 2023
14 Dzulhijjah 1444

Nomor : 050 / 1075
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
H a l : **Hasil Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024.---------**

Yang Terhormat,

**Walikota Lhokseumawe**

di -

**Lhokseumawe**

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Aceh Nomor 050/7528 tanggal 22 Mei 2023 perihal Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan surat Saudara Nomor 050/1997 tanggal 26 Juni 2023 perihal Permohonan Jadwal Fasilitasi Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Bappeda Aceh telah melaksanakan Rapat Fasilitasi Rancangan Perkada RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 pada tanggal 27 Juni 2023 yang dihadiri oleh pejabat terkait dari unsur Pemerintah Aceh dan unsur kabupaten/kota.
2. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Kota Lhokseumawe segera melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 dengan memperhatikan beberapa catatan hasil fasilitasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
3. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, diminta Walikota untuk:
   a. Menetapkan Rancangan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Lhokseumawe menjadi Peraturan Walikota Lhokseumawe paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2024 ditetapkan.
   b. Menyampaikan Peraturan Walikota tentang RKPD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 kepada Gubernur Aceh melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan, dengan melampirkan matrik penyempurnaan hasil fasilitasi.
4. Selanjutnya diharapkan kepada Saudara segera memberikan tanggapan dalam bentuk surat tindak lanjut terhadap hasil fasilitasi provinsi dan tindak lanjut terhadap reviu APIP Kota Lhokseumawe yang disampaikan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 1 (satu) eksemplar dan *soft copy* kepada kami Bappeda Aceh cq. Bidang Program dan Pendanaan Pembangunan Bappeda Aceh atau melalui email: bappedaaceh.program@gmail.com selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH ACEH BAPPEDA

**MUHAMMAD IKHSAN, ST, MT, M.Eng**
PEMBINA TK. I
NIP. 19720125 200212 1 004
ND. No. 127.1/1064 Tgl. 3 Juli 2023

**Tembusan:**
1. Pj. Gubernur Aceh;
2. Sekretaris Daerah Aceh;
3. Inspektur Aceh;
4. Kepala Bappeda Kota Lhokseumawe.

**HASIL FASILITASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**

**UMUM**

1. Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024 **Sudah sesuai** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2. Dalam penyajian keseluruhan bab masih ditemukan beberapa kesalahan tulis, perbedaan jenis huruf (*font*) dan ukuran huruf, perbedaan judul tabel dengan tabelnya. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali keseluruhan penyajian dokumen agar dapat tersaji secara baik dan konsisten.
3. Bahwa Dokumen RKPD harus menjadi pedoman utuh dalam penyusunan KUA PPAS maupun APBD
4. Dalam hal perubahan RKPD pada bagian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan apabila dalam keadaan yang mendesak dan keadaan yang darurat dengan persetujuan bersama antara Badan Anggaran dan TAPD.
5. Dalam hal perubahan RKPD pada bagian rincian kegiatan baik tambah atau kurang pagu anggran apabila terdapat kebijakan dari pusat maka harus ada kesepakatan dengan pihak legistatif.
6. Belanja Hibah untuk pihak ketiga harus masuk ke dalam narasi RKPD.
7. Dokumen RKPD bukunya dipisah menjadi 3 buku (1 Narasi, 2 Sub Kegiatan, 3 Pokir)
8. Pada dokumen RKPD mohon dihindari adanya terbuka dalam hal penambahan pendapatan dan belanja yang dibahas dalam konteks politik
9. Bila ada penambahan anggaran maka dalam proses perencanaan diberikan kepada Bappeda.
10. Mohon agar kegiatan Pelaksanaan Pilkada (Desk Pilkada, KIP, Panwas, dan Pengamanan) dan Pengendalian Inflasi dapat didukung dengan dana yang memadai.
11. Agar dapat melaksananan penginputan semua rincian pada belanja, pendapatan dan pembiayaaan di tingkat RKPD.

**A. BAB I. PENDAHULUAN**

1. Menyesuaikan kembali dasar hukum pada Sub Bab 1.2 terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kota LhokseumaweTahun 2024 sebagai berikut:
   - **Menghapus dasar hukum:**
     a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485)
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).

**Menambahkan dasar hukum:**

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180).

**2.** Narasikan Sub Bab 1.3 terkait Hubungan Antar Dokumen, sehingga jelas hubungan dan keterkaitan RKPD Kota Lhokseumawe tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya.

## B. BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

1. Data-data yang ditampilkan mohon dapat disajikan secara time series 2018-2022 sebagai tahun dasar perencanaan (n-2) dan dapat dibandingkan dengan Aceh dan Nasional ataupun dengan RKPD sebelumnya, Daerah yang setara sehingga tergambar permasalahan di daerah.
2. Terkait bidang pekerjaan umum agar dapat menggantikan nomenklatur jalan negara dengan jalan nasional sertta agar dapat ditambahkan kondisi jalan Nasional, kabupaten dan Provinsi yang ada di daerah beserta persentase sehingga tergambarkan kondisi jalan secara keseluruhan di daerah.
3. Narasi tentang PDRB perkapita agar dapat dicermati kembali tentang pembahasan yang disampaikan.
4. Terkait data dan narasi tentang panjang jalan berkurang karena taman kendaraan bermotor mohon dapat dicermati kembali.
5. Agar narasi tentang pengelolaan sampah mohon disampaikan Indeks Pengelolaan sampah terkait narasi pada lingkungan hidup permasalahan.
6. Agar narasi terhadap potensi bencana dapat menambahkan data terkait IRB dan angka kejadian yang ada di daerah.
7. Terkait data angka kematian ibu dan bayi dan permasalahan kesehatan lain agar dapat didukung dengan strategi penanganan dan didukung kebijakan pendanaan pada bab selanjutnya.

8. Agar narasi dan data terkait kemiskinan ekstrim dapat disampaikan sehingga hubungan antar bab dapat konsisten dan terjaga.
9. Terkait narasi pada urusan sosial pada PMKS agar ditambahkan potensi sumber daya sosial yang mendukung dalam penanganan masalah sosial tersebut antara lain PSKS.
10. Terkait pada SPM khususnya bidang pendidikan mohon disesuaikan dengan peraturan yang terbaru dengan melengkapi indikator yang masih belum ada dan bisa merujuk pada Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
11. Belum ditemui adanya kegiatan dalam rangka pemenuhuhan infrastruktur dasar sebagai upaya pemenuhan SPM, agar dapat disempurnakan kembali.
12. Terkait evaluasi kinerja mohon dapat dicermati kembai terkait satuan dan data yang disampaikan.
13. Agar dalam permasalahan yang disajikan dapat dilihat kembali dan disesuaikan dengan arah kebijakan dan kebijaksanaan pendanaan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
14. Menyangkut tentang keterkaitan dokumen agar dirinci yang menjadi keterkaitan tersebut sehingga dapat dilihat posisi antar dokumen yang ada terhadap dokumen RKPD yang sedang disusun.

**C. BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH**

1. Terkait arah kebijakan ekonomi daerah, agar pada bab ini dimasukkan arah pelaksananaan kinerja dengan diulas lebih mendalam dari sisi strategi dan upaya pencapaian serta dibedakan dengan ulasan pada bab II.
2. Agar disampaikan strategi dan narasi yang lebih mendalam upaya mendapatkan sumber pendanaan lain
3. Mohon dalam proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan yang disampaikan menggunakan data rincian belanja sehingga dapat dilihat rincian penggunaan sumber dana dan disesuaikan dengan hasil inputan pada SIPD.

**D. BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

1. Dalam menjaga upaya dukungan terhadap kebijakan prioritas penyelenggaraan urusan,maka perlu disajikan integrasi Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah (arah kebijakan) yang akan dilaksanakan oleh Daerah Tahun 2024.
2. Agar Tema dan permasalahan mohon dapat dicermati kembali dalam upaya menjaga konsistensi.
3. Adanya inkonsistensi terkait permasalahan pada bab sebelumnya mohon dapat disingkronkan agar konsistensi hubungan antar bab dapat terjaga
4. Terkait pada SPM khususnya bidang pendidikan mohon disesuaikan dengan peraturan yang terbaru dengan melengkapi indikator yang masih belum ada dan bisa merujuk pada Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

## E. BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

1. Mohon rincian baik Belanja, pendapatan dan Pembiayaan mohon dapat disajikan sampai rincian kegiatan dan diiput dalam SIPD.
2. Agar dalam penentuan anggaran terhadap kegiatan Pilkada agar mencukupi terutama kegiatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas, Pelaksanan Desk Pilkada, dan Kebutuhan Pengamanan.
3. Terkait capaian akses air minum yang masih sangat rendah agar dapat didukung dengan pendanaan yang memadai dalam upaya pencapaian SPM.

## F. BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

1. Pada Tabel Indikator Kinerja Daerah Aceh Tahun 2024 perlu dipastikan bahwa penentuan indikator kinerja sudah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024.

## G. BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan bab penyederhanaan dari kaidah pelaksanaan didalam rancangan akhir RKPD, sehingga perlu ditambahkan narasi bahwa RKPD merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA- PPAS.

Banda Aceh, Juli 2023
a.n. GUBERNUR ACEH
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

PEMERINTAH ACEH BAPPEDA

**MUHAMMAD IKHSAN, ST, MT, M.Eng**
PEMBINA TK. I
NIP. 19720125 200212 1 004
ND. No. 127.1/1064 Tgl. 3 Juli 2023

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 2 TELP. (0645) 630835 FAXIMILE (0645) 630253
Website : www.bappeda.lhokseumawekota.go.id
**LHOKSEUMAWE - 24351**

Lhokseumawe, 3 Juli 2023

Nomor : 050 / 943
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Penjelasan/Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.

Kepada Yth,

Kepala Bappeda Aceh

di-
Tempat

1. Sehubungan dengan Pelaksanaan Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 oleh Bappeda Aceh pada tanggal 27 Juni 2023, berikut kami sampaikan Penjelasan/Tindak Lanjut Hasil Fasilitasi Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2024.
2. Demikian disampaikan, terima kasih.

KEPALA BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE

PEMERINTAH KOTA BAPPEDA LHOKSEUMAWE

MULYANTO, S.Sos
NIP. 196308071987081001

**FORMAT MATRIKS PENYEMPURNAAN PERBAIKAN HASIL FASILITASI RKPD 2024**
**KOTA LHOKSEUMAWE**

| NO | BAGIAN | NARASI MASUKAN PERBAIKAN | TINDAK LANJUT | | HAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | **UMUM** | | | | | |
| 1 | Sistematika Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lhokseumawe Tahun 2024 Sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. | Sudah dipedomani | Ya | | | |
| 2 | Dalam penyajian keseluruhan bab masih ditemukan beberapa kesalahan tulis, perbedaan jenis huruf (font) dan ukuran huruf, perbedaan judul tabel dengan tabelnya. Oleh karena itu, perlu ditinjau kembali keseluruhan penyajian dokumen agar dapat tersaji secara baik dan konsisten. | Sudah dikoreksi dan ditindaklanjuti | Ya | | | |
| 3 | Bahwa Dokumen RKPD harus menjadi pedoman utuh dalam penyusunan KUA PPAS maupun APBD | Akan dipedomani | Ya | | | |
| 4 | Dalam hal perubahan RKPD pada bagian program, Kegiatan dan Sub Kegiatan apabila dalam keadaan yang mendesak dan keadaan yang darurat dengan persetujuan bersama antara Badan Anggaran dan TAPD. | Akan dipedomani | Ya | | | |
| 5 | Dalam hal perubahan RKPD pada bagian rincian kegiatan baik tambah atau kurang pagu anggran apabila terdapat kebijakan dari pusat maka harus ada kesepakatan dengan pihak legistatif. | Akan dipedomani | Ya | | | |
| 6 | Belanja Hibah untuk pihak ketiga harus masuk ke dalam narasi RKPD | Sudah ditindaklanjuti | Ya | | | |
| 7 | Dokumen RKPD bukunya dipisah menjadi 3 buku (1 Narasi, 2 Sub Kegiatan, 3 Pokir) | Sudah ditindaklanjuti | Ya | | | |
| 8 | Pada dokumen RKPD mohon dihindari adanya terbuka dalam hal penambahan pendapatan dan belanja yang dibahas dalam konteks politik | Akan dipedomani | Ya | | | |
| 9 | Bila ada penambahan anggaran maka dalam proses perencanaan diberikan kepada Bappeda. | Akan dipedomani | Ya | | | |

| NO | BAGIAN | NARASI MASUKAN PERBAIKAN | TINDAK LANJUT | | HAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 10 | Mohon agar kegiatan Pelaksanaan Pilkada (Desk Pilkada, KIP, Panwas, dan Pengamanan) dan Pengendalian Inflasi dapat didukung dengan dana yang memadai | kegiatan Pelaksanaan Pilkada (Desk Pilkada, KIP, Panwas, dan Pengamanan) sudah di akomodir pada Perangkat Daerah Badan Kesbangpol dan Pengendalian Inflasi sudah di akomodir pada perangkat daerah Disprindagkop, DKP3 | Ya | | | |
| 11 | Agar dapat melaksananan penginputan semua rincian pada belanja, pendapatan dan pembiayaaan di tingkat RKPD | Sudah ditindaklanjuti dan dilakukan penginputan rincian pada belanja, pendapatan dan pembiayaan dalam SIPD | Ya | | | |
| **1** | **PENDAHULUAN** | | | | | |
| 1 | Menyesuaikan kembali dasar hukum pada Sub Bab 1.2 terkait peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kota LhokseumaweTahun 2024 sebagai berikut | Untuk dasar hukum telah dilakukan perbaikan dan penambahan sesuai dengan hasil fasilitasi | Ya | | | |
| | - Menghapus dasar hukum: | | | | 8 s.d 10 | |
| | a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2004 nomor 126; Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); | Telah di hapus | Ya | | | |
| | b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485) | Telah di hapus | Ya | | | |
| | c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136). | Telah di hapus | Ya | | | |
| | Menambahkan dasar hukum: | | | | 8 s.d 10 | |
| | a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); | Telah ditambahkan | Ya | | | |

| NO | BAGIAN | NARASI MASUKAN PERBAIKAN | TINDAK LANJUT | | HAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| | b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) | Telah ditambahkan | Ya | | | |
| | c. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180). | Telah ditambahkan | Ya | | | |
| 2 | Narasikan Sub Bab 1.3 terkait Hubungan Antar Dokumen, sehingga jelas hubungan dan keterkaitan RKPD Kota Lhokseumawe tahun 2024 dengan dokumen perencanaan lainnya. | Telah dilakukan perbaikan terhadap keterkaitan antar dokumen | Ya | | 6 | |
| **2** | **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** | | | | | |
| 1. | Data-data yang ditampilkan mohon dapat disajikan secara time series 2018-2022 sebagai tahun dasar perencanaan (n-2) dan dapat dibandingkan dengan Aceh dan Nasional ataupun dengan RKPD sebelumnya, Daerah yang setara sehingga tergambar permasalahan di daerah | Sudah dilakukan perbaikan data time series 201 | Ya | | Bab 2 | |
| 2 | Terkait bidang pekerjaan umum agar dapat menggantikan nomenklatur jalan negara dengan jalan nasional sertta agar dapat ditambahkan kondisi jalan Nasional, kabupaten dan Provinsi yang ada di daerah beserta persentase sehingga tergambarkan kondisi jalan secara keseluruhan di daerah. | Telah dilakukan penyesuain | Ya | | 85 | |
| 3 | Narasi tentang PDRB perkapita agar dapat dicermati kembali tentang pembahasan yang disampaikan | Telah dilakukan perbaikan | Ya | | 18 s.d 19 | |
| 4 | Narasi dan data yang menyajikan jumlah penduduk mohon dapat disinkronkan kembali terhadap tabel pada pembahasan lain dalam menjaga konsistensi dalam dokumen (tabel 2.32) | Telah dilakukan perbaikan | Ya | | 50,51.52,53,61,62,66,67,85,87,96,173 | |
| 5 | Terkait data dan narasi tentang panjang jalan berkurang karena taman kendaraan bermotor mohon dapat dicermati kembali | Telah dilakukan perbaikan | Ya | | 165 | |
| 6 | Agar narasi tentang pengelolaan sampah mohon disampaikan Indeks Pengelolaan sampah terkait narasi pada lingkungan hidup permasalahan | Belum tersedia data | | Tidak | | Tidak Tersedia data (N/A) |
| 7 | Agar narasi terhadap potensi bencana dapat menambahkan data terkait IRB dan angka kejadian yang ada di daerah. | Telah dilakukan penambahan pada narasi | Ya | | 103, 104 | |

| NO | BAGIAN | NARASI MASUKAN PERBAIKAN | TINDAK LANJUT | | HAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 8 | Terkait data angka kematian ibu dan bayi dan permasalahan kesehatan lain agar dapat didukung dengan strategi penanganan dan didukung kebijakan pendanaan pada bab selanjutnya | Telah dilakukan penyesuaian | Ya | | 25 dan 81 | |
| 9 | Agar narasi dan data terkait kemiskinan ekstrim dapat disampaikan sehingga hubungan antar bab dapat konsisten dan terjaga. | Telah dilakukan penambahan pada narasi | Ya | | 112 | |
| 10 | Terkait narasi pada urusan sosial pada PMKS agar ditambahkan potensi sumber daya sosial yang mendukung dalam penanganan masalah sosial tersebut antara lain PSKS | Telah dilakukan penambahan pada narasi | Ya | | 109 s.d 110 | |
| 11 | Terkait pada SPM khususnya bidang pendidikan mohon disesuaikan dengan peraturan yang terbaru dengan melengkapi indikator yang masih belum ada dan bisa merujuk pada Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. | Telah dilakukan penyesuaian pada narasi | Ya | | 44 | |
| 12 | Belum ditemui adanya kegiatan dalam rangka pemenuhuhan infrastruktur dasar sebagai upaya pemenuhan SPM, agar dapat disempurnakan kembali | Telah dilakukan penyesuain | Ya | | 201 s.d 202 | |
| 13 | Terkait evaluasi kinerja mohon dapat dicermati kembai terkait satuan dan data yang disampaikan | Untuk data indikator mengadopsi langsung dari RPJMK tahun 2017-2022 dan capaian yang di sampaiakan oleh OPD, untuk perubahannya akan di sesuaikan pada penyusunan Dokumen RPJMK periode 2024-2029 selanjutnya | | Tidak | | akan di sesuaikan |
| 14 | Agar dalam permasalahan yang disajikan dapat dilihat kembali dan disesuaikan dengan arah kebijakan dan kebijaksanaan pendanaan melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan | Telah dilakukan penyesuain | Ya | | 271 s.d 277 | |
| 15 | Menyangkut tentang keterkaitan dokumen agar dirinci yang menjadi keterkaitan tersebut sehingga dapat dilihat posisi antar dokumen yang ada terhadap dokumen RKPD yang sedang disusun | Telah dilakukan penyesuaian pada bab 1 | Ya | | 11 s.d 16 Bab 1 | |
| **3** | **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | |
| 1 | Terkait arah kebijakan ekonomi daerah, agar pada bab ini dimasukkan arah pelaksananaan kinerja dengan diulas lebih mendalam dari sisi strategi dan upaya pencapaian serta dibedakan dengan ulasan pada bab II | Telah dilakukan penyesuain | Ya | | 3 | |
| 2 | Agar disampaikan strategi dan narasi yang lebih mendalam upaya mendapatkan sumber pendanaan lain | Telah dilakukan penyesuain | Ya | | 25 s.d 26 | |
| 3 | Mohon dalam proyeksi belanja, pendapatan dan pembiayaan yang disampaikan menggunakan data rincian belanja sehingga dapat dilihat rincian penggunaan sumber dana dan disesuaikan dengan hasil inputan pada SIPD | Telah dilakukan penyesuain | Ya | | 28 s.d 29 | |

| NO | BAGIAN | NARASI MASUKAN PERBAIKAN | TINDAK LANJUT | | HAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| **4** | **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | |
| 1 | Dalam menjaga upaya dukungan terhadap kebijakan prioritas penyelenggaraan urusan,maka perlu disajikan integrasi Hasil Rakortekrenbang Tahun 2023 untuk menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah (arah kebijakan) yang akan dilaksanakan oleh Daerah Tahun 2024 | Terkait hasil rakortekrenbang Tahun 2023, Telah | Ya | | 33 s.d 36 | |
| 2 | Agar Tema dan permasalahan mohon dapat dicermati kembali dalam upaya menjaga konsistensi. | Terkait tema telah disesuikan dengan permasalahan pada bab II dan sudah selaras dengan provinsi dan pusat, tercantum | Ya | | 9 | |
| 3 | Adanya inkonsistensi terkait permasalahan pada bab sebelumnya mohon dapat disingkronkan agar konsistensi hubungan antar bab dapat terjaga | Sudah dilakukan penyesuai antara permasalaha | Ya | | 9 s.d 10 | |
| 4 | Terkait pada SPM khususnya bidang pendidikan mohon disesuaikan dengan peraturan yang terbaru dengan melengkapi indikator yang masih belum ada dan bisa merujuk pada Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan | Sudah dilakukan penambahan sesuai Permendikbudristek No. 32 Tahun 2022 | Ya | | 33 | |
| **5** | **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH** | | | | | |
| 1 | Mohon rincian baik Belanja, pendapatan dan Pembiayaan mohon dapat disajikan sampai rincian kegiatan dan diiput dalam SIPD | Seluruh Belanja, pendapatan dan Pembiayaan telah diinput sampai rincian kegiatan dan diiput dalam SIPD. | Ya | | Tabel 5.12 Buku 2 | |
| 2 | Agar dalam penentuan anggaran terhadap kegiatan Pilkada agar mencukupi terutama kegiatan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas, Pelaksanan Desk Pilkada, dan Kebutuhan Pengamanan | Anggaran kegiatan Pilkada telah tercukupi untuk KIP, Panwaslih, Desk Pilkada dan Kebutuhan pengamanan sesuai dengan kemampuan daerah. | Ya | | Tabel 5.12 Buku 2 | |

| NO | BAGIAN | NARASI MASUKAN PERBAIKAN | TINDAK LANJUT | | HAL | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | YA | TIDAK | | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 3 | Terkait capaian akses air minum yang masih sangat rendah agar dapat didukung dengan pendanaan yang memadai dalam uapaya juga memenuhi pencapaian SPM | Pendanaan untuk mendukung capaian akses air minum dalam rangka pencapaian SPM telah dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah pada Perangkat Daerah Dinas PUPR Kota Lhokseumawe pada program pengelolaan Dan Pengembangan Sistim Penyediaan Air Minum yang meliputi sub kegiatan Pembangunan Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan; dan Perluasan sistim penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan. Untuk Tahun 2024 Kota Lhokseumawe juga mendapat lokpri DAK Air Minum | Ya | | Tabel 5.12 Buku 2 | |
| **6** | **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH** | | | | | |
| 1 | Pada Tabel Indikator Kinerja Daerah Aceh Tahun 2024 perlu dipastikan bahwa penentuan indikator kinerja sudah memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 | Sudah dilakukan penyesuaian | Ya | | 43 | |
| **7** | **PENUTUP** | | | | | |
| 1 | Bab ini merupakan bab penyederhanaan dari kaidah pelaksanaan didalam rancangan akhir RKPD, sehingga perlu ditambahkan narasi bahwa RKPD merupakan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, penyelarasan prioritas pembangunan dan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, dan antar tingkat pemerintah serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan KUA- PPAS | Sudah dilakukan penyesuaian | Ya | | 1 | |

Keterangan:

1 Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka;
2 Kolom ini memuat bagian yang menjadi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
3 Kolom ini memuat narasi masukan perbaikan penyempurnaan RKPD Tahun 2024 pada saat pelaksanaan fasilitasi;
4 Kolom ini diisi dengan tanda cek (/ 'YA', jika masukan hasil fasilitasi ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024;
5 Kolom ini diisi dengan tanda cek (/ "TIDAK", jika masukan hasil fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti dalam dokumen RKPD Tahun 2024
6 Kolom ini memuat halaman hasil tindak lanjut yarig sudali diperbaiki dalam RKPD Tahun 2024; dan
7 Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika hasil masukan fasilitasi TIDAK ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerali dalam RKPD Tahun 2024

Lhokseumawe, 3 Juli 2023
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
**KOTA LHOKSEMAWE**

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE BAPPEDA

**MULYANTO, S.SOS**
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630807 198708 1 001

# INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

## LAPORAN HASIL REVIU
## RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)
## LHOKSEUMAWE TAHUN 2024

**NOMOR : 700/53/LHR-IL/2023**

**TANGGAL : 27 JUNI 2023**

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

**INSPEKTORAT**

Jl. Darussalam No. 109 Telp/Fax (0645) 43543 Lhokseumawe

**LAPORAN HASIL REVIU**
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)**
**LHOKSEUMAWE TAHUN 2024**
**NOMOR : 700/53/LHR-IL/2023**
**TANGGAL : 27 JUNI 2023**

## I. Ringkasan Eksekutif

1. Inspektorat Kota Lhokseumawe sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2024. Reviu yang dilakukan berupa pengujian terbatas terhadap Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Tahun 2023-2026, pengujian kesesuaian atau keselarasan Rancangan Akhir RKPK Tahun 2024 yang disusun telah mempedomani Peraturan terkait dokumen perencanaan, dan menguji adanya konsistensi atas subtansi penyusunan antar bab pada Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA. 2024.

   Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya perumusan dan penyajian dokumen rancangan akhir RKPD serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi, agar sesuai dengan kaidah dan tata cara perencanaan pembangunan tahunan daerah, sehingga dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Maksud dari pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan ini, untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan terhadap informasi dalam dokumen rancangan akhir RKPD.

   Pelaksanaan kegiatan reviu dilakukan oleh tim reviu Berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe tahun 2023. Tim RKPK telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menguji kesesuaian informasi dan proses substansi penyusunan terhadap penyajian antar bab dalam dokumen rancangan akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.

Pengujian dilaksanakan dengan menelaah dan menganalisis dengan dokumen pendukung lainnya, dan permintaan keterangan atau wawancara mengenai proses penyusunannya untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat penjelasannya dalam penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 tersebut.

Penugasan ini juga sebagai upaya peningkatan kualitas dokumen perencanaan sebagai upaya mengurangi potensi kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah sehingga fungsi reviu perlu dioptimalkan, karena Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ tanggal 03 Juni 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023, yang antara lain menegaskan bahwa APIP agar memastikan perangkat daerah terkait dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP serta Tim Fasilitasi Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2024 dan Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 di Provinsi harus memperhatikan dan meyakinkan seluruh rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP telah ditindaklanjuti.

2. Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 secara umum telah disusun berdasarkan tata cara dan kaidah yang ditetapkan. Akan tetapi masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian terhadap tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan hasil sebagai berikut :
   a. Seluruh kelengkapan kegiatan Musrembang sudah dilengkapi dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan tetapi surat undangan, absensi peserta, dan dokumentasi kegiatan tidak tersedia.
   b. Masih terdapat beberapa Indikator Program dan target pada RKPK Tahun 2024 yang tidak dicantumkan serta Indikator Program dan target yang belum sesuai dengan Qanun RPK 2023-2026 pada tahun berkenaan.

c. Terdapat beberapa program pembangunan daerah yang disajikan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 tidak dimasukan dalam Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 pada BAB IV tabel 4.5.

d. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada beberapa bidang urusan yang belum berorientasi hasil *(outcome)* dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu specifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu

e. Penyajian substansi dan mekanisme penyusunan belum seluruhnya diuraikan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 dan Permendagri 86 Tahun 2017 dan pedoman umum terkait penyusunan dokumen RKPD tahun 2024.

f. Terdapat indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tidak dicantumkan serta indikator kinerja kegiatan belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah.

g. Terdapat 8 Arah kebijakan yang disajikan dalam Bab IV tidak diuraikan sebelumya dalam Bab II pada penjelasan terkait permasalahan pembangunan untuk memperoleh konsistensi penyajian antar Bab.

h. Terdapat beberapa Isu Strategis yang disajikan dalam Bab II namun tidak memiliki arah kebijakan yang tepat dalam penyajiannya pada Bab IV.

## II. Dasar Hukum

Dasar hukum peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan reviu dokumen RKPD tahun 2024 adalah semua peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran, meliputi:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003. Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara 311).

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan.

k. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 700/1329/IJ tanggal 03 Juni 2022 tentang Penyampaian Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah Tahun 2023.

o. Rancangan Permendagri tentang pedoman umum penyusunan RKPDtahun 2024

p. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kota Lhokseumawe Tahun 2023.

q. Surat Perintah Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor 800/53/IL/2023 tanggal 30 Mei 2023.

## III. Tujuan Reviu

Reviu dokumen RKPD adalah penelaahan atas penyusunan dokumen RKPD oleh APIP provinsi/kabupaten/kota yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen tersebut telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Hal ini sebagai upaya untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas kualitas, agar mengurangi potensi kegagalan dalam perencanaan pembangunan daerah, karena RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Tujuan reviu dokumen rencana pembangunan tahunan daerah oleh APIP Kota Lhokseumawe adalah untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi informasi dalam RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 sesuai dengan Dokumen RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Hasil pelaksanaan reviu ini adalah memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan perumusan dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 telah sesuai dengan tata cara dan kaidah-kaidah perencanaan antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu, berbasis kinerja serta telah dilengkapi dengan dokumen pendukung yang memadai.

## IV. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 ini adalah pengujian terbatas terhadap Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Tahun 2023-2026, pengujian Kesesuaian Atau Keselarasan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 yang disusun telah mempedomani Permendagri terkait penyusunan RKPD Tahun 2023 dan ketentuan lainnya, serta Konsistensi atas Subtansi Penyusunan Antar Bab pada

Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. Fokus reviu RKPK ini adalah memastikan bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 telah berpedoman pada RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024.

Reviu dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 mencakup pengujian terbatas terhadap kesesuaian dengan dokumen RPK tahun 2023-2026 dan substansi penyusunannya sesuai tahapan, tata cara maupun sistematika perumusan rancangan akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 sampai dengan siap ditetapkan oleh Kepala Daerah. Akan tetapi reviu ini tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern yang biasanya dilaksanakan dalam suatu kegiatan audit.

## V. Batasan Tanggung Jawab

Semua Informasi yang disajikan dalam dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 merupakan tanggungjawab Tim penyusun RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. Oleh karena itu Tim Inspektorat tidak bertanggungjawab atas informasi yang tidak disajikan oleh Tim Penyusun RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. Kegiatan reviu RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 ini telah dilaksanakan sesuai dengan Standar.

## VI. Metodologi Reviu

Reviu RKPK Lhokseumawe tahun 2024 dilaksanakan sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomr 700/3153/SJ tentang pelaksanaan Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintah atas penyusunan dokumen perencanan pembangunan dan rencana keuangan daerah tahun anggaran 2022. Penggunaan metodologi pelaksanaan reviu dilakukan dengan cara penelaahan atas dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 dan dokumen pendukung terkait lainnya, serta wawancara atau permintaan keterangan dengan pejabat dalam tim penyusun pada Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang terkait dengan proses penyusunan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.

Reviu Dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2023 dilakukan dengan cara pengujian terbatas terhadap Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 dengan Rencana Pembangunan Kota (RPK) Tahun 2023-2026, pengujian Kesesuaian Atau Keselarasan Rancangan Akhir RKPK Tahun 2024 yang disusun telah mempedomani Rancangan Permendagri terkait penyusunan RKPD Tahun 2024 serta Konsistensi atas Subtansi Penyusunan Antar Bab pada Rancangan Akhir RKPK

Lhokseumawe Tahun 2024 dengan cara menelaah dan menganalisis sesuai prosedur berikut ini:

a) Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Ta.2024 Dengan RPK TA. 2023 - 2026, dengan melakukan pengujian terhadap :
   1. Pemenuhan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelengkapan dokumen penyusunan Rancangan Akhir RKPK.
   2. Kesesuaian dengan membandingkan antara rumusan prioritas dan sasaran Pembangunan dalam rancangan akhir RKPK dengan Qanun RPK.
   3. Kesesuaian terhadap pencantuman target kinerja sasaran dan program dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPK dengan Qanun RPK.
   4. Kesesuaian dengan membandingkan sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada bab IV rancangan akhir RKPK dengan sasaran pada BAB V dan strategi, arah kebijakan, program pembangunan Daerah, pada BAB VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK.
   5. Kesesuaian dengan membandingkan indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD).
   6. Kesesuaian atau keselarasan terhadap program/kegiatan yang ada dalam rancangan akhir RKPK sesuai dengan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   7. Kesesuaian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program pada rancangan akhir RKPK dan Qanun RPK.

b) Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah mempedomani aturan yang berlaku terkait penyusunan RKPK TA. 2024, dengan melakukan prosedur pengujian sebagai berikut:
   1. Permintaan keterangan terhadap tahapan dan mekanisme penyusunan RKPK Ta. 2024.
   2. Analisis kesesuaian terhadap Rancangan Akhir RKPD yang disusun telah mempedomani Peraturan Menteri terkait Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2024.

c) Pengujian Atas Konsistensi Penyusunan Subtansi Antar Bab Pada Rancangan Akhir RKPK, dengan melakukan analisis terhadap :

1. Kesesuaian terhadap arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada Bab V Rencangan akhir RKPK merupakan hasil indentifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II dari Rancangan Akhir RKPK.
2. Kesesuaian terhadap arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada Bab V rancangan akhir RKPK telah disusun berdasarkan isu strategis dan permasalahan pokok pembangunan pada BAB II RKPK.

Reviu dilaksanakan berdasarkan keputusan Inspektur Kota Lhokseumawe dengan susunan tim sebagai berikut:

| No | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN | JABATAN DALAM TIM |
|---|---|---|---|
| 1 | Azwar, SH.MAP | Inspektur Kota Lhokseumawe | Penanggung Jawab |
| 2 | Munawar Faiza, SIP | Sekretaris | Wakil Penanggung Jawab |
| 3 | Syahril, S.Pt.MSM | Inspektorat Wilayah II | Pembantu Penanggung Jawab |
| 4 | Marlaini, SE.M.Si, Ak.CA | Auditor Madya | Pengendali Teknis |
| 5 | Agus Zuliana, SE | Auditor Madya | Ketua Tim |
| 6 | Zulkifli, S.Pd | Auditor Muda | Anggota |
| 7 | Karmawan Prawira, SE | Auditor Penyelia | Anggota |
| 8 | Kadri Ardinan, SE, M. Si | Auditor Penyelia | Anggota |
| 9 | Ida Yusnur, SE | Auditor Pertama | Anggota |

## VII. Gambaran Umum

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) telah mengamanatkan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan daerah dengan berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMK untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dokumen RKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah atas dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah kedalam rencana program dan

kegiatan serta penganggaran tahunan. RKPD memjembatani sinkronisasi dan harmonisasi rencana tahunan dengan rencana strategis serta mengoperasionalkan rencana strategis kedalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur untuk memastikan tercapainya rencana pembangunan jangka menengah.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah menegaskan antara lain bahwa RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan daerah. Kemudian RKPD juga menjadi pedoman kepada kepala daerah dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD. Oleh karena itu, RKPD mempunyai kedudukan , peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelengaaraan pemerintahan daerah mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penanggung jawab yang wajib melaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun.
2. Secara normative, menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai landasan penyusunan RAPBD.
3. Secara Operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja SKPD.
4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

## VIII. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil pengujian terbatas yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa perumusan dokumen Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe tahun 2024 secara garis besar telah disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang ditetapkan. Dari hasil pengujian yang sebelumnya telah dituangkan dalam Catatan Hasil Reviu (CHR). sebagian telah ditindaklanjuti dengan adanya perbaikan terkait kesesuaian antar dokumen lainnya serta terhadap substansi tata cara penyusunan rancangan akhir

RKPK Lhokseumawe tahun 2024. Adapun semua hasil reviu tim Inpektorat Kota Lhokseumawe dapat dilihat sebagai berikut :

**A. Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA.20243 dengan RPK TA. 2023 - 2026.**

Berdasarkan hasil pengujian Pengujian Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA.2024 dengan RPK TA. 2023-2026 dengan tujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen RPK untuk memperoleh keselarasan. Tim reviu melakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

1. Pemenuhan Dokumen terkait mekanisme Penyusunan RKPK TA. 2024.

   Berdasarkan hasil Ceklist kelengkapan dokumen penyusunan Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 secara keseluruhan sudah memadai dan bukti dokumen yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPK telah lengkap. Namun masih terdapat kelengkapan kegiatan Musrembang sudah dilengkapi dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan tetapi surat undangan, absensi peserta, dan dokumentasi kegiatan tidak tersedia.

2. Keselarasan dan kesesuaian terhadap pencantuman indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK TA. 2024 dengan BAB VIII dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 (terkait IKU dan IKD).

   Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian terhadap pencantuman target kinerja sasaran dan program dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPK dengan Qanun RPK yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen Perubahan RPK diperolah hasil masih ada ketidaksesuaian/keselarasan. Tim telah melakukan reviu yang menunjukan hasil masih terdapat beberapa Indikator Program dan target pada RKPK Tahun 2024 yang tidak dicantumkan serta Indikator Program dan target yang belum sesuai dengan Qanun RPK 2023-2026 pada tahun berkenaan. Adapun rinciannya dapat lihat pada tebel berikut:

| No | Program | Indikator Kinerja Program RKPK TA. 2024 | Target Kinerja RKPK TA.2024 | Indikator Kinerja Program RPK TA 2023-2026 | Target Kinerja RPK | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rasio Rumah Layak Huni | 69.63 Rasio | Persentase Ketersediaan rumah layak huni | 69.63 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 30 dokumen | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | 100 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA } dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,70 Indeks | Tersusunya RPPLH Kab/Kota | Tidak ada | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,70 Indeks | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65,35 Nilai | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 0,33 persen | Persentase luasan taman | 61,95 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 85 ton | Persentase jumlah sampah yang ditangani | 89,73 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | - | Pembinaan Pramuka | 42,86 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | - | Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata | 60 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 9 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | - | Peningkatkan Kunjungan Wisata | 96,88 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 10 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | - | Persentase Pembinaan SDM Pariwisata | 100 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 11 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | - | - | Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan | 72,73 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |

3. Kesesuaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab IV dengan Sasaran pada Bab V Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 dan Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, pada Bab VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026.

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada bab IV dengan sasaran pada BAB V rancangan akhir RKPK TA. 2024 dan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, pada BAB VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen Perubahan RPK. Tim telah

melakukan reviu dengan hasil yang menunjukan bahwa semua sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada BAB IV dengan sasaran pada BAB V Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 sesuai dan selaras dengan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah pada BAB VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA.2023-2026. Namun terdapat beberapa program pembangunan daerah yang disajikan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 tidak dimasukan dalam Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 pada BAB IV tabel 4.5. Adapun rincian programnya dapat dilihat pada tabel berikut:

| No | Program Pembangunan Daerah | OPD |
|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DISPORAPAR |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DISPORAPAR |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DISPORAPAR |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DISPORAPAR |

4. Kesesuaian Dengan Membandingkan Indikator Dan Target Kinerja Pada BAB VI Rancangan Akhir RKPK dengan BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD).

   Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian terhadap indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK TA. 2024 dengan BAB VIII dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 (terkait IKU dan IKD) yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen RPK, menunjukan hasil masih ada yang tidak sesuai. Hasil analisis ini dengan membandingkan indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD) diperolah kesimpulan masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada beberapa bidang urusan yang belum berorientasi hasil *(outcome)* dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu specifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu:

| No | Indikator Kinerja program | Keterangan | OPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan | Indikator kinerja program {Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan}Belum Berorientasi Outcome. | DINKES |
| 2 | Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Indikator kinerja program {Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat}Belum Berorientasi Outcome. | DINKES |
| 3 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Indikator kinerja program {Persentase ketaatan terhadap RTRW}Belum Berorientasi Outcome. | PUPR |
| 4 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Indikator kinerja program {Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup}Belum Berorientasi Outcome. | DLH |
| 5 | Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan | Indikator kinerja program {Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan}Belum Berorientasi Outcome. | CAPIL |
| 6 | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik | Indikator kinerja program {Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik}Belum Berorientasi Outcome. | DPMG |
| 7 | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Indikator kinerja program {Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera}Belum Berorientasi Outcome. | DINAS PP |
| 8 | Ketersediaan Pelabuhan Laut | Indikator kinerja program {Ketersediaan Pelabuhan Laut}Belum Berorientasi Outcome. | DISHUB |
| 9 | Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal | Indikator kinerja program {Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal}Belum Berorientasi Outcome. | DPMTSP |
| 10 | Pembinaan Pramuka | Indikator kinerja program {Pembinaan Pramuka}Belum Berorientasi Outcome. | DISPORA |
| 11 | Cakupan Pembinaan Perpustakaan | Indikator kinerja program {Cakupan Pembinaan Perpustakaan}Belum Berorientasi Outcome. | ARPUS |
| 12 | Cakupan Sarana Kelompok Tani | Indikator kinerja program {Cakupan Sarana Kelompok Tani}Belum Berorientasi Outcome. | DKPPP |
| 13 | Cakupan Prasarana Kelompok Tani | Indikator kinerja program {Cakupan Prasarana Kelompok Tani}Belum Berorientasi Outcome. | DKPPP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Indikator kinerja program {Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting}Belum Berorientasi Outcome. | DISKOP |
| 15 | Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang | Indikator kinerja program {Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang}Belum Berorientasi Outcome. | DISKOP |
| 16 | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator kinerja program {Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat}Belum Berorientasi Outcome. | SETDAKO |
| 17 | Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Indikator kinerja program {Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan}Belum Berorientasi Outcome. | SETDAKO |
| 18 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK | Indikator kinerja program {Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK}Belum Berorientasi Outcome. | BAPPEDA |
| 19 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Indikator kinerja program {Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah}Belum Berorientasi Outcome. | BPKD |
| 20 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | B. SAKTI |
| 21 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | B. MANGAT |
| 22 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | M. SATU |
| 23 | Cakupan Pembinaan Syariat Islam | Indikator kinerja program {Cakupan Pembinaan Syariat Islam} Belum Berorientasi Outcome. | DSI-PD |

**B. Kesesuaian Atas Penyusunan Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 Telah Mempedomani Peraturan yang Berlaku Terkait Penyusunan RKPK TA. 2024**

Berdasarkan hasil pengujian dari analisis dokumen dan permintaan keterangan terkait proses tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe tahun 2024, secara keseluruhan belum menyajikan substansi yang harus diuraikan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun

2022 dan Permendagri 86 Tahun 2017 terkait sistematika dan tata cara penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 |
|---|---|---|
| A | Analisis rancangan akhir RKPK yang disusun berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017, Sebagai berikut : | |
| 1 | Bab I pendahuluan<br>a.Latar belakang | Belum menjelaskan bagaimana tindak lanjutnya terhadap proses penyusunan RAPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, agar dijelaskan proses dari bermulanya tahapan penyusunan RKPK 2024 seperti SK Kegiatan, Konsultasi Publik Ranwal RKPK, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Penelaahan POKIR Dewan, dan Musrenbang Rancangan Akhir RKPK. |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, Agar Gambar 1.1 terkait Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD diperbaiki (gambar tidak jelas/kabur) |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, untuk skala prioritas seperti Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi agar ditambahkan dalam pendahuluan |
| | | Poin 1.2 Dasar Hukum Penyusunan, Pencantuman dasar hukum penyusunan agar diteliti kembali peraturan perundang-undangan yang relevan |
| | b. Dasar hukum penyusunan | Masih ada ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan belum memiliki keterkaitan secara langsung dengan penyusunan RKPD seperti point 8, 9, 16, 19, 24, 25, 26, 27. |
| | e.Sistematika dokumen RKPD | Penulisan judul pada beberapa bab seperti bab 2,3,4,5 dan 6 belum dilengkapi dengan nama Kota Lhokseumawe |
| 2 | Bab II Gambaran umum kondisi Kota Lhokseumawe | Umum dan Aspek Daya Saing Daerah |
| | b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegatian RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD | 'Belum menguraikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya adalah untuk menilai dan mengidentifikasi program serta kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% sehingga dapat diusulkan lagi pada penyusunan RKPK tahun berikutnya.<br>Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan RKPK tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi table RPK dalam format tabel t-c-19. |
| | | Penyajian tabel dan gambar agar dinarsikan secara umum sebelum tabel dan gambar disajikan, dan setelah penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan hasil analis terkait penyajian tabel dan gambar di atas, sehingga tidak ada tabel yang dijelaskan dengan tabel pun juga gambar seperti Gambar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dst & Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dst |

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 |
|---|---|---|
| | | Penyajian tabel dan gambar agar menggunakan data terakhir minimal data per 31 desember 2022. |
| | | Jika penyajian tabel lebih dari 1 (satu) halaman, untuk tabel halaman berikutnya agar dibuat judul tabel sebagai lanjutan tabel untuk penyajian data yang lebih informatif, contoh Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 & Tabel 2.74 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 , pun juga untuk tabel-tabel lainnya |
| | | Pada Poin Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe terkait Isu-isu strategis agar ditambahakan terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi serta data-data korelasi yang diharapkan. |
| | | |
| 3 | Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Kota Lhokseumawe | Belum menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu danp erkiraan tahun berjalan mencakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan. |
| | a. Arah kebijakan ekonomi Kota Lhokseumawe | Belum memaparkan arah nasional dibidang ekonomi yang dicantumkan pada dokumen RKPD tahun 2024 dan kebijakan dibidang ekonomi yang tercantum pada RPJMK/RPK provinsi dan kota Lhokseuawe sehinga perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mengatasi permasalahan daerah |
| | | Dalam Bab III ini agar ditambahkan strategi penanggulangan Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, Inflasi dan juga Suksesi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, baik terkait langkah-langkah dan anggaran. |
| | | Terkait analisis terhadap penyajian tabel agar penjelasannya tidak mendahului daripada penyajian tabel itu sendiri seperti tabel 3.3 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025, pun juga untuk tabel-tabel lainnya agar dilakukan analisis terhadap penyajian tabel dan gambar. |
| 4 | Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe | - Belum memaparkan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksaan RKPK tahun lalu dan capaiana kinerja yang direncanakan dalam RPK, serta rancangan kerangka ekonomi daerah berserta kerangka pendanaan.<br>- Tidak ada konsistensi data untuk jumlah dan nama program prioritas pembangunan dalam tabel 4.5 dengan jumlah dan nama program yang disajikan pada bab 5 dalam tabel 5.5.<br>- Setiap selesai penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan analisis terkait penjelasan tabel dan gambar yang disajikan, kemudian pada penyajian |

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 |
|---|---|---|
| | | tabel yang melebihi 1 (satu) hamalan agar dibuat lanjutan tabel untuk halaman berikutnya. |
| 5 | Bab V Rencana kerja pendanaan Kota Lhokseumawe | Belum memaparkan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam tahun rencana RPK pada RKPK tahun 2024. |
| | | Terdapat program pembangunan dalam RPK yang tidak dimasukan dalam RKPK tahun 2024, namun belum diuraikan penyebab dan alasan tidak diakomodir dalam RPKP Tahun 2024 |
| 6 | Bab VI Kinerja penyelenggaraan Pemrintah Kota Lhokseumawe | Penetapan indiator peyelenggaran Pemerintah daerah yang menjadi tolak ukur pencapain kinerja tahunan belum seluruhnya menjadi IKU yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals) serta masih ada IKU yang belum berorientasi hasil (outcome). |
| | | Terkait rencana kerja dan pendanaan daerah, untuk penyajian jumlah pendapatan, belanja, pembiayaan harus di integrasikan dengan data yang ada di SIPD dan tidak memaksakan anggaran yang berpotensi defisit dengan menaikan jumlah pendapatan daerah yang tidak rasional. |
| | | Setiap selesai penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan analisis terjait penjelasan tabel dan gambar yang disajikan, kemudian pada penyajian tabel yang melebihi 1 (satu) halaman agar dibuat lanjutan tabel untuk halaman berikutnya |

## C. Konsistensi dan Keterkaitan Antar Bab pada Penyusunan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Ta. 2024.

### 1. Kesesuaian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program pada rancangan akhir RKPK TA. 2024 dan Qanun RPK Tahun 2023-2026.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program dalam Rancangan Akhri RKPK TA. 2024 dan Qanun RPK TA. 2023-2026 yang bertujuan untuk meyakini bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPK telah disusun sesuai dengan tahapan, sistematika dan tata cara penyusunan dokumen sehingga terjadi konsistensi antar Bab. Pengujian dilakukan dengan melakukan analisis untuk melihat kesesuaian dengan kesimpulan :

- Indikator kinerja program tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja kegiatan tidak dicantumkan.

- Indikator kinerja sub kegiatan tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja kegiatan belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | OPD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 5 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | - | DINAS PP | Indikator kinerja sub kegiatan {Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 6 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | DINAS PP | Indikator kinerja sub kegiatan {Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)}telah mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksannya Kegiatan | DISPORAPAR | Indikator Kinerja kegiatan {Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |

- Berdasarkan Pedoman umum penyusunan RKPK TA. 2024 hasilnya telah menunjukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah telah dimuat dengan Menyusun program dan kegiatan terkait Pemilihan Kepala Daerah. Namun terhadap RKPK Tahun 2024 yang harus berpedoman pada RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi menunjukan belum semua pemilihan programnya mengikuti program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

2. **Kesesuaian terhadap Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab V Rencangan Akhir RKPK merupakan Hasil Indentifikasi Permasalahan Pembangunan pada BAB II dari Rancangan Akhir RKPK.**

   Pengujian kesesuaian terhadap arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada Bab V rancangan akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II rancangan akhir RKPK TA. 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

   a. Arah kebijakan yang dipilih dan dituangkan dalam BAB IV secara umum telah disusun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe yang telah disajikan dalam Bab II.

   b. Terdapat 8 Arah kebijakan yang disajikan dalam Bab IV tidak diuraikan sebelumya dalam Bab II pada penjelasan terkait permasalahan pembangunan untuk memperoleh konsistensi penyajian antar Bab. Permasalahan pembangunan seharusnya menyajikan permasalah pokok dan akar masalah sehingga menjadi salah satu dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas | Arah kebijakan yang dipilih dan disusun dalam Bab IV RKPK ini tidak diuraikan terlebih dahulu dalam penyajian permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi dalam Bab II |
| 2 | Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah | |
| 3 | Meningkatkan pembangunan demokrasi yang partisipatif | |
| 4 | Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan | |
| 5 | Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; | |
| 6 | Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban. | |
| 7 | Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana. | |
| 8 | Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat | |

3. **Kesesuaian antara Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan pada Bab IV Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan Isu Strategis pada BAB II RKPK TA. 2024**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian antara arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada Bab IV rancangan akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan isu strategis pada BAB II RKPK TA. 2024 yang bertujuan untuk meyakini bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPK telah disusun sesuai dengan tahapan, sistematika dan tata cara penyusunan dokumen sehingga terjadi konsistensi antar Bab. Hasil pengujian menunjukan simpulan sebagai berikut:

- Arah kebijakan yang dipilih dan dituangkan dalam BAB IV secara umum telah disusun berdasarkan isu strategis pemerintah daerah yang telah disajikan dalam Bab II.
- Terdapat beberapa Isu Strategis yang disajian dalam Bab II namun tidak memiliki arah kebijakan yang tepat dalam penyajian Bab IV yaitu isu strategis berikut ini :
  a. Peningkatan Kualitas Demokrasi.
  b. Peningkatan Kualitas SDM.

## VIII. Komentar dari Tim Penyusun

Tim penyusun RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 telah menanggapi hasil reviu dengan penjelasan menjelaskan sebagai berikut:

1. Pemenuhan dokumen terkait mekanisme Penyusunan RKPK TA. 2024.

   Penjelasan/tindak lanjut :

   Atas kekurangan dokumen kelengkapan kegiatan Musrenbang Tahun 2024 berupa Surat Undangan, Absensi Peserta, dan Dokumentasi Kegiatan sudah dilengkapi dan akan diserahkan kepada Tim Reviu pada kesempatan pertama.

2. Keselarasan dan kesesuaian terhadap pencantuman indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK TA. 2024 dengan BAB VIII dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 (terkait IKU dan IKD).

   Penjelasan/tindak lanjut :

   Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.

3. Kesesuaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab IV dengan Sasaran pada Bab V Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 dan Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, pada Bab VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026.

   Penjelasan/tindak lanjut :

   Ditindaklanjuti, dan akan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024.

4. Kesesuaian Dengan Membandingkan Indikator Dan Target Kinerja Pada BAB VI Rancangan Akhir RKPK dengan BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD).

   Penjelasan/ tindak lanjut :

   Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024

5. Kesesuaian Atas Penyusunan Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 Telah Mempedomani Peraturan yang Berlaku Terkait Penyusunan RKPK TA. 2024

   Penjelasan/tindak lanjut :

   Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024.

6. Kesesuaian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program pada rancangan akhir RKPK TA. 2024 dan Qanun RPK Tahun 2023-2026.

   Penjelasan/tindak lanjut :

   - Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.
   - Ditindaklanjuti, pemilihan program dalam RKPK untuk mendukung program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Prioritas Provinsi akan disesuaikan pada dokumen penetapan RKPK Tahun 2024.

7. Kesesuaian terhadap Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab V Rencangan Akhir RKPK merupakan Hasil Indentifikasi Permasalahan Pembangunan pada BAB II dari Rancangan Akhir RKPK.

   Penjelasan/tindak lanjut :

   Ditindaklanjuti, dan disesuaikan pada dokumen RKPK Tahun 2024.

8. Kesesuaian antara Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan pada Bab IV Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan Isu Strategis pada BAB II RKPK TA. 2024.

   Penjelasan/ tindak lanjut :

   Ditindaklanjuti, akan diuraikan arah kebijakan tentang isu strategis yang diuraikan dalam Bab IV.

## IX. Rekomendasi

Kepada Tim Penyusun RKPK Lhokseumawe TA. 2024 Lhokseumawe 2023-2026 disarankan agar :

1. Melengkapi dokumentasi kegiatan Musrenbang RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 berupa surat undangan, daftar hadir peserta, dan dokumentasi kegiatan.
2. Melakukan perbaikan atas pencantuman indikator dan target kinerja dalam RKPK Tahun 2024 yang belum sesuai dengan dokumen RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
3. Melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan yang belum sesuai antara dokumen RKPK Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2023-2026.

4. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja program yang belum berorientasi outcome dan belum memenuhi kriteria SMART.
5. Mempedomani semua tahapan, tatacara, terkait subtansi dan konsistensi antar bab dalam penyusunan dokumen RKPK Tahun 2024 berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2023.

## X. Apresiasi

Inspektorat Kota Lhokseumawe mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari semua pihak, sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.

Lhokseumawe, 27 Juni 2023
**Inspektur Kota Lhokseumawe,**

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE INSPEKTORAT

**Azwar, SH.MAP**
NIP. 19630925 200212 1 003

INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

# CATATAN HASIL REVIU
# RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK)
# LHOKSEUMAWE
# TAHUN 2024

**PADA**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN**
**DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE**

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

# INSPEKTORAT

Jl. Darussalam No. 109 Telp/Fax (0645) 43543 Lhokseumawe

## SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor : 800/ 53 /IL/2023

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe.
4. Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan Pada Organisasi perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun 2023.

Inspektur Kota Lhokseumawe, memberi tugas kepada :

| No | Nama | Jabatan | Jumlah Hari |
|---|---|---|---|
| 1. | Azwar, SH.,MAP | Penanggung Jawab | 3 Hari |
| 2. | Munawar Faiza, S.IP | Wakil Penanggung Jawab | 3 Hari |
| 3. | Syahril, S.Pt, MSM | Pembantu Penanggung Jawab | 12 Hari |
| 4. | Marlaini, SE.M.Si.Ak.CA | Pengendali Teknis | 16 Hari |
| 5. | Agus Zuliana, SE | Ketua Tim | 16 Hari |
| 6. | Zulkifli, S.Pd | Anggota Tim | 16 Hari |
| 7. | Karmawan Prawira, SE | Anggota Tim | 16 Hari |
| 8. | Kadri Ardinan, SE.M.Si | Anggota Tim | 16 Hari |
| 9. | Ida Yusnur, SE | Anggota Tim | 16 Hari |

Untuk : Melakukan Reviu Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2024.

Sasaran : Untuk memperoleh keyakinan terbatas Terhadap Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2023 yang telah disusun memenuhi aturan yang berlaku.

| Waktu : | | | |
|---|---|---|---|
| | Perencanaan | 02 Hari | (30 s.d 31 Mei 2023) |
| | Pelaksanaan | 12 Hari | (05 Juni s.d 20 Juni 2023) |
| | Pelaporan | 02 Hari | (21 s.d 22 Juni 2023 ) |

Di : Bappeda Kota Lhokseumawe.

***DALAM MELAKSANAKAN TUGAS AUDITOR, TIM PEMERIKSA DAN PEGAWAI DILARANG MENERIMA GRATIFIKASI DALAM BENTUK APAPUN***

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Lhokseumawe, 30 Mei 2023
Inspektur Kota Lhokseumawe

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE INSPEKTORAT

**AZWAR, SH.MAP**
NIP 19630925 200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

# INSPEKTORAT

**Jl. Darussalam No. 109 Telp/Fax (0645) 43543 Lhokseumawe**

## CATATAN HASIL REVIU
## Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK)
## Kota Lhokseumawe Tahun 2024

Pemerintah Kota Lhokseumawe

Inspektorat Kota Lhokseumawe

Disusun Oleh : Agus Zuliana, SE
Tanggal/Paraf : 21 Juni 2023/
Direviu Oleh : Marlaini, SE.,M.SI.,Ak,CA
Tanggal/Paraf : 22 Juni 2023/
Disetujui Oleh : Azwar, SH.MAP
Tanggal/Paraf : 22 Juni 2023/

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kota Lhokseumawe Nomor: 800/ 53 / IL /2023 tanggal 30 Mei 2023 untuk melaksanakan reviu Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024. RKPK Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Qanun Rencana Pembangunan Kota (RPK) Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Tata cara penyusunan RKPK Lhokseumawe TA. 2024 juga mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah dan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 serta Peraturan terkait lainnya.

Maka dari itu, kami sampaikan Catatan Hasil Reviu (CHR) berupa kesimpulan yang terkait dengan beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian, sehingga perlu dilakukan perbaikan dengan segera, sebagai berikut:

**A. Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA. 2024 dengan RPK TA. 2023 - 2026.**

Berdasarkan hasil pengujian Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA.2024 dengan RPK TA. 2023-2026 dengan tujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen RPK untuk memperoleh keselarasan. Tim reviu melakukan pengujian dengan hasil sebagai berikut :

**1. Pemenuhan Dokumen Pendukung Penyusunan RKPK TA. 2024.**

Berdasarkan hasil Ceklist kelengkapan dokumen penyusunan Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 secara keseluruhan sudah terpenuhi, namun ada beberapa bukti dokumen yang belum lengkap terkait proses penyusunan RKPK yaitu pada kegiatan Musrembang RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. Kelengakpan kegiatan Musrembang sudah dilengkapi dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan tetapi surat undangan, absensi peserta, dan dokumentasi kegiatan tidak tersedia.

**2. Kesesuaian Kesesuaian Terhadap Pencantuman Target Kinerja Sasaran Dan Program dengan Membandingkan Antara Rancangan Akhir RKPK dengan Qanun RPK.**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian terhadap pencantuman target kinerja sasaran dan program dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPK dengan Qanun RPK yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen Perubahan RPK diperolah hasil masih ada ketidaksesuaian/keselarasan. Tim telah melakukan reviu yang menunjukan hasil masih terdapat beberapa Indikator Program dan target pada RKPK Tahun 2024 yang

tidak dicantumkan serta Indikator Program dan target yang belum sesuai dengan Qanun RPK 2023-2026 pada tahun berkenaan. Adapun rinciannya dapat lihat pada tebel berikut:

| No | Program | Indikator Kinerja Program RKPK TA. 2024 | Target Kinerja RKPK TA.2024 | Indikator Kinerja Program RPK TA 2023-2026 | Target Kinerja RPK | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rasio Rumah Layak Huni | 69.63 Rasio | Persentase Ketersediaan rumah layak huni | 69.63 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 30 dokumen | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | 100 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,70 Indeks | Tersusunya RPPLH Kab/Kota | Tidak ada | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,70 Indeks | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65,35 Nilai | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 0,33 persen | Persentase luasan taman | 61,95 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 85 ton | Persentase jumlah sampah yang ditangani | 89,73 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | - | Pembinaan Pramuka | 42,86 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | - | Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata | 60 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 9 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | - | Peningkatkan Kunjungan Wisata | 96,88 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 10 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | - | Persentase Pembinaan SDM Pariwisata | 100 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |
| 11 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | - | - | Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan | 72,73 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 |

**3. Kesesuaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab IV dengan Sasaran pada Bab V Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 dan Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, pada Bab VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026.**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada bab IV dengan sasaran pada BAB V rancangan akhir RKPK TA. 2024 dan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, pada BAB VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen

Perubahan RPK. Tim telah melakukan reviu dengan hasil yang menunjukan bahwa semua sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada BAB IV dengan sasaran pada BAB V Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 sesuai dan selaras dengan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah pada BAB VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA.2023-2026. Namun terdapat beberapa program pembangunan daerah yang disajikan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 tidak dimasukan dalam Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 pada BAB IV tabel 4.5. Adapun rincian programnya dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Program Pembangunan Daerah | OPD |
|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DISPORAPAR |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DISPORAPAR |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DISPORAPAR |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DISPORAPAR |

**4. Kesesuaian Dengan Membandingkan Indikator Dan Target Kinerja Pada BAB VI Rancangan Akhir RKPK dengan BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD).**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian terhadap indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK TA. 2024 dengan BAB VIII dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 (terkait IKU dan IKD) yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen RPK, menunjukan hasil masih ada yang tidak sesuai. Hasil analisis ini dengan membandingkan indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD) diperolah kesimpulan masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada beberapa bidang urusan yang belum berorientasi hasil *(outcome)* dan belum

memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu specifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu:

| No | Indikator Kinerja program | Keterangan | OPD |
|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan | Indikator kinerja program {Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan}Belum Berorientasi Outcome. | DINKES |
| 2 | Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Indikator kinerja program {Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat}Belum Berorientasi Outcome. | DINKES |
| 3 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Indikator kinerja program {Persentase ketaatan terhadap RTRW}Belum Berorientasi Outcome. | PUPR |
| 4 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Indikator kinerja program {Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup}Belum Berorientasi Outcome. | DLH |
| 5 | Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan | Indikator kinerja program {Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan}Belum Berorientasi Outcome. | CAPIL |
| 6 | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik | Indikator kinerja program {Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik}Belum Berorientasi Outcome. | DPMG |
| 7 | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Indikator kinerja program {Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera}Belum Berorientasi Outcome. | DINAS PP |
| 8 | Ketersediaan Pelabuhan Laut | Indikator kinerja program {Ketersediaan Pelabuhan Laut}Belum Berorientasi Outcome. | DISHUB |
| 9 | Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal | Indikator kinerja program {Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal}Belum Berorientasi Outcome. | DPMTSP |
| 10 | Pembinaan Pramuka | Indikator kinerja program {Pembinaan Pramuka}Belum Berorientasi Outcome. | DISPORA |
| 11 | Cakupan Pembinaan Perpustakaan | Indikator kinerja program {Cakupan Pembinaan Perpustakaan}Belum Berorientasi Outcome. | ARPUS |
| 12 | Cakupan Sarana Kelompok Tani | Indikator kinerja program {Cakupan Sarana Kelompok Tani}Belum Berorientasi Outcome. | DKPPP |
| 13 | Cakupan Prasarana Kelompok Tani | Indikator kinerja program {Cakupan Prasarana Kelompok Tani}Belum Berorientasi Outcome. | DKPPP |
| 14 | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Indikator kinerja program {Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting}Belum Berorientasi Outcome. | DISKOP |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 15 | Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang | Indikator kinerja program {Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang}Belum Berorientasi Outcome. | DISKOP |
| 16 | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator kinerja program {Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat}Belum Berorientasi Outcome. | SETDAKO |
| 17 | Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Indikator kinerja program {Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan}Belum Berorientasi Outcome. | SETDAKO |
| 18 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK | Indikator kinerja program {Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK}Belum Berorientasi Outcome. | BAPPEDA |
| 19 | Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah | Indikator kinerja program {Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah}Belum Berorientasi Outcome. | BPKD |
| 20 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | B. SAKTI |
| 21 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | B. MANGAT |
| 22 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | M. SATU |
| 23 | Cakupan Pembinaan Syariat Islam | Indikator kinerja program {Cakupan Pembinaan Syariat Islam} Belum Berorientasi Outcome. | DSI-PD |

## B. Kesesuaian atau Keselarasan Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah Mempedomani Permendagri terkait Penyusunan RKPK TA. 2024

Berdasarkan hasil pengujian dari analisis dokumen dan permintaan keterangan terkait proses tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe tahun 2024, secara keseluruhan belum menyajikan substansi yang harus diuraikan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 dan Permendagri 86 Tahun 2017 terkait sistematika dan tata cara penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 |
|---|---|---|
| A | Analisis rancangan akhir RKPK yang disusun berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017, Sebagai berikut : | |
| 1 | Bab 1 pendahuluan<br>a.Latar belakang | Belum menjelaskan bagaimana tindak lanjutnya terhadap proses penyusunan RAPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, agar dijelaskan proses dari bermulanya tahapan penyusunan RKPK 2024 seperti SK Kegiatan, Konsultasi Publik Ranwal RKPK, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Penelaahan POKIR Dewan, dan Musrenbang Rancangan Akhir RKPK. |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, Agar Gambar 1.1 terkait Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD diperbaiki (gambar tidak jelas/kabur) |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, untuk skala prioritas seperti Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi agar ditambahkan dalam pendahuluan |
| | | Poin 1.2 Dasar Hukum Penyusunan, Pencantuman dasar hukum penyusunan agar diteliti kembali peraturan perundang-undangan yang relevan |
| | b. Dasar hukum penyusunan | Masih ada ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan belum memiliki keterkaitan secara langsung dengan penyusunan RKPD seperti point 8, 9, 16, 19, 24, 25, 26, 27. |
| | e.Sistematika dokumen RKPD | Penulisan judul pada beberapa bab seperti bab 2,3,4,5 dan 6 belum dilengkapi dengan nama Kota Lhokseumawe |
| 2 | Bab II Gambaran umum kondisi Kota Lhokseumawe | Umum dan Aspek Daya Saing Daerah |
| | b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegatian RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD | 'Belum menguraikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya adalah untuk menilai dan mengidentifikasi program serta kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% sehingga dapat diusulkan lagi pada penyusunan RKPK tahun berikutnya.<br>Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan RKPK tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi table RPK dalam format tabel t-c-19. |
| | | Penyajian tabel dan gambar agar dinarsikan secara umum sebelum tabel dan gambar disajikan, dan setelah penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan hasil analis terkait penyajian tabel dan gambar di atas, sehingga tidak ada tabel yang dijelaskan dengan tabel pun juga gambar seperti Gambar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dst & Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dst |
| | | Penyajian tabel dan gambar agar menggunakan data terakhir minimal data per 31 desember 2022. |
| | | Jika penyajian tabel lebih dari 1 (satu) halaman, untuk tabel halaman berikutnya agar dibuat judul tabel sebagai lanjutan tabel untuk penyajian data yang lebih informatif, contoh Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 & Tabel 2.74 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 , pun juga untuk tabel-tabel lainnya |

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 |
|---|---|---|
| | | Pada Poin Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe terkait Isu-isu strategis agar ditambahakan terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi serta data-data korelasi yang diharapkan. |
| | | |
| 3 | Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Kota Lhokseumawe | Belum menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu danp erkiraan tahun berjalan mencakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan. |
| | a. Arah kebijakan ekonomi Kota Lhokseumawe | Belum memaparkan arah nasional dibidang ekonomi yang dicantumkan pada dokumen RKPD tahun 2024 dan kebijakan dibidang ekonomi yang tercantum pada RPJMK/RPK provinsi dan kota Lhokseuawe sehinga perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mengatasi permasalahan daerah |
| | | Dalam Bab III ini agar ditambahkan strategi penanggulangan Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, Inflasi dan juga Suksesi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, baik terkait langkah-langkah dan anggaran. |
| | | Terkait analisis terhadap penyajian tabel agar penjelasannya tidak mendahului daripada penyajian tabel itu sendiri seperti tabel 3.3 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025, pun juga untuk tabel-tabel lainnya agar dilakukan analisis terhadap penyajian tabel dan gambar. |
| 4 | Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe | - Belum memaparkan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksaan RKPK tahun lalu dan capaiana kinerja yang direncanakan dalam RPK, serta rancangan kerangka ekonomi daerah berserta kerangka pendanaan.<br>- Tidak ada konsistensi data untuk jumlah dan nama program prioritas pembangunan dalam tabel 4.5 dengan jumlah dan nama program yang disajikan pada bab 5 dalam tabel 5.5.<br>- Setiap selesai penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan analisis terkait penjelasan tabel dan gambar yang disajikan, kemudian pada penyajian tabel yang melebihi 1 (satu) hamalan agar dibuat lanjutan tabel untuk halaman berikutnya. |
| 5 | Bab V Rencana kerja pendanaan Kota Lhokseumawe | Belum memaparkan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam tahun rencana RPK pada RKPK tahun 2024. |
| | | Terdapat program pembangunan dalam RPK yang tidak dimasukan dalam RKPK tahun 2024, namun belum diuraikan penyebab dan alasan tidak diakomodir dalam RPKP Tahun 2024 |
| 6 | Bab VI Kinerja penyelenggaraan Pemrintah Kota Lhokseumawe | Penetapan indiator peyelenggaran Pemerintah daerah yang menjadi tolak ukur pencapain kinerja tahunan belum seluruhnya menjadi IKU yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals) serta masih ada IKU yang belum berorientasi hasil (outcome). |

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 |
|---|---|---|
| | | Terkait rencana kerja dan pendanaan daerah, untuk penyajian jumlah pendapatan, belanja, pembiayaan harus di integrasikan dengan data yang ada di SIPD dan tidak memaksakan anggaran yang berpotensi defisit dengan menaikan jumlah pendapatan daerah yang tidak rasional. |
| | | Setiap selesai penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan analisis terjait penjelasan tabel dan gambar yang disajikan, kemudian pada penyajian tabel yang melebihi 1 (satu) halaman agar dibuat lanjutan tabel untuk halaman berikutnya |

## C. Konsistensi dan Keterkaitan Antar Bab pada Penyusunan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA. 2024.

### 1. Kesesuaian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program pada rancangan akhir RKPK TA. 2024 dan Qanun RPK Tahun 2023-2026.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program dalam Rancangan Akhri RKPK TA. 2024 dan Qanun RPK TA. 2023-2026 yang bertujuan untuk meyakini bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPK telah disusun sesuai dengan tahapan, sistematika dan tata cara penyusunan dokumen sehingga terjadi konsistensi antar Bab. Pengujian dilakukan dengan melakukan analisis untuk melihat kesesuaian dengan kesimpulan :

- Indikator kinerja program tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja kegiatan tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja sub kegiatan tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja kegiatan belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | OPD | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 5 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | - | DINAS PP | Indikator kinerja sub kegiatan {Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| 6 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | DINAS PP | Indikator kinerja sub kegiatan {Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)}telah mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| 7 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksannya Kegiatan | DISPORAPAR | Indikator Kinerja kegiatan {Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. |

- Berdasarkan Pedoman umum penyusunan RKPK TA. 2024 hasilnya telah menunjukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di

bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah telah dimuat dengan Menyusun program dan kegiatan terkait Pemilihan Kepala Daerah. Namun terhadap RKPK Tahun 2024 yang harus berpedoman pada RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi menunjukan belum semua pemilihan programnya mengikuti program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

**2. Kesesuaian terhadap Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab V Rencangan Akhir RKPK merupakan Hasil Indentifikasi Permasalahan Pembangunan pada BAB II dari Rancangan Akhir RKPK.**

Pengujian kesesuaian terhadap arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada Bab V rancangan akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II rancangan akhir RKPK TA. 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Arah kebijakan yang dipilih dan dituangkan dalam BAB IV secara umum telah disusun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe yang telah disajikan dalam Bab II.

b. Terdapat 8 Arah kebijakan yang disajikan dalam Bab IV tidak diuraikan sebelumya dalam Bab II pada penjelasan terkait permasalahan pembangunan untuk memperoleh konsistensi penyajian antar Bab. Permasalahan pembangunan seharusnya menyajikan permasalah pokok dan akar masalah sehingga menjadi salah satu dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas | Arah kebijakan yang dipilih dan disusun dalam Bab IV RKPK ini |
| 2 | Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | Meningkatkan pembangunan demokrasi yang partisipatif | tidak diuraikan terlebih dahulu dalam penyajian permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi dalam Bab II |
| 4 | Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan | |
| 5 | Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; | |
| 6 | Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban. | |
| 7 | Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana. | |
| 8 | Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat | |

**3. Kesesuaian antara Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan pada Bab IV Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan Isu Strategis pada BAB II RKPK TA. 2024**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian antara arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada Bab IV rancangan akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan isu strategis pada BAB II RKPK TA. 2024 yang bertujuan untuk meyakini bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPK telah disusun sesuai dengan tahapan, sistematika dan tata cara penyusunan dokumen sehingga terjadi konsistensi antar Bab. Hasil pengujian menunjukan simpulan sebagai berikut:

- Arah kebijakan yang dipilih dan dituangkan dalam BAB IV secara umum telah disusun berdasarkan isu strategis pemerintah daerah yang telah disajikan dalam Bab II.
- Terdapat beberapa Isu Strategis yang disajian dalam Bab II namun tidak memiliki arah kebijkan yang tepat dalam penyajian Bab IV yaitu isu strategis berikut ini :
  a. Peningkatan Kualitas Demokrasi.
  b. Peningkatan Kualitas SDM.

## D. REKOMENDASI

Kepada Tim Penyusun RKPK Lhokseumawe TA. 2024 Lhokseumawe 2023-2026 disarankan agar :

1. Melengkapi dokumentasi kegiatan Musrenbang RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 berupa surat undangan, daftar hadir peserta, dan dokumentasi kegiatan.
2. Melakukan perbaikan atas pencantuman indikator dan target kinerja dalam RKPK Tahun 2024 yang belum sesuai dengan dokumen RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
3. Melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan yang belum sesuai antara dokumen RKPK Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2023-2026.
4. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja program yang belum berorientasi outcome dan belum memenuhi kriteria SMART.
5. Mempedomani semua tahapan, tatacara, terkait subtansi dan konsistensi antar bab dalam penyusunan dokumen RKPK Tahun 2024 berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2023.

Kepala Bidang Program,
Pendanaan Pembangunan
Bappeda Kota Lhokseumawe

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BAPPEDA

**Firdaus, SE**
NIP. 19700610 200504 1 002

Lhokseumawe, 22 Juni 2023
Pengendali Teknis

**Marlaini, SE. M.Si. Ak. CA**
NIP. 19751210 200504 2001

# BERITA ACARA KESEPAKATAN TINDAK LANJUT

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Dua** Bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut antara pihak-pihak :

Nama : Firdaus, SE
Nip : 19700610 200504 1 002
Jabatan : Kabid Program, Pendanaan Pembangunan BAPPEDA Kota Lhokseumawe
Sebagai Pihak Pertama

Nama : Marlaini, SE, M.Si, Ak, CA
Nip : 19751210 200504 2 001
Jabatan : Pengendali Teknis/Auditor Madya
Sebagai Pihak Kedua

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah menyatakan sepakat atas pembahasan tentang Hasil Reviu seperti terlampir dalam Berita Acara Pembahasan Hasil Reviu.

Tindak lanjut akan dilakukan hari setelah berita acara ini ditandatangani.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya.

Lhokseumawe, 22 Juni 2023

| Pihak Pertama, | Pihak Kedua, |
|---|---|
| PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE BAPPEDA | |
| **FIRDAUS, SE** | **MARLAINI, SE, M.Si, Ak, CA** |
| NIP. 19700610 200504 1 002 | NIP. 19751210 200504 2 001 |

# INSPEKTORAT KOTA LHOKSEUMAWE

## PERNYATAAN TELAH DIREVIU
## RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA (RKPK) LHOKSEUMAWE
## TAHUN 2024

Kami telah mereviu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe untuk Tahun 2024 sesuai Pedoman Reviu atas dokumen Perencananaan Kerja Pemerintah serta Penganggaran Tahunan Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 menjadi tanggungjawab manajemen pada Pemerintah Kota Lhokseumawe.

Reviu bertujuan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta memberikan keyakinan terbatas mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi agar sesuai dengan kaidah dan tata cara perencanaan pembangunan daerah, sehingga dapat menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Pelaksanaan reviu atas dokumen perencanaan pembangunan ini, untuk memberi keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan terhadap informasi dalam Perubahan RKPD.

Dipindai dengan CamScanner

Berdasarkan hasil reviu kami, secara umum sudah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, namun masih terdapat hal yang perlu mendapatkan perbaikan dan penyesuaian dalam penyajian dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2024.

Lhokseumawe, 22 Juni 2023

**INSPEKTUR KOTA LHOKSEUMAWE**

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE INSPEKTORAT

**Azwar, SH. M.AP**

NIP. 19630925 200212 1 003

Dipindai dengan CamScanner

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
JL. H. RAMLI RIDWAN NO. 2 TELP. (0645) 630835 FAXIMILE (0645) 630253
Website : www.bappeda.lhokseumawekota.go.id
**LHOKSEUMAWE - 24351**

Lhokseumawe, 23 Juni 2023

Nomor : 050 / 924
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penjelasan/Tindak Lanjut atas CHR RKPK Lhokseumawe Tahun 2024.

Kepada Yth,

Inspektur Kota Lhokseumawe
di-
Tempat

Menindaklanjuti Catatan Hasil Reviu atas Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK) Lhokseumawe Tahun 2024 yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Lhokseumawe, berikut kami sampaikan Penjelasan/Tindak Lanjut atas Catatan Hasil Reviu RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 sebagai berikut:

**A. Kesesuaian Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA. 2024 dengan RPK Tahun 2023-2026.**

**1. Pemenuhan Dokumen Pendukung Penyusunan RKPK Tahun 2024.**

Berdasarkan hasil Ceklist kelengkapan dokumen penyusunan Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 secara keseluruhan sudah terpenuhi, namun ada beberapa bukti dokumen yang belum lengkap terkait proses penyusunan RKPK yaitu pada kegiatan Musrenbang RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. Kelengkapan kegiatan Musrenbang sudah dilengkapi dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan tetapi surat undangan, absensi peserta, dan dokumentasi kegiatan tidak tersedia.

*Penjelasan/Tindak Lanjut:*

Atas kekurangan dokumen kelengkapan kegiatan Musrenbang Tahun 2024 berupa Surat Undangan, Absensi Peserta, dan Dokumentasi Kegiatan sudah dilengkapi dan akan diserahkan kepada Tim Reviu pada kesempatan pertama.

**2. Kesesuaian Terhadap Pencantuman Target Kinerja Sasaran dan Program dengan Membandingkan Antara Rancangan Akhir RKPK dengan RPK.**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian terhadap pencantuman target kinerja sasaran dan program dengan membandingkan antara rancangan akhir RKPK dengan RPK yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen RPK diperolah hasil masih ada ketidaksesuaian/keselarasan. Tim telah melakukan reviu yang menunjukan hasil masih terdapat beberapa Indikator Program dan target pada RKPK Tahun 2024 yang tidak dicantumkan serta Indikator Program dan target yang belum sesuai dengan RPK 2023-2026 pada tahun berkenaan. Adapun rinciannya dapat lihat pada tebel berikut:

| No | Program | Indikator Kinerja Program RKPK TA. 2024 | Target Kinerja RKPK TA.2024 | Indikator Kinerja Program RPK TA 2023-2026 | Target Kinerja RPK | Keterangan | Penjelasan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN | Rasio Rumah Layak Huni | 69.63 Rasio | Persentase Ketersediaan rumah layak huni | 69.63 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 30 dokumen | Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah | 100 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 3 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,70 Indeks | Tersusunya RPPLH Kab/Kota | Ada | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 4 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 63,70 Indeks | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 65,35 Nilai | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 5 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Persentase Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | 0,33 persen | Persentase luasan taman | 61,95 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | 85 ton | Persentase jumlah sampah yang ditangani | 89,73 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 7 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | - | Pembinaan Pramuka | 42,86 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |

| No | Program | Indikator Kinerja Program RKPK TA. 2024 | Target Kinerja RKPK TA.2024 | Indikator Kinerja Program RPK TA 2023-2026 | Target Kinerja RPK | Keterangan | Penjelasan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | - | Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata | 60 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 9 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | - | Peningkatkan Kunjungan Wisata | 96,88 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 10 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | - | Persentase Pembinaan SDM Pariwisata | 100 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 11 | PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD | - | - | Persentase Rancangan Qanun yang ditetapkan | 72,73 Persen | Indikator dan target kinerja {PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD} dalam RKPK TA. 2024 tidak sesuai dengan Qanun RPK TA. 2023-2026 | Indikator dan Target Kinerja Program sudah disesuaikan dengan RPK 2023-2026, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |

**3. Kesesuaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab IV dengan Sasaran pada Bab V Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 dan Strategi, Arah Kebijakan, Program Pembangunan Daerah, pada Bab VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026.**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada bab IV dengan sasaran pada BAB V rancangan akhir RKPK TA. 2024 dan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah, pada BAB VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen Perubahan RPK. Tim telah melakukan reviu dengan hasil yang menunjukan bahwa semua sasaran dan prioritas pembangunan daerah pada BAB IV dengan sasaran pada BAB V Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 sesuai dan selaras dengan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah pada BAB VI yang ditetapkan dalam Qanun RPK TA.2023-2026. Namun terdapat beberapa program pembangunan daerah yang disajikan dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 tidak dimasukan dalam Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 pada BAB IV tabel 4.5. Adapun rincian programnya dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Program Pembangunan Daerah | OPD | Penjelasan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | DISPORAPAR | Ditindaklanjuti, dan akan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 2 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN | DISPORAPAR | Ditindaklanjuti, dan akan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 3 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN | DISPORAPAR | Ditindaklanjuti, dan akan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | DISPORAPAR | Ditindaklanjuti, dan akan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |

**4. Kesesuaian Dengan Membandingkan Indikator Dan Target Kinerja Pada BAB VI Rancangan Akhir RKPK dengan BAB VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD).**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian terhadap indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK TA. 2024 dengan BAB VIII dalam Qanun RPK TA. 2023-2026 (terkait IKU dan IKD) yang bertujuan untuk meyakini bahwa dokumen Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah berpedoman pada dokumen RPK, menunjukan hasil masih ada yang tidak sesuai. Hasil analisis ini dengan membandingkan indikator dan target kinerja pada BAB VI rancangan akhir RKPK dengan BAB VIII kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPK (terkait IKU dan IKD) diperolah kesimpulan masih terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada beberapa bidang urusan yang belum berorientasi hasil (outcome) dan belum memenuhi kriteria indikator yang baik yaitu specifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu:

| No | Indikator Kinerja program | Keterangan | OPD | Penjelasan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan | Indikator kinerja program {Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan}Belum Berorientasi Outcome. | DINKES | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 2 | Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Indikator kinerja program {Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat}Belum Berorientasi Outcome. | DINKES | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 3 | Persentase ketaatan terhadap RTRW | Indikator kinerja program {Persentase ketaatan terhadap RTRW}Belum Berorientasi Outcome. | PUPR | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 4 | Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup | Indikator kinerja program {Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup}Belum Berorientasi Outcome. | DLH | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 5 | Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan | Indikator kinerja program {Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan}Belum Berorientasi Outcome. | CAPIL | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |

| No | Indikator Kinerja program | Keterangan | OPD | Penjelasan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik | Indikator kinerja program {Persentase Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah Gampong yang Baik}Belum Berorientasi Outcome. | DPMG | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 7 | Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera | Indikator kinerja program {Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera}Belum Berorientasi Outcome. | DINAS PP | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 8 | Ketersediaan Pelabuhan Laut | Indikator kinerja program {Ketersediaan Pelabuhan Laut}Belum Berorientasi Outcome. | DISHUB | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 9 | Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal | Indikator kinerja program {Persentase Sektor pada Promosi Penanman Modal}Belum Berorientasi Outcome. | DPMTSP | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 10 | Pembinaan Pramuka | Indikator kinerja program {Pembinaan Pramuka}Belum Berorientasi Outcome. | DISPORA | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 11 | Cakupan Pembinaan Perpustakaan | Indikator kinerja program {Cakupan Pembinaan Perpustakaan}Belum Berorientasi Outcome. | ARPUS | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 12 | Cakupan Sarana Kelompok Tani | Indikator kinerja program {Cakupan Sarana Kelompok Tani}Belum Berorientasi Outcome. | DKPPP | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 13 | Cakupan Prasarana Kelompok Tani | Indikator kinerja program {Cakupan Prasarana Kelompok Tani}Belum Berorientasi Outcome. | DKPPP | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 14 | Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Indikator kinerja program {Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting}Belum Berorientasi Outcome. | DISKOP | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 15 | Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang | Indikator kinerja program {Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang}Belum Berorientasi Outcome. | DISKOP | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 16 | Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat | Indikator kinerja program {Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat}Belum Berorientasi Outcome. | SETDAKO | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 17 | Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan | Indikator kinerja program {Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan}Belum Berorientasi Outcome. | SETDAKO | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 18 | Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK | Indikator kinerja program {Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK}Belum Berorientasi Outcome. | BAPPEDA | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 19 | Cakupan Pengelolaan | Indikator kinerja program {Cakupan Pengelolaan Barang | BPKD | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen |

| No | Indikator Kinerja program | Keterangan | OPD | Penjelasan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|
| | Barang Milik Daerah | Milik Daerah}Belum Berorientasi Outcome. | | Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 20 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | B. SAKTI | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 21 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | B. MANGAT | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 22 | Persentase Penertiban | Indikator kinerja program {Persentase Penertiban}Belum Berorientasi Outcome. | M. SATU | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 23 | Cakupan Pembinaan Syariat Islam | Indikator kinerja program {Cakupan Pembinaan Syariat Islam} Belum Berorientasi Outcome. | DSI-PD | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |

**B. Kesesuaian atau Keselarasan Rancangan Akhir RKPK yang disusun telah Mempedomani Permendagri terkait Penyusunan RKPK TA. 2024.**

Berdasarkan hasil pengujian dari analisis dokumen dan permintaan keterangan terkait proses tahapan dan tata cara penyusunan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe tahun 2024, secara keseluruhan belum menyajikan substansi yang harus diuraikan dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 81 Tahun 2022 dan Permendagri 86 Tahun 2017 terkait sistematika dan tata cara penyusunan dokumen RKPD tahun 2024 sebagai berikut :

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 | Penjelasan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| A | Analisis rancangan akhir RKPK yang disusun berpedoman pada Permendagri 86 Tahun 2017, Sebagai berikut : | | |
| 1 | Bab 1 pendahuluan<br>a.Latar belakang | Belum menjelaskan bagaimana tindak lanjutnya terhadap proses penyusunan RAPBD Kota Lhokseumawe Tahun 2024 | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, agar dijelaskan proses dari bermulanya tahapan penyusunan RKPK 2024 seperti SK Kegiatan, Konsultasi Publik Ranwal RKPK, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Penelaahan POKIR Dewan, dan Musrenbang Rancangan Akhir RKPK. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, Agar Gambar 1.1 terkait Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD diperbaiki (gambar tidak jelas/kabur) | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Poin 1.1 Latar Belakang, untuk skala prioritas seperti Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, Stunting, | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 | Penjelasan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | | Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi agar ditambahkan dalam pendahuluan | |
| | | Poin 1.2 Dasar Hukum Penyusunan, Pencantuman dasar hukum penyusunan agar diteliti kembali peraturan perundang-undangan yang relevan | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | b. Dasar hukum penyusunan | Masih ada ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan belum memiliki keterkaitan secara langsung dengan penyusunan RKPD seperti point 8, 9, 16, 19, 24, 25, 26, 27. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | e.Sistematika dokumen RKPD | Penulisan judul pada beberapa bab seperti bab 2,3,4,5 dan 6 belum dilengkapi dengan nama Kota Lhokseumawe | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 2 | Bab II Gambaran umum kondisi Kota Lhokseumawe | Umum dan Aspek Daya Saing Daerah | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | b. Evaluasi pelaksanaan program dan kegatian RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD | 'Belum menguraikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja. Evaluasi yang dilakukan terkait kinerja tahun sebelumnya adalah untuk menilai dan mengidentifikasi program serta kegiatan yang belum terealisasi atau belum terlaksana 100% sehingga dapat diusulkan lagi pada penyusunan RKPK tahun berikutnya.<br>Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut diuraikan pelaksanaan program dan kegiatan RKPK tahun lalu, tahun berjalan dan realisasi table RPK dalam format tabel t-c-19. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Penyajian tabel dan gambar agar dinarsikan secara umum sebelum tabel dan gambar disajikan, dan setelah penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan hasil analis terkait penyajian tabel dan gambar di atas, sehingga tidak ada tabel yang dijelaskan dengan tabel pun juga gambar seperti Gambar 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dst & Tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dst | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Penyajian tabel dan gambar agar menggunakan data terakhir minimal data per 31 desember 2022. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Jika penyajian tabel lebih dari 1 (satu) halaman, untuk tabel halaman berikutnya agar dibuat judul tabel sebagai lanjutan tabel untuk penyajian data yang lebih informatif, contoh Tabel 2.7 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Lhokseumawe Tahun 2018-2022 & Tabel 2.74 Jumlah Pelanggaran Syariat Islam yang dilakukan Masyarakat Kota | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 | Penjelasan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | | Lhokseumawe Tahun 2018-2022 , pun juga untuk tabel-tabel lainnya | |
| | | Pada Poin Permasalahan Pembangunan Kota Lhokseumawe terkait Isu-isu strategis agar ditambahakan terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, dan Inflasi serta data-data korelasi yang diharapkan. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | | |
| 3 | Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Kota Lhokseumawe | Belum menguraikan penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu danp erkiraan tahun berjalan mencakup indicator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | a. Arah kebijakan ekonomi Kota Lhokseumawe | Belum memaparkan arah nasional dibidang ekonomi yang dicantumkan pada dokumen RKPD tahun 2024 dan kebijakan dibidang ekonomi yang tercantum pada RPJMK/RPK provinsi dan kota Lhokseuawe sehinga perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mengatasi permasalahan daerah | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Dalam Bab III ini agar ditambahkan strategi penanggulangan Stunting, Kemiskinan/Kemiskinan Ekstrim, Inflasi dan juga Suksesi Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada secara serantak di Tahun 2024, baik terkait langkah-langkah dan anggaran. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Terkait analisis terhadap penyajian tabel agar penjelasannya tidak mendahului daripada penyajian tabel itu sendiri seperti tabel 3.3 Realisasi dan Target/Proyeksi Belanja Kota Lhokseumawe Tahun 2021-2025, pun juga untuk tabel-tabel lainnya agar dilakukan analisis terhadap penyajian tabel dan gambar. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 4 | Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Kota Lhokseumawe | - Belum memaparkan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksaan RKPK tahun lalu dan capaiana kinerja yang direncanakan dalam RPK, serta rancangan kerangka ekonomi daerah berserta kerangka pendanaan.<br>- Tidak ada konsistensi data untuk jumlah dan nama program prioritas pembangunan dalam tabel 4.5 dengan jumlah dan nama program yang disajikan pada bab 5 dalam tabel 5.5.<br>- Setiap selesai penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan analisis terkait penjelasan tabel dan gambar | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |

| No | Sistematika Penyusunan Dokumen RKPK sesuai ketentuan yang berlaku | Catatan hasil reviu atas Substansi tatacara penyajian dokumen RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 | Penjelasan/Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| | | yang disajikan, kemudian pada penyajian tabel yang melebihi 1 (satu) hamalan agar dibuat lanjutan tabel untuk halaman berikutnya. | |
| 5 | Bab V Rencana kerja pendanaan Kota Lhokseumawe | Belum memaparkan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang direncanakan dalam tahun rencana RPK pada RKPK tahun 2024. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Terdapat program pembangunan dalam RPK yang tidak dimasukan dalam RKPK tahun 2024, namun belum diuraikan penyebab dan alasan tidak diakomodir dalam RPKP Tahun 2024 | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| 6 | Bab VI Kinerja penyelenggaraan Pemrintah Kota Lhokseumawe | Penetapan indiator peyelenggaran Pemerintah daerah yang menjadi tolak ukur pencapain kinerja tahunan belum seluruhnya menjadi IKU yang memenuhi kriteria SMART (specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound goals) serta masih ada IKU yang belum berorientasi hasil (outcome). | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Terkait rencana kerja dan pendanaan daerah, untuk penyajian jumlah pendapatan, belanja, pembiayaan harus di integrasikan dengan data yang ada di SIPD dan tidak memaksakan anggaran yang berpotensi defisit dengan menaikan jumlah pendapatan daerah yang tidak rasional. | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |
| | | Setiap selesai penyajian tabel dan gambar agar ditambahkan analisis terjait penjelasan tabel dan gambar yang disajikan, kemudian pada penyajian tabel yang melebihi 1 (satu) halaman agar dibuat lanjutan tabel untuk halaman berikutnya | Ditindaklanjuti, dan akan disesuaikan pada dokumen Penetapan RKPK Tahun 2024 |

## C. Konsistensi dan Keterkaitan Antar Bab pada Penyusunan Rancangan Akhir RKPK Lhokseumawe TA. 2024.

### 1. Kesesuaian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program pada rancangan akhir RKPK TA. 2024 dan Qanun RPK Tahun 2023-2026.

Berdasarkan hasil pengujian terhadap kinerja kegiatan/sub kegiatan telah mendukung kinerja program dalam Rancangan Akhri RKPK TA. 2024 dan Qanun RPK TA. 2023-2026 yang bertujuan untuk meyakini bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPK telah disusun sesuai dengan tahapan, sistematika dan tata cara penyusunan dokumen sehingga terjadi konsistensi antar Bab. Pengujian dilakukan dengan melakukan analisis untuk melihat kesesuaian dengan kesimpulan :

- Indikator kinerja program tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja kegiatan tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja sub kegiatan tidak dicantumkan.
- Indikator kinerja kegiatan belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. Adapun rinciannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

| No | Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | OPD | Keterangan | Penjelasan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 2 | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 3 | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 4 | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja program {PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 5 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | - | DINAS PP | Indikator kinerja sub kegiatan {Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| 6 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | DINAS PP | Indikator kinerja sub kegiatan {Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)}telah mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |

| No | Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | OPD | Keterangan | Penjelasan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota | Terlaksannya Kegiatan | DISPORAPAR | Indikator Kinerja kegiatan {Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| | Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga | Jumlah dokumen laporan | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga} belum mendukung kinerja program untuk pencapaian sasaran pemerintah daerah. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| | Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |

| No | Program, Kegiatan/ Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program | OPD | Keterangan | Penjelasan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|---|---|
| | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |
| | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | - | DISPORAPAR | Indikator kinerja kegiatan {Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar} tidak dicantumkan dalam RKPK TA. 2024. | Indikator dan Target Kinerja sudah disesuaikan, dan disajikan pada dokumen Penetapan RKPK Lhokseumawe Tahun 2024. |

- Berdasarkan Pedoman umum penyusunan RKPK TA. 2024 hasilnya telah menunjukan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik di daerah telah dimuat dengan Menyusun program dan kegiatan terkait Pemilihan Kepala Daerah. Namun terhadap RKPK Tahun 2024 yang harus berpedoman pada RKP Tahun 2024 serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi menunjukan belum semua pemilihan programnya mengikuti program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

  *Penjelasan/Tindak Lanjut:*

  Ditindaklanjuti, pemilihan program dalam RKPK untuk mendukung program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Prioritas Provinsi akan disesuaikan pada dokumen penetapan RKPK Tahun 2024.

**2. Kesesuaian terhadap Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan Daerah pada Bab V Rencangan Akhir RKPK merupakan Hasil Indentifikasi Permasalahan Pembangunan pada BAB II dari Rancangan Akhir RKPK.**

Pengujian kesesuaian terhadap arah kebijakan serta program prioritas pembangunan daerah pada Bab V rancangan akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan hasil indentifikasi permasalahan pembangunan pada BAB II rancangan akhir RKPK TA. 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Arah kebijakan yang dipilih dan dituangkan dalam BAB IV secara umum telah disusun berdasarkan identifikasi permasalahan pembangunan Kota Lhokseumawe yang telah disajikan dalam Bab II.

b. Terdapat 8 Arah kebijakan yang disajikan dalam Bab IV tidak diuraikan sebelumya dalam Bab II pada penjelasan terkait permasalahan pembangunan untuk memperoleh konsistensi penyajian antar Bab. Permasalahan pembangunan seharusnya menyajikan permasalah pokok dan akar masalah

sehingga menjadi salah satu dasar perumusan arah kebijakan pembangunan daerah yaitu dapat dilihat pada tabel berikut :

| No | Arah Kebijakan Pembangunan Daerah | Keterangan | Penjelasan / Tindak Lanjut |
|---|---|---|---|
| 1 | Penguatan Kelembagaan dan pengelolaan pendidikan secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas | Arah kebijakan yang dipilih dan disusun dalam Bab IV RKPK ini tidak diuraikan terlebih dahulu dalam penyajian permasalahan pembangunan yang telah diidentifikasi dalam Bab II | Ditindaklanjuti, dan disesuaikan pada dokumen RKPK Tahun 2024. |
| 2 | Optimalisasi kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dan retribusi daerah | | |
| 3 | Meningkatkan pembangunan demokrasi yang partisipatif | | |
| 4 | Penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan serta peningkatan sarana prasarana pemerintahan | | |
| 5 | Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; | | |
| 6 | Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban. | | |
| 7 | Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana. | | |
| 8 | Pengembangan nilai budaya aceh dan penyebarluasan informasi sejarah kepada masyarakat | | |

**3. Kesesuaian antara Arah Kebijakan serta Program Prioritas Pembangunan pada Bab IV Rancangan Akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan Isu Strategis pada BAB II RKPK TA. 2024.**

Berdasarkan hasil pengujian atas kesesuaian antara arah kebijakan serta program prioritas pembangunan pada Bab IV rancangan akhir RKPK TA. 2024 disusun berdasarkan isu strategis pada BAB II RKPK TA. 2024 yang bertujuan untuk meyakini bahwa rumusan Rancangan Akhir RKPK telah disusun sesuai dengan tahapan, sistematika dan tata cara penyusunan dokumen sehingga terjadi konsistensi antar Bab. Hasil pengujian menunjukan simpulan sebagai berikut:

- Arah kebijakan yang dipilih dan dituangkan dalam BAB IV secara umum telah disusun berdasarkan isu strategis pemerintah daerah yang telah disajikan dalam Bab II.
- Terdapat beberapa Isu Strategis yang disajian dalam Bab II namun tidak memiliki arah kebijkan yang tepat dalam penyajian Bab IV yaitu isu strategis berikut ini :
  a. Peningkatan Kualitas Demokrasi;
  b. Peningkatan Kualitas SDM.

*Penjelasan/Tindaklanjut:*

Ditindaklanjuti, akan diuraikan arah kebijakan tentang isu strategis yang diuraikan dalam Bab IV.

## D. REKOMENDASI

Kepada Tim Penyusun RKPK Lhokseumawe TA. 2024 Lhokseumawe 2023-2026 disarankan agar :

1. Melengkapi dokumentasi kegiatan Musrenbang RKPK Lhokseumawe Tahun 2024 berupa surat undangan, daftar hadir peserta, dan dokumentasi kegiatan.
2. Melakukan perbaikan atas pencantuman indikator dan target kinerja dalam RKPK Tahun 2024 yang belum sesuai dengan dokumen RPK Lhokseumawe Tahun 2023-2026.
3. Melakukan penyesuaian terhadap program prioritas pembangunan yang belum sesuai antara dokumen RKPK Tahun 2024 dengan RKP Tahun 2023-2026.
4. Melakukan perbaikan terhadap indikator kinerja program yang belum berorientasi outcome dan belum memenuhi kriteria SMART.
5. Mempedomani semua tahapan, tatacara, terkait subtansi dan konsistensi antar bab dalam penyusunan dokumen RKPK Tahun 2024 berdasarkan Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2023.

*Penjelasan/Tindak Lanjut:*

- Kelengkapan dokumen pendukung kegiatan Musrenbang telah disiapkan dan dilengkapi, serta akan diserahkan pada kesempatan pertama.
- Menyesuaikan dan mencantumkan indikator yang belum termuat dalam RKPK Tahun 2024.
- Menyesuaikan program prioritas pembangunan antara RKPK dan RPK Tahun 2023-2026.
- Perbaikan indikator kinerja program pada dokumen penetapan RKPK Tahun 2024.
- Mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 81 Tahun 2023 dalam menyusun RKPK Tahun 2024.

Demikian disampaikan, terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA KOTA LHOKSEUMAWE
Kabid. Program dan Pendanaan Pembangunan

PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
BAPPEDA

FIRDAUS, SE
NIP. 19700610 200504 1 002

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023

BUKU
II

# Lampiran
## Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

**RENCANA KERJA PEMERINTAH**
**KOTA LHOKSEUMAWE**
**TAHUN 2024**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**
**KOTA LHOKSEUMAWE**
**TAHUN 2023**

**KERANGKA PENDANAAN**
**RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**
**TAHUN 2024**

| NO. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **I.** | **PENDAPATAN DAERAH** | **746,640,104,482** | |
| **1** | **Pendapatan Asli Daerah** | **56,345,750,000** | |
| 1.1. | Pajak Daerah | 34,123,250,000 | |
| 1.2. | Retribusi Daerah | 3,612,500,000 | |
| 1.3. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 5,200,000,000 | |
| 1.4. | Lain-Lain PAD yang Sah | 13,410,000,000 | |
| **2** | **Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** | **615,885,706,000** | |
| 2.1. | Dana Bagi Hasil (DBH) | 17,283,623,000 | |
| 2.2. | Dana Alokasi Umum (DAU) | 433,613,526,000 | |
| 2.3. | Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik | 23,192,612,000 | |
| 2.4. | Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 82,063,439,000 | |
| 2.5. | Dana Insentif Daerah (DID) | - | |
| 2.6. | Dana Desa (DD) | 59,732,506,000 | |
| **3** | **Pendapatan Transfer Antar Daerah** | **61,062,030,639** | |
| 3.1. | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH) | 31,220,106,455 | |
| 3.2. | Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) | 29,841,924,184 | |
| **4** | **Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah** | **13,346,617,843** | |
| 4.1. | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP | 13,346,617,843 | |
| | **Jumlah Pendapatan Daerah** | **746,640,104,482** | |
| | | | |
| **II.** | **BELANJA DAERAH** | **761,066,186,781** | |
| **1** | **Belanja Operasi** | **552,647,279,230** | |
| 1.1. | Belanja Pegawai | 339,335,452,564 | |
| 1.2. | Belanja Barang dan Jasa | 169,979,128,649 | |
| 1.3. | Belanja Subsidi | 1,008,000,000 | |
| 1.4. | Belanja Hibah | 23,301,326,017 | |
| 1.5. | Belanja Bantuan Sosial | 19,023,372,000 | |
| **2** | **Belanja Modal** | **93,833,111,651** | |
| 2.1. | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 19,021,042,290 | |
| 2.2. | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 46,728,876,015 | |
| 2.3. | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 24,377,078,714 | |
| 2.4. | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 3,706,114,632 | |
| **3** | **Belanja Tak Terduga** | **3,000,000,000** | |
| 3.1. | Belanja Tak Terduga | 3,000,000,000 | |
| **4** | **Belanja Transfer** | **111,585,795,900** | |
| 4.1. | Belanja Bagi Hasil | 6,823,120,088 | |
| 4.2. | Belanja Bantuan Keuangan | 104,762,675,812 | |
| | **Jumlah Belanja Daerah** | **761,066,186,781** | |
| | **SURPLUS / (DEFISIT)** | **(14,426,082,299)** | |
| | | | |

| NO. | URAIAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. | **PEMBIAYAAN DAERAH** | | |
| 1 | **Penerimaan Pembiayaan** | **16,426,082,299** | |
| | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 16,426,082,299 | |
| 2 | **Pengeluaran Pembiayaan** | **2,000,000,000** | |
| | Penyertaan Modal | 2,000,000,000 | |
| | **Pembiayaan Netto** | **14,426,082,299** | |
| | | | |
| | **SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN** | - | |

## PAGU INDIKATIF PERANGKAT DAERAH
## RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
## TAHUN 2024

| NO. | PERANGKAT DAERAH / URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | PAGU INDIKATIF |
|---|---|---|
| **1** | **Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah** | **1,813,741,547** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan* | *1,813,741,547* |
| **2** | **Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan** | **184,128,117,164** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan* | *183,178,117,164* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan* | *950,000,000* |
| **3** | **Dinas Kesehatan** | **117,408,748,502** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan* | *117,408,748,502* |
| **4** | **Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat** | **44,701,811,731** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang* | *42,151,811,731* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman* | *2,550,000,000* |
| **5** | **Badan Penanggulangan Bencana Daerah** | **5,715,035,892** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidangketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat* | *5,715,035,892* |
| **6** | **Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah** | **9,097,094,745** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidangketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat* | *9,097,094,745* |
| **7** | **Dinas Sosial** | **4,485,334,640** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Sosial* | *4,485,334,640* |
| **8** | **Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana** | **7,167,986,615** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak* | *4,483,209,005* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana* | *2,684,777,610* |
| **9** | **Dinas Pertanahan** | **3,941,676,952** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan* | *3,941,676,952* |
| **10** | **Dinas Lingkungan Hidup** | **30,998,964,040** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup* | *30,998,964,040* |
| **11** | **Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil** | **4,045,441,627** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil* | *4,045,441,627* |
| **12** | **Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Gampong** | **3,070,760,701** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa* | *3,070,760,701* |
| **13** | **Dinas Perhubungan** | **7,079,199,546** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan* | *7,079,199,546* |
| **14** | **Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian** | **2,467,596,952** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika* | *2,447,596,952* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Persandian* | *20,000,000* |

| NO. | PERANGKAT DAERAH / URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | PAGU INDIKATIF |
|---|---|---|
| **15** | **Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja** | **5,921,050,141** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja* | *5,262,850,140* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal* | *658,200,001* |
| **16** | **Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata** | **5,706,525,502** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga* | *5,506,525,502* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata* | *200,000,000* |
| **17** | **Sekretariat Majelis Adat Aceh** | **1,497,654,300** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan* | *1,497,654,300* |
| **18** | **Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan** | **2,892,617,459** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan* | *2,862,617,459* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan* | *30,000,000* |
| **19** | **Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian Dan Pangan** | **9,399,064,803** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pangan* | *7,298,709,814* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan* | *634,791,620* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian* | *1,465,563,369* |
| **20** | **Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah** | **7,561,680,213** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah* | *4,811,980,213* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan* | *2,470,000,000* |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian* | *279,700,000* |
| **21** | **Sekretariat Daerah** | **31,377,930,212** |
| | *Sekretariat Daerah* | *31,377,930,212* |
| **22** | **Sekretariat DPRK** | **24,042,195,477** |
| | *Sekretariat DPRD* | *24,042,195,477* |
| **23** | **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah** | **8,046,262,628** |
| | *Perencanaan* | *7,496,262,628* |
| | *Penelitian Dan Pengembangan* | *550,000,000* |
| **24** | **Badan Pengelolaan Keuangan Daerah** | **132,551,026,973** |
| | *Keuangan* | *132,551,026,973* |
| **25** | **Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia** | **41,592,155,040** |
| | *Kepegawaian* | *39,686,395,640* |
| | *Pendidikan Dan Pelatihan* | *1,905,759,400* |
| **26** | **Inspektorat** | **10,175,494,827** |
| | *Inspektorat Daerah* | *10,175,494,827* |
| **27** | **Kecamatan Banda Sakti** | **2,835,017,638** |
| | *Kecamatan* | *2,835,017,638* |
| **28** | **Kecamatan Blang Mangat** | **2,266,189,681** |
| | *Kecamatan* | *2,266,189,681* |
| **29** | **Kecamatan Muara Satu** | **2,211,765,882** |
| | *Kecamatan* | *2,211,765,882* |
| **30** | **Kecamatan Muara Dua** | **2,480,052,450** |

| NO. | PERANGKAT DAERAH / URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG | PAGU INDIKATIF |
|---|---|---|
| | *Kecamatan* | *2,480,052,450* |
| **31** | **Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik** | **23,074,550,717** |
| | *Kesatuan Bangsa Dan Politik* | *23,074,550,717* |
| **32** | **Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama** | **3,565,727,830** |
| | *Kekhususan Aceh* | *3,565,727,830* |
| **33** | **Sekretariat Baitul Mal** | **8,589,792,446** |
| | *Kekhususan Aceh* | *8,589,792,446* |
| **34** | **Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah** | **9,157,921,908** |
| | *Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan* | *4,160,480,000* |
| | *Kekhususan Aceh* | *4,997,441,908* |
| | **Jumlah Pagu Indikatif** | **761,066,186,781** |

# TABEL 5.12
# RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE
# TAHUN 2024

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH** | | | | | | **1,813,741,547** | | | | | | | **1,470,623,357** | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1,813,741,547** | | | | | | | **1,470,623,357** | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH** |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **1,813,741,547** | | | | | | | **1,470,623,357** | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH** |
| **1** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **1,641,932,662** | | | | | | **-** | **1,282,509,822** | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH** |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*** | - | | | ***10 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekretariat MPD*** | - | ***9,810,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 9,810,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***168 OB*** | ***982,749,542*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Aparatur Sekretariat MPD*** | - | ***879,603,824*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 168 Orang/bulan | 982,749,542 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Aparatur Sekretariat MPD | | 879,603,824 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***5 Jenis*** | ***86,183,600*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekretariat MPD*** | - | ***52,095,998*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 33 Paket | 17,778,600 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 3,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 561 Paket | 12,265,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 5,250,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 5,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 380 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 1,197,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 37 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 37,648,998 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***448,399,520*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekretariat MPD*** | - | ***290,500,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 500,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 447,399,520 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 290,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***114,600,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekretariat MPD*** | - | ***50,500,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 12,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 76,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 36,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 16 Unit | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekretariat MPD | | 2,500,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| **2** | **1** | **01** | **08** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH** | **Persentase Sekolah yang Menerapkan Asessment Kompetensi Minimum (AKM)** | - | | | **83.76 Persen** | **171,808,885** | | | | | | - | **188,113,535** | **SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH** |
| | ***1*** | ***01*** | ***08*** | ***7.01*** | | ***Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan aceh*** | - | | | ***2 Jenis*** | ***52,980,855*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Satuan Pendidikan*** | - | ***3,113,535*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 08 | 7.01 | 0002 | Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh | Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh | | | | 3 Satuan Pendidikan | 52,980,855 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Satuan Pendidikan | | 3,113,535 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | ***1*** | ***01*** | ***08*** | ***7.03*** | | ***Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***19,999,650*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Satuan Pendidikan*** | - | ***35,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 08 | 7.03 | 0002 | Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah | | | | 1 Dokumen | 19,999,650 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Satuan Pendidikan | | 35,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | ***1*** | ***01*** | ***08*** | ***7.04*** | | ***Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh*** | - | | | ***2 Jenis*** | ***46,828,380*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan*** | - | ***80,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |
| | 1 | 01 | 08 | 7.04 | 0001 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya | | | | 75 Orang | 46,828,380 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | 80,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | ***1*** | ***01*** | ***08*** | ***7.05*** | | ***Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***52,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Satuan Pendidikan*** | - | ***70,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 08 | 7.05 | 0002 | Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh | | | | 1 Satuan Pendidikan | 26,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Satuan Pendidikan | | 35,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | 1 | 01 | 08 | 7.05 | 0003 | Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh | Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya | | | | 3 Satuan Pendidikan | 26,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Satuan Pendidikan | | 35,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH |
| | | | | | | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** | | | | | | **184,128,117,164** | | | | | | | **173,106,520,775** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **183,178,117,164** | | | | | | | **172,581,520,775** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **183,178,117,164** | | | | | | | **172,581,520,775** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| **3** | **1** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **125,331,239,629** | | | | | | **-** | **132,985,499,343** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen perencanaan, pengangaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah*** | - | | | ***7 Dokumen*** | ***126,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***50,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 126,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***118,578,377,703*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***124,000,499,343*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1072 Orang/bulan | 118,578,377,703 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 124,000,499,343 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.03*** | | ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen barang milik daerah*** | - | | | ***7 Dokumen*** | ***5,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***5,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.03 | 0006 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | | | | 4 Laporan | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 5,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode pelaksanaan adm umum perangkat daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***95,964,090*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***190,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 25,964,090 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 7 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 80 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 120,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah*** | - | | | ***9 Jenis*** | ***386,332,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***175,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 4 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 150,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 13 Unit | 336,332,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 25,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***6,060,565,836*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***8,425,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5 Laporan | 11,035,910 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 5,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 7 Laporan | 127,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 260,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 5 Laporan | 5,922,529,926 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 8,160,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara*** | - | | | ***5 Jenis*** | ***79,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***140,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 3 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 25,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 25,700,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 15,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **4** | **1** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN** | **Angka Partisipasi Kasar** | - | | | **98.40 Persen** | **57,596,684,335** | | | | | | - | **38,925,000,000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | ***1*** | ***01*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar*** | ***Jumlah sarana dan prasarana pendidikan sekolah dasar yang dikelola*** | - | | | ***20 Unit*** | ***31,030,254,637*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***21,650,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 840,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 263,918,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 3 Unit | 462,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 370,972,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah | Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 3 Ruang | 406,702,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 250,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia | | | | 100 Paket | 650,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS [BLOCK GRANT] | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 250,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0022 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa | Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia | | | | 50 Paket | 500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 250,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | | | | 110 Orang | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 635 Orang | 600,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 1,000,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah | | | | 110 Satuan Pendidikan | 500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 150,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS | | | | 110 Satuan Pendidikan | 17,640,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 15,000,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar | | | | 150 Orang | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 150,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 110 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 12 Ruang | 5,405,004,837 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Unit | 213,313,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 250,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik | Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar | | | | 110 Satuan Pendidikan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.01 | 0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Ruang | 2,707,844,800 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama*** | ***Jumlah sarana dan prasarana pendidikan smp yang dikelola*** | - | | | ***20 Unit*** | ***20,655,646,698*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***12,120,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU | Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 601,090,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Ruang | 559,674,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembangunan Laboratorium | Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun | | | | 3 Ruang | 2,651,850,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0009 | Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah | Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 2 Unit | 549,884,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 250,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun | | | | 5 Unit | 1,105,036,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 1,000,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah | Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 5 Ruang | 3,815,006,698 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah | Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 99,984,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 100,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium | Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 787,238,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 200,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0025 | Pengadaan Mebel Sekolah | Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia | | | | 150 Paket | 500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 250,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa | Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik | | | | 100 Peserta Didik | 500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | | | | 40 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 50 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah | Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan | | | | 25 Satuan Pendidikan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS | | | | 25 Satuan Pendidikan | 8,480,900,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 6,000,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | | | | 60 Orang | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah | Jumlah Ruang Kepala Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Ruang | 99,984,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 15 Dokumen | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 40,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik | Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar | | | | 3000 Satuan Pendidikan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.02 | 0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru | Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah | | | | 2 Ruang | 735,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 610,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)*** | ***Jumlah sarana dan prasarana pendidikan PAUD yang dikelola*** | - | | | ***10 Unit*** | ***4,816,243,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***3,545,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun | | | | 6 Unit | 1,413,293,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 550,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 1 Unit | 315,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 200,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD | Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik | | | | 100 Peserta Didik | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 200,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD | | | | 75 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 300,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 50 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 250,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD | Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen | | | | 76 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD | Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP | | | | 132 Satuan Pendidikan | 2,862,950,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 2,000,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.03 | 0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 154 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 25,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***02*** | ***2.04*** | | ***Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*** | ***Jumlah sarana dan prasarana pendidikan non formal/kesetaraan yang dikelola*** | - | | | ***5 Unit*** | ***1,094,540,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***1,610,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun | | | | 1 Unit | 450,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 1,000,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 15 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi | | | | 15 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 30,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP | | | | 3 Satuan Pendidikan | 422,700,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan | | | | 20 Orang | 51,840,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP PAUD | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan | | | | 76 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 20,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 02 | 2.04 | 0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah | Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat | | | | 2 Unit | 125,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 500,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **5** | **1** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM** | **Kelulusan Dan Ketercapaian Kurikulum di Satuan Pendidikan** | **-** | | | **100 Persen** | **190,176,400** | | | | | | **-** | **550,932,612** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | ***1*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*** | ***Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan dasar yang ditetapkan*** | - | | | ***4 Dokumen*** | ***140,176,400*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***350,932,612*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 4 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,932,612 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia | | | | 450 Buku | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 200,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya | | | | 110 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar | Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun | | | | 4 Dokumen | 20,176,400 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***1*** | ***01*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal*** | ***Jumlah kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini yang ditetapkan*** | - | | | ***4 Dokumen*** | ***50,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***200,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal | Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia | | | | 300 Buku | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 200,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **6** | **1** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN** | **Persentase Guru dan Tendik Yang Mendapatkan Pembinaan** | **-** | | | **90.00 Persen** | **30,016,800** | | | | | | **-** | **60,088,820** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | ***1*** | ***01*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*** | ***Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***30,016,800*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***60,088,820*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 2 Dokumen | 15,016,800 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 30,088,820 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 04 | 2.01 | 0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | | | | 2 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 30,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **7** | **1** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN** | **Persentase Sekolah yang Memperoleh Izin** | **-** | | | **100 Persen** | **30,000,000** | | | | | | **-** | **60,000,000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | ***1*** | ***01*** | ***05*** | ***2.02*** | | ***Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat*** | ***Jumlah dokumen hasil penilaian kelayakan usul perizinan PAUD dan Pendidikan non formal*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***30,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***60,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 1 | 01 | 05 | 2.02 | 0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 48 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 30,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | 1 | 01 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat | | | | 48 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Sekolah, Guru dan Siswa | | 30,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **950,000,000** | | | | | | | **525,000,000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **950,000,000** | | | | | | | **525,000,000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| **8** | **2** | **22** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN** | **Persentase kegiatan pengembangan budaya** | **-** | | | **61.54 Persen** | **900,000,000** | | | | | | **-** | **475,000,000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | ***2*** | ***22*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah objek kebudayaan yang dikelola*** | - | | | ***4 Objek*** | ***700,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***25,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 2 | 22 | 02 | 2.01 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan | | | | 1 Objek | 700,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekolah, Guru dan Siswa | | 25,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| | ***2*** | ***22*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Objek kesenian tradisional yang dilestarikan*** | - | | | ***4 Objek*** | ***200,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***450,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 2 | 22 | 02 | 2.02 | 0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya | Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan | | | | 200 Objek | 200,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekolah, Guru dan Siswa | | 450,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| **9** | **2** | **22** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL** | **Persentase pembinaan sanggar seni** | **-** | | | **3.45 Persen** | **50,000,000** | | | | | | **-** | **50,000,000** | **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN** |
| | ***2*** | ***22*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah objek kesenian daerah yang memperoleh pembinaan*** | - | | | ***2 objek*** | ***50,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Sekolah, Guru dan Siswa*** | - | ***50,000,000*** | ***DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN*** |
| | 2 | 22 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) | | | | 50 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOP MUSEUM DAN TAMAN BUDAYA-MUSEUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekolah, Guru dan Siswa | | 50,000,000 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | **DINAS KESEHATAN** | | | | | | **117,408,748,502** | | | | | | | **140,103,562,463** | **DINAS KESEHATAN** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **117,408,748,502** | | | | | | | **140,103,562,463** | **DINAS KESEHATAN** |
| | **1** | **02** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN** | | | | | | **117,408,748,502** | | | | | | | **140,103,562,463** | **DINAS KESEHATAN** |
| **10** | **1** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **64,063,011,561** | | | | | | - | **63,172,062,463** | **DINAS KESEHATAN** |
| | ***1*** | ***02*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | ***25,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***61,789,791,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***ASN*** | - | ***55,102,686,463*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 11100 Orang/bulan | 61,789,791,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | ASN | | 55,102,686,463 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***35,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***ASN dan Non ASN*** | - | ***75,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 10 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | ASN dan Non ASN | | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 30 Orang | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | ASN dan Non ASN | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***307,280,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***kantor dan faskes*** | - | ***522,500,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 180,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | kantor dan faskes | | 250,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | kantor dan faskes | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | kantor dan faskes | | 100,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2,280,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | kantor dan faskes | | 2,500,000 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | kantor dan faskes | | 120,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,001,640,561*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Kesehatan*** | ***kantor dan faskes*** | - | ***6,591,876,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Kesehatan | kantor dan faskes | | 1,500,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 250 Laporan | 551,400,001 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | kantor dan faskes | | 650,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 10000 Laporan | 448,740,560 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | kantor dan faskes | | 5,940,376,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***919,300,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Sarana dan prasarana*** | - | ***855,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sarana dan prasarana | | 35,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 35 Unit | 736,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sarana dan prasarana | | 595,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 120,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sarana dan prasarana | | 145,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 20 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sarana dan prasarana | | 80,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| **11** | **1** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT** | **Cakupan Pemenuhan Upaya Kesehatan perorangan dan Upaya Kesehatan masyarakat** | - | | | **100 Persen** | **53,141,736,941** | | | | | | - | **76,448,500,000** | **DINAS KESEHATAN** |
| | ***1*** | ***02*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Faskes Yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***8 Faskes*** | ***29,881,301,098*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***faskes*** | - | ***55,470,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya | Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000 | | | | 1 Unit | 20,000,191,680 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 50,000,000,000 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas | Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas | | | | 7 Unit | 120,585,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 500,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0010 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 3 Unit | 1,800,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 1,800,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan | | | | 8 Unit | 4,680,490,418 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 1,400,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar | | | | 60 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 100,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan | Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan | | | | 7 Paket | 3,140,874,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 1,500,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0024 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas | | | | 200 Keluarga | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 100,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.01 | 0026 | Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan | Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan | | | | 7 Paket | 69,160,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 70,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Faskes yang Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat daerah Kabupaten/Kotan*** | - | | | ***7 Faskes*** | ***23,120,435,843*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Masyarakat*** | - | ***20,855,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil | Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 5144 Orang | 80,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 250,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin | Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4900 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 100,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir | Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4477 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 80,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita | Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 16504 Orang | 710,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 350,000,000 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar | Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 27913 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 250,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif | Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 132729 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 220,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut | Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 23578 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 100,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi | Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 44046 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 200,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus | Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar | | | | 4806 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 350,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar | | | | 474 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 60,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis | Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 3603 Orang | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 400,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV | Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar | | | | 7422 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 200,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar | | | | 10 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar | | | | 100 Dokumen | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 200,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 200,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga | | | | 2 Dokumen | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 60,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan | | | | 1 Dokumen | 52,420,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 70,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan | | | | 3 Dokumen | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 190,000,000 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya | | | | 26 Dokumen | 13,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Kesehatan | Masyarakat | | 80,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan | | | | 2 Dokumen | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) | Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 100 Orang | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan | | | | 50 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 100,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular | | | | 10 Dokumen | 86,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 500,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat | | | | 7 Dokumen | 13,346,617,843 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 12,900,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0028 | Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional | Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan | | | | 100 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas | | | | 7 Dokumen | 6,104,723,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 2,800,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya | | | | 200 Dokumen | 1,960,290,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 800,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota | Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 36,585,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 80,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0036 | Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) | | | | 10 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0037 | Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah | | | | 20 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 40,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.02 | 0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) | | | | 1 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***02*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*** | ***Jumlah Faskes yang melaksanakan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi*** | - | | | ***7 Faskes*** | ***100,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***faskes*** | - | ***50,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan | | | | 3 Dokumen | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***02*** | ***2.04*** | | ***Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Faskes yang memperoleh Izin Rumah Sakit Kelac C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***10 Faskes*** | ***40,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***faskes*** | - | ***73,500,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya | Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya | | | | 10 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 42,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar | | | | 10 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | faskes | | 31,500,000 | DINAS KESEHATAN |
| **12** | **1** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN** | **Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan** | - | | | **4.14 Persen** | **60,000,000** | | | | | | - | **263,000,000** | **DINAS KESEHATAN** |
| | ***1*** | ***02*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Praktik Tenaga Kesehatan*** | - | ***41,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Praktik Tenaga Kesehatan | | 41,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***30,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***SDM Kesehatan*** | - | ***72,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | SDM Kesehatan | | 26,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | 1 | 02 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | SDM Kesehatan | | 46,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Peserta Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***40 SDMK*** | ***20,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***SDM Kesehatan*** | - | ***150,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya | | | | 20 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | SDM Kesehatan | | 150,000,000 | DINAS KESEHATAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 13 | 1 | 02 | 04 | | | **PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN** | **Persentase Rekomendasi Usaha Kesehatan** | - | | | **100 Persen** | **99,000,000** | | | | | | - | **120,000,000** | **DINAS KESEHATAN** |
| | ***1*** | ***02*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*** | ***Jumlah Sarana Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)*** | - | | | ***10 Tempat*** | ***20,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Tempat Usaha*** | - | ***40,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 04 | 2.01 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | | | | 2 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Tempat Usaha | | 40,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***04*** | ***2.02*** | | ***Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*** | ***Jumlah Dokumen Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***11,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Produk Alat Kesehatan*** | - | ***25,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | | | | 2 Dokumen | 11,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Produk Alat Kesehatan | | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***04*** | ***2.03*** | | ***Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*** | ***Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***50,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Produksi PIRT*** | - | ***25,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 04 | 2.03 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Produksi PIRT | | 25,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***04*** | ***2.04*** | | ***Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*** | ***Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***6,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Tempat Pengelolaan Makanan*** | - | ***10,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 04 | 2.04 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) | | | | 1 Dokumen | 6,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Tempat Pengelolaan Makanan | | 10,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***04*** | ***2.05*** | | ***Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*** | ***Jumlah Dokumen Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***6,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Tempat jajanan Makanan*** | - | ***10,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 04 | 2.05 | 0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan | | | | 1 Dokumen | 6,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Tempat jajanan Makanan | | 10,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***04*** | ***2.06*** | | ***Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*** | ***Jumlah Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga*** | - | | | ***10 Produk*** | ***6,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Produksi PIRT*** | - | ***10,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 04 | 2.06 | 0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan | Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan | | | | 10 Unit | 6,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Produksi PIRT | | 10,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| **14** | **1** | **02** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN** | **Cakupan Promsi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat** | - | | | **83.44 Persen** | **45,000,000** | | | | | | - | **100,000,000** | **DINAS KESEHATAN** |
| | ***1*** | ***02*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***20,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Masyarakat*** | - | ***50,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 50,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***05*** | ***2.02*** | | ***Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Keluarga yang berprilaku Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***20 Keluarga*** | ***20,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Masyarakat*** | - | ***35,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |
| | 1 | 02 | 05 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK-PELAYANAN KESEHATAN | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat | | 35,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | ***1*** | ***02*** | ***05*** | ***2.03*** | | ***Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***5,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***UKBM*** | - | ***15,000,000*** | ***DINAS KESEHATAN*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 02 | 05 | 2.03 | 0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) | | | | 1 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | UKBM | | 15,000,000 | DINAS KESEHATAN |
| | | | | | | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** | | | | | | **44,701,811,731** | | | | | | | **62,922,193,383** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **44,701,811,731** | | | | | | | **62,922,193,383** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | **1** | **03** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG** | | | | | | **42,151,811,731** | | | | | | | **52,274,664,210** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| **15** | **1** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **5,861,929,720** | | | | | | **-** | **6,153,123,514** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***03*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | *-* | | | ***5 Dokumen*** | ***102,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | *-* | ***27,175,247*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK PENERANGAN JALAN, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 26,249,147 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 2,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 926,100 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | ***1*** | ***03*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | *-* | | | ***12 Bulan*** | ***4,396,265,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Aparatur PUPR*** | *-* | ***4,539,421,538*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 818 Orang/bulan | 4,396,265,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Aparatur PUPR | | 4,539,421,538 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | ***1*** | ***03*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | *-* | | | ***12 Bulan*** | ***171,140,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | *-* | ***174,963,442*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 41 Paket | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 28,940,625 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 833 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 12,733,875 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 16,206,750 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 1,319,692 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 56 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 115,762,500 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | ***1*** | ***03*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***6 Unit*** | ***75,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***25,467,750*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 25,467,750 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | ***1*** | ***03*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***911,424,720*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***1,005,699,962*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 24 Laporan | 2,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 2,315,250 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 60 Laporan | 362,110,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 257,872,545 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 852 Laporan | 547,314,720 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 745,512,167 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | ***1*** | ***03*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***9 Unit*** | ***206,100,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***380,395,575*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 38,548,912 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 102,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 65,174,287 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 270,884,250 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 5,788,125 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| **16** | **1** | **03** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM** | **Persentase Penduduk Berakses Air Minum** | **-** | | | **22.18 Persen** | **2,966,721,017** | | | | | **Dinas PUPR** | **-** | **7,210,132,438** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***03*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum melalui SPAM Jaringan Pipa dan Bukan Jaringan Pipa*** | - | | | ***15.75 Persen*** | ***2,966,721,017*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***7,210,132,438*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan | Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun | | | | 105 Unit | 1,090,464,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 1,653,750,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun | | | | 1 Dokumen | 376,257,017 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 43,882,438 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 03 | 2.01 | 0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | | | | 808 SR | 1,500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 5,512,500,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| **17** | **1** | **03** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH** | **Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi** | **-** | | | **71.86 Persen** | **10,456,583,000** | | | | | **Dinas PUPR** | **-** | **3,548,086,446** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***03*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Jumlah Rumah Tangga Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik*** | - | | | ***71.01 Persen*** | ***10,456,583,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***3,548,086,446*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0032 | Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman | Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan | | | | 554 M³/Hari | 10,236,083,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 3,316,561,446 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 05 | 2.01 | 0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun | | | | 1 Dokumen | 220,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 231,525,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| **18** | **1** | **03** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE** | **Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat** | **-** | | | **74.85 Persen** | **3,174,536,000** | | | | | **Dinas PUPR** | **-** | **3,009,844,602** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***03*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Drainase dalam Kondisi Baik*** | **-** | | | ***67.20 Persen*** | ***3,174,536,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***3,009,844,602*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi | | | | 317 Sistem Drainase Perkotaan | 400,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 453,048,422 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun | | | | 1718 Sistem Drainase Perkotaan | 2,749,536,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 2,441,633,250 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 06 | 2.01 | 0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 115,162,929 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| **19** | **1** | **03** | **08** | | | **PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG** | **Persentase penataan bangunan gedung** | **-** | | | **7,69 Persen** | **2,500,000,000** | | | | | **Dinas PUPR** | **-** | **2,031,446,518** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***03*** | ***08*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung*** | ***Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung "Persentase Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung"*** | **-** | | | ***1 Dokumen 7.69 Persen*** | ***2,500,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***2,031,446,518*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 08 | 2.01 | 0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan | | | | 3 Bangunan Gedung | 2,500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Infrastruktur | Dinas PUPR | | 2,031,446,518 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **20** | **1** | **03** | **10** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN** | **Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap** | **-** | | | **71.64 Persen** | **17,032,041,994** | | | | | **Dinas PUPR** | **-** | **27,952,237,337** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***03*** | ***10*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Tingkat Kemantapan Jalan*** | *-* | | | ***71.64 Persen*** | ***17,032,041,994*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | *-* | ***27,952,237,337*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan | Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun | | | | 5 Dokumen | 290,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 321,552,087 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0032 | Pembangunan Jalan | Panjang Jalan yang Dibangun | | | | 6.133 KM | 9,178,062,785 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 18,676,000,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0033 | Rekonstruksi Jalan | Panjang Jalan yang Direkonstruksi | | | | 2.693 KM | 6,792,096,209 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 8,201,200,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 10 | 2.01 | 0044 | Rehabilitasi Jalan | Panjang Jalan yang Direhabilitasi | | | | 0.742 KM | 771,883,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 753,485,250 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| **21** | **1** | **03** | **12** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG** | **Persentase ketaatan terhadap RTRW Persentase ketaatan terhadap RTRW** | **-** | | | **61.13 Persen 61.13 Persen** | **160,000,000** | | | | | **Dinas PUPR** | **-** | **2,369,793,352** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***03*** | ***12*** | ***2.02*** | | ***Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Dokumen Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota*** | *-* | | | ***1 Dokumen 3 Dokumen*** | ***160,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | *-* | ***2,369,793,352*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 1,543,500,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | 1 | 03 | 12 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 826,293,352 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | **1** | **04** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN** | | | | | | **2,550,000,000** | | | | | | | **10,647,529,173** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| **22** | **1** | **04** | **03** | | | **PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN** | **Persentase Ketersediaan Rumah Layak Huni** | **-** | | | **69.63 Persen** | **200,000,000** | | | | | **Dinas PUPR** | **-** | **1,102,500,000** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***04*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha*** | ***Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni*** | - | | | ***30.49 Persen*** | ***200,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***1,102,500,000*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 04 | 03 | 2.03 | 0002 | Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni | Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki | | | | 26 Unit Rumah | 200,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 1,102,500,000 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| **23** | **1** | **04** | **04** | | | **PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH** | **Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh** | - | | | **0.32 Persen** | **1,650,000,000** | | | | | **Dinas PUPR** | - | **4,467,876,880** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***04*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Penurunan Jumlah Rumah Tidak Layak Huni*** | - | | | ***30.49 Persen*** | ***1,650,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***4,467,876,880*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 04 | 04 | 2.01 | 0004 | Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru | Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh | | | | 48 Unit | 1,650,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 4,467,876,880 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| **24** | **1** | **04** | **05** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)** | **Rasio PSU Dalam Kondisi Baik** | - | | | **0.117 Rasio** | **700,000,000** | | | | | **Dinas PUPR** | - | **5,077,152,293** | **DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT** |
| | ***1*** | ***04*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan*** | ***Persentase Unit Rumah Terfasilitasi PSU*** | - | | | ***70.43 Persen*** | ***700,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas PUPR*** | - | ***5,077,152,293*** | ***DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT*** |
| | 1 | 04 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian | Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian | | | | 4 Lokasi | 700,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas PUPR | | 5,077,152,293 | DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| | | | | | | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** | | | | | | **5,715,035,892** | | | | | | | **9,326,634,200** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5,715,035,892** | | | | | | | **9,326,634,200** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **5,715,035,892** | | | | | | | **9,326,634,200** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| **25** | **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **4,885,035,892** | | | | | | - | **5,463,002,359** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***5 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***BPBD Kota Lhokseumawe*** | - | ***15,000,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 15 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*** | - | | | ***490 OB*** | ***2,426,572,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe*** | - | ***2,333,585,359*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 490 Orang/bulan | 2,426,572,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Aparatur BPBD Kota Lhokseumawe | | 2,333,585,359 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***86,500,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***BPBD Kota Lhokseumawe*** | - | ***96,000,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 150 Paket | 76,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 86,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 4 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***453,940,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***BPBD Kota Lhokseumawe*** | - | ***113,140,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 50 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1200 Paket | 377,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 12,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 1,140,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 60,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***2 Jenis*** | ***234,000,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***BPBD Kota Lhokseumawe*** | - | ***360,000,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 184,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 300,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 60,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***1,265,723,892*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***BPBD Kota Lhokseumawe*** | - | ***2,230,977,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 3,300,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 126,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 213,023,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 1,138,223,892 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 2,014,654,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***403,300,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***BPBD Kota Lhokseumawe*** | - | ***314,300,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 33,300,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 15 Unit | 340,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 56,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 170,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 30 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | BPBD Kota Lhokseumawe | | 55,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| **26** | **1** | **05** | **03** | | | **PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA** | **Persentase Penanggulangan Bencana** | **-** | | | **100 Persen** | **605,000,000** | | | | | | **-** | **3,663,291,364** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | ***1*** | ***05*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota*** | **-** | | | ***2 Jenis*** | ***15,000,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***100,000,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 03 | 2.01 | 0004 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun | | | | 50 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*** | ***Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*** | **-** | | | ***10 Jenis*** | ***390,000,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***2,797,291,364*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0008 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya | | | | 50 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 411,300,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0014 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal | | | | 1 Dokumen | 203,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 300,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya | | | | 100 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 1,200,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0016 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana | | | | 100 Kawasan | 21,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 85,991,364 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.02 | 0017 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya | | | | 1 laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 800,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*** | ***Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***120,000,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Masyarakat*** | - | ***616,000,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0003 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana | | | | 300 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat | | 166,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.03 | 0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | | | | 300 Orang | 80,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Masyarakat | | 450,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***03*** | ***2.04*** | | ***Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*** | ***Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***80,000,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***150,000,000*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |
| | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah | | | | 1 Dokumen | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 50,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 03 | 2.04 | 0010 | Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan | | | | 1 Kegiatan | 50,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 100,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| **27** | **1** | **05** | **04** | | | **PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN** | **Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran** | - | | | **100 Persen** | **225,000,000** | | | | | | - | **200,340,477** | **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH** |
| | ***1*** | ***05*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***225,000,000*** | | | ***Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Pemerintah Kota, Aparatur BPBD, dan Masyarakat*** | - | ***200,340,477*** | ***BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pemerintah Kota, Aparatur BPBD, dan Masyarakat | | 50,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran | Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran | | | | 110 Orang | 160,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pemerintah Kota, Aparatur BPBD, dan Masyarakat | | 50,340,477 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | 1 | 05 | 04 | 2.01 | 0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri | Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait | | | | 2 Unit | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pemerintah Kota, Aparatur BPBD, dan Masyarakat | | 100,000,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| | | | | | | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** | | | | | | **9,097,094,745** | | | | | | | **11,323,964,908** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **9,097,094,745** | | | | | | | **11,323,964,908** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** |
| | **1** | **05** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT** | | | | | | **9,097,094,745** | | | | | | | **11,323,964,908** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** |
| **28** | **1** | **05** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **6,270,644,745** | | | | | | **-** | **8,318,029,589** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***15,700,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Satpol PP WH*** | - | ***2,381,177*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 1,681,177 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | | | 1 Laporan | 700,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 700,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***4,301,261,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Satpol PP WH*** | - | ***3,545,593,000*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 54 Orang/bulan | 4,301,261,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 3,545,593,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***188,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Satpol PP WH*** | - | ***206,500,000*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 163,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 163,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 6,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 1 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 25,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | | | 35 Orang | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 12,500,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***81,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Satpol PP WH*** | - | ***132,640,000*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 19,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 500 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 10,500,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 12,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 1,140,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 90,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Satpol PP WH*** | - | ***50,000,000*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 50,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***1,433,443,745*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Satpol PP WH*** | - | ***4,128,815,412*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 2,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 110,833,333 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 122,700,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1,321,110,412 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 4,004,115,412 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***05*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***221,100,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Satpol PP WH*** | - | ***252,100,000*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 33,300,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 6 Unit | 167,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 167,800,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 44,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 16 Unit | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Satpol PP WH | | 7,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| **29** | **1** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman** | - | | | **100 Persen** | **2,826,450,000** | | | | | | - | **3,005,935,319** | **SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH** |
| | ***1*** | ***05*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Periode Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***210,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***198,000,000*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia | Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 35 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 18,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 2.01 | 0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan | | | | 12 laporan | 175,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 170,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota*** | ***Periode Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***35,000,000*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |
| | 1 | 05 | 02 | 2.02 | 0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP | | | | 1 Laporan | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 35,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | ***1*** | ***05*** | ***02*** | ***7.04*** | | ***Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh*** | ***Periode Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***2,596,450,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pol PPWH, Masyarakat*** | - | ***2,772,935,319*** | ***SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0002 | Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | | | | 1 Laporan | 85,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pol PPWH, Masyarakat | | 136,485,319 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0003 | Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam | | | | 1 Laporan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pol PPWH, Masyarakat | | 80,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0007 | Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku | | | | 1 Laporan | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pol PPWH, Masyarakat | | 110,000,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | 1 | 05 | 02 | 7.04 | 0011 | Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan | | | | 1 Laporan | 2,446,450,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pol PPWH, Masyarakat | | 2,446,450,000 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH |
| | | | | | | **DINAS SOSIAL** | | | | | | **4,485,334,640** | | | | | | | **5,441,510,380** | **DINAS SOSIAL** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4,485,334,640** | | | | | | | **5,441,510,380** | **DINAS SOSIAL** |
| | **1** | **06** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL** | | | | | | **4,485,334,640** | | | | | | | **5,441,510,380** | **DINAS SOSIAL** |
| **30** | **1** | **06** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **2,975,334,640** | | | | | | - | **2,966,438,244** | **DINAS SOSIAL** |
| | ***1*** | ***06*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | - | | | ***20 Dokumen*** | ***3,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur*** | - | ***4,106,069*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 3,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 4,106,069 | DINAS SOSIAL |
| | ***1*** | ***06*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***2,434,706,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur*** | - | ***2,179,251,255*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 300 Orang/bulan | 2,434,706,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 2,179,251,255 | DINAS SOSIAL |
| | ***1*** | ***06*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***101,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur*** | - | ***224,805,706*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 90 Paket | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 50,074,016 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1100 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 15,022,205 | DINAS SOSIAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 35 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 24,536,268 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1,902,812 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 133,270,403 | DINAS SOSIAL |
| | ***1*** | ***06*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***7 Jenis*** | ***88,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur*** | - | ***75,111,025*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 88,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 75,111,025 | DINAS SOSIAL |
| | ***1*** | ***06*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***242,888,640*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur*** | - | ***378,008,752*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30 Laporan | 1,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 2,453,626 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 30 Laporan | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 75,111,025 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 230 Laporan | 166,688,640 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 300,444,100 | DINAS SOSIAL |
| | ***1*** | ***06*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***60 Unit*** | ***105,600,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur*** | - | ***105,155,435*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 12 Unit | 34,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 25,037,008 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 36 Unit | 26,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 60,088,820 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 10,014,803 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 7 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 10,014,803 | DINAS SOSIAL |
| **31** | **1** | **06** | **02** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL** | **Cakupan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Keluarga Kurang Mampu** | - | | | **74.92 Persen** | **275,000,000** | | | | | | - | **529,245,916** | **DINAS SOSIAL** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***06*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial*** | - | | | ***74.92 Persen*** | ***275,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***529,245,916*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 79,116,946 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 74,954,794 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Keluarga | 170,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 24,984,931 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 5 Lembaga | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 316,876,002 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0005 | Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) | Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 4 Sertifikat | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 33,313,241 | DINAS SOSIAL |
| **32** | **1** | **06** | **04** | | | **PROGRAM REHABILITASI SOSIAL** | **Persentase Penanganan Rehabilitasi Sosial** | - | | | **100 Persen** | **1,120,000,000** | | | | | | - | **866,230,416** | **DINAS SOSIAL** |
| | ***1*** | ***06*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial*** | ***Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial*** | - | | | ***100 Persen*** | ***645,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***645,904,742*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 300,444,100 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 150,222,050 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 18,026,646 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 200 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 40,059,213 | DINAS SOSIAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 80 Orang | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 77,063,911 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 50 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 30,044,410 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0012 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 80 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 30,044,410 | DINAS SOSIAL |
| | ***1*** | ***06*** | ***04*** | ***2.02*** | | ***Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial*** | ***Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial*** | - | | | ***100 Persen*** | ***475,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***220,325,673*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 150 Orang | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 150,222,050 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA | Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 300,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 25,037,008 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0011 | Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 70 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 20,029,606 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0013 | Pemberian Layanan Rujukan | Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 100 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 25,037,008 | DINAS SOSIAL |
| **33** | **1** | **06** | **05** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL** | **Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial** | - | | | **43.76 Persen** | **50,000,000** | | | | | | - | **1,001,480,336** | **DINAS SOSIAL** |
| | ***1*** | ***06*** | ***05*** | ***2.02*** | | ***Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***142414 Orang*** | ***50,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***1,001,480,336*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata | | | | 113755 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 500,740,168 | DINAS SOSIAL |
| | 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota | | | | 28439 Keluarga | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 500,740,168 | DINAS SOSIAL |
| **34** | **1** | **06** | **06** | | | **PROGRAM PENANGANAN BENCANA** | **Persentase Korban Bencana Yang Menerima Bantuan Masa Tanggap Darurat** | - | | | **100 Persen** | **25,000,000** | | | | | | - | **28,041,449** | **DINAS SOSIAL** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***1*** | ***06*** | ***06*** | ***2.02*** | | ***Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Sosialiasi Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota*** | - | | | ***100 Persen*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***28,041,449*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 25 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 28,041,449 | DINAS SOSIAL |
| **35** | **1** | **06** | **07** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN** | **Persentase Taman Makam Pahlawan Yang dikelola** | - | | | **100 Persen** | **40,000,000** | | | | | | - | **50,074,016** | **DINAS SOSIAL** |
| | ***1*** | ***06*** | ***07*** | ***2.01*** | | ***Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota*** | - | | | ***100 Persen*** | ***40,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***50,074,016*** | ***DINAS SOSIAL*** |
| | 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota | | | | 1 Makam | 40,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 50,074,016 | DINAS SOSIAL |
| | | | | | | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | **7,167,986,615** | | | | | | | **7,925,164,340** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7,167,986,615** | | | | | | | **7,925,164,340** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | **2** | **08** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK** | | | | | | **4,483,209,005** | | | | | | | **5,250,164,340** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| **36** | **2** | **08** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **3,627,214,730** | | | | | | - | **4,170,115,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***08*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*** | - | | | ***7 Dokumen*** | ***15,999,990*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***DP3AP2KB*** | - | ***18,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 7 Dokumen | 15,999,990 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 18,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Gaji dan Tunjngan ASN*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***3,047,295,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***DP3AP2KB*** | - | ***3,015,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 410 Orang/bulan | 3,047,295,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 3,015,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Reformasi Birokrasi*** | ***DP3AP2KB*** | - | ***60,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 2 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 60,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Umum OPD*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***92,630,460*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***DP3AP2KB*** | - | ***172,325,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 20,009,990 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 35,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 6,480,470 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 9,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 17,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 1,325,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 20 Laporan | 50,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 110,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan*** | - | | | ***7 Unit*** | ***40,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***DP3AP2KB*** | - | ***160,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 7 Unit | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 160,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***267,489,280*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***DP3AP2KB*** | - | ***446,140,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 5 Laporan | 1,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 1,440,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 47,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 81,700,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 218,789,280 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 363,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***153,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***DP3AP2KB*** | - | ***298,650,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 34,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 38,650,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 4 Unit | 84,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 95,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 110,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 10 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | DP3AP2KB | | 55,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **37** | **2** | **08** | **02** | | | **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN** | **Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender** | **-** | | | **62.02 Persen** | **44,998,755** | | | | | | **-** | **100,118,427** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***08*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota*** | ***Cakupan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarustamaan Gender*** | - | | | ***75.30 Persen*** | ***9,999,490*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Lembaga/Organisasi Perempuan Kota Lhokseumawe*** | - | ***14,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 02 | 2.01 | 0004 | Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG | Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 20 Perangkat Daerah | 9,999,490 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Lembaga/Organisasi Perempuan Kota Lhokseumawe | | 14,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***14,999,550*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Organisasi Perempuan Kota Lhokseumawe*** | - | ***31,118,427*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 14,999,550 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Organisasi Perempuan Kota Lhokseumawe | | 31,118,427 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas*** | - | | | ***1 Lembaga*** | ***19,999,715*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Calon Pengantin Kota Lhokseumawe (Percepatan Penurunan Stunting)*** | - | ***55,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | | 30 Orang | 19,999,715 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Calon Pengantin Kota Lhokseumawe (Percepatan Penurunan Stunting) | | 55,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **38** | **2** | **08** | **03** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN** | **Cakupan Perlindungan Perempuan dCakupan Perlindungan Perempuan dan Anakan Anak** | - | | | **87.50 Persen** | **254,198,820** | | | | | | - | **275,930,913** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***08*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Cakupan Perlindungan Perempuan*** | - | | | ***85 Persen*** | ***74,799,820*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Perempuan Korban Kekerasan*** | - | ***86,930,913*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 59,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | | 62,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 03 | 2.01 | 0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 10 Perangkat Daerah | 14,999,820 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | | 24,930,913 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Layanan Rujukan Lanjutan*** | - | | | ***85 Persen*** | ***138,735,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Perempuan Korban Kekerasan*** | - | ***142,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 03 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 65 Layanan | 138,735,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Perempuan Korban Kekerasan | | 142,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan*** | - | | | ***85 Persen*** | ***40,664,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***47,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 03 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | | | | 20 Orang | 40,664,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 47,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **39** | **2** | **08** | **04** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA** | **Persentase Pembinaan Kelompok PerempuPersentase Pembinaan kelompok perempuanan** | - | | | **92.41 Persen** | **30,001,795** | | | | | | - | **50,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***08*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Pembinaan kelompok perempuan*** | - | | | ***92.41 Persen*** | ***30,001,795*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***50,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 30,001,795 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **40** | **2** | **08** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK** | **Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Kebutuhan Data SIGA/SDGA** | - | | | **32.35 Persen** | **19,999,895** | | | | | | - | **30,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***08*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***19,999,895*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***30,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 19,999,895 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **41** | **2** | **08** | **06** | | | **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)** | **Cakupan Pemenuhan Hak Anak** | **-** | | | **37.18 Persen** | **134,999,680** | | | | | | **-** | **222,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***08*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota*** | ***Cakupan Pemenuhan Hak Anak*** | - | | | ***37.18 Persen*** | ***49,999,835*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Anak Kota Lhokseumawe*** | - | ***52,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 06 | 2.01 | 0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | | | | 26 Organisasi | 49,999,835 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Anak Kota Lhokseumawe | | 52,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***06*** | ***2.02*** | | ***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota*** | - | | | ***60000 Anak*** | ***84,999,845*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Anak Kota Lhokseumawe*** | - | ***170,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 60000 Orang | 20,000,240 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Anak Kota Lhokseumawe | | 55,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 9,999,890 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Anak Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 39,999,820 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Anak Kota Lhokseumawe | | 45,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 06 | 2.02 | 0004 | Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 14,999,895 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Anak Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **42** | **2** | **08** | **07** | | | **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK** | **PersentasPersentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensife Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif** | **-** | | | **100 Persen** | **371,795,330** | | | | | | **-** | **402,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***08*** | ***07*** | ***2.01*** | | ***Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif*** | - | | | ***100 Persen*** | ***102,699,330*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***117,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0003 | Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu | | | | 1 Kegiatan | 12,999,330 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 22,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 08 | 07 | 2.01 | 0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA | | | | 300 Orang | 89,700,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 95,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***07*** | ***2.02*** | | ***Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota*** | - | | | ***60 Pengaduan*** | ***208,100,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Anak Korban Kekerasan*** | - | ***215,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 08 | 07 | 2.02 | 0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan | | | | 60 Orang | 208,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Anak Korban Kekerasan | | 215,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***08*** | ***07*** | ***2.03*** | | ***Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***60,996,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Lembaga Penyedia Layanan*** | - | ***70,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 08 | 07 | 2.03 | 0006 | Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/ | Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK | | | | 35 Orang | 60,996,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Lembaga Penyedia Layanan | | 70,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | **2** | **14** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** | | | | | | **2,684,777,610** | | | | | | | **2,675,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| **43** | **2** | **14** | **02** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK** | **Persentase Perangkat Daerah yang Berperan aktif dalam Pembangunan Daerah melalui Kampung KB** | **-** | | | **64.71 Persen** | **30,000,000** | | | | | | **-** | **40,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***14*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk*** | ***Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Sekolah di Wilayah Kota Lhokseumawe*** | - | ***40,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sekolah di Wilayah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 02 | 2.01 | 0021 | Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan | | | | 2 Kegiatan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Sekolah di Wilayah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **44** | **2** | **14** | **03** | | | **PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** | **Cakupan PCakupan Pembinaan Keluarga Berencanaembinaan Keluarga Berencana** | **-** | | | **51.61 Persen** | **1,452,878,000** | | | | | | **-** | **1,510,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***14*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal*** | ***Cakupan Pembinaan Keluarga Berencana*** | - | | | ***51.26 Persen*** | ***445,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***300,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 4 Laporan | 216,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 225,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0012 | Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | | | | 3 Dokumen | 214,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 55,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 2.01 | 0014 | Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja | | | | 3 Organisasi | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***14*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)*** | ***Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)*** | - | | | ***253 Kader*** | ***252,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***250,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 14 | 03 | 2.02 | 0004 | Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) | | | | 253 Orang | 252,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 250,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***14*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya*** | - | | | ***21 Paskes*** | ***545,278,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB*** | - | ***720,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | | | | 21 Laporan | 47,395,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB | | 85,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0003 | Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) | | | | 1519 Orang | 165,384,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB | | 110,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0006 | Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB | | | | 29 Unit | 322,499,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB | | 510,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 2.03 | 0010 | Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi | | | | 20 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Fasilitas Kesehatan Pelayanan KB | | 15,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | ***2*** | ***14*** | ***03*** | ***2.04*** | | ***Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB*** | ***Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB*** | - | | | ***52 Kampung KB*** | ***209,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Kesehatan*** | ***Balai Penyuluh KB, Kader dan Kampung KB*** | - | ***240,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |
| | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB | | | | 4 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Kesehatan | Balai Penyuluh KB, Kader dan Kampung KB | | 20,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 03 | 2.04 | 0006 | Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | | | | 52 Kampung | 199,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Balai Penyuluh KB, Kader dan Kampung KB | | 220,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| **45** | **2** | **14** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)** | **Cakupan Pemberdayaan dan Cakupan Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga SejahteraPeningkatan Keluarga Sejahtera** | - | | | **104.78 Persen** | **1,201,899,610** | | | | | | - | **1,125,000,000** | **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA** |
| | ***2*** | ***14*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*** | ***Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk*** | - | | | ***58 Kelompok*** | ***1,201,899,610*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan*** | ***Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga*** | - | ***1,125,000,000*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | | | | 68 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 75,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) | | | | 3 Laporan | 29,999,610 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 50,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | 2 | 14 | 04 | 2.01 | 0024 | Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | | | | 204 Orang | 1,161,900,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-BOKB-KB | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Kesehatan | Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | | 1,000,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA |
| | | | | | | **DINAS PERTANAHAN** | | | | | | **3,941,676,952** | | | | | | | **3,364,104,102** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3,941,676,952** | | | | | | | **3,364,104,102** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | **2** | **10** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN** | | | | | | **3,941,676,952** | | | | | | | **3,364,104,102** | **DINAS PERTANAHAN** |
| **46** | **2** | **10** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **3,221,099,040** | | | | | | - | **2,789,104,102** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | ***2*** | ***10*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Pertanahan*** | - | ***15,574,708*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 5 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 15,574,708 | DINAS PERTANAHAN |
| | ***2*** | ***10*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***2,825,209,120*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Dinas Pertanahan*** | - | ***2,389,869,144*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 490 Orang/bulan | 2,825,209,120 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Pertanahan | | 2,389,869,144 | DINAS PERTANAHAN |
| | ***2*** | ***10*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***80,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Pertanahan*** | - | ***106,222,800*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 30 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 19,380,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1300 Paket | 4,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 7,140,000 | DINAS PERTANAHAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 4 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 7,140,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 730 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 1,162,800 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 32 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 71,400,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | ***2*** | ***10*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***2 Jenis*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Pertanahan*** | - | ***25,667,610*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 17 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 25,667,610 | DINAS PERTANAHAN |
| | ***2*** | ***10*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah undefined*** | - | | | ***3 Jenis undefined undefined*** | ***178,449,920*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Pertanahan*** | - | ***184,398,840*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 100 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 1,020,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 48 Laporan | 75,400,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 104,448,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 72 Laporan | 102,049,920 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 78,930,840 | DINAS PERTANAHAN |
| | ***2*** | ***10*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jenis Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***102,300,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Pertanahan*** | - | ***67,371,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 33,966,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 39,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 2,040,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 15,300,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 15 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Dinas Pertanahan | | 16,065,000 | DINAS PERTANAHAN |
| **47** | **2** | **10** | **10** | | | **PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH** | **Persentase Luas Lahan bersertifikat Milik Pemerintah** | - | | | **0.59 Persen** | **35,000,000** | | | | | | - | **95,000,000** | **DINAS PERTANAHAN** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***10*** | ***10*** | ***2.01*** | | ***Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jenis Koordinasi Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***35,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***95,000,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah | Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 4 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 50,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 10 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya | | | | 4 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 45,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| **48** | **2** | **10** | **12** | | | **PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH** | **Persentase Luas Lahan Bersertifikat Milik Masyarakat** | - | | | **45.64 Persen** | **40,000,000** | | | | | | - | **75,000,000** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | ***2*** | ***10*** | ***12*** | ***7.01*** | | ***Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*** | ***Jumlah Kegiatan Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah*** | - | | | ***1 Kegiatan*** | ***40,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***75,000,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 12 | 7.01 | 0001 | Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah | Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah | | | | 5 Laporan | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 75,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| **49** | **2** | **10** | **13** | | | **PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN** | **Persentase Tanah yang Dipetakan** | - | | | **67.80 Persen** | **40,000,000** | | | | | | - | **80,000,000** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | ***2*** | ***10*** | ***13*** | ***7.01*** | | ***Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong*** | ***Jenis Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***40,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***80,000,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 13 | 7.01 | 0001 | Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda | | | | 5 Dokumen | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 80,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| **50** | **2** | **10** | **14** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN** | **Persentase Pembinaan SDM Pertanahan** | - | | | **52.63 Persen** | **50,000,000** | | | | | | - | **125,000,000** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | ***2*** | ***10*** | ***14*** | ***7.01*** | | ***Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten*** | ***Jumlah Dokumen Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***60,000,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 14 | 7.01 | 0002 | Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan | | | | 5 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 60,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | ***2*** | ***10*** | ***14*** | ***7.02*** | | ***Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan*** | ***Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan*** | - | | | ***1 Kegiatan*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Lembaga Mukim dan Keuchik*** | - | ***65,000,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 14 | 7.02 | 0001 | Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik | Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan | | | | 68 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Mukim dan Keuchik | | 65,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| **51** | **2** | **10** | **16** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN** | **Ketersediaan Sistem Informasi Pertanahan** | - | | | **Tidak Ada/Tidak** | **515,577,912** | | | | | | - | **150,000,000** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | ***2*** | ***10*** | ***16*** | ***7.01*** | | ***Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)*** | ***Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***515,577,912*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***150,000,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 10 | 16 | 7.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | | | | 4 Dokumen | 490,577,912 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 75,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | 2 | 10 | 16 | 7.01 | 0002 | Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH) | | | | 4 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 75,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| **52** | **2** | **10** | **17** | | | **PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN** | **Persentase Penyelesaian Kasus Sengketa Dan Konflik Pertanahan** | **-** | | | **60 Persen** | **40,000,000** | | | | | | **-** | **50,000,000** | **DINAS PERTANAHAN** |
| | ***2*** | ***10*** | ***17*** | ***7.01*** | | ***Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan*** | ***Jenis Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan*** | **-** | | | ***2 Jenis*** | ***40,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***50,000,000*** | ***DINAS PERTANAHAN*** |
| | 2 | 10 | 17 | 7.01 | 0001 | Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 50,000,000 | DINAS PERTANAHAN |
| | | | | | | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **30,998,964,040** | | | | | | | **30,730,743,700** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **30,998,964,040** | | | | | | | **30,730,743,700** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| | **2** | **11** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP** | | | | | | **30,998,964,040** | | | | | | | **30,730,743,700** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| **53** | **2** | **11** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **25,468,186,000** | | | | | | **-** | **28,476,681,130** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| | ***2*** | ***11*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Lancarnya Administrasi Perkantoran*** | - | | | ***12 bulan*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Dinas Lingkungan Hidup*** | - | ***127,570,275*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 127,570,275 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | ***2*** | ***11*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Lancarnya Administrasi Perkantoran*** | - | | | ***12 bulan*** | ***3,122,312,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Aparatur Dinas Lingkungan Hidup*** | - | ***2,906,801,006*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 434 Orang/bulan | 3,122,312,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Aparatur Dinas Lingkungan Hidup | | 2,906,801,006 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | ***2*** | ***11*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Lancarnya Administrasi Perkantoran*** | - | | | ***12 bulan*** | ***1,300,590,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Dinas Lingkungan Hidup*** | - | ***1,560,409,043*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1,244,450,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 1,447,031,250 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 2,083,725 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 1,319,693 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 35 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 109,974,375 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | ***2*** | ***11*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Lancarnya Administrasi Perkantoran*** | - | | | ***12 bulan*** | ***19,005,964,800*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Dinas Lingkungan Hidup*** | - | ***21,256,921,643*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 2 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 1,736,438 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 11,050,916,529 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 10,964,397,725 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 7,953,548,271 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 10,290,787,480 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | ***2*** | ***11*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Lancarnya Administrasi Perkantoran*** | - | | | ***12 bulan*** | ***2,024,319,200*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Dinas Lingkungan Hidup*** | - | ***2,624,979,163*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 38,548,913 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 1,981,019,200 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 2,501,430,250 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Dinas Lingkungan Hidup | | 85,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| **54** | **2** | **11** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Tersusunya RPPLH Kab/Kota** | **-** | | | **Ada -** | **80,000,000** | | | | | | **-** | **231,525,000** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| | ***2*** | ***11*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*** | ***semakin baiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*** | - | | | ***70,27 Indeks*** | ***80,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***231,525,000*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 115,762,500 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | | | | 1 Dokuman | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 115,762,500 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| **55** | **2** | **11** | **03** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP** | **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** | **-** | | | **65.35 Nilai** | **20,000,000** | | | | | | **-** | **-** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| | ***2*** | ***11*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota*** | ***semakin baiknya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*** | - | | | ***70,27 Indeks*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | - | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Ujong Pacu | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | - | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| **56** | **2** | **11** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)** | **Persentase Luasan Taman** | **-** | | | **61.95 Persen** | **1,080,000,000** | | | | | | **-** | **1,122,537,570** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| | ***2*** | ***11*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota*** | ***Persentase luasan taman*** | - | | | ***20 persen*** | ***1,080,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***1,122,537,570*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Ha | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 55,125,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0007 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati | Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola | | | | 10 Unit | 1,000,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 857,882,445 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 11 | 04 | 2.01 | 0008 | Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya | Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 1 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 209,530,125 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| **57** | **2** | **11** | **11** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN** | **Persentase Jumlah Sampah yang Ditangani** | **-** | | | **89.73 Persen** | **4,350,778,040** | | | | | | **-** | **900,000,000** | **DINAS LINGKUNGAN HIDUP** |
| | ***2*** | ***11*** | ***11*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Sampah*** | ***Persentase jumlah sampah yang ditangani*** | - | | | ***89.73 persen*** | ***4,350,778,040*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***900,000,000*** | ***DINAS LINGKUNGAN HIDUP*** |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | | | 68 Kelompok | 500,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | - | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | | | | 1 Dokumen | 100,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 300,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | | | 1 Unit | 3,197,250,720 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 300,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | 2 | 11 | 11 | 2.01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | | | 85 Ton | 553,527,320 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Lingkungan Hidup | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 300,000,000 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| | | | | | | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **4,045,441,627** | | | | | | | **2,691,978,185** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4,045,441,627** | | | | | | | **2,691,978,185** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | **2** | **12** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** | | | | | | **4,045,441,627** | | | | | | | **2,691,978,185** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| **58** | **2** | **12** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **3,204,242,560** | | | | | | **-** | **2,379,220,000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | ***2*** | ***12*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Dukcapil*** | - | ***15,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 12 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 15,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***2,403,164,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Dinas Dukcapil*** | - | ***1,200,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 490 Orang/bulan | 2,403,164,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Dukcapil | | 1,200,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***5 Jenis*** | ***5,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Dinas Dukcapil*** | - | ***30,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 20 Orang | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Aparatur Dinas Dukcapil | | 30,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***106,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Dukcapil*** | - | ***186,800,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 6 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 50,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1200 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 15,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 15 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 20,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 1,800,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 150 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 100,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***7 Jenis*** | ***85,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Dukcapil*** | - | ***200,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 20 Unit | 85,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 200,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Umum Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***437,238,560*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Dukcapil*** | - | ***485,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 180 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 5,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 9 Laporan | 156,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 150,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 279,138,560 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 330,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***152,700,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Dinas Dukcapil*** | - | ***262,420,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 40,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 39,400,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 77,420,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 75,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 45 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Dinas Dukcapil | | 70,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| **59** | **2** | **12** | **02** | | | **PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** | **Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk** | - | | | **71.18 Persen** | **180,000,000** | | | | | | - | **144,000,000** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | ***2*** | ***12*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pelayanan Pendaftaran Penduduk*** | ***Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan*** | - | | | ***4 Dokumen*** | ***80,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***70,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan | | | | 4 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0002 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk | | | | 17280 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 12960 Laporan | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0005 | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan | | | | 20 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 02 | 2.01 | 0008 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk | Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk | | | | 20160 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Penataan Pendaftaran Penduduk*** | ***Periode Penataan Pendaftaran Penduduk*** | - | | | ***2 Kegiatan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***10,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 12 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan | Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia | | | | 3 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk*** | - | | | ***4 Dokumen*** | ***90,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***64,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk | | | | 4 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0005 | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk | Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk | | | | 1 Laporan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 02 | 2.03 | 0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk | Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia | | | | 46800 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 4,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| **60** | **2** | **12** | **03** | | | **PROGRAM PENCATATAN SIPIL** | **Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil** | - | | | **87.77 Persen** | **100,000,000** | | | | | | - | **55,240,067** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | ***2*** | ***12*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pelayanan Pencatatan Sipil*** | ***Jumlah Dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil*** | - | | | ***8100 Dokumen*** | ***40,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***20,240,067*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0002 | Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan | | | | 5 Layanan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 03 | 2.01 | 0003 | Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil | | | | 8100 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 10,240,067 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*** | ***Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil*** | - | | | ***5 Laporan*** | ***60,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***35,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil | | | | 5 Laporan | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0004 | Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil | | | | 1 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 03 | 2.02 | 0008 | Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil | Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil | | | | 1 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| **61** | **2** | **12** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN** | **Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** | - | | | **100 Persen** | **551,199,067** | | | | | | - | **88,444,101** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***12*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*** | ***Jumlah Dokumen Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan*** | - | | | ***4 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***5,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 04 | 2.01 | 0003 | Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah | | | | 18 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***04*** | ***2.03*** | | ***Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*** | ***Jumlah Laporan Administrasi Kependudukan*** | - | | | ***8 Laporan*** | ***511,199,067*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***73,444,101*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 12 Laporan | 220,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,444,101 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0007 | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | | | | 2 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 38,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | 2 | 12 | 04 | 2.03 | 0008 | Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan | | | | 12 Dokumen | 281,199,067 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | ***2*** | ***12*** | ***04*** | ***2.04*** | | ***Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*** | ***Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan*** | - | | | ***3 Laporan*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***10,000,000*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 04 | 2.04 | 0001 | Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan | | | | 2 Laporan | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 10,000,000 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| **62** | **2** | **12** | **05** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN** | **Ketersediaan Profil Perkembangan Kependudukan** | - | | | **Ada Ada** | **10,000,000** | | | | | | - | **25,074,017** | **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL** |
| | ***2*** | ***12*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Penyusunan Profil Kependudukan*** | ***Jumlah Buku Profil Kependudukan*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***25,074,017*** | ***DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL*** |
| | 2 | 12 | 05 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain | Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 25,074,017 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| | | | | | | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** | | | | | | **3,070,760,701** | | | | | | | **3,180,061,027** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **3,070,760,701** | | | | | | | **3,180,061,027** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** |
| | **2** | **13** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA** | | | | | | **3,070,760,701** | | | | | | | **3,180,061,027** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** |
| **63** | **2** | **13** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **2,632,880,480** | | | | | | - | **2,642,979,196** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** |
| | ***2*** | ***13*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Tersedianya Dokumen Perencanaan*** | - | | | ***8 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***DMPG*** | - | ***16,537,500*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 13 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 16,537,500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | ***2*** | ***13*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Tersedianya Laporan Keuangan OPD*** | - | | | ***336 OB*** | ***2,111,328,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur DMPG*** | - | ***1,790,316,390*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |
| | 2 | 13 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 336 Orang/bulan | 2,111,328,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur DMPG | | 1,790,316,390 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | ***2*** | ***13*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Tersedianya Pelayanan Administrasi Kantor*** | - | | | ***12 Paket*** | ***75,280,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***DMPG*** | - | ***80,792,500*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 16,537,500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 12 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 11,025,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 11,025,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 235 Dokumen | 2,280,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 2,205,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 40,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 40,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | ***2*** | ***13*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Tersedianya Barang Milik Daerah*** | - | | | ***1 Unit*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***DMPG*** | - | ***27,562,500*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |
| | 2 | 13 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 27,562,500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | ***2*** | ***13*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor*** | - | | | ***12 Laporan*** | ***292,472,480*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***DMPG*** | - | ***460,171,506*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 2,205,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 110,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | DMPG | | 165,375,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 13 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 180,972,480 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | DMPG | | 292,591,506 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | ***2*** | ***13*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Tersedianya Pemeliharaan Rutin/Berkala Barang Milik Daerah*** | - | | | ***1 Unit*** | ***118,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***DMPG*** | - | ***267,598,800*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | DMPG | | 53,096,400 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 25,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | DMPG | | 32,589,900 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | DMPG | | 165,375,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 22 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Lancang Garam | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | DMPG | | 16,537,500 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| **64** | **2** | **13** | **04** | | | **PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA** | **Cakupan Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong** | - | | | **74.49 Persen** | **223,880,221** | | | | | | - | **268,441,634** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** |
| | ***2*** | ***13*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa*** | ***Meningkatnya Pembinaan Dan Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa*** | - | | | ***68 Dokumen*** | ***223,880,221*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur*** | - | ***268,441,634*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa | | | | 1 Dokumen | 2,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 2,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa | | | | 5 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 25,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | | | | 5 Dokumen | 86,880,221 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 100,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 68 Orang | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 25,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 10,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | | | | 1 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 30,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 1,441,634 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 3,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 10,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0012 | Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa | | | | 68 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 5,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0013 | Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 30,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas | | | | 68 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 2,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 04 | 2.01 | 0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Gampong, Masyarakat, dan Aparatur | | 25,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| **65** | **2** | **13** | **05** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT** | **Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan** | **-** | | | **86.03 Persen** | **214,000,000** | | | | | | **-** | **268,640,197** | **DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG** |
| | ***2*** | ***13*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Tersediannya Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat di Gampong*** | - | | | ***68 Gampong*** | ***214,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Lembaga Pemberdayaan Masyarakat*** | - | ***268,640,197*** | ***DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG*** |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 30,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 68 Lembaga | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 20,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | | | | 68 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 3,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | | | 3 Laporan | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 25,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | | | | 1 Laporan | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 3,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa | | | | 1 Dokumen | 6,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 3,000,000 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | 2 | 13 | 05 | 2.01 | 0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | | | | 68 Dokumen | 130,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Lembaga Pemberdayaan Masyarakat | | 184,640,197 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG |
| | | | | | | **DINAS PERHUBUNGAN** | | | | | | **7,079,199,546** | | | | | | | **6,103,722,551** | **DINAS PERHUBUNGAN** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7,079,199,546** | | | | | | | **6,103,722,551** | **DINAS PERHUBUNGAN** |
| | **2** | **15** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN** | | | | | | **7,079,199,546** | | | | | | | **6,103,722,551** | **DINAS PERHUBUNGAN** |
| **66** | **2** | **15** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **4,794,199,546** | | | | | | **-** | **4,881,342,280** | **DINAS PERHUBUNGAN** |
| | ***2*** | ***15*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | **-** | | | ***2 Dokumen*** | ***14,175,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dinas Perhubungan*** | - | ***5,000,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 14,175,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dinas Perhubungan | | 5,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | ***2*** | ***15*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | **-** | | | ***12 Bulan*** | ***2,335,336,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Aparatur Dishub*** | - | ***2,650,000,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 288 Orang/bulan | 2,335,336,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Aparatur Dishub | | 2,650,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | ***2*** | ***15*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | **-** | | | ***12 Bulan*** | ***275,154,466*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dishub*** | - | ***182,842,280*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 29,962,280 | DINAS PERHUBUNGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 151,014,466 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 15,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 28,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 35,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 2,880,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 50 Laporan | 70,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 100,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | ***2*** | ***15*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***7 Unit*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dishub*** | - | - | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | - | DINAS PERHUBUNGAN |
| | ***2*** | ***15*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,254,134,080*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dishub*** | - | ***1,342,500,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 2,500,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 87,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 130,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1,165,334,080 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 1,210,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***15*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***55 Unit*** | ***885,400,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Dishub*** | - | ***701,000,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 36,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 15 Unit | 709,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 600,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 15 Unit | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 15,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 135,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Dishub | | 50,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| **67** | **2** | **15** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)** | **Cakupan Kualitas Layanan Transportasi** | - | | | **52.08 Persen** | **2,285,000,000** | | | | | | - | **1,222,380,271** | **DINAS PERHUBUNGAN** |
| | ***2*** | ***15*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia*** | - | | | ***121 Unit*** | ***360,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Pengguna Jalan*** | - | ***385,000,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun | | | | 1 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Jalan | | 80,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 100 Unit | 180,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Jalan | | 180,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan | Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 1 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Jalan | | 50,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.02 | 0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan | Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara | | | | 19 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Jalan | | 75,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***15*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*** | ***Jumlah terminal yang dikelola*** | - | | | ***2 Unit*** | ***1,360,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Pengguna Angkutan*** | - | ***312,380,271*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 02 | 2.03 | 0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) | Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara | | | | 1 Unit | 1,360,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Angkutan | | 312,380,271 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | ***2*** | ***15*** | ***02*** | ***2.05*** | | ***Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor*** | ***Periode penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***182,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Pengguna Kendaraan Angkutan*** | - | ***105,000,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia | | | | 1 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Kendaraan Angkutan | | - | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 1 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Kendaraan Angkutan | | 15,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 1600 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Kendaraan Angkutan | | 65,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara | | | | 8 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Kendaraan Angkutan | | 15,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.05 | 0010 | Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor | | | | 1 Laporan | 12,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Kendaraan Angkutan | | 10,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | ***2*** | ***15*** | ***02*** | ***2.06*** | | ***Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota*** | ***Periode penyelenggaraan Menajemen dan Rekayasa Lalu Lintas*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***180,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Pengguna Jalan*** | - | ***165,000,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Jalan | | 55,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 15 | 02 | 2.06 | 0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas | Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan | | | | 45 Dokumen | 130,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Pengguna Jalan | | 110,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | ***2*** | ***15*** | ***02*** | ***2.08*** | | ***Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan*** | ***Periode pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***203,000,000*** | | | ***Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur*** | ***Angkutan Orang/Barang*** | - | ***255,000,000*** | ***DINAS PERHUBUNGAN*** |
| | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0003 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal | | | | 3 Laporan | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Angkutan Orang/Barang | | 15,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | 2 | 15 | 02 | 2.08 | 0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum | | | | 4 Laporan | 195,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Infrastruktur | Angkutan Orang/Barang | | 240,000,000 | DINAS PERHUBUNGAN |
| | | | | | | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** | | | | | | **2,467,596,952** | | | | | | | **2,143,114,189** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2,467,596,952** | | | | | | | **2,143,114,189** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| | **2** | **16** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA** | | | | | | **2,447,596,952** | | | | | | | **2,093,114,189** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| **68** | **2** | **16** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **1,864,596,952** | | | | | | - | **2,022,614,189** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| | ***2*** | ***16*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***8,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Diskominfo*** | - | ***14,000,000*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Diskominfo | | 14,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | ***2*** | ***16*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***1,507,683,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur*** | - | ***1,457,091,309*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 280 Orang/bulan | 1,507,683,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur | | 1,457,091,309 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | ***2*** | ***16*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***86,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Diskominfo, Aparatur*** | - | ***123,140,000*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 30,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 7,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 5,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 1,140,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 32 Laporan | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 80,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | ***2*** | ***16*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***26 Laporan*** | ***214,173,952*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Diskominfo, Aparatur*** | - | ***344,082,880*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 1,200,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 55,016,667 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 166,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 27,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 147,957,285 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 149,882,880 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | ***2*** | ***16*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***33 Unit*** | ***48,600,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Diskominfo, Aparatur*** | - | ***84,300,000*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 33,300,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 35,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 30 Unit | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Diskominfo, Aparatur | | 16,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| **69** | **2** | **16** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase Penyebaran Informasi Publik** | - | | | **23.68 Persen** | **30,000,000** | | | | | | - | **28,000,000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| | ***2*** | ***16*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Periode Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***28,000,000*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | | | | 50 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Perangkat Daerah | | 8,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | | | | 10 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Perangkat Daerah | | 10,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | | | | 30 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Perangkat Daerah | | 10,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| **70** | **2** | **16** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase Pelayanan Publik Yang Terintegrasi** | **-** | | | **11.76 Persen** | **553,000,000** | | | | | | **-** | **42,500,000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| | ***2*** | ***16*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Sistem Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Unit*** | ***500,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Perangkat Daerah*** | - | ***15,000,000*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | | | | 1 Unit | 500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Perangkat Daerah | | 15,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | ***2*** | ***16*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Periode Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***53,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Perangkat Daerah*** | - | ***27,500,000*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | | | | 7 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Perangkat Daerah | | 7,500,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | | | | 600 Layanan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Perangkat Daerah | | 5,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | | | | 2 Dokumen | 13,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Perangkat Daerah | | 15,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | **2** | **21** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN** | | | | | | **20,000,000** | | | | | | | **50,000,000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| **71** | **2** | **21** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase OPD yang melakukan pengamanan data dan informasi terintegrasi** | **-** | | | **8.82 Persen** | **20,000,000** | | | | | | **-** | **50,000,000** | **DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN** |
| | ***2*** | ***21*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Periode Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Perangkat Daerah*** | - | ***50,000,000*** | ***DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN*** |
| | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | | | | 34 Perangkat Daerah | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Perangkat Daerah | | 50,000,000 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN |
| | | | | | | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** | | | | | | **5,921,050,141** | | | | | | | **5,736,709,380** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5,921,050,141** | | | | | | | **5,736,709,380** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | **2** | **07** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA** | | | | | | **5,262,850,140** | | | | | | | **5,116,636,095** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| **72** | **2** | **07** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **5,131,825,140** | | | | | | **-** | **4,936,185,470** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Capaian Laporan Kinerja*** | - | | | ***5 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DPMPTSP Naker, Aparatur*** | - | ***16,000,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 16,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***4,616,218,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DPMPTSP Naker, Aparatur*** | - | ***4,064,861,270*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 559 Orang/bulan | 4,616,218,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 4,064,861,270 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***12,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DPMPTSP Naker, Aparatur*** | - | ***16,000,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 3 Orang | 12,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 16,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi umum*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***116,140,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DPMPTSP Naker, Aparatur*** | - | ***206,140,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 33,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 534 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 17,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 55,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 1,140,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 120 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 100,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DPMPTSP Naker, Aparatur*** | - | ***114,985,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 5 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 114,985,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***282,867,140*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DPMPTSP Naker, Aparatur*** | - | ***421,599,200*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 1,500,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 118,701,220 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 170,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 162,665,920 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 250,099,200 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | ***2*** | ***07*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***79,600,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DPMPTSP Naker, Aparatur*** | - | ***96,600,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 34,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 34,300,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 25,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 31,300,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 14 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 5,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 07 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | DPMPTSP Naker, Aparatur | | 26,000,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| **73** | **2** | **07** | **03** | | | **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA** | **Persentase Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan** | - | | | **14.29 Persen** | **75,000,000** | | | | | | - | **58,900,000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***07*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi*** | ***Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Jumlah Pelaksanaan Pelatihan*** | - | | | ***1 Kegiatan 5 Lembaga*** | ***75,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat, Angkatan Kerja*** | - | ***58,900,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 07 | 03 | 2.01 | 0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n | | | | 20 Orang | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat, Angkatan Kerja | | 58,900,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| **74** | **2** | **07** | **04** | | | **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA** | **Persentase Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan** | **-** | | | **53.57 Persen** | **16,025,000** | | | | | | **-** | **28,940,625** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***07*** | ***04*** | ***2.02*** | | ***Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Penerbitan Izin LPTKS*** | - | | | ***10 Lembaga*** | ***5,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta*** | - | ***17,364,375*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 04 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dan Pengendalian LPTKS | Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku | | | | 10 Lembaga | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta | | 17,364,375 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | ***2*** | ***07*** | ***04*** | ***2.03*** | | ***Pengelolaan Informasi Pasar Kerja*** | ***Tersedianya Informasi Pasar Kerja*** | - | | | ***1060 Orang*** | ***11,025,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pencari Kerja*** | - | ***11,576,250*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 04 | 2.03 | 0002 | Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online | Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub) | | | | 1060 Orang | 11,025,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pencari Kerja | | 11,576,250 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| **75** | **2** | **07** | **05** | | | **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL** | **Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial** | **-** | | | **100 Persen** | **40,000,000** | | | | | | **-** | **92,610,000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***07*** | ***05*** | ***2.02*** | | ***Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Penyelesaian Perselisihan*** | - | | | ***41 Kasus*** | ***40,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Lembaga Tripartit*** | - | ***92,610,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 07 | 05 | 2.02 | 0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan | | | | 41 Perkara | 40,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Lembaga Tripartit | | 92,610,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | **2** | **18** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL** | | | | | | **658,200,001** | | | | | | | **620,073,285** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| **76** | **2** | **18** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase Kemudahan Penanaman Modal** | **-** | | | **40.00 Persen** | **27,000,000** | | | | | | **-** | **11,576,250** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***18*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***27,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha*** | - | ***11,576,250*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 18 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | | | | 5 Dokumen | 27,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 11,576,250 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **77** | **2** | **18** | **03** | | | **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Persentase Sektor pada Promosi Penanaman Modal** | **-** | | | **20.00 Persen** | **30,000,000** | | | | | | **-** | **22,601,250** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***18*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Tersedianya Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal*** | - | | | ***5 Dokumen*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha*** | - | ***22,601,250*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 11,025,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 18 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | | | | 1 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 11,576,250 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| **78** | **2** | **18** | **04** | | | **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Indeks Peningkatan Pelayanan Perizinan** | **-** | | | **87.66 Indeks** | **115,000,001** | | | | | | **-** | **201,006,168** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***18*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota*** | ***Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***115,000,001*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha*** | - | ***201,006,168*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah | Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota | | | | 340 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 17,500,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 340 Pelaku Usaha | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 30,900,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | | | | 110 Pelaku Usaha | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 64,350,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 18 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko | Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | | | | 340 Kegiatan Usaha | 60,000,001 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 88,256,168 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| **79** | **2** | **18** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Indeks Pemantauan dan Pengawasan Investasi** | **-** | | | **76.83 Indeks** | **478,200,000** | | | | | | **-** | **372,850,000** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***18*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***478,200,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha*** | - | ***372,850,000*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | | | | 225 Pelaku Usaha | 338,421,600 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 305,350,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | 2 | 18 | 05 | 2.01 | 0006 | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | | 60 Kegiatan Usaha | 139,778,400 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 67,500,000 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| **80** | **2** | **18** | **06** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Ketersediaan Database Perizinan** | - | | | **Ada Ada/Tidak** | **8,000,000** | | | | | | - | **12,039,617** | **DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA** |
| | ***2*** | ***18*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Ketersediaan Data Base Perzinan*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***8,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha, Pemerintah*** | - | ***12,039,617*** | ***DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA*** |
| | 2 | 18 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | | | | 1 Dokumen | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha, Pemerintah | | 12,039,617 | DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA |
| | | | | | | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** | | | | | | **5,706,525,502** | | | | | | | **6,799,257,880** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **5,506,525,502** | | | | | | | **6,494,157,880** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | **2** | **19** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA** | | | | | | **5,506,525,502** | | | | | | | **6,494,157,880** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| **81** | **2** | **19** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **3,089,795,000** | | | | | | - | **3,820,057,880** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | ***2*** | ***19*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen perencanaan*** | - | | | ***7 dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan*** | ***Aparatur OPD*** | - | ***35,061,400*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 35,061,400 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | ***2*** | ***19*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen administrasi keuangan*** | - | | | ***6 dokumen*** | ***2,589,555,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan*** | ***Aparatur OPD*** | - | ***2,832,717,800*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 19 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 420 Orang/bulan | 2,589,555,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 2,832,717,800 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | ***2*** | ***19*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***11 dokumen*** | ***71,140,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan*** | ***Aparatur OPD*** | - | ***195,779,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 35,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 10 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 11,025,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 5 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 8,500,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 20 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 1,254,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15 Laporan | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 140,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | ***2*** | ***19*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***8 dokumen*** | ***80,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan*** | ***Aparatur OPD*** | - | ***121,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 80,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 121,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | ***2*** | ***19*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***4 dokumen*** | ***199,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan*** | ***Aparatur OPD*** | - | ***319,389,680*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 1,650,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 77,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 112,640,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 10 Laporan | 120,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 205,099,680 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | ***2*** | ***19*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***8 dokumen*** | ***135,100,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan*** | ***Aparatur OPD*** | - | ***316,110,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 60,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Pendidikan | Aparatur OPD | | 66,110,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 19 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pendidikan | Aparatur OPD | | 250,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| **82** | **2** | **19** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN** | **Persentase Organisasi Pemuda Yang Aktif** | **-** | | | **100 Persen** | **225,000,000** | | | | | | **-** | **635,000,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | ***2*** | ***19*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***5 Dokumen*** | ***150,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Masyarakat*** | - | ***415,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0004 | Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | Jumlah Pemuda Terpenuhi Haknya Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan | | | | 800 Orang | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Masyarakat | | 370,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 02 | 2.01 | 0007 | Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi | Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan | | | | 10 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Masyarakat | | 45,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | ***2*** | ***19*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***1 dokumen*** | ***75,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Organisasi Pemuda*** | - | ***220,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 02 | 2.02 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan | | | | 2 Dokumen | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Organisasi Pemuda | | 220,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| **83** | **2** | **19** | **03** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN** | **Jumlah prestasi olahraga** | **-** | | | **6 Cabor** | **2,141,730,502** | | | | | | **-** | **2,028,100,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | ***2*** | ***19*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***2 dokumen*** | ***200,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Masyarakat*** | - | ***250,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan | | | | 1 Unit | 200,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Masyarakat | | 250,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | ***2*** | ***19*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***2 dokumen*** | ***1,441,730,502*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***Masyarakat*** | - | ***1,578,100,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0001 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 2 Dokumen | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Masyarakat | | 37,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 2 | 19 | 03 | 2.02 | 0002 | Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota | | | | 1 Dokumen | 1,341,730,502 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | Masyarakat | | 1,541,100,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***19*** | ***03*** | ***2.04*** | | ***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***2 dokumen*** | ***500,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Organisasi Olahraga*** | - | ***200,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 03 | 2.04 | 0002 | Pengembangan Organisasi Keolahragaan | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan | | | | 1 Organisasi | 500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Organisasi Olahraga | | 200,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| **84** | **2** | **19** | **04** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN** | **Pembinaan Pramuka** | - | | | **42.86 Persen** | **50,000,000** | | | | | | - | **11,000,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | ***2*** | ***19*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***5 dokumen*** | ***50,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan*** | ***organisasi kepramukaan dan masyarakat*** | - | ***11,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 2 | 19 | 04 | 2.01 | 0003 | Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah | Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 25 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pendidikan | organisasi kepramukaan dan masyarakat | | 11,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **200,000,000** | | | | | | | **305,100,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | **3** | **26** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA** | | | | | | **200,000,000** | | | | | | | **305,100,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| **85** | **3** | **26** | **02** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA** | **Persentase Peningkatan Daya Tarik Pariwisata** | - | | | **60 Persen** | **30,000,000** | | | | | | - | **40,000,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | ***3*** | ***26*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***2 dokumen*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat*** | - | ***40,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 3 | 26 | 02 | 2.01 | 0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan | | | | 1 Orang | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 40,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| **86** | **3** | **26** | **03** | | | **PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA** | **Peningkatkan Kunjungan Wisata** | - | | | **96.88 Persen** | **70,000,000** | | | | | | - | **143,000,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | ***3*** | ***26*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***3 dokumen*** | ***70,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat*** | - | ***143,000,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |
| | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 5 Dokumen | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 33,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | 3 | 26 | 03 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | | | | 5 Kegiatan | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 110,000,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| **87** | **3** | **26** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF** | **Persentase Pembinaan SDM Pariwisata** | - | | | **100 Persen** | **100,000,000** | | | | | | - | **122,100,000** | **DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA** |
| | ***3*** | ***26*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar*** | ***Jumlah dokumen laporan*** | - | | | ***5 dokumen*** | ***100,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat*** | - | ***122,100,000*** | ***DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 26 | 05 | 2.01 | 0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif | | | | 200 Orang | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 122,100,000 | DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| | | | | | | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** | | | | | | **1,497,654,300** | | | | | | | **1,175,185,020** | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **1,497,654,300** | | | | | | | **1,175,185,020** | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** |
| | **2** | **22** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN** | | | | | | **1,497,654,300** | | | | | | | **1,175,185,020** | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** |
| **88** | **2** | **22** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **1,262,654,300** | | | | | | **-** | **1,106,185,020** | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** |
| | ***2*** | ***22*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 dokumen*** | ***8,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Sekretariat MAA*** | - | ***8,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |
| | 2 | 22 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 8,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | ***2*** | ***22*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***742,464,540*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Aparatur Sekretariat MAA*** | - | ***664,395,260*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |
| | 2 | 22 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 1 Orang/bulan | 742,464,540 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Aparatur Sekretariat MAA | | 664,395,260 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | ***2*** | ***22*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***70,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Sekretariat MAA*** | - | ***13,540,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 9,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 2,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 3,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 2,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 1,140,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 5,400,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | ***2*** | ***22*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***378,249,760*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Sekretariat MAA*** | - | ***378,249,760*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |
| | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 1,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 22 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 377,249,760 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 377,249,760 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | ***2*** | ***22*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***63,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Sekretariat MAA*** | - | ***42,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |
| | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 20,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 25,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 20,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Sekretariat MAA | | 2,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| **89** | **2** | **22** | **07** | | | **PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)** | **Indek Adat Istiadat Adat<br>Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang dilestarikan<br>Persentase Fasilitasi sengketa adat** | - | | | **100 Persen<br>13 Jenis<br>100 Persen** | **235,000,000** | | | | | | - | **69,000,000** | **SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH** |
| | ***2*** | ***22*** | ***07*** | ***7.01*** | | ***Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat*** | ***Jumlah Pembinaan Adat Istiadat yang diLestarikan*** | - | | | ***5 Jenis*** | ***180,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat dan Lembaga Adat*** | - | ***57,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |
| | 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0001 | Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional | | | | 1 Laporan | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Lembaga Adat | | 10,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0002 | Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi | | | | 2 Lembaga | 55,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Lembaga Adat | | 2,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0003 | Sosialisasi Adat Istiadat | Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat | | | | 30 Orang | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Lembaga Adat | | 25,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | 2 | 22 | 07 | 7.01 | 0006 | Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang | Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan | | | | 2 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Lembaga Adat | | 20,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | ***2*** | ***22*** | ***07*** | ***7.02*** | | ***Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat*** | ***Jumlah Pengembangan hukum Adat yang dibina*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***30,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Lembaga Hukum Adat*** | - | ***10,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |
| | 2 | 22 | 07 | 7.02 | 0001 | Penguatan Peradilan Adat | Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat | | | | 50 Orang | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Lembaga Hukum Adat | | 10,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | ***2*** | ***22*** | ***07*** | ***7.03*** | | ***Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat*** | ***Jumlah Lembaga Adat dan tokoh yang dibina*** | - | | | ***5 Jenis*** | ***25,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Lembaga dan Tokoh Adat*** | - | ***2,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 22 | 07 | 7.03 | 0002 | Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat | Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat | | | | 50 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Lembaga dan Tokoh Adat | | 2,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH |
| | | | | | | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** | | | | | | **2,892,617,459** | | | | | | | **2,461,627,776** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **2,892,617,459** | | | | | | | **2,461,627,776** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | **2** | **23** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN** | | | | | | **2,862,617,459** | | | | | | | **2,428,552,776** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| **90** | **2** | **23** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **2,577,617,459** | | | | | | **-** | **2,063,066,049** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | ***2*** | ***23*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***3 Dokumen/Laporan*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perpustakaan dan Kearsipan*** | - | ***14,332,500*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |
| | 2 | 23 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 14,332,500 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | ***2*** | ***23*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***2,170,495,792*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Perpustakaan dan Kearsipan*** | - | ***1,486,137,500*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |
| | 2 | 23 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 336 Orang/bulan | 2,170,495,792 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Perpustakaan dan Kearsipan | | 1,486,137,500 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | ***2*** | ***23*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***9 Dokumen*** | ***98,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perpustakaan dan Kearsipan*** | - | ***123,449,131*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 12,733,875 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 7,524,563 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 7,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 9,261,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 1,319,693 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 92,610,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | ***2*** | ***23*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Pada Perangkat Daerah*** | - | | | ***4 Dokumen*** | ***209,281,667*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perpustakaan dan Kearsipan*** | - | ***369,457,893*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 1,157,625 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 75,516,667 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 105,575,400 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 132,765,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 262,724,868 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | ***2*** | ***23*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | - | | | ***13 Unit*** | ***84,700,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perpustakaan dan Kearsipan*** | - | ***69,689,025*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 35,423,325 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 51,400,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 34,265,700 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| **91** | **2** | **23** | **02** | | | **PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN** | **Cakupan Pembinaan Perpustakaan** | - | | | **9.02 Persen** | **285,000,000** | | | | | | - | **365,486,727** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | ***2*** | ***23*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***10 Dokumen*** | ***160,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perpustakaan*** | - | ***265,211,888*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya | | | | 1 Perpustakaan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan | | 16,322,513 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 25 Perpustakaan | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan | | 33,075,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0005 | Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | | | | 15 Perpustakaan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan | | 16,537,500 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan | | 44,100,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0007 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi | | | | 3 Layanan | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Reformasi Birokrasi | Perpustakaan | | 27,562,500 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0008 | Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan | | | | 1000 Eksemplar | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Perpustakaan | | 110,250,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.01 | 0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan | | | | 1 Eksemplar | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Perpustakaan | | 17,364,375 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | ***2*** | ***23*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*** | - | | | ***5 Dokumen*** | ***125,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat, Pelajar*** | - | ***100,274,839*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0001 | Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan | | | | 80 Lokus | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Pelajar | | 12,074,839 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Perpustakaan | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Pelajar | | - | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0003 | Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca | Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota | | | | 6 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Pelajar | | 27,562,500 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan | | | | 2 Perpustakaan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Pelajar | | 33,075,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | 2 | 23 | 02 | 2.02 | 0005 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya | | | | 6 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Pelajar | | 27,562,500 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | **2** | **24** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN** | | | | | | **30,000,000** | | | | | | | **33,075,000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| **92** | **2** | **24** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP** | **Persentase Pengelolaan arsip sesuai standar** | - | | | **10.91 Persen** | **30,000,000** | | | | | | - | **33,075,000** | **DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN** |
| | ***2*** | ***24*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Perpustakaan dan Kearsipan*** | - | ***33,075,000*** | ***DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN*** |
| | 2 | 24 | 02 | 2.03 | 0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1 Laporan | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Perpustakaan dan Kearsipan | | 33,075,000 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN |
| | | | | | | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** | | | | | | **9,399,064,803** | | | | | | | **15,453,867,053** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **7,298,709,814** | | | | | | | **7,423,048,767** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | **2** | **09** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN** | | | | | | **7,298,709,814** | | | | | | | **7,423,048,767** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| **93** | **2** | **09** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **7,098,714,149** | | | | | | - | **7,296,982,407** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***09*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | - | | | ***15 Dokumen*** | ***50,000,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe*** | - | ***216,000,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 15 Dokumen | 50,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 216,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***2*** | ***09*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***5,807,296,346*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Aparatur Sipil Negara DKPPP*** | - | ***5,380,049,452*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 840 Orang/bulan | 5,807,296,346 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | Aparatur Sipil Negara DKPPP | | 5,380,049,452 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***2*** | ***09*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***134,140,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe*** | - | ***238,561,700*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 80 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 21,030,877 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1,150 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 64,676,407 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 30 Paket | 18,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 50,073,516 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 730 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 2,884,235 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 70,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 99,896,665 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***2*** | ***09*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***13 Unit*** | ***100,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe*** | - | ***107,658,060*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 107,658,060 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***2*** | ***09*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***711,977,803*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe*** | - | ***854,177,864*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30 Laporan | 2,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 1,578,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 84 Laporan | 200,636,680 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 262,398,759 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 708 Laporan | 508,841,123 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 590,201,105 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***2*** | ***09*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***45 Unit*** | ***295,300,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi*** | ***DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe*** | - | ***500,535,331*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 12 Unit | 43,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 350,164,500 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 24 Unit | 157,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 134,597,612 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 10,515,500 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | DInas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan Kota Lhokseumawe | | 5,257,719 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **94** | **2** | **09** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT** | **Ketersediaan Pangan Utama** | - | | | **41.38 Persen** | **159,995,980** | | | | | | - | **94,066,360** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***2*** | ***09*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*** | ***Frekuensi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan*** | - | | | ***5 Kali*** | ***114,998,790*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***49,066,360*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya | | | | 2 Laporan | 14,999,440 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 5,066,360 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0007 | Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga | | | | 1 Keluarga | 39,999,745 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota | Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota | | | | 12 Laporan | 29,999,670 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 12,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.01 | 0014 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis | Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis | | | | 12 Laporan | 29,999,935 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 12,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***09*** | ***03*** | ***2.04*** | | ***Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi*** | ***Jumlah Capaian Target Konsumsi Pangan Perkapital/Tahun yang Terlaksana*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***44,997,190*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***45,000,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0001 | Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun | | | | 1 Dokumen | 14,997,215 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 2 | 09 | 03 | 2.04 | 0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal | | | | 1 Laporan | 29,999,975 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 40,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **95** | **2** | **09** | **04** | | | **PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN** | **Persentase Ketersediaan Informasi Kerawanan Pangan** | - | | | **55.56 Persen** | **9,999,810** | | | | | | - | **20,000,000** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***2*** | ***09*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan*** | ***Jumlah Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan yang di susun*** | - | | | ***1 Kali*** | ***9,999,810*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***20,000,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan | Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan | | | | 1 Dokumen | 9,999,810 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **96** | **2** | **09** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN** | **Persentase Pengawasan dan Pengendalian Konsumsi Pangan Segar** | - | | | **63.64 Persen** | **29,999,875** | | | | | | - | **12,000,000** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***2*** | ***09*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar yang Terlaksana*** | - | | | ***4 Kali*** | ***29,999,875*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***12,000,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 2 | 09 | 05 | 2.01 | 0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota | | | | 5 Dokumen | 29,999,875 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 12,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **2,100,354,989** | | | | | | | **8,030,818,286** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | **3** | **25** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN** | | | | | | **634,791,620** | | | | | | | **5,229,977,899** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| **97** | **3** | **25** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP** | **Cakupan bina kelompok nelayan** | - | | | **47.47 Persen** | **149,935,445** | | | | | | - | **1,260,966,745** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***3*** | ***25*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota*** | ***Jumlah Hasil Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dikelola*** | - | | | ***2 Do,kumen*** | ***4,966,900*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe*** | - | ***15,412,595*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia | | | | 10 Dokumen | 4,966,900 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe | | 15,412,595 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***3*** | ***25*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Pemberdayaan Nelayan yang Terfasilitasi*** | - | | | ***10 Kelompok*** | ***124,968,545*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe*** | - | ***1,229,719,100*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 11 Orang | 99,980,695 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe | | 431,050,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 03 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | 7 Kelompok | 24,987,850 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe | | 798,669,100 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***3*** | ***25*** | ***03*** | ***2.04*** | | ***Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Tanda Daftar Kapal Perikanan yang di Terbitkan*** | - | | | ***100 Dokumen*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe*** | - | ***15,835,050*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 03 | 2.04 | 0002 | Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT | Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan | | | | 300 Rekomendasi | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe | | 15,835,050 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **98** | **3** | **25** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA** | **Cakupan bina kelompok pembudidaya** | - | | | **49.83 Persen** | **304,986,305** | | | | | | - | **3,895,600,000** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***3*** | ***25*** | ***04*** | ***2.02*** | | ***Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*** | ***Jumlah Pembudidaya Ikan Kecil yang di Berdayakan*** | - | | | ***10 Kelompok*** | ***79,998,040*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe*** | - | ***672,000,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 04 | 2.02 | 0001 | Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil | Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas | | | | 100 Kelompok | 79,998,040 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | | 672,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***3*** | ***25*** | ***04*** | ***2.04*** | | ***Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*** | ***Jumlah Data Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***224,988,265*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe*** | - | ***3,223,600,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 4,998,745 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | | 45,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 31 Unit | 79,992,325 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | | 473,550,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0003 | Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | | | | 1774 Unit | 9,997,245 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | | 232,050,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | 25 | 04 | 2.04 | 0006 | Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat | Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi | | | | 4 Ha | 129,999,950 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Pembudidaya Kota Lhokseumawe | | 2,473,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **99** | **3** | **25** | **05** | | | **PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN** | **Persentase Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan** | - | | | **46.67 Persen** | **49,932,820** | | | | | | - | **33,283,845** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***3*** | ***25*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota*** | ***Frekuensi Pengawasan Sumber Daya Perikanan*** | - | | | ***8 Kali*** | ***49,932,820*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe*** | - | ***33,283,845*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota | | | | 8 Dokumen | 49,932,820 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Nelayan Kota Lhokseumawe | | 33,283,845 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **100** | **3** | **25** | **06** | | | **PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN** | **Cakupan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan** | - | | | **100 Persen** | **129,937,050** | | | | | | - | **40,127,309** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***3*** | ***25*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil*** | ***Jumlah Dokumen Tanda Daftar kapal*** | - | | | ***75 Dokumen*** | ***59,937,050*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***20,024,080*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko | | | | 10 Dokumen | 59,937,050 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,024,080 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***3*** | ***25*** | ***06*** | ***2.02*** | | ***Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*** | ***Frekuensi Pembinaan Kelompok Usaha Hasil Perikanan*** | - | | | ***4 Kali*** | ***70,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***20,103,229*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 25 | 06 | 2.02 | 0001 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | | | | 20 Unit Usaha | 70,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 20,103,229 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | **3** | **27** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN** | | | | | | **1,465,563,369** | | | | | | | **2,800,840,387** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| **101** | **3** | **27** | **02** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN** | **Cakupan Sarana Kelompok Tani** | - | | | **33.46 Persen** | **60,000,000** | | | | | | - | **126,133,280** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***3*** | ***27*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*** | ***Frekuensi Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian*** | - | | | ***4 Kali*** | ***60,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Tani Kota Lhokseumawe*** | - | ***126,133,280*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 02 | 2.01 | 0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | | | | 4 Laporan | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 126,133,280 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **102** | **3** | **27** | **03** | | | **PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN** | **Cakupan Prasarana Kelompok Tani** | - | | | **34.51 Persen** | **1,050,499,845** | | | | | | - | **1,640,080,919** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***3*** | ***27*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pengembangan Prasarana Pertanian*** | ***Frekuensi Pengembangan Bibit Pertanian/Perkebunan*** | - | | | ***8 Kali*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Tani Kota Lhokseumawe*** | - | ***526,014,739*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 03 | 2.01 | 0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola | | | | 12 Dokumen | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 526,014,739 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***3*** | ***27*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pembangunan Prasarana Pertanian*** | ***Jumlah Prasaran Pertanian yang dibangun*** | - | | | ***5 Unit*** | ***920,500,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Tani Kota Lhokseumawe*** | - | ***500,000,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0002 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian | Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 3 Unit | 740,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0003 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 10 Unit | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 03 | 2.02 | 0009 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | | | | 4 Unit | 80,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 300,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***3*** | ***27*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota*** | ***Jumlah Data Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang dikelola*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***99,999,845*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Ternak Kota Lhokseumawe*** | - | ***614,066,180*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 03 | 2.03 | 0001 | Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan | | | | 5 Laporan | 99,999,845 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Ternak Kota Lhokseumawe | | 614,066,180 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **103** | **3** | **27** | **04** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER** | **Cakupan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Verternier** | - | | | **42.00 Persen** | **205,074,695** | | | | | | - | **75,085,960** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***3*** | ***27*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Wilayah Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Menular yang terjamin Kesehatan Hewan*** | - | | | ***1 Kecamatan*** | ***19,999,775*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Ternak Kota Lhokseumawe*** | - | ***50,085,960*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis | Jumlah kader zoonosis | | | | 4 Orang | 19,999,775 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Ternak Kota Lhokseumawe | | 50,085,960 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | ***3*** | ***27*** | ***04*** | ***2.03*** | | ***Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Laboratorium dan Medik Veteriner yang dikelola*** | - | | | ***1 Unit*** | ***185,074,920*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Ternak Kota Lhokseumawe*** | - | ***25,000,000*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 04 | 2.03 | 0002 | Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | | | | 4 Laporan | 185,074,920 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Ternak Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **104** | **3** | **27** | **05** | | | **PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN** | **Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan** | **-** | | | **50.37 Persen** | **19,988,949** | | | | | | **-** | **10,026,040** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***3*** | ***27*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Bencana Pertanian yang ditanggulangi*** | - | | | ***1 Kali*** | ***19,988,949*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Tani Kota Lhokseumawe*** | - | ***10,026,040*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 05 | 2.01 | 0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | | | | 10 Ha | 19,988,949 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 10,026,040 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| **105** | **3** | **27** | **07** | | | **PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN** | **Cakupan Pembinaan Kelembagaan Penyuluhan dan Kelembagaan Petani** | **-** | | | **40.93 Persen** | **129,999,880** | | | | | | **-** | **949,514,188** | **DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN** |
| | ***3*** | ***27*** | ***07*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian*** | ***Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan yang di fasilitasi*** | - | | | ***1 Unit*** | ***129,999,880*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Kelompok Tani Kota Lhokseumawe*** | - | ***949,514,188*** | ***DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN*** |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 3 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 54,264,188 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | 3 | 27 | 07 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 2 Unit | 79,999,880 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Kelompok Tani Kota Lhokseumawe | | 895,250,000 | DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN DAN PANGAN |
| | | | | | | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** | | | | | **7,561,680,213** | | | | | | | **12,691,681,082** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | **2** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4,811,980,213** | | | | | | | **6,129,885,635** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | **2** | **17** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH** | | | | | | **4,811,980,213** | | | | | | | **6,129,885,635** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| **106** | **2** | **17** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **3,980,610,213** | | | | | | **-** | **4,974,268,842** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | - | | | ***8 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***215,296,266*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 215,296,266 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***3,226,171,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***3,188,096,474*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 420 Orang/bulan | 3,226,171,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 3,188,096,474 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.03*** | | ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***26,101,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***2,184,000*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.03 | 0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | | | | 1 Dokumen | 26,101,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 2,184,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.04*** | | ***Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Pendapatan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***4,368,000*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.04 | 0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 2,184,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.04 | 0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 2,184,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***31,834,688*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 35 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 31,834,688 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***82,140,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***257,567,738*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 8 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 49,480,200 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 15,280,650 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 6,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 31,834,688 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 1,852,200 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 159,120,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan*** | - | | | ***10 Unit*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***95,504,063*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 95,504,063 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***395,498,213*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***817,851,688*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 15 Laporan | 1,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 4,051,688 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 84 Laporan | 189,583,333 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 397,800,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 708 Laporan | 204,414,880 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 416,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***2*** | ***17*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***91 Unit*** | ***180,700,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Disperindagkop UKM*** | - | ***361,565,925*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 14 Unit | 36,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 76,403,250 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 24 Unit | 79,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 99,522,675 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 92,820,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan<br>Pertumbuhan Ekonomi | Disperindagkop UKM | | 92,820,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **107** | **2** | **17** | **03** | | | **PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi yang Sehat** | - | | | **6.48 Persen** | **10,000,000** | | | | | | - | **12,733,875** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***2*** | ***17*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota*** | ***Jumlah Koperasi Berprestasi yang Dapat penilaian*** | - | | | ***20 Koperasi*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Lembaga Koperasi*** | - | ***12,733,875*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan | | | | 10 Unit Usaha | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Lembaga Koperasi | | 12,733,875 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **108** | **2** | **17** | **04** | | | **PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI** | **Persentase Koperasi yang Sehat** | - | | | **6.48 Persen** | **15,000,000** | | | | | **Lembaga Koperasi** | - | **12,733,875** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***2*** | ***17*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Lembaga Koperasi*** | - | ***12,733,875*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 04 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan | | | | 10 Unit Usaha | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Lembaga Koperasi | | 12,733,875 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **109** | **2** | **17** | **05** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN** | **Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Koperasi** | - | | | **72.25 Persen** | **83,948,140** | | | | | **Lembaga Koperasi** | - | **85,000,000** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***2*** | ***17*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***83,948,140*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Lembaga Koperasi*** | - | ***85,000,000*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 05 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian | | | | 0 Orang | 83,948,140 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-PK2UKM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Lembaga Koperasi | | 85,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **110** | **2** | **17** | **06** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI** | **Persentase Koperasi Mandiri** | - | | | **76.89 Persen** | **10,000,000** | | | | | **Lembaga Koperasi** | - | **12,733,875** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***2*** | ***17*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Periode Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Lembaga Koperasi*** | - | ***12,733,875*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 06 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya | | | | 10 Unit Usaha | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Lembaga Koperasi | | 12,733,875 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **111** | **2** | **17** | **07** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)** | **Persentase Fasilitasi UMKM** | - | | | **24.89 Persen** | **612,421,860** | | | | | | - | **446,656,918** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***2*** | ***17*** | ***07*** | ***2.01*** | | ***Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan*** | ***Penambahan Jumlah UMKM yang terdata dalam satu tahun*** | - | | | ***92 UMKM*** | ***612,421,860*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha Mikro*** | - | ***446,656,918*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro | | | | 20 Unit Usaha | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha Mikro | | 12,733,875 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro | | | | 20 Orang | 125,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha Mikro | | 33,923,043 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 2 | 17 | 07 | 2.01 | 0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan | Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan | | | | 100 Orang | 387,421,860 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DAK NON FISIK-PK2UKM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha Mikro | | 400,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **112** | **2** | **17** | **08** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM** | **Persentase Pengembangan UMKM** | **-** | | | **7.31 Persen** | **100,000,000** | | | | | **Pelaku Usaha Mikro** | **-** | **585,758,250** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***2*** | ***17*** | ***08*** | ***2.01*** | | ***Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil*** | ***Jumlah UMKM yang difasilitasi*** | - | | | ***100 UMKM*** | ***100,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha Mikro*** | - | ***585,758,250*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 2 | 17 | 08 | 2.01 | 0002 | Pengembangan Usaha Mikro | Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi | | | | 100 Unit Usaha | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha Mikro | | 585,758,250 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | **3** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN** | | | | | | **2,749,700,000** | | | | | | | **6,561,795,447** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | **3** | **30** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN** | | | | | | **2,470,000,000** | | | | | | | **5,442,959,939** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| **113** | **3** | **30** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN** | **Cakupan Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** | **-** | | | **0.22 Persen** | **830,000,000** | | | | | | **-** | **1,458,160,125** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***3*** | ***30*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan*** | ***Jumlah sarana dsitribusi perdagangan yang dibangun*** | - | | | ***3 Unit*** | ***800,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat*** | - | ***1,439,362,500*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 3 | 30 | 03 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 1 Unit | 800,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 1,439,362,500 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | ***3*** | ***30*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya*** | ***Jumlah pembinaan terhadap Penagih Retribusi Pasar*** | - | | | ***2 kali*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat*** | - | ***18,797,625*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 30 | 03 | 2.02 | 0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan | | | | 1 Dokumen | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 18,797,625 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **114** | **3** | **30** | **04** | | | **PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING** | **Cakupan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting** | **-** | | | **60.01 Persen** | **1,115,000,000** | | | | | **Masyarakat** | **-** | **430,526,250** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***3*** | ***30*** | ***04*** | ***2.02*** | | ***Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*** | ***Periode Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,115,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Masyarakat*** | - | ***430,526,250*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0002 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan | | | | 56 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 42,446,250 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 30 | 04 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota | | | | 2 Laporan | 1,100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Masyarakat | | 388,080,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **115** | **3** | **30** | **05** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR** | **Persentase Partisipasi pada Promosi Dagang** | **-** | | | **75.00 Persen** | **455,000,000** | | | | | | **-** | **1,383,637,500** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***3*** | ***30*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Event Pameran dagang dan promosi dagang yang diikuti*** | - | | | ***6 Kegiatan/kali*** | ***455,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha dan Pemerintah*** | - | ***1,383,637,500*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0002 | Pameran Dagang Nasional | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang | | | | 3 Pelaku Usaha | 200,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Pemerintah | | 909,562,500 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0003 | Pameran Dagang Lokal | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal | | | | 2 Pelaku Usaha | 240,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Pemerintah | | 441,000,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 30 | 05 | 2.01 | 0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan | Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan | | | | 1 Pelaku Usaha | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha dan Pemerintah | | 33,075,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **116** | **3** | **30** | **06** | | | **PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN** | **Persentase Tera Tera Ulang UTTP** | **-** | | | **71.35 Persen** | **70,000,000** | | | | | | **-** | **2,170,636,064** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***3*** | ***30*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan*** | ***Jumlah Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan pengawasan*** | - | | | ***6 Kali*** | ***70,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pelaku Usaha*** | - | ***2,170,636,064*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang | Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang | | | | 20 Unit | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 430,164,189 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal | Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina | | | | 10 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 1,710,253,125 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 30 | 06 | 2.01 | 0003 | Penyidikan Metrologi Legal | Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal | | | | 1 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pelaku Usaha | | 30,218,750 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | **3** | **31** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN** | | | | | | **279,700,000** | | | | | | | **1,118,835,508** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| **117** | **3** | **31** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI** | **Cakupan Pembinaan, Pengawasan dan Promosi Industri Kecil Menengah** | **-** | | | **5.27 Persen** | **254,700,000** | | | | | | **-** | **1,058,198,008** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***3*** | ***31*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah dokumen Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kota Lhokseumawe*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***254,700,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***1,058,198,008*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 36,382,500 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 239,772,475 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 606,375,000 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat | | | | 1 Dokumen | 164,700,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi & Pelayanan Dasar yang Terintegrasi dan Berwawasan Lingkungan Pertumbuhan Ekonomi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 115,030,533 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | 3 | 31 | 02 | 2.01 | 0006 | Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 60,637,500 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| **118** | **3** | **31** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL** | **Ketersediaan Informasi yang dibutuhkan** | **-** | | | **Ada Ada/Tidak** | **25,000,000** | | | | | **Pemerintah Kota Lhokseumawe** | **-** | **60,637,500** | **DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH** |
| | ***3*** | ***31*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*** | ***Jumlah Dokumen Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan*** | ***Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***60,637,500*** | ***DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 3 | 31 | 04 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan | Memperkuat Ketahanan Ekonomi yang Produktif dan Kompetitif Pertumbuhan Ekonomi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 60,637,500 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH |
| | | | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **31,377,930,212** | | | | | | | **37,864,384,209** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **31,377,930,212** | | | | | | | **37,864,384,209** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | **4** | **01** | | | | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | | | | **31,377,930,212** | | | | | | | **37,864,384,209** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| **119** | **4** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **29,278,018,212** | | | | | | **-** | **25,424,762,822** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***8 Dokumen*** | ***20,200,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat Daerah*** | - | ***17,200,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 8 Dokumen | 20,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 17,200,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***12,553,051,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat Daerah*** | - | ***13,096,816,302*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 2408 Orang/bulan | 12,553,051,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 13,096,816,302 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***140,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Sekretariat Daerah*** | - | ***7,500,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | | | 1 Paket | 140,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Sekretariat Daerah | | 7,500,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***5,860,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat Daerah*** | - | ***3,040,000,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 280,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 170,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 1 Paket | 350,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 160,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 1,500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 1,200,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 130,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 100,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | | | | 1 Laporan | 350,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 210,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 500 Laporan | 3,250,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 1,200,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***10 Unit*** | ***2,262,088,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat Daerah*** | - | ***600,000,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan | | | | 9 Unit | 1,412,088,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 450,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 850,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 150,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***2,633,983,720*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat Daerah*** | - | ***4,331,803,520*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 10,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 756,400,200 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 951,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 12,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 12,500,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 1,840,083,520 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 3,358,303,520 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***5 Jenis*** | ***2,904,590,492*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat Daerah*** | - | ***1,750,000,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 18 Unit | 769,590,492 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 750,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 19 Unit | 285,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 500,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 800,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 100,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 6 Unit | 600,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 300,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 450,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 100,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.11*** | | ***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***579,105,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Sekretariat Daerah*** | - | ***579,105,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 28 Orang/Bulan | 179,105,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Sekretariat Daerah | | 179,105,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.11 | 0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | | | | 24 Orang/Bulan | 400,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Sekretariat Daerah | | 400,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.12*** | | ***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*** | ***Periode Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***330,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat Daerah*** | - | ***323,000,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 140,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 135,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 120,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 127,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.12 | 0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan | | | | 1 Paket | 70,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat Daerah | | 61,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.13*** | | ***Penataan Organisasi*** | ***Jumlah Dokumen Penataan Organisasi*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***410,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***498,338,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan | | | | 6 Dokumen | 95,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 76,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana | | | | 7 Laporan | 145,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 337,338,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.13 | 0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi | | | | 5 Dokumen | 170,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 85,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***01*** | ***2.14*** | | ***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*** | ***Periode Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,585,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***1,181,000,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 1 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 96,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 1 Laporan | 1,400,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 950,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 1 Laporan | 85,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 135,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| **120** | **4** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT** | **Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan, Hukum dan Kesejahteraan Rakyat** | **-** | | | **98.70 Persen** | **1,542,912,000** | | | | | | **-** | **11,838,461,791** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | ***4*** | ***01*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Administrasi Tata Pemerintahan*** | ***Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan*** | **-** | | | ***3 Dokumen*** | ***592,912,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | **-** | ***10,512,799,371*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan | Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan | | | | 1 Dokumen | 152,912,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 52,500,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan | | | | 9 Dokumen | 245,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 325,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah | | | | 4 Dokumen | 195,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 10,135,299,371 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*** | ***Periode Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat*** | **-** | | | ***12 Bulan*** | ***490,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | **-** | ***795,000,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual | | | | 1 Dokumen | 240,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 315,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 50,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas | | | | 1 Dokumen | 200,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 430,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*** | ***Jumlah Dokumen Fasilitasi dan Koordinasi Hukum*** | **-** | | | ***3 Dokumen*** | ***460,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | **-** | ***530,662,420*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah | Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun | | | | 6 Dokumen | 138,588,200 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 170,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum | Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum | | | | 16 Kasus | 287,531,600 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 325,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi | | | | 70 Dokumen | 33,880,200 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 35,662,420 | SEKRETARIAT DAERAH |
| **121** | **4** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN** | **Cakupan Perumusan dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan** | **-** | | | **97.00 Persen** | **557,000,000** | | | | | | **-** | **601,159,596** | **SEKRETARIAT DAERAH** |
| | ***4*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*** | ***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***160,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***265,160,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD | | | | 1 Dokumen | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 52,660,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian | | | | 4 Laporan | 85,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 160,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil | | | | 2 Dokumen | 40,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 52,500,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*** | ***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***150,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Organisasi Perangkat Daerah (OPD)*** | - | ***79,699,596*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan | | | | 4 Laporan | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | | 39,500,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 12 Laporan | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | | 40,199,596 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | ***4*** | ***01*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*** | ***Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***247,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***256,300,000*** | ***SEKRETARIAT DAERAH*** |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 8 Dokumen | 125,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 138,500,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik | | | | 6 Dokumen | 47,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 75,800,000 | SEKRETARIAT DAERAH |
| | 4 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa | | | | 5 Orang | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 42,000,000 | SEKRETARIAT DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | **SEKRETARIAT DPRK** | | | | | | **24,042,195,477** | | | | | | | **25,963,278,361** | **SEKRETARIAT DPRK** |
| | **4** | | | | | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **24,042,195,477** | | | | | | | **25,963,278,361** | **SEKRETARIAT DPRK** |
| | **4** | **02** | | | | **SEKRETARIAT DPRD** | | | | | | **24,042,195,477** | | | | | | | **25,963,278,361** | **SEKRETARIAT DPRK** |
| **122** | **4** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **18,841,216,907** | | | | | | **-** | **20,101,445,246** | **SEKRETARIAT DPRK** |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat DPRK*** | - | ***3,006,003*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 20 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 3,006,003 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode gaji dan Tunjangan ASN*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***5,373,054,667*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***ASN Sekretariat DPRK*** | - | ***4,524,506,457*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 868 Orang/bulan | 5,373,054,667 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | ASN Sekretariat DPRK | | 4,524,506,457 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***11 Jenis*** | ***595,780,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat DPRK*** | - | ***752,402,551*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | | | | 25 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 18,036,018 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 75 Paket | 90,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 150,300,150 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | | | | 2 Paket | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 11,022,011 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 18000 Paket | 230,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 270,540,270 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 65,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 90,180,090 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 96 Dokumen | 87,780,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 97,093,897 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 115,230,115 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***50,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat DPRK*** | - | ***50,100,050*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 12 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 50,100,050 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***1,455,492,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat DPRK*** | - | ***2,704,185,018*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 500 Laporan | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 5,010,005 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 330,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 367,976,881 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 7 Laporan | 16,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 28,056,028 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 3636 Laporan | 1,103,892,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 2,303,142,104 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***5 Jenis*** | ***391,067,240*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat DPRK*** | - | ***758,969,584*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 48 Unit | 209,567,240 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 70,140,070 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 60 Unit | 76,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 239,879,039 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 425,850,425 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 20,040,020 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 3,060,030 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.14*** | | ***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*** | ***Jumlah Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***110,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat DPRK*** | - | ***260,520,260*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.14 | 0001 | Fasilitasi Keprotokolan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan | | | | 30 Laporan | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 20,040,020 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.14 | 0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan | | | | 3 Laporan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 220,440,220 | SEKRETARIAT DPRK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 01 | 2.14 | 0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan | Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan | | | | 3 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Sekretariat DPRK | | 20,040,020 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.15*** | | ***Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*** | ***Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***10,430,823,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pimpinan dan Anggota DPRK*** | - | ***9,813,669,787*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD | Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD | | | | 350 Orang/Bulan | 10,006,473,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pimpinan dan Anggota DPRK | | 9,365,175,292 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan | | | | 125 Paket | 299,350,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pimpinan dan Anggota DPRK | | 323,244,370 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.15 | 0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD | | | | 25 Orang | 125,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pimpinan dan Anggota DPRK | | 125,250,125 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***01*** | ***2.16*** | | ***Layanan Administrasi DPRD*** | ***Jumlah Layanan Administrasi DPRD*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***420,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Fraksi DPRK/ Anggota DPRK*** | - | ***1,234,085,536*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD | | | | 48 Laporan | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Fraksi DPRK/ Anggota DPRK | | 20,010,020 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 01 | 2.16 | 0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD | | | | 48 Laporan | 400,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Fraksi DPRK/ Anggota DPRK | | 1,214,075,516 | SEKRETARIAT DPRK |
| **123** | **4** | **02** | **02** | | | **PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD** | **Persentase Rancangan Qanun yang Ditetapkan** | - | | | **72.73 Persen** | **5,200,978,570** | | | | | | - | **5,861,833,115** | **SEKRETARIAT DPRK** |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*** | ***Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD*** | - | | | ***5 Qanun*** | ***505,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***729,555,120*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah | | | | 20 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 19,698,919 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah | | | | 15 Dokumen | 415,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 613,151,298 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan | Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan | | | | 2 Dokumen | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 96,704,903 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Pembahasan Kebijakan Anggaran*** | ***Tersedianya Dokumen Kebijakan Anggaran*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***572,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Anggota DPRK dan SKPD*** | - | ***929,648,262*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0001 | Pembahasan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS | | | | 10 Dokumen | 24,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK dan SKPD | | 29,717,847 | SEKRETARIAT DPRK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | | | | 10 Dokumen | 24,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK dan SKPD | | 29,764,991 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Pembahasan APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD | | | | 1 Dokumen | 400,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK dan SKPD | | 714,383,126 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0004 | Pembahasan APBD Perubahan | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan | | | | 1 Dokumen | 24,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK dan SKPD | | 29,765,742 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD | | | | 1 Dokumen | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK dan SKPD | | 126,016,556 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan*** | ***Terlaksananya pengawasan penyelenggaran pemerintahan oleh Perangkat Daerah*** | - | | | ***34 OPD*** | ***872,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***991,880,360*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum | | | | 10 Laporan | 350,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 432,887,077 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur | | | | 10 Laporan | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 160,204,930 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat | | | | 10 Laporan | 155,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 160,200,922 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian | | | | 10 Laporan | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 160,205,331 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam | | | | 10 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 10,020,010 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan | | | | 10 Dokumen | 9,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 12,195,655 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran | | | | 10 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 24,048,024 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.03 | 0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah | | | | 10 Dokumen | 28,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 32,118,411 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.04*** | | ***Peningkatan Kapasitas DPRD*** | ***Meningkatnya kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRK*** | - | | | ***25 Orang*** | ***1,595,978,570*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Anggota DPRK*** | - | ***1,783,917,280*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0001 | Orientasi DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD | | | | 1 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | - | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0002 | Pendalaman Tugas DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD | | | | 25 Dokumen | 300,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 501,000,500 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli | Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli | | | | 36 Orang | 167,272,830 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 167,607,543 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi | Jumlah Tenaga Ahli Fraksi | | | | 48 Orang | 184,305,740 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 184,674,536 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat | | | | 12 Dokumen | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 10,020,010 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD | Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD | | | | 1 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | - | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD | Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD | | | | 4 Dokumen | 834,400,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 920,614,691 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.05*** | | ***Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat*** | ***Tersedianya dokumen aspirasi masyarakat*** | - | | | ***2 dokumen*** | ***1,150,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Anggota DPRK dan Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***1,279,605,377*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0001 | Kunjungan Kerja dalam Daerah | Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD | | | | 3 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK dan Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 50,100,050 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.05 | 0003 | Pelaksanaan Reses | Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses | | | | 3 Dokumen | 1,100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK dan Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 1,229,505,327 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.06*** | | ***Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD*** | ***Terlaksananya pengawasan kode etik DPRD*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***6,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Anggota DPRK*** | - | ***5,010,005*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD | Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD | | | | 1 Dokumen | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | - | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.06 | 0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD | | | | 6 Laporan | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 5,010,005 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.07*** | | ***Pembahasan Kerja Sama Daerah*** | ***Tersedianya dokumen kerjasama daerah*** | - | | | ***3 dokumen*** | ***455,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***72,076,641*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 02 | 2.07 | 0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah | | | | 12 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 5,010,005 | SEKRETARIAT DPRK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 4 | 02 | 02 | 2.07 | 0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi | Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 450,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 67,066,636 | SEKRETARIAT DPRK |
| | ***4*** | ***02*** | ***02*** | ***2.08*** | | ***Fasilitasi Tugas DPRD*** | ***Terlaksananya tugas-tugas DPRK*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***45,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Anggota DPRK*** | - | ***70,140,070*** | ***SEKRETARIAT DPRK*** |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD | Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun | | | | 6 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 10,020,010 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah | | | | 12 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 50,100,050 | SEKRETARIAT DPRK |
| | 4 | 02 | 02 | 2.08 | 0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD | | | | 18 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Anggota DPRK | | 10,020,010 | SEKRETARIAT DPRK |
| | | | | | | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | | | | | | **8,046,262,628** | | | | | | | **7,128,592,555** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **8,046,262,628** | | | | | | | **7,128,592,555** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | **5** | **01** | | | | **PERENCANAAN** | | | | | | **7,496,262,628** | | | | | | | **7,014,635,055** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| **124** | **5** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **5,640,310,217** | | | | | | - | **5,895,008,060** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | - | | | ***15 Dokumen*** | ***15,689,380*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Bappeda Kota Lhokseumawe*** | - | ***25,000,000*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 15 Dokumen | 15,689,380 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***4,496,024,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe*** | - | ***4,524,992,235*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 840 Orang/bulan | 4,496,024,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe | | 4,524,992,235 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe*** | - | ***40,000,000*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 10 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Bappeda Kota Lhokseumawe | | 40,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerha | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***5*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***219,131,272*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Bappeda Kota Lhokseumawe*** | - | ***365,121,651*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 80 Paket | 43,066,272 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 52,710,200 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1150 Paket | 29,925,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 44,581,451 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 30 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 730 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 2,880,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 60 Laporan | 120,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 234,950,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***13 Unit*** | ***90,338,060*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Bappeda Kota Lhokseumawe*** | - | ***75,000,000*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 3 Unit | 90,338,060 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 75,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***488,584,505*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Bappeda Kota Lhokseumawe*** | - | ***584,659,104*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 30 Laporan | 2,990,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 84 Laporan | 225,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 266,200,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 708 Laporan | 260,594,505 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 313,459,104 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***45 Unit*** | ***310,543,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Bappeda Kota Lhokseumawe*** | - | ***280,235,070*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 34,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 47,916,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 90,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 72,819,070 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 136,444,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 49,999,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Bappeda Kota Lhokseumawe | | 59,500,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| **125** | **5** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH** | **Ketersediaan Dokumen Perencanaan: RKPK yang telah ditetapkan dengan Perkada** | **-** | | | **Ada<br>Ada/Tidak** | **1,266,495,246** | | | | | | **-** | **560,924,436** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***01*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*** | ***Jumlah Dokumen Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan*** | **-** | | | ***17 Dokumen*** | ***975,031,721*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***287,833,567*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) | | | | 2 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 31,740,120 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya | Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah | | | | 2 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 40,322,650 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Konsultasi Publik | Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik | | | | 3 Berita Acara | 145,936,325 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 26,250,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah | | | | 12 Berita Acara | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,750,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota | Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota | | | | 3 Berita Acara | 328,141,606 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 63,535,889 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan | Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan | | | | 204 Usulan | 9,929,470 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 10,500,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) | | | | 4 Dokumen | 366,024,320 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 99,734,908 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Kesepakatan Perencanaan Pembangunan Sumber Dana Non APBK*** | **-** | | | ***4 Dokumen*** | ***104,914,325*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***100,507,180*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) | | | | 3 Dokumen | 54,551,190 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 75,507,180 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan | | | | 1 Buku | 50,363,135 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***5*** | ***01*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah*** | ***Jumlah Doukumen Pengendalian, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah*** | - | | | ***4 Dokumen*** | ***131,972,505*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***141,146,409*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan | | | | 2 Laporan | 79,480,880 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 104,233,344 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 02 | 2.03 | 0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah | | | | 2 Laporan | 52,491,625 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 36,913,065 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***02*** | ***2.04*** | | ***Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***54,576,695*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***31,437,280*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 02 | 2.04 | 0001 | Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah | Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola | | | | 1 Dokumen | 54,576,695 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 31,437,280 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| **126** | **5** | **01** | **03** | | | **PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** | **Penjabaran Konsistensi Program RPJMK ke dalam RKPK** | - | | | **100 Persen** | **589,457,165** | | | | | | - | **558,702,559** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*** | ***Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***170,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***177,952,559*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 32,952,559 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 11 Laporan | 6,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan | | | | 1 Laporan | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 3 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0006 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 13 Laporan | 6,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0007 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia | | | | 13 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.01 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia | | | | 2 Laporan | 72,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 40,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*** | ***Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***234,998,170*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***185,000,000*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 59,999,565 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 1 Laporan | 19,999,590 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian | | | | 2 Laporan | 99,999,500 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian | | | | 3 Laporan | 19,999,795 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 60,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 1 Dokumen | 14,999,935 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.02 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA | | | | 1 Laporan | 19,999,785 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 20,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***01*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan*** | ***Periode Pelaksanaan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktrur dan Kewilayahan*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***184,458,995*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***195,750,000*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 6 Dokumen | 24,947,035 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0003 | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 99,548,805 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur | | | | 1 Laporan | 29,969,490 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 30,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0005 | Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) | Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) | | | | 2 Dokumen | 14,996,135 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 25,000,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 01 | 03 | 2.03 | 0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan | Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan | | | | 1 Laporan | 14,997,530 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Mon Geudong | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 15,750,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | **5** | **05** | | | | **PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN** | | | | | | **550,000,000** | | | | | | | **113,957,500** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| **127** | **5** | **05** | **02** | | | **PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH** | **Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan** | **-** | | | **75.00 Persen** | **550,000,000** | | | | | | **-** | **113,957,500** | **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***05*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*** | ***Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Peyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***200,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***70,562,500*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah | | | | 1 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 27,775,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan | Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 26,250,000 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 2.01 | 0014 | Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 16,537,500 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***05*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*** | ***Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***100,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | - | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 05 | 02 | 2.02 | 0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial | | | | 1 Dokumen | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | - | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | ***5*** | ***05*** | ***02*** | ***2.04*** | | ***Pengembangan Inovasi dan Teknologi*** | ***Jumlah Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi di Daerah*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***250,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***43,395,000*** | ***BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*** |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi | | | | 1 Dokumen | 200,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 27,037,500 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |
| | 5 | 05 | 02 | 2.04 | 0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif | | | | 1 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 16,357,500 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | | | | | | **132,551,026,973** | | | | | | | **131,033,770,834** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **132,551,026,973** | | | | | | | **131,033,770,834** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| | **5** | **02** | | | | **KEUANGAN** | | | | | | **132,551,026,973** | | | | | | | **131,033,770,834** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| **128** | **5** | **02** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **14,717,502,552** | | | | | | - | **12,571,147,100** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***02*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***7 Dokumen*** | ***17,200,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***18,060,000*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 2 Dokumen | 17,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 18,060,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***100 %*** | ***12,319,078,712*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***10,077,788,487*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 80 Orang/bulan | 12,319,078,712 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 10,077,788,487 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***100 %*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***15,000,000*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 5 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***100 %*** | ***362,280,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***692,394,000*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 70,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 75,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 65,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 80,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 15,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2,280,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 2,394,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 4 Laporan | 120,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 170,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 01 | 2.06 | 0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | | | | 4 Dokumen | 90,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 350,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah*** | - | | | ***25 Unit*** | ***50,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***150,000,000*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 150,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***100 %*** | ***1,233,943,840*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***1,430,904,613*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 5,250,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 400,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 440,500,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 828,443,840 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 985,154,613 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah*** | - | | | ***42 Unit*** | ***720,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***187,000,000*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 8 Unit | 250,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 45,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 440,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 100,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 30 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 21,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 01 | 2.09 | 0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 21,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| **129** | **5** | **02** | **02** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** | **Opini BPK Penetapan APBD Tepat Waktu** | - | | | **WTP Opini Tepat Waktu Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu** | **112,975,795,900** | | | | | | - | **110,710,125,739** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***02*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Anggaran Daerah*** | - | | | ***16 Dokumen*** | ***770,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe*** | - | ***2,673,834,223*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 45,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 81,033,750 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 45,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 74,963,854 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 49,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0004 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 49,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | | | | 2 Dokumen | 145,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 242,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | | | | 2 Dokumen | 145,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 242,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran | | | | 4 Dokumen | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 206,836,619 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.01 | 0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 44 Orang | 295,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BPKD Kota Lhokseumawe | | 1,729,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Pengelolaan Perbendaharaan Daerah*** | - | | | ***348 Dokumen*** | ***290,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Reformasi Birokrasi*** | ***Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe*** | - | ***578,122,752*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0003 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD | | | | 105 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 132,481,047 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0005 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | | | | 29 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 132,481,047 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0006 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank | | | | 35 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 19,613,247 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | | | | 12 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 15,833,069 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait | | | | 68 Dokumen | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 142,866,669 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0010 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan | | | | 5 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 35,332,857 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.02 | 0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 105 Orang | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 99,514,816 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah*** | - | | | ***1166 Dokumen*** | ***320,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe*** | - | ***676,168,764*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah | | | | 75 Laporan | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 34,265,700 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban | | | | 1150 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 35,191,800 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran | | | | 650 Laporan | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 58,344,300 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi | | | | 40 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 114,141,825 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | | | | 4 Dokumen | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 203,510,475 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD | | | | 1 Dokumen | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 65,984,625 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah | | | | 5 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 27,667,238 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | | | | 2 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 30,908,588 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0010 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 1 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 48,272,963 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 02 | 2.03 | 0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota | | | | 140 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah Lingkup Pemko Lhokseumawe | | 57,881,250 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | ***5*** | ***02*** | ***02*** | ***2.04*** | | ***Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah*** | ***Jumlah Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Keuangan*** | - | | | ***272 Laporan*** | ***111,595,795,900*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Desa/Gampong dalam Lingkup Kota Lhokseumawe*** | - | ***106,782,000,000*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 02 | 2.04 | 0008 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan | | | | 272 Laporan | 111,595,795,900 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Desa/Gampong dalam Lingkup Kota Lhokseumawe | | 106,782,000,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| **130** | **5** | **02** | **03** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH** | **Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah** | - | | | **100 Persen** | **3,727,728,521** | | | | | | - | **6,285,830,043** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***02*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Pengelolaan Barang Milik Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah*** | - | | | ***9 Dokumen*** | ***3,727,728,521*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***6,285,830,043*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 47,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 92,361,342 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah | | | | 2 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 45,695,278 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah | | | | 5 Laporan | 240,870,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 276,307,838 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah | | | | 1 Laporan | 99,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kuta Blang | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 160,650,567 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah | | | | 10 Laporan | 3,141,517,721 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 5,408,811,721 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | | | | 1 Dokumen | 26,190,800 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 40,878,401 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | | | | 34 Laporan | 63,650,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 177,119,171 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 03 | 2.01 | 0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun | | | | 1 Laporan | 84,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 84,005,725 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| **131** | **5** | **02** | **04** | | | **PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH** | **Persentase penerimaaan PAD** | **-** | | | **100 Persen** | **1,130,000,000** | | | | | | **-** | **1,466,667,952** | **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH** |
| | ***5*** | ***02*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah*** | ***Besaran Penerimaan PAD*** | - | | | ***70.39 Milyar*** | ***1,130,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat dan Para Pelaku Usaha*** | - | ***1,466,667,952*** | ***BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH*** |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 2 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 315,106,702 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | | | | 10 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 27,562,500 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | | | | 5 Unit | 190,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 57,881,250 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah | | | | 10 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 198,450,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | | | | 10 Laporan | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 93,712,500 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya | | | | 5000 Obyek Pajak | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 68,355,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah | | | | 100 Dokumen | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 136,710,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi | | | | 10 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 33,075,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0011 | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah | | | | 50000 Dokumen | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 198,450,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah | | | | 10 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 69,457,500 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | | | | 50000 Dokumen | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 198,450,000 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | | | | 10 Laporan | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | 69,457,500 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | 5 | 02 | 04 | 2.01 | 0015 | Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah | | | | 10 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Masyarakat dan Para Pelaku Usaha | | - | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH |
| | | | | | | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | | | | | | **41,592,155,040** | | | | | | | **13,100,109,935** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| | **5** | | | | | **UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **41,592,155,040** | | | | | | | **13,100,109,935** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| | **5** | **03** | | | | **KEPEGAWAIAN** | | | | | | **39,686,395,640** | | | | | | | **12,410,185,863** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| **132** | **5** | **03** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **38,010,081,110** | | | | | | **-** | **10,156,129,327** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| | ***5*** | ***03*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe*** | - | ***18,174,713*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 18,174,713 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***37,364,401,750*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe*** | - | ***8,494,181,512*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 3080 Orang/bulan | 37,364,401,750 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 8,494,181,512 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***12,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe*** | - | ***222,705,000*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 03 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 15 Orang | 12,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 222,705,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***136,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe*** | - | ***472,245,577*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 80 Paket | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 86,752,042 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1650 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 29,106,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 40 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 24,255,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 1,382,535 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40 Laporan | 80,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 330,750,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***2 Jenis*** | ***52,900,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe*** | - | ***257,860,969*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 20 Unit | 52,900,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 257,860,969 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***314,039,360*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe*** | - | ***517,075,256*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 40 Laporan | 3,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 3,387,431 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 36 Laporan | 133,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 170,887,500 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 2 Laporan | 178,039,360 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 342,800,325 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***4 Jenis*** | ***115,600,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe*** | - | ***173,886,300*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 34,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 36,713,250 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 26,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 36,713,250 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 66,150,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 5 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur BKPSDM Kota Lhokseumawe | | 34,309,800 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| **133** | **5** | **03** | **02** | | | **PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH** | **Persentase fasilitasi pelayanan Administrasi kepegawaian** | **-** | | | **53.10 Persen** | **1,676,314,530** | | | | | | **-** | **2,254,056,536** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| | ***5*** | ***03*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*** | ***Jumlah Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN*** | - | | | ***12 Jenis*** | ***640,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***CPNS dan Aparatur Pemko Lhokseumawe*** | - | ***629,474,274*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN | | | | 1 Dokumen | 15,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | CPNS dan Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 43,063,650 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0004 | Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN | | | | 1 Laporan | 600,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | CPNS dan Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 553,335,624 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN | Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi | | | | 1 Lembaga | 10,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | CPNS dan Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 11,025,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | CPNS dan Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 11,025,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.01 | 0011 | Pengelolaan Data Kepegawaian | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 5,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | CPNS dan Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 11,025,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Mutasi dan Promosi ASN*** | ***Periode Pengelolaan Mutasi dan Promosi ASN*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***75,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Pemko Lhokseumawe*** | - | ***283,737,774*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0001 | Pengelolaan Mutasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah | | | | 100 Dokumen | 10,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 11,025,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN | | | | 1000 Dokumen | 35,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 138,757,343 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Promosi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN | | | | 10 Dokumen | 30,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 133,955,431 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***5*** | ***03*** | ***02*** | ***2.03*** | | ***Pengembangan Kompetensi ASN*** | ***Jumlah Pengembangan Kompetensi ASN*** | - | | | ***15 Jenis*** | ***625,863,930*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Pemko Lhokseumawe*** | - | ***679,183,523*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN | Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya | | | | 200 Orang | 316,308,200 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 224,014,660 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0002 | Pengelolaan Assessment Center | Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center | | | | 1 Dokumen | 134,555,730 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 309,181,638 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0003 | Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN | | | | 1 Dokumen | 30,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 52,033,277 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan | | | | 200 Orang | 85,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 82,928,948 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.03 | 0006 | Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN | Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan | | | | 50 Orang | 60,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 11,025,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | ***5*** | ***03*** | ***02*** | ***2.04*** | | ***Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*** | ***Periode Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***335,450,600*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Pemko Lhokseumawe*** | - | ***661,660,965*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Dokumen | 277,950,600 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 551,250,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0003 | Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur | | | | 1 Laporan | 7,500,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 22,050,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan | | | | 250 Orang | 10,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 44,260,965 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai | Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa | | | | 150 Orang | 30,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 33,075,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | 5 | 03 | 02 | 2.04 | 0010 | Evaluasi Disiplin ASN | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 11,025,000 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | **5** | **04** | | | | **PENDIDIKAN DAN PELATIHAN** | | | | | | **1,905,759,400** | | | | | | | **689,924,072** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |
| **134** | **5** | **04** | **02** | | | **PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** | **Persentase pejabat yang telah mengikuti diklat struktural** | - | | | **9.75 Persen** | **1,905,759,400** | | | | | | - | **689,924,072** | **BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***5*** | ***04*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*** | ***Jumlah Pelaksanaan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional*** | - | | | ***8 Jenis*** | ***1,905,759,400*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Pemko Lhokseumawe*** | - | ***689,924,072*** | ***BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA*** |
| | 5 | 04 | 02 | 2.02 | 0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan | | | | 1 Laporan | 1,905,759,400 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Pemko Lhokseumawe | | 689,924,072 | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| | | | | | | **INSPEKTORAT** | | | | | | **10,175,494,827** | | | | | | | **8,359,430,938** | **INSPEKTORAT** |
| | **6** | | | | | **UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN** | | | | | | **10,175,494,827** | | | | | | | **8,359,430,938** | **INSPEKTORAT** |
| | **6** | **01** | | | | **INSPEKTORAT DAERAH** | | | | | | **10,175,494,827** | | | | | | | **8,359,430,938** | **INSPEKTORAT** |
| **135** | **6** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **7,265,505,900** | | | | | | - | **6,254,591,262** | **INSPEKTORAT** |
| | ***6*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Inspektorat*** | - | ***15,723,241*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 6 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Inspektorat | | 15,723,241 | INSPEKTORAT |
| | ***6*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelayanan Administrasi Keuangan*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***5,916,366,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Inspektorat*** | - | ***5,286,775,636*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 51 Orang/bulan | 5,916,366,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 5,286,775,636 | INSPEKTORAT |
| | ***6*** | ***01*** | ***01*** | ***2.05*** | | ***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*** | ***Persentase Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur*** | - | | | ***100 Persen*** | ***310,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Inspektorat*** | - | ***40,059,213*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0003 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 15,022,205 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.05 | 0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | | | | 30 Orang | 300,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 25,037,008 | INSPEKTORAT |
| | ***6*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***272,280,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Inspektorat*** | - | ***212,594,245*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 33,048,851 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 13,019,244 | INSPEKTORAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 1 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 9,013,323 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 2,280,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 2,283,375 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 1 Laporan | 200,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 155,229,452 | INSPEKTORAT |
| | ***6*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Periode Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***178,846,600*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Inspektorat*** | - | ***103,485,219*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 16 Unit | 178,846,600 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 103,485,219 | INSPEKTORAT |
| | ***6*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***386,342,300*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Inspektorat*** | - | ***426,403,087*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 1 Laporan | 1,989,500 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 2,002,961 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 76,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 106,958,100 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 308,352,800 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 317,442,026 | INSPEKTORAT |
| | ***6*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***186,671,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Inspektorat*** | - | ***169,550,621*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 33,349,295 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 5 Unit | 128,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 121,179,121 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 33 Unit | 24,871,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Inspektorat | | 15,022,205 | INSPEKTORAT |
| **136** | **6** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN** | **Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan** | - | | | **81,43 Persen** | **2,410,748,722** | | | | | | - | **1,700,835,546** | **INSPEKTORAT** |
| | ***6*** | ***01*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Pengawasan Internal*** | ***Jumlah Laporan Pengawasan Internal*** | - | | | ***197 Laporan*** | ***1,915,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perangkat Daerah*** | - | ***1,424,192,417*** | ***INSPEKTORAT*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0001 | Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | | | | 9 Laporan | 225,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 130,410,827 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | | | | 50 Laporan | 270,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 239,795,613 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Reviu Laporan Kinerja | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | | | | 16 Laporan | 220,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 152,860,460 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Reviu Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | | | | 10 Laporan | 410,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 339,562,884 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengawasan Desa | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa | | | | 11 Laporan | 540,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 261,743,340 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0006 | Kerja Sama Pengawasan Internal | Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | | | | 1 Kesepakatan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 107,029,947 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.01 | 0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | | | | 100 Dokumen | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 192,789,346 | INSPEKTORAT |
| | ***6*** | ***01*** | ***02*** | ***2.02*** | | ***Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*** | ***Jumlah Laporan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu*** | - | | | ***16 Laporan*** | ***495,748,722*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perangkat Daerah*** | - | ***276,643,129*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah | Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani | | | | 1 Laporan | 24,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 21,031,087 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 02 | 2.02 | 0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | | | | 15 Laporan | 470,948,722 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 255,612,042 | INSPEKTORAT |
| **137** | **6** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI** | **Kategori Penilaian Reformasi Birokrasi<br>Tingkat Maturitas SPIP Pemko Lhokseumawe<br>Level Kapabilitas APIP** | - | | | **CC/50.50 Kategori/Point<br>Level 3 (3,2) Level (Point) Level 3 Level** | **499,240,205** | | | | | | - | **404,004,130** | **INSPEKTORAT** |
| | ***6*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*** | ***Jumlah Rekomendasi yang Dihasilkan*** | - | | | ***51 Rekomendasi*** | ***155,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Perangkat Daerah, Pemerintah Kota*** | - | ***261,668,578*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun | | | | 50 Rekomendasi | 130,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah, Pemerintah Kota | | 235,515,973 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.01 | 0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan | Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun | | | | 1 Rekomendasi | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah, Pemerintah Kota | | 26,152,605 | INSPEKTORAT |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***6*** | ***01*** | ***03*** | ***2.02*** | | ***Pendampingan dan Asistensi*** | ***Persentase Pendampingan dan Asistensi*** | - | | | ***100 Persen*** | ***344,240,205*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Perangkat Daerah*** | - | ***142,335,552*** | ***INSPEKTORAT*** |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah | | | | 34 perangkat daerah | 145,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 57,339,586 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi | | | | 34 perangkat daerah | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 26,152,605 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | | | | 2 Kegiatan | 120,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 26,152,605 | INSPEKTORAT |
| | 6 | 01 | 03 | 2.02 | 0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas | | | | 34 perangkat daerah | 19,240,205 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Perangkat Daerah | | 32,690,756 | INSPEKTORAT |
| | | | | | | **KECAMATAN BANDA SAKTI** | | | | | | **2,835,017,638** | | | | | | | **2,956,099,207** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| | **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2,835,017,638** | | | | | | | **2,956,099,207** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| | **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2,835,017,638** | | | | | | | **2,956,099,207** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| **138** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **2,600,017,638** | | | | | | - | **2,647,748,538** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***7 Dokumen*** | ***14,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***12,237,500*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 14,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 12,237,500 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***2,160,548,838*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***1,868,000,000*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 28 Orang/bulan | 2,160,548,838 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 1,868,000,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***98,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***153,498,538*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 35 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 30,358,538 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 4 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 20,000,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 7,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 12,000,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 1,140,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 25 Laporan | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 90,000,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***8 Jenis*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***11,025,000*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 11,025,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***189,528,800*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***464,650,000*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 310 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 3,150,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 48 Laporan | 46,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 68,250,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 142,328,800 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 393,250,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***112,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***138,337,500*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 43,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 26,985,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 82,687,500 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 19,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kecamatan Banda Sakti | | 28,665,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| **139** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase pembinaan PKK Gampong** | - | | | **44.44 Persen** | **145,000,000** | | | | | | - | **147,884,106** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | ***Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***125,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***138,884,106*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | | 18,000,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | | 120,884,106 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | ***Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | - | | | ***1 Laporan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Tim Penggerak PKK Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***5,000,000*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Tim Penggerak PKK Gampong dalam Kecamatan Banda Sakti | | 5,000,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***7.04*** | | ***Pemberdayaan Mukim*** | ***Periode Pemberdayaan Mukim*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***4,000,000*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 03 | 7.04 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 12 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim dalam Kecamatan Banda Sakti | | 4,000,000 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| **140** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penertiban** | - | | | **100 Persen** | **50,000,000** | | | | | | - | **110,413,207** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| | ***7*** | ***01*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | ***Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*** | - | | | ***1 Laporan*** | ***50,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***110,413,207*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 75 Laporan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti | | 110,413,207 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| **141** | **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam** | - | | | **100 Persen** | **20,000,000** | | | | | | - | **21,346,553** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| | ***7*** | ***01*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | ***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | - | | | ***1 Laporan*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Camat dan Muspika*** | - | ***21,346,553*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Camat dan Muspika | | 21,346,553 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| **142** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong** | - | | | **100 Persen** | **20,000,000** | | | | | | - | **28,706,803** | **KECAMATAN BANDA SAKTI** |
| | ***7*** | ***01*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | ***Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Gampong dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti*** | - | ***28,706,803*** | ***KECAMATAN BANDA SAKTI*** |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 18 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Gampong dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti | | 13,333,807 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 18 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Kampung Jawa Lhokseumawe | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Gampong dalam Wilayah Kecamatan Banda Sakti | | 15,372,996 | KECAMATAN BANDA SAKTI |
| | | | | | | **KECAMATAN BLANG MANGAT** | | | | | | **2,266,189,681** | | | | | | | **2,340,487,224** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2,266,189,681** | | | | | | | **2,340,487,224** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| | **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2,266,189,681** | | | | | | | **2,340,487,224** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| **143** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **2,061,189,681** | | | | | | **-** | **2,135,638,151** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***6 Dokumen*** | ***14,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Blang Mangat*** | - | ***2,200,000*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 14,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 2,200,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,551,999,712*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Kecamatan*** | - | ***1,568,370,959*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 276 Orang/bulan | 1,551,999,712 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan | | 1,568,370,959 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***98,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Blang Mangat*** | - | ***81,774,692*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 70 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 10,700,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 620 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 4,400,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 20 Paket | 7,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 5,355,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 1,319,692 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 30 Laporan | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 60,000,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Periode Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Blang Mangat*** | - | ***6,930,000*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 10 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 6,930,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***223,249,969*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Blang Mangat*** | - | ***425,150,000*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 110 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 1,150,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 72 Laporan | 47,784,689 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 40,000,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 888 Laporan | 174,465,280 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 384,000,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***143,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Blang Mangat*** | - | ***51,212,500*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 43,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 25,700,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 2 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 20,000,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 20 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Blang Mangat | | 5,512,500 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| **144** | **7** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK** | **Persentase Peningkatan Fasilitas Publik** | - | | | **60 Persen** | **10,000,000** | | | | | | - | **5,000,000** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| | ***7*** | ***01*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*** | ***Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***5,000,000*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 5,000,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| **145** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase pembinaan PKK Gampong** | - | | | **86.36 Persen** | **145,000,000** | | | | | | - | **134,745,449** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | ***Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***125,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***118,900,000*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 18,900,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 100,000,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | ***Jumlah Laporan Pemberdayaan Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | - | | | ***1 Laporan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***10,914,921*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 10,914,921 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***7.04*** | | ***Pemberdayaan Mukim*** | ***Periode Pemberdayaan Mukim*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Mukim*** | - | ***4,930,528*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 03 | 7.04 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 168 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Mukim | | 4,930,528 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| **146** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penertiban** | - | | | **80.00 Persen** | **10,000,000** | | | | | | - | **10,022,205** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| | ***7*** | ***01*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | ***Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***10,022,205*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 10,022,205 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| **147** | **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam** | - | | | **22.73 Persen** | **20,000,000** | | | | | | - | **20,029,607** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| | ***7*** | ***01*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala DaerahDokumen*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pimpinan Kecamatan Blang Mangat*** | - | ***20,029,607*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pimpinan Kecamatan Blang Mangat | | 20,029,607 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| **148** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong** | - | | | **100 Persen** | **20,000,000** | | | | | | - | **35,051,812** | **KECAMATAN BLANG MANGAT** |
| | ***7*** | ***01*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | ***Jumlah Dokumen Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***35,051,812*** | ***KECAMATAN BLANG MANGAT*** |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 15,000,000 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Blang Mangat, Ulee Blang Mane | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 20,051,812 | KECAMATAN BLANG MANGAT |
| | | | | | | **KECAMATAN MUARA SATU** | | | | | | **2,211,765,882** | | | | | | | **2,504,780,075** | **KECAMATAN MUARA SATU** |
| | **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2,211,765,882** | | | | | | | **2,504,780,075** | **KECAMATAN MUARA SATU** |
| | **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2,211,765,882** | | | | | | | **2,504,780,075** | **KECAMATAN MUARA SATU** |
| **149** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **1,998,855,362** | | | | | | - | **2,341,780,075** | **KECAMATAN MUARA SATU** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***10 Dokumen*** | ***14,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Muara Satu*** | - | ***23,535,478*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 14,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Batuphat Timur | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 23,535,478 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,496,765,882*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Kecamatan Muara Satu*** | - | ***1,529,806,080*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 204 Orang/bulan | 1,496,765,882 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Batuphat Timur | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Kecamatan Muara Satu | | 1,529,806,080 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***100 Persen*** | ***98,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Muara Satu*** | - | ***117,677,390*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 22 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 14,121,287 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 240 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 7,060,643 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 12 Paket | 7,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 9,061,159 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 2,471,225 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 15 Laporan | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 84,963,076 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***100 Persen*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Muara Satu*** | - | ***35,303,217*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 35,303,217 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***100 Persen*** | ***216,149,480*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Muara Satu*** | - | ***400,103,128*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 2,000,516 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 76,117,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 98,025,266 | KECAMATAN MUARA SATU |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 139,032,480 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 300,077,346 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***100 Persen*** | ***143,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Muara Satu*** | - | ***235,354,782*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 43,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 81,197,400 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 141,212,869 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Satu | | 12,944,513 | KECAMATAN MUARA SATU |
| **150** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase pembinaan PKK Gampong** | - | | | **100 Persen** | **145,000,000** | | | | | | - | **120,000,000** | **KECAMATAN MUARA SATU** |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | ***Jumlah Periode Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***125,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat*** | - | ***60,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 20,400,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 5 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat | | 39,600,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | ***Jumlah Periode Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Lembaga Kemasyarakatan*** | - | ***36,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | | 12 Lembaga Kemasyarakatan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Lembaga Kemasyarakatan | | 36,000,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***7.04*** | | ***Pemberdayaan Mukim*** | ***Jumlah Pemberdayaan Mukim*** | - | | | ***2 Mukim*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Lembaga Mukim*** | - | ***24,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 03 | 7.04 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 12 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Lembaga Mukim | | 24,000,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| **151** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penertiban** | - | | | **50.00 Persen** | **15,000,000** | | | | | | - | **8,000,000** | **KECAMATAN MUARA SATU** |
| | ***7*** | ***01*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | ***Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Masyarakat, Forkopimcam*** | - | ***8,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 6 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Masyarakat, Forkopimcam | | 8,000,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| **152** | **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam** | **-** | | | **100 Persen** | **25,000,000** | | | | | | **-** | **15,000,000** | **KECAMATAN MUARA SATU** |
| | ***7*** | ***01*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | ***Jumlah Periode Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Forkopimcam*** | - | ***15,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 12 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Forkopimcam | | 15,000,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| **153** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong** | **-** | | | **100 Persen** | **27,910,520** | | | | | | **-** | **20,000,000** | **KECAMATAN MUARA SATU** |
| | ***7*** | ***01*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | ***Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa*** | - | | | ***11 Gampong*** | ***27,910,520*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Gampong*** | - | ***20,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA SATU*** |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 3 Dokumen | 12,910,520 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Gampong | | 5,000,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 11 Laporan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Satu, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Gampong | | 15,000,000 | KECAMATAN MUARA SATU |
| | | | | | | **KECAMATAN MUARA DUA** | | | | | | **2,480,052,450** | | | | | | | **1,773,730,228** | **KECAMATAN MUARA DUA** |
| | **7** | | | | | **UNSUR KEWILAYAHAN** | | | | | | **2,480,052,450** | | | | | | | **1,773,730,228** | **KECAMATAN MUARA DUA** |
| | **7** | **01** | | | | **KECAMATAN** | | | | | | **2,480,052,450** | | | | | | | **1,773,730,228** | **KECAMATAN MUARA DUA** |
| **154** | **7** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | **-** | | | **100 Persen** | **2,275,052,450** | | | | | | **-** | **1,595,730,228** | **KECAMATAN MUARA DUA** |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***7 Dokumen*** | ***14,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Jumlah Dokumen*** | - | ***20,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 1 Dokumen | 14,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Jumlah Dokumen | | 20,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,781,252,450*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Jumlah ASN*** | - | ***859,865,030*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 14 Orang/bulan | 1,781,252,450 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Jumlah ASN | | 859,865,030 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***98,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Peralatan dan Perlengkapan Kantor*** | - | ***110,123,348*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 30 Paket | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 25,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 2 Paket | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 5,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 2 Paket | 7,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 8,926,348 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 1,197,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 0 Laporan | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | 70,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***8 Jenis*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Kantor Camat Muara Dua*** | - | ***25,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 1 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Kantor Camat Muara Dua | | 25,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***207,860,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Material Yang dibutuhkan*** | - | ***398,506,850*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 200 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Material Yang dibutuhkan | | 2,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 40 Laporan | 49,098,333 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Material Yang dibutuhkan | | 63,173,250 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 157,761,667 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Material Yang dibutuhkan | | 333,333,600 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | ***7*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***143,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemeliharaan Gedung Kantor*** | - | ***182,235,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 43,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemeliharaan Gedung Kantor | | 26,985,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemeliharaan Gedung Kantor | | 150,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 3 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemeliharaan Gedung Kantor | | 5,250,000 | KECAMATAN MUARA DUA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **155** | **7** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN** | **Persentase pembinaan PKK Gampong** | **-** | | | **17.65 Persen** | **150,000,000** | | | | | | **-** | **95,000,000** | **KECAMATAN MUARA DUA** |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | ***Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***130,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan*** | - | ***85,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | 12,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | | 73,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***2.03*** | | ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | ***Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan*** | - | | | ***1 Laporan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pembinaan PKK Gampong di Wilayah Kecamatan*** | - | ***5,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 03 | 2.03 | 0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan | | | | 1 Lembaga Kemasyarakatan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pembinaan PKK Gampong di Wilayah Kecamatan | | 5,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | ***7*** | ***01*** | ***03*** | ***7.04*** | | ***Pemberdayaan Mukim*** | ***Periode Pemberdayaan Mukim*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan*** | - | ***5,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 03 | 7.04 | 0002 | Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim | Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya | | | | 6 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Koordinasi Musyawarah Pimpinan Kecamatan | | 5,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| **156** | **7** | **01** | **04** | | | **PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM** | **Persentase Penertiban** | **-** | | | **23.53 Persen** | **10,000,000** | | | | | | **-** | **50,000,000** | **KECAMATAN MUARA DUA** |
| | ***7*** | ***01*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | ***Jumlah Dokumen Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*** | - | | | ***2 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Meningkatnya Penertiban di Wilayah Kecamatan*** | - | ***50,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 04 | 2.01 | 0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan | | | | 1 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Penertiban di Wilayah Kecamatan | | 50,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| **157** | **7** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM** | **Persentase penanganan permasalahan oleh Forkopimcam** | **-** | | | **17.65 Persen** | **25,000,000** | | | | | | **-** | **15,000,000** | **KECAMATAN MUARA DUA** |
| | ***7*** | ***01*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum*** | - | | | ***1 Dokumen*** | ***25,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan*** | - | ***15,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 05 | 2.01 | 0008 | Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | | | 1 Dokumen | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan | | 15,000,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| **158** | **7** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA** | **Persentase Pengawasan Pemerintahan Gampong** | **-** | | | **100 Persen** | **20,000,000** | | | | | | **-** | **18,000,000** | **KECAMATAN MUARA DUA** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***7*** | ***01*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | ***Jumlah Laporan Fasilitasi, rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*** | - | ***18,000,000*** | ***KECAMATAN MUARA DUA*** |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 5,250,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | 7 | 01 | 06 | 2.01 | 0017 | Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya | | | | 17 Laporan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Muara Dua, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Reformasi Birokrasi | Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | | 12,750,000 | KECAMATAN MUARA DUA |
| | | | | | | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **23,074,550,717** | | | | | | | **3,948,818,241** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | **8** | | | | | **UNSUR PEMERINTAHAN UMUM** | | | | | | **23,074,550,717** | | | | | | | **3,948,818,241** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | **8** | **01** | | | | **KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** | | | | | | **23,074,550,717** | | | | | | | **3,948,818,241** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| **159** | **8** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **2,685,164,757** | | | | | | - | **2,737,326,060** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | ***8*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***15 Dokumen*** | ***15,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Badan Kesbangpol*** | - | ***16,438,275*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 15 Dokumen | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 16,438,275 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | ***8*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***2,130,008,110*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Badan Kesbangpol*** | - | ***1,995,849,882*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 420 Orang/bulan | 2,130,008,110 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Aparatur Badan Kesbangpol | | 1,995,849,882 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | ***8*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***134,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Badan Kesbangpol*** | - | ***144,865,193*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 100 Paket | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 41,674,500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 525 Paket | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 9,261,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 105 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 11,576,250 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 12 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 1,319,693 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 100 Laporan | 70,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 81,033,750 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***8*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***3 Jenis*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Badan Kesbangpol*** | - | ***115,762,500*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 24 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 115,762,500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | ***8*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***230,916,647*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Badan Kesbangpol*** | - | ***377,819,859*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 12 Laporan | 1,200,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 1,389,150 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 76,004,167 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 108,463,674 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 564 Laporan | 153,712,480 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 267,967,035 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | ***8*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***145,100,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Badan Kesbangpol*** | - | ***86,590,351*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 39,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 38,548,913 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 2 Unit | 30,600,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 36,465,188 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 5,788,125 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 1 Unit | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Badan Kesbangpol | | 5,788,125 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **160** | **8** | **01** | **02** | | | **PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN** | **Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan** | - | | | **1.91 Persen** | **570,000,000** | | | | | | - | **94,726,556** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | ***8*** | ***01*** | ***02*** | ***2.01*** | | ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan*** | ***Persentase jumlah masyarakat yang memperoleh pendidikan wawasan kebangsaan*** | - | | | ***191 Persen*** | ***570,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***94,726,556*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 50 Orang | 550,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 39,601,556 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | 01 | 02 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | | | | 12 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 55,125,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **161** | **8** | **01** | **03** | | | **PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK** | **Rasio partisipasi masyarakat dalam partai politik** | **-** | | | **0.80 Rasio** | **19,022,202,017** | | | | | | **-** | **651,472,500** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | ***8*** | ***01*** | ***03*** | ***2.01*** | | ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*** | ***Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik*** | - | | | ***7895 Persen*** | ***19,022,202,017*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh***<br>***Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***651,472,500*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 2 Orang | 18,652,202,017 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 564,375,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 100 Orang | 350,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 44,100,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 03 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | | | | 75 Laporan | 20,000,000 | - Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa<br>- Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 42,997,500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **162** | **8** | **01** | **04** | | | **PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN** | **Persentase Pembinaan Ormas** | **-** | | | **18.75 Persen** | **150,000,000** | | | | | | **-** | **316,352,500** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***8*** | ***01*** | ***04*** | ***2.01*** | | ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*** | ***Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***150,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***316,352,500*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 04 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | | | | 15 Orang | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 316,352,500 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **163** | **8** | **01** | **05** | | | **PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA** | **Persentase pembinaan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba, PEKAT, serta Kerukunan Umat Beragama** | - | | | **2.65 Persen** | **50,000,000** | | | | | | - | **28,940,625** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | ***8*** | ***01*** | ***05*** | ***2.01*** | | ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya*** | ***Jumlah Laporan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya*** | - | | | ***2 Laporan*** | ***50,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***28,940,625*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 05 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | | | | 25 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 28,940,625 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| **164** | **8** | **01** | **06** | | | **PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL** | **Persentase konflik sosial yang tertangani** | - | | | **100 Persen** | **597,183,943** | | | | | | - | **120,000,000** | **BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK** |
| | ***8*** | ***01*** | ***06*** | ***2.01*** | | ***Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*** | ***Jumlah Laporan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial*** | - | | | ***5 Laporan*** | ***597,183,943*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah*** | - | ***120,000,000*** | ***BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK*** |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 3 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 48,468,750 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | | | | 2 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 21,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 40 Orang | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 13,781,250 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 40 Orang | 347,183,943 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 15,750,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | 8 | 01 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | | | | 4 Laporan | 75,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Pemerintah Kota, Masyarakat, Perangkat Daerah | | 21,000,000 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| | | | | | | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA** | | | | | | **3,565,727,830** | | | | | | | **3,209,050,665** | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA** |
| | **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **3,565,727,830** | | | | | | | **3,209,050,665** | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA** |
| | **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **3,565,727,830** | | | | | | | **3,209,050,665** | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA** |
| **165** | **9** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **2,950,727,830** | | | | | | - | **2,634,416,954** | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA** |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah*** | - | | | ***3 Dokumen*** | ***14,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Sekretariat MPU*** | - | ***10,000,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 3 Dokumen | 14,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Sekretariat MPU | | 10,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,366,471,510*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur MPU*** | - | ***1,058,443,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 18 Orang/bulan | 1,366,471,510 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur MPU | | 1,058,443,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***106,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***MPU Kota Lhokseumawe*** | - | ***76,140,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 9,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 3 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 1 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,140,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 10 Laporan | 70,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 60,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Dearah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***10 Unit*** | ***20,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***MPU Kota Lhokseumawe*** | - | ***69,200,994*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | | | 6 Unit | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 69,200,994 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***1,327,316,320*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi*** | ***MPU Kota Lhokseumawe*** | - | ***1,336,032,960*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 120 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 28,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 14,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 4 Laporan | 1,298,316,320 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 1,321,032,960 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***116,800,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***MPU Kota Lhokseumawe*** | - | ***84,600,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 4 Unit | 109,800,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 79,600,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | | | 12 Unit | 7,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi | MPU Kota Lhokseumawe | | 5,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| **166** | **9** | **01** | **03** | | | **PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH** | **Persentase Fatwa yang tersebarluaskan** | - | | | **71.43 Persen** | **615,000,000** | | | | | | - | **574,633,711** | **SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA** |
| | ***9*** | ***01*** | ***03*** | ***7.01*** | | ***Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama*** | ***Jumlah Laporan Peningkatan Sumber Daya Ulama dan Lembaga Keagamaan*** | - | | | ***4 Laporan*** | ***590,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Kader Ulama/Masyarakat*** | - | ***568,133,711*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |
| | 9 | 01 | 03 | 7.01 | 0003 | Pendidikan Kader Ulama | Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan | | | | 50 Orang | 515,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS-PROVINSI ACEH | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Kader Ulama/Masyarakat | | 500,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 03 | 7.01 | 0005 | Muzakarah Masalah Keagamaan | Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan | | | | 3 Laporan | 50,000,000 | - | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Kader Ulama/Masyarakat | | 32,000,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | 9 | 01 | 03 | 7.01 | 0011 | Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam | | | | 2 Laporan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Kader Ulama/Masyarakat | | 36,133,711 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | ***9*** | ***01*** | ***03*** | ***7.02*** | | ***Silaturahmi Ulama-Ulama*** | ***Jumlah Syiar Keagamaan Dalam Wilayah Kota Lhokseumawe*** | - | | | ***3 Kali*** | ***25,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Ulama/Masyarakat*** | - | ***6,500,000*** | ***SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA*** |
| | 9 | 01 | 03 | 7.02 | 0002 | Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah | Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah | | | | 30 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Ulama/Masyarakat | | 6,500,000 | SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA |
| | | | | | | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** | | | | | | **8,589,792,446** | | | | | | | **10,417,591,496** | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** |
| | **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **8,589,792,446** | | | | | | | **10,417,591,496** | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** |
| | **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **8,589,792,446** | | | | | | | **10,417,591,496** | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** |
| **167** | **9** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **1,680,392,446** | | | | | | - | **2,508,278,996** | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***100 Prosen*** | ***13,400,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Baitul Mal*** | - | ***13,385,000*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 10 Dokumen | 13,400,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 13,385,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***100 Prosen*** | ***901,388,390*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Reformasi Birokrasi*** | ***Aparatur Baitul Mal*** | - | ***1,188,784,296*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 10 Orang/bulan | 901,388,390 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Reformasi Birokrasi | Aparatur Baitul Mal | | 1,188,784,296 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***100 Prosen*** | ***131,140,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Baitul Mal*** | - | ***139,135,500*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 41 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 11,025,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 55 Paket | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 7,717,500 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 3 Paket | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 8,820,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 365 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 1,323,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 40 Laporan | 95,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 110,250,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Kenderaan Dinas/Operasional dan Sarana Prasaran Pendukung Kantor*** | - | | | ***100 Prosen*** | ***30,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Baitul Mal*** | - | ***11,025,000*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 64 Unit | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 11,025,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Tersedianya Jasa Pelayanan Kantor*** | - | | | ***100 Prosen*** | ***535,864,056*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Baitul Mal*** | - | ***1,055,092,500*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 87 Laporan | 1,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 2,205,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 1 Laporan | 1,750,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 22,050,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 12 Laporan | 533,114,056 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 1,030,837,500 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Tersedianya Pemeliharaan dan Rehabilitasi*** | - | | | ***100 Prosen*** | ***68,600,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Baitul Mal*** | - | ***100,856,700*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 33,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 45,378,900 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 1 Unit | 25,500,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 44,452,800 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 27 Unit | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Banda Sakti, Simpang Empat | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Baitul Mal | | 11,025,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| **168** | **9** | **01** | **04** | | | **PROGRAM BAITUL MAL** | **Rasio ZIS yang disalurkan terhadap ZIS yang dikumpulkan** | **-** | | | **100 Persen** | **6,909,400,000** | | | | | | **-** | **7,909,312,500** | **SEKRETARIAT BAITUL MAL** |
| | ***9*** | ***01*** | ***04*** | ***7.01*** | | ***Pengelolaan ZISWAF*** | ***Periode Penyusunan Perencanaan ZISWAF*** | **-** | | | ***1 Dokumen*** | ***10,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh***<br>***Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Pemerintah Kota Lhokseumawe*** | - | ***27,562,500*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 04 | 7.01 | 0001 | Penyusunan Perencanaan ZISWAF | Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun | | | | 1 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Pemerintah Kota Lhokseumawe | | 27,562,500 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | ***9*** | ***01*** | ***04*** | ***7.02*** | | ***Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal*** | ***Periode Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal*** | **-** | | | ***100 Prosen*** | ***35,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh***<br>***Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Pemerintah Kota*** | - | ***771,750,000*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 04 | 7.02 | 0001 | Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF | Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf | | | | 2 Orang | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Pemerintah Kota | | 385,875,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.02 | 0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM | | | | 2 Dokumen | 5,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Pemerintah Kota | | 165,375,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.02 | 0004 | Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal | | | | 1 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Pemerintah Kota | | 220,500,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | ***9*** | ***01*** | ***04*** | ***7.03*** | | ***Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf*** | ***Periode Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF*** | **-** | | | ***100 Prosen*** | ***6,864,400,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh***<br>***Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat Kota Lhokseumawe*** | - | ***7,110,000,000*** | ***SEKRETARIAT BAITUL MAL*** |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0001 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir | | | | 1985 Orang | 2,040,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 1,847,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0002 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin | | | | 1349 Orang | 2,249,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 2,500,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0003 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil | | | | 118 Orang | 670,400,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 720,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0004 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf | | | | 15 Orang | 45,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 45,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0005 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin | | | | 6 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 48,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0006 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah | | | | 50 Orang | 60,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 300,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0007 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir | | | | 235 Orang | 285,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 350,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | 9 | 01 | 04 | 7.03 | 0008 | Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq | Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq | | | | 326 Orang | 1,500,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan & Keistimewaan Aceh Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat Kota Lhokseumawe | | 1,300,000,000 | SEKRETARIAT BAITUL MAL |
| | | | | | | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** | | | | | | **9,157,921,908** | | | | | | | **20,631,874,515** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| | **1** | | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR** | | | | | | **4,160,480,000** | | | | | | | **8,499,738,383** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| | **1** | **01** | | | | **URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN** | | | | | | **4,160,480,000** | | | | | | | **8,499,738,383** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| **169** | **1** | **01** | **07** | | | **PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH** | **Persentase Dayah dengan Type A** | **-** | | | **7.89 Persen** | **4,160,480,000** | | | | | | **-** | **8,499,738,383** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| | ***1*** | ***01*** | ***07*** | ***7.01*** | | ***Pengelolaan Pendidikan Dayah*** | ***Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan Dayah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***4,160,480,000*** | | | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat*** | - | ***8,499,738,383*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0001 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun | | | | 40 Unit | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 6,632,278,385 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0002 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah | Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi | | | | 4 Unit | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 86,673,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0003 | Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah | Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya | | | | 438 Orang | 3,785,480,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 578,548,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0004 | Pemberdayaan dan Pendidikan Santri | Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan | | | | 25 Peserta Didik | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 200,000,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0005 | Pembinaan Manajemen Dayah | Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan | | | | 66 Satuan Pendidikan | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 20,000,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0006 | Penelitian dan Pengembangan Dayah | Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan | | | | 20 Satuan Pendidikan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 56,654,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0007 | Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah | Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya | | | | 6 Satuan Pendidikan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 3,675,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0008 | Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah | Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia | | | | 20 Buku | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 399,999,999 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0010 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah | | | | 2 Dokumen | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 399,999,999 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0011 | Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi | | | | 20 Satuan Pendidikan | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 10,000,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0012 | Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian | Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya | | | | 50 Satuan Pendidikan | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 27,560,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0013 | Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | | | | 2 Satuan Pendidikan | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 69,650,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 1 | 01 | 07 | 7.01 | 0014 | Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah | Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun | | | | 2 Dokumen | 10,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dayah, Balai Pengajian, Pimpinan, Guru Dayah dan Balai Pengajian, Santri, Masyarakat | | 14,700,000 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | **9** | | | | | **UNSUR KEKHUSUSAN DAN KEISTIMEWAAN** | | | | | | **4,997,441,908** | | | | | | | **12,132,136,132** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| | **9** | **01** | | | | **KEKHUSUSAN ACEH** | | | | | | **4,997,441,908** | | | | | | | **12,132,136,132** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| **170** | **9** | **01** | **01** | | | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah** | - | | | **100 Persen** | **3,617,441,908** | | | | | | - | **2,883,559,354** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.01*** | | ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | ***Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*** | - | | | ***7 Dokumen*** | ***12,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***SKPD*** | - | ***5,017,515*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | | | 4 Dokumen | 12,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | SKPD | | 5,017,515 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.02*** | | ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | ***Periode Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***2,820,940,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***SKPD*** | - | ***2,367,263,577*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | | | 476 Orang/bulan | 2,820,940,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | SKPD | | 2,367,263,577 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.06*** | | ***Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | ***Periode Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***135,399,508*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***SKPD*** | - | ***107,314,610*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | | | 37 Paket | 23,259,508 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | SKPD | | 25,388,625 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | | | 320 Paket | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | SKPD | | 15,052,545 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | | | | 15 Paket | 8,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | SKPD | | 10,536,782 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | | | | 2 Dokumen | 1,140,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | SKPD | | 1,143,993 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | 80 Laporan | 95,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | SKPD | | 55,192,665 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.07*** | | ***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | ***Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***50,000,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Dinas Syariat Islam dan PD*** | - | ***21,274,264*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 42,750,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 8,529,776 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | | | 15 Unit | 7,250,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 12,744,488 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.08*** | | ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Periode Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***502,702,400*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Dinas Syariat Islam dan PD*** | - | ***321,275,005*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | | | 100 Laporan | 2,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 4,320,080 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 280,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 11,439,934 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | 3 Laporan | 220,702,400 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 305,514,991 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***01*** | ***2.09*** | | ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***Jumlah Pemeliharaan Barang Milik*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***96,400,000*** | | | ***Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Dinas Syariat Islam dan PD*** | - | ***61,414,383*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | | | 1 Unit | 34,100,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 33,215,949 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | | | | 3 Unit | 47,300,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 23,180,919 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | | | | 8 Unit | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Dinas Syariat Islam dan PD | | 5,017,515 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| **171** | **9** | **01** | **02** | | | **PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH** | **Cakupan Pembinaan Syariat Islam** | - | | | **53.88 Persen** | **1,380,000,000** | | | | | | - | **9,248,576,778** | **DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH** |
| | ***9*** | ***01*** | ***02*** | ***7.01*** | | ***Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam*** | ***Terlaksananya Kegiatan wawasan keIslaman*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***110,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat, Pelajar*** | - | ***200,700,600*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0001 | Pelatihan Mawaris | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris | | | | 55 Orang | 20,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat, Pelajar | | 50,175,150 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | | 80 Orang | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat, Pelajar | | 50,175,150 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0005 | Seminar Problematika Syariat Islam | Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam | | | | 40 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat, Pelajar | | 50,175,150 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.01 | 0006 | Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat | Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya | | | | 60 Orang | 30,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat, Pelajar | | 50,175,150 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***02*** | ***7.02*** | | ***Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran*** | ***Terciptanya Generasi Muda Yang Islami*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***250,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat, Anak-anak, Dewasa dan Remaja*** | - | ***2,105,853,300*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 02 | 7.02 | 0004 | Pelaksanaan MTQ | Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ | | | | 216 Orang | 250,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat, Anak-anak, Dewasa dan Remaja | | 2,105,853,300 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | ***9*** | ***01*** | ***02*** | ***7.04*** | | ***Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam*** | ***Terlaksanaya Kegiatan dakwah dan Syiar Islam*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***365,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat dan Pelajar*** | - | ***5,978,659,998*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0001 | Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam | | | | 1 Dokumen | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Pelajar | | 150,525,450 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0003 | Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan | Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya | | | | 52 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Pelajar | | 70,245,210 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0004 | Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan | Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan | | | | 3 Orang | 15,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Pelajar | | 100,350,300 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0005 | Pelatihan Takmir Mesjid | Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan | | | | 52 Orang | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Pelajar | | 100,350,300 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0006 | Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam | Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam | | | | 36 Orang | 50,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Pelajar | | 250,875,750 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0011 | Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan | Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi | | | | 101 Unit | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Pelajar | | 927,131,334 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.04 | 0013 | Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama | Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya | | | | 13 Unit | 100,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA OTONOMI KHUSUS | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Pelajar | | 4,379,181,654 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***02*** | ***7.05*** | | ***Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam*** | ***Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam ditengah masyarakat dan Terciptanya Qari-Qariah dan Hafizh*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***310,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat dan Generasi Muda*** | - | ***341,191,020*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0001 | Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman | Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman | | | | 1 Laporan | 25,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Generasi Muda | | 60,210,180 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0003 | Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam | Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam | | | | 100 Orang | 35,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Generasi Muda | | 100,350,300 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | 9 | 01 | 02 | 7.05 | 0007 | Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla | | | | 95 Orang | 250,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat dan Generasi Muda | | 180,630,540 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***02*** | ***7.06*** | | ***Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam*** | ***Terwujudnya Pelaksanaan Syiar Islam*** | - | | | ***1 Tahun*** | ***300,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat*** | - | ***521,821,560*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0007 | Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam | | | | 6 Laporan | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat | | 250,875,750 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode Renstra OPD | Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022 | Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023 | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | Target 2024 | Pagu Indikatif (Rp) | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | | Target | Pagu Indikatif (Rp) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Nasional | Daerah | | | | |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 9 | 01 | 02 | 7.06 | 0009 | Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah | | | | 300 Orang | 150,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing<br>Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat | | 270,945,810 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | ***9*** | ***01*** | ***02*** | ***7.07*** | | ***Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah*** | ***Terwujudnya Masyarakat yang faham ilmu agama*** | - | | | ***12 Bulan*** | ***45,000,000*** | | | ***Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan*** | ***Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya*** | ***Masyarakat*** | - | ***100,350,300*** | ***DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH*** |
| | 9 | 01 | 02 | 7.07 | 0001 | Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman | | | | 2 Lembaga | 45,000,000 | - Kota Lhokseumawe, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan | Memperkuat pelaksanaan syariat islam dan budaya | Masyarakat | | 100,350,300 | DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH |
| | **J U M L A H** | | | | | | | | | | | **761,066,186,781** | | | | | | | **775,384,224,234** | |

**Pj. WALI KOTA LHOKSEUMAWE**

**I M R A N**

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA LHOKSEUMAWE
TAHUN 2023